

INNOVATE TO SERVE



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

2016

LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI



Cover Story



Dampak atau besar arti sebuah inovasi bukan ditentukan oleh kecanggihannya teknologinya, melainkan dari besar guna dan manfaat yang dihasilkan. Meskipun berupa hal kecil, sebuah inovasi sederhana dapat membawa perubahan dan dampak yang besar apalagi ketika hasilnya dapat melayani dan dinikmati oleh masyarakat luas.

Perahu yang ditampilkan pada cover Laporan Tahunan Terintegrasi BFI 2016 mempunyai struktur terbuat dari bambu dan membentang di kedua sisi perahu. Pada

struktur yang membentuk bingkai-bingkai persegi empat inilah dipasang kantong jaring untuk menangkap ikan. Alat ini dikenal dengan nama Jaring Angkat Perahu. Jaring Angkat Perahu memiliki kelebihan dibandingkan bentuk jaring angkat lain karena dapat berpindah tempat dan mencapai perairan yang lebih jauh dari garis pantai.

Jaring Angkat adalah inovasi alat penangkap ikan yang banyak digunakan dan diperbolehkan di Indonesia guna menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa mengancam kelestarian lingkungan. Pengoperasiannya dilakukan di permukaan perairan dengan menurunkan dan mengangkat jaring secara vertikal dari bagian tengah perahu/rakit/struktur statis di garis pantai. Penangkapan cara ini umumnya dibantu dengan lampu sebagai alat pengumpul ikan dan penggulung tali jaring untuk penurunan dan pengangkatan jaring.

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan wilayah daratan, memiliki sumber daya alam laut yang melimpah. Tidak sedikit masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah pesisir atau kepulauan, yang bergantung kehidupannya dari kekayaan alam laut seperti ikan sebagai sumber pangan dan komoditi perdagangan. Didorong oleh meningkatnya kebutuhan dan kemajuan teknologi, teknik penangkapan ikan dari masa ke masa turut berkembang. Usaha penangkapan dari seekor demi seekor berubah ke arah penangkapan dalam jumlah besar dengan cara yang lebih cepat dan efisien, salah satunya dengan inovasi Jaring Angkat Perahu. Dengan konsep yang serupa, BFI senantiasa terus melakukan inovasi untuk memberikan layanan pembiayaan secara cepat, efisien, dan transparan bagi kelompok pelanggan yang lebih luas.

DISCLAIMER

PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") telah melakukan segala upaya untuk memastikan keakuratan informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Namun, Perusahaan tidak menjamin kesesuaian, ketepatan, kegunaan atau hal lain apapun mengenai informasi ini. Laporan Tahunan Terintegrasi ini berisi beberapa pernyataan berwawasan ke depan tentang harapan masa depan, rencana, dan strategi yang bukan merupakan fakta sejarah Perusahaan. Hal-hal tersebut didasarkan pada harapan, perkiraan, prakiraan dan proyeksi saat ini tentang bisnis dan lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan keyakinan dan asumsi yang dibuat oleh manajemen. Sehubungan dengan harapan, perkiraan, prakiraan dan proyeksi tersebut yang tergantung pada sejumlah risiko, ketidakpastian dan asumsi, hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang diproyeksikan sebelumnya. Oleh karena itu, Perusahaan bermaksud mengingatkan pembaca untuk tidak menempatkan ketergantungan sepenuhnya pada pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tersebut sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau perkembangan lainnya. Ketergantungan yang ditempatkan pada Laporan Tahunan Terintegrasi dan Akun ini sepenuhnya merupakan risiko dari pihak yang menempatkan ketergantungan tersebut. Perlu diketahui juga bahwa seluruh angka yang terdapat dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini telah dibulatkan ke bilangan dalam miliar rupiah terdekat, dan dengan demikian, dimungkinkan adanya perbedaan dalam perhitungan persentase perubahan dibandingkan jika dihitung dengan menggunakan angka dari Laporan Keuangan *Audited*.

INNOVATE TO SERVE

Inovasi dapat berupa hal-hal kecil. Di BFI, kami mendorong karyawan kami untuk terus-menerus berpikir 'out of the box' dan melihat segala sesuatunya melampaui norma-norma industri dan mencari cara untuk memperbaiki produk, proses, dan sistem kami demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

Ide yang melatarbelakangi tema 2016 kami, *Innovate to Serve*, bukanlah berupa teknologi yang kompleks atau perubahan cara berbisnis yang radikal. Usaha kami dilakukan secara tatap muka dan kami melayani segmen pelanggan yang tradisional, tetapi kami yakin bahwa peluang perubahan selalu ada, sekecil apapun perubahan itu. Beberapa inisiatif yang kami lakukan misalnya: penggunaan aplikasi digital untuk menyederhanakan proses kerja dan mengurangi ketergantungan pada intervensi manusia. Menghadapi persaingan yang semakin ketat (langsung maupun tidak langsung) dari usaha-usaha tradisional atau non-tradisional telah mendorong kami untuk mengubah cara berpikir tentang para pesaing kami.

Tujuan akhir kami adalah **memberikan layanan pembiayaan secara cepat, efisien, dan transparan bagi kelompok pelanggan yang lebih luas.** Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memulai inisiatif penting tahun ini, yaitu diversifikasi

dan peningkatan kapabilitas originasi dan manajemen agensi kami, serta memberikan nilai tambah atas produk yang dijual. Kami berusaha mempercepat waktu dan menyederhanakan proses survei, meningkatkan transparansi, serta terus meningkatkan sistem penilaian risiko kami.

Inisiatif-inisiatif tersebut adalah hal-hal besar yang akan terus menjadi fokus Perusahaan di tahun-tahun selanjutnya. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaiki cara kami menjalankan usaha, serta terus berupaya untuk tetap relevan dalam industri yang tak terelakkan lagi akan menjadi semakin ramai di masa depan.

KESINAMBUNGAN TEMA



2012

THREE DECADES OF SUSTAINABLE GROWTH

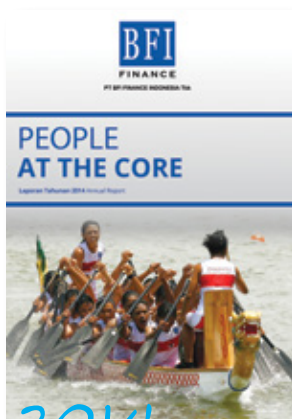
Merayakan 30 tahun dalam berbisnis, BFI telah memiliki rekam jejak yang baik dalam pertumbuhan berkesinambungan.



2013

BUILDING A GREAT FRANCHISE

BFI telah membangun budaya perusahaan yang kokoh dalam pengembangan jaringan bisnisnya, dengan berlandaskan pada "GREAT," nilai-nilai dasar Perusahaan yang diresmikan pada 2013 dalam rangka membangun reputasi bisnis yang terhormat dan untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia.



2014

PEOPLE AT THE CORE

Peningkatan dalam proses dan teknologi tentunya tidak akan cukup tanpa dukungan dari tenaga kerja yang kompeten dan beretos kerja baik. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki komitmen jangka panjang untuk memperkuat bisnis dengan sumber daya manusia sebagai intinya untuk dapat membangun organisasi yang lebih baik, kuat dan efisien.



2015

OPTIMIZE • GROW • LEAD

Strategi optimalisasi untuk mencetak kinerja unggul dalam rangka memperkuat pertumbuhan Perusahaan tidak hanya saat ini, melainkan juga untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan terutama di masa-masa yang penuh tantangan.



2016

INNOVATE TO SERVE

Merupakan inisiatif Perusahaan untuk memperbaiki cara menjalankan usaha. Perusahaan yakin bahwa peluang perubahan selalu ada, sekecil apapun perubahan itu.

PENGANTAR LAPORAN TERINTEGRASI

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI”) menyajikan Laporan Tahunan 2016 ini dalam bentuk Laporan Terintegrasi. Laporan ini menggambarkan bagaimana keseimbangan *Triple Bottom Line (Profit-People-Planet)* memberikan kontribusi pada pencapaian BFI dalam jangka panjang serta bagaimana kami sebagai perusahaan jasa keuangan berfokus pada inovasi dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

REFERENSI DALAM PELAPORAN

Laporan Terintegrasi BFI 2016 ini memadukan Laporan Tahunan (termasuk laporan finansial auditor independen) dan Laporan Keberlanjutan yang sebelumnya diterbitkan setiap tahun secara terpisah. Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada peraturan perundangan yang terkait dengan penyajian Laporan Tahunan Perseroan Terbatas serta panduan pembuatan Laporan Keberlanjutan dari *Global Reporting Initiatives (“GRI”)*.

- Data dan informasi finansial disajikan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
- Data dan informasi non-finansial disajikan sesuai dengan ketentuan ‘in-accordance’ Panduan Pembuatan Laporan Keberlanjutan dari *Global Reporting Initiatives* Generasi-4 atau GRI G4 dengan tambahan *Financial Service Sector Disclosure G4* dengan opsi inti.
- Keterpaduan laporan finansial dan non-finansial dalam laporan ini disusun mengikuti prinsip panduan dari *The International Integrated Reporting Framework* yang diterbitkan oleh International Integrated Reporting Council.

Laporan ini menyajikan pelbagai topik non-finansial yang material bagi BFI dan pandangan pemangku kepentingannya. Pemilihan topik dalam laporan ini, *Innovate to Serve*, dijelaskan lebih lanjut di bagian Penjelasan Tema (lihat halaman 1).

TENTANG LAPORAN TERINTEGRASI

Penggunaan kerangka Laporan Terintegrasi atau *Integrated Reporting (“IR”)* yang disusun oleh International Integrated Reporting Council ditujukan untuk menyajikan pelaporan Perusahaan agar menjadi lebih efisien dan produktif.

Sesuai dengan namanya, Laporan Terintegrasi menunjukkan bagaimana sumber daya yang dimiliki Perusahaan berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan sumber-sumber permodalan yang ada, dalam rangka menciptakan nilai tambah, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Karena interaksi sumber daya dipandang secara keseluruhan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan, maka informasi yang ada di dalam laporan ini, selain bagi kalangan finansial, bermanfaat bagi juga bagi karyawan, pelanggan, pemasok, mitra, masyarakat sekitar, regulator, dan pembuat kebijakan.

Lebih lanjut mengenai kerangka IR dan informasi pendukungnya dapat ditelusuri melalui situs web <https://integratedreporting.org>.

IKHTISAR PENTING 2016

DISTRIBUSI **OUTLET**

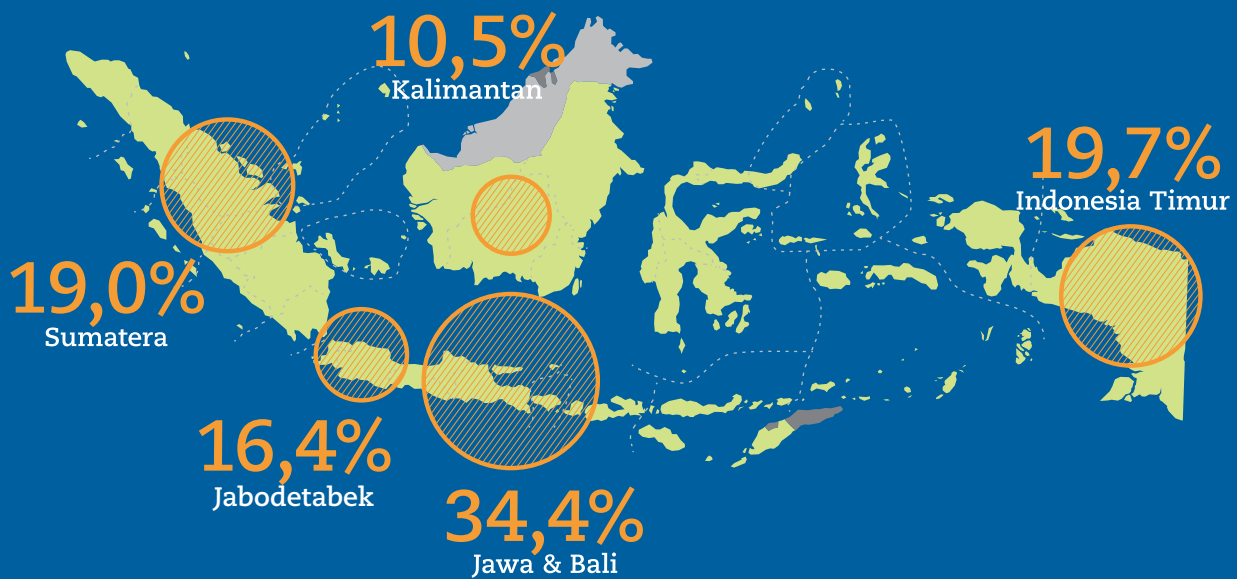
209

Cabang

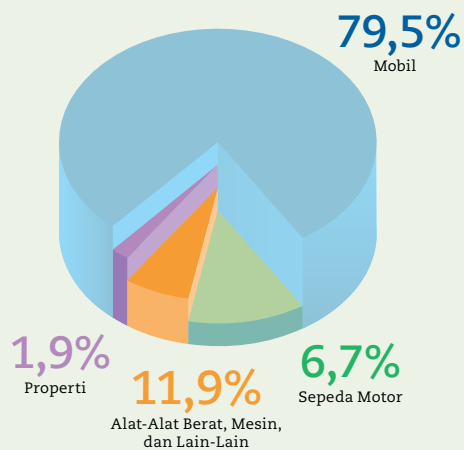


96

Gerai



PRODUK BERDASARKAN **TIPE ASET**

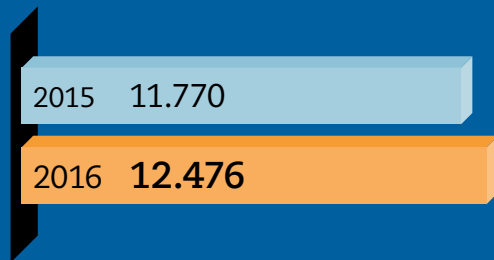


8.941

JUMLAH
KARYAWAN

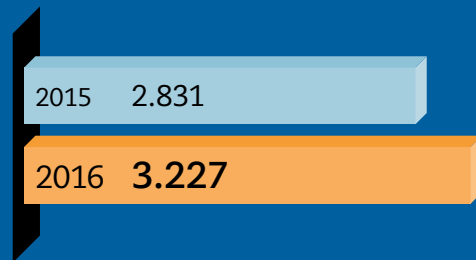
JUMLAH ASET (Rp miliar)

↑ 6,0% yoy



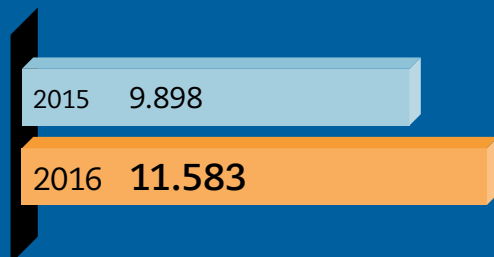
JUMLAH PENDAPATAN (Rp miliar)

↑ 14,0% yoy



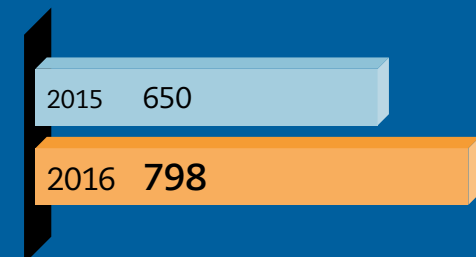
JUMLAH PIUTANG - BERSIH (Rp miliar)

↑ 17,0% yoy



LABA BERSIH (Rp miliar)

↑ 22,8% yoy



Peringkat **AA-(idn)**
Outlook Stabil
oleh Fitch Ratings

ROAE
↑ 19,3%

NPF
↓ 0,91%

DAFTAR ISI

Cover Story	i
Innovate to Serve	1
Kesinambungan Tema	2
Pengantar Laporan Terintegrasi	3
Ikhtisar Penting 2016	4

KILAS KINERJA 9

Ikhtisar Data Keuangan Penting	10
Ikhtisar Saham	12
Struktur Pemegang Saham	14
Ikhtisar Obligasi	15
Peristiwa Penting 2016	16
Penghargaan dan Pencapaian	22

LAPORAN MANAJEMEN 27

Laporan Dewan Komisaris	30
Laporan Direksi	36

PROFIL PERUSAHAAN 45

Identitas Perusahaan	46
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan	47
Riwayat Singkat Perusahaan	48
Jejak Langkah	50
Bidang Usaha	52
Peta dan Jaringan Operasional	54
Struktur Organisasi	55
Profil Dewan Komisaris	56
Profil Direksi	61

Profil Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	65
Komite Audit	65
Komite Manajemen Risiko	66
Komite Nominasi dan Remunerasi	68
Profil Manajemen Senior	70
Komposisi Kepemilikan Saham	77
Profil Pemegang Saham Mayoritas	78
Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham	79
Pencatatan Efek Lainnya	83
Struktur Korporasi	92
Informasi mengenai Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi	92
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	93

SUMBER DAYA MANUSIA 95

Sumber Daya Manusia	96
---------------------	----

UNIT PENDUKUNG BISNIS 115

Jaringan dan Operasional	116
Teknologi Informasi	120

120

Teknologi Informasi

Kesiapan Teknologi Informasi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan Perusahaan.

140

Tinjauan Kinerja Keuangan

Laba bersih Perusahaan meningkat sebanyak 23% dibandingkan tahun sebelumnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 125

Tinjauan Ekonomi dan Industri	126
Tinjauan Bisnis	128
Aspek Pemasaran	135
Tinjauan Kinerja Keuangan	140
Kemampuan Membayar Utang	162
Tingkat Kolektibilitas Piutang (Kualitas Aset)	163
Struktur Modal (Kecukupan Modal)	164
Kebijakan dan Pembayaran Dividen	166
Penggunaan Dana Penerbitan Umum	167
Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, serta Restrukturisasi Utang atau Modal	167
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh	168
Perubahan Kebijakan Akuntansi	169
Prospek Bisnis 2017	170

TATA KELOLA PERUSAHAAN 173

Laporan Tata Kelola Perusahaan	174
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	188
Dewan Komisaris	202
Direksi	219
Komite Audit	234
Komite Manajemen Risiko	240
Komite Nominasi dan Remunerasi	244
Sekretaris Perusahaan	250
Audit Internal	253
Audit Eksternal	259
Manajemen Risiko	261
Sistem Pengendalian Internal	271
Kasus Hukum 2016	273
Akses Informasi dan Komunikasi Perusahaan	281
Hubungan Investor	285
Kode Etik dan Budaya Perusahaan	286
Kebijakan Antikorupsi	288
Sistem Pelaporan Pelanggaran	291
Opsi Saham	292
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	293

307

Implementasi Program CSR

Program CSR mengutamakan keterlibatan karyawan dalam aktivitas yang dijalankan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 295

Keberadaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	296
Implementasi Program CSR	307
Kontribusi untuk Pembangunan	314

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN 317

Alamat Outlet	318
---------------	-----

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2016 329

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2016 PT BFI Finance Indonesia Tbk	330
---	-----

LAPORAN KEUANGAN AUDITED 333

PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN 457

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016 – BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK 459

INDEKS GRI-G4 INTI 467

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:





MY WORK – BULUKUMBA
HASRULLAH ARIFIN

Proses penyelesaian pembuatan kapal pinisi

KILAS KINERJA

Ikhtisar Data Keuangan Penting	10
Ikhtisar Saham	12
Ikhtisar Obligasi	15
Peristiwa Penting 2016	16
Penghargaan dan Pencapaian	22



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka dalam tabel dan grafik di bawah ini disajikan dalam miliar rupiah (kecuali disebutkan lain).

Tabel 1 – IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DAN RASIO

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pendapatan Pembiayaan	1.268	1.505	1.784	2.125	2.401
Lain-Lain	314	385	515	706	826
Jumlah Pendapatan	1.582	1.890	2.299	2.831	3.227
Bunga dan Keuangan	360	422	505	712	792
Gaji dan Tunjangan	339	428	506	627	716
Umum dan Administrasi	177	234	294	341	392
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	73	107	198	230	273
Lain-Lain	19	32	46	85	29
Jumlah Beban	968	1.223	1.549	1.995	2.202
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	614	667	750	836	1.025
Beban Pajak Penghasilan	124	159	150	186	227
Laba Tahun Berjalan	490	508	600	650	798
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	-	(34)	(48)	63	(63)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	490	474	552	713	735
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
Kas dan Setara Kas	169	225	290	777	165
Piutang Pembiayaan - Bersih	5.940	7.239	8.558	9.898	11.583
Piutang Lain-Lain - Bersih	59	83	127	141	164
Aset Tetap - Bersih	286	388	416	428	414
Aset Tak Berwujud - Bersih	19	26	31	22	20
Aset Lain- Lain	97	340	261	504	130
Jumlah Aset	6.570	8.301	9.683	11.770	12.476
Pinjaman yang Diterima	2.404	3.172	3.933	5.637	4.691
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	1.124	1.454	1.622	1.681	2.965
Utang Lain-Lain	180	312	561	433	565
Jumlah Liabilitas	3.708	4.938	6.116	7.751	8.221
Ekuitas	2.862	3.363	3.567	4.019	4.255
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6.570	8.301	9.683	11.770	12.476
DATA SAHAM					
Saham Beredar (juta)	1.521	1.527	1.550	1.566	1.597
Laba per Saham Dasar (Nilai Rupiah Penuh)	322	333	390	417	524
Dividen per Saham (Nilai Rupiah Penuh)	-	125	192	208	*

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
RASIO-RASIO					
PROFITABILITAS					
Imbal Hasil atas Rata-Rata Aset (ROAA) [^]	10,3%	9,0%	8,3%	7,8%	8,5%
Imbal Hasil atas Rata-Rata Ekuitas (ROAE) ^{^^}	18,8%	16,3%	17,3%	17,1%	19,3%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Pendapatan	31,0%	26,8%	26,1%	23,0%	24,7%
KUALITAS ASET					
Kredit Bermasalah (termasuk <i>Joint Financing</i>)	1,05%	1,38%	1,48%	1,33%	0,91%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai terhadap Piutang Pembiayaan yang Dikelola	1,0%	1,1%	1,4%	1,5%	1,4%
Coverage terhadap Kredit Bermasalah	0,9x	0,8x	1,0x	1,1x	1,5x
LIKUIDITAS					
Rasio Likuiditas ^{***}	1,8x	1,9x	1,5x	1,6x	1,7x
Solvabilitas Aset ^{^^^}	0,6x	0,6x	0,6x	0,7x	0,7x
Rasio Gearing ^{^^}	1,2x	1,4x	1,6x	1,8x	1,8x
INFORMASI LAINNYA					
Jumlah Outlet	185	236	260	267	305
Jumlah Karyawan	5.396	6.516	7.407	7.924	8.941

* Menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2017

** Laba Tahun Berjalan/Rata-Rata Ekuitas

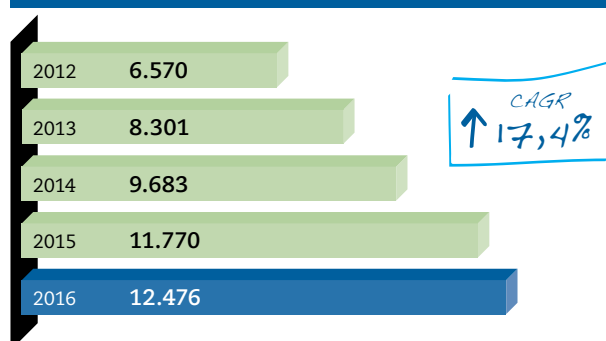
*** Aset Lancar/Liabilitas Lancar

[^] Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Rata-Rata Aset

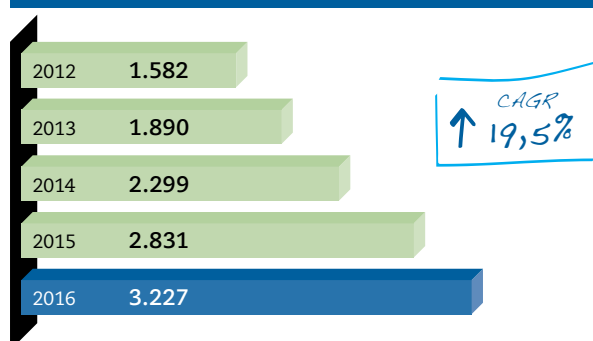
^{^^} (Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih)/Ekuitas

^{^^^} Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset

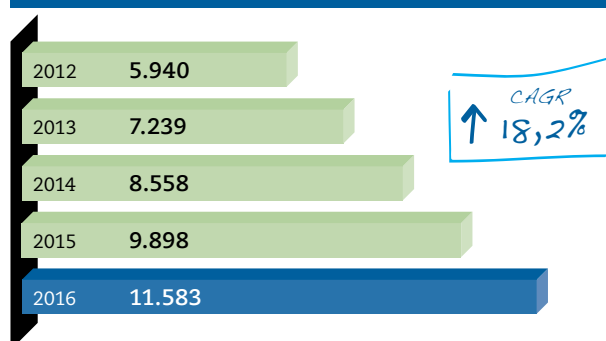
Grafik 1 – JUMLAH ASET (Rp miliar)



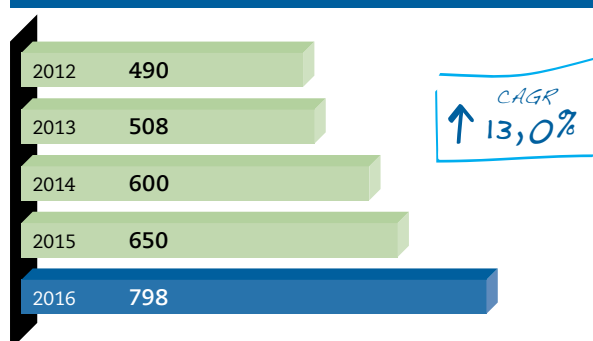
Grafik 3 – JUMLAH PENDAPATAN (Rp miliar)



Grafik 2 – JUMLAH PIUTANG - BERSIH (Rp miliar)



Grafik 4 – LABA BERSIH (Rp miliar)



IKHTISAR SAHAM

Tabel 2 – SEJARAH PENERBITAN SAHAM

AKSI KORPORASI	PERIODE	SAHAM BARU DITERBITKAN (juta)	SAHAM DITEMPATKAN (juta)
IPO @Rp5.750,00	April 1990	2,1	10,5
1 untuk 10 Saham Dividen	Januari 1993	1,2	11,7
17 untuk 20 Saham Bonus	Juli 1993	9,9	21,6
1 untuk 3 Saham Dividen	Januari 1994	7,2	28,8
1 untuk 1 Penawaran Umum Terbatas @Rp1.500,00	Mei 1994	28,9	57,7
2 untuk 1 Penawaran Umum Terbatas @Rp1.000,00	Maret 1997	115,4	173,1
2 untuk 1 Pemecahan Saham	September 1997	173,1	346,2
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi	Agustus 2002 - Mei 2006	414,2	760,4
2 untuk 1 Pemecahan Saham	Agustus 2012	760,3	1.520,7
MESOP Tahap I - Grant Date 1	Mei 2013	5,9	1.526,6
MESOP Tahap I - Grant Date 2	Mei 2014	23,3	1.549,9
MESOP Tahap II - Grant Date 1	Mei 2015	16,0	1.566,0
MESOP Tahap II - Grant Date 2	Mei 2016	30,8	1.596,7

Keterangan:

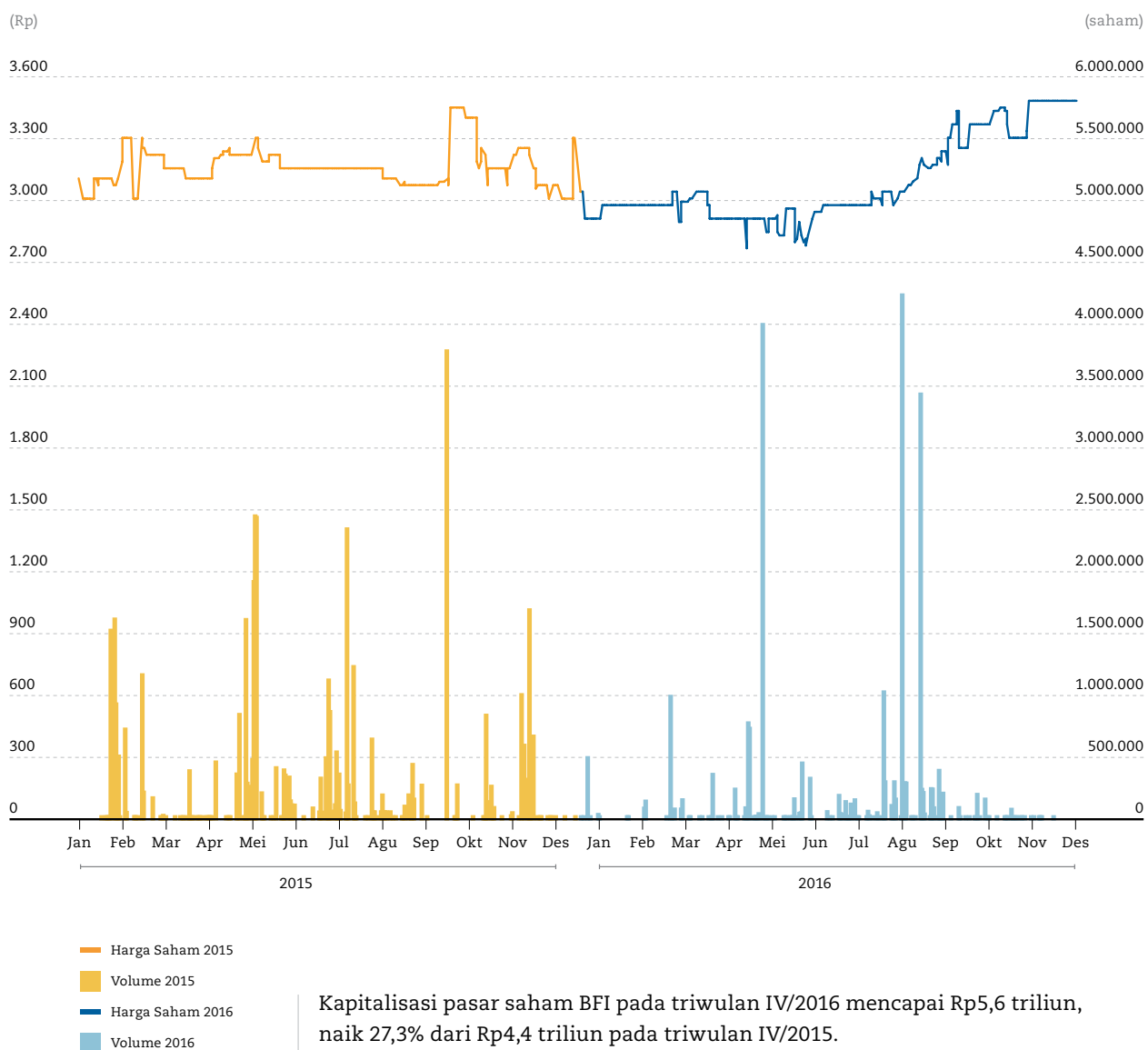
MCB = Mandatory Convertible Bonds (Obligasi Wajib Konversi)

MESOP = Management and Employee Stock Option Program (Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham)

Tabel 3 – SEJARAH HARGA SAHAM

PERIODE	HARGA SAHAM						PEREDARAN SAHAM DI PASAR REGULER				KAPITALISASI PASAR (Rp)	
	TERTINGGI (Rp)		TERENDAH (Rp)		PENUTUPAN (Rp)		VOLUME TRANSAKSI (unit)		NILAI TRANSAKSI (Rp)		2015	2016
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
Triwulan 1	2.800	2.800	2.330	2.525	2.550	2.800	7.323.100	2.169.300	18.253.867.500	5.916.450.500	3.952.333.133.100	4.384.686.773.600
Triwulan 2	2.800	2.795	2.500	2.370	2.600	2.710	5.501.200	7.597.000	41.478.159.000	19.771.000.000	4.071.494.861.200	4.327.088.333.020
Triwulan 3	3.000	3.300	2.495	2.500	3.000	3.300	10.120.900	12.724.700	25.995.366.000	37.656.228.000	4.697.878.686.000	5.269.148.154.600
Triwulan 4	2.945	3.600	2.380	3.120	2.800	3.500	5.169.600	1.372.000	14.000.350.500	4.560.309.000	4.384.686.773.600	5.588.490.467.000

Grafik 5 – KINERJA SAHAM



Kapitalisasi pasar saham BFI pada triwulan IV/2016 mencapai Rp5,6 triliun, naik 27,3% dari Rp4,4 triliun pada triwulan IV/2015.

Jumlah volume saham BFI yang diperdagangkan di 2016 mencapai 23.863.000 unit saham atau senilai Rp67.903.987.500,00.

Harga Saham BFI (BFIN) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2016

Saham BFI dibuka 2 Januari 2016 dengan harga penutupan Rp2.700,00 dan ditutup 30 Desember 2016 dengan harga penutupan Rp3.500,00 per saham, yaitu menguat sebesar 29,6%. IHSG dibuka pada 4.593 poin dan ditutup pada 5.297 poin, menguat 15,32%.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

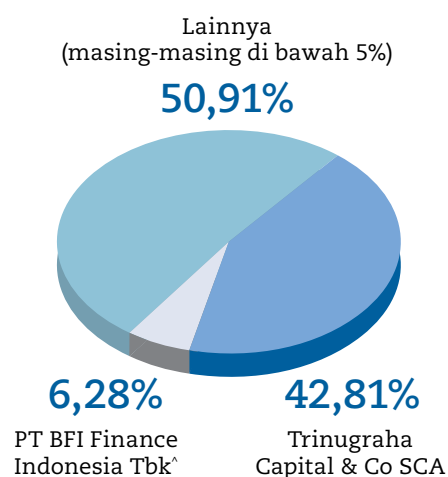
Komposisi pemegang saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 – KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM	2016		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	170.881.241.500	42,81
PT BFI Finance Indonesia Tbk [^]	100.273.200	25.068.300.000	6,28
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	812.913.396	203.228.349.000	50,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.596.711.562	399.177.890.500	100,00

[^] Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB pada 15 April 2015

Grafik 6 – KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM



Tabel 5 – SEJARAH PEMBAYARAN DIVIDEN SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR

TAHUN BUKU	2012	2013	2014	2015	2016**
Tanggal Rapat Direksi/Rapat Umum Pemegang Saham	16 Mei 2013	6 Mei 2014	9 Desember 2014/ 15 April 2015	19 November 2015/ 25 April 2016	21 November 2016
JUMLAH DIVIDEN PER SAHAM (dalam nilai penuh - mata uang rupiah)					
Interim*	-	-	138	138	150
Final**	-	125	54	70	**
Jumlah	-	125	192	208	150
Rasio Pembayaran	-	38,1%	49,6%	49,7%	**
TANGGAL PEMBAYARAN					
Interim*	-	-	15 Januari 2015	16 Desember 2015	16 Desember 2016
Final**	-	19 Agustus 2014	15 Mei 2015	25 Mei 2016	-
Jumlah Dividen (Rp miliar)	-	193	298	323	224

* Dividen tunai interim diputuskan oleh Rapat Direksi

** Perusahaan menentukan pembayaran dividen final untuk 2016 pada RUPS 2017

Efek yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 6 – IKHTISAR OBLIGASI

EFEK UTANG YANG DICATATKAN		TANGGAL PENCATATAN DI BEI	TANGGAL EFEKTIF	PERINGKAT OBLIGASI	JUMLAH (Rp juta)	NOMINAL YANG DITERBITKAN		TANGGAL JATUH TEMPO	STATUS
						(Rp juta)	(Rp juta)		
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	Seri A:	13 Juni 2012	4 Juni 2012 (No. S-6878/BL/2012)	A(idn)	575.000	195.000	17 Juni 2013	Lunas	
	Seri B:					110.000	12 Juni 2014	Lunas	
	Seri C:					270.000	12 Juni 2015	Lunas	
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	Seri A:	20 Februari 2013	4 Juni 2012 (No. S-6878/BL/2012)	A+(idn)	625.000	100.000	1 Maret 2014	Lunas	
	Seri B:					370.000	19 Februari 2015	Lunas	
	Seri C:					155.000	19 Februari 2016	Lunas	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Seri A:	10 Maret 2014	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	AA-(idn)*	500.000	225.000	17 Maret 2015	Lunas	
	Seri B:					55.000	7 Maret 2016	Lunas	
	Seri C:					220.000	7 Maret 2017	Belum lunas	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Seri A:	20 Maret 2015	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	AA-(idn)*	1.000.000	345.000	29 Maret 2016	Lunas	
	Seri B:					105.000	19 Maret 2017	Belum lunas	
	Seri C:					550.000	19 Maret 2018	Belum lunas	
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Seri A:	26 Februari 2016	28 Februari 2014 (No. S-121/D.04/2014)	AA-(idn)*	1.000.000	200.000	5 Maret 2017	Belum lunas	
	Seri B:					142.000	25 Februari 2018	Belum lunas	
	Seri C:					658.000	25 Februari 2019	Belum lunas	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Seri A:	26 Oktober 2016	17 Oktober 2016 (No.S588/D.04/2016)	AA-(idn)*	1.000.000	317.000	25 Oktober 2017	Belum lunas	
	Seri B:					550.000	25 Oktober 2019	Belum lunas	
	Seri C:					133.000	25 Oktober 2021	Belum lunas	

* Berdasarkan surat hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings No.: 189/DIR/RAT/XI/2016 dan No.: 190/DIR/RAT/XI/2016 masing-masing tanggal 25 November 2016

Hasil pemeringkatan ulang atas surat-surat utang jangka panjang BFI sesuai dengan Surat No.: 189/DIR/RAT/XI//2016 dan No.: 190/DIR/RAT/XI//2016 masing-masing tanggal 25 November 2016 dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Ratings") adalah sebagai berikut:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang Perusahaan naik menjadi 'AA-(idn)' Outlook Stabil dari 'A+(idn)' Outlook Positif.
- Peringkat Nasional Jangka Pendek naik menjadi 'F1+(idn)' dari 'F1(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 naik masing-masing menjadi 'AA-(idn)' dari 'A+(idn)' dan menjadi 'F1+(idn)' dari 'F1(idn)'.

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014 naik menjadi 'AA-(idn)' dari 'A+(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 naik menjadi 'AA-(idn)' dari 'A+(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 naik masing-masing menjadi 'AA-(idn)' dari 'A+(idn)' dan menjadi 'F1+(idn)' dari 'F1(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 naik menjadi 'AA-(idn)' dari 'A+(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk *Medium Term Notes* III Tahun 2015 sebesar Rp100 miliar adalah 'AA-(idn)'.

PERISTIWA PENTING 2016

JANUARI

8 Penyelenggaraan Orientasi Pasca-Penugasan Pengajar Muda (OPP PM) oleh Indonesia Mengajar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

12 Pemberian penghargaan *The Best Business Agent (BA)* dalam *NDF Motorcycle Gathering 2015* untuk wilayah Jakarta-Depok-Tangerang di Tangerang Selatan

16 Pengundian “Uber Milyaran BFI 2015” Periode IV dan peluncuran “Uber Milyaran BFI 2016” di Surabaya, Jawa Timur



FEBRUARI

11 Konferensi Pers “Uber Milyaran BFI 2016” di Semarang, Jawa Tengah

12 Penyerahan *Grand Prize* “Uber Milyaran BFI 2015” kepada pelanggan di Bojonegoro, Jawa Timur

18 Konferensi Pers “Uber Milyaran BFI 2016” di Palembang, Sumatera Selatan

22 Tur Manajemen BFI ke Korea Selatan yang dilakukan tiga tahap hingga Maret 2016

25 Konferensi Pers “Uber Milyaran BFI 2016” dan “BFI RUN 2016” serta penyerahan hadiah “Uber Milyaran BFI 2015” Periode IV kepada pelanggan di Kemang, Jakarta Selatan

MARET

29 Konferensi Pers “BFI RUN 2016” di Jakarta Pusat



APRIL

7 Perayaan Ulang Tahun BFI ke-34 bertema “Kejar Prestasi Raih Peluang Lewat Inovasi” yang diadakan di BFI Tower, BSD City, Tangerang Selatan, sekaligus Peresmian Rebranding Media Sosial BFI (Facebook, Twitter, Instagram)

10 “BFI RUN 2016” dan pengundian “Uber Milyaran BFI 2016” Periode I yang diadakan di BSD City, Tangerang Selatan

25 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa serta Paparan Publik Tahunan di Hotel The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan

MEI

3-14 “Europe Bounding Tour 2016”

11 Acara pelepasan karyawan BFI yang mengikuti Program *Homestay* bekerja sama dengan Gerakan Indonesia Mengajar

21-27 Tur Manajemen BFI ke Jepang

24 Seminar Literasi Keuangan, *Career Workshop* dan Sosialisasi Program Beasiswa S1 di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Tangerang Selatan



JUNI

13 “Gerakan 1.000 Perlengkapan Sekolah” dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Bulan Suci Ramadhan 1437 Hijriyah untuk para siswa di 12 SD kurang mampu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

23 Acara Buka Puasa Bersama Karyawan di BFI Tower, BSD City, Tangerang Selatan, yang dihadiri oleh anak-anak dari panti asuhan wilayah setempat

JULI

23 Pengundian “Uber Milyaran BFI 2016” Periode II di Medan, Sumatera Utara



AGUSTUS

10-21 Partisipasi BFI dan Uber dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2016 di Indonesia Convention Exhibition (“ICE”), BSD City, Tangerang Selatan

13 Program Relawan Karyawan oleh Kantor Cabang BFI Semarang untuk pembangunan drainase di daerah Kalialang Baru, Semarang, Jawa Tengah, kerja sama dengan Habitat for Humanity (HFH) Indonesia

15 Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

19-21 Acara “Sales Force Gathering” sebagai bentuk apresiasi Perusahaan kepada Tim Sales Force di BSD City, Tangerang Selatan dan Jakarta

29-30 Partisipasi BFI dalam acara “Indonesia Fintech Festival & Conference 2016” di ICE BSD City, Tangerang Selatan. Sudjono (Director of Finance & IT) menjadi salah satu pembicara dalam sesi “Fintech dalam Institusi Finansial Non-Perbankan.”



SEPTEMBER

- 3 Kelas Inspirasi bersama Gerakan Indonesia Mengajar di dua SD di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
- 19 Program Talkshow “Director’s Update” di Radio Smart FM oleh Sutadi (Director of Retail Business)
- 20 Peresmian gedung baru Kantor Cabang BFI Jambi
- 21 Investor Gathering Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 di Hotel Mulia, Jakarta Pusat
- 24 Penyerahan hadiah “Uber Milyaran BFI 2016” Periode II berupa satu unit mobil Toyota Agya kepada pelanggan di Medan, Sumatera Utara



OKTOBER

- 5 Peresmian gedung baru Kantor Cabang BFI di Citeureup, Cibinong, Jawa Barat
- 8 Pengundian “Uber Milyaran BFI 2016” Periode III di Balikpapan, Kalimantan Timur
- 11 Peresmian “Rumah Jahit BFI” di Duri Kepa, Jakarta Barat, kerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB)
- 15 Peresmian gedung baru Kantor Cabang BFI di Cimahi, Jawa Barat
- 17 Peresmian gedung baru Kantor Cabang BFI di Surabaya, Jawa Timur
- 22 Program Penanaman 1.000 Bibit Pohon Mangrove di Pantai Marunda, Jakarta Utara, kerja sama dengan Yayasan KeMANGTEER

NOVEMBER

12 Peresmian gedung baru Kantor Cabang BFI di Merauke, Papua

26-27 Partisipasi dalam acara *Multifinance Day* bertema “Maju Berkat Pembiayaan” yang diselenggarakan oleh OJK dan APPI di Bandar Lampung, Lampung

27 Partisipasi BFI sebagai sponsor acara “Surabaya 10K” yang diselenggarakan oleh Dispora Kota Surabaya di Sentral Ikan Bulak, Jawa Timur



21 Peresmian Kantor Cabang BFI ke-2 di Bogor, Jawa Barat

28 Peresmian Kantor Cabang BFI ke-5 di Bandung, Jawa Barat

28 Peresmian Kantor Cabang BFI ke-2 di Mataram, Nusa Tenggara Barat

DESEMBER

16 Peresmian Kantor Cabang BFI ke-2 di Semarang, Jawa Tengah

20 Penutupan Program Kelas Merajut bagi staf pengajar dan produksi “Rumah Jahit BFI - Duri Kepa” dan pemberian piagam penghargaan bagi para peserta di BFI Tower, BSD City, Tangerang Selatan

PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN

2016

BFI menjadi salah satu nominator dalam *Sustainable Finance Award 2016* untuk sub-kategori 'Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.' *Sustainable Finance Award* diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") bagi industri jasa keuangan yang dinilai mampu memberikan kontribusi yang berimbang dalam inisiatif keuangan berkelanjutan, di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola.



6



7



8



1



9

1 Penghargaan *Lifetime Achievement in Multifinance Industry 2015* oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI") untuk Francis Lay Sioe Ho, Presiden Direktur BFI, dalam acara "Pertemuan Anggota dan Apresiasi APPI 2015" pada 26 Januari 2016 di Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1, Jakarta

2 Penghargaan *Market Conduct 2015* oleh OJK sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang Telah Melaksanakan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2015, pada 22 Maret 2016 di Hotel Le Meridien, Jakarta

3 Penghargaan *Infobank Digital Brand Awards 2016* oleh majalah *Infobank* berdasarkan hasil survei *Infobank* bersama *Isentia Research* selama 2015, pada 5 April 2016 di Hotel Le Meridien, Jakarta

4 Penghargaan *Investor Awards 2016* sebagai Emiten Terbaik 2016 untuk Sektor *Multifinance* oleh majalah *Investor*, pada 3 Mei 2016 di *Main Hall* Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta

5 Penghargaan *Corporate Image Award 2016* dari *Frontier Consulting Group* berkolaborasi dengan majalah *TEMPO* dan *MARKETING* untuk "The Best in Building and Managing Corporate Image" kategori *Heavy Equipment Leasing* (Sewa Pembiayaan Alat Berat) berdasarkan hasil survei *Indonesia's Most Admired Companies* ("IMAC") 2016, pada 8 Juni 2016 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta



2



3



4



5



10



11



12



13

6 Penghargaan *Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2016* oleh Brand Finance dan majalah SWA, pada 21 Juli 2016 di Hotel Shangri-La, Jakarta

7 Penghargaan *Indonesia Human Capital Study ("IHCS") 2016* oleh Dunamis Human Capital dan majalah *BusinessNews Indonesia* dalam kategori *The Best of Human Capital Initiatives (The Best Recruitment System Initiative)*, pada 8 September 2016 di Balai Kartini, Jakarta

8 Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2015 dan Peringkat Pertama kategori "Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 triliun ke atas" oleh majalah *Infobank*, pada 29 September 2016 di Hotel InterContinental MidPlaza, Jakarta

9 Tropi Emas untuk Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut (2011-2015) oleh majalah *Infobank*, pada 29 September 2016 di Hotel InterContinental MidPlaza, Jakarta

10 Penghargaan untuk Francis Lay Sioe Ho, Presiden Direktur dan CEO BFI, sebagai salah satu Finalis "CNBC 15th Asia Business Leaders Awards (ABLA) 2016" dari CNBC Asia, pada November 2016

11 Penghargaan "Warta Ekonomi Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2016" sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan Kinerja Keuangan Terbaik (*Best Financial Performance*) untuk Kategori Aset di atas Rp5 triliun oleh majalah *Warta Ekonomi*, pada 1 Desember 2016 di Hotel Pullman Jakarta Indonesia

12 Penghargaan "Best Employer Award 2016" Kategori *Financial Institution* sebagai "The 2nd Best Company of Active Contribution for Telkom University Graduates Placement" oleh Telkom University Bandung, pada 1 Desember 2016 di Hotel InterContinental MidPlaza, Jakarta

13 Penghargaan sebagai Nominator "Sustainable Finance Award 2016" Kategori Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) – Lembaga Jasa Keuangan Lainnya oleh OJK pada 1 Desember 2016 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali



2015

- Penghargaan *IHCS Award* 2015 oleh *Dunamis Human Capital* dan majalah *BusinessNews Indonesia* dalam kategori *Appreciation of Human Capital Management System Improvement*
- Penghargaan *Corporate Image Award 2015* oleh *Frontier Consulting Group* dan majalah *TEMPO* untuk “The Best in Building and Managing Corporate Image” kategori *Heavy Equipment Leasing (Sewa Pembiayaan Alat Berat)*, berdasarkan hasil survei *IMAC 2015*
- Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2014 dan Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan *Multifinance* Terbaik oleh majalah *Infobank*
- Tropi Emas untuk Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut (2010-2014) oleh majalah *Infobank*

2014



- Penghargaan *Corporate Image Award 2014* oleh *Frontier Consulting Group*, majalah *TEMPO* dan majalah *MARKETING* untuk “The Best in Building and Managing Corporate Image” kategori *Heavy Equipment Leasing (Sewa Pembiayaan Alat Berat)*, berdasarkan hasil survei *IMAC 2014*
- Penghargaan “Maju Berkat Kredit” oleh *APPI* berdasarkan kinerja Perusahaan dalam membantu pelanggannya meraih kesuksesan berkat fasilitas pembiayaan dari *BFI*
- Penghargaan *Corporate Image Award 2014* oleh *Frontier Consulting Group*, majalah *TEMPO* dan majalah *MARKETING* untuk “The Best in Building and Managing Corporate Image” kategori *Heavy Equipment Leasing (Sewa Pembiayaan Alat Berat)*, berdasarkan hasil survei *IMAC 2014*
- Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2013 dan Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan *Multifinance* Terbaik oleh majalah *Infobank*
- Tropi Emas untuk Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut (2009-2013) oleh majalah *Infobank*
- Penghargaan “Investor Awards Best Listed Companies 2014” oleh majalah *Investor* sebagai salah satu Emiten Terbaik yang tercatat di *Bursa Efek Indonesia (BEI)* untuk kinerja sepanjang 2013 hingga triwulan pertama 2014
- Penghargaan “Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2014” oleh *APPI* untuk kategori aset di atas Rp5 triliun

2013



- Penghargaan Tokoh Finansial Indonesia 2013 oleh majalah *Investor* yang diberikan kepada Francis Lay Sioe Ho, Presiden Direktur BFI, yang mendapatkan nominasi sebagai “Top Executive of Multifinance Company”
- Penghargaan *Corporate Image Award 2013* oleh Frontier Consulting Group dan majalah *Bloomberg Businessweek* untuk “The Best in Building and Managing Corporate Image” kategori *Heavy Equipment Leasing* (Sewa Pembiayaan Alat Berat), berdasarkan hasil survei IMAC 2013
- Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2012 dan Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan *Multifinance* Terbaik oleh majalah *Infobank*
- Tropi Emas untuk Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut (2008-2012) oleh majalah *Infobank*
- Penghargaan Rekor Bisnis (ReBi) 2013 oleh Tera Foundation, *Harian Seputar Indonesia* dan didukung oleh Frontier Consulting Group sebagai “Perusahaan *Multifinance* dengan Layanan ‘One Stop Service’ Telecenter Terlengkap di Indonesia”

2012



- Tropi Emas untuk Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Selama Lima Tahun Berturut-turut (2007-2011) oleh majalah *Infobank*
- Peringkat Sepuluh Besar Perusahaan *Multifinance* Terbaik Tahun 2011 oleh majalah *Investor*
- Perusahaan *Multifinance* dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus Tahun 2011 dan Perusahaan *Multifinance* Terbaik oleh majalah *Infobank*



AGRICULTURE TANAH TERASERING – MAJALENGKA
KUSNADI

Pengelolaan kebun daun bawang di atas bukit terasering

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Komisaris	30
Laporan Direksi	36



Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") masing-masing untuk jangka waktu lima tahun.

Pengangkatan Francis Lay Sioe Ho dan Cornelliuss Henry Kho masing-masing sebagai Presiden Direktur

dan Direktur, serta pengangkatan Kusmayanto Kadiman sebagai Presiden Komisaris, Emmy Yuhassarie, Johannes Sutrisno dan Alfonso Napitupulu masing-masing sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 80 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di



Jakarta dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 yaitu tahun 2016. Sementara Sudjono dan Sutadi diangkat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan

2019. Dominic John Picone dan Sunata Tjiterosampurno diangkat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2020.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

*"Dewan Komisaris
memberikan
penghargaan kepada
Direksi atas
kinerja bisnis yang
baik di 2016 dan
pembangunan fondasi
keuangan yang kokoh
untuk masa depan."*

Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Yang terhormat Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan,

Atas nama Dewan Komisaris (“BOC”), saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI”) dapat menutup 2016 dengan kinerja yang memuaskan dan terus membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan usaha di masa depan. Hasil positif ini dapat dicapai di tengah kondisi ekonomi dan pasar yang sangat menantang, berkat kebijaksanaan manajemen dan kekayaan pengalaman Direksi yang telah melalui banyak siklus kredit dan ekonomi sebagai pimpinan Perusahaan.

Dewan Komisaris mengakui dan memberi penghargaan kepada Direksi atas keberhasilannya memimpin dan mengembangkan Perusahaan dalam situasi yang penuh tantangan ini. Dengan tema “*Innovate to Serve*”, saya percaya Direksi telah memulai inisiatif strategis yang tepat untuk mengatasi kondisi ekonomi yang melambat dan perubahan-perubahan yang mulai kita lihat dalam industri ini. Tema ini berfokus pada perbaikan efisiensi operasional agar dapat bersaing lebih baik di industri yang makin kompetitif dan menantang melalui pengembangan dan penerapan alur kerja dan proses yang lebih efisien, optimalisasi manajemen risiko dan sistem audit internal, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (“SDM”) BFI, serta investasi di bidang Teknologi Informasi untuk meningkatkan proses otomasi serta menciptakan kanal distribusi digital yang baru.

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DI 2016

Tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan, baik secara politik maupun ekonomi. Sepanjang tahun ini, pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengeluaran, terutama di area yang dapat berdampak positif pada ekonomi negara. Sayangnya, upaya ini tidak didukung oleh kondisi ekonomi dunia yang lesu dan kondisi politik yang tidak menentu. Selama beberapa tahun terakhir, rupiah berada di bawah tekanan yang cukup besar karena menurunnya ekspor. Pergerakan rupiah sangat fluktuatif di sepanjang tahun, namun nilai tukar rupiah sedikit mengalami peningkatan di 2016 sebesar

3,3%. Inflasi masih berada dalam target inflasi Bank Indonesia, sehingga badan otoritas moneter kemudian menurunkan tingkat suku bunga acuan untuk memacu pertumbuhan.

Karena lambatnya pertumbuhan pasar domestik dan lemahnya daya beli berbagai perusahaan, permintaan atas kredit dan pendanaan dari bank berkurang. Di 2016, jumlah Piutang Dagang industri pendanaan hanya tumbuh sebesar 6,7% ke angka Rp388 triliun dari Desember 2015 ke Desember 2016. Hal ini cukup signifikan mengingat di tahun sebelumnya jumlah piutang pendanaan nasional turun hampir 1%.

PENILAIAN KERJA DIREKSI

Kami puas dengan kemampuan Direksi menumbuhkan dan meningkatkan keuntungan serta kualitas aset, sekaligus mempertahankan tingkat modal yang cukup di tengah kondisi yang menantang. Jumlah aset naik 6% ke angka Rp12.476 miliar, sedangkan laba bersih setelah pajak naik 23% ke angka Rp798 miliar, sementara kualitas aset yang dapat dilihat dari tingkat Kredit Bermasalah (*Non-Performing Financing* atau “NPF”) sebesar 0,91%. Tingkat modal di angka Rp4.255 miliar, yang mewakili rasio aset terhadap modal sebesar 2,93x dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan.

Selain itu, kami memberi penghargaan terhadap kemampuan manajemen yang memperoleh peningkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia, dari 'A+(idn)' dengan Outlook Positif ke 'AA-(idn)' dengan Outlook Stabil.

Dewan Komisaris juga menghargai upaya manajemen yang sukses mengalihkan usaha pendanaannya dari sektor-sektor yang berisiko tinggi, seperti sektor yang berkaitan erat dengan komoditas, dan lebih memfokuskan usahanya kepada sektor berisiko lebih rendah. Langkah ini terbukti sukses di Jawa, saat daerah lain yang berfokus pada komoditas mengalami perlambatan.

Direksi memilih strategi yang tepat dengan memfokuskan diri pada pengembangan jaringan cabang Perusahaan dan ekspansi di banyak *channel* yang akan mendukung pertumbuhan BFI jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Kami juga ingin melaporkan bahwa laporan keuangan tahun ini telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma dari BDO International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PEMANTAUAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP STRATEGI DAN REKOMENDASI MANAJEMEN

Dewan Komisaris memantau implementasi strategi manajemen melalui rapat triwulan bersama Direksi dan rapat bulanan dibanding kewajiban minimum empat kali setahun dengan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris juga mempunyai akses untuk memeriksa laporan manajemen periodik, sehingga kami dapat menjalankan peran kami sebagai pengawas dan memastikan bahwa pertahanan tiga lapis dari perusahaan berjalan efektif.

Melalui rapat-rapat yang kami adakan, Dewan Komisaris menilai kinerja Perusahaan serta memberi arahan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Sebagai contoh, kami telah merekomendasikan manajemen untuk lebih cermat mengikuti berita-berita eksternal, misalnya tren politik dan ekonomi terakhir sehingga BFI dapat lebih proaktif dalam mengeluarkan tanggapan manajemennya. Kami terus memastikan bahwa prinsip kehati-hatian dijaga saat manajemen membangun

bisnis untuk mengelola dan meminimalisir risiko. Akhirnya, kami juga memastikan bahwa investasi pada SDM dan teknologi informasi Perusahaan dipertahankan demi perkembangan di masa depan.

Salah satu bidang yang kami tinjau selama penilaian kami adalah perbandingan target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") dengan hasil sebenarnya. Kami juga memastikan bahwa Perusahaan memperhatikan dan mengikuti peraturan perundangan dari Pemerintah, khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku, Komite Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Selama rapat-rapat periodik Dewan Komisaris/Direksi, tiga Komite ini memberi laporan kepada Dewan Komisaris, yang kemudian didiskusikan lebih lanjut dalam rapat Dewan Komisaris. Ketika diperlukan, Dewan Komisaris dapat mengundang manajemen untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

Untuk 2016, kami puas dengan kinerja Komite-Komite yang telah melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, berintegritas, dan sejalan dengan peraturan yang berlaku.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris mementingkan penerapan yang tepat dari kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau "GCG"). Di bawah pengawasan kami, manajemen telah menjalankan Perusahaan sejalan dengan prinsip GCG. Kami menganggap ini perlu dan penting demi mempertahankan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi terus mencari cara lebih lanjut untuk meningkatkan dan memperkuat penerapan GCG, di mana BFI sebagai satu-satunya perusahaan pembiayaan yang berhasil mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh OJK terkait *Market Conduct* dan *Sustainable Finance Award* ("SFA").

Kami juga telah meninjau kepatuhan Direksi terhadap tugas dan tanggung jawab mereka, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan serta aturan dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, kami percaya bahwa manajemen telah

Dewan Komisaris memantau implementasi strategi manajemen melalui rapat reguler bersama Direksi dan rapat dengan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

berhasil menuntaskan tugas dan kewajiban mereka. Di 2016, sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK dan lembaga regulasi lainnya, Perusahaan telah memperbarui dan melengkapi pedoman dan buku petunjuk baru untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Akhirnya, berdasarkan laporan periodik Direksi, kami telah menjawab dan menyelesaikan tugas pengawasan dan pelaporan kami terhadap para pemegang saham. Melalui sejumlah rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite sepanjang tahun ini, kami memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan standar tertinggi dan mengikuti prinsip-prinsip GCG, yaitu kepatuhan, transparansi, integritas dan akuntabilitas.

PENILAIAN PROSPEK BISNIS MANAJEMEN UNTUK 2017

Kami puas terhadap rencana manajemen untuk 2017 karena mereka telah memperhitungkan seluruh aspek eksternal dan internal. Tahun depan akan terus menjadi tahun yang penuh tantangan dengan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi dari pemerintah, sehingga Perusahaan perlu mengantisipasi berbagai perubahan tersebut dan mengambil keuntungan dari peluang usaha baru yang akan tumbuh di masa depan.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang telah berimbas terhadap ekonomi Indonesia pada 2017, manajemen perlu lebih meningkatkan kehati-hatian dalam menyikapi berbagai dampak yang dapat mempengaruhi kinerja nasabah Perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko harus terus ditingkatkan dengan didukung manajemen dan sistem teknologi informasi yang handal sehingga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Kondisi makroekonomi serta kebijakan pemerintah dan OJK akan tetap menjadi faktor utama untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan industri pendanaan nasional. Kami percaya bahwa BFI tetap mampu menjawab tantangan di tahun mendatang dan tetap menjadi salah satu yang terdepan dalam industri pendanaan di Indonesia.

PENUTUP

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direksi, manajemen senior dan semua staf yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil yang baik di 2016. Selain itu, kami ingin berterima kasih kepada nasabah kami untuk loyalitas dan dukungan terus menerus terhadap para pemegang saham serta para pemangku kepentingan.

Tidak ada perubahan dalam keanggotaan Dewan Komisaris di 2016, tetapi dalam kesempatan ini kami ingin menyambut anggota Direksi baru, yaitu Sigit Hendra Gunawan, yang bergabung dengan latar belakang yang menunjang di bidang pengelolaan kredit dan risiko, serta Edy Sugito sebagai anggota dari Komite Audit. Kami percaya beliau akan menjadi aset berharga bagi keluarga kami yang sedang berkembang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Stefanus Ginting yang telah melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite Audit selama ini.

Akhir kata, kami berharap BFI dapat terus berkembang dan menyediakan jasa keuangan kepada basis nasabah kami yang sedang berkembang, agar dapat memberikan nilai tambah yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham di masa mendatang.

Terima kasih.



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Dari kiri ke kanan

1. **Sunata Tjiterosampurno**
Komisaris
2. **Alfonso Napitupulu**
Komisaris (Independen)
3. **Emmy Yuhassarie**
Komisaris (Independen)
4. **Kusmayanto Kadiman**
Presiden Komisaris
5. **Johanes Sutrisno**
Komisaris (Independen)
6. **Dominic John Picone**
Komisaris



DEWAN
KOMISARIS

LAPORAN DIREKSI

*"Sejalan dengan
tema 'Innovate
to Serve',
Perusahaan tetap
sigap menghadapi
tantangan
di 2016."*

Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur



Yang Terhormat Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan,

Dengan bangga saya laporkan bahwa dalam iklim global yang penuh ketidakpastian dan kejutan serta terhambatnya pertumbuhan domestik, PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI”) tetap berhasil meningkatkan aset dan profitabilitasnya di 2016.

Total aset dan pembiayaan naik sebesar masing-masing 6,0% dan 6,8% menjadi Rp12,5 triliun dan Rp10,7 triliun pada akhir tahun, sementara laba bersih setelah pajak naik 22,8% menjadi Rp798 miliar selama tahun ini. Selain menambah aset serta pendanaannya, BFI juga meningkatkan kualitas asetnya, sebagaimana tercermin dari menurunnya rasio kredit bermasalah (“NPF”) dari 1,3% pada tahun lalu menjadi 0,9% pada tahun ini.

Pencapaian besar kami lainnya dalam tahun ini adalah peningkatan Peringkat Jangka Panjang Nasional BFI dari PT Fitch Ratings Indonesia, dari ‘A+(idn)’ menjadi ‘AA-(idn)’ dengan Outlook Stabil. Kami pun tetap menjadi perusahaan pembiayaan independen berperingkat tertinggi di Indonesia.

Tema kami tahun ini, “*Innovate to Serve*” mencerminkan komitmen kami untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam hal evolusi industri dan dinamika pasar. Walau bisnis kami bersifat tradisional, kami terus berupaya meningkatkan produk dan jasa kami, baik dalam originasi (termasuk kemitraan baru dengan usaha dagang dan portal *e-commerce* untuk mendorong upaya originasi), peningkatan efisiensi, serta penghematan biaya. Bagi kami, inovasi berarti penerapan ide-ide baru dan berbeda untuk meningkatkan kualitas produk, proses, dan jasa yang telah ada. Kami meyakini pentingnya hal ini agar kami tetap relevan di tengah era digitalisasi dan persaingan yang semakin ketat dari para pemain tradisional maupun non-tradisional. Menanggapi hal itu, kami menerapkan proyek *Golden Bamboo* yang berfokus pada aspek-aspek kunci berikut: Produktivitas Agen, Peningkatan Penawaran Produk, dan Optimalisasi Jaringan, termasuk digitalisasi manajemen risiko dengan peningkatan pada sistem penilaian dan pemesanan. Hal ini akan kami bahas lebih rinci di bagian bawah.

Untuk pertama kalinya, kami menggabungkan Laporan Keberlanjutan dengan Laporan Tahunan kami untuk tahun ini. Kami menjalankan peran bisnis dan kemasyarakatan kami dengan serius melalui pemusatan aktivitas tanggung jawab sosial pada konsep 3P: *Profit*, *People*, dan *Planet*. Kami percaya bahwa dengan menanamkan nilai-nilai tersebut ke seluruh perusahaan, budaya tanggung jawab sosial dan ketersinambungan yang kuat akan tercipta. Sangatlah penting bagi karyawan kami untuk memahami esensi dan hubungan antara ketiga P tersebut, yaitu bahwa kami tidak dapat mengorbankan masyarakat dan lingkungan demi mengejar *profit*.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Pada 2016, perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,0%, namun masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan 4,8% di tahun sebelumnya. Lemahnya perekonomian global berakibat pada menurunnya ekspor sepanjang tahun ini, walaupun harga komoditas ekspor mulai membaik di penghujung tahun. Rupiah bergerak fluktuatif sepanjang 2016, kecenderungan menguat dari Rp13.898 per USD di awal tahun ke Rp13.436 per USD di akhir tahun, atau menguat sebesar 3,3% sepanjang tahun. Tingkat konsumsi tergolong lemah meskipun tingkat suku bunga rupiah telah menurun sepanjang tahun, karena permintaan kredit pun menurun. Tahun ini, tingkat inflasi berhasil ditekan relatif rendah pada level 3,02%, sehingga Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga acuan untuk rupiah dari 5,5% di awal tahun menjadi 4,75%.

Lemahnya permintaan domestik Indonesia mempengaruhi kinerja sektor perbankan dan pembiayaan (*multifinance*). Imbasnya, pertumbuhan kredit bank dan piutang *multifinance* tidak tumbuh sesuai harapan dan kualitas aset pun memburuk, seiring dengan meningkatnya jumlah NPF dalam industri.

Jumlah piutang sektor *multifinance* tumbuh 6,7% menjadi Rp388 triliun pada Desember 2016. Lemahnya pertumbuhan ini merupakan cerminan dari lambatnya pertumbuhan sektor otomotif dimana penjualan mobil baru mencapai 1.062.729 unit, meningkat tipis 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan sepeda motor baru mengalami penurunan sebesar 9,3% menjadi kurang dari 6.000.000 unit.

KINERJA KEUANGAN DI 2016

Kami berhasil meningkatkan piutang dalam kelola kami sebesar 6,5% menjadi Rp13 triliun. Meskipun penjualan mobil baru mengalami penurunan secara nasional, BFI mampu bertumbuh melalui strateginya untuk fokus ke kendaraan mobil bekas. Piutang dari kendaraan mobil bekas mencakup 68,9% dari portofolio kami senilai Rp9,0 triliun, diikuti oleh piutang dari kendaraan motor bekas yang mencakup 6,7% dari portofolio kami senilai Rp868 miliar, dan piutang dari alat berat dan properti sebesar 13,8% atau Rp1,8 triliun.

Pertumbuhan ini berasal dari dukungan pendanaan obligasi dan pinjaman bank. Kami berhasil menempatkan Rp2 triliun melalui penerbitan dua obligasi. Biaya dana membaik menjadi 11,3%, atau 23 bps lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam hal struktur modal, rasio utang terhadap ekuitas kami masih berada di level rendah senilai 1,8x. Struktur modal kami kini lebih efisien berkat upaya diversifikasi berkelanjutan Perusahaan atas struktur pendanaannya.

Pertumbuhan piutang menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 14% menjadi Rp3,2 triliun pada 2016, sementara kami mengurangi pembiayaan atas mobil baru selama tahun ini. Selain itu, kami juga berhasil menurunkan biaya pendanaan sekaligus mempertahankan tingkat pengembalian portofolio yang tinggi, sehingga margin bunga kami meningkat menjadi 8,85% dari 8,20% di tahun lalu. Efisiensi manajemen risiko dan biaya juga berbuah positif dengan menghasilkan peningkatan margin operasional kami. Dalam hal ini, kami memperketat proses penyaringan manajemen risiko kami dengan beralih ke segmen pasar terukur berisiko rendah, dan menjauh dari sektor berisiko tinggi yang terkait erat dengan sektor sumber daya alam yang bermasalah. Kami juga memperketat proses pemantauan risiko kami dengan kajian lebih mendalam dan berkala terhadap profil risiko pelanggan. Selain itu, kami mengubah rentang waktu kebijakan penghapusan buku kami pada Desember 2016 dari 270 hari menjadi 210 hari, sehingga menghasilkan angka NPF sebesar 0,91% sepanjang tahun.

Laba bersih Perusahaan pada 2016 adalah Rp798 miliar, atau meningkat sebesar 22,8% dari 2015. Angka ini melebihi perkiraan kami dan dicapai di tengah kondisi pasar yang lemah. Laba bersih tersebut menghasilkan angka *Return on Average Equity* ("ROAE") sebesar 19,3% dan *Return on Average Assets* ("ROAA") sebesar 8,5%, yang merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Total Ekuitas mencapai Rp4.255 miliar, atau meningkat sebesar Rp236 miliar, atau 5,9% dari Total Ekuitas 2015 sebesar Rp4.019 miliar.

KINERJA OPERASIONAL DI 2016

Sejalan dengan motto Perusahaan "*Innovate to Serve*", pada 2016 kami bekerja sama dengan konsultan strategis untuk mengonsepan dan menjalankan sejumlah langkah operasional penting (yang mayoritas akan kami teruskan di tahun finansial baru) yang berfokus pada Optimalisasi Jaringan, Peningkatan Penawaran Produk, serta Produktivitas Agen.

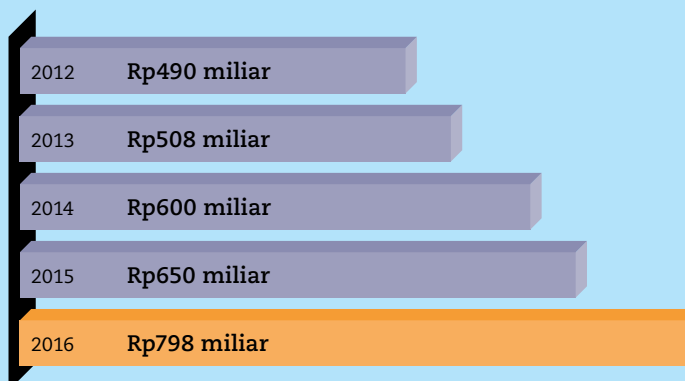
Optimalisasi Jaringan

Untuk Optimalisasi Jaringan, kami terus memperluas jangkauan pasar kami, mengoptimalkan upaya pemasaran, dan memperketat pemantauan cabang melalui metrik kinerja cabang terstandarisasi sekaligus jangkauan cabang yang dapat dikendalikan. Kami mempertahankan strategi

pertumbuhan kami berupa perluasan jaringan distribusi di Jawa sekaligus memperkuat merek dan eksistensi BFI di wilayah yang belum banyak terjangkau perusahaan pendanaan lainnya, seperti di kawasan Indonesia Timur. Di akhir tahun, kami telah memiliki 305 outlet dibandingkan 267 outlet pada tahun sebelumnya. Kami terus mengkaji dan mengelola ekspansi jaringan cabang kami dalam rangka menjamin peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dalam pendanaan kendaraan motor dan mobil, kami pun terus mengembangkan bisnis kami melalui outlet kami di Pulau Jawa, yang memiliki potensi pasar terbesar karena kepadatan populasi, aktivitas ekonomi, dan akses ke infrastrukturnya yang lebih baik.

Selain memperkuat jaringan fisik, kami juga memperluas distribusi kami melalui kanal digital internal dan eksternal. Kami memperbarui situs web Perusahaan kami dan meningkatkan pemasaran melalui media sosial, sekaligus memperkuat hubungan dengan sejumlah mitra digital (*agregator*). Hal ini sejalan dengan semboyan Perusahaan “*Innovate to Serve*”, dan kami meyakini bahwa walaupun hasil yang signifikan belum muncul, langkah digital yang kami ambil akan meningkatkan kemampuan operasional kami dan memastikan keselarasan dengan perkembangan di bidang ini. Kolaborasi dengan Fintech dan penggunaan aplikasi dalam proses originasi dan penagihan pun telah diintegrasikan ke dalam proses yang telah ada.

Grafik 7 – LABA BERSIH PERUSAHAAN TAHUN 2012-2016



Penawaran Produk

Perbaikan dalam Penawaran Produk meliputi proses survei yang lebih baik dan cepat, peningkatan transparansi proses, dan waktu persetujuan yang lebih cepat, serta profil risiko yang lebih terstandardisasi. Langkah-langkah tersebut masih dalam tahap awal penerapannya sementara kami meneruskan proses *roll-out* di tahun finansial baru.

Produktivitas Agen

Produktivitas Agen adalah langkah terbesar kami tahun ini, dengan fokus untuk meningkatkan manajemen agen kami. Tujuannya adalah mempermudah pemantauan dan pengelolaan jaringan agen demi peningkatan produktivitas dan prospek untuk meningkatkan originasi. Kecepatan, transparansi, dan kesederhanaan adalah prinsip utama dalam peningkatan proses ini.

Pencapaian operasional penting lainnya selama tahun ini adalah dalam Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Risiko.

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam hal Sumber Daya Manusia, kami berfokus pada peningkatan sumber perekrutan dan kualitas rekrutan baru, sekaligus mengangkat citra kami sebagai pemberi kerja di bidang ini. Kami juga mengkomunikasikan dan meningkatkan metrik produktivitas demi pengelolaan KPI dan pemantauan kinerja yang lebih baik, khususnya di cabang. Proses pembelajaran juga menjadi prioritas kami melalui pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan penyampaian dan komunikasi karyawan lini depan kami dan *supervisor* mereka.

MANAJEMEN RISIKO

Tahun ini, kami berhasil mengalihkan fokus produk dari kendaraan mobil baru ke bekas. Dampak pengalihan ini berhasil ditekan, sebagaimana tercermin dari kenaikan Pembiayaan Baru sebesar 6,8%, walaupun penjualan kendaraan mobil baru turun sebesar 71,2%. Kami juga menunjukkan peningkatan dalam mitigasi risiko kredit, sebagaimana terbukti dari *vintage* yang lebih mudah dikelola melalui Ulasan Kualitas Produk yang sistematis, Kriteria Penerimaan Risiko, dan kebijakan risiko untuk pemesanan (segmentasi yang lebih baik, penjaminan yang lebih ketat). Penagihan juga

semakin membaik, karena kami mampu meminimalisir akun yang berpindah (*roll*) ke umur tunggakan yang lebih tua.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

BFI selalu berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan berstandar nasional dalam Tata Kelola Perusahaan ("GCG"). Selain itu, kami juga menjalankan prinsip keberlanjutan di tiga bidang (pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan lingkungan) yang merupakan salah satu tanggung jawab sosial yang dijalankan di semua tingkatan organisasi kami.

Melalui tim CSR kami, Tata Kelola Perusahaan diterapkan dalam aktivitas yang berfokus pada komunitas, masyarakat, dan lingkungan alam. Kualitas penerapan GCG dalam BFI terus ditingkatkan sejalan dengan standar dan praktik terbaik di Indonesia, seperti *Roadmap* OJK. Kami juga memastikan nilai-nilai kami sejalan dengan aktivitas bisnis kami, berdasarkan prinsip GCG dan didukung oleh kendali internal dan manajemen risiko yang kuat. Hal ini akan meminimalisir risiko dan membantu kinerja bisnis di masa depan.

KEBERLANJUTAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sejalan dengan visi kami untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar, kami menjaga keseimbangan antara 3P (*Profit, People, Planet*). Program keberlanjutan kami meliputi langkah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta karyawan kami dan keluarga mereka.

Sejak 2004, kami bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Jawa untuk memberikan Beasiswa BFI bagi mahasiswa S1 berprestasi. Kami juga membuka pendaftaran *online* untuk program beasiswa S1 kami dari universitas-universitas di seluruh Indonesia. Pada 2016,

Sejalan dengan visi kami untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar, kami menjaga keseimbangan antara 3P (Profit, People, Planet). Program keberlanjutan kami meliputi langkah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta karyawan kami dan keluarga mereka.



Kemitraan kami dengan **Gerakan Indonesia Mengajar** berlanjut tahun ini dengan Program Pengajar Muda dan Kelas Inspirasi di dua SD di Luwuk, Sulawesi Tengah, sekaligus partisipasi dalam Program Homestay yang memberi kesempatan kepada karyawan untuk tinggal bersama dan belajar dari guru-guru Indonesia Mengajar.

kami menganugerahkan 63 beasiswa untuk mahasiswa dari berbagai jurusan. Kami juga terus memberikan beasiswa kepada putra-putri karyawan kami, dari jenjang SD hingga SMA. Jumlah anak yang dinaungi program ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi 129 siswa di 2016 dari 76 di 2015. Kemitraan kami dengan Gerakan Indonesia Mengajar berlanjut di tahun ini dengan Program Pengajar Muda dan Kelas Inspirasi di dua SD di Luwuk, Sulawesi Tengah, sekaligus partisipasi dalam Program *Homestay* yang memberi kesempatan kepada karyawan untuk tinggal bersama dan belajar dari guru-guru Indonesia Mengajar.

Selain itu, sejak 2014 kami juga bekerja sama dengan Yayasan Habitat for Humanity Indonesia dalam program “BFI untuk Kalialang Baru – Proyek Air dan Pendidikan” yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga berpenghasilan rendah.

Pada 2016, kami membangun saluran air yang memadai untuk penduduk RW 07 di Kalialang Baru, Semarang, Jawa Tengah dan terlibat dalam proyek independen lainnya seperti renovasi sekolah dan tempat ibadah. Di bidang kesehatan, kami meneruskan kerja sama dengan Yayasan Citra Baru dengan mengadakan operasi bibir sumbing gratis bagi keluarga kurang mampu yang telah berjalan sejak 2012.

PELUANG DAN RENCANA BISNIS PADA 2017

Tahun depan akan tetap menjadi tahun yang penuh tantangan. Walaupun harga minyak dan komoditas perlahan naik, ekspor dan perekonomian diproyeksikan tetap dalam kondisi lemah, terutama di paruh pertama tahun. Akan tetapi,

diharapkan ada peningkatan di paruh kedua. Berdasarkan asumsi makro pemerintah pada APBN 2017, pertumbuhan, inflasi, diperkirakan akan mencapai 4-4,5%. Sementara itu, rupiah diperkirakan akan terus tertekan, antara lain karena melemahnya perekonomian Tiongkok dan kemungkinan kenaikan suku bunga USD dari Bank Sentral AS di 2017.

Berdasarkan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) triwulan IV-2016 oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 akan berada di sekitar 5,13%. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan tahun depan adalah, antara lain, meningkatnya belanja pemerintah dan investasi yang sejalan dengan berbagai paket stimulus ekonomi dari pemerintah. Pemerintah berencana memperkenalkan reformasi pajak sebagai lanjutan

program Amnesti Pajak, mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan, dan memperbaiki program kesejahteraan sosial negara. Pemerintah mencanangkan target yang ambisius dari pendapatan pajak. Target ini amatlah penting, karena defisit negara telah ditetapkan tidak melebihi dari 3%.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami pun melanjutkan upaya-upaya kami di 2016 dengan langkah strategis berikut untuk 2017:

- meningkatkan produktivitas kapabilitas manajemen Agen kami dengan fokus pada kecepatan, kesederhanaan, dan transparansi;
- mengoptimalkan pertumbuhan melalui ekspansi jaringan berkelanjutan sekaligus kemampuan penilaian kredit yang lebih terfokus dan intensif; dan
- terus memperkuat profil dan kompetensi karyawan di semua tingkatan, serta berinvestasi untuk inisiatif Teknologi Informasi baru dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi dan memperdalam penetrasi pasar melalui digitalisasi layanan kami.

Kami mengharapkan dukungan berkelanjutan dari OJK dan peningkatan keselarasan dengan industri *multifinance*. Dengan diterapkannya sejumlah peraturan baru, kami melihat lebih banyak peluang bagi perusahaan pembiayaan seperti kami untuk bertumbuh. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan pasar dan pembiayaan perusahaan di masa depan.

PENUTUP DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Akhir kata, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menginformasikan bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada 25 April 2016, para pemegang saham kami menyetujui pengangkatan Sigit Hendra Gunawan sebagai Direktur Independen Perusahaan. Sigit memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kredit dan risiko, dan kami meyakini bahwa beliau akan menjadi aset berharga bagi Perusahaan.

Atas nama Direksi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan kerja samanya. Kami juga berterima kasih kepada para pemegang saham, nasabah, bankir, pemegang obligasi, mitra bisnis, dan para pembuat kebijakan atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang berkelanjutan. Kami pun sangat berterima kasih kepada semua karyawan kami, yang telah bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan kami dalam mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindungannya terhadap bisnis kami pada 2016, dan memohon panduan-Nya di 2017.

Terima kasih.



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

Dari kiri ke kanan

1. Sutadi

Direktur Pembiayaan Ritel

2. Cornelius Henry Kho

Direktur Operasional dan
Pembiayaan Korporasi

3. Francis Lay Sioe Ho

Presiden Direktur

4. Sudjono

Direktur Keuangan dan
Teknologi Informasi

5. Sigit Hendra Gunawan

Direktur Risiko Perusahaan
(Independen)



DIREKSI



**PRODUKSI BIOLA BAMBU – CIMAHI
DJULI PAMUNGKAS**

Eksplorasi penggunaan bambu sebagai alat musik modern mampu menjadi langkah untuk meningkatkan usaha ekonomi kreatif dan memperkaya budaya Indonesia

PROFIL PERUSAHAAN

Identitas Perusahaan	46
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan	47
Riwayat Singkat Perusahaan	48
Jejak Langkah	50
Bidang Usaha	52
Peta dan Jaringan Operasional	54
Struktur Organisasi	55
Profil Dewan Komisaris	56
Profil Direksi	61
Profil Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	65
Komite Audit	65
Komite Manajemen Risiko	66
Komite Nominasi dan Remunerasi	68
Profil Manajemen Senior	70
Komposisi Kepemilikan Saham	77
Profil Pemegang Saham Mayoritas	78
Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham	79
Pencatatan Efek Lainnya	83
Struktur Korporasi	92
Informasi Mengenai Entitas Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi	92
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	93



IDENTITAS PERUSAHAAN

PROFIL PERUSAHAAN



NAMA PERUSAHAAN

PT BFI Finance Indonesia Tbk
(disingkat "BFI")

KEDUDUKAN

Tangerang Selatan,
Indonesia

PENDIRIAN PERUSAHAAN

7 April 1982

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

BURSA EFEK

Saham BFI dicatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI")

TANGGAL PENCATATAN SAHAM

16 Mei 1990

KODE SAHAM

BFIN

MODAL DASAR

Rp500 miliar

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp399,2 miliar

KEPEMILIKAN

- Trinugraha Capital & Co SCA: 42,81%
- PT BFI Finance Indonesia Tbk*: 6,28%
- Publik/Lainnya (masing-masing di bawah 5%): 50,91%

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)

*Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

Hubungi Kami

KANTOR PUSAT

PT BFI Finance Indonesia Tbk

BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City - Tangerang Selatan 15322
Indonesia

Telepon: (62-21) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili: (62-21) 2966 0757, 2966 0758

SEKRETARIS PERUSAHAAN

corsec@bfi.co.id

HUBUNGAN INVESTOR

investor@bfi.co.id

SITUS WEB

www.bfi.co.id

CALL CENTER

1500018

MEDIA SOSIAL

BFI Finance @BFIFinance bfinance

KEGIATAN USAHA

Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna



305

Jumlah
Outlet



8.941

Jumlah
Karyawan

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI DASAR PERUSAHAAN

Visi

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat

Misi

- Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami
- Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik yang terpercaya
- Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi
- Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat

NILAI-NILAI DASAR



- G** Grow and Improve Continuously
- R** Respect and Care
- E** Excellent Service
- A** Absolute Integrity
- T** Trust and Team Spirit

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan telah dikaji secara mendalam sejalan dengan perkembangan bisnis BFI yang dinamis. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



PENDIRIAN

PT BFI Finance Indonesia Tbk (“Perusahaan” atau “BFI”) merupakan salah satu pelopor perusahaan pembiayaan di Indonesia. Bermula sebagai PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia, perusahaan kongsi dengan Manufacturer Hanover Leasing Corporation (“MHLC”) dari Amerika Serikat, Perusahaan didirikan pada 7 April 1982 berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di

Jakarta dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Kepemilikan saham MHLC adalah 70%, sedangkan sisanya dimiliki warga Indonesia.

Perusahaan memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan sebagai perusahaan leasing dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982.

Pada 1986, PT Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd., Hong Kong, mengambil alih kepemilikan MHLC di Perusahaan dan kemudian mengubah nama Perusahaan menjadi PT Bunas Finance Indonesia berdasarkan Akta yang dibuat di hadapan Inge Hendarmin, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 14 Agustus 1986, dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9677.HT.01.04. TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 November 1986, Tambahan No. 1451.

PERKEMBANGAN

Pada 1990, Perusahaan menjadi salah satu perusahaan pembiayaan pertama yang *go public* setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau "BEI") dengan kode saham BFIN. Nama dan status Perusahaan disesuaikan menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk.

Pada tahun yang sama, BFI mengubah izin operasinya menjadi perusahaan bisnis *multifinance* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Setelah melewati krisis keuangan Asia tahun 1997, Perusahaan berhasil merestrukturisasi utangnya pada 2001 dan mengubah namanya menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Notaris No. 116 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 27 Juni 2001, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668.HT.01.04. TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.

Pada 20 Februari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan No. KEP-038/ KM.5/2006 untuk memberlakukan secara surut izin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk sejak tanggal disetujuinya perubahan nama Perusahaan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668.HT.01.04. TH.2001 tanggal 24 Juli 2001.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar yang terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 20 Juni 2016, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan penerbitan saham hasil pelaksanaan *Management & Employee Stock Option Program* (MESOP) untuk Tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima oleh Menhukham No. AHU-AH.01.03-0061069 tanggal 27 Juni 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078939.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 dalam rangka perubahan Pasal 4 ayat (2) tentang Modal. Sampai dengan Laporan Tahunan Terintegrasi ini diselesaikan, perubahan ini belum diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

BFI KINI

Saat ini, BFI telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dengan jaringan dan cakupan produk terluas, didukung oleh 8.941 karyawan di 209 kantor cabang dan 96 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BFI adalah perusahaan penyedia jasa pembiayaan ternama yang telah menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dan meraih berbagai penghargaan, di antaranya predikat "Perusahaan Multifinance dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus" dari majalah InfoBank selama sebelas tahun berturut-turut (2006-2016).

Per 31 Desember 2016, Trinugraha Capital & Co SCA, lembaga keuangan yang berbasis di Luxembourg adalah pemegang saham mayoritas BFI sebesar 42,81%.

Sejak tahun 2013, Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan.

JEJAK LANGKAH

1982

- Perusahaan didirikan dengan nama PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia.
- Memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan (*leasing*).

1990

- Memperoleh izin operasi untuk menjalankan bisnis *multifinance* yang diperbarui pada 1990.
- *Go Public* di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau "BEI") dengan kode saham BFIN dengan menerbitkan 25% saham baru (2.125.000 lembar) yang ditawarkan ke publik dengan nominal Rp1.000,00 per saham seharga Rp5.750,00 per saham.
- Status dan nama Perusahaan berubah menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk.

1994

- Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") sebanyak 28.829.558 saham.

2001

- Menyelesaikan restrukturisasi keuangan yang menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas.
- Nama Perusahaan berubah menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk.

1986

- Diakuisisi oleh PT Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd., Hong Kong.
- Nama Perusahaan berubah menjadi PT Bunas Finance Indonesia.

1993

- Pembagian dividen saham pertama dengan perhitungan 1 (satu) saham baru untuk 10 (sepuluh) saham yang dimiliki, sebanyak 1.062.500 saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per saham.

1997

- Pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000,00 per saham menjadi Rp500,00 per saham.

2002

- Penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* (Obligasi Wajib Konversi atau "MCB") yang dikonversi menjadi 414.384.585 saham biasa pada 2006.

2006

- Amandemen izin usaha Perusahaan pada 20 Februari 2006 untuk mengkomodasi perubahan nama Perusahaan.
- Pelunasan seluruh utang sesuai dengan proses restrukturisasi keuangan.

2011

- Trinugraha Capital & Co SCA menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 44,95%.
- Meraih peringkat 'A(idn)' dari Fitch Ratings.

2015

- Program pembelian kembali saham yang beredar (stock buyback) untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan.
- Meraih peringkat 'A+(idn)' Outlook Positif dari Fitch Ratings dari sebelumnya 'A+(idn)' Outlook Stabil.

2007

- Penerbitan obligasi perdana berupa Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
- Meraih peringkat Baa1(id) dari Moody's Investors Service.

2012

- Peluncuran Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham ("MESOP") sebesar maksimal 5% ekuivalen saham baru dari jumlah saham Perusahaan.
- Perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari Rp500,00 per saham menjadi Rp250,00 per saham.

2016

- Perusahaan meraih peringkat 'AA-(idn)' Outlook Stabil dari Fitch Ratings dari sebelumnya 'A+(idn)' Outlook Positif.

BIDANG USAHA

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (“PMK 84”), ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal di bidang:

- a. Sewa Pembiayaan;
- b. Pembiayaan Konsumen;
- c. Anjak Piutang; dan
- d. Usaha Kartu Kredit.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 29”), ruang lingkup diubah menjadi:

- a. Pembiayaan Investasi;
- b. Pembiayaan Modal Kerja;
- c. Pembiayaan Multiguna; dan
- d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Laporan perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI” atau “Perusahaan”) pada Pasal 3, telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 30 April 2015 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0934483. AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 serta telah dicatat pada Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank sesuai surat dari Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank OJK No. S-4171/NB.111/2015 tanggal 5 Agustus 2015.



DODY TRI ARIYANTO

UD Tri Mulia, Tuban, Jawa Timur

Saya telah bermitra dengan BFI sejak 2010. Saat itu saya mengetahui BFI dari media massa dan beranggapan bahwa BFI adalah perusahaan yang sudah mapan. Kerja sama dengan BFI cukup baik, karena ada prosedur yang jelas, dapat diandalkan, dan pelayanan yang sopan serta ramah. Saya tidak ragu untuk terus bekerja sama dengan BFI di masa depan.

SEGMENT USAHA

Karena belum adanya aturan pelaksanaan mengenai pengklasifikasian pembiayaan sesuai POJK 29, segmen usaha Perusahaan masih mengacu kepada kegiatan Perusahaan sesuai dengan PMK 84, yaitu Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan.

Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen meliputi pembiayaan kendaraan mobil baru yang dibeli melalui *dealer*, dan kendaraan mobil dan motor bekas melalui *dealer* atau tenaga *sales* Perusahaan (*non-dealer*).

1. Pembiayaan Kendaraan Mobil Baru dan Bekas (*Dealer*)

Pembiayaan kendaraan mobil baru dan bekas melalui *dealer* telah menjadi bisnis inti BFI selama lebih dari 20 tahun. Produk yang dipasarkan di hampir semua kantor kami cabang ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan kendaraan mobil baru dan bekas melalui rekanan *dealer*. Jangka waktu pembiayaan satu hingga empat tahun dengan suku bunga tetap.

2. Pembiayaan Kendaraan Mobil Bekas dan Motor Bekas (*Non-Dealer*)

Pembiayaan *non-dealer* diperkenalkan pertama kali pada 2006 untuk melayani kebutuhan para pelanggan secara langsung (pemilik kendaraan mobil dan motor). Hal ini termasuk para pelanggan yang melakukan transaksi *repeat order*, pelanggan baru dari referensi sesama pelanggan (program *Customer-Get-Customer*), atau melalui agen penjualan lepas dan *telesales call centre* (pemasaran dan penjualan langsung). Target pemasarannya adalah kalangan masyarakat berpenghasilan bawah hingga menengah.

Sewa Pembiayaan

Bisnis Sewa Pembiayaan meliputi jasa keuangan yang ditujukan bagi pelanggan perorangan dan badan usaha yang melakukan pembelian atau *sale and leaseback* atas alat-alat berat, mesin-mesin, kendaraan bermotor dan peralatan lainnya, baik untuk kondisi baru maupun bekas. Pelanggan di bidang Sewa Pembiayaan BFI umumnya

berasal dari sektor industri pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.

PRODUK BERDASARKAN JENIS ASET

Segmen usaha Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan Sewa Perusahaan mencakup portofolio produk berdasarkan jenis aset sebagai berikut:

1. Kendaraan Mobil Baru;
2. Kendaraan Mobil Bekas;
3. Kendaraan Motor Bekas;
4. Alat-Alat Berat dan Lain-Lain, terdiri dari:
 - alat-alat berat;
 - truk dan alat transportasi umum;
 - mesin-mesin; dan
 - lain-lain.
5. Properti.

Pembahasan lebih lanjut mengenai portofolio produk akan disajikan pada bagian Tinjauan Usaha Per Produk Berdasarkan jenis Aset dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 128-134).

ERFIN ANRIBALI

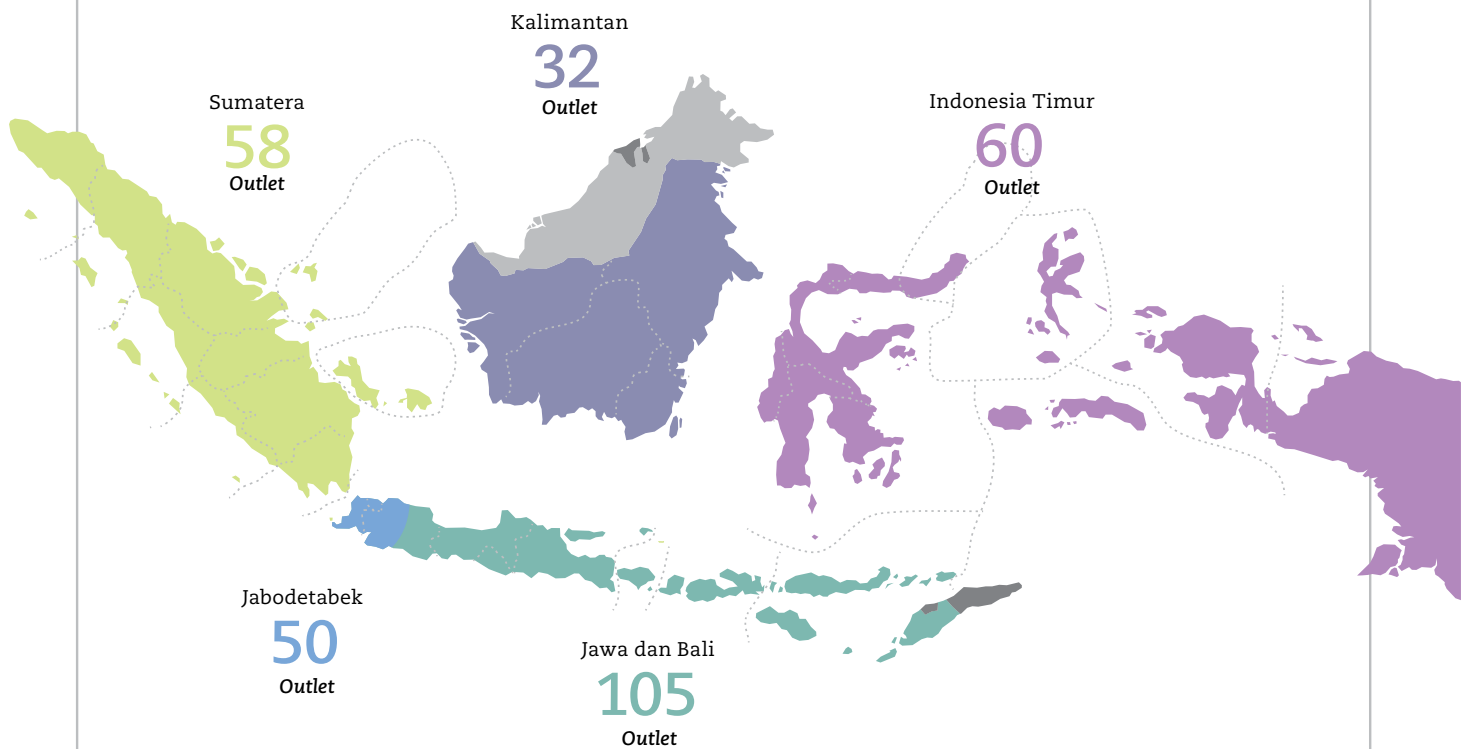
PT Hasjrat Abadi - Ternate, Maluku Utara

Kami sudah bermitra dengan BFI sejak November 2014. Faktor penting dalam kerja sama ini adalah mapannya posisi BFI sebagai sebuah perusahaan sehingga BFI sangat memahami kebutuhan mitra seperti kami dan para pelanggan kami.

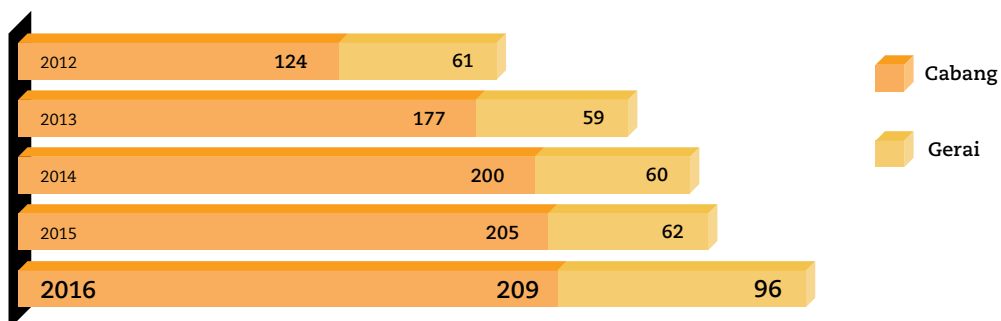


PETA DAN JARINGAN OPERASIONAL

Saat ini BFI memiliki satu kantor pusat dan 305 outlet yang melayani konsumen dan pelanggan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

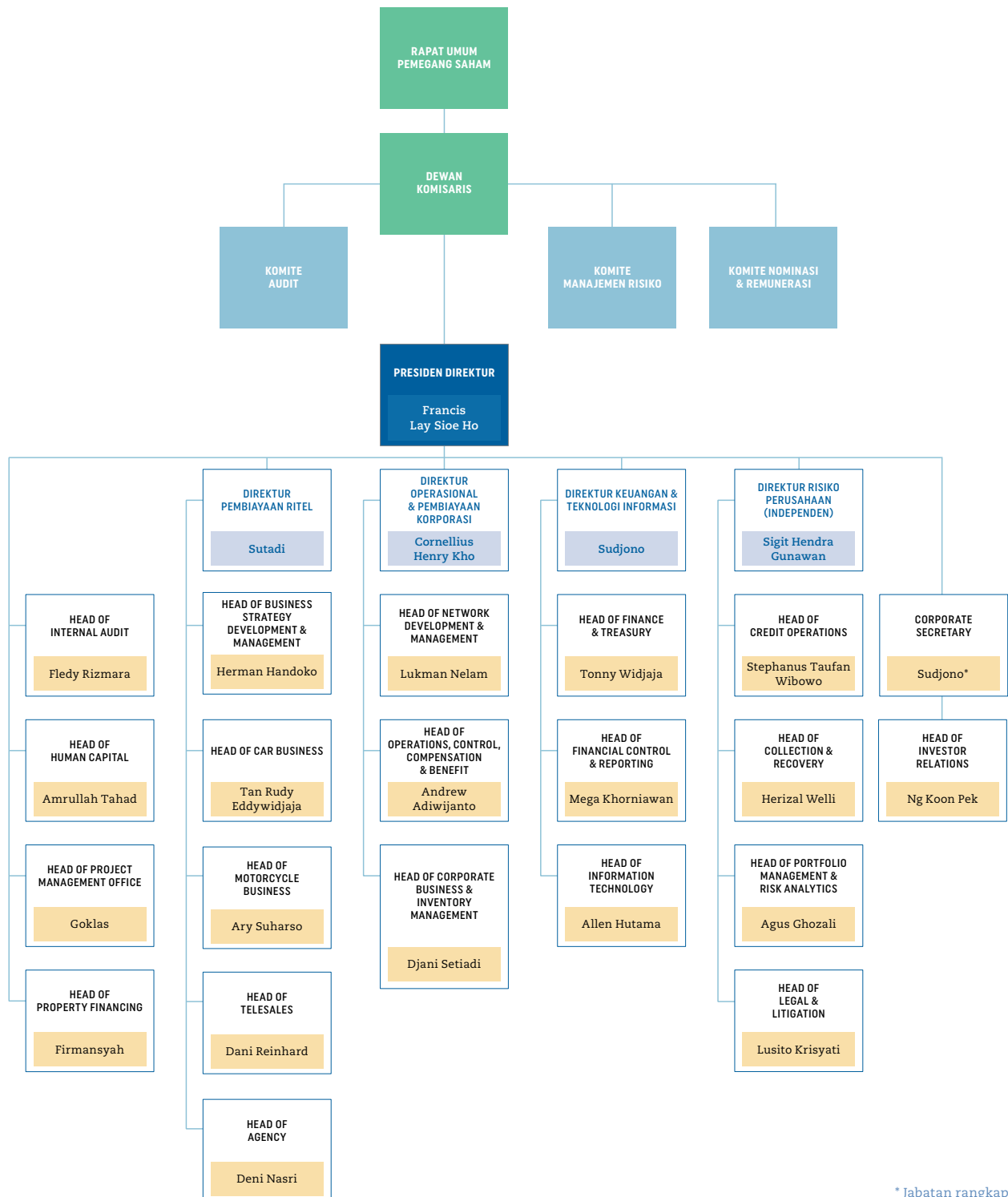


Grafik 8 – JUMLAH OUTLET



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BFI pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



* Jabatan rangkap

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 43 tanggal 25 April 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-00045172 tanggal 28 April 2016, susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1	Presiden Komisaris	Kusmayanto Kadiman
2	Komisaris (Independen)	Johanes Sutrisno
3	Komisaris (Independen)	Alfonso Napitupulu
4	Komisaris (Independen)	Emmy Yuhassarie
5	Komisaris	Dominic John Picone
6	Komisaris	Sunata Tjiterosampurno



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir pada 1954, usia 62 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 dan diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Power, Komisaris PT Tamaris Hidro, Presiden Komisaris PT iForte Solusi Infotek dan Presiden Komisaris PT Setiabudi Investment Management. Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris di BFI, beliau menjabat sebagai

komisaris dan penasihat di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan pembangkit listrik sejak tahun 2009, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada 2004-2009, Ketua Asian-Europe University Network (ASEA-UNINET) pada 2002-2004, Rektor Institut Teknologi Bandung ("ITB") pada 2001-2004, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB pada 1998-2001, Kepala Laboratorium Kontrol ITB pada 1995-1998, Direktur Kelompok Usaha di Jakarta pada 1993-1995, dan Direktur Pusat Komputer ITB pada 1990-1993. Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari Australian National University, Canberra, Australia, pada 1988, serta Sarjana Teknik Fisika dari ITB pada 1977.



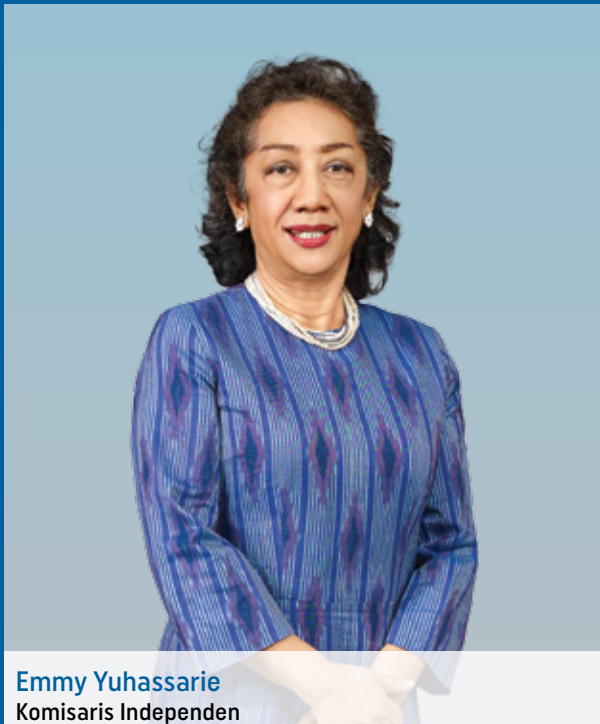
Johanes Sutrisno
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir pada 1951, usia 65 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021 serta menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Bentoel Internasional Investama Tbk sejak Maret 2010 hingga 31 Maret 2016. Beliau bergabung dengan BFI sebagai *Credit Officer* (1982-1991), kemudian menjabat sebagai Direktur (1991-1999) dan Presiden Komisaris (2000-2011). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Carsurin dari April 2007 hingga Juni 2013, bergabung dengan Mutual International Finance Corporation (1980-1982), dan sebagai Auditor di SGV, Utomo, Mulia & Co. (1973-1976). Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* (M.B.A.) dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta, pada 2009 dan Sarjana Ekonomi Manajemen (Drs.) dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1980.



Alfonso Napitupulu
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir pada 1950, usia 66 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 80 tanggal 15 Juni 2011 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021 serta menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Managing Partner* dari Kantor Hukum atau Law Office of Alfonso Napitupulu & Partners, Jakarta, sejak tahun 1993, Direktur Utama PT Nana Mandiri Dwikarya sejak tahun 1989, Komisaris Independen PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance) sejak tahun 2015, Komisaris Utama PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) sejak 2016, dan Staf Ahli Pengelola Statuter AJB Bumiputera 1912 sejak 2016. Sebelum bergabung dengan BFI, beliau pernah bekerja di Kantor Pengacara Alfonso Giunseng & Kolopaking, Jakarta, pada 1988-1993, Praktisi *International Lawyer* di Law Office of Bronson, Bronson & McKinnon, San Francisco, California, Amerika Serikat, pada 1984-1985, Kantor Hukum Gani Djemat & Partners pada 1975-1988, serta sebagai Advokat Konsultan Hukum untuk Pasar Modal dan Hak Kepemilikan Intelektual pada 1976. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum (Perdata) dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1975.



Emmy Yuhassarie
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir pada 1950, usia 66 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021 serta menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Kehormatan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPPM") sejak tahun 2012, Penasihat HKHPPM, Dewan Pengawas Indonesia Institute of Corporate Directorship (IICD) sejak tahun 2012, Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium/ INALUM (Persero) sejak tahun 2007 dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara BUMN Republik Indonesia pada 2007-2012, dan Konsultan Domestik Bank Dunia dan Indonesia National Committee of Good Governance pada 2004-2005. Beliau meraih gelar *Master of Law* (L.L.M.) dari University of California (UC), Berkeley, Amerika Serikat, pada 1982 dan Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1979.



Dominic John Picone
Komisaris

Warga negara Australia, lahir pada 1978, usia 38 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Singapura. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015-2020. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi dari tahun 2011 hingga Maret 2015. Saat ini beliau juga menduduki posisi sebagai *Managing Director* dan *Head of Financial Services (Asia, excl. India)* TPG Capital (S) Pte. Ltd. di Singapura sejak tahun 2005. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Analis di Divisi *Investment Banking Credit Suisse First Boston* di Melbourne, Australia (2004-2005), dan berbagai posisi di Divisi *Consumer Finance ANZ Bank*, Australia (1998-2004). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum (*Bachelor Degree in Laws*) pada 2003 dan *Bachelor of Commerce (Honours-Finance)* pada 2001 dari University of Melbourne, Australia.



Sunata Tjiterosampurno
Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir pada 1972, usia 44 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 Juli 2015 untuk periode 2015-2020. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dari Mei 2013 hingga September 2014. Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director* Northstar Advisors Pte. Ltd. dimulai sejak tahun 2006, Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) sejak tahun 2009, Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk sejak tahun 2011, Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Tbk sejak 2013, dan Komisaris PT Multi Adiprakarsa Manunggal sejak 2016. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris, anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2015), Direktur *Investment Banking* PT. Danareksa Sekuritas (2004-2006), dan Konsultan di Boston Consulting Group, Jakarta (1998-2004). Beliau memulai karir sebagai *Assistant Vice President* untuk Riset Ekuitas PT Lippo Securities – SBC Warburg (1995-1998). Beliau memperoleh gelar *Master of Finance (Merit)* dari London Business School, Inggris, pada 2002, dan *Bachelor of Business Administration (Distinction)* dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, pada 1995.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 43 tanggal 25 April 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0045172 tanggal 28 April 2016, susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

1	Presiden Direktur	Francis Lay Sioe Ho
2	Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	Cornellius Henry Kho
3	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	Sudjono
4	Direktur Pembiayaan Ritel	Sutadi
5	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Sigit Hendra Gunawan



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

Warga negara Indonesia, lahir pada 1948, usia 68 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau mulai bekerja sebagai *Executive Officer* di Kementerian Keuangan atau *Ministry of Finance* di Singapura pada 1972-1973. Beliau bergabung dengan PT Indoinvest pada 1975 sebagai *Treasury Officer* dan kemudian menjabat sebagai *Credit Manager* hingga tahun 1980. Pada 1983 beliau diangkat sebagai Direktur BFI, dan kemudian menjabat sebagai

Presiden Direktur pada 1986. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016, beliau diangkat kembali sebagai Presiden Direktur untuk periode 2016-2021. Beliau meraih gelar *Bachelor of Business Administration (B.B.A.)* dari National University of Singapore (NUS) di Singapura pada 1972 dan *Master of Business Management (M.B.M.)* dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 1975.



Cornelius Henry Kho*
Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi

Warga negara Indonesia, lahir pada 1966, usia 50 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 15 Juni 2011 dan diangkat kembali untuk menjabat posisi yang sama berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Mei 2014 yang membawahi Divisi Operasional Perusahaan, Pengembangan Jaringan dan Pembiayaan Korporasi, beliau menjabat sebagai Direktur yang membawahi berbagai departemen di BFI pada 2007-2014, antara lain, *Human Capital* hingga tahun 2012, *Finance and Treasury* serta Audit Internal hingga tahun 2014 dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan hingga Juni 2014. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawas Keuangan dan *Treasury* BFI (1996-1997), Pengawas Keuangan BFI (1992-1996) dan Auditor di Prasetio, Utomo and Co. (1989-1992). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1990.

*Mengundurkan diri per 31 Januari 2017



Sudjono
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi

Warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 46 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 untuk periode 2014-2019, merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi dan berbagai jabatan lainnya di BFI pada 1993 hingga April 2014, serta Anggota Komite Manajemen Risiko pada 2003-2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai Auditor Senior Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) - anggota Deloitte Touche Tohmatsu International pada 1991-1993. Beliau meraih gelar *Enterprise Risk Manager (ERM™)* dari Asia Risk Management Institute (ARiMI) dan National University of Singapore (NUS) di Singapura pada 2009, *Master of Business Administration (M.B.A.)* dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Jakarta, pada 2006, dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1993.



Sutadi
Direktur Pembiayaan Ritel

Warga negara Indonesia, lahir pada 1974, usia 42 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang. Beliau menjabat sebagai Direktur Pembiayaan Ritel berdasarkan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 25 Juni 2014 untuk periode 2014-2019. Sebelumnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan lainnya di BFI, antara lain, Kepala Divisi Bisnis Ritel hingga April 2014, Kepala Departemen dan *Associate Division Head* (2008-2012), Pimpinan Regional atau *Regional Manager* (2006-2008), Pimpinan Cabang atau *Branch Manager* (2004-2006), *Branch Establishment Manager* (2001-2004), dan *Branch Manager* (2000-2001). Beliau juga pernah menjabat sebagai *Sales Executive* bidang *Marketing Export* PT Tjiwi Kimia Pulp & Paper (1999-2000) serta *Collection & Credit Analyst Officer* PT Bunas Finance Indonesia (1997-1999). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1998.



Sigit Hendra Gunawan
Direktur Risiko Perusahaan (Independen)

Warga negara Indonesia, lahir pada 1968, usia 48 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang. Beliau menjabat sebagai Direktur Risiko Perusahaan (Independen) sejak April 2016 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau bergabung di BFI sebagai *Head of Enterprise Risk* pada 2015. Sebelumnya, beliau meniti karir di Adira Finance pada 2005-2015 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kredit atau *Deputy Director - Head of Credit & Collection*, dan di PT Astra Sedaya Finance sebagai *Account Management Department Head* dan *Credit Analyst and Risk Department Head (Fleet Division)* pada Januari 1994 hingga Agustus 2005. Beliau memperoleh Sertifikasi Manajemen Bisnis (*Certified Business Management*) pada 2004 dan *Certified Business Management-Operation* pada 2003, keduanya dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1993.

PROFIL KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT



Emmy Yuhassarie
Ketua Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir pada 1950, usia 66 tahun. Jabatan beliau selaku Ketua Komite Audit dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Profil beliau sudah disajikan sebelumnya dalam Profil Dewan Komisaris (halaman 59).



Edy Sugito
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1964, usia 52 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia dan Komisaris Independen pada beberapa perusahaan, antara lain, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2005-2012), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000-2005) dan Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2000). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada 1991.



Friso Palilingan
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir pada 1983, usia 33 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau saat juga menjabat sebagai *Partner* di PKF Indonesia, *Vice Chairman* di NBP Capital, anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI"), anggota Komite Audit pada PT Intiland Development Tbk dan PT Duta Intidaya Tbk. Sebelumnya, beliau merupakan *Partner* dari salah satu kantor akuntan peringkat lima besar dunia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada 2005 dan Magister Akuntansi pada 2008, keduanya dari Kwik Kian Gie School of Business (sebelumnya dikenal sebagai Institut Bisnis & Informatika Indonesia) di Jakarta. Beliau juga memperoleh gelar *Certified Public Accountant (CPA)* pada 2008 dan *Chartered Accountant (CA)* pada 2013, keduanya dari IAI, serta *Certified Audit Committee Practitioner* dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada 2016.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO



Johanes Sutrisno
Ketua Komite Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, lahir pada 1951, usia 65 tahun. Beliau diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Saat ini, Johannes Sutrisno juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Profil beliau sudah disajikan sebelumnya dalam Profil Dewan Komisaris (halaman 58).



Jono Effendy
Anggota Komite Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, lahir pada 1974, usia 42 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau adalah *Co-Founder* dan *Managing Director* PT Kiran Resources Indonesia (sejak Juni 2004). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di PT Commonwealth Life (sejak November 2014) serta anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Commonwealth (sejak Maret 2013) dan PT Bank BNP Paribas Indonesia (sejak Juli 2007). Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di beberapa bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Sebelumnya, dalam periode Juli 2001 hingga Februari 2004, beliau memegang beberapa posisi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), antara lain: *Group Head of Research*

in the area of Banking Landscape, Group Head of Consultant Management Unit dan Coordinator of Special Staff of IBRA Chairman. Beliau memulai kariernya di PT Tanjung Johor Wood Industry, Jakarta (Desember 1993 - Juli 1996) sebagai Akuntan, dan kemudian sebagai Auditor Senior di Arthur Andersen, Jakarta (Agustus 1996 - Juli 1998) dan sebagai Konsultan Senior di Deloitte Touche, Jakarta (Desember 1998 - Juli 2001). Beliau memperoleh gelar *Master* bidang Keuangan dari Universitas Pelita Harapan di Tangerang pada 2003, *Sarjana Ekonomi Akuntansi* dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada 1996, serta memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Indonesia, dan *International Certificate in Banking and Regulation* dari Global Association of Risk Professionals (GARP), Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko yang berbasis di New York, Amerika Serikat pada 2011. Beliau juga memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko untuk Perusahaan Asuransi Tingkat 5 dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) pada 2015.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



Alfonso Napitupulu
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Indonesia, lahir pada 1950, usia 66 tahun. Jabatan beliau selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen yang diangkat kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016 untuk periode 2016-2021. Profil beliau sudah disajikan sebelumnya dalam Profil Dewan Komisaris (halaman 58).



Andrew Adiwijanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Indonesia, lahir pada 1968, usia 48 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau juga menjabat sebagai *Head of Operations and Control* sejak tahun 2012 dan *Head of Compensation and Benefit* sejak 2014. Beliau bergabung dengan BFI pada 1993 sebagai *Marketing Officer* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Makassar, Denpasar dan Palembang, Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Sumatera, dan Kepala Departemen (*Department Head*) *Quality Service, Corporate Service, Human Capital* dan *Branch Operations*. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS), Jawa Timur, pada 1992, dan *Master of Business Administration (M.B.A.)* dari Universitas Gadjah Mada di Jakarta pada 2013. Beliau juga memperoleh sertifikat khusus mengikuti kursus intensif "*Human Capital Management: Making HR & Business Partnership Work*" dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 2008.



Priyambodo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Indonesia, lahir pada 1953, usia 63 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BFI sejak April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 untuk periode 2016-2021. Beliau pernah bergabung di BFI pada 1983 hingga tahun 2013 dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Manager Payroll Compensation* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya sebelumnya, antara lain, *Accounting Manager* dan *Payroll Unit Head*. Beliau memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Akademi Akuntansi Indonesia, Jakarta, pada 1980.

PROFIL MANAJEMEN SENIOR

KANTOR PUSAT

Berikut adalah Manajemen Senior Kantor Pusat yang kedudukannya setingkat di bawah Direksi:

MANAJEMEN SENIOR – KANTOR PUSAT

Duduk, dari kiri ke kanan

Head of Corporate Business
and Inventory Management Djani Setiadi

Head of Operations, Control,
Compensation and Benefit Andrew Adiwijanto

Head of Finance
and Treasury Tonny Widjaja

Berdiri, dari kiri ke kanan

Head of Car Business Tan Rudy Eddywidjaja

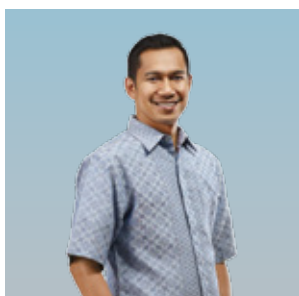
Head of Collection
and Recovery Herizal Welli

Head of Human Capital Amrullah Tahad

Head of Network
Development
and Management Lukman Nelam

Head of Business
Strategy Development
and Management Herman Handoko





Amrullah Tahad
Head of Human Capital

Warga negara Indonesia, lahir pada 1976, usia 40 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau bergabung dengan Perusahaan sejak Januari 2015 dan menjabat sebagai *Head of Human Capital*. Sebelum bergabung dengan BFI, beliau pernah menjabat sebagai *Group Head - Human Capital Business Partner* di Sampoerna Financial Group pada 1 September 2012 hingga 31 Desember 2014, berkarir di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai *Regional Business Partner Manager* (2011-2012), *People Development* (2008-2010), *Branch Manager* untuk *Micro Banking* (2005-2008), dan *Business Manager* untuk *Consumer Banking* (2004-2005). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (Hubungan Internasional) dari Universitas Hasanuddin di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 1999. Beliau juga memperoleh sertifikat khusus dalam rangka mengikuti Seminar “*Managing Talent across Generation and Workplace Diversity*” oleh Clariden di Singapura pada 2015.



Andrew Adiwijanto
Head of Operations, Control,
Compensation and Benefit

Warga negara Indonesia, lahir pada 1968, usia 48 tahun. Beliau menjabat sebagai *Head of Operations and Control* sejak tahun 2012 dan merangkap sebagai *Head of Compensation and Benefit* sejak tahun 2014. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 13 April 2015. Profil beliau sudah disajikan sebelumnya dalam Profil Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris (halaman 68).



Djani Setiadi
Head of Corporate Business
and Inventory Management

Warga negara Indonesia, lahir pada 1967, usia 49 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang. Beliau bergabung dengan BFI pada 1997 sebagai *Operations Officer* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Tangerang, Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandar Lampung dan Pontianak, *Head of Credit Operations* dan merangkap *Head of Collection and Recovery* mulai tahun 2015. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1991. Beliau juga memperoleh sertifikat khusus mengikuti *Senior Management Development Program (SMDP) batch ke-1* dari Prasetya Mulya Business School pada 2011. Beliau menjabat sebagai *Head of Corporate Business and Inventory Management* sejak September 2016.



Herizal Welli
Head of Collection
and Recovery

Warga negara Indonesia, lahir pada 1969, usia 47 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau bergabung dengan BFI pada 1996 sebagai *Marketing Officer* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Wakil Pimpinan Cabang (*Deputy Branch Manager*) di Pekanbaru, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Bengkulu, Padang dan Jakarta-Pondok Indah, *Product Manager*, *Unit Head of Asset Management* dan *Department Head of Credit* di Kantor Pusat, Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Barat 2 dan Jabodeta. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Newcastle, New South Wales, Australia, pada 1995. Beliau menjabat sebagai *Head of Collection and Recovery* sejak September 2016.



Herman Handoko
Head of Business
Strategy Development
and Management

Warga negara Indonesia, lahir pada 1978, usia 38 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau bergabung dengan BFI pada 2003 sebagai Kepala Operasional dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, *Marketing Officer Leasing* dan *Used Car*, Kepala Sales, Kepala Produk Mobil, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Jakarta Barat-Meruya, Pimpinan Area (*Area Manager*) di DKI Jakarta, *Associate Department Head of Network and Development*, *Department Head of Branch Management*, dan Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jakarta, Depok dan Tangerang. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, pada 2002. Beliau menjabat sebagai *Head of Business Strategy Development and Management* sejak 2016.



Lukman Nelam
Head of Network
Development
and Management

Warga negara Indonesia, lahir pada 1965, usia 51 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau bergabung dengan BFI pada 1995 sebagai *Marketing Officer* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Pekanbaru dan Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Sumatera 1. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada 1995. Beliau juga memperoleh sertifikat khusus mengikuti *Management Development Program (MDP)* dari Asian Institute of Management (AIM) di Filipina pada 2011. Beliau menjabat sebagai *Head of Network Development and Management* sejak 2015.



Tan Rudy Eddywidjaja
Head of Car Business

Warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 46 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau bergabung dengan BFI pada 1997 sebagai Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Surabaya dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Barat, dan *Department Head of Product Management*. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Putra Bangsa di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada 1996. Beliau menjabat sebagai *Head of Car Business* sejak 2014.



Tonny Widjaja
Head of Finance & Treasury

Warga negara Indonesia, lahir pada 1967, usia 49 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau bergabung dengan BFI pada 1994 sebagai *Assistant Manager of Treasury Department*. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1990, dan mengikuti beberapa program pendidikan dan pelatihan; termasuk *General Management Executive Programme* di National University of Singapore (NUS) pada 2009. Beliau menjabat sebagai *Head of Finance & Treasury* sejak 1996.

KANTOR WILAYAH

Berikut adalah Manajemen Senior yang menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*):

MANAJEMEN SENIOR – KANTOR WILAYAH

Duduk, dari kiri ke kanan

Pimpinan Wilayah Sumatera 3	Iwan
Pimpinan Wilayah Kalimantan 1	John Piter Sinaga
Pimpinan Wilayah Jawa Tengah	Rachmadi
Pimpinan Wilayah Jawa Timur 2	I Kadek Tirtayasa
Pimpinan Wilayah Kalimantan 2	Hernandi Kusno

Berdiri, dari kiri ke kanan

Pimpinan Wilayah Sulawesi 2	Susinto Tenggono Then
Pimpinan Wilayah Sulawesi 1	Khenriek Tjandra
Pimpinan Wilayah Sumatera 2	Sudi Hartono
Pimpinan Wilayah Jawa Barat 1	Stefanus Wibowo
Pimpinan Wilayah Jawa Timur 1	Tan Eng Han
Pimpinan Wilayah Jadeta dan Jawa Barat 2	Stanly Darisang





Stanly Darisang
Pimpinan Wilayah Jadeta
dan Jawa Barat 2

Warga negara Indonesia, lahir pada 1971, usia 45 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau bergabung dengan BFI pada 1996 sebagai *Marketing Leasing Officer* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Pontianak, Jakarta-Pondok Indah dan Banjarmasin, dan Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Kalimantan 1. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Kristen Petra di Surabaya, Jawa Timur pada 1996. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Barat 2 sejak Oktober 2015 dan merangkap wilayah Jadeta (Jakarta, Depok dan Tangerang) sejak September 2016.



Stefanus Wibowo
Pimpinan Wilayah
Jawa Barat 1

Warga negara Indonesia, lahir pada 1981, usia 35 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Beliau bergabung dengan BFI pada 2003 sebagai *Management Trainee* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Jakarta-Kemayoran, Jakarta-Sunter, dan Pimpinan Area (*Area Manager*) untuk wilayah DKI Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta, pada 2003. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Barat 1 sejak Januari 2015.



Rachmadi
Pimpinan Wilayah
Jawa Tengah

Warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 46 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Beliau bergabung dengan BFI pada 2006 sebagai Pimpinan Cabang (*Branch Manager*), antara lain untuk daerah Solo dan Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) pada 1992. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2011.



Tan Eng Han
Pimpinan Wilayah
Jawa Timur 1

Warga negara Indonesia, lahir pada 1975, usia 41 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Beliau bergabung dengan BFI pada 1997 sebagai *Management Trainee* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Cirebon dan Pimpinan Area (*Area Manager*) untuk wilayah Karawang dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Provinsi Jawa Barat, pada 1993. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Timur 1 sejak Juni 2016.



I Kadek Tirtayasa
Pimpinan Wilayah
Jawa Timur 2

Warga negara Indonesia, lahir pada 1971, usia 45 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Denpasar, Provinsi Bali. Beliau bergabung dengan BFI pada 1997 sebagai *Marketing Executive* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) dan Pimpinan Area (*Area Manager*) untuk wilayah Denpasar, Provinsi Bali. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Udayana, Denpasar, pada 1995. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Timur 2 (termasuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara) sejak 2014.



Sudi Hartono
Pimpinan Wilayah
Sumatera 2

Warga negara Indonesia, lahir pada 1971, usia 45 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Beliau bergabung dengan BFI pada 1994 sebagai *Marketing Staff* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, *Marketing Officer*, Kepala Perwakilan di Pangkal Pinang, Padang, Bandar Lampung, Kepala Bagian Marketing Kantor Cabang Pekanbaru dan Palembang, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Jambi, Pimpinan Area (*Area Manager*) untuk wilayah Jambi dan Medan. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Sains & Teknologi T.D. Pardede di Medan, Sumatera Utara, pada 1996. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Sumatera 2 sejak tahun 2014.



Iwan
Pimpinan Wilayah
Sumatera 3

Warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 46 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Beliau bergabung dengan BFI pada 1995 sebagai *Marketing Officer* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Banjarmasin, Palembang, Jambi dan Lampung. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tridinanti di Palembang, Sumatera Selatan, pada 1994. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi dan Lampung sejak tahun 2005.



John Piter Sinaga
Pimpinan Wilayah
Kalimantan 1

Warga negara Indonesia, lahir pada 1969, usia 47 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bergabung dengan BFI pada 1997 sebagai *Marketing Staff* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Kepala Bagian Marketing, Wakil Pimpinan Cabang (*Deputy Branch Manager*) di Tangerang, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Pamulang dan Tangerang, serta Pimpinan Area (*Area Manager*) di Pekanbaru, Provinsi Riau. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara di Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada 1994. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Kalimantan 1 sejak tahun 2015.



Hernandi Kusno
Pimpinan Wilayah
Kalimantan 2

Warga negara Indonesia, lahir pada 1969, usia 47 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Beliau bergabung dengan BFI pada 1994 sebagai Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Samarinda dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain Koordinator Wilayah (*Regional Coordinator*) untuk Kalimantan Timur pada 2002. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1992. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Kalimantan 2 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) sejak 2007.



Khenriek Tjandra
Pimpinan Wilayah
Sulawesi 1

Warga negara Indonesia, lahir pada 1973, usia 43 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau bergabung dengan BFI pada 2002 sebagai Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, *Branch Manager* di Makassar, Pimpinan Area (*Area Manager*) untuk wilayah Palu dan Makassar. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar, pada 1996. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Sulawesi 1 sejak 2015.



Susinto Tenggono Then
Pimpinan Wilayah Sulawesi 2

Warga negara Indonesia, lahir pada 1973, usia 43 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau bergabung dengan BFI pada 1994 sebagai *Marketing Executive* dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya, antara lain, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) di berbagai daerah Sumatera (Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Palembang), Jawa Timur dan Bali (Denpasar, Malang dan Surabaya), Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, *Department Head of Branch Development* dan *Division Head of Collection*. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Tridinanti di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada 1995. Beliau menjabat sebagai Pimpinan Wilayah (*Regional Manager*) untuk wilayah Sulawesi 2 sejak 2015.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perusahaan, komposisi pemegang saham BFI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 - KOMPOSISI SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

KETERANGAN	NOMINAL Rp250 PER SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	PERSentase SAHAM
Modal Dasar	2.000.000.000	500.000.000.000	100,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.596.711.562	399.177.890.500	79,84%
Jumlah Saham dalam Portepel Pemegang Saham:	403.288.438	100.822.109.500	20,16%
Trinugraha Capital & Co SCA	683.524.966	170.881.241.500	42,81%
PT BFI Finance Indonesia Tbk*	100.273.200	25.068.300.000	6,28%
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	812.913.396	203.228.349.000	50,91%
Jumlah	1.596.711.562	399.177.890.500	100,00%

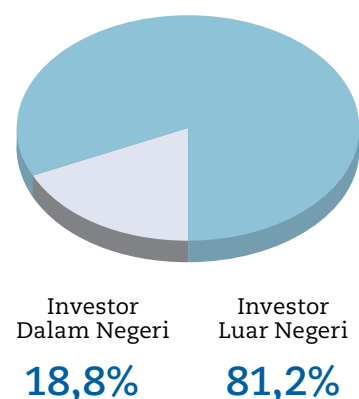
Kepemilikan saham dari anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 - KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM	PERSentase SAHAM
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	38.988.508	2,44%
Cornellius Henry Kho	Direktur	12.171.998	0,76%
Sudjono	Direktur	3.338.000	0,21%
Sutadi	Direktur	2.200.000	0,14%
Sigit Hendra Gunawan	Direktur (Independen)	1.000.000	0,06%
Johanes Sutrisno	Komisaris (Independen)	248	0,00%
Jumlah		57.698.754	3,61%

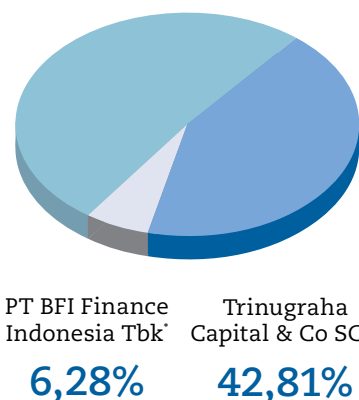
Struktur kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk per akhir 2016 terdiri dari 900 individu dan institusi, di mana 81,2% di antaranya terdaftar di luar negeri dan 18,8% sisanya di dalam negeri. Terdapat dua institusi yang memegang saham melebihi 5%, yaitu Trinugraha Capital & Co SCA, Luxembourg dengan kepemilikan 42,8% dan PT BFI Finance Indonesia Tbk sebesar 6,3%. Saham atas nama PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan hasil pembelian kembali saham Perusahaan.

Grafik 9 - KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN



Grafik 10 - STRUKTUR KORPORASI BFI

Lainnya (masing-masing di bawah 5%)
50,91%



*Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

PROFIL PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

Trinugraha Capital & Co SCA

SEJARAH SINGKAT

Trinugraha Capital & Co SCA ("TC&Co") adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan Maitre Joseph Elvinger, Notaris di Luxembourg dan terdaftar pada *The Registre de Commerce et des Societes* di Luxembourg di bawah nomor B 160504. Anggaran dasar TC&Co telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir telah berlaku secara efektif berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa TC&Co tertanggal 20 Mei 2011, dibuat di hadapan Maitre Joseph Elvinger, Notaris di Luxembourg.

MAKSUD DAN TUJUAN TC&Co

Maksud dan tujuan usaha yang dijalankan oleh TC&Co adalah untuk melakukan penyertaan, dalam bentuk apapun, pada perusahaan, kemitraan (*partnership*) atau jenis badan usaha lainnya. TC&Co dapat menjalankan semua hal komersial, teknis dan keuangan atau operasi lainnya, yang berhubungan langsung atau tidak langsung pada semua lingkup dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dari tujuannya.

PENGURUS DAN PENGAWAS TC&Co

Sesuai dengan anggaran dasar TC&Co, TC&Co dikelola oleh satu atau beberapa *manager* yang merupakan pemegang saham tanpa tanggung jawab terbatas (*unlimited liability shareholders/commandite*) (*Manager*, dan secara bersama-sama, *Managers*). Trinugraha Capital, sebuah *societe a responsabilite limitee* (TC Sarl), ditunjuk menjadi *Manager* tunggal dari TC&Co. Segala hal terkait TC&Co dan kondisi keuangan termasuk secara khusus pembukuan dan rekeningnya diawasi oleh TC&Co *Supervisory Board*.

Manager:

Trinugraha Capital ("TC Sarl").

Supervisory Board:

Anggota: Garibaldi Thohir
Anggota: John Viola
Anggota: Doug Puckett

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Berdasarkan Akta No.57 tanggal 7 April 1982 yang kemudian diubah dengan Akta No.40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan pada saat didirikan adalah sebesar Rp3.000.000.000 terbagi atas 100 saham prioritas dan 1.900 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.500.000, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 100 saham prioritas dan 900 saham biasa.

Berdasarkan Akta No.80 tanggal 22 November 1989 dan Akta No.27 tanggal 8 Maret 1990, modal dasar Perusahaan pada saat Perusahaan hendak melakukan penawaran umum ditingkatkan dari Rp3.000.000.000 yang terbagi atas 100 saham prioritas dan 1.900 saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.500.000 menjadi sebesar Rp15.000.000.000 yang terbagi atas 15.000.000 saham biasa masing-masing bernilai nominal Rp1.000 sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sejumlah Rp8.500.000.000 yang terbagi atas 8.500.000 saham.

1. **PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA**

Pada 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp1.000 per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp5.750 per saham.

Pada 16 Mei 1990, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 2.125.000 lembar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau disingkat "BEI").

2. **DIVIDEN SAHAM**

Berdasarkan Akta No. 31 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., tertanggal 8 April 1993 para pemegang saham menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp1.062.500.000 atau 1.062.500 lembar saham kepada pemegang saham yang tercatat pada 11 Mei 1993 dengan mengeluarkan 1 (satu) saham baru untuk setiap 10 (sepuluh) saham yang dimiliki.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 1.062.500 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 14 Juni 1993 dan 11 Juni 1993.

3. **SAHAM BONUS**

Berdasarkan Akta No. 32, tanggal 8 April 1993, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp15.000.000.000 yang

terbagi atas 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000, menjadi sebesar Rp30.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp10.625.000.000 yang terbagi atas 10.625.000 saham. Selain itu para pemegang saham juga menyetujui untuk mengkapitalisasi agio saham dengan mengeluarkan saham bonus sebanyak 17 lembar untuk setiap 20 lembar saham yang dimiliki. Total jumlah saham bonus yang dibagikan pada 17 September 1993 adalah 9.934.668 lembar saham atau dengan jumlah nominal sejumlah Rp9.934.668.000. Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 9.934.668 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 22 September 1993 dan 13 September 1993.

4. **COMPANY LISTING**

Pada 1993, sesuai dengan surat persetujuan No. S-303/BEJ.I.1/XI/1993 tanggal 30 November 1993 dan No. 177/EMT/LIST/BES/XI/93 tanggal 19 November 1993, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah menyetujui untuk mencatatkan tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal Rp8.500.000.000. per saham yang sama dan mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 6 Desember 1993 dan 2 Desember 1993.

Dengan demikian jumlah saham Perusahaan telah tercatat sejumlah 21.622.168 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (*Company Listing*).

5. **DIVIDEN SAHAM**

Berdasarkan Akta No. 107 tanggal 22 Januari 1994, yang dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan antara lain telah menyetujui pembagian dividen saham seluruhnya sebesar Rp7.207.390.000 atau sejumlah 7.207.390 lembar saham, dengan perhitungan 3:1, yaitu untuk setiap 3 (tiga) lembar saham yang dimiliki para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 21 Februari 1994, akan memperoleh 1 (satu) lembar saham baru.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 7.207.390 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing tanggal 22 Maret 1994 dan 21 Maret 1994.

6. **PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I)**

Berdasarkan Akta No. 2, tanggal 1 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp30.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000, menjadi sebesar Rp100.000.000.000 yang

terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp21.622.168.000 yang terbagi atas 21.622.168 saham.

Pada 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/"Bapepam-LK" dan terakhir dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/"OJK") melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Pertama ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham di mana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 1 (satu) saham baru.

Pada 9 Mei 1994, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 28.829.558 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 57.659.116 saham.

7. **PENAWARAN UMUM TERBATAS II (PUT II)**

Pada 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-71/PM/1997 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Kedua ("PUT II") Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp1.000 per saham di mana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 2 (dua) saham baru.

Pada 12 Februari 1997, Perusahaan mencatatkan saham-sahamnya sebanyak 115.318.232 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 172.977.348 saham.

8. **PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM**

Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp500 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham. Pada 3 November 1997, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 172.977.348 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

9. **SAHAM BARU DARI KONVERSI OBLIGASI WAJIB KONVERSI**

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* atau Obligasi Wajib Konversi ("MCB") yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan. Berdasarkan Akta No. 67 tanggal 9 Agustus 2006 dengan telah dikonversinya seluruh MCB sebanyak 414.384.585

lembar saham biasa maka jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham.

Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 414.384.585 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada 11 Mei 2006 dan 5 Juni 2006.

10. **PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM**

Berdasarkan Akta No.65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2

Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp500 per saham menjadi sebesar Rp250 per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham.

Pemecahan nilai nominal saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

Pada 10 Agustus 2012, setelah Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut, Perusahaan mencatatkan sahamnya sebanyak 760.339.281 di BEI sehingga saham Perusahaan yang beredar menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham.

11. **PENERBITAN SAHAM UNTUK PELAKSANAAN MESOP TAHAP I - GRANT DATE 1**

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penerbitan saham untuk pelaksanaan *Management and Employee Stock Options Program* ("MESOP") untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp250 per saham untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juni 2014.

BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan MESOP untuk Tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI.

Pada 31 Mei 2013, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 5.936.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP Tahap I - *Grant Date 1*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.526.614.562 saham.

12. **PENERBITAN SAHAM UNTUK PELAKSANAAN MESOP TAHAP I - GRANT DATE 2**

Pada 30 Mei 2014, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 23.320.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP untuk Tahap I - *Grant Date 2*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.549.934.562.

13. **PENERBITAN SAHAM UNTUK PELAKSANAAN MESOP TAHAP II - GRANT DATE 1**

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penerbitan saham untuk pelaksanaan MESOP untuk Tahap II di BEI. Besarnya saham untuk MESOP Tahap II adalah sebesar sisa saham yang telah dialokasikan pada MESOP Tahap I yang belum dilaksanakan ditambah Hak Opsi Tahap II.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan MESOP untuk Tahap II tersebut secara pra-pencatatan di BEI sebanyak 46.777.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp250 per saham.

Pada 29 Mei 2015, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 16.025.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP untuk Tahap II - *Grant Date 1*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.565.959.562.

14. **PENERBITAN SAHAM UNTUK PELAKSANAAN MESOP TAHAP II - GRANT DATE 2**

Pada 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru sebanyak 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan MESOP untuk Tahap II - *Grant Date 2*, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM

<p>15. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN (STOCK BUYBACK)</p> <p>Pada 15 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah</p>	<p>maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak</p>	<p>RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp341.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 100.273.200 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp252.160.169.658.</p>
--	--	--

PERUBAHAN JUMLAH SAHAM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham beredar Perusahaan dapat diringkaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9 – KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM BEREDAR

AKSI KORPORASI	BURSA SAHAM	TANGGAL PENCATATAN	SAHAM TERCATAT	JUMLAH SAHAM TERCATAT	JUMLAH NOMINAL (Rp)
Penawaran Umum Saham Perdana	BEJ & BES	16 Mei 1990	2.125.000	2.125.000	2.125.000.000
Dividen Saham	BEJ & BES	14 Juni 1993, 11 Juni 1993	1.062.500	3.187.500	3.187.500.000
Saham Bonus	BEJ & BES	22 September 1993, 13 September 1993	9.934.668	13.122.168	13.122.168.000
Company Listing	BEJ & BES	6 Desember 1993, 2 Desember 1993	8.500.000	21.622.168	21.622.168.000
Dividen Saham	BEJ & BES	22 Maret 1994, 21 Maret 1994	7.207.390	28.829.558	28.829.558.000
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)	BEJ & BES	9 Mei 1994	28.829.558	57.659.116	57.659.116.000
Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)	BEJ & BES	12 Februari 1997	115.318.232	172.977.348	172.977.348.000
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEJ & BES	3 November 1997	172.977.348	345.954.696	172.977.348.000
Saham Baru dari Konversi Obligasi Wajib Konversi	BEJ & BES	11 Mei 2006, 5 Juni 2006	414.384.585	760.339.281	380.169.640.500
Pemecahan Nilai Nominal Saham	BEI	10 Agustus 2012	760.339.281	1.520.678.562	380.169.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I - Grant Date 1	BEI	31 Mei 2013	5.936.000	1.526.614.562	381.653.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap I - Grant Date 2	BEI	30 Mei 2014	23.320.000	1.549.934.562	387.483.640.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II - Grant Date 1	BEI	29 Mei 2015	16.025.000	1.565.959.562	391.489.890.500
Penerbitan Saham untuk Pelaksanaan MESOP Tahap II - Grant Date 2	BEI	31 Mei 2016	30.752.000	1.596.711.562	399.177.890.500

PENCATATAN EFEK LAINNYA

PENCATATAN OBLIGASI DAN MEDIUM TERM NOTES

Tabel 10 – IKHTISAR PENCATATAN OBLIGASI (PER 31 DESEMBER 2016)

EFEK UTANG YANG DITERBITKAN	TANGGAL PENCATATAN DI BEI	TANGGAL EFEKTIF	PERINGKAT OBLIGASI	JUMLAH (Rp juta)	JUMLAH YANG DITERBITKAN (Rp juta)	TANGGAL JATUH TEMPO	STATUS
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	13 Juni 2012	4 Juni 2012 (No.S-6878/BL/2012)	A(idn)	575.000			
Seri A:					195.000	17 Juni 2013	Lunas
Seri B:					110.000	12 Juni 2014	Lunas
Seri C:					270.000	12 Juni 2015	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	20 Februari 2013	4 Juni 2012 (No.S-6878/BL/2012)	A+(idn)	625.000			
Seri A:					100.000	1 Maret 2014	Lunas
Seri B:					370.000	19 Februari 2015	Lunas
Seri C:					155.000	19 Februari 2016	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	10 Maret 2014	28 Februari 2014 (No.S-121/D.04/2014)	AA-(idn)	500.000			
Seri A:					225.000	17 Maret 2015	Lunas
Seri B:					55.000	7 Maret 2016	Lunas
Seri C:					220.000	7 Maret 2017	Belum lunas
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	20 Maret 2015	28 Februari 2014 (No.S-121/D.04/2014)	AA-(idn)	1.000.000			
Seri A:					345.000	29 Maret 2016	Lunas
Seri B:					105.000	19 Maret 2017	Belum lunas
Seri C:					550.000	19 Maret 2018	Belum lunas
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	26 Februari 2016	28 Februari 2014 (No.S-121/D.04/2014)	AA-(idn)	1.000.000			
Seri A:					200.000	5 Maret 2017	Belum lunas
Seri B:					142.000	25 Februari 2018	Belum lunas
Seri C:					658.000	25 Februari 2019	Belum lunas
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	26 Oktober 2016	17 Oktober 2016 (No.S-588/D.04/2016)	AA-(idn)	1.000.000			
Seri A:					317.000	25 Oktober 2017	Belum lunas
Seri B:					550.000	25 Oktober 2019	Belum lunas
Seri C:					133.000	25 Oktober 2021	Belum lunas

Pencatatan Obligasi

2012

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp575 miliar tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 13 Juni 2012. Obligasi ini mendapatkan peringkat A(idn). Kemudian berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC125/DIR/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 dari PT Fitch Ratings Indonesia, obligasi ini mendapatkan peringkat A+(idn). Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Kim Eng Securities

Plaza Bapindo - Citibank Tower,
Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 526 3445
Fax: (62-21) 526 3507, 526 3603

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Kresna Tower, Lt. 6
Parc 18 Sudirman Central
Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2555 7000
Fax: (62-21) 2939 1950, 2939 1951

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790 - Indonesia
Tel.: (62-21) 7917 5000
Fax: (62-21) 799 0720

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Prudential Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Jl. Arteri Kedoya No. 8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5290 7304-06
Fax: (62-21) 526 1136

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Tel. : (62-21) 5795 7755
Fax : (62-21) 5795 7750

Pada 17 Juni 2013, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri A.

Pada 12 Juni 2014, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri B.

Pada 12 Juni 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri C.

Pada 31 Desember 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri A, Seri B dan Seri C.

2013

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp625 miliar tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 20 Februari 2013. Obligasi ini mendapatkan peringkat A+(idn). Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Kim Eng Securities

Plaza Bapindo - Citibank Tower,
Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 526 3445
Fax: (62-21) 526 3507, 526 3603

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Kresna Tower, Lt. 6
Parc 18 Sudirman Central
Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2555 7000
Fax: (62-21) 2939 1950, 2939 1951

Wali Alamat**PT Bank Mega Tbk.**

Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790 - Indonesia
Tel.: (62-21) 7917 5000
Fax: (62-21) 799 0720

Akuntan Publik**Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan**

Prudential Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum**Jusuf Indradewa & Partners**

Rukan Arjuna Square
Jl. Arjuna Utara No. 7D & 7E
Jakarta 11510 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5694 3722
Fax: (62-21) 5694 3701

Notaris**Fathiah Helmi, S.H.**

Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5290 7304-06
Fax: (62-21) 526 1136

Pemeringkat Efek**PT Fitch Ratings Indonesia**

Prudential Tower, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Tel. : (62-21) 5795 7755
Fax : (62-21) 5795 7750

Pada 1 Maret 2014, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri A.

Pada 19 Februari 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri B.

Pada 19 Februari 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri C.

Pada 31 Desember 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri A, Seri B dan Seri C.

2014

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2014. Obligasi ini mendapatkan peringkat A+(idn). Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Kresna Tower, Lt. 6
Parc 18 Sudirman Central
Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2555 7000
Fax: (62-21) 2939 1950, 2939 1951

PT Trimegah Securities, Tbk.

Gedung Artha Graha,
Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2924 9088
Fax: (62-21) 2924 9168

Wali Alamat

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790 - Indonesia
Tel.: (62-21) 7917 5000
Fax: (62-21) 799 0720

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Prudential Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Jl. Arteri Kedoya No. 8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5290 7304-06
Fax: (62-21) 526 1136

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7755
Fax: (62-21) 5795 7750

Pada 17 Maret 2015, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri A.

Pada 7 Maret 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Seri B.

Pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 yang terutang masing-masing sebesar Rp220 miliar dan Rp275 miliar.

2015

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 20 Maret 2015. Obligasi ini mendapatkan peringkat AA-(idn). Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Kresna Tower, Lt. 6
 Parc 18 Sudirman Central
 Business District (SCBD)
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 2555 7000
 Fax: (62-21) 2939 1950, 2939 1951

PT Trimegah Securities, Tbk.

Gedung Artha Graha,
 Lt. 18 & 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 2924 9088
 Fax: (62-21) 2924 9168

Wali Alamat**PT Bank Mega Tbk.**

Menara Bank Mega
 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
 Jakarta 12790 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 7917 5000
 Fax: (62-21) 799 0720

Akuntan Publik**Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan**

Prudential Tower, Lt. 17
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta 12910 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 5795 7300
 Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum**Jusuf Indradewa & Partners**

Rukan Arjuna Square
 Jl. Arjuna Utara No. 7D & 7E
 Jakarta 11510 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 5694 3722
 Fax: (62-21) 5694 3701

Notaris**Fathiah Helmi, S.H.**

Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 5290 7304-06
 Fax: (62-21) 526 1136

Pemeringkat Efek**PT Fitch Ratings Indonesia**

Prudential Tower, Lt. 20
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
 Tel. : (62-21) 5795 7755
 Fax : (62-21) 5795 7750

Pada 29 Maret 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A.

Pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 yang terutang masing-masing sebesar Rp655 miliar dan Rp1 triliun.

2016

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 26 Februari 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat AA-(idn). Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**PT Danareksa Sekuritas**

Gedung Danareksa, Lt. 1
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
 Jakarta 10110 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
 Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI, Lt. 7, Suite 718
 Jl. Jend. Sudirman No. 28
 Jakarta 10210 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 5793 1168, 2806 1168
 Fax: (62-21) 5793 2076, 5793 1220

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lantai 28
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 526 3445
 Fax: (62-21) 526 3603, 526 3507

PT Trimegah Securities, Tbk.

Gedung Artha Graha,
 Lt. 18 & 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 2924 9088
 Fax: (62-21) 2924 9168

Wali Alamat**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Menara BTN Lt. 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta 10130 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 633 6789
 Fax: (62-21) 634 6873

Akuntan Publik**Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan**

Prudential Tower, Lt. 17
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
 Jakarta 12910 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 5795 7300
 Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum**Jusuf Indradewa & Partners**

Jl. Arteri Kedoya No. 8
 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
 Jakarta Barat 11520 - Indonesia
 Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
 Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160 - Indonesia
Tel.: (62-21) 739 2801
Fax: (62-21) 726 5090

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Tel. : (62-21) 5795 7755
Fax : (62-21) 5795 7750

Pada 31 Desember 2016, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 yang terutang sebesar Rp1 triliun.

2016

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A, Seri B dan Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp1 triliun tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 26 Oktober 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat AA-(idn). Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

PT DBS Vickers Securities Indonesia

DBS Bank Tower Lantai 32
Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940 - Indonesia
Tel.: (62-21) 3003 4900
Fax: (62-21) 3003 4944

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 526 3445
Fax: (62-21) 526 3603, 526 3507

PT Trimegah Securities, Tbk.

Gedung Artha Graha,
Lt. 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2924 9088
Fax: (62-21) 2924 9168

Wali Alamat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara BTN Lt. 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Tel.: (62-21) 633 6789
Fax: (62-21) 634 6873

Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

Prudential Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners

Jl. Arteri Kedoya No. 8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160 - Indonesia
Tel.: (62-21) 739 2801
Fax: (62-21) 726 5090

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910 - Indonesia
Tel. : (62-21) 5795 7755
Fax : (62-21) 5795 7750

Pada 31 Desember 2016, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 yang terutang sebesar Rp1 triliun.

Tabel 11 – IKHTISAR PENCATATAN MEDIUM TERM NOTES

EFEK UTANG YANG DITERBITKAN	TANGGAL PENCATATAN DI BEI	PERINGKAT MTN	JUMLAH (Rp juta)	JUMLAH YANG DITERBITKAN (Rp juta)	TANGGAL JATUH TEMPO	STATUS
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia I Tahun 2012	Tidak dicatatkan di bursa efek	A+(idn)	225.000			
Seri A:				25.000	25 Januari 2014	Lunas
Seri B:				200.000	25 Januari 2015	Lunas
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia II Tahun 2014	Tidak dicatatkan di bursa efek	-	130.000	130.000	14 Juni 2015	Lunas
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	Tidak dicatatkan di bursa efek	AA-(idn)	100.000			
Seri A:				50.000	13 April 2017	Belum lunas
Seri B:				50.000	13 Mei 2018	Belum lunas
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	Tidak dicatatkan di bursa efek	-	155.000	155.000	15 Agustus 2016	Lunas

Penerbitan Medium Term Notes

2012

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia I Tahun 2012

Pada 25 Januari 2012, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* BFI Finance Indonesia I Tahun 2012 ("MTN I") dengan nilai nominal sebesar Rp225 miliar terbagi atas Seri A dan Seri B.

Bunga MTN I dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga MTN tersebut. Pembayaran bunga MTN I terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri MTN I.

Arranger dan/atau Agen Penempatan

PT NISP Sekuritas
OCBC NISP Tower, Lt. 21
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2935 2788
Fax: (62-21) 5794 4095

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110 - Indonesia
Tel.: (62-21) 350 9777, 350 9888
Fax: (62-21) 350 0989, 350 1817

Agen Pemantau dan Agen Jaminan

PT Bank Sinarmas Tbk.
Wisma Bank Sinarmas,
Tower 3 Lt. 1,2
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Tel.: (62-21) 3199 0101
Fax: (62-21) 3192 4009

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners
Jl. Arteri Kedoya No. 8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
Fax: (62-21) 2254 4367

Notaris

Fathiah Helmi, S.H.
Graha Irama, Lt. 6, Suite 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Tel.: (62-21) 5290 7304-06
Fax: (62-21) 526 1136

Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok MTN I Seri A dan Seri B masing-masing pada 25 Januari 2014 dan 25 Januari 2015.

2014

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia II Tahun 2014

Pada 4 Juni 2014, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* BFI Finance Indonesia II Tahun 2014 ("MTN II") dengan nilai nominal sebesar Rp130 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun.

Bunga MTN II dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga MTN tersebut. Pembayaran bunga MTN II yang terakhir sekaligus jatuh tempo pada 14 Juni 2015.

Arranger dan/atau Agen Penempatan

Trimegah Sekuritas PT Trimegah Securities, Tbk.

Gedung Artha Graha,
Lt. 18 & 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2924 9088
Fax: (62-21) 2924 9168

Agen Pemantau dan Agen Jaminan

PT Bank Bukopin Tbk.

Bank Bukopin Building Lt. 8
Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770 - Indonesia
Tel.: (62-21) 798 8266, 798 9837
Fax: (62-21) 798 0705

Konsultan Hukum

Aprilda Fiona & Partners

Grand Wijaya Center H 34
Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru
Jakarta 12160 - Indonesia
Tel.: (62-21) 723 1675
Fax: (62-21) 726 1676

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160 - Indonesia
Tel.: (62-21) 739 2801
Fax: (62-21) 726 5090

Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok MTN II pada 14 Juni 2015.

2015

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* BFI Finance Indonesia III Tahun 2015 ("MTN III") dengan jumlah pokok sebesar total Rp100 miliar yang terdiri dari Seri A sebesar Rp50 miliar dan Seri B sebesar Rp50 miliar yang telah didistribusikan secara elektronik oleh KSEI pada 13 April 2015.

Bunga MTN III dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga MTN tersebut. Pembayaran bunga MTN III terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri MTN III.

Penerbitan MTN III dibantu oleh lembaga dan profesional bidang pasar modal, sebagai berikut:

Arranger

PT Ciptadana Securities

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2557 4800
Fax: (62-21) 2557 4900

Agen Pemantau

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 575 8130, 575 2362
Fax: (62-21) 575 2444

Konsultan Hukum

Wiyono Partnership

Attorneys at Law
Cyber 2 Tower, Lt. 7
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5,
Kav. 13
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2902 1288
Fax: (62-21) 2902 1277

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160 - Indonesia
Tel.: (62-21) 739 2801
Fax: (62-21) 726 5090

Pada 31 Desember 2016, saldo pokok MTN III yang terutang sebesar Rp100 miliar.

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015

Pada 5 Agustus 2015, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015 ("MTN IV") dengan nilai nominal sebesar Rp155 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun.

Bunga MTN IV dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga MTN tersebut. Pembayaran bunga MTN IV yang terakhir sekaligus jatuh tempo pada 15 Agustus 2016.

Arranger

PT Ciptadana Securities

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2557 4800
Fax: (62-21) 2557 4900

Agen Pemantau

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel.: (62-21) 575 8130, 575 2362
Fax: (62-21) 575 2444

Konsultan Hukum

Wiyono Partnership

Attorneys at Law
Cyber 2 Tower, Lt. 7
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5,
Kav. 13
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2902 1288
Fax: (62-21) 2902 1277

Notaris

Mardiana, S.H., Sp.N.

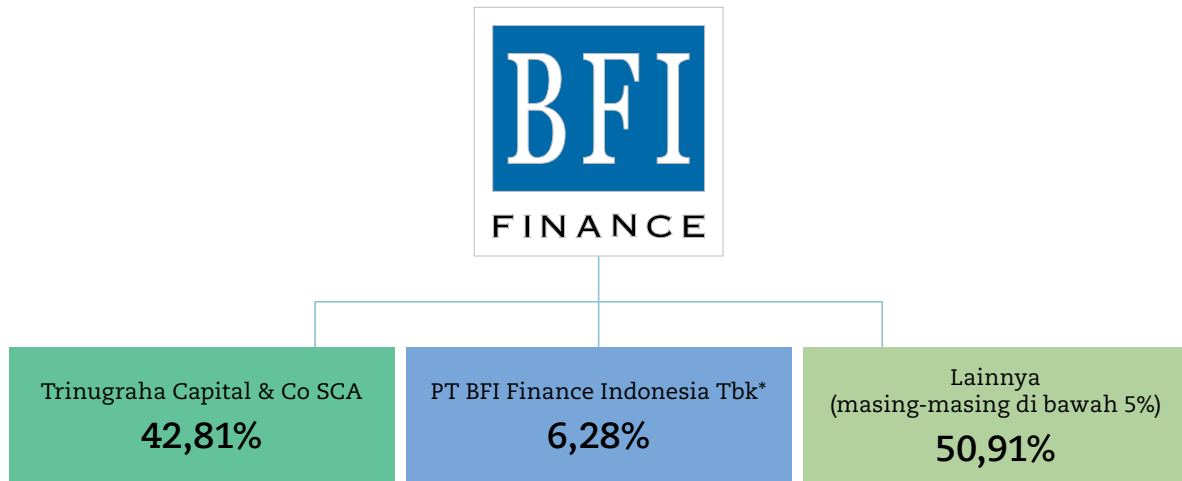
Jl. K.H. Atim I No. 25, RT 02/RW 04
Sunan Kalijaga,
Pasar Rangkasbitung
Kp. Kebon Kelapa - Rangkasbitung
Lebak 42314 - Indonesia
Tel.: (62-252) 206126

Perusahaan telah melunasi seluruh saldo pokok MTN IV pada 15 Agustus 2016.

STRUKTUR KORPORASI

Struktur Korporasi BFI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Grafik 11 – STRUKTUR KORPORASI BFI



*Hasil pembelian kembali saham Perusahaan sesuai keputusan RUPSLB 15 April 2015

INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Perusahaan tidak memiliki entitas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790 - Indonesia
Tel: (62-21) 7917 5000 ext. 16210
Fax: (62-21) 799 0720

Agen Pemantau

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel: (62-21) 575 8130, 575 2362
Fax: (62-21) 575 2444

Konsultan Hukum

Jusuf Indradewa & Partners
Jl. Arteri Kedoya No. 8
Kedoya Selatan, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520 - Indonesia
Tel.: (62-21) 2254 4117 ext. 107
Fax: (62-21) 2254 4367

Kantor Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Prudential Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia
Tel: (62-21) 5795 7300
Fax: (62-21) 5795 7301

Biro Administrasi Efek

PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340 - Indonesia
Tel: (62-21) 314 0032, 390 0645
Fax: (62-21) 314 0185, 390 0652, 390 0671



KUDA PUSTAKA - PURBALINGGA
LILIK DARMAWAN

Anak-anak antre meminjam buku yang dibawa oleh Ridwan Sururi dengan menggunakan kuda

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia

96



SUMBER DAYA MANUSIA

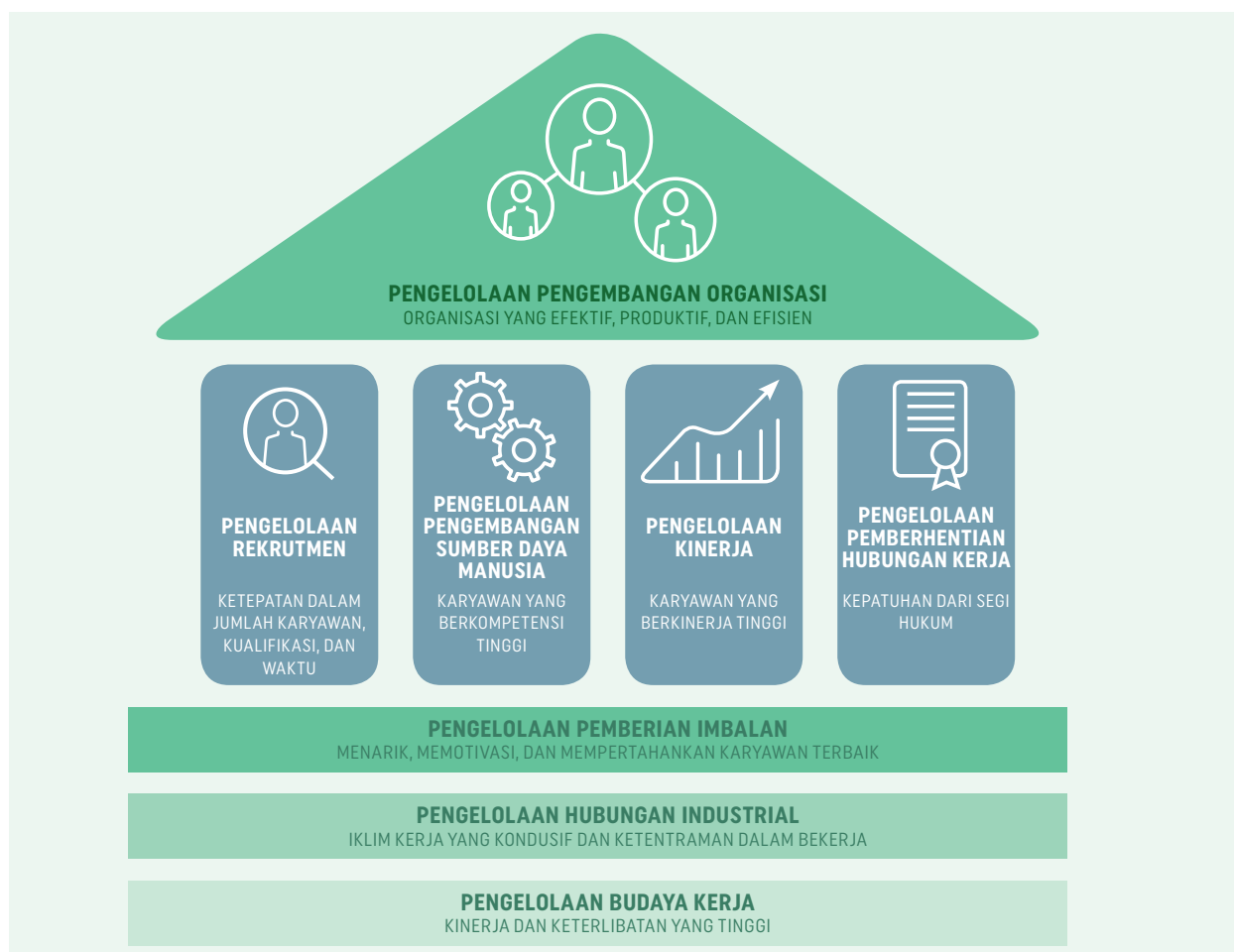
Sumber daya manusia (“SDM”) adalah aset paling berharga dan mitra Perusahaan dalam memastikan daya tahan terhadap kondisi eksternal sekaligus kemampuan membuka peluang pertumbuhan. BFI konsisten merealisasikan program-program pengembangan SDM yang senantiasa diselaraskan dengan perkembangan industri terkini serta sejalan dengan target Perusahaan. Sebagai aset paling berharga, BFI terus meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur. Sebagai mitra utama, rencana dan realisasi pengembangan usaha dapat dilaksanakan dengan komitmen dan dedikasi oleh *GREAT People* dari berbagai tingkatan organisasi.



PENGELOLAAN SDM

Dalam pengelolaan SDM, Departemen *Human Capital* (“HC”) mengambil posisi sebagai mitra bisnis organisasi. Hal ini diwujudkan dalam penyelarasan kebutuhan bisnis dengan strategi SDM sehingga menghasilkan organisasi yang efektif, produktif dan efisien. *Organization Development* sebagai payung dalam pengembangan strategi SDM dengan melaksanakan pilar proses *Recruitment Management*, *People Development Management*, *Performance Management* dan *Termination Management*. Sebagai pendukung atas efektivitas pelaksanaan pilar proses tersebut dikembangkan strategi *Reward Management* dan *Industrial Relations Management*. Selain itu juga *Culture Management* dijadikan sebagai fondasi dalam organisasi sehingga dapat menciptakan organisasi yang solid dan berkinerja tinggi.

Grafik 12 – KERANGKA PENGELOLAAN SDM BFI



BUDAYA PERUSAHAAN

Pada Desember 2016, Perusahaan meluncurkan Visi dan Misi baru Perusahaan yang akan mulai diterapkan sejak Januari 2017, yaitu:

Visi

“Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.”

Misi

1. Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami;
2. Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik yang terpercaya;

3. Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi;
4. Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan; dan
5. Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

Selain itu Departemen HC juga melakukan pembaruan nilai-nilai budaya organisasi yaitu **GREAT** beserta dengan panduan perilaku akan dijadikan sebagai komitmen perilaku bersama seluruh karyawan selama bekerja

di BFI dan untuk mendukung hal tersebut, seluruh karyawan juga disebut sebagai GREAT People.

Program internalisasi nilai-nilai Perusahaan tersebut dilakukan secara bertahap sejak akhir 2016 melalui kampanye pada tingkat eksekutif dan dilanjutkan ke seluruh karyawan pada 2017.

MANAJEMEN REKRUTMEN

Dalam memenuhi kebutuhan SDM yang meningkat sebanyak 1.022 karyawan (12,9%) dari tahun 2015, BFI melakukan berbagai strategi dalam proses rekrutmen, antara lain, pemilahan karakteristik pekerjaan, perluasan mitra rekrutmen, pemanfaatan media sosial dan penggunaan teknologi untuk mempersingkat waktu proses seleksi.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan di BFI, rekrutmen SDM dipilah menjadi tiga bagian posisi, yaitu posisi strategis, *trainee* dan non-strategis. Proses rekrutmen untuk posisi strategis (*managerial level*) disentralisasi di kantor pusat. Posisi *trainee* terdiri dari *trainee* eksternal yang berasal dari karyawan baru dan *trainee* internal yang berasal dari dalam Perusahaan juga disentralisasi di kantor pusat. Sedangkan posisi non-strategis, proses rekrutmen dilakukan di masing-masing cabang.

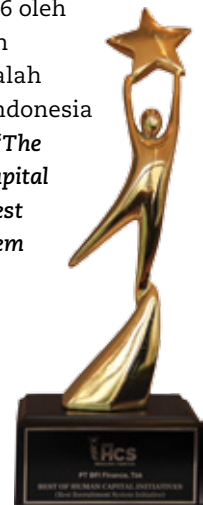
Untuk mendukung hal ini, BFI memperluas *partner sourcing* melalui kerja sama dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Perusahaan menggunakan tenaga dari dalam

yaitu karyawan BFI sendiri melalui program *employee-get-employee* yang memberikan sejumlah penghargaan kepada karyawan yang berhasil membawa tenaga kerja dari luar BFI dengan masa kerja minimal selama enam bulan. Program *employee-get-employee* ini dapat dikatakan cukup sukses karena memiliki *joint rate* yang paling tinggi mencapai 95%. BFI juga menjalin relasi lebih baik dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia melalui pemberian beasiswa, pemagangan, *campus hiring* dan *campus awareness* dengan pemberian seminar oleh perwakilan Direksi dan Manajemen BFI.

Sesuai dengan perkembangan jaman, BFI juga memanfaatkan media sosial dan situs *web* dalam proses *sourcing* seperti Facebook, Twitter, Instagram, Career.com, LinkedIn dan Jobstreet. Selain melalui mitra dan media sosial, tidak jarang proses *sourcing* juga dilakukan secara langsung di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa posisi yang non-strategis misalnya *sales force*, *collection* atau lainnya.

Hal ini dilakukan untuk untuk mendapatkan kandidat sebanyak mungkin yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BFI juga menggunakan teknologi dalam proses seleksi karyawan yaitu BFI Jobs. Pelamar kerja dapat secara langsung mengisi lembar isian pelamar secara *online* dan melakukan psikotes *online* di sistem JFA (*Job Fit Assessment*) sebagai prasyarat penerimaan karyawan di Perusahaan. Selain itu pelamar kerja juga dapat mengetahui proses rekrutmennya secara langsung pada sistem ATS (*Applicant Tracking System*). Atas upaya pembuatan sistem ini, BFI juga memperoleh penghargaan Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2016 oleh Dunamis Human Capital dan majalah BusinessNews Indonesia dalam kategori “*The Best of Human Capital Initiatives (The Best Recruitment System Initiative)*” pada September 2016.



BFI menyadari bahwa kunci sukses Perusahaan untuk terus tumbuh secara berkesinambungan dan berkualitas, terletak pada pengelolaan desain organisasi dan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan kinerja. Kemampuan organisasi untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta-talenta terbaik merupakan salah satu prioritas utama dalam strategi bisnis.



Pada 2016, BFI mendapatkan penghargaan "Best Employer Awards 2016" kategori Financial Institution dari Telkom University Bandung.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan perkembangan bisnis BFI selama 2016, pemenuhan SDM yang berkualitas merupakan tantangan terbesar dalam pengelolaan SDM di BFI. Dengan jumlah karyawan berjumlah 8.941 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan wilayah cakupan 209 cabang dan 96 gerai, BFI terus berupaya memastikan seluruh karyawan mendapat pengembangan kompetensi secara merata.

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, BFI berinvestasi untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan organisasi saat ini dan di masa mendatang melalui pelatihan di internal, eksternal dan mitra bisnis BFI.

BFI Learning Center

Melalui fokus dalam rangka membangun *Learning Organization*, program pengembangan SDM disusun secara komprehensif dan terus disempurnakan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Inisiatif-inisiatif BFI Learning Center pada 2016 berfokus pada proses *reorganizing*, *restrategizing*, utilisasi *Knowledge Management* dan membentuk infrastruktur pembelajaran organisasi. Inisiatif-inisiatif tersebut terealisasi melalui:

1. Penerapan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk pengembangan kompetensi karyawan level manajerial ke atas.
2. Menginisiasi HC Learning di tingkat Area. HC Learning memiliki tugas dan tanggung jawab mengimplementasikan strategi pelatihan dari *Learning Center* di seluruh kantor cabang BFI di Indonesia,

sebagai bentuk implementasi program pengembangan SDM secara merata.

3. Melakukan implementasi *Knowledge Management* sebagai proses utilisasi aset pengetahuan di organisasi. Implementasi *Knowledge Management* tertuang dalam beberapa aktivitas adalah sebagai berikut:
 - a. *Sharing Session*
 - i. *Leader's Talk*
 - ii. *Inspire*
 - b. *Knowledge Mapping*
 - c. *Change Advocate Forum*
4. Melakukan implementasi strategi pembelajaran dan pengembangan SDM di organisasi melalui tiga kategori pelatihan umum, yaitu:
 - a. **Pelatihan Wajib (Mandatory Training)**
Merupakan pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan BFI. Pelatihan kategori wajib (*mandatory*) juga diperuntukkan untuk karyawan yang

akan mengisi jenjang karir berikutnya.

b. Pelatihan Sertifikasi (Certification Training)

Merupakan pelatihan untuk memberikan sertifikasi suatu keahlian karyawan sesuai dengan pekerjaannya. Pada 2016, *Learning Center* telah memberikan enam jenis pelatihan sertifikasi. Pelatihan ini diberikan melalui kerja sama dengan beberapa pihak (dalam hal ini termasuk OJK) untuk melakukan sertifikasi kepada seluruh *stakeholder* dan karyawan yang berkepentingan.

c. Pelatihan Peningkatan dan Penyegaran (Enhancement and Refreshment Training)

Jenis pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan fungsional karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada 2016, *Learning Center* dan mitra bisnis menyelenggarakan 207 jenis pelatihan di Kantor Pusat, Area, dan Cabang BFI di seluruh Indonesia.

Selama 2016, BFI Learning Center juga melakukan pengembangan strategi pembelajaran baru guna meningkatkan kualitas program pelatihan SDM di organisasi melalui strategi bernama BFI Corporate Institute (CI). BFI Corporate Institute merupakan transformasi BFI Learning Center. Melalui pengembangan Corporate Institute ini, BFI Learning Center dapat menjadi pusat pengembangan SDM yang lebih terpadu bagi organisasi.

Biaya Pengembangan SDM

Sepanjang 2016, pengembangan SDM di Perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp19,1 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,1% dibandingkan

dengan tahun 2015 yang sebesar Rp13,6 miliar. Penyerapan biaya tersebut termasuk, antara lain, biaya penyelenggaraan program, biaya akomodasi dan biaya-biaya pendukung lainnya.

PENGLOLAAN KINERJA

Penilaian Kinerja Perusahaan

Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Karyawan memegang peranan utama dalam memitigasi berbagai risiko dan masalah yang dihadapi oleh Perusahaan dalam tahun berjalan. Kemampuan Perusahaan untuk mengarahkan, mengembangkan dan mendorong kemampuan terbaik dari diri karyawan merupakan aktivitas kunci dalam merespon tantangan serta senantiasa menyesuaikan diri terhadap tuntutan pasar yang dinamis.

Tabel 12 – PROGRAM PELATIHAN 2016

Kategori Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah Peserta
Pelatihan Wajib	5	4.478
Pelatihan Sertifikasi	6	7.135
Pelatihan Peningkatan dan Penyegaran	207	835
Jumlah	218	12.448

Tabel 13 – PESERTA PELATIHAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN 2016

Level Jabatan	Pelatihan Wajib	Pelatihan Sertifikasi	Pelatihan Peningkatan dan Penyegaran	Jumlah Pelatihan
Dewan Komisaris dan Direksi	0	2	5	7
Manajer Senior	2	111	456	569
Manajer Junior	5	94	170	269
Officer	380	182	1.938	2.500
Staf	4.091	446	4.566	9.103
Jumlah Peserta	4.478	835	7.135	12.448

NI WAYAN SRIWANTI

Customer Relationship Executive, Kantor Cabang Mataram

Suasana kerja di BFI sangat mendukung pekerjaan yang saya lakukan, terutama yang saya rasakan adalah semangat kekeluargaannya, sehingga motivasi di tempat kerja selalu dapat dijaga. Kesan pertama saya tentang BFI pada waktu baru bergabung adalah perusahaan yang penuh kedisiplinan.



Dalam pengukuran kinerja SDM, Perusahaan melakukan pengukuran dua jenis produktivitas indeks, yaitu:

- Financial Productivity*, melalui perbandingan antara pendapatan Perusahaan dan jumlah seluruh karyawan; dan
- Workload Productivity*, melalui perbandingan antara jumlah booking yang dikelola Perusahaan dengan jumlah seluruh karyawan.

Untuk meningkatkan produktivitas, pada pertengahan 2016 Perusahaan melakukan *business process reengineering* untuk karyawan mitra yang bertujuan untuk mengevaluasi kembali posisi-posisi yang menjadi proses *core* dan *non-core* sehingga mendapatkan produktivitas yang optimal.

Penilaian Kinerja Individu

Dalam mengukur kinerja setiap karyawan, departemen HC telah membuat sistem pengelolaan kinerja yang tersistematis dan otomatisasi di sistem *Human Capital Information System* ("HCIS").

Dalam sistem penilaian kinerja ini, terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- Employee-goal Setting* ("EGS")
Pada bagian ini setiap karyawan diwajibkan untuk menyusun KPI (*Key Performance Indicator*) dengan atasannya yang akan dijadikan sebagai indikator dalam penilaian kinerja. Sistem KPI yang digunakan dalam BFI adalah sistem *sharing* KPI sehingga terdapat keterkaitan KPI antara satu bagian dengan bagian lainnya. Saat ini proses penyusunan EGS dikonsolidasi di masing-masing *Human Capital Business Partner* ("HCBP") di setiap area lalu diunggah ke dalam sistem HCIS.
- Performance Review*
Pada bagian ini, seluruh karyawan dan atasan melakukan penilaian atas KPI yang telah disepakati. Proses ini dilakukan setiap Juli sebagai penilaian kinerja tengah tahun dan akan digunakan untuk data dalam sistem promosi karyawan.
- Performance Appraisal*
Pada bagian terakhir ini adalah penilaian karyawan dan atasan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun

penuh. Hasil penilaian ini yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pemberian insentif dan *profit sharing* oleh Perusahaan bagi karyawan yang memiliki kinerja baik. Perusahaan juga memberikan sanksi kepada karyawan dengan tujuan memberikan pembinaan dan peringatan agar kinerja karyawan meningkat dan sesuai dengan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan.

PENGEMBANGAN KARIR

Perusahaan memiliki keyakinan bahwa faktor kunci yang menentukan keunggulan bersaingnya adalah kapabilitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Komitmen Perusahaan adalah mengarahkan, mengembangkan, mengoptimalkan kemampuan karyawan serta menyelaraskan minat karyawan sesuai dengan kebutuhan SDM sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan membuat program *People Management* yang merupakan kerangka pengelolaan pengembangan karyawan melalui perumusan standar kompetensi

(kompetensi inti, kepemimpinan, fungsional dan teknis), pemetaan potensi (*Human Asset Value/HAV Map*), perencanaan karir serta program pengembangannya. Dua aktivitas besaran kerangka *talent management* BFI adalah sebagai berikut:

1. *People Mapping* merupakan aktivitas *mapping* seluruh karyawan berdasarkan kinerja dan potensi karyawan. Dalam pengukuran kinerja, didapat dari hasil penilaian kinerja, sedangkan potensi karyawan berasal dari proses asesmen berdasarkan kompetensi dan potensi dari setiap posisi. *People Mapping* ini dilakukan setiap enam bulan sekali untuk persiapan kaderisasi pemimpin di cabang dan kantor pusat. Hasil proses *People Mapping* juga dilakukan sebagai pertimbangan dalam proses promosi.
2. *People Development* merupakan proses pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut yang berujung pada peningkatan kinerja Perusahaan. Program pengembangan ini dilakukan di kalangan internal dan eksternal BFI sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Di 2016, BFI telah melakukan banyak program pelatihan internal melalui BFI CI, *Breakfast Meeting*, *Executive Coaching* untuk tingkat manajerial, pemberian beasiswa kuliah untuk



tingkat manajerial, *BFI Leader Inspiring* yang merupakan program temu seluruh karyawan dengan perwakilan manajemen BFI untuk *sharing knowledge* di seluruh cabang BFI, serta banyak program lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh karyawan dan mitra bisnis BFI.

PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Bagi Perusahaan, loyalitas dan produktivitas karyawan adalah aset utama guna mencapai target yang lebih baik di masa mendatang. Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan antara lain meliputi:

1. Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja bagi karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan ditambah dengan prestasi yang telah dicapai dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan. Pencapaian kinerja dilihat dari beberapa faktor yaitu individu, grup atau tim, serta Perusahaan. Perusahaan juga memandang pentingnya penyesuaian gaji terhadap keadaan perekonomian sehingga standar kehidupan yang layak bagi karyawan dapat terpenuhi. Perusahaan juga selalu memperhatikan standar penetapan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Fasilitas dan Tunjangan

Di samping gaji pokok dan tunjangan transportasi, Perusahaan juga memberikan fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya, antara lain:

- Program kepemilikan kendaraan motor (*Motorcycle Ownership Program* atau MOP) dan kepemilikan kendaraan mobil (*Car Ownership Program* atau COP);
- Program kepemilikan fasilitas penunjang kerja berupa kamera digital, komputer *laptop*, kalkulator finansial dan *smartphone*;
- Fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang merupakan pengganti dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sejak 2015, terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM);
- Asuransi karyawan yang mencakup Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Jiwa;
- Tunjangan untuk perumahan, pulang ke kota domisili dan penempatan bagi karyawan yang ditempatkan di kota lain di luar domisili;
- Tunjangan kesusahan (*hardship allowance*) yang diberikan kepada karyawan pendatang yang ditempatkan di kota-kota yang dikategorikan sulit dan terletak jauh dari perkotaan;
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali; dan
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya.

HUMAN CAPITAL INFORMATION SYSTEM

Perusahaan menyadari bahwa teknologi informasi sangat berperan besar dalam memenuhi kebutuhan bisnis, baik operasional dan non-operasional di BFI. Apalagi kondisi geografis BFI yang memiliki cabang di seluruh Indonesia, membutuhkan bantuan teknologi informasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.

Mulai dari pertengahan 2015, BFI sudah mengimplementasikan sistem *Human Capital Information System* ("HCIS") sebagai pengganti sistem sebelumnya yang meliputi untuk seluruh karyawan dan mitra BFI. Modul-modul dalam sistem HCIS juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, antara lain:

1. Modul *Employee Self Service* (ESS) khusus bagi karyawan Mitra BFI merupakan pengembangan sistem ESS untuk seluruh Mitra BFI sehingga memiliki *database* yang valid. Modul ini juga menjadi penunjang data bagi pembayaran sistem remunerasi kepada seluruh Mitra BFI.



ASIH LUWIDARTI UTAMI

Branch Operations & Services Supervisor, Kantor Cabang Tangerang

Saya sudah bersama-sama dengan BFI selama 25 tahun dengan segala suka dan dukanya. Apa yang menyebabkan saya begitu betah di BFI? Ada banyak hal yang membuat saya terus berkarir di Perusahaan ini. Yang pasti adalah rasa kekeluargaan, hampir tidak ada kesenjangan atau gap dalam bekerja sehari-hari. Di samping itu, fasilitas dan benefit yang saya terima memadai dan adanya jenjang karier yang jelas untuk saya.

2. Modul *Job Fit Assessment* (JFA) merupakan aktivitas psikotes *online* yang dapat diakses secara langsung oleh pelamar kerja. Hasil psikotes juga langsung didapat oleh rekruter dalam waktu singkat selama satu jam. Sistem ini sangat menghemat waktu dan meningkatkan hasil kualitas pemeriksaan psikotes.
3. Modul *Applicant Tracking System* (ATS) merupakan sistem *tracking* untuk para pelamar kerja yang melamar kerja di BFI sehingga dapat mengetahui kemajuan proses rekrutmennya secara langsung.
4. Modul *Learning Management System* (LMS) merupakan pengembangan dari sistem ESS saat ini untuk pendaftaran pelatihan yang datanya akan tersentralisasi di BFI *Corporate Institute*.
5. Modul *Performance Management System* (PMS) untuk pengembangan sistem *Employee Goal Setting* (EGS). Karyawan dapat secara langsung memasukkan dan melakukan perubahan KPI dalam proses *performance planning*.

PROGRAM DAN AKTIVITAS KARYAWAN

Dengan tujuan untuk membangun kebersamaan dan meruntuhkan batasan-batasan struktural dalam berkomunikasi, Perusahaan memberikan berbagai fasilitas kepada karyawan untuk melakukan aktivitas kebersamaan, seperti:

1. Program kesehatan dan kebugaran, antara lain:
 - Bola basket
 - Bulutangkis
 - Futsal
 - Jujitsu
 - Yoga
 - Senam Zumba
 - Tenis Meja
 - Lari
2. Kegiatan kebersamaan karyawan (*outing*); baik karyawan kantor cabang maupun kantor pusat; dan
3. Buka puasa bersama dalam rangka bulan suci Ramadhan.

Lebih jauh lagi, aktivitas-aktivitas ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan karyawan untuk saling berbagi. Kebiasaan tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan inisiatif *Knowledge Management*.



AKTIVITAS OLAHRAGA BERSAMA BERTUJUAN UNTUK MENUMBUHKAN KEBIASAAN KARYAWAN UNTUK SALING MENGHARGAI

KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016

Pada 2016 BFI berhasil memperoleh peningkatan produktivitas sebesar 6,4%. Tolak ukur pengukuran produktivitas yang digunakan adalah jumlah kontrak baru dibagi dengan jumlah karyawan.

Tabel 14 – PRODUKTIVITAS KARYAWAN

Keterangan	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Karyawan	7.924	8.941	1.017	12,8%
Jumlah Outlet	267	305	38	14,2%
Karyawan/Jaringan	29,7	29,3	(0,4)	-1,3%
Jumlah Kontrak Baru/ Jumlah Karyawan	29,7	31,6	1,9	6,4%

HUBUNGAN INDUSTRIAL

BFI memahami bahwa hubungan industrial yang baik merupakan salah satu kunci keberlanjutan usaha Perusahaan dan karenanya berupaya untuk senantiasa merealisasikan berbagai program pemenuhan hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan Perusahaan.

Praktik ketenagakerjaan yang diselenggarakan Perusahaan meliputi hubungan ketenagakerjaan, kondisi kerja dan jaminan sosial, dialog ketenagakerjaan, serta pengembangan SDM dan pelatihan yang lebih baik.

Perhatian yang besar dan komitmen yang tinggi dalam kebijakan ketenagakerjaan juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh karyawan.

Dalam kerangka ini, BFI memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan. Hak dan kewajiban manajemen dan karyawan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebanyak 5.322 orang karyawan tetap atau 59,5% dari 8.941 orang jumlah karyawan BFI per 31 Desember 2016 dilindungi kepentingannya dalam Peraturan Perusahaan tersebut, sedangkan bagi karyawan berstatus kontrak dilindungi dengan Perjanjian Kerja Sama.

Dalam setiap kegiatan operasionalnya, BFI senantiasa membuka saluran informasi yang luas sehingga karyawan dapat mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung; baik melalui saluran *Hotline HC Care* berupa email dan telepon maupun melalui komunikasi secara langsung; kepada manajemen

Perusahaan yang secara reguler melakukan kunjungan ke cabang melalui kegiatan “*BFI Leaders Inspire*”. Dengan kondisi seperti di atas, karyawan BFI belum melihat inisiatif pembentukan serikat pekerja sebagai saluran komunikasi yang efektif.

PENANGANAN KELUHAN KETENAGAKERJAAN

Kami meletakkan karyawan sebagai pemangku kepentingan yang sejajar dengan Perusahaan. Dengan pemahaman ini, BFI selalu mencermati pengaduan atau keluhan karyawan yang berkaitan dengan hubungan kerja, praktik kepegawaian dan pelanggaran hak asasi manusia, untuk dicarikan jalan keluar yang tepat bagi semua pihak.

Perusahaan menerima setiap pengaduan yang dikemukakan secara lisan dan tertulis serta diselesaikan secara berjenjang sesuai hirarki.

Dengan pendekatan yang setara, hubungan industrial di BFI dapat terjalin dengan baik.

Suasana kerja yang kondusif dapat dijaga dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Perusahaan terkait dengan pelaksanaan hubungan industrial selama 2016.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bagi BFI, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") merupakan prioritas utama serta bagian dari pelaksanaan praktik ketenagakerjaan yang baik. Dengan K3 yang baik, suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung atmosfir positif yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja.

Dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja, BFI menerapkan perangkat kebijakan dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk melindungi seluruh karyawan dari risiko kerja yang mereka hadapi. Termasuk di dalamnya adalah penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang sesuai dengan risiko dan usaha peningkatan kesadaran K3 kepada setiap karyawan.

Pelaksanaan seluruh kebijakan dan prosedur K3 dikoordinasikan oleh Divisi Operations and Control di mana beberapa karyawan terlibat dalam struktur formal kepengurusan K3.

Pengaturan Perlindungan Karyawan

Aturan tentang K3 diadopsi Perusahaan melalui Perjanjian Kerja Bersama yang mencantumkan persyaratan keselamatan kerja seperti tertuang di dalam Pasal 39 tentang Pencegahan dan Penanggulangan. Di dalamnya ditetapkan bahwa:

1. Setiap karyawan wajib secara aktif mencegah dan menghindari terjadi kecelakaan kerja, musibah kebakaran, pencurian dan keadaan lain yang membahayakan keselamatan karyawan, kerusakan aset Perusahaan, dan lingkungan.
2. Setiap karyawan wajib secara aktif menanggulangi bila terjadi kecelakaan kerja, musibah kebakaran, banjir, pencurian dan kejadian lain yang membahayakan dan/atau merusak aset Perusahaan.
3. Karyawan yang bertugas di luar kantor dengan kendaraan motor wajib menggunakan helm sebagai pelindung keselamatan.

Selain kebijakan, SOP, dan aturan K3, Perusahaan melindungi setiap karyawannya dengan asuransi kesehatan dan kecelakaan agar karyawan merasa tenang dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Perlindungan karyawan atas kecelakaan kerja diwujudkan dalam bentuk:

1. BPJS Ketenagakerjaan melalui program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja);

2. Asuransi Kecelakaan Diri yang disediakan oleh Perusahaan dan bekerja sama dengan perusahaan asuransi; dan
3. Asuransi Kesehatan yang disediakan oleh Perusahaan dan bekerja sama dengan perusahaan asuransi.

Implementasi K3 Gedung

Sifat dan skala kegiatan usaha BFI bertumpu pada kegiatan administrasi perkantoran dan aktivitas yang dilakukan di luar kantor. BFI berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta aman untuk karyawan, pelanggan dan aset Perusahaan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kepatuhan, BFI memastikan Seluruh perizinan yang menyangkut keselamatan gedung telah dipenuhi. Seluruh perizinan seperti sistem kelistrikan; baik untuk sambungan listrik PLN maupun pembangkit listrik (*genset*); sistem transportasi (*lift* dan *gondola*), sistem instalasi penyalur petir, sistem kebakaran gedung dan sistem pengolahan limbah atau *Sewage Treatment Plant (STP)*, telah memiliki izin dan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kantor pusat BFI Tower adalah gedung terbesar yang dikelola Perusahaan dengan luas 20.000m² yang dengan sendirinya memiliki risiko keselamatan gedung yang relatif tinggi. Program K3 yang telah dilakukan selama 2016, di kantor pusat BFI Tower meliputi:

1. Penyediaan kotak P3K di setiap lantai dan penyediaan sarana penyelamatan terhadap bencana kebakaran;

2. Dibentuknya *Fire Brigade* yang melibatkan pihak *Security*, *Building Maintenance*, *Cleaning Service*, karyawan dan penyewa gedung (*tenant*);
3. Latihan evakuasi keadaan darurat secara berkala yang melibatkan semua pihak;
4. Uji coba peralatan pemadam kebakaran untuk memastikan semua berfungsi dengan baik (*sprinkler*, *hydrant* dan sistem *alarm*);
5. Perawatan rutin sarana gedung seperti *lift*, *diesel pump*, *genset*, gondola dan sistem kebakaran; dan
6. Pengecekan sistem kelistrikan.

Tim keadaan darurat yang dibentuk melakukan kegiatan simulasi tanggap darurat secara berkala. Kegiatan simulasi tanggap darurat dilakukan berdasarkan identifikasi potensi bahaya di kantor pusat yaitu risiko kebakaran di gedung tinggi.

Praktek Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Karyawan Lapangan

Karyawan lapangan dengan mengemban tugas dan tanggung jawab di luar kantor memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi, termasuk di dalamnya adalah bidang pemasaran, penagihan, dan unit tertentu di bagian operasional. Dalam kesehariannya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di luar kantor.

Terkait dengan itu, kecelakaan lalu lintas adalah risiko yang cukup tinggi. Jumlah kecelakaan lalu lintas serta hal lainnya yang terjadi pada karyawan selama menjalankan tugasnya di lapangan mengalami penurunan. Pada 2016, terdapat 20 kasus, menurun dibandingkan dengan 29 kasus pada 2015.

Promosi Kesehatan

BFI melakukan kegiatan promosi pencegahan penyakit akibat kerja untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai potensi penyakit akibat kerja dari kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari. Termasuk dalam program ini adalah penyediaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan level tertentu.

Program promosi kesehatan yang spesifik juga dilakukan di daerah-daerah yang mengalami wabah penyakit endemis seperti demam berdarah dan malaria, atau kondisi lingkungan yang memburuk seperti asap kebakaran hutan.

Kegiatan pencegahan penyakit juga difasilitasi Perusahaan dengan penyediaan sarana olah raga untuk karyawan, seperti lapangan bulutangkis, basket, tenis meja, ruang untuk jujitsu, senam zumba, dan yoga.

BFI juga melakukan komunikasi K3 kepada seluruh karyawan melalui berbagai media. Kampanye keselamatan dan kesehatan dilakukan dengan memasang poster dan banner, komunikasi elektronik dan situs intranet BFI Learning Center.

Pengamanan Aset

Selain keselamatan tenaga kerja, BFI melakukan pengelolaan untuk melindungi dan mengamankan aset, terutama aspek pengamanan dokumen milik pelanggan dalam Pusat Kustodian (*Custodian Centre*).

Untuk keperluan perlindungan dan pengamanan, BFI membangun ruangan penyimpanan tahan gempa dan kebakaran di Kantor Pusat BFI Tower dengan pengamanan sepanjang waktu.

DEMOGRAFI KARYAWAN BFI

Sejalan dengan berkembangnya bisnis BFI, jumlah karyawan juga mengalami peningkatan. Per 31 Desember 2016, jumlah karyawan mencapai 8.941 orang, meningkat 12,8% dibandingkan jumlah karyawan 2015 yang mencapai 7.924 orang. Lebih dari separuh (59,5%) adalah karyawan tetap. Peningkatan karyawan terjadi di hampir semua direktorat BFI sesuai kebutuhan masing-masing.

Demografi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan sangat baik, dengan adanya peningkatan komposisi karyawan dengan jenjang pendidikan diploma, sarjana S1, S2, dan S3. Jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan tersebut meningkat 831 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Karyawan dengan jenjang pendidikan ini mencakup 70,5% dari seluruh angkatan kerja BFI pada 2016, sedang sisanya berpendidikan SMA ke bawah.

Berdasarkan kelompok usia, 70,7% karyawan BFI berusia kurang dari 30 tahun, dengan komposisi terbanyak, yaitu hampir separuh berusia 25-30 tahun dari keseluruhan karyawan sehingga demografi karyawan berdasarkan usia membentuk piramida. Komposisi ini mengindikasikan regenerasi karyawan sudah berlangsung cukup baik. Dari keseluruhan karyawan, 8.941 karyawan, 93,6% berada pada posisi staf dan officer yang berinteraksi langsung dengan pasar dan menjadi ujung tombak pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Grafik 13 – JUMLAH KARYAWAN



Tabel 15 – PERBANDINGAN JUMLAH KARYAWAN

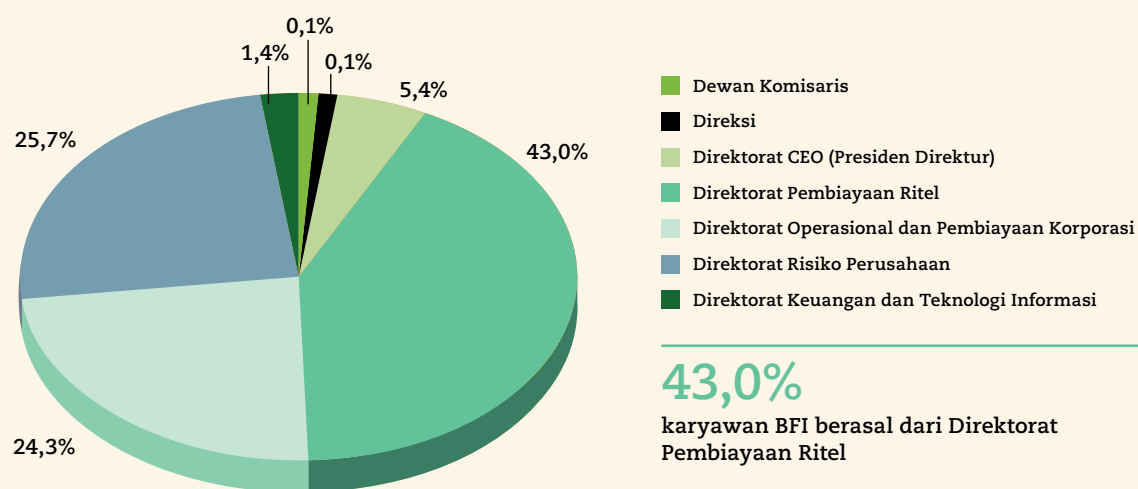
Tahun		Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
2015	2016	Jumlah	Persentase
7.924	8.941	1.017	12,8%



Tabel 16 – JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT

Keterangan	2015		2016		Jumlah 2015	Jumlah 2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita			Jumlah	Persentase
Dewan Komisaris	5	1	5	1	6	6	0	0,0%
Direksi	4	0	5	0	4	5	1	25,0%
Direktorat CEO (Presiden Direktur)	276	76	376	112	352	488	136	38,6%
Direktorat Pembiayaan Ritel	2.528	345	3.205	641	2.873	3.846	973	33,9%
Direktorat Operasional dan Pembiayaan Korporasi	989	1.274	983	1.187	2.263	2.170	-93	-4,1%
Direktorat Risiko Perusahaan	2.066	250	2.035	264	2.316	2.299	-17	-0,7%
Direktorat Keuangan dan Teknologi Informasi	64	46	82	45	110	127	17	15,5%
Jumlah	5.932	1.992	6.691	2.250	7.924	8.941	1.017	12,8%

Grafik 14 – PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT



Tabel 17 – JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Keterangan	2015		2016		Jumlah 2015	Jumlah 2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita			Jumlah	Persentase
Karyawan Tetap	3.410	1.376	3.825	1.497	4.786	5.322	536	11,2%
Karyawan Kontrak	1.803	463	1.229	310	2.266	1.539	-727	-32,1%
Mitra BFI	719	153	1.637	443	872	2.080	1.208	138,5%
Jumlah	5.932	1.992	6.691	2.250	7.924	8.941	1.017	12,8%

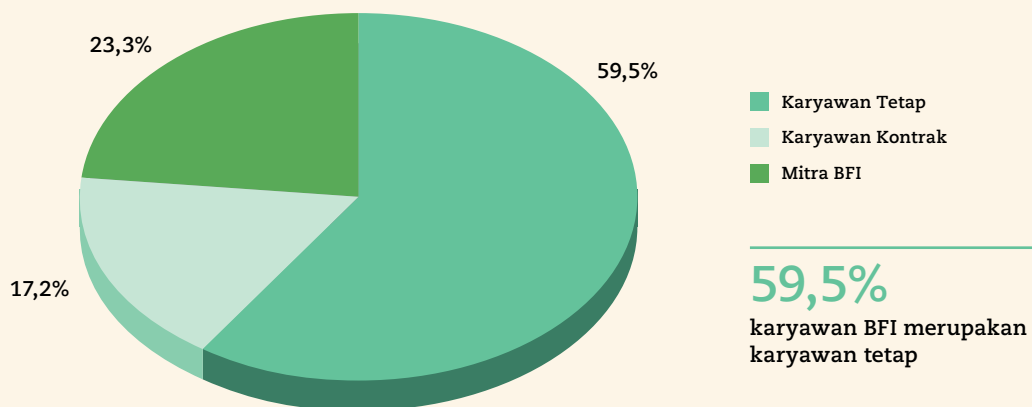
Tabel 18 – JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Keterangan	2015		2016		Jumlah 2015	Jumlah 2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita			Jumlah	Persentase
Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3)	30	9	33	9	39	42	3	7,7%
Strata 1 (S1)	3.061	1.366	3.628	1.523	4.427	5.151	724	16,4%
Diploma	675	330	753	356	1.005	1.109	104	10,3%
SMA ke bawah	2.166	287	2.277	362	2.453	2.639	186	7,6%
Jumlah	5.932	1.992	6.691	2.250	7.924	8.941	1.017	12,8%

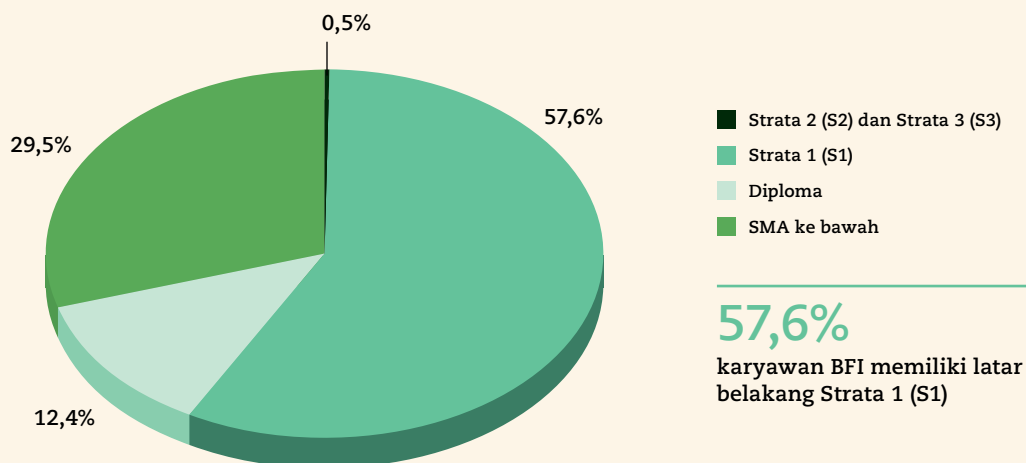
Tabel 19 – JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Keterangan	2015		2016		Jumlah 2015	Jumlah 2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita			Jumlah	Persentase
Dewan Komisaris dan Direksi	9	1	10	1	10	11	1	10,0%
Manajer Senior	91	23	105	22	114	127	13	11,4%
Manajer Junior	302	67	356	79	369	435	66	17,9%
Officer	1.433	564	1.565	599	1.997	2.164	167	8,4%
Staf	4.097	1.337	4.655	1.549	5.434	6.204	770	14,2%
Jumlah	5.932	1.992	6.691	2.250	7.924	8.941	1.017	12,8%

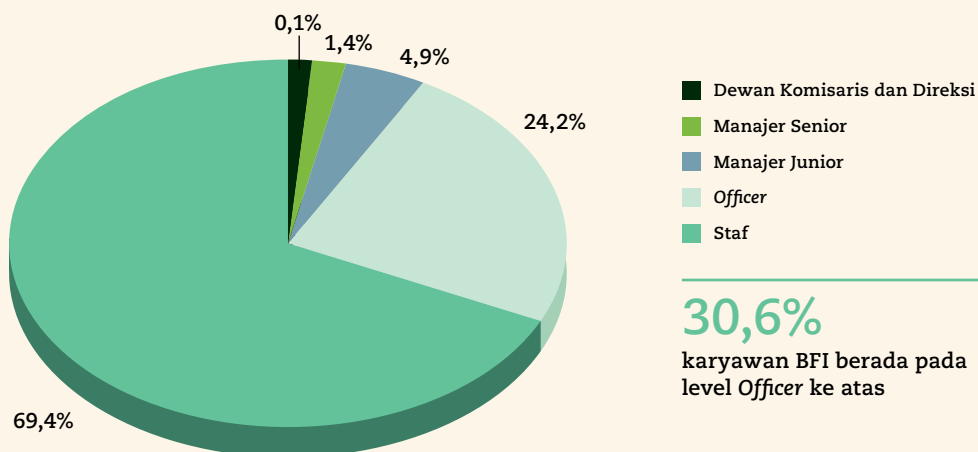
Grafik 15 – PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN



Grafik 16 – PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN



Grafik 17 – PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN



Tabel 20 – JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Keterangan	2015		2016		Jumlah 2015	Jumlah 2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita			Jumlah	Persentase
< 25 tahun	1.035	631	1.193	679	1.666	1.872	206	12,4%
25 - 30 tahun	2.968	985	3.316	1.132	3.953	4.448	495	12,5%
31 - 40 tahun	1.718	321	1.942	377	2.039	2.319	280	13,7%
41 - 50 tahun	194	50	219	55	244	274	30	12,3%
> 50 tahun	17	5	21	7	22	28	6	27,3%
Jumlah	5.932	1.992	6.691	2.250	7.924	8.941	1.017	12,8%

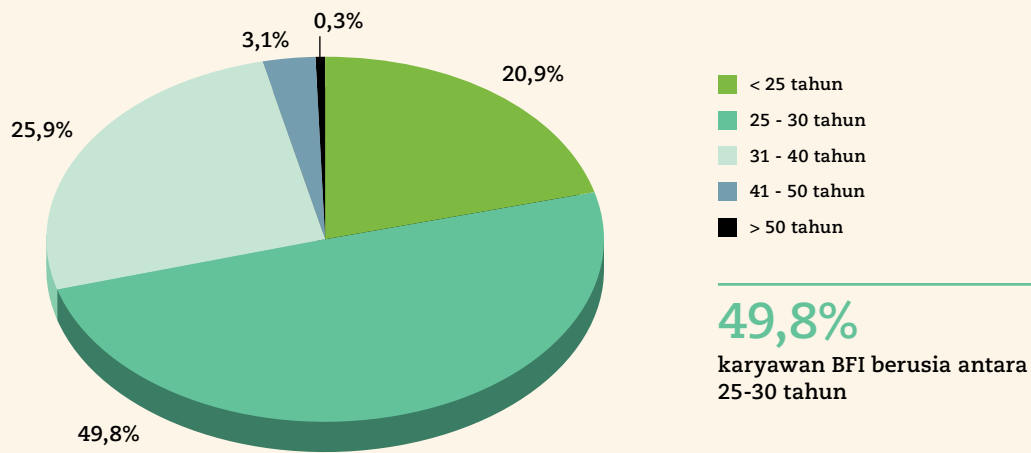
Tabel 21 – JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Keterangan	2015		2016		Jumlah 2015	Jumlah 2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita			Jumlah	Persentase
< 3 tahun	3.857	1.120	4.374	1.279	4.977	5.653	676	13,6%
3 - 5 tahun	1.347	547	1.339	516	1.894	1.855	-39	-2,1%
6 - 10 tahun	517	227	728	342	744	1.070	326	43,8%
11 - di atas 20 tahun	211	98	250	113	309	363	54	17,5%
Jumlah	5.932	1.992	6.691	2.250	7.924	8.941	1.017	12,8%

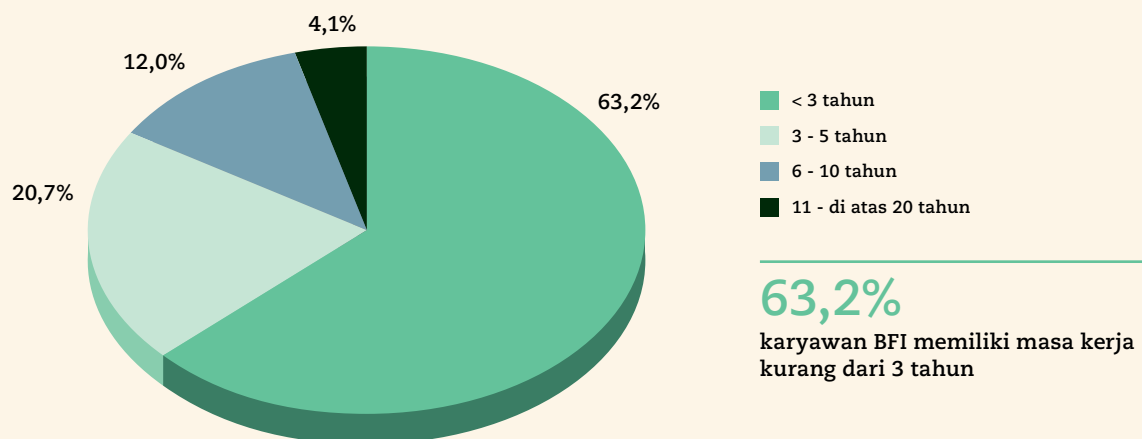
Tabel 22 – PESERTA MANAJEMEN TALENTA DAN KADERISASI

Keterangan	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Manajer dan Pimpinan di atasnya	38	102	64	168,4%
Supervisor	546	609	63	11,5%
Jumlah	584	711	127	21,7%

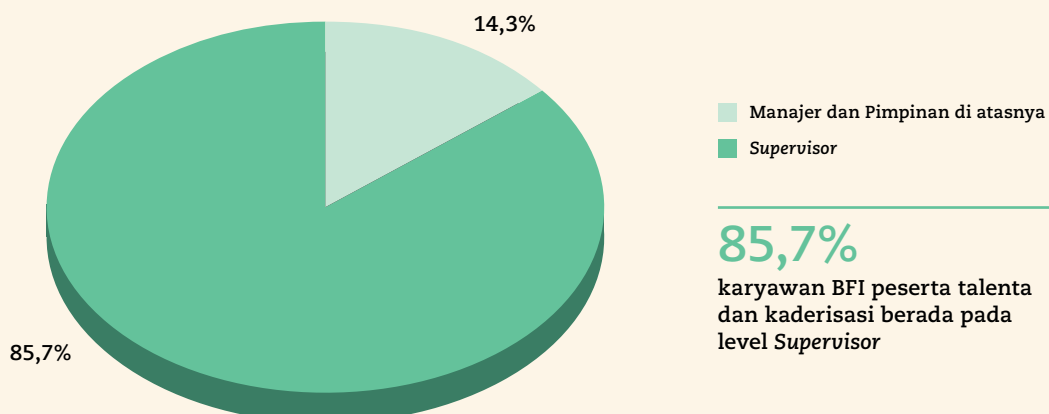
Grafik 18 – PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN USIA

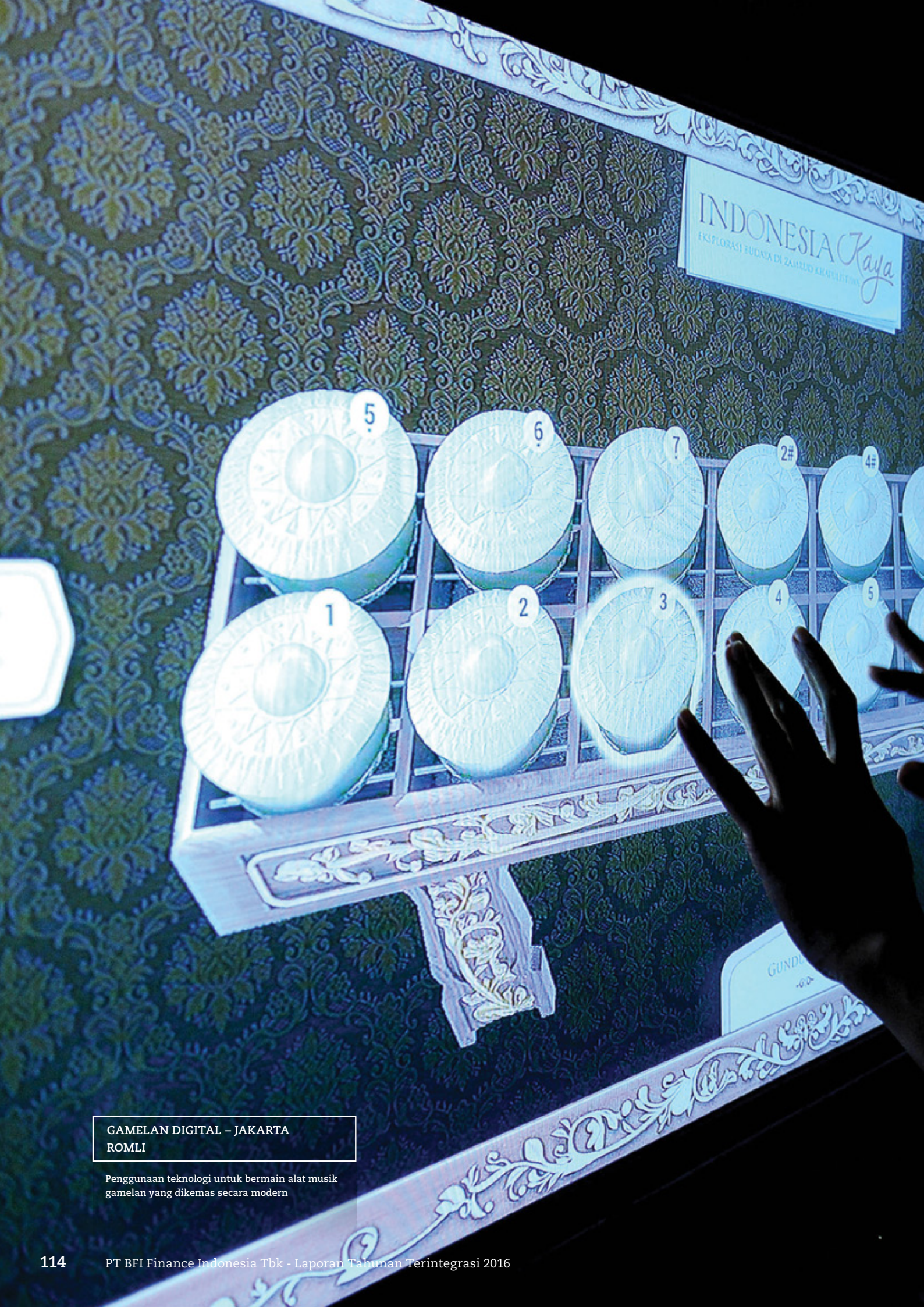


Grafik 19 – PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA



Grafik 20 – PERSENTASE PESERTA MANAJEMEN TALENTA DAN KADERISASI





GAMELAN DIGITAL – JAKARTA
ROMLI

Penggunaan teknologi untuk bermain alat musik gamelan yang dikemas secara modern

UNIT PENDUKUNG BISNIS

Jaringan dan Operasional

116

Teknologi Informasi

120



JARINGAN DAN OPERASIONAL

PENGEMBANGAN JARINGAN

Dalam rangka mengembangkan bisnis di 2017, Perusahaan menambah sebanyak 38 kantor cabang dan gerai sehingga jumlahnya menjadi 305 outlet per akhir 2016.

Pengembangan jaringan bertujuan untuk:

- Mengoptimalkan penetrasi pasar dengan merapatkan lokasi kantor sehingga lebih mudah diakses pelanggan; dan
- Mempercepat proses aplikasi dan meningkatkan pelayanan konsumen.



Langkah lain yang kami ambil untuk pengembangan jaringan, antara lain:

a. **Mengefektifkan Pengelolaan di Kantor Cabang dan Gerai**

Mengoptimalkan kantor cabang dan gerai melalui pengelolaan penjualan, penagihan dan operasional yang lebih efektif.

b. **Meningkatkan Pengawasan terhadap Kantor Cabang dan Gerai**

Menerapkan pengawasan berkelanjutan terhadap kantor cabang dan gerai melalui sistem area dan regional, serta pengoptimalan peran kantor pusat dalam pengelolaan informasi dan penanganan cepat atas kantor cabang yang mengalami penurunan kinerja.

PENGEMBANGAN OPERASIONAL DAN PRODUKTIVITAS

BFI telah menjalankan berbagai proyek pengembangan operasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas, pelayanan pelanggan, dan efisiensi operasional di kantor cabang maupun kantor pusat.

Grafik 21 – JUMLAH OUTLET



Proyek Golden Bamboo

Pada 2016, Perusahaan menjalankan proyek *Golden Bamboo* sebagai lanjutan dari proyek RACE (*Revenue Acceleration and Cost Efficiency*) dengan fokus kepada peningkatan produktivitas, pelayanan pelanggan, dan efisiensi operasional, melalui otomasi dan teknologi digital. Proyek ini sudah memasuki tahap implementasi secara nasional dan berfokus pada tiga hal utama:

- Efektivitas dan efisiensi seluruh penjualan;
- Efektivitas pengelolaan kontrak konsumen dan penagihan; dan
- Sistem kontrol manajemen yang lebih baik dalam proses analisis kredit.

Tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan peningkatan pendapatan dan penurunan biaya tiap kantor cabang melalui pengoptimalan proses kerja dan sistem kontrol penugasan tim surveyor; dan

- Meningkatkan kualitas layanan konsumen melalui integrasi sistem pendukung penilaian analisis kelayakan tahap awal, sehingga keputusan persetujuan kredit dapat diambil lebih cepat.

Inisiatif yang dilakukan dalam proyek ini, antara lain:

- Pembuatan aplikasi untuk mendukung otomasi penugasan surveyor dari lokasi kantor cabang yang terdekat dengan konsumen;
- Peningkatan kapasitas tim surveyor seiring bertambahnya jumlah penugasan; dan
- Pembuatan aplikasi pendukung untuk penilaian analisis kelayakan.

Selain itu, struktur penagihan di kantor cabang diperbaiki melalui penugasan tim penagihan pada area kerja dan kelompok konsumen yang lebih teratur, sehingga produktivitas meningkat.

Tujuan dan manfaat perubahan struktur tersebut adalah sebagai berikut:

- Mempermudah dan mempercepat penyediaan layanan;

- Membangun hubungan yang lebih baik dengan para pelanggan dan mitra bisnis atau *supplier*;
- Meningkatkan kapasitas kantor cabang; dan
- Memperbaiki kinerja serta produktivitas.

Proyek ini dijalankan dalam beberapa tahap. Pada triwulan ke-4 tahun 2016, Perusahaan sudah menjalankan *pilot project* di dua wilayah dengan hasil memuaskan dan sambutan baik dari seluruh karyawan kantor cabang. Proyek ini akan memasuki implementasi lanjutan secara bertahap di regional lainnya pada awal 2017, hingga dapat berlaku secara nasional.

Hasil yang telah didapat dari proyek ini:

Penyederhanaan Proses

Proyek *Golden Bamboo* menyederhanakan proses operasional dengan menjadi terkonsolidasinya sebagian kegiatan operasional di level area dan regional yang sebelumnya dilaksanakan per masing-masing cabang kegiatan operasional di level area dan regional. Dampaknya, pelayanan kepada konsumen/pelanggan maupun mitra usaha Perusahaan pun menjadi lebih baik.



Peningkatan Kontrol Internal

Perubahan proses juga bertujuan meningkatkan komunikasi, efektivitas antartim operasional, dan efisiensi pembagian tugas dan tanggung jawab setiap lapisan (regional, area, dan cabang) dalam struktur organisasi. Lebih sederhananya proses di cabang-cabang mampu meningkatkan kualitas kontrol internal di tingkat cabang dan area.

Pengoptimalan Produktivitas Operasional

Penyederhanaan proses operasional dapat mengoptimalkan produktivitas karyawan operasional. Berdasarkan perbandingan data 2015 dan 2016, jumlah karyawan operasional menurun dari 928 orang menjadi 826 orang (12,3%) berkat penyederhanaan proses tersebut. Angka di atas menunjukkan peningkatan produktivitas karyawan operasional, walaupun jaringan operasional Perusahaan semakin meluas di 2016.



MUJIYANA

Pelanggan Pembiayaan Mobil Bekas, Sleman, Yogyakarta

Mulanya pada 2008, saya memperoleh informasi tentang BFI dari teman dan kerabat saya. Setelah bekerja sama, ternyata cocok, sampai sekarang. Menurut saya, layanan BFI yang sekarang sudah baik, terutama prosedurnya yang jelas dan petugasnya yang cepat tanggap. Jika ada keperluan lagi, tentunya saya akan kembali memilih BFI.

KERRY MONDONG JONG

Truck & Excavator Financing Customer – Ternate, Maluku Utara

Layanan BFI cukup baik. Cara pengajuan aplikasinya jelas dan mudah, petugas selalu dapat dihubungi, dan BFI juga memberikan pengetahuan dan perhatian yang cukup kepada kami sebagai pelanggan. Kalau ada kebutuhan lagi di masa depan, saya akan kembali memilih BFI untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.



FOKUS PADA LAYANAN PELANGGAN

BFI terus meningkatkan kualitas layanan pelanggan yang menjadi faktor penting dalam persaingan industri melalui penyempurnaan sistem, prosedur dan keandalan jaringan.

Penerapan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan

BFI memiliki nilai-nilai dasar yang senantiasa diterapkan untuk meraih kepuasan pelanggan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui *Excellent Service* atau Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal.

Dalam rangka mengembangkan bisnis pada 2017, Perusahaan menambah sebanyak 38 kantor cabang dan gerai sehingga totalnya menjadi 305 outlet per akhir 2016



BFI menerapkan strategi pelayanan prima yang berkelanjutan dengan tema "Smile from the HEART." HEART merupakan singkatan dari:

- **H**-Hati yang peduli kepada pelanggan.
- **E**-Ekspresikan dengan keramahan dan ketulusan.
- **A**-Andalkan kecepatan dan ketepatan.
- **R**-Responsif dan proaktif mengatasi kebutuhan pelanggan.
- **T**-Tutur kata yang positif.

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga konsistensi budaya pelayanan, BFI senantiasa meningkatkan kompetensi karyawannya, khususnya para *frontliner*, dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dan pelanggan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama 2016 untuk peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. *Service Training*, yaitu pelatihan agar pelaku pelayanan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu memberikan respon yang cepat, memiliki integritas yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Perusahaan, konsisten dan santun dalam memberikan pelayanan pelanggan;
2. Pemberian nilai lebih dan kemudahan bagi pelanggan BFI Prioritas; dan
3. Program *Special Treatment* Pelanggan Motor dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, berupa pemberian *voucher* gratis dan bingkisan menarik lainnya bagi para pelanggan produk pembiayaan kendaraan motor.

TEKNOLOGI INFORMASI

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan senantiasa mengembangkan Teknologi Informasi ("TI") untuk mencapai kinerja optimal dan mengintegrasikan seluruh lini bisnis yang ada. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat posisi dan keunggulan Perusahaan di bidang usaha pembiayaan yang semakin kompetitif.

Pengembangan TI di BFI bertujuan untuk memenuhi rencana jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan. Rencana jangka panjang berkaitan dengan infrastruktur TI dan *platform* aplikasi yang disiapkan agar mampu mendukung pengembangan bisnis Perusahaan dalam 5-10 tahun ke depan, sedangkan rencana jangka pendek bertujuan untuk mendukung strategi bisnis Perusahaan dalam 1-2 tahun ke depan, yang meliputi antara lain kebutuhan atas pengembangan aplikasi *Core System* dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya.

Untuk mendukung pertumbuhan Perusahaan ke depan, BFI membangun *data center* yang dapat menunjang skalabilitas bisnis dalam sepuluh tahun ke depan dan memenuhi Standar Tier-2+ (*redundant power source, redundant network* dan *redundant cooling system*). Demi menjamin tersedianya layanan yang andal, Perusahaan juga telah mengoperasikan *server virtualization* dan sistem *High Availability*. Dengan penggunaan *server virtualization*, optimalisasi investasi TI dapat dicapai dan penerapan sistem *High Availability* akan meminimalisir risiko gangguan sistem akibat kerusakan perangkat keras (*hardware failure*).

Untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, Perusahaan terus mengembangkan aplikasi IT secara berkesinambungan, menambahkan fitur bisnis, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan yang ada. Sistem informasi manajemen (*Management Information System* atau "MIS") pun terus dikembangkan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif dan berlandaskan data aktual.

CORE SYSTEM TERINTEGRASI

Sejalan dengan rencana ekspansi bisnis Perusahaan melalui pembukaan sejumlah cabang di luar Jawa, peran TI pun semakin penting dari segi operasional, kontrol, dan pemanfaatan database untuk perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan Perusahaan.

Sejak tahun 2008, Perusahaan telah mengembangkan sistem aplikasi utama (*Core System*) yang terintegrasi dan berbasis web untuk mendukung pertumbuhan bisnis selama paling tidak sepuluh tahun ke depan. Selanjutnya, proses integrasi dengan sistem pendukung dilakukan secara berkelanjutan sehingga proses bisnis utama dapat dimonitor dan dibandingkan dengan target *Service Level Agreement* ("SLA").

Sistem yang diintegrasikan meliputi aplikasi sistem *Telesales, Salestrax, Mobile Survey* dan *Core System*.

Saat ini, seluruh sistem Perusahaan sudah terintegrasi dan proses *monitoring* dapat dilakukan secara *real-time*, dan mencakup sebagian besar proses operasional sehari-hari, antara lain:

- *Customer-acquisition process and marketing simulation* yang meliputi simulasi kredit serta pengecekan *negative list* dan status kredit untuk pelanggan yang sudah ada;
- *Account acquisition* yang meliputi laporan survei, *financial structuring, credit management and approval, credit appeal* dan lainnya, sehingga seluruh proses kredit tercatat di sistem dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan;
- *Disbursement and finance*, sistem terintegrasi yang memungkinkan pembayaran terpusat secara *online* kepada para *supplier*, serta pencatatan semua aktivitas keuangan yang terjadi di seluruh kantor cabang pada sistem; dan
- *Account maintenance*, sistem yang memonitor seluruh transaksi para pelanggan, meliputi antara lain pembayaran, penagihan, penerbitan surat peringatan, hingga penarikan barang dan manajemen atas barang yang berhasil ditarik hingga terjual.

Kini hampir seluruh aktivitas bisnis dijalankan melalui *Core System*, termasuk transaksi yang melibatkan pihak ketiga (misalnya penutupan asuransi secara *host-to-host* dengan perusahaan rekanan). Setiap transaksi keuangan yang terjadi pun langsung terhubung dengan modul *General Ledger* ("GL") dalam *Core System* tersebut.

Teknologi informasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen dan pelanggan melalui kecepatan, ketepatan dan transparansi proses bisnis.

Core System menghasilkan aktivitas bisnis yang lebih terkontrol, ketersediaan informasi setiap saat, dan pengambilan keputusan bisnis yang jauh lebih cepat dan akurat. Pengembangan masing-masing modul dijalankan agar sistem senantiasa dalam kondisi terkini sesuai kebutuhan Perusahaan. Perkembangan TI dalam Perusahaan pun telah mendorong tumbuhnya budaya pengambilan keputusan berbasis data dan informasi.

HIGH AVAILABILITY DAN DISASTER RECOVERY PLAN ("DRP")

Sistem *High Availability* dan *DRP* diterapkan untuk memastikan ketersediaan informasi yang memadai sebagai penunjang bisnis Perusahaan.

Sistem *High Availability* dapat menanggulangi potensi gangguan pada sistem kerja pusat data BFI (yang dapat disebabkan oleh kerusakan perangkat keras, pemadaman listrik, gangguan komunikasi data, keadaan kahar atau huru-hara) melalui proses *failover* instan ke sistem *backup* saat terjadi gangguan.

DRP dijalankan melalui replikasi data secara *online* maupun *offline*. *Online backup* BFI dilakukan melalui replikasi data berkesinambungan

(*real-time mirroring*) yang menjamin ketersediaan cadangan data terkini, di mana setiap perubahan pada database induk akan segera dimasukkan ke database situs *Data Recovery Centre* ("DRC") secara *real*

time. Situs *DRC* dikelola oleh vendor independen yang merupakan salah satu penyedia pusat data terbesar di Indonesia dan telah memenuhi standarisasi *DRC Tier-3* yang mencakup *redundant infrastructure capacity, dual power source* dan *concurrently maintainable site*. Sementara, proses *offline backup* dijalankan melalui mekanisme *backup* ke *CD* dan *tape* secara berkala dan disimpan di luar kantor.

Jika terjadi gangguan seperti kerusakan pada infrastruktur pusat data, sistem *High Availability* akan menjalankan proses pengalihan operasional *Core System* secara otomatis ke situs *DRC*. Potensi gangguan operasional dan kehilangan data pun dapat diminimalisir, sehingga kegiatan operasional di kantor cabang maupun pusat tetap berjalan normal.

Setiap tahunnya, BFI melakukan serangkaian uji coba dan simulasi untuk memastikan mekanisme *DRP* berjalan sesuai ekspektasi Perusahaan.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS, PRODUKTIVITAS KERJA DAN KEMUDAHAN OPERASIONAL MELALUI PENERAPAN SISTEM TI

BFI terus berupaya mengembangkan sistem informasi

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Dengan sistem informasi terintegrasi yang didukung oleh *Data Warehouse* dan *Business Intelligence*, proses pengambilan keputusan oleh manajemen pun menjadi lebih cepat dan efektif.

Sepanjang 2016, BFI berhasil mengimplementasikan aplikasi *mobile survey* dan *mobile collection*, yang meningkatkan kecepatan dan efektifitas kerja karyawan di lapangan. Ketersediaan *spatial data* terbukti menjadi informasi yang sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan operasional juga dilakukan dengan dukungan TI yang antara lain berupa:

1. Payment Point untuk Pelanggan

Payment Point bertujuan memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dengan memungkinkan transaksi nontunai dan pembayaran angsuran di lokasi terdekat melalui kerja sama dengan BCA, Mandiri, Permata, jaringan ATM Bersama, jaringan Alfa (Alfamart, Alfa Midi, Alfa Express dan Lawson), Indomaret, dan Pos Indonesia.

2. Electronic Data Capture ("EDC")

EDC digunakan oleh staf penagihan di lapangan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas proses penagihan kepada para pelanggan.

3. E-filing dan Document Management System ("DMS")

E-filing dan *DMS* adalah aplikasi manajemen dokumen

terpusat yang dapat diakses oleh user terkait. Dengan sistem ini, Perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya, sekaligus menerapkan sistem kustodian di beberapa lokasi cabang sehingga kontrol, akuntabilitas, dan tertib administrasi atas dokumen menjadi lebih baik. Penggabungan lokasi penyimpanan aset jaminan pelanggan dilakukan dengan membentuk empat pusat kustodian (*custodian centre*) yang berlokasi di kantor cabang BSD City (Tangerang Selatan), Bandung, Surabaya, dan Pekanbaru.

KEAMANAN TI

Perusahaan mengkaji dan mengevaluasi keamanan sistem informasi secara berkesinambungan dengan mengacu kepada standar keamanan ISO 27001. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Perusahaan menentukan arah dan prioritas pengembangan keamanan sistem informasi serta melakukan penyempurnaan prosedur dan kontrol.

PENGEMBANGAN TI 2016

Pengembangan TI di lingkungan bisnis Perusahaan selama 2016 meliputi:

1. Rebranding Situs Web Perusahaan

Menanggapi perkembangan dunia internet dan digital serta penggunaan *smartphone*, Perusahaan melakukan *rebranding* sekaligus

pengembangan situs web dengan teknologi terkini dan konsep *Responsive Website*.

2. Business Process Re-engineering

Persaingan bisnis yang semakin kompetitif mewajibkan Perusahaan melakukan *Business Process Re-engineering*, khususnya dalam hal *Lead Capture* dan *Loan Origination* sehingga proses pengajuan kredit dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan transparan.

3. Pengembangan Infrastruktur Data Center

Untuk mencapai layanan TI yang sistematis, stabil, dan aman, Perusahaan menjalankan perbaikan, penyempurnaan dan peremajaan infrastruktur TI secara berkesinambungan. Salah satu perwujudannya adalah melakukan peremajaan *storage* dan *server*. Peremajaan *storage* dilakukan dengan penggantian *storage server* dan penggunaan media *Solid State Disk* ("SSD") yang saat ini merupakan media tercepat dan terkini. Penggunaan media SSD mampu meningkatkan kinerja sistem secara signifikan dan keseluruhan. Peremajaan server dilakukan terhadap *server Core System*; mencakup *production server*, *standby server* dan *DRP server*; sehingga siap mendukung pertumbuhan bisnis dalam beberapa tahun mendatang.

4. Data Warehouse dan Business Intelligence ("DW/BI")

BFI senantiasa mengembangkan sistem DW/BI secara paralel dengan *Core System*, sejalan dengan perkembangan dinamika bisnis Perusahaan.

Dengan sistem baru yang lebih mudah digunakan dan canggih ini, pengguna dapat memperoleh informasi dari aplikasi seluler dan mengambil keputusan dengan lebih cepat.

SISTEM DAN APLIKASI TI LAINNYA

Dalam rangka mempermudah kerja SDM melalui TI, BFI turut mengembangkan berbagai solusi TI yang terintegrasi dengan aplikasi *Core System*, antara lain:

1. Sistem Teleoperation dan Telesales

Sistem *Teleoperation* dan *Telesales* bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran serta operasional Perusahaan. Kedua sistem ini dikembangkan secara terpisah, namun tetap terintegrasi dengan aplikasi *Core System*. Dengan demikian, integritas data dan proses pemantauan aktivitas seperti penjualan, pemasaran, pemesanan dan penagihan dapat berjalan dengan baik. Sistem *Teleoperation* dan *Telesales* yang tersedia saat ini antara lain:

Teleoperation Collection

Panggilan untuk mengingatkan pelanggan yang terlambat membayar angsuran antara 1-3 hari, serta menindaklanjuti pelanggan yang memberikan janji pembayaran dalam tempo tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo awal.

Teleoperation Survey

Bagian dari program *Customer Relationship Management* ("CRM") yang bertujuan melakukan survei kepuasan pelanggan dan

mendapatkan masukan dari pelanggan mengenai pelayanan dari kantor cabang BFI di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Teleoperation Audit

Panggilan telepon untuk memperbarui status data pelanggan dan menjalankan fungsi audit terhadap validitas data pelanggan.

Telesales

Proses penjualan dan persetujuan melalui telepon yang menjangkau seluruh Indonesia, dengan efektivitas kerja yang dapat terukur dan terpantau dengan baik.

2. Fixed Assets Management ("FAM")

Sistem yang dirancang untuk dapat berintegrasi dengan modul pembukuan Perusahaan, sehingga jumlah aset dapat ditangani dengan baik.

3. Aplikasi Mobile Survey & Approval

Sistem aplikasi seluler yang terintegrasi dengan Core System dengan tujuan meningkatkan efektivitas *staf surveyor* di lapangan, sehingga mereka tidak perlu lagi kembali ke kantor untuk memasukkan data aplikasi konsumen pada sistem komputer.

4. Pengembangan Human Capital Information System ("HCIS")

Pengembangan aplikasi berbasis jaringan yang dapat diakses online dari seluruh outlet Perusahaan, dan

dilengkapi dengan fitur-fitur *employee self-service* seperti pemutakhiran data pribadi karyawan, pengajuan klaim biaya berobat rawat inap dan rawat jalan, serta pengajuan izin dan cuti karyawan. Proses evaluasi hasil kerja tengah tahun dan akhir tahun juga dilakukan secara *online* dari seluruh outlet di Indonesia.

5. Loan Management System

Sistem terintegrasi yang berperan sebagai penghubung antara pihak bank dengan BFI, sehingga pencatatan atau pembukuan transaksi *Joint Financing* maupun *Fund Borrowings* dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dengan aplikasi *Core System*; baik transaksi yang berasal dari fasilitas *Joint Financing*, *Asset Purchase*, maupun Pinjaman Berjangka (*Term Loan*) dari pihak bank. Sistem ini juga berfungsi memantau transaksi pencairan, pembayaran angsuran dan pelunasan yang dipercepat secara harian, dan pemantauan arus kas harian, serta menghasilkan berbagai laporan untuk keperluan analisa dan pengambilan keputusan.

6. Sistem Host-to-Host

Proses kerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko tidak tertutupnya asuransi atas aset yang dibiayai, yang dilakukan secara terintegrasi dengan *Core System* yang ada.

RENCANA PENGEMBANGAN TI 2017

Rencana pengembangan pada 2017 mencakup lanjutan proses pengembangan dari 2016, serta membangun kapasitas dan efisiensi bisnis Perusahaan melalui berbagai inisiatif berikut:

1. Pembaruan sistem *Loan Origination* dan *Credit Engine* berbasis BPM (*Business Process Management*) dan *Rule Engine*;
2. Mengembangkan *Mobile Application* untuk konsumen, pelanggan dan mitra bisnis;
3. Pembaruan aplikasi *Telesales* berbasis CRM (*Customer Relationship Management*);
4. Mengembangkan infrastruktur TI secara berkesinambungan, khususnya terkait *security*, *availability* dan *system performance*;
5. Membangun kemampuan *underwriting* bisnis yang mampu menjangkau dan memproses *database* calon konsumen dalam jumlah besar secara instan dan berbasis digital melalui aplikasi yang mudah dipakai penggunaanya;
6. Mengembangkan kapasitas untuk melayani segmen konsumen baru, termasuk bidang *e-commerce*, dan mengambil peluang bisnis yang belum terlayani seluruhnya oleh sistem finansial tradisional;
7. Pengembangan *Procurement System* yang mencakup proses pengadaan barang dalam lingkup Perusahaan; dan
8. Pengembangan aplikasi pendukung bisnis lainnya sesuai perkembangan Perusahaan.



**KREDIT USAHA BERSAMA BFI - INDRAMAYU
SOFYAN EFENDI**

Pemanfaatan fasilitas keuangan untuk meningkatkan
Usaha Kecil Menengah

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Ekonomi dan Industri	126
Tinjauan Bisnis	128
Aspek Pemasaran	135
Tinjauan Kinerja Keuangan	140
Kemampuan Membayar Utang	162
Tingkat Kolektibilitas Piutang (Kualitas Aset)	163
Struktur Modal (Kecukupan Modal)	164
Kebijakan dan Pembayaran Dividen	166
Penggunaan Dana Penerbitan Umum	167
Investasi, Divestasi, Merger & Akuisisi, serta Restrukturasi Utang atau Modal	167
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh	168
Perubahan Kebijakan Akuntansi	169
Prospek Bisnis 2017	170



TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Kendati pertumbuhan kredit perbankan dan institusi keuangan non-bank hanya mencapai 7,9% di 2016 dibandingkan 10,5% di tahun sebelumnya, BFI dapat menumbuhkan piutang bersih pembiayaan sebesar 17,0% selama 2016.



Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Secara eksternal, kelesuan perekonomian global tidak membantu aktivitas ekspor Indonesia. Selanjutnya, muncul tren positif yang menunjukkan pemulihan ekonomi global, namun sejumlah tantangan tetap dirasakan, terutama dari perekonomian Eropa, Jepang dan Tiongkok yang terus melambat, dan pasar keuangan global yang mencatat kenaikan suku bunga Bank Sentral AS.

Seiring perlambatan ekonomi global, pertumbuhan PDB Indonesia juga tetap dalam kondisi yang rendah di 2016 yaitu 5,0%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 4,8%. Inflasi Indonesia tetap rendah pada 3,0%, yang merupakan batas bawah target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 3-5%. Sementara itu, harga sumber energi menurun di tengah proses reformasi subsidi bahan bakar minyak oleh Pemerintah, seiring dengan penurunan harga sumber energi dunia. Kondisi rupiah sangat fluktuatif di sepanjang tahun, dimana nilai tukar rupiah terhadap USD diawali dengan angka Rp13.898 per USD dan ditutup pada Rp13.436 per USD di akhir tahun.

Industri pembiayaan di Indonesia merupakan industri yang sangat terfragmentasi dengan sekitar 200 pelaku bisnis. Perusahaan-perusahaan ini memiliki izin untuk menyediakan produk pembiayaan yang meliputi Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen, Anjak Piutang, dan lain-lain. Selama beberapa tahun, telah kita saksikan pertumbuhan yang kuat di industri pembiayaan dengan rata-rata 6,4% selama 2012-2016. Pada 2016 total Piutang Pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 6,7% menjadi Rp387.505 miliar setelah sempat terjadi kontraksi pada 2015.

Tabel 23 – POSISI PIUTANG INDUSTRI PEMBIAYAAN (2012-2016)

Dalam Rp miliar	2012	2013	2014	2015	2016
Posisi Piutang	302.052	348.027	366.138	363.273	387.505

Sumber: Bank Indonesia.

Industri pembiayaan didominasi oleh sektor Pembiayaan Konsumen, dengan kontribusi sekitar 70,3% dari total piutang pembiayaan. Sektor ini meningkat sebesar 5,5% untuk periode Januari-Agustus 2016 menjadi Rp263.034 miliar. Pembiayaan Konsumen terutama didominasi oleh pembiayaan atas kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil.

Pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi domestik dengan mengurangi persyaratan uang muka untuk kredit mobil dan sepeda motor sejak Juni 2015, dan hal tersebut berdampak positif pada penjualan mobil baru, namun tidak mempengaruhi penjualan motor baru yang terus bergerak turun sejak pencapaian tertinggi di 2011 sebanyak lebih dari 8 juta unit.

Selama 2016, penjualan sepeda motor baru mengalami kontraksi sebesar 8,5% dari 2015, menjadi 5.931.285 unit. Sebaliknya, penjualan mobil baru berhasil mencatatkan pertumbuhan bersih sebesar 4,9%, dengan tingkat penjualan di 2016 mencapai 1.062.729 unit.

Tabel 24 – PENJUALAN MOBIL DAN MOTOR NASIONAL

Dalam Unit	2012	2013	2014	2015	2016
Mobil	1.116.230	1.229.901	1.208.019	1.013.291	1.062.729
Motor	7.064.457	7.743.879	7.867.285	6.480.155	5.931.285

Sumber: Gaikindo, AISI.

Sementara itu, terjadi kontraksi sebesar 5,1% atau Rp5.372 miliar atas piutang Sewa Pembiayaan, menjadi Rp99.480 miliar untuk periode Januari-Agustus 2016 (sesuai data industri yang dipublikasikan oleh OJK). Sektor ini berkontribusi sebesar 26,6% terhadap jumlah piutang pembiayaan per Agustus 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pelemahan komoditas yang menjadi andalan bagi sewa pembiayaan belum berakhir, meskipun pada akhir 2016 sudah terdapat titik cerah berupa peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

TINJAUAN BISNIS

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tertanggal 19 November 2014, Ruang lingkup Perusahaan meliputi bidang usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Saat ini BFI memfokuskan kegiatan bisnisnya pada pembiayaan mobil (baru dan bekas) dan sepeda motor (bekas), serta pembiayaan alat berat, mesin dan peralatan lainnya. Mulai 2015, Perusahaan mulai menjajaki sektor properti, yang dibukukan sebagai piutang Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan.

Tabel 25 – PEMBIAYAAN BARU DAN PIUTANG PEMBIAYAAN YANG DIKELOLA BERDASARKAN KEGIATAN USAHA

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Baru				
Sewa Pembiayaan	5.148	6.824	1.676	32,6%
Pembiayaan Konsumen	4.910	3.919	(991)	-20,2%
Jumlah Pembiayaan Baru	10.058	10.743	685	6,8%
Piutang Pembiayaan yang Dikelola				
Sewa Pembiayaan	5.293	7.182	1.889	35,7%
Pembiayaan Konsumen	6.936	5.844	(1.092)	-15,7%
Jumlah Piutang Pembiayaan yang Dikelola	12.229	13.026	797	6,5%
Keterangan (unit)				
Pembiayaan Baru				
Sewa Pembiayaan	47.495	65.989	18.494	38,9%
Pembiayaan Konsumen	188.218	216.841	28.623	15,2%
Jumlah Pembiayaan Baru	235.713	282.830	47.117	20,0%
Piutang Pembiayaan yang Dikelola				
Sewa Pembiayaan	58.943	91.113	32.170	54,6%
Pembiayaan Konsumen	256.192	271.796	15.604	6,1%
Jumlah Piutang Pembiayaan yang Dikelola	315.135	362.909	47.774	15,2%

Sehubungan dengan teknis pencatatan piutang pembiayaan dimana berdasarkan POJK No. 29/POJK.05/2014 dapat terjadi suatu jenis pembiayaan dengan aset yang sama memiliki tujuan pembiayaan yang berbeda, sehingga harus dibukukan secara terpisah antara lain di Pembiayaan Konsumen maupun Sewa Pembiayaan, maka dalam pembahasan tinjauan bisnis ini, Perusahaan akan berfokus pada jenis pembiayaan berdasarkan aset.

Tabel 26 – PEMBIAYAAN BARU DAN PIUTANG PEMBIAYAAN YANG DIKELOLA BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Baru				
Pembiayaan Mobil Bekas	6.792	7.805	1.013	14,9%
Pembiayaan Mobil Baru	1.246	359	-887	-71,2%
Pembiayaan Mobil	8.038	8.164	126	1,6%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	949	1.186	237	25,0%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	928	1.204	276	29,7%
Pembiayaan Properti	143	189	46	32,2%
Jumlah Pembiayaan Baru	10.058	10.743	685	6,8%
Piutang Pembiayaan yang Dikelola				
Pembiayaan Mobil Bekas	7.877	8.980	1.103	14,0%
Pembiayaan Mobil Baru	2.269	1.380	-889	-39,2%
Pembiayaan Mobil	10.146	10.360	214	2,1%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	1.287	1.544	257	20,0%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	654	868	214	32,7%
Pembiayaan Properti	142	254	112	78,9%
Jumlah Piutang Pembiayaan yang Dikelola	12.229	13.026	797	6,5%
Keterangan (unit)				
Pembiayaan Baru				
Pembiayaan Mobil Bekas	76.243	88.512	12.269	16,1%
Pembiayaan Mobil Baru	8.968	1.978	(6.990)	-77,9%
Pembiayaan Mobil	85.211	90.490	5.279	6,2%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	1.422	2.372	950	66,8%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	148.717	189.174	40.457	27,2%
Pembiayaan Properti	363	794	431	118,7%
Jumlah Pembiayaan Baru	235.713	282.830	47.117	20,0%
Piutang Pembiayaan yang Dikelola				
Pembiayaan Mobil Bekas	128.391	145.506	17.115	13,3%
Pembiayaan Mobil Baru	25.403	18.311	(7.092)	-27,9%
Pembiayaan Mobil	153.794	163.817	10.023	6,5%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	2.515	4.077	1.562	62,1%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	158.403	193.933	35.530	22,4%
Pembiayaan Properti	423	1.082	659	155,8%
Jumlah Piutang Pembiayaan yang Dikelola	315.135	362.909	47.774	15,2%

* Termasuk mesin dan peralatan lain

Kinerja bisnis Perusahaan berdasarkan jenis aset pada 2015 dan 2016 disajikan dalam paragraf selanjutnya.

PEMBIAYAAN BARU

Perusahaan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp10.743 miliar selama 2016, naik dari Rp10.058 miliar atau setara dengan 6,8%. Peningkatan yang terbesar terjadi pada Sewa Pembiayaan yaitu naik sebesar Rp1.676 miliar atau 32,6% dibanding tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan pada pembiayaan mobil bekas yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan. Sementara itu, pembiayaan konsumen mengalami kontraksi sebesar Rp991 miliar atau 20,2%, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan baru atas mobil baru.

Dari sisi jenis aset, peningkatan penyaluran pembiayaan baru didorong oleh peningkatan 14,9% atau Rp1.013 miliar pada pembiayaan mobil bekas hingga Rp7.805 miliar. Nilai ini dapat menutup dampak penurunan sebesar Rp887 miliar, atau penurunan sebesar 71,2% dari bisnis pembiayaan mobil baru. Penurunan ini sejalan dengan strategi Perusahaan dalam mengurangi fokus pada pembiayaan mobil baru di masa mendatang. Semua jenis aset lainnya dalam Pembiayaan Baru menunjukkan peningkatan yang sehat.

Pembiayaan Mobil

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan penjualan mobil baru di Indonesia berjalan stagnan, dari angka tertinggi pada 2013 sebanyak 1.229.901 unit, terus turun hingga menjadi 1.013.291 unit pada 2015. Pada 2016, terdapat peningkatan tipis sebesar 4,9% menjadi 1.062.729 unit (Tabel 24).

Pada akhir 2014, Perusahaan mencoba mengembangkan pembiayaan di sektor mobil baru, khususnya untuk segmen komersial di Jawa, dan sejak saat itu, pembiayaan mobil baru mengalami lonjakan yang cukup besar. Namun demikian, sejalan dengan berlalunya waktu, Perusahaan mengevaluasi perkembangan yang terjadi atas piutang pembiayaan di segmen tersebut, dan mendapati bahwa kualitas piutang yang dibiayai tidak sesuai harapan dan pada akhirnya sejak pertengahan tahun 2015, Perusahaan memutuskan untuk mengurangi ekspansi di sektor ini. Sebagai akibatnya, sepanjang 2016, terjadi penurunan yang cukup signifikan atas pembiayaan baru di sektor mobil baru sebesar Rp887 miliar atau 71,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pangsa pasar Perusahaan di mobil baru tidak signifikan, di bawah 1%, dan Perusahaan tidak memiliki rencana untuk fokus di bidang ini dalam tahun-tahun kedepan.

Fokus Perusahaan saat ini ada pada pembiayaan mobil bekas, yang mencakup 72,7% dari total penyaluran pembiayaan baru selama 2016. Sepanjang 2016, jumlah pembiayaan tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 14,9% dari tahun sebelumnya atau setara dengan Rp1.013 miliar. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari fokus Perusahaan di bidang pemasaran dan program retensi konsumen yang baik.

Jenis kendaraan yang dibiayai (baru dan bekas) meliputi berbagai tipe, dengan porsi terbesar ada di kendaraan serba guna (*minibus/MPV*), yang diikuti oleh kendaraan *jeep* dan truk.

Tabel 27 – DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BARU MOBIL BERDASARKAN JENIS MOBIL

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Minibus/MPV	3.548	3.926	378	10,7%
Jeep	1.266	1.422	156	12,3%
Truk	1.328	1.280	-48	-3,6%
Pick-up	1.418	993	-425	-30,0%
Sedan	429	488	59	13,8%
Bis	49	55	6	12,2%
Jumlah	8.038	8.164	126	1,6%
Persentase dari Jumlah				
Minibus/MPV	44,1%	48,1%	n/a	4,0%
Jeep	15,8%	17,4%	n/a	1,6%
Truk	16,5%	15,6%	n/a	-0,9%
Pick-up	17,6%	12,2%	n/a	-5,4%
Sedan	5,4%	6,0%	n/a	0,6%
Bis	0,6%	0,7%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Tabel 28 – DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BARU MOBIL BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Toyota	2.622	2.885	263	10,0%
Mitsubishi	1.560	1.416	-144	-9,2%
Daihatsu	981	994	13	1,3%
Honda	783	915	132	16,9%
Suzuki	1.034	801	-233	-22,5%
Isuzu	171	180	9	5,3%
Merek Jepang Lain-Lain	644	684	40	6,2%
Di Luar Merek Jepang	243	289	46	18,9%
Jumlah	8.038	8.164	126	1,6%
Persentase dari Jumlah				
Toyota	33,0%	35,3%	n/a	2,3%
Mitsubishi	19,1%	17,4%	n/a	-1,7%
Daihatsu	12,7%	12,2%	n/a	-0,5%
Honda	8,8%	11,2%	n/a	2,4%
Suzuki	13,5%	9,8%	n/a	-3,7%
Isuzu	2,0%	2,2%	n/a	0,2%
Merek Jepang Lain-Lain	8,2%	8,4%	n/a	0,2%
Di Luar Merek Jepang	2,7%	3,5%	n/a	0,8%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Sementara itu, merek mobil yang dibiayai oleh Perusahaan sebagian besar (>95%) adalah merek Jepang yang memiliki harga jual kembali yang lebih baik dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Merek Toyota berkontribusi 35,3% dari total pembiayaan baru Perusahaan sepanjang 2016.

Karena ketiadaan data total penjualan mobil bekas, pangsa pasar Perusahaan di mobil bekas tidak dapat dihitung secara akurat.

Pembiayaan Sepeda Motor

Sebagaimana halnya dengan penjualan mobil baru, penjualan sepeda motor baru di Indonesia juga mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan tertinggi terjadi pada 2011 dengan penjualan motor lebih dari 8.012.540 unit, dan sejak itu, terjadi fluktuasi penjualan, namun tidak pernah mencapai angka tertinggi tersebut, bahkan penjualan di 2016 hanya mencapai 5.931.285 unit, menurun 8,5% dari tahun 2015 sebanyak 6.480.155 unit (Tabel 24).

Perusahaan tidak melakukan pembiayaan sepeda motor baru, dan hanya membiayakan sepeda motor bekas. Strategi ini ditempuh karena pertimbangan bahwa pasar sepeda motor baru sudah dipenuhi banyak perusahaan pembiayaan lain yang sejak lama fokus di pasar ini, sementara itu Perusahaan tidak memiliki *competitive advantage* di bidang ini dan Perusahaan melihat bahwa prospek pertumbuhan penjualan sepeda motor baru tidak terlalu menggemblirakan, sebagaimana terbukti dari tabel yang di atas.

Pembiayaan sepeda motor bekas yang dilakukan Perusahaan adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah sepeda motor yang beredar di pasar saat ini sangat besar dan belum tergarap secara maksimal, sehingga ruang bagi Perusahaan untuk berperan di segmen ini masih terbuka lebar. Selama 2016, jumlah pembiayaan sepeda motor bekas mencapai Rp1.204 miliar dan berkontribusi sebesar 11,2% dari total pembiayaan baru Perusahaan, atau meningkat sebesar 29,7% dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi merek sepeda motor yg dibiayai, sebagian besar terbagi menjadi dua merek, yaitu Honda dan Yamaha.

Tabel 29 – DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BARU SEPEDA MOTOR BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Honda	443	595	152	34,3%
Yamaha	402	498	96	23,9%
Suzuki	60	78	18	30,0%
Lain-Lain	23	33	10	43,5%
Jumlah	928	1.204	276	29,7%
Persentase dari Jumlah				
Honda	47,7%	49,4%	n/a	1,7%
Yamaha	43,3%	41,4%	n/a	-1,9%
Suzuki	6,5%	6,5%	n/a	0,0%
Lain-Lain	2,5%	2,7%	n/a	0,2%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Alat-Alat Berat, Mesin dan Peralatan Lainnya

Sejak awal berdirinya, Perusahaan telah melakukan pembiayaan alat-alat berat hingga saat ini, yang terdiri dari berbagai tipe, merek dan kegunaan, dengan usaha konsumen di industri yang beragam, termasuk sektor

komoditas. Sejak 2013, industri komoditas yang menjadi andalan Indonesia menunjukkan tanda-tanda kontraksi, sejalan dengan penurunan tingkat permintaan khususnya dari Tiongkok selaku pembeli terbesar.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut, sejak 2014 Perusahaan secara bertahap telah melakukan

diversifikasi portofolio ke industri lain termasuk manufaktur dan infrastruktur.

Sebagai hasilnya, selama 2016, Perusahaan mampu membukukan penyaluran alat-alat berat, mesin dan peralatan lainnya sebesar Rp1.186 miliar, meningkat sebesar Rp237 miliar atau 25,0% dibandingkan 2015.

Tabel 30 – DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BARU ALAT-ALAT BERAT, MESIN DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN INDUSTRI

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Konstruksi	271	324	53	19,6%
Jasa	148	248	100	67,6%
Pertambangan	101	167	66	65,3%
Industri dan Manufaktur	145	166	21	14,5%
Perhutanan	126	129	3	2,4%
Perkebunan	84	67	-17	-20,2%
Perdagangan dan Distribusi	41	40	-1	-2,4%
Lain-Lain	33	45	12	36,4%
Jumlah	949	1.186	237	25,0%
Persentase dari Jumlah				
Konstruksi	28,6%	27,3%	n/a	-1,3%
Jasa	15,6%	20,9%	n/a	5,3%
Pertambangan	10,6%	14,1%	n/a	3,5%
Industri dan Manufaktur	15,3%	14,0%	n/a	-1,3%
Perhutanan	13,3%	10,9%	n/a	-2,4%
Perkebunan	8,8%	5,6%	n/a	-3,2%
Perdagangan dan Distribusi	4,3%	3,4%	n/a	-0,9%
Lain-Lain	3,5%	3,8%	n/a	0,3%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Industri konstruksi saat ini menjadi kontributor utama dari keseluruhan portofolio BFI, sejalan dengan stabilnya prospek industri konstruksi yang tidak terdampak sebagaimana sektor komoditas.

Selain itu, sejalan dengan reposisi fokus di luar industri terkait sektor komoditas, alat-alat yang dibiayai juga mengalami perubahan, dimana sebelumnya sebagian besar pembiayaan adalah untuk alat-alat berat, saat ini porsi mesin-mesin telah mengalami peningkatan, khususnya mesin-mesin berskala kecil dan merupakan bagian yang independen dari suatu proses produksi (bukan *integrated machine* yang diinstalasi dalam suatu pabrik besar).

Tabel 31 – DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BARU ALAT-ALAT BERAT, MESIN, DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN JENIS PERALATAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Bulldozer	96	73	(23)	-24,0%
Excavator	315	452	137	43,5%
Forklift	58	49	(9)	-15,5%
Alat Berat lainnya	208	202	(6)	-2,9%
Total Alat Berat	677	776	99	14,6%
Mesin	261	388	127	48,7%
Lain-Lain	11	22	11	100,0%
Jumlah	949	1.186	237	25,0%
Persentase dari Jumlah				
Bulldozer	10,1%	6,2%	n/a	-3,9%
Excavator	33,2%	38,1%	n/a	4,9%
Forklift	6,1%	4,1%	n/a	-2,0%
Alat Berat lainnya	21,9%	17,0%	n/a	-4,9%
Total Alat Berat	71,3%	65,4%	n/a	-5,9%
Mesin	27,5%	32,7%	n/a	5,2%
Lain-Lain	1,2%	1,9%	n/a	0,7%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan Properti

Sejalan dengan harapan OJK bahwa perusahaan pembiayaan tidak hanya fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor, mulai tahun 2015 Perusahaan mulai mengembangkan pembiayaan properti. Sebagai tahap awal, pembiayaan properti difokuskan pada *existing customer* BFI, dan saat ini sudah mulai dipasarkan ke konsumen lainnya.

Total penyaluran pembiayaan baru untuk properti berjumlah Rp189 miliar selama 2016, atau meningkat 32,2% dibanding tahun sebelumnya. Obyek pembiayaan properti berupa rumah maupun ruko.

Tabel 32 – DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN BARU PROPERTI BERDASARKAN JENIS PROPERTI

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Rumah	115	172	57	49,6%
Ruko	28	17	-11	-39,3%
Jumlah	143	189	46	32,2%
Persentase dari Jumlah				
Rumah	80,4%	91,0%	n/a	10,6%
Ruko	19,6%	9,0%	n/a	-10,6%
Jumlah	100,0%	100,0%		

ASPEK PEMASARAN

Pemasaran berperan sangat penting bagi BFI dalam memperluas jangkauan bisnis, melakukan penetrasi ke pasar yang baru, mengantisipasi kompetisi dan mengubah tren bisnis, serta menawarkan beragam produk baru untuk senantiasa bersaing dalam pasar yang semakin dinamis.

TARGET PASAR DAN STRATEGI PEMASARAN

Secara umum, target pasar untuk pembiayaan kendaraan bermotor mobil dan motor adalah masyarakat berpendapatan bawah hingga menengah. BFI berkomitmen untuk membangun bisnis non-dealer dalam rangka melakukan diversifikasi sumber bisnisnya. BFI bersaing di pasar melalui sejumlah paket pemasaran produk yang inovatif, waktu pemrosesan yang cepat, dan dukungan operasional yang kuat. Perusahaan juga menargetkan pelanggan korporat, pengguna alat berat, pelaku bisnis transportasi umum dan permesinan. Pelanggan korporat BFI berasal dari berbagai sektor bisnis, seperti pertambangan, perdagangan dan jasa, kontraktor umum, pertanian, manufaktur, infrastruktur, transportasi, makanan dan minuman, serta kesehatan.

Strategi pemasaran Perusahaan pada 2016 adalah dengan melanjutkan perluasan jaringan cabang Perusahaan, manajemen basis data dan *telesales*, serta penguatan hubungan dengan dealer, agen, dan perusahaan rekanan. Distribusi menjadi salah satu faktor penggerak utama bagi kesuksesan bisnis BFI. Kegiatan bisnis memerlukan kedekatan hubungan yang kuat dengan dealer, agen, dan pegawai *telesales* yang efektif, sebagai pelengkap dari staf yang terlatih dan jaringan cabang Perusahaan yang luas. BFI juga bergantung pada beberapa strategi pemasaran untuk menghasilkan pendapatan dalam tiap segmen produk. Sumber utama dalam menciptakan bisnis dan distribusi adalah dengan melalui cabang Perusahaan dan outlet, dealer, dan non-dealer. Kegiatan ini dilakukan melalui sebuah pendayaan penjualan dan unit pemasaran yang berspesialisasi dalam tiap segmen produk, menggunakan *telesales* dan agen pihak ketiga.

Aktivitas pemasaran dilakukan melalui 305 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Pulau Jawa dan Bali menghasilkan kontribusi terbesar bagi bisnis Perusahaan, sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk, pengembangan bisnis, transportasi, pariwisata, pertanian dan, khususnya, industri konstruksi, yang meluas dengan pesat. Area lainnya yang memiliki potensi pengembangan bisnis dan perluasan basis pelanggan adalah Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, mengingat kebutuhan akan alat berat dan barang modal lainnya. Namun, area-area tersebut memiliki kecenderungan bersifat siklis, dan saat ini tengah terdampak oleh penurunan harga-harga komoditas.

Pemasaran berperan sangat penting untuk memperluas jangkauan usaha, melakukan penetrasi ke pasar yang baru, mengantisipasi kompetisi dan berbagai perubahan tren bisnis, serta menawarkan produk baru dan inovatif. BFI menawarkan beragam produk untuk bersaing secara lebih baik dalam pasar yang semakin dinamis. BFI memanfaatkan beragam sumber dan jaringan pemasaran untuk membangun bisnis yang kuat dan meraih pangsa pasar lebih besar.

PERLUASAN JARINGAN CABANG PERUSAHAAN, MANAJEMEN BASIS DATA DAN TELESALLES

Hingga penghujung 2016, Perusahaan memiliki 305 outlet yang terdiri dari 209 cabang dan 96 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari segi area, 19% outlet tersebut berada di Pulau Sumatera, 16% berada di Jabodetabek, 34% berada di Pulau Jawa dan Bali, 11% berada di Pulau Kalimantan dan 20% berada di Pulau Sulawesi dan bagian Indonesia Timur. BFI berkomitmen untuk melanjutkan perluasan jaringan cabangnya untuk menjangkau pasar-pasar di Indonesia yang belum dimasuki.

BFI mempekerjakan tim *telemarketing in-house* berlokasi di beberapa area yang tersebar di banyak tempat, untuk mempromosikan produk dan layanan Perusahaan kepada pelanggan potensial melalui telepon, pesan pendek singkat (SMS), dan nomor *hotline* 1500018.

Identifikasi prospek dilakukan melalui basis data pelanggan BFI yang telah tersedia, dan juga melalui basis data yang dikompilasi oleh tim *internal sales*. Manajemen basis data memegang peran penting dalam strategi pemasaran Perusahaan karena membantu BFI mencapai pelanggan yang lebih luas cakupannya di berbagai lokasi. Maka dari itu, langkah ini dapat menghemat waktu dan upaya, serta menjaga rendahnya biaya rutin. Tim *telemarketing* BFI juga menyediakan “*One Stop Solutions*” dan juga informasi akurat untuk pelanggan dengan sesuai dan tepat waktu, disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Pelanggan yang telah bergabung dengan BFI juga disediakan layanan *Outbound Telemarketing* yang membuat mereka merasa lebih nyaman dan mudah dalam mencari bantuan pendanaan kembali. Dengan layanan *call centre* BFI 1500018, pelanggan dapat mengakses informasi tentang proses pendanaan serta melayangkan keluhan bilamana mereka tidak puas terhadap layanan Perusahaan.

HUBUNGAN DENGAN DEALER DAN AGEN

BFI telah berbisnis dengan berbagai *dealer* selama 22 tahun dan telah membangun hubungan yang kuat dengan *dealer* mobil baru dan bekas. BFI menjaga hubungan dengan beragam program yang bertujuan menyediakan insentif bagi *dealer* dan program yang memperkuat hubungan jangka panjang yang sedang berlangsung. BFI memperlakukan *dealer* sebagai

mitra, dan menyediakan program pelatihan bagi *dealer*, dengan tujuan untuk lebih jauh mengasah keterampilan dalam memasarkan produk-produk mereka kepada para pelanggan potensial.

Pertumbuhan jaringan *dealer* Perusahaan selama tiga tahun terakhir (2014-2016) adalah sebagai berikut:

Tabel 33 – PERTUMBUHAN JARINGAN DEALER PERUSAHAAN			
Keterangan	2014	2015	2016
Jaringan <i>dealer</i> (mobil)	2.415	3.718	4.490

Per akhir 2016, Perusahaan membina jaringan dengan 4.490 *dealer* mobil di seluruh Indonesia. BFI terus berkomitmen untuk mengembangkan jaringannya ke daerah-daerah yang belum terambah pasarnya.

Program *BFI Partnership Loyalty* adalah suatu program insentif yang melibatkan *dealer* mobil untuk membina hubungan jangka panjang dengan mereka, sekaligus memberi insentif bagi mereka untuk terus bekerja sama dengan Perusahaan untuk mencapai sasaran-sasaran Perusahaan.

Beberapa program *BFI Partnership Loyalty* yang dilaksanakan di 2016 meliputi:

1. *Incentive Tour & Gathering*

Perusahaan memberikan insentif berupa perjalanan wisata dan *gathering* bagi para *dealer* sebagai wujud apresiasi Perusahaan terhadap mereka yang telah mencapai target minimum dan memberikan kontribusi dalam jumlah yang ditentukan dalam waktu enam bulan. Di 2016, sebanyak 60 *dealer* dan *showroom* dari seluruh Indonesia diikutsertakan dalam “*BFI Tour F1 Sepang Kuala Lumpur, Malaysia*” yang diselenggarakan pada 1-3 Oktober 2016. Perjalanan wisata ini kemudian dilanjutkan dengan *Dealer Gathering* yang pokok acaranya adalah pemberian penghargaan “*The Best Dealers 2016*”.

2. Penghargaan Pemasaran

BFI juga melaksanakan program pemberian penghargaan atas kinerja pemasaran kepada para *dealer* untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi mereka di tengah lingkungan usaha yang semakin kompetitif.

HUBUNGAN DENGAN JARINGAN AGEN (REKANAN BISNIS SEBAGAI AGEN PEMASARAN)

BFI juga bergantung pada rujukan-rujukan dari para agen untuk bisnis ritelnya, khususnya untuk pendanaan mobil bekas dan sepeda motor. Agen-agen, atau rekanan bisnis, merupakan pihak independen yang dilibatkan oleh Perusahaan untuk membantu produk BFI masuk ke dalam jaringan pelanggan atau kenalan mereka. dan mereka mendapatkan komisi serta bonus untuk rujukan yang sukses. Hingga hari ini, BFI memiliki sekitar 4.000 agen aktif. Para agen berfokus pada pembiayaan

multiguna menggunakan mobil bekas dan sepeda motor sebagai jaminan.

Manajemen agen di BFI meliputi program manajemen loyalitas yang didukung oleh transparansi dan cepatnya proses operasi bisnis yang kuat dan tangguh untuk semua pihak yang terlibat. Beberapa program loyalitas Perusahaan meliputi *Reward Points* dan *Star Club* bagi agen-agen dengan pencapaian penjualan tertinggi. Perusahaan juga menyediakan program pelatihan bagi para agen, seperti sesi pelatihan kemahiran komunikasi dan pengetahuan produk.

Setiap tahunnya, BFI menyelenggarakan *gathering* nasional untuk rekanan bisnis di mana para rekanan terbaik akan diberikan penghargaan “Best BA” dan BFI akan memberikan *reward* bagi mereka yang memiliki kontribusi tertinggi sebagai bentuk insentif dan motivasi bagi seluruh rekanan bisnis BFI.

HUBUNGAN BISNIS KORPORAT

BFI juga berupaya mempertahankan dan memperbaiki hubungan dengan para pemasok alat berat, mesin, truk, dan kendaraan komersil lainnya. Hubungan dengan pelanggan yang telah ada sebelumnya dikelola oleh manajer pemasaran BFI dan manajer cabang. Perusahaan bangga akan layanan yang diberikan dengan tingkat profesionalisme tinggi serta berintegritas, baik kepada pemasok maupun pengguna akhir.

Dalam rangka mendukung strategi pemasaran, Perusahaan telah mengambil beberapa langkah pemasaran, antara lain:

- Terus menyediakan pelayanan berkualitas baik kepada pelanggan dan *dealer*;
- Mengadakan kampanye media besar-besaran dan bekerja bersama pemasok dan *dealer* untuk merancang paket-paket pembiayaan menarik bagi pelanggan prospektif;
- Menambahkan cabang baru untuk menyokong pertumbuhan;
- Memperluas penawaran produk;
- Membangun infrastruktur yang mendukung kinerja Perusahaan; dan
- Memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan agar senantiasa kompetitif di pasar.

Bisnis Korporat BFI telah memenangkan beberapa penghargaan berikut:

- **2013:** *Corporate Image Award* 2013 dari *Frontier Consulting Group* dan *Bloomberg Businessweek* sebagai “*The Best in Building and Managing Corporate Image*” dalam kategori *Heavy Equipment Leasing*, berdasarkan survei *Indonesia’s Most Admired Companies* (IMAC) 2013.
- **2014:** *Corporate Image Award* 2014 dari *Frontier Consulting Group*, Majalah TEMPO dan Majalah *MARKETING* sebagai “*The Best in Building and Managing Corporate Image*” dalam kategori *Heavy Equipment Leasing*, berdasarkan survei *Indonesia’s Most Admired Companies* (IMAC) 2014.

- **2015:** *Corporate Image Award* 2015 dari *Frontier Consulting Group* dan Majalah TEMPO sebagai “*The Best in Building and Managing Corporate Image*” dalam kategori *Heavy Equipment Leasing*, berdasarkan survei *Indonesia’s Most Admired Companies* (IMAC) 2015.
- **2016:** *Corporate Image Award* 2016 dari *Frontier Consulting Group* bekerja sama dengan Majalah TEMPO dan *MARKETING* sebagai “*The Best in Building and Managing Corporate Image*” dalam kategori *Heavy Equipment Leasing*, berdasarkan survei *Indonesia’s Most Admired Companies* (IMAC) 2016.

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pembiayaan usaha kecil menengah (“UKM” atau “SME”) diluncurkan pada pertengahan 2016 yang menargetkan usaha kecil dan menengah dalam industri kreatif. Estimasi data menunjukkan bahwa bisnis UKM atau SME di Indonesia saat ini melibatkan pekerja sekitar 60 juta orang, yang mayoritasnya belum memiliki akses ke bank dan lembaga keuangan lainnya. BFI ingin memberikan pertolongan dan berkontribusi terhadap pengembangan sektor ini dengan membantu mendorong produksi yang berkualitas lebih baik dan dengan kuantitas lebih tinggi dari produk-produk yang dihasilkan UKM industri kreatif. Ini sejalan dengan inisiatif Pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kreatif.

Target pembiayaan usaha kecil menengah adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah-bawah. BFI berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan bisnis *non-dealer* yang meliputi cakupan pelanggan yang lebih luas. Beragam paket dengan inovasi pemasaran produk serta waktu pemrosesan yang cepat membuat BFI mampu terus bersaing di pasar yang agresif. UKM menengah secara khusus membutuhkan pembiayaan investasi modal serta untuk modal kerja. Industri yang secara khusus dibiayai oleh BFI meliputi makanan dan minuman, busana, kerajinan, dan pencetakan.

Aktivitas pemasaran dilakukan melalui kota-kota yang berpotensi tinggi untuk pengembangan produk usaha kecil menengah di beberapa area di Pulau Jawa dan Bali. Industri kreatif saat ini tengah tumbuh dengan pesat, khususnya di area dengan pengaruh pariwisata yang kuat, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar.

Untuk mendukung strategi ini, Perusahaan telah menyusun inisiatif pemasaran sebagai berikut:

1. Menciptakan jaringan komunitas;
2. Mendidik dan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pelaku usaha kecil menengah;
3. Bekerja sama dengan pemasok yang mendukung industri kreatif; dan
4. Memfasilitasi keserasian antara pemasok, debitur, dan BFI.

CORPORATE BRANDING DAN PROMOSI PRODUK

Dalam mengoordinasikan beragam kegiatannya, Perusahaan memahami pentingnya *corporate branding* dalam rangka menciptakan citra positif yang efisien dan efektif bagi masyarakat luas dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Fungsi utama *corporate branding* adalah menyusun standar atau prinsip dasar terkait pemanfaatan identitas Perusahaan, berikut cara-cara efektif untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Fungsi *corporate branding* dan promosi produk adalah:

- Mengoordinasikan, memantau, dan menganalisis strategi pemasaran nasional untuk periode waktu tertentu menurut kebijakan Perusahaan;
- Merancang strategi promosi nasional berdasarkan hasil analisis dan menyiapkan unit promosi yang sejalan dengan itu;
- Mengarahkan dan mengoordinasikan acara yang dihadiri Perusahaan sebagai bentuk promosi Perusahaan;
- Mengimplementasikan tugas yang berkaitan lainnya untuk meraih target promosi; dan
- Memastikan bahwa seluruh desain dan materi promosi sesuai kaidah ciri khas Perusahaan.

Aktivitas yang diselenggarakan untuk menyokong *corporate branding* pada 2016 antara lain:

- Memonitor standarisasi *company branding* dan identitas Perusahaan;

- Menyediakan konsultasi dan pembantuan untuk unit kerja di dalam Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan program resmi yang melibatkan Perusahaan, atau sponsor dari Perusahaan, sehingga standar identitas korporasi menjadi konsisten dan harmonis;
- Menyediakan konsultasi dan bantuan untuk promosi kampanye produk pembiayaan Perusahaan; dan
- Memastikan semua atribut Perusahaan yang digunakan di acara lokal dan nasional diprakarsai oleh cabang perusahaan dan sesuai standar identitas Perusahaan.

Unit Promosi Produk fokus dalam mempromosikan produk dan layanan Perusahaan. Produk-produk tersebut dipromosikan melalui berbagai aktivitas, baik dalam tatanan lokal maupun nasional, dan dikerjakan oleh setiap cabang. Fungsi utama unit ini adalah mengoordinasikan aktivitas promosi dan strategi pemasaran yang harus dijalankan oleh cabang-cabang Perusahaan, baik lokal maupun nasional. Tujuannya adalah untuk mendukung target penjualan yang ditentukan oleh setiap unit manajemen produk.

Program-program promosi yang menarik dilakukan dengan dukungan publikasi media yang bertujuan mempromosikan produk-produk Perusahaan, dan juga sebagai bentuk apresiasi untuk pelanggan dan khalayak umum. Setiap aktivitas Perusahaan didasari atas empat aspek, yaitu: branding, penjualan, entertainment dan *Corporate Social Responsibility* ("CSR"). Unit

Manajemen Event dan Unit CSR Perusahaan secara spesifik mengatur dua aspek terakhir.

CUSTOMER RELATIONSHIP

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, Perusahaan menyelenggarakan program undian tahunan yang disebut “Uber Milyaran”.

“Uber Milyaran 2016”

Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, BFI menyelenggarakan acara “Uber Milyaran 2016.” Acara ini berlangsung setahun penuh dan diundi bagi pelanggan Perusahaan. Program undian ini disambut baik, dengan jumlah peserta mencapai 188.126 partisipan. Perusahaan menyediakan ratusan hadiah bagi pelanggan yang beruntung, seperti 175 smartphone, 25 unit Honda Beat, dan hadiah utama yang terdiri dari empat unit Toyota Agya dan satu All New Kijang Innova. Untuk berpartisipasi, pelanggan harus mengambil pinjaman dari BFI selama masa undian. Kemudian, mereka mendapatkan sebuah kupon yang diundi setiap tiga bulan sekali.

Pengambilan undian “Uber Milyaran 2016” berlangsung empat kali, yaitu:

- Untuk periode Januari–Maret 2016, undian dilaksanakan pada April 2016.
- Untuk periode April–Juni 2016, undian dilaksanakan pada Juli 2016.
- Untuk periode Juli–September 2016, undian dilaksanakan pada Oktober 2016.
- Untuk periode Oktober–Desember 2016, undian akan dilaksanakan pada Februari 2017 bersamaan dengan undian *Ultimate Winner*.

Perusahaan berharap terselenggaranya program loyalitas semacam ini akan meningkatkan basis pelanggan dan meraih pertumbuhan berkelanjutan. Gelaran ini memelihara loyalitas pelanggan sekaligus menjangkau banyak pelanggan baru.

SALURAN PENGEMBANGAN BISNIS BARU

Indonesia terus mengalami pertumbuhan luar biasa dalam hal jumlah pengguna internet, dengan angka saat ini mencapai lebih dari 130 juta pengguna. Angka ini telah tumbuh dengan signifikan sejak tahun 2014, di mana tercatat 88 juta pengguna, dan telah melampaui 50% total populasi Indonesia, yang dengan demikian setara dengan tingkat

penetrasi 51,8%. Dengan tingkat populasi Indonesia, terdapat kebutuhan kritikal untuk akses publik terhadap produk informasi yang lebih mudah dijangkau publik melalui media digital. Dengan demikian, pemasaran melalui media digital menawarkan peluang besar bagi BFI.

Pada 2016, BFI mengembangkan strategi pemasaran melalui media digital dan telah bekerja sama dengan 16 *startup* pada portal-portal *fintech* dan otomotif Indonesia, untuk menyediakan kecepatan dan kemudahan layanan bagi pelanggan. Sejumlah pelanggan pada 2016 yang melakukan pengajuan untuk pembiayaan secara *online* mencapai 25.000 pihak, dan terus bertambah. Dengan strategi digital ini, BFI berusaha terus memperbaiki layanan dan cara-cara penyampaian kepada pelanggan.

FOKUS 2017

BFI akan terus beradaptasi terhadap pengembangan dan dinamika pada industri keuangan dan otomotif. Dengan demikian, fokus utama BFI pada 2017 antara lain:

- Melanjutkan perluasan jaringan distribusi fisik dalam bentuk cabang dan outlet;
- Meningkatkan pembiayaan transaksi mobil bekas dari pelanggan akhir (C2C);
- Mengembangkan program loyalitas untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan dealer rekanan, ruang pameran, dan pelanggan; dan
- Melanjutkan eksplorasi saluran-saluran baru, seperti digitalisasi.



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tinjauan keuangan dapat dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI atau Perseroan) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International), akuntan publik independen, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan (anggota dari BDO International), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 Februari 2017 dan 15 Februari 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Aset

Posisi aset Perusahaan dapat dilihat pada Tabel 34 di bawah ini:

Tabel 34 - JUMLAH ASET				
Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Kas dan Setara Kas	777	165	-612	-78,8%
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	5.210	7.121	1.911	36,7%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	4.688	4.462	-226	-4,8%
Jumlah Piutang Bersih	9.898	11.583	1.685	17,0%
Beban Dibayar di Muka	40	42	2	5,0%
Piutang Lain-Lain - Bersih	141	164	23	16,3%
Aset Tetap - Bersih	428	414	-14	-3,3%
Aset Tak Berwujud - Bersih	22	20	-2	-9,1%
Aset Derivatif	441	41	-400	-90,7%
Aset Pajak Tangguhan	14	37	23	164,3%
Aset Lain-Lain	9	10	1	11,1%
Jumlah Aset	11.770	12.476	706	6,0%
Persentase dari Jumlah				
Kas dan Setara Kas	6,6%	1,3%	n/a	-5,3%
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	44,3%	57,1%	n/a	12,8%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	39,8%	35,8%	n/a	-4,0%
Jumlah Piutang Bersih	84,1%	92,9%	n/a	8,8%
Beban Dibayar di Muka	0,3%	0,3%	n/a	0,0%
Piutang Lain-Lain - Bersih	1,2%	1,3%	n/a	0,1%
Aset Tetap - Bersih	3,6%	3,3%	n/a	-0,3%
Aset Tak Berwujud - Bersih	0,2%	0,2%	n/a	0,0%
Aset Derivatif	3,8%	0,3%	n/a	-3,5%
Aset Pajak Tangguhan	0,1%	0,3%	n/a	0,2%
Aset Lain-Lain	0,1%	0,1%	n/a	0,0%
Jumlah Aset	100,0%	100,0%		

Jumlah Aset per 31 Desember 2016 adalah Rp12.476 miliar, meningkat 6,0% dari tahun sebelumnya dengan kontributor terbesar adalah peningkatan pada Investasi Neto Sewa Pembiayaan. Lebih lanjut penjelasan akan dibagi dalam 2 kelompok, masing-masing Aset Pokok yaitu aset terkait kegiatan utama Perusahaan yaitu piutang pembiayaan, serta Aset Pendukung lainnya.

ASET POKOK

Piutang Bersih Pembiayaan

Piutang Bersih Pembiayaan terdiri dari Investasi Neto Sewa Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih. Selama 2016, terdapat pertumbuhan 17,0% pada Piutang Bersih atau sebesar Rp1.685 miliar menjadi Rp11.583 miliar per akhir 2016. Angka ini mewakili 92,9% dari Jumlah Aset pada 2016.

Tabel 35 - PIUTANG BERSIH

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	5.210	7.121	1.911	36,7%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	4.688	4.462	-226	-4,8%
Jumlah Piutang Bersih	9.898	11.583	1.685	17,0%

Investasi Neto Sewa Pembiayaan tercatat sebesar Rp7.121 miliar, naik 36,7% atau Rp1.911 miliar dari Rp5.210 miliar pada 2015. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayaan sewa pembiayaan, khususnya pembiayaan atas alat-alat berat, mesin dan peralatan lainnya serta mobil bekas yang dibukukan sebagai bagian dari Investasi Neto Sewa Pembiayaan. Sementara itu, terdapat penurunan sebesar Rp226 miliar pada Piutang Bersih Pembiayaan Konsumen menjadi Rp4.462 miliar, atau turun 4,8% dari 2015. Penurunan ini terjadi khususnya karena kontraksi pada penyaluran pembiayaan atas mobil baru.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen, selain menggunakan dana sendiri dan pinjaman dari pihak luar, baik pinjaman bank maupun yang berasal dari surat berharga yang diterbitkan, Perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa bank untuk melakukan *joint financing* dengan pengaturan tanpa tanggung renteng (*without recourse*). Dengan demikian, hanya porsi piutang yang dibiayai Perusahaan yang tercatat di laporan posisi keuangan sebagai piutang pembiayaan konsumen, sementara sisanya dicatat di buku Bank.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai piutang Perusahaan, kami akan menjelaskan hubungan antara piutang yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan jumlah Piutang yang Dikelola oleh Perusahaan dan selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada Jumlah Piutang yang Dikelola, berdasarkan jenis asset dan tujuan pembiayaan sesuai klasifikasi yang diatur oleh OJK, sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai piutang dan fokus strategis Perusahaan.

Tabel 36 - PIUTANG YANG DIKELOLA VS PIUTANG BERSIH

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Investasi Sewa Pembiayaan	5.293	7.182	1.889	35,7%
Piutang Pembiayaan Konsumen	6.936	5.844	-1.092	-15,7%
Jumlah Piutang yang Dikelola	12.229	13.026	797	6,5%
Dikurangkan <i>Joint Financing</i>	2.151	1.260	-891	-41,4%
Jumlah Piutang Sebelum Cadangan Kerugian (dalam Neraca)	10.078	11.766	1.688	16,7%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	180	183	3	1,7%
Jumlah Piutang - Bersih (dalam Neraca)	9.898	11.583	1.685	17,0%

Jumlah piutang - bersih meningkat sebesar Rp1.685 miliar atau 17,0% dibandingkan 2015, sementara jumlah piutang yang dikelola meningkat sebesar Rp797 miliar atau 6,5%. Hal ini terjadi akibat penurunan *Joint Financing* yang dibukukan di luar neraca sebesar Rp891 miliar. Piutang pembiayaan bersih tersebut telah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejumlah Rp183 miliar, meningkat sebesar Rp3 miliar atau 1,7% dari tahun 2015.

Tabel 37 - DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pembiayaan Mobil Bekas	7.877	8.980	1.102	14,0%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	1.287	1.544	257	20,0%
Pembiayaan Mobil Baru	2.269	1.380	-889	-39,2%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	654	868	214	32,7%
Pembiayaan Properti	142	254	113	78,9%
Jumlah Piutang yang Dikelola	12.229	13.026	797	6,5%
Persentase dari Jumlah				
Pembiayaan Mobil Bekas	64,4%	68,9%	n/a	4,5%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	10,5%	11,9%	n/a	1,4%
Pembiayaan Mobil Baru	18,6%	10,6%	n/a	-8,0%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	5,3%	6,7%	n/a	1,4%
Pembiayaan Properti	1,2%	1,9%	n/a	0,7%
Jumlah	100,0%	100,0%		

* Termasuk mesin dan peralatan lain

Pada 2016, Perusahaan membukukan Jumlah Piutang yang Dikelola sebesar Rp13.026 miliar atau meningkat 6,5%. Jenis aset terbesar adalah pembiayaan mobil bekas, yang mewakili 68,9% dari Jumlah Piutang yang Dikelola, sementara piutang berupa Alat-Alat Berat, Mobil Baru, Sepeda Motor Bekas, dan Properti mencakup 31,1% dari Jumlah Piutang yang Dikelola.

Piutang yang Dikelola - Mobil

BFI membiayai mobil, baik baru mau bekas, melalui pengaturan Pembiayaan Konsumen dan Sewa

Pembiayaan. Pembiayaan mobil merupakan segmen terbesar di dalam portofolio Perusahaan, memberikan kontribusi 79,5% terhadap Jumlah Piutang yang Dikelola pada 2016, dan 83,0% terhadap Jumlah Piutang yang Dikelola di 2015 (Tabel 37).

Jumlah portofolio piutang kendaraan mobil di 2016 meningkat 2,1% ke angka Rp10.360 miliar dari Rp10.146 miliar di 2015. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan portofolio mobil bekas di angka 14,0% terlepas dari penurunan pada mobil baru sebesar 39,2%. Penurunan jumlah

mobil baru ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk mengurangi konsentrasi pada sektor ini.

Berdasarkan jenis kendaraan, pembiayaan mobil yang dilakukan oleh BFI terdiversifikasi pada berbagai jenis mobil, meliputi kendaraan multifungsi (MPV)/minibus, pick-up, truk dan lainnya, yang digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk penggunaan pribadi maupun keperluan bisnis. Pembiayaan MPV/minibus tercatat telah memberikan kontribusi 47,2%, diikuti oleh jenis mobil lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 38 di bawah ini:

Tabel 38 - DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN MOBIL BERDASARKAN JENIS KENDARAAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Minibus/MPV	4.528	4.888	360	8,0%
Truk	1.787	1.710	-77	-4,3%
Pick-up	1.885	1.572	-313	-16,6%
Jeep	1.376	1.553	177	12,9%
Sedan	515	578	63	12,2%
Bis	56	59	3	5,4%
Jumlah	10.147	10.360	213	2,1%
Persentase dari Jumlah				
Minibus/MPV	44,6%	47,2%	n/a	2,6%
Truk	17,6%	16,5%	n/a	-1,1%
Pick-up	18,6%	15,2%	n/a	-3,4%
Jeep	13,6%	15,0%	n/a	1,4%
Sedan	5,1%	5,6%	n/a	0,5%
Bis	0,5%	0,5%	n/a	0,0%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Pembiayaan mobil oleh Perusahaan meliputi berbagai merek, dengan merek-merek Jepang mendominasi sebesar 97,1%, seperti yang tertera pada Tabel 39 di bawah ini:

Tabel 39 - DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN MOBIL BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Toyota	3.352	3.525	173	5,2%
Mitsubishi	1.937	1.868	-69	-3,6%
Daihatsu	1.285	1.356	71	5,5%
Suzuki	1.368	1.219	-149	-10,9%
Honda	896	1.036	140	15,6%
Isuzu	208	205	-3	-1,4%
Merek Jepang Lain-Lain	829	848	19	2,3%
Di Luar Merek Jepang	272	303	31	11,4%
Jumlah	10.147	10.360	213	2,1%
Persentase dari Jumlah				
Toyota	33,0%	34,0%	n/a	1,0%
Mitsubishi	19,1%	18,0%	n/a	-1,1%
Daihatsu	12,7%	13,1%	n/a	0,4%
Suzuki	13,5%	11,8%	n/a	-1,7%
Honda	8,8%	10,0%	n/a	1,2%
Isuzu	2,0%	2,0%	n/a	0,0%
Merek Jepang Lain-Lain	8,2%	8,2%	n/a	0,0%
Di Luar Merek Jepang	2,7%	2,9%	n/a	0,2%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Kami berfokus pada merek yang paling populer dan laris di pasar Indonesia dengan nilai jual kembali yang lebih baik. Jangka waktu atau tenor pembiayaan mobil yang BFI salurkan berkisar antara 6 sampai 48 bulan.

Piutang yang Dikelola - Sepeda Motor (Bekas)

BFI melakukan pembiayaan sepeda motor bekas melalui pembiayaan konsumen. Pembiayaan sepeda motor, kontribusi terhadap total portofolio Perusahaan sebesar 6,7% dari Jumlah Piutang yang Dikelola pada 2016 dan 5,3% pada 2015 (Tabel 37). Portofolio pembiayaan sepeda motor BFI meliputi berbagai merek, seperti tertera pada Tabel 40 di bawah ini:

Tabel 40 - DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BEKAS BERDASARKAN MEREK

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Honda	314	430	116	36,9%
Yamaha	282	358	76	27,0%
Suzuki	42	56	14	33,3%
Lain-Lain	16	24	8	50,0%
Jumlah	654	868	214	32,7%
Persentase dari Jumlah				
Honda	48,0%	49,5%	n/a	1,5%
Yamaha	43,1%	41,2%	n/a	-1,9%
Suzuki	6,4%	6,5%	n/a	0,1%
Lain-Lain	2,5%	2,8%	n/a	0,3%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Merek sepeda motor yang paling banyak dibiayai oleh BFI adalah Honda dan Yamaha yang merupakan merek-merek terpopuler dan terlaris di Indonesia, dengan kontribusi 90,7% dari total pembiayaan sepeda motor, dan memiliki nilai jual kembali yang lebih baik. Jangka waktu atau tenor pembiayaan sepeda motor Perusahaan berkisar antara 6 hingga 36 bulan.

Piutang yang Dikelola – Alat-Alat Berat, Mesin, dan Lain-Lain

Pembiayaan alat-alat berat, mesin, dan lain-lain mewakili 11,9% dari Jumlah Piutang yang Dikelola pada 2016 dan 10,5% dari Jumlah Piutang yang Dikelola pada 2015.

Selama 2016, terjadi peningkatan 20,0% atas piutang pembiayaan alat berat, mesin dan peralatan

lainnya, dari sebelumnya Rp1.287 miliar menjadi Rp1.544 miliar, atau tumbuh sebesar Rp257 miliar selama 2016.

Peningkatan ini sejalan dengan keberhasilan Perusahaan melakukan diversifikasi produk dan pertumbuhan di sektor industri yang tidak terkena dampak penurunan harga komoditas. Piutang di

sektor pertambangan dapat diturunkan menjadi 15,1% dari total piutang alat berat, mesin dan peralatan lainnya pada 2016, dari sebelumnya mencapai 18,0% pada 2015. Sementara itu, industri konstruksi saat ini menjadi kontributor utama dari keseluruhan portofolio BFI, sejalan dengan stabilnya prospek industri konstruksi yang tidak terdampak sebagaimana sektor komoditas.

Berikut adalah diversifikasi atas jenis jenis alat yang dibiayai untuk pembiayaan alat-alat berat, mesin, dan lain-lain berdasarkan jenis dan industri:

Tabel 41 - DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN, DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Bulldozer	125	117	(8)	-6,4%
Excavator	409	555	146	35,7%
Forklift	64	66	2	3,1%
Alat Berat Lainnya	307	301	(6)	-2,0%
Total Alat Berat	905	1,039	134	14,8%
Mesin	303	447	144	47,5%
Lain-Lain	79	58	(21)	-26,6%
Jumlah	1.287	1.544	257	20,0%
Persentase dari Jumlah				
Bulldozer	9,7%	7,6%	n/a	-2,1%
Excavator	31,8%	35,9%	n/a	4,1%
Forklift	5,0%	4,3%	n/a	-0,7%
Alat Berat Lainnya	23,9%	19,5%	n/a	-4,4%
Total Alat Berat	70,4%	67,3%	n/a	-3,1%
Mesin	23,5%	28,9%	n/a	5,4%
Lain-Lain	6,1%	3,8%	n/a	-2,3%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Tabel 42 - DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO PEMBIAYAAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN, DAN LAIN-LAIN BERDASARKAN INDUSTRI

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Konstruksi	368	408	40	10,9%
Jasa	149	265	116	77,9%
Industri dan Manufaktur	217	261	44	20,3%
Pertambangan	232	233	1	0,4%
Perhutanan	142	177	35	24,6%
Perkebunan	103	96	-7	-6,8%
Perdagangan dan Distribusi	29	45	16	55,2%
Lain-Lain	47	59	12	25,5%
Jumlah	1.287	1.544	257	20,0%
Persentase dari Jumlah				
Konstruksi	28,6%	26,4%	n/a	-2,2%
Jasa	11,6%	17,2%	n/a	5,6%
Industri dan Manufaktur	16,9%	16,9%	n/a	0,0%
Pertambangan	18,0%	15,1%	n/a	-2,9%
Perhutanan	11,0%	11,5%	n/a	0,5%
Perkebunan	8,0%	6,2%	n/a	-1,8%
Perdagangan dan Distribusi	2,2%	2,9%	n/a	0,7%
Lain-Lain	3,7%	3,8%	n/a	0,1%
Jumlah	100,0%	100,0%		

Piutang yang Dikelola - Properti

Sejak dimulai dari 2015, pembiayaan properti telah menunjukkan pertumbuhan yang positif, dimana sepanjang 2016, piutang properti mengalami pertumbuhan sebesar 78,9% atau sebesar Rp112 miliar menjadi sebesar Rp254 miliar di akhir 2016. Jumlah ini merupakan 1,9% dari jumlah piutang yang dikelola (Tabel 37).

Joint Financing

Perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa bank untuk melakukan *joint financing*. Pada umumnya porsi pembiayaan Perusahaan berkisar antara 5%-10% dari total nilai pembiayaan, sisanya dibiayai oleh bank. Perusahaan bertugas selaku *servicer*, yaitu menerima pembayaran dari konsumen dan meneruskan kembali ke bank pemberi pinjaman, serta menjadi kustodian atas aset dokumen yang menjadi *collateral*. Nilai *outstanding* pembiayaan yang merupakan porsi bank masing-masing 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp2.144 miliar dan Rp1.261 miliar, yang dibukukan pada bagian Perjanjian Penting dan Komitmen di Laporan Keuangan Perusahaan.

Tabel 43 - JOINT FINANCING

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Porsi BFI
Jual Beli Piutang			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	51	3	0%
Joint Financing			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.318	666	5%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	263	277	5%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	512	175	10%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	140	5%
Jumlah	2.144	1.261	

Terjadi penurunan nilai sebesar Rp883 miliar yang terjadi karena pengembalian pembayaran konsumen yang jatuh tempo lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan nilai pencairan atas fasilitas *Joint Financing* yang baru.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan sejumlah nilai yang dicadangkan dari piutang dalam kelolaan guna mengantisipasi potensi kerugian piutang di masa yang akan

datang, dan secara kolektif berdasarkan metode statistik maupun dihitung secara individual untuk nilai eksposur dan jenis aset tertentu.

Peningkatan cadangan sebesar Rp3 miliar sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan jumlah piutang yang dikelola, sementara dari sisi potensi menurunnya kualitas aset menunjukkan adanya perbaikan, sehingga tambahan jumlah cadangan yang dibentuk tidak sebesar persentase kenaikan piutang dalam kelolaan.

POS ASET LAINNYA

Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2016, Kas dan Setara Kas tercatat sebesar Rp165 miliar, menurun sebesar 78,8% dibandingkan dengan Rp777 miliar per 31 Desember 2015 (Tabel 34). Saldo kas dan setara kas yang tinggi pada akhir 2015 terjadi karena pencairan dana bank yang sudah dijadwalkan tidak dapat disalurkan sesuai target awal, sehingga terjadi likuiditas per akhir 2015. Lebih lanjut, penjelasan lebih detail akan diuraikan pada bagian Analisis Arus Kas.

Aset Derivatif

Salah satu sumber pendanaan Perusahaan berasal dari pinjaman dalam mata uang asing, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk mengantisipasi risiko tingkat suku bunga dan risiko kurs mata uang, Perusahaan telah menerapkan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan suku bunga mengambang. Lindung nilai tersebut umumnya

dilakukan melalui instrumen derivatif, yaitu perjanjian *cross currency swap* dengan bank yang bereputasi bagus. Tujuan lindung nilai adalah bagian dari manajemen risiko dalam rangka meminimalisir risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang.

Pada akhir 2016, saldo Aset Derivatif menurun sebesar 90,7% menjadi Rp41 miliar di 2016. Penurunan ini terjadi sebagai

dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark-to-market value*). Penurunan tersebut sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing per 31 Desember 2016 dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan jumlah pinjaman dalam mata uang asing, dari USD360.596.865 di akhir 2015 menjadi USD182.260.270 di akhir 2016.

Tabel 44 - ASET DERIVATIF

Keterangan	2015		2016	
	Nilai Nosional USD (Nilai Penuh)	Aset Derivatif (Rp miliar)	Nilai Nosional USD (Nilai Penuh)	Aset Derivatif (Rp miliar)
PT Bank Permata Tbk	107.500.000	45	79.500.000	(31)
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	203.096.865	345	62.760.270	66
PT Bank ANZ Indonesia	50.000.000	51	30.000.000	7
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch	-	-	10.000.000	(1)
Jumlah	360.596.865	441	182.260.270	41

Piutang Lain-Lain - Bersih

Piutang Lain-Lain terdiri dari akun-akun antara lain piutang dalam penyelesaian yaitu jaminan pembiayaan yang dikembalikan oleh konsumen karena tidak mampu meneruskan kewajibannya, piutang karyawan dan piutang penerimaan konsumen.

Total Piutang Lain-Lain - Bersih meningkat 16,3% atau sebesar Rp23 miliar pada 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan piutang yang timbul akibat pembelian saham MESOP oleh karyawan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Selain itu, terdapat kenaikan atas perbedaan temporer dalam pencatatan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui *Payment Point Online Bank*, dimana dana pembayaran tersebut telah masuk di rekening *Payment Point* namun baru dikreditkan ke rekening Perusahaan pada hari kerja berikutnya.

Tabel 45 - PIUTANG LAIN-LAIN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Piutang dalam Proses Penyelesaian	123	84	(39)	-31,7%
Dikurangkan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	36	26	(10)	-27,8%
Piutang dalam Proses Penyelesaian - Bersih	87	58	(29)	-33,3%
Piutang Opsi Saham Karyawan (MESOP)	-	50	50	n/a
Piutang Karyawan	31	27	(4)	-12,9%
Piutang Penerimaan Angsuran Konsumen	19	25	6	31,6%
Premi Asuransi	4	3	(1)	-25,0%
Piutang Lain-Lain	-	1	1	n/a
Jumlah	141	164	23	16,3%

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan merupakan pencatatan atas beda waktu antara pengakuan pendapatan dan beban sesuai standar

akuntansi keuangan dengan perhitungan menurut fiskal. Terjadi kenaikan sebesar 164,3% atau sebesar Rp23 miliar pada 2016 yang utamanya disebabkan oleh penghasilan komprehensif

lain atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai arus kas (Tabel 34). Tidak terdapat dampak apapun atas perubahan ini terhadap utang pajak Perusahaan secara fiskal.

LIABILITAS

Posisi Liabilitas Perusahaan dapat dilihat pada Tabel 46 di bawah ini:

Tabel 46 - LIABILITAS

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima	5.637	4.691	-946	-16,8%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	1.681	2.965	1.284	76,4%
Beban yang Masih Harus Dibayar	141	190	49	34,8%
Imbalan Pasca-kerja	112	140	28	25,0%
Utang Pajak	70	94	24	34,3%
Utang Lain-Lain	110	141	31	28,2%
Jumlah	7.751	8.221	470	6,1%

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.221 miliar, tumbuh 6,1% dari tahun sebelumnya, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pada surat berharga yang diterbitkan.

Detail dari Liabilitas Perusahaan dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Liabilitas Pokok

Liabilitas Pokok Perusahaan dan sumber-sumber pendanaan utang yang utama, dapat dilihat pada Tabel 47 di bawah ini:

Tabel 47 - SUMBER DANA

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima				
Pinjaman Bank (Mata Uang Asing)	4.927	2.426	-2.501	-50,8%
Pinjaman Bank (Rupiah)	710	2.265	1.555	219,0%
Jumlah Pinjaman yang Diterima	5.637	4.691	-946	-16,8%
Surat Berharga yang Diterbitkan				
Utang Obligasi	1.427	2.865	1.438	100,8%
Medium Term Notes	254	100	-154	-60,6%
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	1.681	2.965	1.284	76,4%
Jumlah Sumber Dana	7.318	7.656	338	4,6%

Pinjaman yang Diterima

Jumlah Pinjaman yang Diterima pada 2016 turun 16,8% sebesar Rp946 miliar menjadi Rp4.691 miliar, mewakili 57,1% dari jumlah Liabilitas. Dari Jumlah Pinjaman yang Diterima pada 2016, Rp2.426 miliar atau 51,7% adalah pinjaman dalam mata uang asing dan Rp2.265 miliar atau 48,3% adalah pinjaman dalam rupiah.

Tabel 48 - RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun
Pinjaman (Dolar AS)			
Standard Chartered Bank (Facility Agent)	2.649	1.372	-1.277
Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch	684	400	-284
The Korea Development Bank (Facility Agent)	497	243	-254
Standard Chartered Bank, Singapore Branch	381	200	-181
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch	-	134	134
Emirates NBD Bank PJSC (Facility Agent)	682	77	-605
JA Mitsui Leasing, Ltd.	34	-	-34
Jumlah Pinjaman (Dolar AS)	4.927	2.426	-2.501
Pinjaman (Rupiah)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	754	754
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	141	295	154
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	221	269	48
PT Bank Permata Tbk	3	225	222
PT United Tractors Tbk	-	217	217
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	184	184
Bank of China Limited, Jakarta Branch	-	137	137
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	82	82
PT Bank CTBC Indonesia	104	52	-52
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	50	50
PT Bank DKI	206	-	-206
PT Bank Commonwealth	35	-	-35
Jumlah Pinjaman (Rupiah)	710	2.265	1.555
Pinjaman - Bersih	5.637	4.691	-946

Proporsi pinjaman dalam mata uang asing mengalami penurunan yang cukup besar di 2016 ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya, dan menyeimbangkan pendanaan dari dalam dan luar negeri. BFI Finance saat ini merupakan satu dari sedikit perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mampu mendapatkan pendanaan dari luar negeri secara kompetitif. Selain itu, Perusahaan terus membina hubungan yang kuat dengan bank-bank di Indonesia guna mendukung kebutuhan pendanaan Perusahaan sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang dicatatkan dari tahun ke tahun.

Terkait dengan pinjaman luar negeri, seluruh pinjaman tersebut diberikan dalam mata uang USD, dan dengan suku bunga mengambang. Namun demikian, Perusahaan telah melakukan mitigasi risiko berupa lindung nilai atas transaksi tersebut melalui kontrak *cross-currency swap* dengan bank yang bereputasi baik, sehingga risiko fluktuasi mata uang asing maupun perubahan tingkat suku bunga mengambang dapat ditiadakan.

Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih

Selain mengandalkan sumber dana perbankan, Perusahaan juga melakukan diversifikasi

pendanaan lewat penerbitan obligasi dan *Medium Term Notes* sejak 2007.

Per 31 Desember 2016, Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih meningkat 76,4% menjadi Rp2.965 miliar, yang terdiri dari Utang Obligasi - Bersih sebesar Rp2.865 miliar (96,6%) dan *Medium Term Notes* - Bersih (MTN) sebesar Rp100 miliar (3,4%).

Peningkatan ini didorong oleh penerbitan dua Obligasi berkelanjutan, masing-masing senilai Rp1 triliun selama 2016, serta pelunasan kembali obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp555 miliar.

Rincian surat berharga yang diterbitkan - bersih pada 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 - SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016
Obligasi		
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	155	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	275	220
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	1.000	655
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	-	1.000
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	-	1.000
Jumlah Nilai Nominal	1.430	2.875
Biaya Emisi Obligasi yang Belum Diamortisasi	-3	-10
Jumlah - Bersih	1.427	2.865
Medium Term Notes		
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	100	100
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	155	-
Jumlah Nilai Nominal	255	100
Biaya Emisi MTN yang Belum Diamortisasi	1	-
Jumlah - Bersih	256	100
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan	1.681	2.965

Kronologis surat berharga yang diterbitkan Perusahaan selengkapnya dapat dilihat pada bagian Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

LIABILITAS LAINNYA

Utang Pajak

Utang Pajak meningkat 34,3% atau Rp24 miliar menjadi Rp94 miliar atau 1,1% dari Jumlah Liabilitas pada 2016 (Tabel 46). Peningkatan yang besar ini terutama berasal dari peningkatan utang pajak penghasilan untuk pembayaran dividen interim tunai untuk tahun buku 2016 yang telah dilaksanakan pada 16 Desember 2016, di mana utang pajak tersebut jatuh tempo pada 10 Januari 2017, dan peningkatan nilai taksiran pajak penghasilan pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Pos ini terdiri dari beban operasional dan bunga yang dihitung secara akrual sampai dengan tanggal neraca.

Beban yang Masih Harus Dibayar meningkat 34,8% menjadi Rp190 miliar atau 2,3% dari Jumlah Liabilitas pada 2016 (Tabel 46). Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pencadangan atas beban bonus dan tunjangan karyawan.

Imbalan Pasca-Kerja

Imbalan pasca kerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam rangka memenuhi hak karyawan yang bekerja hingga masa usia pensiun maupun lebih awal sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Imbalan Pasca-Kerja meningkat 25,0% menjadi Rp140 miliar atau 1,7% dari Jumlah Liabilitas pada 2016 (Tabel 46). Peningkatan Manfaat Pasca-Kerja disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan (jumlah karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2016 adalah sebanyak 5.316 orang, atau peningkatan sebesar 12,1%.

Hanya karyawan tetap yang berhak memperoleh imbalan pasca-kerja.

Utang Dividen

Utang Dividen yang tercatat di laporan posisi keuangan adalah sisa dari seluruh dividen yang diterbitkan Perusahaan dan telah dibayarkan namun belum dicairkan oleh pemegang saham (khususnya yang sahamnya tercatat secara *script*).

Utang dividen pada 2016 adalah sebesar Rp1 miliar, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2015 (Tabel 46). Utang dividen disebabkan oleh distribusi Dividen Interim dan Dividen Tunai Final Tahun Buku 2015 berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi pada 19 November 2015 dan 25 April 2016, sedangkan Dividen Tunai Interim untuk tahun buku 2016 berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi pada tanggal 21 November 2016 adalah senilai Rp150 per saham atau setara dengan Rp224 miliar, dibayar tunai pada 16 Desember 2016.

Ekuitas

Rincian jumlah Ekuitas Perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 - EKUITAS

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Modal Saham	392	399	7	1,8%
Tambahan Modal Disetor - Bersih	475	553	78	16,4%
Saham Treasuri	(4)	(252)	(248)	6200,0%
Cadangan Saham Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham	6	-	(6)	n/a
Penghasilan Komprehensif Lain				
Keuntungan (Kerugian) Kumulatif atas Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Arus Kas - Bersih	25	(33)	(58)	-232,0%
Kerugian Aktuarial Program Manfaat Pasti	(44)	(49)	(5)	11,4%
Saldo Laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya	22	32	10	45,5%
Belum Ditentukan Penggunaannya	3.147	3.605	458	14,6%
Jumlah	4.019	4.255	236	5,9%

Jumlah Ekuitas pada 31 Desember 2016 adalah Rp4.255 miliar, naik 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perolehan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp798 miliar setelah dikurangi dividen interim sebesar Rp224 miliar.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perusahaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar 1.596.711.562 saham atau Rp399 miliar termasuk saham tambahan sebesar 30.752.000 saham hasil eksekusi MESOP 2016.

Tambahan Modal Disetor

Pada 31 Desember 2016, saldo Tambahan Modal Disetor adalah Rp553 miliar, yang merupakan selisih lebih antara hasil yang diterima dengan nilai nominal dari modal disetor penuh, penawaran umum saham perdana, dan konversi dari obligasi konversi. Terdapat tambahan sejumlah Rp78 miliar yang berasal dari pembayaran berbasis saham dari MESOP.

Saham Treasuri

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15 April 2015, dengan nilai maksimal sebesar 10% atau 154.993.456 lembar dari total jumlah saham yang beredar pada saat itu.

Adapun tujuan pembelian adalah untuk menjaga likuiditas pasar serta memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya pada saat harga saham tidak likuid. Selain itu pembelian kembali saham tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan nilai laba per saham (*earning per share*) Perusahaan.

Per 15 Oktober 2016 program *buyback shares* ini dinyatakan berakhir.

Seluruh pembelian kembali saham dicatat sebagai saham treasuri pada bagian Ekuitas sebesar nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali pada 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 51 - SAHAM TREASURI

Keterangan	2015		2016	
	Jumlah Saham	Rp miliar	Jumlah Saham	Rp miliar
Saham Treasuri	1.572.800	4	100.273.200	252

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan ("RUPSLB") pada 21 Juni 2012, pemegang saham telah menyetujui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perusahaan atau *Management and Employee Stock Options Program* ("MESOP"), melalui penerbitan hak opsi untuk membeli saham (*stock option*) sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan, dan disetujui kembali berdasarkan RUPSLB 6 Mei 2014, untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016.

Per 31 Desember 2016, seluruh program MESOP telah berakhir, dan seluruh saham yang dialokasikan telah di-*exercise* oleh manajemen dan karyawan.

Penghasilan Komprehensif lainnya

Penghasilan komprehensif lainnya merupakan pos penampung atas dampak bersih berupa keuntungan/kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas serta keuntungan/kerugian aktuarial program manfaat pasti yang tidak dibukukan sebagai bagian dari laporan laba rugi.

Sepanjang 2016, terjadi penurunan ekuitas yang berasal dari kerugian komprehensif lain 2016 sebesar Rp63 miliar, sehingga saldo per akhir 2016 adalah kerugian sebesar Rp82 miliar (Tabel 50).

Imbal Hasil atas Aset dan Imbal Hasil atas Ekuitas (ROAA dan ROAE)

Pengukuran imbal hasil dapat diukur melalui dua pendekatan, yaitu imbal hasil atas aset (*Return on Average Asset* atau ROAA) dan imbal hasil atas ekuitas (*Return on Average Equity* atau ROAE), dengan masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata aset dan rata-rata ekuitas.

Selama 2016, Perusahaan mencatatkan pencapaian positif baik secara ROAA maupun secara ROAE.

Tabel ROAA dan ROAE 2015 dan 2016:

Tabel 52 - ROAA DAN ROAE 2015 DAN 2016

Rasio	2015	2016	Rata-rata Industri*
ROAA	7,8%	8,5%	3,9%
ROAE	17,1%	19,3%	12,0%

* Sumber data statistik lembaga pembiayaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Sepanjang 2015 dan 2016, Perusahaan mencatat laba bersih masing-masing sebesar Rp650 miliar dan Rp798 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 - LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Jumlah Pendapatan	2.831	3.227	396	14,0%
Jumlah Beban	1.995	2.202	207	10,4%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	836	1.025	189	22,6%
Beban Pajak Penghasilan	186	227	41	22,0%
Laba Tahun Berjalan	650	798	148	22,8%
Pajak	63	-63	-126	-200,0%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	713	735	22	3,1%

Terdapat peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp 148 miliar, meningkat sebesar 22,8% dibandingkan laba tahun sebelumnya. Hal ini utamanya dikontribusi oleh peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp 396 miliar setelah dikurangi dengan kenaikan beban sebesar Rp207 miliar. Pendapatan meningkat sebesar 14,0% selama 2016 sementara jumlah beban hanya meningkat 10,4% pada periode yang sama.

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan terutama berasal dari pendapatan pembiayaan yang terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, dan pendapatan lain-lain yang dapat dirinci sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 14,0%, menjadi Rp3.227 miliar pada 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada Jumlah Piutang Bersih sebesar 17,0%, sejalan dengan keberhasilan Perusahaan dalam memperluas jaringan pemasaran serta diversifikasi pembiayaan ke daerah-daerah yang tidak terdampak atas penurunan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir ini.

Untuk memberikan gambaran terkait sumber pendapatan Perusahaan, kami akan memberikan rincian pendapatan serta selanjutnya membagi dan melakukan analisis atas pendapatan berdasarkan jenis Aset kelolaan sebagai berikut:

1. Pembagian sesuai *audit report*.
2. Khusus untuk pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan dibagi berdasarkan aset dan dikurangi porsi *Joint Financing*.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Sepanjang tahun 2016, pendapatan pembiayaan (neto setelah transaksi *Joint Financing*) adalah sejumlah Rp2.401 miliar, meningkat sebesar Rp277 miliar atau 13,0% dibanding tahun sebelumnya (Tabel 54). Peningkatan ini utamanya berasal dari sewa pembiayaan, yang berasal dari pembiayaan kendaraan untuk tujuan modal kerja dan investasi yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi aset (lihat Tabel 55), sektor mobil bekas menyumbang 67,0% dari jumlah pendapatan pembiayaan (sebelum *Joint Financing*) atau sejumlah Rp1.746 miliar, meningkat Rp183 miliar atau 11,7% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan juga terjadi di sektor sepeda motor bekas, alat-alat berat dan mesin serta properti. Satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah mobil baru, sejalan dengan penurunan dari sisi piutang pembiayaan yang disebabkan oleh keputusan strategis manajemen Perusahaan untuk sangat selektif atas sektor ini.

Pendapatan Keuangan atau Bunga

Pendapatan Keuangan utamanya berasal dari pendapatan jasa giro bank atau bunga atas penempatan deposito berjangka atas kelebihan arus kas Perusahaan yang belum dapat disalurkan dalam pembiayaan.

Pendapatan keuangan mengalami kontraksi sebesar Rp14 miliar atau 39,3% dari jumlah tahun sebelumnya. Hal ini timbul karena tidak ada kelebihan dana mengendap yang signifikan selama 2016 dibanding 2015 (Tabel 54), yang berarti pengelolaan dana yang lebih efektif selama 2016.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain merupakan pendapatan yang bersifat non-bunga yang berasal dari kegiatan utama pembiayaan Perusahaan maupun kegiatan lainnya, antara lain terdiri dari pendapatan administrasi, denda keterlambatan, penalti pelunasan dipercepat, pemulihan atas piutang yang telah dihapusbukukan, pendapatan atas penjualan aktiva tetap dan lainnya.

Pendapatan Lain-Lain pada 2016 mencapai Rp805 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 20,0% dari jumlah tahun sebelumnya (Tabel 54). Kenaikan pada Pendapatan Lain-Lain terutama disebabkan oleh pendapatan lain yang terkait dengan pembiayaan, hal mana sejalan dengan kenaikan volume bisnis Perusahaan di 2016.

Tabel 54 - PENDAPATAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pendapatan (termasuk Joint Financing)				
Pendapatan Pembiayaan	2.479	2.608	129	5,2%
Pendapatan Keuangan	35	21	-14	-39,3%
Pendapatan Lain-Lain	669	809	140	20,9%
Jumlah Pendapatan (termasuk Joint Financing)	3.183	3.438	255	8,0%
Dikurangkan Joint Financing	352	211	-141	-40,1%
Jumlah Pendapatan	2.831	3.227	396	14,0%
Pendapatan (setelah dikurangkan Joint Financing)				
Pembiayaan Konsumen	1.239	1.069	-170	-13,8%
Sewa Pembiayaan	885	1.332	447	50,5%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	2.124	2.401	277	13,0%
Keuangan	36	21	-15	-41,0%
Lain-Lain	671	805	134	20,0%
Jumlah Pendapatan	2.831	3.227	396	14,0%

Tabel 55 - PENDAPATAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS ASET

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Rincian berdasarkan Jenis Aset				
Pembiayaan Mobil Bekas	1.563	1.746	183	11,7%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	266	308	42	15,8%
Pembiayaan Mobil Baru	413	288	-125	-30,3%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	220	232	12	5,5%
Lain-Lain	17	34	17	100,0%
Jumlah Pendapatan Pembiayaan (termasuk Joint Financing)	2.479	2.608	129	5,2%
Persentase Jenis Aset				
Pembiayaan Mobil Bekas	63,0%	67,0%	n/a	4,0%
Pembiayaan Sepeda Motor Bekas	10,7%	11,8%	n/a	1,1%
Pembiayaan Mobil Baru	16,7%	11,0%	n/a	-5,7%
Pembiayaan Alat-Alat Berat*	8,9%	8,9%	n/a	0,0%
Lain-Lain	0,7%	1,3%	n/a	0,6%
Jumlah	100,0%	100,0%		

* Termasuk mesin dan peralatan lain

Beban

Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, maka beban diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar sebagai berikut:

Tabel 56 - BEBAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Bunga dan Keuangan	712	792	80	11,2%
Gaji dan Tunjangan	627	716	89	14,2%
Umum dan Administrasi	341	392	51	15,0%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	230	273	43	18,7%
Lain-Lain	85	29	-56	-65,9%
Jumlah	1.995	2.202	207	10,4%

Selama 2016, total beban mencapai Rp2.202 miliar, dimana beban tersebut utamanya berasal dari beban bunga dan keuangan sebesar Rp792 miliar atau 36,0% dari total beban dan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp716 miliar atau mewakili 32,5% dari total beban sepanjang tahun.

Terjadi peningkatan beban sebesar Rp207 miliar atau 10,4% di 2016. Kenaikan ini terutama disumbangkan oleh kenaikan Beban Bunga dan Keuangan sebesar Rp80 miliar atau 11,2%, kenaikan pada Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp89 miliar atau 14,2% serta kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp51 miliar atau 15,0%.

Beban Bunga dan Keuangan

Beban Bunga dan Keuangan merupakan beban yang timbul atas kegiatan pendanaan Perusahaan, baik dari pinjaman maupun surat berharga yang diterbitkan, di luar kegiatan pendanaan yang berbentuk *joint financing* (beban akan disajikan secara neto pada pendapatan bunga dari pembiayaan).

Tabel 57 - PINJAMAN, BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN, DAN *COST OF FUND*

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Pinjaman yang Diterima	5.637	4.691	-946	-16,8%
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	1.681	2.965	1.284	76,4%
Total Pinjaman	7.318	7.656	338	4,6%
Beban Bunga dan Keuangan	712	792	80	11,2%
Rata-Rata Cost of Fund	11,48%	11,25%	-0,23%	11,2%

Beban Bunga dan Keuangan pada 2016 mencapai Rp792 miliar atau 36,0% dari jumlah beban pada 2016, meningkat sebesar Rp80 miliar atau 11,2% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp338 miliar atau 4,6% pada jumlah pinjaman per akhir 2016. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 23 basis poin, dari 11,48% pada 2015 menjadi 11,25% di 2016.

Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan sepanjang tahun berjalan, termasuk tunjangan-tunjangan yang terkait dengan jabatan dan imbalan pasca kerja yang dicadangkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 58 - BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Gaji dan imbalan kerja	589	668	79	13,4%
Imbalan pasca-kerja	29	36	7	24,1%
Cadangan opsi saham	8	12	4	50,0%
Jumlah	626	716	90	14,4%

Beban Gaji dan Tunjangan pada 2016 mencapai Rp716 miliar atau 32,5% dari jumlah beban pada 2016, meningkat sebesar 14,4% dari nilai di tahun sebelumnya.

Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan sebesar 12,8% yaitu dari 7.924 menjadi 8.941 orang di 2016. Selain itu, besaran gaji mengalami penyesuaian sehubungan dengan kenaikan upah minimum secara nasional, berkisar antara 6,5%-17,2%, tergantung masing-masing provinsi.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perusahaan yang terdiri dari berbagai pos biaya, dengan rincian di bawah ini:

Tabel 59 - BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Penyusutan Aset Tetap	60	63	3	5,0%
Jasa Penerimaan Angsuran	39	41	2	5,1%
Perbaikan dan Pemeliharaan	39	40	1	2,6%
Asuransi	25	29	4	16,0%
Perjalanan Dinas dan Transportasi	26	26	0	0,0%
Honorarium Tenaga Ahli	6	23	17	283,3%
Pendidikan dan Pelatihan	14	19	5	35,7%
Sewa Kantor dan Gudang	16	17	1	6,3%
Perlengkapan Kantor	15	16	1	6,7%
Komunikasi	15	16	1	6,7%
Pengiriman, Perangko dan Meterai	14	14	0	0,0%
Listrik dan Air	12	12	0	0,0%
Amortisasi Aset Tak Berwujud	8	8	0	0,0%
Pemasaran	4	4	0	0,0%
Lain-Lain	48	64	16	33,3%
Jumlah	341	392	51	15,0%

Beban Umum dan Administrasi di 2016 mencapai Rp392 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 15,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar 283,3% pada Honorarium Tenaga Ahli, yaitu menjadi Rp23 miliar di 2016, yang merupakan honorarium yang harus dibayar kepada konsultan yang disewa Perusahaan selama tahun berjalan.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai merupakan pencadangan kerugian yang dibentuk berdasarkan evaluasi terhadap penurunan nilai piutang pembiayaan (baik pembiayaan konsumen maupun sewa pembiayaan), yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif yang dievaluasi secara berkala (bulanan) guna memastikan kecukupan nilai cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang tercantum di laporan posisi keuangan mencerminkan nilai yang wajar.

Perincian penyisihan penurunan nilai pada 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 60 - PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - Piutang Pembiayaan Konsumen	142	190	48	33,8%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai - Piutang Sewa Pembiayaan	88	83	(5)	-5,7%
Jumlah	230	273	43	18,7%

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai pada akhir tahun 2016 mencapai Rp273 miliar, mengalami kenaikan sebesar 18,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan bersih Perusahaan yang sebesar 17,0% sepanjang tahun 2016, meskipun disisi lain kualitas piutang menunjukkan perbaikan pada 2016, dengan nilai piutang diragukan dan macet (*non-performing financing*) menurun dari 1,33% pada 2015 menjadi 0,91% dari seluruh piutang dalam kelolaan.

Labanya Tahun Berjalan

Labanya Tahun 2016 mencapai Rp798 miliar, mengalami peningkatan sebesar 22,8% dibandingkan labanya tahun sebelumnya yaitu Rp650 miliar. Tingkat pertumbuhan labanya bersih ini merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Tabel 61 - LABA TAHUN BERJALAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Jumlah Pendapatan	2.831	3.227	396	14,0%
Jumlah Beban	1.995	2.202	207	10,4%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	836	1.025	189	22,6%
Beban Pajak Penghasilan	186	227	41	21,8%
Laba Tahun Berjalan	650	798	148	22,8%

Peningkatan labanya sebelum pajak sepanjang tahun 2016 sebesar Rp189 miliar disumbangkan oleh peningkatan total pendapatan sebesar Rp396 miliar atau setara dengan 14,0% dan setelah dikurangi peningkatan beban sebesar Rp207 miliar atau setara dengan 10,4%.

Dari sisi beban pajak, saat ini Perusahaan menerapkan tarif pajak penghasilan 20% yang berlaku bagi perusahaan publik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Sekurang-kurangnya 40% modal disetor dimiliki oleh publik;
- Pemegang saham publik harus terdiri dari sekurang-kurangnya 300 orang yang masing-masing memiliki kurang dari 5% dari jumlah modal disetor; dan
- Dua kriteria di atas harus dipenuhi sekurang-kurangnya enam bulan (183 hari) dalam satu tahun pajak.

Perusahaan telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut setiap tahun sejak tahun 2008, kecuali pada 2013.

Tabel 62 - RASIO BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	836	1.025	189	22,6%
Beban Pajak Penghasilan	186	227	41	22,0%
Rasio Beban Pajak Penghasilan	22,2%	22,1%	n/a	-0,1%

Rasio pajak untuk tahun 2015 dan 2016 di atas tarif normal 20%, hal ini disebabkan karena ada perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban secara komersial dibandingkan dengan pengakuan secara fiskal, serta beban pajak tambahan yang berasal dari keputusan hasil pemeriksaan pajak.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbedaan antara laba bersih dengan laba komprehensif timbul karena standar akuntansi yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan perhitungan atas program imbalan pasca-kerja yang mana kerugiannya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebagai pos yang tidak diklasifikasikan ke laba rugi. Selain itu, selisih juga berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko mata uang dan suku bunga yang timbul atas transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Selisih ini merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan normal kembali ketika kontrak lindung nilai (swap) mencapai tenggat jatuh tempo.

Tabel laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya serta total penghasilan komprehensif tahun berjalan:

Tabel 63 - PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Laba Tahun Berjalan	650	798	148	22,8%
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	63	(63)	(126)	-200,0%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	713	735	22	3,1%

Sepanjang tahun 2016, terjadi kerugian komprehensif lain sebesar Rp63 miliar, dibandingkan dengan laba komprehensif lain yang terjadi pada 2015 sebesar Rp63 miliar. Hal ini menyebabkan Jumlah Laba Komprehensif tahun berjalan menurun sebesar Rp126 miliar, dari Rp713 miliar pada 2015 menjadi Rp735 miliar pada 2016, atau kenaikan Rp22 miliar.

Laba per Saham Dasar

Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) mencapai Rp524 per saham, meningkat sebesar 25,7% dari Rp417 per saham di 2015. Peningkatan ini menunjukkan hasil positif kinerja keuangan Perusahaan selama tahun berjalan.

Tabel 64 - LABA PER SAHAM DASAR

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Laba Bersih Tahun Berjalan	650	798	148	22,8%
Laba Bersih per Saham (Nilai Penuh)	417	524	107	25,7%

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 - LAPORAN ARUS KAS

Keterangan (Rp miliar)	2015	2016	Perbandingan Komparatif 2 Tahun	
			Jumlah	Persentase
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	290	777	487	167,9%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	148	232	84	56,8%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-76	-51	25	-32,9%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	415	-793	-1.208	-291,1%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	487	-612	-1.099	-225,7%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	777	165	-612	-78,8%

Per 31 Desember 2016, Kas dan Setara Kas tercatat sebesar Rp165 miliar, menurun sebesar 78,8% dibandingkan dengan Rp777 miliar per 31 Desember 2015. Penurunan tersebut sejalan dengan target Perusahaan untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki guna disalurkan kembali ke dalam aktivitas yang produktif, utamanya piutang pembiayaan dan menjaga saldo kas dan setara kas dalam jumlah yang optimal. Saldo kas dan setara kas yang tinggi pada akhir tahun 2015 terjadi karena pencairan dana bank yang sudah dijadwalkannya tidak dapat disalurkan sesuai target awal, sehingga terjadi likuiditas per akhir 2015.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menggambarkan pergerakan kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis Perusahaan. Pada 2016, kas bersih dari aktivitas operasi mencapai Rp232 miliar, meningkat sebesar 56,8% dari Rp148 miliar yang diterima di 2015. Peningkatan ini terutama disumbangkan oleh penerimaan dari transaksi pembiayaan serta bunga dan lain-lain meningkat sebesar Rp970 miliar di 2016. Sementara itu, jumlah pengeluaran kas meningkat sebesar Rp886 miliar di tahun yang sama.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi berasal keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan investasi dan pembelanjaan pada aset modal yang dilakukan oleh Perusahaan. Pada 2016, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai Rp51 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp25 miliar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan aset tetap selama tahun berjalan, sementara belanja modal antara 2016 dengan 2015 hampir sama jumlahnya.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan menggambarkan pergerakan kas yang diperoleh dari transaksi pendanaan, baik pinjaman baru, pelunasan pinjaman maupun pembayaran bunga atas sumber pendanaan tersebut. Pada 2016, kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan mencapai Rp793 miliar, sementara pada 2015 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas tersebut berjumlah Rp415 miliar, sehingga terjadi penurunan arus kas bersih sebesar Rp1.208 miliar.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2016

Sepanjang 2016, pencapaian kinerja keuangan Perusahaan menunjukkan kinerja yang positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 66 - PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Keterangan	Target	Realisasi	Penjelasan atas Pencapaian Budget
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Baru	10%	6,8%	Sedikit di bawah <i>budget</i> , karena adanya perubahan fokus produk
Pertumbuhan Piutang Bersih	10%	17,0%	Di atas <i>budget</i> , karena faktor penurunan porsi pembiayaan <i>Joint Financing</i>
Pertumbuhan Aset	5% - 10%	6,0%	Sesuai <i>budget</i>
Rasio Kredit Bermasalah (NPF)	1,2% - 2,0%	0,9%	Lebih baik dari <i>budget</i> karena perbaikan kapasitas kapabilitas penagihan dan percepatan siklus hapus - buku untuk pembiayaan mobil dan motor
Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas (<i>Gearing</i>)	2x	1,8x	Sesuai <i>budget</i>
Rasio Pembayaran Dividen	Up to 50%	49,8%	Sesuai <i>budget</i>

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Beberapa ukuran yang sering digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat kemampuan membayar utang suatu perusahaan:

- Rasio Solvabilitas Aset, yaitu mengukur seberapa besar aset yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.
- Rasio Likuiditas yang mengukur kemampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek menggunakan aset lancarnya.

- Rasio *gearing*, yaitu mengukur besarnya perbandingan besarnya pinjaman terhadap modal sendiri (ekuitas).
- Hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat kredit terakreditasi.

Berikut adalah rasio-rasio kemampuan membayar utang Perusahaan untuk 2015 dan 2016:

Tabel 67 - RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Rasio Penting	2015	2016	Penjelasan
Solvabilitas Aset	0,7x	0,7x	Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset yang dibiayai menggunakan liabilitas, dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan membayar utang adalah tinggi.
Likuiditas	1,6x	1,7x	Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.
Gearing	1,8x	1,8x	Perusahaan memiliki rasio <i>gearing</i> yang termasuk rendah dibanding rata-rata perusahaan pembiayaan sebesar 3,0x, sementara batas maksimal yang diizinkan sesuai POJK No. 29/OJK/2014 adalah maksimal 10x.

Sebagai perusahaan yang melakukan penerbitan surat hutang di pasar modal, BFI mendapatkan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Hasil pemeringkatan terakhir yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada 25 November 2016 kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- 'AA-(idn)' dengan *Outlook* Stabil atas peringkat nasional jangka panjang.
- 'F1+(idn)' dengan *Outlook* Stabil atas peringkat nasional jangka pendek.

Keterangan:

- Peringkat nasional di kategori 'AA' menunjukkan ekspektasi akan risiko gagal bayar yang relatif sangat rendah terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Risiko kredit hanya sedikit berbeda dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapatkan peringkat tertinggi di Indonesia.
- Peringkat Nasional 'F1' mengindikasikan kapasitas membayar komitmen keuangan secara tepat waktu relatif paling kuat terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Dalam skala peringkat nasional Fitch Ratings, peringkat ini diberikan kepada risiko gagal bayar relatif terendah terhadap yang lain di Indonesia. Apabila profil likuiditas secara spesifik dinilai kuat, tanda "+" ditambahkan pada peringkat yang diberikan.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG (KUALITAS ASET)

Perusahaan mengklasifikasikan kolektibilitas piutang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Berikut adalah analisa umur piutang pembiayaan dalam kelolaan untuk 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 68 - TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG (KUALITAS ASET)

Keterangan	Hari Tunggakan	Jumlah Piutang (Rp miliar)		Persentase (%)	
		2015	2016	2015	2016
1 - Lancar	0-30 hari	11.833	12.678	96,8	97,3
2a - DPK*	31-60 hari	156	152	1,3	1,2
2b - DPK*	61-90 hari	76	78	0,6	0,6
3a - Kurang Lancar	91-120 hari	40	34	0,3	0,3
3b - Kurang Lancar	121-150 hari	34	32	0,3	0,2
4 - Diragukan	151-180 hari	27	24	0,2	0,2
5 - Macet	>180 hari	62	28	0,5	0,2
Jumlah		12.229	13.026	100,0	100,0

* DPK = Dalam Perhatian Khusus

Selama 2016, Perusahaan mampu menjaga rasio kolektibilitasnya dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dengan rasio tunggakan yang cukup rendah untuk masing-masing kelompok tunggakan. Rasio tunggakan di atas 30 hari menurun dari 3,2% di 2015 menjadi 2,7% di 2016. Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh klasifikasi aset yang dibiayai.

Hal ini sejalan dengan fokus Perusahaan dalam melakukan penagihan lebih awal (*early collection*) yang telah mulai diterapkan sejak 2014 telah menunjukkan hasil yang positif. Selain itu, standar *underwriting* diterapkan secara ketat, dengan mengurangi kegiatan di sektor-sektor berisiko tinggi seperti yang terkait komoditas. Sepanjang tahun, Perusahaan telah menyelaraskan tim penagihannya, meningkatkan kontrol kredit dan memperkenalkan metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan.

Hasil dari efektivitas manajemen risiko dan penagihan tampak dari peningkatan positif atas rasio Kredit Bermasalah ("NPF"), yang dihitung dari rasio piutang jatuh tempo lebih dari 90 hari yaitu 0,91% pada 2016 dibandingkan 1,33% pada 2015.

KEBIJAKAN PENGHAPUSBUKUAN

Perusahaan mengubah kebijakan Penghapusan Piutang pada Desember 2016 dari 270 hari ke atas menjadi 210 hari ke atas. Perubahan ini berlaku untuk portofolio piutang mobil dan motor, sementara untuk piutang alat-alat berat, mesin dan properti, hapus buku dilakukan berdasarkan analisa *account* secara individual atau paling lambat apabila tunggakan melebihi 270 hari, akan dilakukan hapus buku secara otomatis.

Perubahan kebijakan penghapus bukuan dilaksanakan karena berdasarkan analisa dari manajemen, efektifitas penagihan setelah piutang mengalami tunggakan lebih dari 210 hari adalah rendah, sehingga penghapus-bukuan yang lebih awal akan lebih mengefektifkan fokus penagihan atas piutang yang hapus buku secara terpisah dari piutang yang masih aktif. Perubahan ini juga mengacu kepada best practice yang banyak diterapkan di bank dan perusahaan pembiayaan besar di Indonesia.

STRUKTUR MODAL (KECUKUPAN MODAL)

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Anggaran dasar Perusahaan mengatur bahwa modal dasar Perusahaan adalah berjumlah Rp500 miliar yang terdiri 2 miliar lembar saham dengan nominal Rp250 untuk setiap lembar saham. Dari modal dasar tersebut, sebanyak 1.596.711.562 lembar saham telah ditempatkan dan disetor penuh. Lebih lanjut, terdapat sejumlah 100.273.200 lembar saham dibeli kembali oleh Perusahaan hingga 31 Desember 2016.

Dalam pengelolaan permodalan, Perusahaan mengacu pada Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 19 November 2014, yang di antaranya mengatur

mengenai ketentuan modal perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

- Ekuitas minimum Rp100 miliar;
- Ekuitas minimum sebesar 50% dari modal disetor; dan
- Jumlah pinjaman terhadap ekuitas yang dikurangi pinjaman subordinasi dengan penyertaan sebesar maksimal 10 kali, baik untuk pinjaman dalam maupun luar negeri (*gearing ratio*).

Dalam hal ini, Perusahaan telah memenuhi aturan-aturan di atas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 69 - STRUKTUR MODAL

Keterangan (Rp miliar)	Ketentuan POJK	Realisasi Perusahaan	
		2015	2016
Ekuitas	Minimal Rp100 miliar	4.019	4.255
Proporsi Jumlah Ekuitas terhadap Modal Disetor	Minimal 50%	1,025%	1,066%
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimal 10x	1,8x	1,8x

IKATAN YANG MATERIAL

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material.

INVESTASI BARANG MODAL

Rincian Belanja Modal Perusahaan pada 2016 adalah sebagai berikut:

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perusahaan pada umumnya meliputi investasi di bidang infrastruktur teknologi informasi dan penataan kantor-kantor cabang. Sumber dana pembelian barang modal tersebut sebagian besar menggunakan dana internal Perusahaan. Dengan adanya investasi barang modal tersebut, Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Jumlah pengeluaran barang modal pada 2016 adalah Rp62 miliar. Seluruh pengeluaran barang modal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada tanggal Laporan Tahunan Terintegrasi ini diterbitkan, Perusahaan sedang melakukan proses penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun, dengan jadwal pencatatan obligasi di BEI pada 3 Maret 2017.

Berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. Corp/SJN/L/II/17-0024 tanggal 1 Pebruari 2017 bahwa pada 31 Januari 2017, Perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Cornelliuss Henry Kho selaku Direktur Perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan, Perusahaan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Untuk itu Perusahaan saat ini sedang menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan RUPS dimaksud sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perusahaan dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- Seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama, termasuk hak atas dividen. Pengecualian dividen adalah atas saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) atau saham lain yang dikecualikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.
- Sesuai anggaran dasar Perusahaan, pembayaran dividen harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perusahaan, termasuk laba bersih tahun berjalan, tingkat likuiditas serta kebutuhan untuk ekspansi bisnis.

- Tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang saham untuk menentukan lain, Perusahaan berkeinginan untuk membagikan dividen tunai dengan nilai hingga 50% dari laba bersih tahun berjalan.
- Pembagian dividen dapat dilakukan sekaligus maupun lebih dari satu kali lewat dividen interim.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan melakukan pembagian dividen atas laba bersih tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 70 - KEBIJAKAN DIVIDEN & PEMBAYARAN DIVIDEN		
Keterangan (Rp miliar)	2015	2016
Laba Bersih Tahun Berjalan	650	798
Dividen Tunai		
Dividen Interim Tahun Berjalan	107	224
Dividen Final	216	*
Jumlah Dividen Tunai	323	224
% Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih Tahun Sebelumnya	49,7%	*
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai		
Dividen Interim Tahun Berjalan	16-Des-15	16-Des-16
Dividen Final	25-Mei-16	*

* Menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2017

Perusahaan telah membayar Rp150 (nilai penuh) per saham dalam dividen interim atas perolehan laba bersih 2016, yang setara dengan rasio pembayaran sebesar 28,1% dari laba bersih. Pembayaran dividen final untuk 2016 akan membutuhkan persetujuan para pemangku kepentingan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan. Untuk detail Sejarah Pembayaran Dividen, dapat dilihat pada Tabel 5.

PENGGUNAAN DANA PENERBITAN UMUM

Sepanjang 2016, Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum untuk Obligasi Rupiah, yang disebut dengan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap III”) dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”) dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp1 triliun.

Untuk memenuhi peraturan OJK No. X.K.4 tentang kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, Perusahaan telah menyampaikan realisasi penggunaan dana atas penawaran umum tersebut di atas sebagai berikut:

Jenis penawaran, tanggal tercatat di bursa, realisasi jumlah penawaran dan jumlah bersih, sisa penawaran umum, tanggal pelaporan.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus dan informasi tambahan yang telah diterbitkan dalam rangka penawaran umum di atas, dana tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:

- Sekitar 60% digunakan untuk modal kerja di berbagai aktivitas Pembiayaan Konsumen; dan
- Sekitar 40% digunakan untuk modal kerja di berbagai aktivitas Pembiayaan Sewa.

Seluruh dana hasil penawaran umum telah digunakan untuk kegiatan utama pembiayaan Perusahaan, sehingga dengan demikian sisa dana yang belum digunakan adalah Nihil. Lebih lanjut, tidak ada perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut.

INVESTASI, DIVESTASI, MERGER & AKUISISI, SERTA RESTRUKTURASI UTANG ATAU MODAL

Selama 2016, Perusahaan tidak melakukan kegiatan terkait investasi, divestasi, merger dan akuisisi, ataupun restrukturisasi utang atau modal yang sifatnya material.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERPENGARUH

Sepanjang 2016, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan pembiayaan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 1/SEOJK.5/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan;
5. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.5/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan;
6. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
7. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank: dan
8. Surat Edaran OJK No. 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan.

Perubahan kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perusahaan namun tidak berdampak signifikan terhadap performa dan pendapatan Perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa, perubahan kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan tepat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkualitas.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PERUBAHAN ATAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Penerapan dari perubahan interpretasi standar akuntansi berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan Perusahaan.

Standar dan penyesuaian standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

- PSAK 4 – Laporan Keuangan Tersendiri (Amandemen 2015);
- PSAK 5 – Segmen Operasi (Penyesuaian 2015);
- PSAK 7 – Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (Penyesuaian 2015);
- PSAK 13 – Properti Investasi (Penyesuaian 2015);
- PSAK 15 – Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (Amandemen 2015);
- PSAK 16 – Aset Tetap (Penyesuaian 2015);
- PSAK 19 – Aset Tak Berwujud (Penyesuaian 2015);
- PSAK 22 – Kombinasi Bisnis (Penyesuaian 2015);
- PSAK 24 – Imbalan Kerja (Amandemen 2015);
- PSAK 25 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan (Penyesuaian 2015);
- PSAK 53 – Pembayaran Berbasis Saham (Amandemen 2015);
- PSAK 65 – Laporan Keuangan Konsolidasian (Amandemen 2015);
- PSAK 66 – Pengaturan Bersama (Amandemen 2015);
- PSAK 67 – Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain (Amandemen 2015);
- PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar (Penyesuaian 2015);
- ISAK 30 - Pungutan.

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan, tentang Prakarsa Pengungkapan, ISAK 31 – Interpretasi atas Ruang Lingkup, dan PSAK 13 – Properti Investasi.

Selengkapnya dapat dilihat pada Laporan keuangan audit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

PROSPEK BISNIS 2017

TINJAUAN EKONOMI MASA MENDATANG

Perbaikan fundamental ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi perekonomian Indonesia di 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 diproyeksikan di angka 5,1% atau lebih, dengan tingkat inflasi sekitar 4%, defisit anggaran belanja sekitar 2,4% dari GDP dan nilai tukar rupiah terhadap USD berkisar di angka Rp13.300/USD. Dengan asumsi pertumbuhan tersebut, tingkat pertumbuhan di sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank diperkirakan berkisar di angka 10%, tidak jauh berbeda dengan pencapaian 2016 sebesar 8,9% dimana pertumbuhan ekonomi tercatat 5,0%.

Hal ini memberikan gambaran, meskipun ada optimisme, bisnis di 2017 masih akan penuh tantangan, khususnya terkait dengan kondisi berikut ini:

1. Dampak risiko ekonomi global, seperti *Brexit* dan masa depan *Eurozone*, '*Trump effect*' dan kenaikan *Fed Rate* serta *re-balancing* ekonomi Tiongkok;
2. Nilai perdagangan barang komoditas diperkirakan masih rendah meskipun secara harga diperkirakan akan lebih baik dibanding 2016;
3. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap fluktuatif dan tertekan dengan kecenderungan melemah;
4. Target pendapatan pajak yang cukup agresif di 2017 yang bila meleset akan mempengaruhi defisit anggaran belanja dan pertumbuhan ekonomi; dan
5. Disparitas pendapatan yang sangat tinggi (sebagaimana ditunjukkan dengan *Gini ratio* 0,4) yang bisa menimbulkan dampak sosial dan politik.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada 2017, antara lain:

- Pertumbuhan jumlah penduduk generasi milenial, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di bidang konsumsi dan produksi;
- Paket kebijakan ekonomi Indonesia yang memiliki visi pertumbuhan jangka panjang;
- Pembangunan infrastruktur yang lebih baik dengan menggunakan modal dalam negeri akan membantu menopang pertumbuhan ekonomi; dan
- Kondisi politik yang relatif stabil. Secara umum, dapat dilihat juga perkembangan dan pembukaan daerah-daerah baru di berbagai provinsi di Indonesia selain di Pulau Jawa, yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah proyek pembangunan di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan, dan banyak tempat lainnya.

STRATEGI BISNIS 2017

Perusahaan akan tetap melanjutkan strategi yang telah dijalankan di tahun sebelumnya dengan penekanan sebagai berikut:

- Fokus pada penerapan praktik manajemen risiko yang berhati-hati;
- Terus memaksimalkan pertumbuhan pendapatan dari wilayah-wilayah dengan tingkat risiko yang terkendali, seperti wilayah Jawa dan Indonesia Timur;
- Meneruskan fokus pertumbuhan pada produk pembiayaan kendaraan mobil bekas, yang memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan Perusahaan, dengan terus berekspansi meraih memperbesar pangsa pasar di Pulau Jawa dan terutama Jabodetabek, dimana pangsa pasar Perusahaan masih kecil sementara potensi yang ada masih sangat besar;
- Untuk alat berat dan mesin, Perusahaan akan berupaya membukukan bisnis baru dan fokus pada pelanggan yang memiliki catatan pembayaran yang baik, dan fokus untuk menjaga kualitas portofolio;
- Membuka titik-titik penjualan baru untuk meningkatkan distribusi;

- Fokus terhadap produktivitas dan pengelolaan biaya yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan akan tetap menjadi langkah utama Perusahaan. Perusahaan akan berupaya mengelola biaya kredit dan biaya operasional khususnya dari sektor-sektor komoditas;
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kemampuankapabilitas teknologi informasi Perusahaan, dan pengembangan kompetensi SDM agar siap memasuki bisnis baru yang belum lama ini diperbolehkan oleh OJK;
- Menyempurnakan manajemen risiko Perusahaan untuk mengantisipasi tantangan bisnis yang semakin dinamis, baik dalam segi peningkatan biaya, gejolak kondisi makroekonomi, serta situasi persaingan bisnis yang semakin meningkat; dan
- Terus menjajaki dan berkolaborasi dengan perusahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan kapabilitas originasi bisnis dan pemrosesan aplikasi yang masuk ke Perusahaan.

PROYEKSI TAHUN 2017

- Penyaluran pembiayaan baru diharapkan dapat meningkat *double digit* dibanding tahun sebelumnya;
- Jumlah Piutang yang Dikelola meningkat *double digit* dibandingkan pada 2016 sejalan dengan peningkatan jumlah pembiayaan baru;
- Pertumbuhan positif atas pendapatan maupun laba bersih di atas pencapaian 2016;
- NPF terjaga di bawah 2,0%;
- menjaga tingkat kesehatan keuangan yang baik dan *gearing* di bawah 3x; dan
- Melanjutkan kebijakan pembayaran dividen selama kondisi bisnis dan likuiditas Perusahaan memungkinkan, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain.



PEMBANGUNAN MRT JAKARTA - JAKARTA
FRANSISKUS PARULIAN SIMBOLON

MRT memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas transportasi publik

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Laporan Tata Kelola Perusahaan	174
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	188
Dewan Komisaris	202
Direksi	219
Komite Audit	234
Komite Manajemen Risiko	240
Komite Nominasi dan Remunerasi	244
Sekretaris Perusahaan	250
Audit Internal	253
Audit Eksternal	259
Manajemen Risiko	261
Sistem Pengendalian Internal	271
Kasus Hukum 2016	273
Akses Informasi dan Komunikasi Perusahaan	281
Hubungan Investor	285
Kode Etik dan Budaya Perusahaan	286
Kebijakan Antikorupsi	288
Sistem Pelaporan Pelanggaran	291
Opsi Saham	292
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya	293



LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BFI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”) secara konsisten dan berkelanjutan selaras dengan dinamika bisnis dan tuntutan industri pembiayaan di Indonesia.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan GCG dalam seluruh kegiatan Perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan risiko bisnis Perusahaan, implementasi GCG diarahkan juga sebagai pedoman bagi manajemen dan karyawan untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara khusus, salah satu upaya untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG bagi perusahaan pembiayaan.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tantangan yang dihadapi Perusahaan semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, BFI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan selaras dengan dinamika bisnis dan tuntutan industri pembiayaan di Indonesia. Melalui komitmen ini, BFI yakin dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan dan menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan standar yang tinggi.

BFI memandang bahwa penerapan GCG di lingkungan Perusahaan tidak semata sebagai pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus menjadi budaya Perusahaan, dengan mewujudkan prinsip-prinsip GCG di dalam kegiatan Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan. BFI meyakini bahwa penerapan GCG di lingkungan Perusahaan akan meningkatkan keyakinan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terhadap pengawasan dan pengelolaan kegiatan usaha, serta meningkatkan nilai Perusahaan.

PAKTA INTEGRITAS BFI

Manajemen BFI memiliki dokumen Pakta Integritas yang berisi komitmen Perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Pakta Integritas BFI bertujuan untuk menumbuhkembangkan aspek keterbukaan dan kejujuran, guna menciptakan pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkungan bisnis. BFI juga berkomitmen untuk menetapkan standar yang tinggi atas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan. Kepatuhan terhadap standar etika bisnis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan lain yang berlaku merupakan dasar bagi pengelolaan kegiatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham atas penyelenggaraan GCG. Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh

NILAI- NILAI DASAR PERUSAHAAN

GIAT MEMPERBAIKI DIRI SECARA BERKESINAMBUNGAN

Nilai ini merupakan komitmen dari Perusahaan untuk selalu berkembang, baik dalam sisi kualitas maupun kuantitas, dalam hal perkembangan bisnis maupun kekuatan sumber daya manusia, dalam hal pemikiran maupun tindakan yang lebih efektif dan produktif, dalam hal proses maupun hasil kerja yang nyata, untuk mendukung pertumbuhan organisasi. Komitmen pengembangan ini juga diikuti dengan perbaikan secara konsisten dan terus-menerus dalam segala aspek, yaitu dalam pengembangan organisasi, bisnis, produk, proses kerja dan kualitas sumber daya manusia.

REALISASIKAN SALING MENGHORMATI DAN PEDULI

Menghormati dan menunjukkan kepedulian merupakan budaya Perusahaan yang dilakukan secara konsisten, tidak hanya terbatas kepada sesama karyawan tetapi juga keseluruhan organisasi. Menghormati sesama karyawan dengan cara menghargai perbedaan yang ada, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan, serta mencari persamaan untuk membentuk Perusahaan yang lebih kokoh. Peduli pada kondisi dan situasi Perusahaan, dan turut serta dalam mendukung pencapaian Perusahaan dalam situasi apapun.

EKSTRA LAYANAN KEPADA PELANGGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Nilai ini diartikan sebagai tuntutan yang terus-menerus untuk menciptakan kepuasan dalam pelayanan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Pemikiran ini sangat penting sebagai pedoman Perusahaan dalam hal penyusunan prinsip kebijakan dan strategi, aktivitas bisnis dan proses pengambilan keputusan serta dalam pemberian layanan.

ABSOLUT DALAM INTEGRITAS

Integritas mencakup keutuhan dan keseimbangan antara pemikiran (perspektif), perkataan dan tindakan terhadap kondisi dan situasi yang ada, dan termasuk di dalamnya adalah kejujuran, ketulusan dan komitmen terhadap suatu keadaan. Integritas juga tercermin dalam kesesuaian dan konsistensi perkataan dan perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan (*walk the talk*) dalam melakukan peraturan Perusahaan demi kemajuan organisasi. Integritas dapat terlihat dalam melakukan hal yang benar dan berani mengakui kesalahan demi terciptanya budaya yang transparan dan positif.

TIM KERJA YANG SOLID DAN SALING PERCAYA

Kerja sama yang utuh dan optimal dapat diperoleh melalui kepercayaan yang dibangun melalui berbagai kondisi yang ada. Saling percaya merupakan modal utama organisasi untuk mengikat dan mempererat hubungan antara sesama karyawan, antara karyawan dan Perusahaan, dan sebaliknya. Adanya saling percaya disertai itikad dan semangat positif demi kemajuan organisasi adalah menjadi dasar terciptanya hubungan dan kerja sama untuk jangka waktu yang panjang.

karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Pakta Integritas Perusahaan dengan sebaik-baiknya sejalan dengan pelaksanaan kebijakan strategis yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pakta Integritas BFI mengatur tentang Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha

Pendahuluan

Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha berlaku bagi seluruh kegiatan BFI, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, bagi setiap karyawannya. Semua pihak yang berwenang di BFI

mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dikomunikasikan secara lengkap kepada karyawannya untuk ditaati dengan sungguh-sungguh.

BFI melaksanakan kegiatan usahanya dengan kejujuran, integritas, dan keterbukaan, serta menghormati kepentingan pemegang saham, karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Nilai-Nilai Dasar Perusahaan

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan telah memberitahukan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan, tanpa melihat posisinya, bahwa mereka harus mematuhi dengan sungguh-sungguh etika pada tingkat

tertinggi yang ditanamkan dalam Nilai-Nilai Dasar Perusahaan.

Manajemen dan karyawan Perusahaan diwajibkan untuk memahami dan mematuhi Nilai-Nilai Dasar tersebut yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan adalah dasar bagi seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam melaksanakan setiap kegiatan bisnis Perusahaan. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan disingkat menjadi G.R.E.A.T.

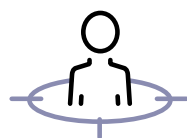
Tanggung Jawab Perusahaan

BFI mengakui adanya 5 (lima) bidang tanggung jawab Perusahaan, sebagai berikut:



Pemegang Saham

(a) **Kepada Pemegang Saham.** Perusahaan akan menjalankan usaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BFI bermaksud untuk memberikan hasil usaha yang optimal dengan senantiasa memelihara tingkat pengembalian investasi kepada para pemegang saham, sementara itu juga mempertahankan kecukupan dana untuk menggerakkan pertumbuhan Perusahaan. BFI sangat menghargai hubungan dengan para pemegang saham dan akan memberikan informasi tepat waktu, teratur dan dapat dipercaya mengenai kegiatan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan.



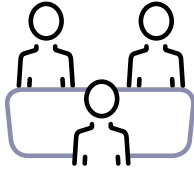
Pelanggan

(b) **Kepada Pelanggan.** Perusahaan memiliki komitmen untuk mendapatkan dan mempertahankan para pelanggan dengan menyediakan produk jasa pembiayaan yang memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dari segi manfaat dan biayanya.



Karyawan

(c) **Kepada Karyawan.** Perusahaan menghargai para karyawan sebagai sumber daya yang sangat penting melalui komitmen atas pengembangan sumber daya manusia. BFI akan merekrut, mempekerjakan, memberikan pelatihan dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, Perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat dan menjamin keselamatan para karyawan.

Pemangku
Kepentingan

(d) **Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan.** Perusahaan senantiasa memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan para kreditur, mitra usaha dan pihak lainnya dengan siapa Perusahaan melakukan bisnis, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.



Masyarakat

(e) **Kepada Masyarakat.** Sebagai anggota masyarakat, kami akan senantiasa menjalankan bisnis Perusahaan yang bertanggung jawab dengan menghormati undang-undang dan peraturan yang berlaku di tempat Perusahaan melakukan usaha dan berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan Perusahaan tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

Partisipasi Perusahaan, baik dalam pemberian sumbangan maupun penyelenggaraan pelatihan serta kegiatan sosial lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi lingkungan sekitarnya dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh penerimanya.

Integritas Usaha

BFI beserta seluruh kantor cabangnya dituntut untuk mengutamakan kejujuran, integritas dan kewajaran di semua aspek usaha perusahaan dan mengharapkan hal yang sama dalam hubungan dengan semua

pihak dengan siapa BFI berbisnis. Seluruh transaksi bisnis atas nama Perusahaan dicatat secara akurat sesuai dengan prosedur operasional standar dan tunduk pada audit. Para karyawan perlu menyampingkan keperluan pribadi mereka ketika menjalankan bisnis Perusahaan.

Komitmen Kegiatan Operasional

Pemakaian dan Perlindungan Aset Perusahaan

BFI akan memastikan bahwa setiap karyawan bertanggung jawab atas pemakaian yang wajar, perlindungan dan pelestarian aset dan sumber daya Perusahaan. Aset dan sumber daya Perusahaan, maupun kesempatan-kesempatan apapun yang timbul berdasarkan kedudukan seseorang, digunakan semata-mata untuk kepentingan pencapaian tujuan Perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karyawan BFI dilarang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan.

Pengungkapan Informasi

BFI menganggap informasi di bidang strategi bisnis merupakan aset penting bagi Perusahaan yang harus dilindungi terhadap kehilangan, pelanggaran serta pemakaian dan pengungkapan yang tidak selayaknya.

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

BFI akan senantiasa memastikan bahwa semua karyawan mentaati aturan-aturan perdagangan orang dalam. Ini berarti bahwa adanya informasi bukan untuk umum yang dapat mempengaruhi harga saham BFI dirahasiakan dengan baik sampai diumumkan oleh manajemen yang berwenang. Lebih lanjut, karyawan yang mempunyai informasi sensitif yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham BFI dan hak-hak terkait, tidak boleh melakukan transaksi langsung maupun tidak langsung atas saham BFI dan hak-hak terkait tersebut.

Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Pakta Integritas Perusahaan dengan sebaik-baiknya sejalan dengan pelaksanaan kebijakan strategis yang diterapkan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dasar Hukum

BFI berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Praktik GCG yang dijalankan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Tabel 71 – DASAR HUKUM IMPLEMENTASI GCG

No. Dasar Hukum	Judul
1. Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan 3. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 4. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan 5. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan 6. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan 7. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan 8. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 9. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 10. Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

No. Dasar Hukum	Judul
	11. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
	12. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
	13. Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
	14. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
	15. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
	16. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
	17. Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
	18. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
	19. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
	20. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
	21. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
	22. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
	23. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
	24. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
	25. Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
	26. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
	27. Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
	28. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
	29. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
	30. Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
	31. Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
	32. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
	33. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

No. Dasar Hukum	Judul
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat 2. Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan 3. Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan 4. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik 5. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan 6. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen 7. Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan 8. Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2015 tentang Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris, dan/atau Penilai Independen sebagai Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 9. Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015 10. Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.04/2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal 11. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 12. Surat Edaran OJK Nomor 47/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (<i>Down Payment</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan
6. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"; sekarang OJK) dan Keputusan Ketua Bapepam-LK, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik 2. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik 3. Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-431/BL/2012 Tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik 4. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan
7. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Di samping peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Perusahaan juga memperhatikan dan menjadikan acuan beberapa pedoman, antara lain:

- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (“GCG”) Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (“KNKCG”) sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan dan penerapan GCG. Pedoman Umum GCG Indonesia diterbitkan pertama kali oleh KNKCG pada 1999 dan telah mengalami dua kali perbaikan pada 2001 dan 2006;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK; dan
- Anggaran dasar Perusahaan.

Prinsip Utama

Dalam melaksanakan kegiatannya, BFI menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Prinsip-prinsip GCG tersebut adalah:

Tabel 72 – PRINSIP UTAMA GCG

No.	Prinsip GCG	Implementasi
1	<p>Keterbukaan (<i>Transparency</i>)</p> <p>Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI senantiasa melakukan pengelolaan usaha secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi diwujudkan dengan memberikan informasi kepada pemegang saham dengan jujur. Selain itu, penerapan prinsip ini diwujudkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan Terintegrasi; • Penyusunan dan penjelasan program kerja Perusahaan; • Laporan keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan triwulan dan tahunan; • Memberikan laporan keterbukaan informasi terkait kegiatan usaha Perusahaan; dan • Pemanfaatan situs web (<i>website</i>) untuk menyampaikan informasi Perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2	<p>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</p> <p>Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien</p>	<p>Manajemen membuat <i>job description</i> yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan. Prinsip ini terimplementasi dalam pembagian tugas antar organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta indikator kerjanya.</p>
3	<p>Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)</p> <p>Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>BFI memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (“CSR”) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan usaha. BFI menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan menyelenggarakan hal-hal antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; • Melaksanakan program dan kegiatan CSR; dan • Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.

No.	Prinsip GCG	Implementasi
4	<p>Kemandirian (<i>Independence</i>)</p> <p>Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat</p>	<p>Bagi BFI, independensi dalam pengelolaan usaha mutlak diperlukan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan peraturan dari otoritas terkait secara penuh tanpa intervensi pihak luar. Dengan penerapan prinsip independensi, BFI menjalankan kegiatan usaha dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menuju kesejahteraan. Penerapan prinsip independensi mendorong ke arah profesionalisme, kreativitas, dan kemandirian dalam pengelolaan bisnis Perusahaan. Penerapan prinsip ini diterapkan dalam kegiatan usaha BFI, antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan; • Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan; • Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan; dan • Kegiatan Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen atau wakilnya yang diberi wewenang dalam RUPS sebagaimana diatur, serta mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
5	<p>Kesetaraan dan Kewajaran (<i>Fairness</i>)</p> <p>Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.</p>	<p>BFI menjalankan kinerja secara adil serta menaati seluruh peraturan yang ada guna melindungi pemangku kepentingan dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan. BFI berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara adil serta bebas dari prasangka yang dapat muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. Prinsip ini diterapkan oleh BFI, antara lain, dengan kebijakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • BFI melaporkan informasi terkait rekanan kepada <i>stakeholder</i> secara adil dan transparan; dan • BFI memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh karyawan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; serta adanya penilaian kinerja secara periodik serta kesempatan promosi yang sama bagi seluruh karyawan.

Tujuan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BFI bertujuan untuk, antara lain:

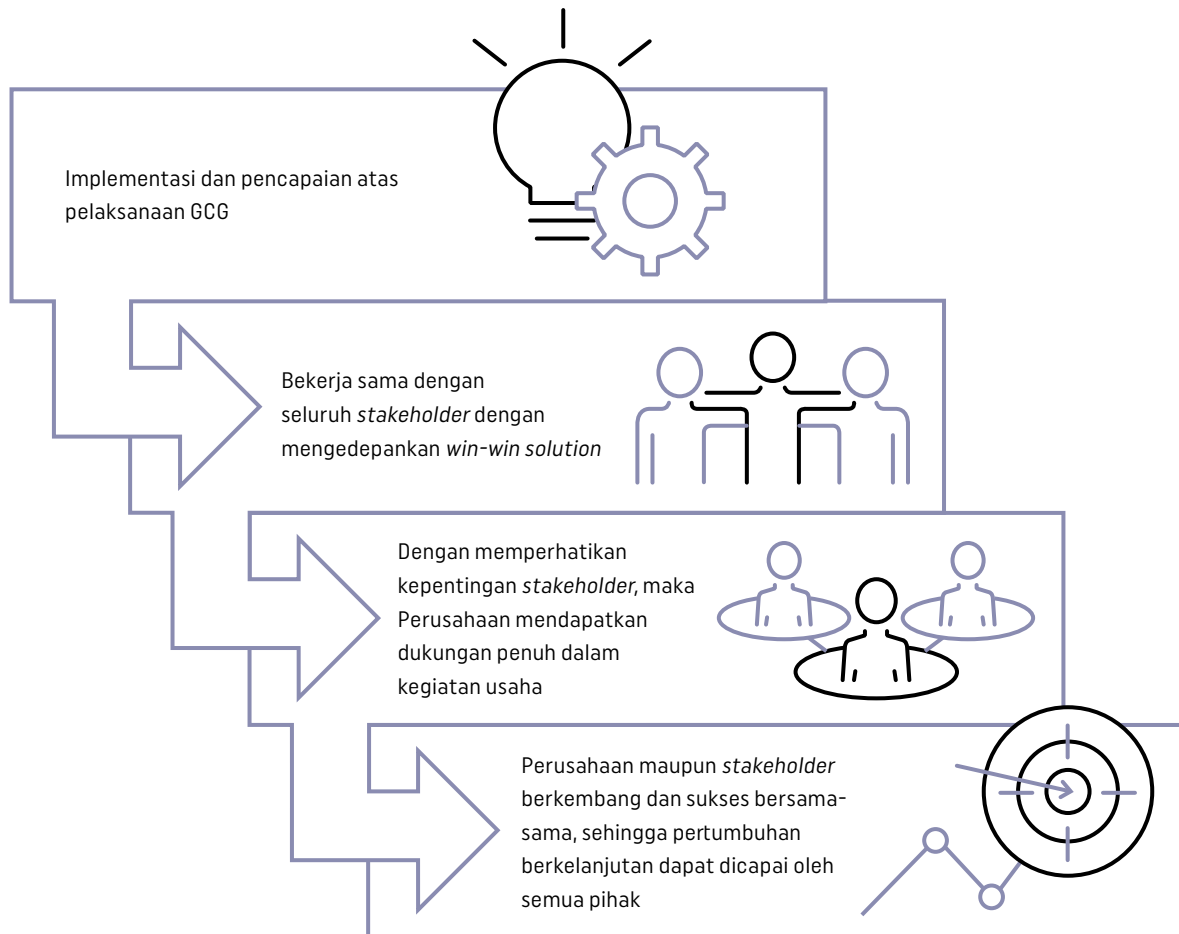
1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya pemegang saham, debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien;

3. Meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas CSR terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, serta memiliki

daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan; dan

5. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

Tujuan tersebut dapat digambarkan dalam skema pencapaian GCG sebagai berikut:



Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap seluruh elemen GCG dan yang terkait pelaksanaan GCG pada masa-masa mendatang.

Struktur dan Mekanisme GCG

Sesuai UUPT, struktur GCG terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu:

1. RUPS

RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan/atau anggaran dasar

Perusahaan dan merupakan forum pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha Perusahaan dan memperhatikan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan perangkat Perusahaan untuk mengawasi pelaksanaan usaha dijalankan sesuai dengan strategi,

prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

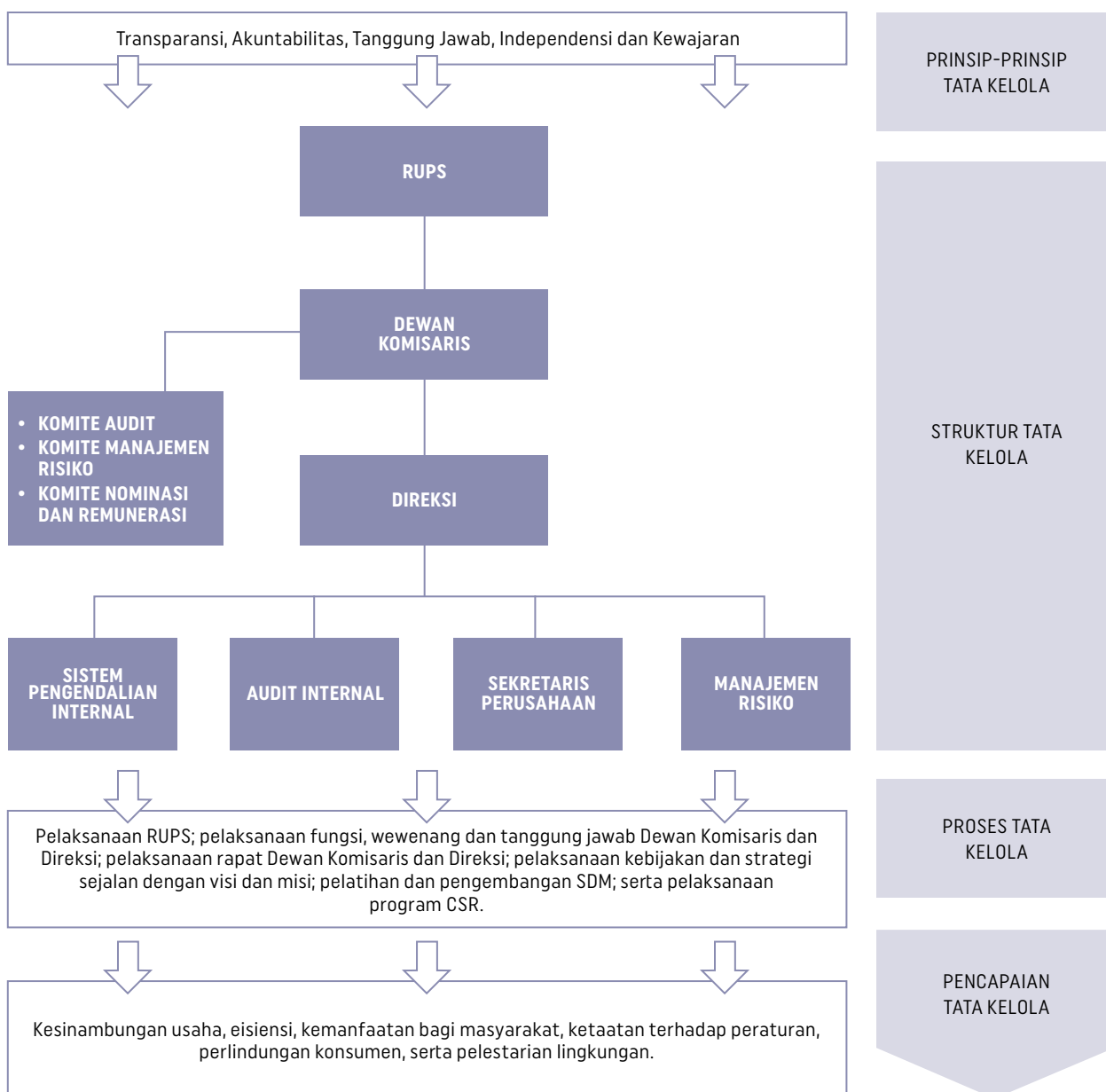
3. Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan; baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan perangkat eksekutif Perusahaan untuk menjalankan dan mengelola usaha sesuai dengan strategi, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang salah satu atau lebih anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, serta masing-masing bagian fungsional terkait.

Struktur Tata Kelola

Bagan Struktur GCG BFI adalah sebagai berikut:



Fokus utama dalam struktur GCG BFI adalah:

- Memastikan pemetaan fungsi atau kegiatan bisnis guna menghindari potensi benturan kepentingan; dan
- Memastikan bahwa mekanisme *check and balances* dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan kegiatan masing-masing organ dalam struktur GCG BFI akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Infrastruktur GCG

BFI memiliki infrastruktur GCG, baik dalam bentuk kebijakan maupun prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Infrastruktur GCG ini senantiasa dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan perkembangan terkini serta *best practice* atas penerapan GCG.

Infrastruktur GCG di BFI telah disempurnakan melalui Surat Keputusan (“SK”) Direksi No. 24/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Prosedur Perusahaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan. BFI senantiasa melakukan penyempurnaan infrastruktur GCG-nya agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan.

Infrastruktur GCG BFI terdiri dari (Tabel 73).

Masing-masing bagian dari infrastruktur GCG tersebut di atas akan diuraikan dalam bagian-bagian selanjutnya dalam Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Roadmap GCG

1. BFI selalu tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagai perusahaan publik, Perusahaan juga senantiasa memenuhi arahan dari Otoritas

Jasa Keuangan (“OJK”) dalam pelaksanaan *roadmap* GCG, yang mana pada 2014, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disusun dengan menggunakan referensi utama dan merujuk kepada standar internasional terkait praktik GCG.

2. BFI menyadari pentingnya penerapan GCG bagi kelangsungan bisnis dan Perusahaan telah melakukan serangkaian upaya untuk menyelaraskan program implementasi dan sosialisasi GCG dengan budaya Perusahaan.
3. Perusahaan telah memiliki infrastruktur GCG yang memadai, antara lain terdiri dari: Kode Etik (*Code of Conduct*), Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komite-Komite, serta prosedur dan kebijakan pendukung lainnya, seperti kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan Kepatuhan. Dari waktu ke

Tabel 73 – INFRASTRUKTUR GCG BFI

No.	Infrastruktur GCG	Bentuk
1	Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, yang berlaku bagi seluruh kegiatan BFI, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, serta bagi setiap karyawannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>) sebagai pedoman perilaku • Nilai-Nilai Dasar Perusahaan • Komitmen Kegiatan Operasional
2	Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>)
3	Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Komite Audit • Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
4	Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>) sebagai pedoman perilaku • Piagam <i>Internal Audit</i>
5	Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Keuangan Triwulanan • Laporan Tahunan • Laporan Keberlanjutan

waktu, infrastruktur GCG tersebut secara berkelanjutan terus dievaluasi dan dilakukan pengkinian.

Fokus Penerapan GCG

Pada 2016, fokus implementasi GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan terhadap berbagai peraturan eksternal dan internal yang relevan kepada seluruh jenjang organisasi Perusahaan melalui berbagai media komunikasi yang tersedia di Perusahaan, antara lain: sosialisasi peraturan baru Perusahaan ke karyawan melalui fasilitas intranet dan media internal lainnya.

2. Melakukan penilaian kualitas *outcome* (hasil implementasi) yang memenuhi harapan *stakeholder* Perusahaan yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur GCG, yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, yaitu:
 - a. Kecukupan transparansi laporan;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Penanganan perlindungan pelanggan;
 - d. Independensi dalam melakukan audit; dan

- e. Pencapaian kinerja Perusahaan; baik kinerja finansial maupun operasional.

Evaluasi Penerapan GCG

Implementasi GCG memerlukan penilaian untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan oleh Perusahaan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.

Pada 2016, BFI melakukan penilaian pencapaian GCG secara internal dengan hasil yang mencerminkan bahwa Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan GCG dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 74 – EVALUASI PENERAPAN GCG

Aspek	Faktor Positif	Faktor Negatif
A Struktur Tata Kelola		
1 Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Direksi	Secara umum, telah sesuai dengan kompleksitas dan ukuran Perusahaan, serta memenuhi peraturan yang berlaku.	-
2 Struktur Organisasi	Secara umum, BFI memiliki struktur organisasi yang terdiri atas direktorat, divisi, dan unit/fungsi kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional, serta penerapan pengendalian internal.	-
3 Kebijakan dan Prosedur	BFI telah memiliki kebijakan dan prosedur yang antara lain meliputi Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>), Piagam Komite Audit, Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Kode Etik, Piagam Audit Internal, aturan Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha (<i>Code of Business Principles</i>), Komitmen Kegiatan Operasional serta Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi (TI).	-

Aspek	Faktor Positif	Faktor Negatif
4 Sistem Informasi	BFI telah memiliki infrastruktur MIS yang mendukung aktivitas bisnis dan operasional, serta mendukung implementasi sistem pengendalian internal.	-
B Proses Tata Kelola		
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab	Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah berlangsung dengan baik.	-
2 Sumber Daya Manusia ("SDM")	BFI telah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan serta berfokus pada kecukupan ketersediaan SDM.	-
3 Manajemen Risiko	Dalam penerapan manajemen risiko, BFI secara berkala melakukan tinjauan atas limit risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan penilaian model internal atas pengelolaan risiko.	-
4 Pengaduan Pelanggan	BFI mengelola dan menyelesaikan pengaduan pelanggan sesuai dengan ketentuan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .	-
5 Budaya Disiplin dan Kepatuhan	BFI telah berupaya meningkatkan penegakan budaya disiplin dan kepatuhan di seluruh jenjang organisasi dengan menyusun Pakta Integritas untuk meningkatkan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>), <i>Anti-Fraud</i> dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>), serta memperkuat Sistem Pengendalian Internal.	-
6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i> atau "CSR")	BFI telah menjalankan CSR sebagai bagian dari proses bisnis Perusahaan.	-
C Hasil Tata Kelola		
1 Rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat menjadi masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.	-
2 Benturan Kepentingan	Tidak ada indikasi adanya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) yang mengakibatkan kerugian BFI.	-
3 Penyampaian Informasi kepada Publik	Secara umum, BFI telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik secara transparan, antara lain mencakup pelaporan keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan.	-
4 Kinerja Perusahaan	BFI mencatat pertumbuhan dan kinerja positif yang terlihat dari pertumbuhan aset dan laba serta terkendalinya piutang macet <i>Non-Performing Financing</i> atau NPF.	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

KEDUDUKAN RUPS DALAM PERUSAHAAN

RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi Perusahaan serta forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada para Pemegang Saham.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") yang wajib diselenggarakan sesuai anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG RUPS

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan/pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham;
2. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
4. Menetapkan target dan menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Menetapkan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik atau "KAP");
7. Menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta rencana kerja jangka panjang Perusahaan;
8. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan agenda dalam setiap RUPS yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan, mengajukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan, terutama untuk tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan di muka dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mempersiapkan pemberitahuan dan panggilan untuk pelaksanaan RUPS, termasuk agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS DI 2016

Selama 2016, BFI melaksanakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB. RUPS Perusahaan telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS 2016

BFI menyelenggarakan RUPS 2016 dengan melaksanakan tata cara penyelenggaraan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagai berikut:

Tabel 75 – TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPST DAN RUPSLB – 25 APRIL 2016

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Dasar Hukum
1	Pemberitahuan rencana dan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS	Surat BFI kepada OJK No. Corp.Sjn/L/III/16-0053 tanggal 8 Maret 2016, dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank (“IKNB”), BEI, KSEI, PT Sirca Datapro Perdana dan ICaMEL	Pasal 8 POJK No. 32/POJK.04/2014
2	Pemberitahuan kepada Pemegang Saham, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional; • Situs web BEI; dan situs web Perusahaan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah Bahasa Inggris, paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklan Pemberitahuan Rencana RUPS kepada Pemegang Saham di <i>Investor Daily</i> tanggal 16 Maret 2016 • Pemberitahuan Rencana RUPS di situs web BEI tanggal 16 Maret 2016 • Pemberitahuan Rencana RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris tanggal 16 Maret 2016 	Pasal 10 ayat (1) dan (4) POJK No. 32/POJK.04/2014
3	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Pemberitahuan kepada Pemegang Saham di surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS	Surat BFI kepada OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank (“IKNB”), dan BEI No. Corp/CH/L/III/16-0056 tanggal 16 Maret 2016, dengan tembusan kepada IKNB dan ICaMEL disertai Bukti Iklan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham	Pasal 10 ayat (8) POJK No. 32/POJK.04/2014
4	Tanggal terakhir Daftar Pemegang Saham, pukul 16.00 WIB, 1 (satu) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS	Meminta kepada Biro Administrasi Efek (PT Sirca Datapro Perdana) rekap nama pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	Pasal 19 ayat (2) POJK No. 32/POJK.04/2014
5	Panggilan RUPS, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran nasional; • Situs web BEI; dan • Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklan Panggilan RUPS kepada Pemegang Saham di <i>Investor Daily</i> tanggal 1 April 2016 • Panggilan RUPS di situs web BEI tanggal 1 April 2016 • Pemberitahuan Panggilan RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris tanggal 1 April 2016 	Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014
6	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Panggilan kepada Pemegang Saham di surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS	Surat BFI kepada OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non-Bank (“IKNB”), BEI dan PT Sirca Datapro Perdana dan ICaMEL No. Corp./FL/L/IV/16-0065 tanggal 1 April 2016, disertai Bukti Iklan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham	Pasal 13 ayat (7) POJK No. 32/POJK.04/2014
7	Pelaksanaan RUPS	Tanggal 25 April 2016 di Hotel The Dharmawangsa Jakarta, Jl. Brawijaya Raya No.26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia	
8	Menyampaikan Risalah RUPS kepada OJK paling lambat 30 hari setelah tanggal RUPS	Surat BFI kepada OJK No. Corp./FL/L/IV/16-0082 tanggal 26 April 2016, dengan tembusan kepada BEI, KSEI, Sirca Datapro Perdana dan ICaMEL	Pasal 32 dan 33 POJK No. 32/POJK.04/2014
9	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, minimal di: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran nasional; • Situs web BEI; dan • Situs web Perusahaan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling kurang adalah bahasa Inggris, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iklan Pengumuman Risalah RUPST dan RUPSLB di <i>Bisnis Indonesia</i> dan <i>Investor Daily</i> tanggal 27 April 2016 • Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS di situs web BEI tanggal 27 April 2016 • Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS di situs web Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris tanggal 27 April 2016 	Pasal 34 ayat (2) POJK No. 32/POJK.04/2014
10	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat	Surat BFI kepada OJK No. Corp/SJN/L/IV/16-0083 tanggal 27 April 2016, tembusan kepada BEI, KSEI, PT Sirca Datapro Perdana dan ICaMEL dengan melampirkan bukti iklan pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat	Pasal 34 ayat (7) POJK No. 32/POJK.04/2014

Uraian Pelaksanaan RUPS 2016

RUPST dan RUPSLB, 25 April 2016

Pada hari Senin, 25 April 2016 di Hotel Dharmawangsa, Ruang Bimasena, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan RUPST dan RUPSLB Perseroan dan ringkasan risalahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Dominic John Picone (Komisaris) terdiri dari:

Dewan Komisaris

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Kusmayanto Kadiman | Presiden Komisaris |
| 2. Johannes Sutrisno | Komisaris Independen |
| 3. Alfonso Napitupulu | Komisaris Independen |
| 4. Emmy Yuhassarie | Komisaris Independen |
| 5. Sunata Tjiterosampurno | Komisaris |

Direksi

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Francis Lay Sioe Ho | Presiden Direktur Independen |
| 2. Cornellius Henry Kho | Direktur Independen |
| 3. Sudjono | Direktur Independen |
| 4. Sutadi | Direktur Independen |

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 1.303.876.733 saham atau 85,43% suara dari total 1.526.286.762 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu yaitu sebanyak 1.565.959.562 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri yaitu sebesar 39.672.800 saham;
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 1.303.876.733 saham atau 85,43% suara dari total 1.526.286.762 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu yaitu sebanyak 1.565.959.562 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri yaitu sebesar 39.672.800 saham.

Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPST dan RUPSLB untuk setiap mata acara, para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan (kecuali dalam mata acara kelima RUPST tidak dilakukan sesi tanya-jawab karena hanya bersifat laporan), namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

IV. Mekanisme

Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan pemungutan suara kecuali dalam mata acara kelima RUPST tidak dilakukan sesi tanya-jawab karena hanya bersifat laporan.

V. Keputusan RUPST

Hasil Keputusan RUPST tanggal 25 April 2016 yang dituangkan dalam Akta Berita Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 42 tanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keputusan dalam

Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan" sesuai Laporanannya Nomor: 062/6.B008/SC.3/12.15 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara pertama:

- Setuju – 1.303.876.733 saham (100%);
- Abstain – 0 (0%);
- Tidak Setuju – 0 (0%).

Keputusan dalam

Mata Acara Kedua:

1. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp208,- (dua ratus delapan rupiah) per lembar saham atau dengan jumlah total sebesar Rp317.467.646.496,- (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan 48,82% (empat puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) per lembar saham atau Rp106.840.073.340,- (seratus enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan rupiah) per lembar saham yang telah dibagikan kepada

Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2015. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2016;

2. Menyisihkan sebesar Rp9.322.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk cadangan sesuai anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Sisa laba bersih tahun buku 2015 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara kedua:

- Setuju – 1.303.876.733 saham (100%);
- Abstain – 0 (0%);
- Tidak Setuju – 0 (0%).

Keputusan dalam Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara ketiga:

- Setuju – 1.303.876.733 saham (100%);
- Abstain – 0 (0%);
- Tidak Setuju – 0 (0%).

Keputusan dalam

Agenda Keempat:

1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2016 atau meningkat 3,5% (tiga koma lima persen) dari tahun sebelumnya serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sejumlah Rp1.840.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan

penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2016;

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara keempat:

- Setuju – 1.303.876.733 saham (100%);
- Abstain – 0 (0%);
- Tidak Setuju – 0 (0%).

Keputusan dalam Agenda Kelima:

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan untuk modal kerja sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara kelima:

Oleh karena mata acara kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.

VI. Keputusan RUPSLB

Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 25 April 2016 yang dituangkan dalam Akta Berita RUPSLB PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 43 tanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari,

S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Keputusan dalam Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/ atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, *Medium Term Notes* (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan di mana transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, *Medium Term Notes* (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan,

dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara pertama:

- Setuju – 1.302.220.733 saham (99,87%);
- Abstain – 0 (0%);
- Tidak Setuju – 1.656.000 saham (0,13%).

Keputusan dalam Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui mengangkat kembali Kusmayanto Kadiman sebagai Presiden Komisaris, Johannes Sutrisno, Emmy Yuhassarie, Alfonso Napitupulu masing-masing sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021;
2. Menyetujui mengangkat kembali Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Direktur dan Cornelliuss Henry Kho sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021;
3. Menyetujui pengangkatan Sigit Hendra Gunawan sebagai Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya masing-masing adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	Johanes Sutrisno
Komisaris Independen	Emmy Yuhassarie
Komisaris Independen	Alfonso Napitupulu
Komisaris	Dominic John Picone
Komisaris	Sunata Tjiterosampurno

DIREKSI

Presiden Direktur	Francis Lay Sioe Ho
Direktur	Cornellius Henry Kho
Direktur	Sudjono
Direktur	Sutadi
Direktur Independen	Sigit Hendra Gunawan

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian total remunerasi tahun 2016 sehubungan dengan pengangkatan Sigit Hendra Gunawan sebagai anggota Direksi Perseroan;

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.

Dasar pengambilan keputusan dalam mata acara ketiga:

- Setuju – 1.302.220.733 saham (99,87%);
- Abstain – 0 (0%);
- Tidak Setuju – 1.656.000 saham (0,13%).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2015 maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Tabel 76 – JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	Keterangan	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	25 April 2016
2	Laporan jadwal pembagian Dividen Tunai kepada OJK dan Bursa	26 April 2016
3	Pengumuman di Bursa dan iklan pemberitahuan mengenai pembagian Dividen Tunai di surat kabar	27 April 2016
4	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2016
5	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Mei 2016
6	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Mei 2016
7	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Mei 2016
8	Recording date untuk Dividen Tunai	9 Mei 2016
9	Pembayaran Dividen Tunai	25 Mei 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.
2. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan akan membayar Dividen Tunai melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan Pemegang Saham Perseroan akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik) dan menginginkan pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat banknya serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham itu sendiri, dengan disertai fotokopi KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") melalui surat yang bermaterai Rp6.000,- yang sudah harus diterima selambatnya tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan: PT Sirca Datapro Perdana Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340 Tel.: (021) 390-0645, 390-59200
4. Dividen Tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka asli Surat Keterangan Domisilinya dikirimkan kepada PT Sirca Datapro Perdana.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham.
 - c. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, telah diterima oleh KSEI atau BAE selambatnya tanggal 9 Mei 2016, pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada para Pemegang Saham asing akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Keputusan RUPS 2016 dan 2015 serta Realisasinya

Tabel 77 – REALISASI RUPST – 25 APRIL 2015

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;	Y	-
Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan" sesuai Lapornya Nomor: 062/6.B008/SC.3/12.15 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.	Y	-
Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp208,- (dua ratus delapan rupiah) per lembar saham atau dengan jumlah total sebesar Rp317.467.646.496,- (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan 48,82% (empat puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) per lembar saham atau Rp106.840.073.340,- (seratus enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan rupiah) per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2015. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2016.	Y	-
Menyisihkan sebesar Rp9.322.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk cadangan sesuai anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Y	-
Sisa laba bersih tahun buku 2015 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Y	-
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.	Y	-

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2016 atau meningkat 3,5% (tiga koma lima persen) dari tahun sebelumnya serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sejumlah Rp1.840.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).	Y	-
Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2016.	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.	Y	-
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan untuk modal kerja sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.	Y	-

Tabel 78 – REALISASI RUPSLB – 25 APRIL 2015

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, <i>Medium Term Notes (MTN)</i> dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan di mana transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2.	Y	-
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, <i>Medium Term Notes (MTN)</i> dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.	Y	-
Menyetujui mengangkat kembali Kusmayanto Kadiman sebagai Presiden Komisaris, Johannes Sutrisno, Emmy Yuhassarie, Alfonso Napitupulu masing-masing sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.	Y	-
Menyetujui mengangkat kembali Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Direktur dan Cornelliuss Henry Kho sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.	Y	-

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui pengangkatan Sigit Hendra Gunawan sebagai Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya masing-masing adalah sebagai berikut:		
DEWAN KOMISARIS		
Presiden Komisaris	Kusmayanto Kadiman	
Komisaris Independen	Johanes Sutrisno	Y -
Komisaris Independen	Emmy Yuhassarie	
Komisaris Independen	Alfonso Napitupulu	
Komisaris	Dominic John Picone	
Komisaris	Sunata Tjiterosampurno	
DIREKSI		
Presiden Direktur	Francis Lay Sioe Ho	
Direktur	Cornellius Henry Kho	
Direktur	Sudjono	
Direktur	Sutadi	
Direktur Independen	Sigit Hendra Gunawan	
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian total remunerasi tahun 2016 sehubungan dengan pengangkatan Sigit Hendra Gunawan sebagai anggota Direksi Perseroan.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.	Y	-

Tabel 79 – REALISASI RUPST – 15 APRIL 2015

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk laporan Keuangan dan laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.	Y	-
Menerima baik dan mengesahkan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan" sesuai laporannya Nomor: 071/5-B008/SC-2/12.14 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.	Y	-

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp192,- (seratus sembilan puluh dua rupiah) per lembar saham atau dengan jumlah total sebesar Rp297.587.435.904,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah) yang merupakan 49,8% (empat puluh sembilan koma delapan persen) dari laba bersih Perseroan, setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan rupiah) per lembar saham atau dengan jumlah total sebesar Rp213.890.969.556,- (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2015 dan sisanya sebesar Rp83.696.466.348,- (delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar Rp54,- (lima puluh empat rupiah) per lembar saham akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2015 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2015.	Y	-
Menyisihkan sebesar Rp7.374.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk cadangan sesuai anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Y	-
Sisa laba bersih tahun buku 2014 akan dibukukan sebagai laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Y	-
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.	Y	-
Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> Total seluruhnya sejumlah Rp228.790.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2015 atau meningkat 4,2% (empat koma dua persen) dari tahun sebelumnya; Memberikan tantiem untuk tahun 2014 sejumlah Rp1.735.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah); Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2015. 	Y	-
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.	Y	-

Tabel 80 – REALISASI RUPSLB – 15 APRIL 2015

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, <i>Medium Term Notes</i> ("MTN") dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan di mana transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2.	Y	-
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, <i>Medium Term Notes</i> ("MTN") dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.	Y	-
Menyetujui: 1. Perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan dari Otoritas jasa Keuangan maupun peraturan-peraturan lain yang terkait yang materinya telah dibagikan kepada para pemegang saham dalam Rapat. 2. Menyusun kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Y	-

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
<p>Menyetujui pengangkatan Dominic John Picone dan Sunata Tjiterosampurno masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dari Otoritas jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya masing-masing adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Kusmayanto Kadiman Komisaris Independen : Johannes Sutrisno Komisaris Independen : Alfonso Napitupulu Komisaris Independen : Emmy Yuhassarie Komisaris : Dominic John Picone Komisaris : Sunata Tjiterosampurno</p>	Y	-
Memberikan kewenangan kepada Rapat Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian total remunerasi tahun 2015 yang telah diputuskan dalam RUPST hari ini sehubungan dengan pengangkatan Dominic John Picone dan Sunata Tjiterosampurno sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.	Y	-
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham Perseroan yang beredar saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal.	Y	-
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana pembelian kembali saham Perseroan, termasuk untuk menentukan harga, jadwal dan tata cara dari pelaksanaan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	Y	-
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menghadap pihak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Y	-

Tabel 81 – REALISASI RUPSLB – 8 SEPTEMBER 2015

Keputusan	Telah Direalisasikan (Y) Belum Direalisasikan (N)	Alasan Belum Direalisasikan
Menerima dengan baik dan mengesahkan pengunduran diri Harry Jesus Rodriguez Palmer dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.	Y	-
Mengukuhkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya masing-masing menjadi sebagai berikut:		
Direksi		
Presiden Direktur Independen : Francis Lay Sioe Ho		
Direktur Independen : Cornelius Henry Kho		
Direktur Independen : Sudjono	Y	-
Direktur Independen : Sutadi		
Dewan Komisaris		
Presiden Komisaris : Kusmayanto Kadiman		
Komisaris Independen : Johannes Sutrisno		
Komisaris Independen : Alfonso Napitupulu		
Komisaris Independen : Emmy Yuhassarie		
Komisaris : Dominic John Picone		
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno		
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.	Y	-
Memperpanjang jangka waktu kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan penerbitan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi dalam <i>Management Employee Stock Options Program</i> (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini, sehubungan dengan penerbitan saham hasil pelaksanaan Program MESOP untuk Tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.	Y	-

Pengaturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33") yang berlaku pada 8 Desember 2014 dan setiap Emiten atau Perusahaan Publik diberikan waktu untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK ini paling lambat satu tahun sejak POJK 33 diundangkan. Pemenuhan terhadap POJK 33 tersebut telah dilaksanakan mulai 2015.

DEWAN KOMISARIS

TUGAS POKOK

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan.

Terdapat dua tingkatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris:

1. Level *Performance*, yaitu fungsi Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan memberikan nasihat kepada Direksi dan menyampaikan usulan dalam RUPS.
2. Level *Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku.

Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dalam melakukan fungsi pengawasan:

- Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan kolektif seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menjadi pelaksana tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi, kecuali dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
 - Pengawasan dilakukan terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex-post facto*) dan/atau keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive basis*).
 - Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana tindakan tersebut dilakukan secara kolektif.
- Pengawasan dilakukan tidak hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup seluruh aspek bisnis dan aspek korporat dari Perusahaan.
 - Dewan Komisaris memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas anggota Dewan Komisaris, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di Perusahaan lain, jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Komite di Perusahaan maupun perusahaan lain termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta total honorarium yang diterima dari Perusahaan serta informasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan yang terakhir Nomor 10 Tanggal 20 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0061069, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, jika para anggota Dewan Komisaris tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. Sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 Tanggal 12 November 2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan

Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan *juncto* POJK No 27/POJK.03/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kandidat diwajibkan untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh OJK. Tetapi jika calon anggota Dewan Komisaris sebelumnya telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya POJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan pada saat mulai berlakunya POJK, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut masih dinyatakan berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jika masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah habis, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali namun tergantung pada penilaian kinerja yang diawasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi jika Komite akan mengesahkan anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya untuk diangkat kembali. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris akan mengusulkan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut dalam RUPS.

KRITERIA PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan yang pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

4. Kriteria tambahan bagi Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen, sebagaimana diuraikan pada bagian Informasi mengenai Komisaris Independen dalam bab ini.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal terdiri dari dua orang dan salah satunya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jika Dewan Komisaris lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, jumlah

Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) atau satu pertiga dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan yang diaktakan dengan Akta No. 43 tanggal 25 April 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0045172 tanggal 28 April 2016, komposisi Dewan Komisaris terlampir di tabel 85.

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disajikan dalam Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 56-60).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk, diterbitkan pada 1 Desember 2015, yang disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi rujukan dan/atau pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai organ Perusahaan;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi; dan
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan anggaran dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pedoman adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi.

Terkait Dewan Komisaris, Pedoman mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Keanggotaan Dewan Komisaris
3. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris
4. Etika Jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Hak Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Tabel 82 – KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2016

No.	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan*
1	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-473/BL/2011 tanggal 11 Agustus 2011
2	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2020/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
3	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2019/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
4	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-474/BL/2011 tanggal 11 Agustus 2011
5	Dominic John Picone	Komisaris	Singapura	Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015	RUPS 2020	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-283-NB.11-2015 tanggal 1 Juni 2015
6	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015	RUPS 2020	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-282-NB.11-2015 tanggal 1 Juni 2015

* Hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan berlaku lima tahun sejak tanggal ditetapkan oleh OJK

9. Organ Pendukung Dewan Komisaris
10. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Etika Jabatan Dewan Komisaris

1. Etika Berkaitan dengan Keteladanan

- a. Dewan Komisaris mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai contoh teladan yang baik bagi Direksi dan karyawan Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada

- Direksi untuk kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai tertinggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam sikap dan tindakan.
 - d. Toleransi dalam sikap dan tindakan, santun dalam menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
 - e. Menghormati keputusan RUPS.
 - f. Memiliki orientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
 - g. Terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai masalah

- yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan.
- h. Mengambil sikap, menyampaikan pendapat, dan melakukan tindakan sebagai pribadi, secara jelas dan tegas untuk kepentingan Perusahaan. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan kepentingan stakeholder.
 - i. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempatkan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, di atas kepentingan pribadi.

2. **Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

3. **Etika Berkaitan dengan Peluang Perusahaan**

Selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:

- a. Memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
- b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

4. **Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

Dewan Komisaris mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perusahaan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

5. **Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan**

Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan Anggota Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan RUPS, yang pada akhirnya akan merugikan Perusahaan. Atas hal tersebut maka Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa:

- a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- b. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk jika tidak memiliki kepemilikan saham Perusahaan, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perusahaan jika ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
- d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi

independensinya dalam melaksanakan tugas;

- e. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut;
- f. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan; dan
- g. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

6. **Etika Berkaitan dengan Keuntungan Pribadi**

Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterima sebagai anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh pemegang saham.

7. **Etika Berusaha dan Antikorupsi**

- a. Anggota Dewan Komisaris tidak akan menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga bernilai

- dari pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.
- b. Segala imbalan, hadiah dan sumbangan yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan memberikan hadiah dan bentuk pemberian lainnya kepada pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris bertanggung jawab pada hal-hal berikut ini:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dilarang ikut terlibat dalam proses pembuatan keputusan operasional, dengan pengecualian pada persetujuan atas usulan kredit di mana eksposur melampaui wewenang persetujuan kredit dari Direksi;
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.

Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab antara Komisaris dan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris:
 - Meninjau secara luas dan menyeluruh atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik;
 - Meninjau ulang masalah ekonomi makro dan keuangan;
 - Berkomunikasi dengan pemegang saham pengendali sehubungan dengan hal-hal yang melibatkan pemegang saham; dan
 - Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi.
2. Komisaris Independen:
 - Mengawasi dan memberikan nasihat atas pelaksanaan GCG;
 - Meninjau ulang dan menyampaikan rekomendasi tentang setiap usulan dari Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit;

- Memberikan nasihat dalam masalah hukum;
 - Memberikan nasihat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 - Menjaga hubungan baik dengan pihak regulator.
3. Komisaris:
 - Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan;
 - Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian; dan
 - Melakukan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi Perusahaan.

HAK DEWAN KOMISARIS

Secara umum Dewan Komisaris memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap dan transparan;
2. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau Anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Komisaris;
3. Memberhentikan sementara waktu Anggota Direksi sesuai ketentuan anggaran dasar;
4. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya (jika dianggap perlu) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan;
5. Dapat menggunakan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;

6. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
7. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, asas

kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sebagian anggota Dewan Komisaris BFI tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan, kecuali Kusmayanto Kadiman (Presiden Komisaris), Dominic John Picone (Komisaris) dan Sunata Tjiterosampurno (Komisaris) yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali.

Tabel 83 – KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Kompetensi
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: <i>Doctor of Philosophy</i> dan Sarjana Teknik Fisika • Pengalaman kerja: Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur, Rektor ITB, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia • Usia: 62 tahun
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: <i>Master of Business Administration (M.B.A.)</i> dan Sarjana Ekonomi Manajemen • Pengalaman kerja: Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko • Usia: 65 tahun
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Sarjana Hukum • Pengalaman kerja: Pengacara, Konsultan Hukum, Komisaris, Komisaris Independen, Direktur Utama • Usia: 66 tahun
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: <i>Master of Law</i> dan Sarjana Hukum • Pengalaman kerja: Konsultan Hukum, Dosen, Komisaris, Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Komite Audit • Usia: 66 tahun
5.	Dominic John Picone	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: <i>Bachelor's Degree in Laws</i> dan <i>Bachelor of Commerce (Honours-Finance)</i> • Pengalaman kerja: berbagai jabatan di bidang pembiayaan konsumen (<i>consumer finance</i>), <i>investment banking</i>, <i>investment services</i>, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, Komisaris, <i>Managing Director</i>, <i>Head of Financial Services</i> • Usia: 38 tahun
6.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: <i>Master of Finance</i> dan <i>Bachelor of Business Administration</i> • Pengalaman kerja: Konsultan, Direktur, <i>Managing Director</i>, Komisaris, Presiden Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko • Usia: 44 tahun

Independensi Dewan Komisaris dapat digambarkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga seperti di Tabel 86.

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang obyektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Persyaratan Komisaris Independen

Komisaris Independen, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris, satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
- Tidak memiliki saham; baik langsung maupun tidak langsung; pada Perusahaan;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
- Tidak mempunyai hubungan usaha; baik langsung maupun tidak langsung; yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

Tabel 84 – KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Nama	Jabatan	BFI	Perusahaan Lain
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Dominic John Picone	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada

Dalam hal Komisaris Independen menjabat di Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama satu tahun.

Jumlah Anggota Komisaris Independen

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Perusahaan, pemegang saham dalam

RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2016 berjumlah enam orang anggota dengan tiga di antaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 50% dari Komisaris yang ada dan telah memenuhi ketentuan OJK.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Dengan mengacu pada Pasal 25 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33") yang berlaku pada 8 Desember 2014, masing-masing Komisaris Independen Perusahaan, yaitu: Johannes Sutrisno,

Alfonso Napitupulu dan Emmy Yuhassarie, telah memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen di mana masing-masing tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi perusahaan pembiayaan.

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris BFI dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 85 – RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Komisaris of PT Adaro Power Komisaris of PT Tamaris Hidro Presiden Komisaris PT iForte Solusi Infotek Presiden Komisaris PT Setiabudi Investment Management
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit PT Bentoel Internasional Investama Tbk (hingga Maret 2016)
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Managing Partner Kantor Hukum Alfonso Napitupulu & Partners Direktur Utama PT Nana Mandiri Dwikarya Komisaris Independen PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance) Komisaris Utama PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) Staf Ahli Pengelola Statuter AJB Bumiputera 1912
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium/INALUM (Persero)
5.	Dominic John Picone	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Managing Director dan Head of Financial Services (Asia, excl. India) TPG Capital (S) Pte. Ltd., Singapura
6.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Managing Director Northstar Advisors Pte. Ltd. Presiden Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Komisaris PT Multi Adiprakarsa Manunggal

Tabel 86 – INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kusmayanto Kadiman	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Johanes Sutrisno	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Alfonso Napitupulu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emmy Yuhassarie	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dominic John Picone	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Sunata Tjiterosampurno	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√

Berdasarkan Pasal 24 POJK 33, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada empat emiten atau perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan

Pembiayaan (“POJK 30”), anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari tiga perusahaan lain. Hal ini tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keenam anggota Dewan Komisaris BFI telah mematuhi ketentuan POJK 30 dan POJK 33 dimaksud.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas atau dua pertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan secara teratur dengan Direksi, dan jika diperlukan Rapat Dewan Komisaris diadakan setelah rapat gabungan, jika memang dianggap perlu oleh satu anggota Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau jika diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sepersepuluh dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama, dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat itu.

Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris resmi, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan tersebut dan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris resmi.

Pembuatan Risalah Rapat Dewan Komisaris

Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris (jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Sepanjang 2016

Dewan Komisaris menyelenggarakan 11 kali rapat. Tanggal rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK 30 Pasal 30 ayat (2), Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 75% dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam periode satu tahun.

2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihatnya kepada Direksi, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi guna membicarakan implementasi keputusan yang dibuat dalam rapat sebelumnya, kinerja keuangan, manajemen risiko dan hal-hal lain yang mungkin berdampak pada kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pada 2016 Dewan Komisaris melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Menyelenggarakan 11 kali Rapat Dewan Komisaris;
2. Memberikan persetujuan atas penunjukan KAP untuk tahun buku 2016;

3. Menyetujui rencana operasional Perusahaan 2016; dan
4. Menyetujui usulan Direksi atas anggaran 2016.

Selama 2016, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal penting, antara lain:

1. Usulan nominasi calon Direksi dari pejabat internal Perusahaan;
2. Usulan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Penetapan KAP;
4. Tindak lanjut rekomendasi KAP;
5. Usulan penggunaan laba tahun buku 2015;
6. Usulan mengenai hal-hal strategis terkait kegiatan bisnis perusahaan.
7. Memberikan persetujuan atas tindakan direksi sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar Perusahaan.

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Umum

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris.

Tabel 87 – JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Tanggal	Kusmayanto Kadiman	Johanes Sutrisno	Alfonso Napitupulu	Emmy Yuhassarie	Dominic John Picone	Sunata Tjiterosampurno
26 Januari 2016	√	√	√	√	√	-
16 Februari 2016	√	√	√	-	√	√
23 Maret 2016	√	√	√	√	√	√
21 April 2016	√	√	√	√	-	√
25 Mei 2016	√	√	√	√	√	√
21 Juni 2016	√	√	√	√	√	√
28 Juli 2016	√	√	√	√	√	√
23 Agustus 2016	√	√	√	√	√	√
27 September 2016	√	√	√	√	√	√
24 Oktober 2016	√	√	√	√	√	√
29 November 2016	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	10	10	10
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	91%	91%	91%

Tabel 88 – AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Tanggal	Agenda Rapat
26 Januari 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
16 Februari 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
23 Maret 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
21 April 2016	Pembahasan mengenai persiapan RUPST dan RUPSLB tanggal 25 April 2016, rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, hal lain-lain
25 Mei 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
21 Juni 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
28 Juli 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
23 Agustus 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
27 September 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
24 Oktober 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain
29 November 2016	Pembahasan mengenai kinerja bulanan, hal lain-lain

Tabel 89 – JADWAL DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tanggal	Kusmayanto Kadiman	Johanes Sutrisno	Alfonso Napitupulu	Emmy Yuhassarie	Dominic John Picone	Sunata Tjiterosampurno
26 Januari 2016	√	√	√	√	√	-
16 Februari 2016	√	√	√	-	√	√
23 Maret 2016	√	√	√	√	√	√
21 April 2016	√	√	√	√	-	√
25 Mei 2016	√	√	√	√	√	√
21 Juni 2016	√	√	√	√	√	√
28 Juli 2016	√	√	√	√	√	√
23 Agustus 2016	√	√	√	√	√	√
27 September 2016	√	√	√	√	√	√
24 Oktober 2016	√	√	√	√	√	√
29 November 2016	√	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	11	11	11	10	10	10
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	91%	91%	91%

Tabel 90 – AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tanggal	Agenda Rapat
26 Januari 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 24 November 2015, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Desember 2015, hal lain-lain
16 Februari 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 26 Januari 2016, laporan dari Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Manajemen Risiko, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Januari 2016, hal lain-lain
23 Maret 2016	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya tanggal 16 Februari 2016, rekomendasi untuk perubahan komposisi Komite-Komite, tinjauan kinerja keuangan dan manajemen risiko per 29 Februari 2016, hal lain-lain
21 April 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 23 Maret 2016, evaluasi persiapan RUPST dan RUPSLB tanggal 25 April 2016, laporan rapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, tinjauan kinerja keuangan dan manajemen risiko per triwulan I 2016, hal lain-lain
25 Mei 2016	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya tanggal 21 April 2016, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 April 2016, hal lain-lain
21 Juni 2016	Pembahasan mengenai materi tertunda dari rapat sebelumnya tanggal 25 Mei 2016, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Mei 2016, hal lain-lain
28 Juli 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 21 Juni 2016, laporan rapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, tinjauan kinerja keuangan dan manajemen risiko per triwulan II 2016, hal lain-lain
23 Agustus 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 28 Juli 2016, tinjauan atas hal-hal terkait pernyataan hukum, pembahasan kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Juli 2016, hal lain-lain
27 September 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 23 Agustus 2016, kinerja keuangan per 31 Agustus 2016, hal lain-lain
24 Oktober 2016	Pembahasan mengenai pelaksanaan keputusan yang dibuat dalam rapat tanggal 27 September 2016, laporan rapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, kinerja keuangan per 30 September 2016, hal lain-lain
29 November 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Oktober 2016, hal lain-lain

BAGAN MEKANISME REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris setidaknya-tidaknya memuat hal-hal berikut ini:

1. Tingkat tercapainya kuorum dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-komite yang ada;
2. Kontribusi dalam proses pengawasan Perusahaan;
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakan Perusahaan.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 ayat (10) anggaran dasar Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditentukan oleh RUPS. Namun demikian, RUPS

dapat memberikan kuasa pada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menyetujui jumlah remunerasi yang diusulkan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu pada kebijakan internal Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja Perusahaan.

Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS. Mekanisme remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- Direksi, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan, mengajukan usulan untuk jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa remunerasi yang diusulkan oleh Direksi dengan kondisi pasar untuk industri yang relevan dengan ukuran dan bisnis yang sebanding.
- Dengan mempertimbangkan kinerja bisnis Perusahaan dan kontribusi anggota, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi

pada Rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh RUPST, menyetujui jumlah remunerasi, dan menentukan distribusi remunerasi itu di antara anggota Dewan Komisaris sendiri. Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Struktur remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan selama 2016 terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- honorarium;
- tunjangan; dan
- tantiem.

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 April 2016: “Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2016 atau

meningkat 3,5% (tiga koma lima persen) dari tahun sebelumnya serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sejumlah Rp1.840.000.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).”

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA BARU DEWAN KOMISARIS

BFI menyadari pentingnya Program Orientasi bagi Anggota Baru Dewan Komisaris agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya. BFI sedang mempertimbangkan penyusunan program orientasi yang bertujuan agar anggota baru Dewan Komisaris dapat mengetahui kondisi Perusahaan secara umum dan saling mengenal satu sama lain, serta menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Dalam praktik yang telah berlangsung di BFI hingga saat ini, orientasi untuk anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Dewan Komisaris yang pertama kali dihadiri oleh anggota baru tersebut.

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan mengalokasikan anggaran bagi Dewan Komisaris guna mengikuti program pelatihan melalui berbagai seminar dan pelatihan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas kinerja Perusahaan. Sepanjang 2016, Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan seperti pada Tabel 91.

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Perusahaan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yang senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap.

6. Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas suatu hal, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tersebut kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direksi sehingga tercipta keseimbangan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan komunikasi korporasi melalui informasi satu pintu (*one-gate policy*) dapat tercapai.
7. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, konsisten dan lengkap.
8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan. Dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan setiap anggotanya, sehingga hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

Tabel 91 – PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris	22 September 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-19	Jakarta	Indonesian Institute for Corporate Directorship ("IICD")
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen	23 Juni 2016 1 Desember 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-17 International Seminar on Sustainable Finance (ISSF) "Mainstreaming Sustainable Finance through Innovation"	Jakarta Denpasar, Bali	IICD OJK dan International Finance Corporation ("IFC")
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen	23 Juni 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-17	Jakarta	IICD
Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen	7 April 2016	Narasumber Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang OJK 2016 (Level Pertama) dengan tema <i>Good Governance</i>	Jakarta	OJK
Dominic John Picone	Komisaris	4-5 Februari 2016 18-19 Oktober 2016	Pelatihan "Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA) Pertemuan Tahunan Investor TPG ke-23	Yangon, Myanmar Scottsdale, Arizona, AS	Latham and Watkins LLP TPG
Sunata Tjiterosampurno	Komisaris	23 Juni 2016 6 Desember 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-17 Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan Tahun 2017"	Jakarta Jakarta	IICD APPI

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap komite bertemu secara teratur atau jika diperlukan. Masing-masing komite terdiri atas Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan anggota komite lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga komite itu dijelaskan dalam piagam mereka masing-masing dan mereka melapor pada Dewan Komisaris. Atas biaya Perusahaan, setiap komite berhak untuk meminta saran dari pihak eksternal jika diperlukan.

DIREKSI

TUGAS POKOK

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam segala hal dan dalam segala kejadian.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, anggota Direksi diangkat oleh para Pemegang Saham dalam RUPS untuk masa jabatan dimulai sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan RUPST ke-5, dan anggota Direksi dapat diberhentikan oleh para Pemegang Saham dalam RUPS setiap saat sebelum masa jabatan masing-masing berakhir. Sebelum diangkat sebagai anggota Direksi, kandidat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2013 Tanggal 12 November 2013 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan juncto POJK No 27/POJK.03/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Kandidat diwajibkan untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh OJK.

Seluruh anggota Direksi saat ini telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jika masa jabatan anggota Direksi telah habis, pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan kembali, namun tergantung pada penilaian kinerja yang diawasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah penilaian, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi jika Komite akan mengesahkan anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya untuk diangkat kembali. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Direksi akan mengusulkan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut dalam RUPS.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Sesuai anggaran dasar Perusahaan, yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi BFI adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Dalam lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- g. Persyaratan tambahan untuk Direktur Independen.

Di samping itu, anggota Direksi BFI juga berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan yang cukup dan relevan mengenai jabatannya;
- b. Memiliki pemahaman atas hukum dan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan serta hukum dan peraturan lain yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan;
- c. Memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pembiayaan dan bidang lain yang relevan dengan posisinya; dan
- d. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan manajemen yang strategis agar dapat mengembangkan Perusahaan menjadi lembaga keuangan yang sehat.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN PROFIL ANGGOTA DIREKSI

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Anggota Direksi minimal terdiri dari dua orang anggota Direksi, satu di antaranya diangkat menjadi Presiden Direktur.

Paling kurang satu orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham Perusahaan tersebut tercatat.

Selama periode 2016, jumlah anggota dan susunan Direksi Perusahaan mengalami perubahan, yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan yang diaktakan dengan Akta No. 1 tertanggal 8 September 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tertanggal 8 September 2015 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHUAH.01.03-0970960 tanggal 9 Oktober 2015, susunan Direksi mulai 8 September 2015 hingga 25 April 2016 (Tabel 92).

- Berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perusahaan yang diaktakan dengan Akta No. 43 tertanggal 25 April 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tertanggal 25 April 2016 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0045172 tanggal 28 April 2016, susunan Direksi periode 25 April hingga 31 Desember 2016 (Tabel 92).

Profil Anggota Direksi

Profil masing-masing anggota Direksi telah disajikan dalam Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 61-64).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Pedoman tersebut berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi di lingkup Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan Direksi, Pedoman tersebut mengatur antara lain:

1. Fungsi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Syarat Menjadi Anggota Direksi
4. Etika Jabatan Direksi
5. Tugas dan Kewajiban Direksi
6. Wewenang Direksi
7. Hak Direksi
8. Rapat Direksi
9. Evaluasi Kinerja Direksi
10. Organ Pendukung Direksi

Tabel 92 – KOMPOSISI DIREKSI PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2016

No.	Nama	Jabatan	Negara Domisili	Tanggal Pengangkatan	Akhir Masa Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan*
1.	Francis Lay Sioe Ho*	Presiden Direktur	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2021/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
2.	Cornellius Henry Kho*	Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2018/NB.1/2014 tanggal 4 Agustus 2014
3.	Sudjono*	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014	RUPS 2019	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-1294/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014
4.	Sutadi*	Direktur Pembiayaan Ritel	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 18 tanggal 6 Mei 2014	RUPS 2019	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-1292/NB.1/2014 tanggal 3 Juni 2014
5.	Sigit Hendra Gunawan**	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Indonesia	Akta Berita Acara RUPSLB No. 43 tanggal 25 April 2016	RUPS 2021	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-218/NB.11/2016 tanggal 29 Maret 2016

* Periode 1 Januari - 31 Desember 2016

** Periode 25 April - 31 Desember 2016

Etika Jabatan Direksi

1. Etika Berkaitan dengan Keteladanan

Direksi mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi karyawan.

2. Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, dan Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

3. Etika Berkaitan dengan Peluang Perusahaan

Direksi dilarang untuk:

- a. Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri;
- b. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku; dan
- c. Berkompetisi dengan Perusahaan, yaitu menggunakan pengetahuan/ informasi dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perusahaan.

4. Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Direksi mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.

5. Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Etika yang berkaitan dengan benturan kepentingan meliputi:

- a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
- c. Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk jika tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perusahaan jika ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Apabila terjadi benturan kepentingan, Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut;
- e. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
- f. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
- g. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut; dan

- h. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

6. Etika Berkaitan dengan Keuntungan Pribadi

Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji, tunjangan dan fasilitas lain yang diterimanya sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

7. Etika Berusaha dan Antikorupsi

Anggota Direksi dilarang untuk menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga dan bernilai dari pelanggan untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Tugas dan tanggung jawab utama Direksi adalah untuk menjaga aset Perusahaan dan memberikan imbal balik yang pantas atas investasi para pemegang saham, juga sambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal berikut ini:

1. Mengembangkan visi, misi dan nilai-nilai dasar Perusahaan serta rencana strategis Perusahaan yang dikonsolidasikan dalam anggaran bisnis;
2. Membangun struktur organisasi yang kuat dan dengan jelas menentukan fungsi-fungsi dari setiap unit kerja dan mengelola sumber daya manusia secara efektif;
3. Membentuk suatu sistem bagi mekanisme kontrol internal dan manajemen risiko yang memastikan implementasi fungsi audit internal di seluruh jajaran manajemen, yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah disetujui; dan
4. Mengelola kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan.

Tugas Khusus

Secara khusus, tugas dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. **Terkait dengan Etika Berusaha dan Antikorupsi**
 - a. Anggota Direksi dilarang untuk menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dan bernilai dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.
 - b. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS.
- c. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. **Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal**
 - a. Direksi wajib menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perusahaan;
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
 - d. Melaksanakan sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan;
 - e. Melaksanakan monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - f. Membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk masing-masing butir di atas, disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan;
 - g. Wajib menyusun/ membangun Sistem Pengendalian Internal sehingga mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan organisasi, bahkan mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya korupsi dan kolusi;
 - h. Untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif, Presiden Direktur secara struktural dibantu oleh seluruh Pejabat Struktural sampai dengan tingkat Kepala Departemen/ Unit;
 - i. Menetapkan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi Unit Audit Internal sesuai dengan Keputusan Direksi; dan

- j. Mendorong terciptanya lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - filosofi dan gaya manajemen;
 - cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab;
 - pengorganisasian dan pengembangan SDM; dan
 - perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

3. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- a. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;
- b. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap;
- c. Mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG;
- d. Menyampaikan rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris);
- e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi Perusahaan wajib untuk tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan individu atau kelompok.

4. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

- a. Direksi menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan;
- b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahan;
- d. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai;
- e. Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang; dan
- f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

5. Terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi wajib mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten. Sistem manajemen risiko yang dikembangkan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi.
- b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko.
- c. Penyusunan Profil Risiko, yaitu proses untuk mendeskripsikan besaran dampak dan probabilitas tiap jenis risiko, berdasarkan hasil pengukuran risiko.
- d. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial.
- e. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko.
- f. Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan.
- g. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Terkait Hubungan dengan Stakeholder

- a. Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pengguna jasa, pemasok dan stakeholder lainnya; dan
- b. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya.

7. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Rincian pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Tabel 93.

WEWENANG DAN HAK DIREKSI

Wewenang

Direksi memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan usaha;
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk pengangkatan, mutasi, suksesi dan pemberhentian, penetapan gaji, imbalan pascakerja dan jaminan hari tua, serta penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan; dan
5. Menetapkan keputusan strategis dan operasional yang mengandung risiko dan ketidakpastian.

Hak

Direksi memiliki hak-hak dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Perusahaan sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Setiap anggota Direksi berhak melakukan pembelaan dalam RUPS jika RUPS sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi.
3. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.
4. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

Tabel 93 – TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Nama dan Jabatan	Tugas dan Wewenang
Francis Lay Sioe Ho Presiden Direktur	Beliau memiliki wewenang pengambil keputusan yang paling tinggi dalam Perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan target bisnis. Bersama dengan anggota Direksi lainnya, beliau memimpin formulasi dan implementasi tujuan strategis dan rencana bisnis BFI. Beliau juga menerima laporan langsung dari seluruh Direktur, <i>Head of Human Capital</i> , <i>Head of Property-Back Financing (PBF)</i> dan <i>Head of Internal Audit</i> . Beliau juga yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Cornellius Henry Kho Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	Tanggung jawab utama beliau adalah memastikan penyelarasan fungsi-fungsi dalam organisasi agar operasional Perusahaan berjalan dengan baik dan mematuhi kebijaksanaan internal yang telah ditetapkan. Beliau juga bertanggung jawab dalam mengembangkan jaringan distribusi Perusahaan, memantau kinerja jaringan dan mengembangkan produk-produk pembiayaan korporasi. Beliau menerima laporan langsung dari <i>Head of Operations</i> , <i>Control</i> , <i>Compensation and Benefit</i> , <i>Head of Network Development and Management</i> , serta <i>Head of Corporate Business and Inventory Management</i> .

Nama dan Jabatan	Tugas dan Wewenang
<p>Sudjono Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi</p>	<p>Sebagai <i>Chief Financial Officer (CFO)</i>, beliau bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perusahaan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang diterapkan. Beliau juga berperan sebagai mitra bagi setiap unit bisnis dan <i>regional business operation</i> atas pelaporan, analisis kinerja keuangan dan operasional dari setiap lini bisnis Perusahaan. Selain itu, sebagai <i>Chief Information Officer (CIO)</i>, beliau bertanggung jawab atas strategi dan <i>roadmap</i> teknologi informasi BFI dan memastikan adanya tingkat ketersediaan yang tinggi (<i>high availability</i>) atas seluruh perangkat dan aplikasi IT yang digunakan dalam mendukung kelancaran bisnis BFI saat ini dan di masa mendatang, serta mengembangkan peran IT sebagai <i>business enabler</i> dalam mencapai pertumbuhan Perusahaan. Unit-unit di bawah pengawasannya terdiri dari <i>Finance and Treasury, Financial Control and Reporting, Budgeting and Performance Monitoring, Information Technology (IT), Corporate Secretariat</i> dan Hubungan Investor (<i>Investor Relations</i>).</p>
<p>Sutadi Direktur Pembiayaan Ritel</p>	<p>Beliau bertanggung jawab menyusun rencana anggaran tahunan untuk bisnis pembiayaan yang meliputi segmen produk mobil baru dan bekas serta motor bekas. Tanggung jawab beliau lainnya adalah merumuskan strategi dan rencana kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis ritel tahunan yang sudah ditentukan. Beliau juga bekerja sama dengan Divisi Risiko Perusahaan (<i>Enterprise Risk</i>) dalam mengelola tingkat risiko setiap segmen produk ritel untuk mendukung pencapaian target profitabilitas Perusahaan yang sudah ditetapkan. Unit-unit di bawah pengawasannya antara lain terdiri dari <i>Product Management</i> untuk Kendaraan Mobil dan Motor, <i>Product Development</i> untuk Kendaraan Mobil dan Motor, <i>Digital Marketing, Business Acquisition</i> dan <i>Business Strategy Development and Management</i>.</p>
<p>Sigit Hendra Gunawan Direktur Risiko Perusahaan (Independen)</p>	<p>Beliau bertanggung jawab atas pengawasan manajemen risiko di seluruh Perusahaan yang meliputi risiko-risiko dari sisi kredit/pembiayaan, likuiditas dan pendanaan, operasional, hukum dan peraturan, strategi/bisnis, serta reputasi. Tugas utamanya adalah meninjau ulang dan menyetujui risiko bisnis yang diajukan, implementasi dan pemantauan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, manajemen operasional kredit untuk mendukung tujuan bisnis, dan menjaga Sistem Manajemen Informasi (MIS) yang komprehensif dan prasarana analitis. Beliau bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, diukur dan dikelola dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Unit-unit di bawah pengawasannya terdiri dari <i>Credit Unit, Collection and Recovery, Operational Risk, Operational Policy and Procedure, Portfolio Management and Risk Analysis</i>, dan <i>Legal and Litigation</i>.</p>

kejadian serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan.

- Anggota Direksi berhak mendapat gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi Perusahaan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Semua anggota Direksi BFI tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan.

Tabel 94 – KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

No.	Nama	Jabatan	Kompetensi
1	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Pendidikan: <i>Master of Business Management (M.B.M.)</i> , <i>Bachelor of Business Administration (B.B.A.)</i> Pengalaman kerja: Presiden Direktur, Direktur dan Pendiri Perusahaan, <i>Credit Manager</i> , <i>Treasury Officer</i> , <i>Executive Officer</i> Kementerian Keuangan (<i>Ministry of Finance</i>) di Singapura Usia: 68 tahun
2	Cornellius Henry Kho	Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	Pendidikan: Sarjana Ekonomi Akuntansi Pengalaman kerja: Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi, Auditor Usia: 50 tahun
3	Sudjono	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	Pendidikan: <i>Enterprise Risk Manager (ERM™)</i> , <i>Master of Business Administration (M.B.A.)</i> , Sarjana Ekonomi Akuntansi Pengalaman kerja: Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Auditor Senior Usia: 46 tahun
4	Sutadi	Direktur Pembiayaan Ritel	Pendidikan: Sarjana Teknik Industri Pengalaman kerja: Kepala Divisi, <i>Regional Manager</i> , Pimpinan Cabang (<i>Branch Manager</i>), <i>Sales Executive</i> , <i>Collection & Credit Analyst Officer</i> Usia: 42 tahun
5	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Pendidikan: <i>Certified Business Management</i> , <i>Certified Business Management-Operation</i> , Sarjana Teknik Industri Pengalaman kerja: Direktur, <i>Head of Enterprise Risk</i> , Kepala Divisi Kredit, <i>Deputy Director - Head of Credit & Collection</i> , <i>Account Management Department Head</i> , <i>Credit Analyst & Risk Department Head (Fleet Division)</i> Usia: 48 tahun

Independensi Direksi dapat digambarkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga sebagai berikut:

Tabel 95 – INDEPENDENSI DIREKSI

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Francis Lay Sioe Ho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cornellius Henry Kho	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sudjono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sutadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sigit Hendra Gunawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

INFORMASI MENGENAI DIREKTUR INDEPENDEN

Dengan mengacu pada keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang antara menetapkan bahwa Perusahaan harus mengangkat Direktur yang Tidak Terafiliasi, dan sesuai dengan perubahan peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014

tanggal 20 Januari 2014) di mana istilah “Direktur Tidak Terafiliasi” digantikan dengan istilah “Direktur Independen”, maka Perusahaan telah mengangkat Direktur Independen yaitu Sigit Hendra Gunawan.

Persyaratan Direktur Independen

Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagai anggota Direksi, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan paling kurang selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur pada perusahaan lain; dan
- Tidak menjadi Orang Dalam pada Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Masa jabatan Direktur Independen adalah paling banyak dua periode berturut-turut berdasarkan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat.

Tabel 96 – KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Nama	Jabatan	BFI	Perusahaan Lainnya
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Cornellius Henry Kho	Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	Tidak ada	Tidak ada
Sudjono	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	Tidak ada	Tidak ada
Sutadi	Direktur Pembiayaan Ritel	Tidak ada	Tidak ada
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Tidak ada	Tidak ada

RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Informasi rangkap jabatan anggota Direksi BFI dijelaskan dalam Tabel 97.

Berdasarkan Pasal 9 POJK 30, anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap

jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga perusahaan lain, kecuali anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak

perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 24 POJK 33, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai

anggota Direksi paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua emiten atau perusahaan publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap

jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada empat emiten atau perusahaan publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada lima komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima anggota Direksi telah mematuhi ketentuan Pasal 9 POJK 30 dan Pasal 24 POJK 33 dimaksud.

Tabel 97 – RANGKAP JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Nama	Jabatan	Jabatan di Luar Perusahaan
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	Tidak ada
Cornellius Henry Kho	Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	Tidak ada
Sudjono	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	Tidak ada
Sutadi	Direktur Pembiayaan Ritel	Tidak ada
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	Tidak ada

RAPAT DIREKSI

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.

Kebijakan mengenai Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi (telekonferensi) atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi dengan cara demikian dianggap

sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak memberikan kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut bersifat mutlak.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir

atau diwakili dalam rapat.

Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pejabat satu level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Risalah Rapat Direksi dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan dalam risalah rapat tersebut wajib dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (jika ada). Risalah Rapat Direksi dapat dibuat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, termasuk menyimpan dan mendistribusikan kepada peserta rapat. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Tabel 98 – JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Cornellius Henry Kho	Sudjono	Sutadi	Sigit Hendra Gunawan*
26 Januari 2016	-	√	√	√	-
16 Februari 2016	√	√	√	√	-
23 Maret 2016	-	√	√	√	-
21 April 2016	√	√	√	√	-
25 Mei 2016	√	√	√	√	√
21 Juni 2016	√	√	√	√	√
28 Juli 2016	√	√	√	√	√
23 Agustus 2016	√	√	√	√	√
27 September 2016	√	√	√	√	√
24 Oktober 2016	√	√	√	√	√
29 November 2016	√	√	√	√	√
14 Desember 2016	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	10	12	12	12	8
Persentase Kehadiran per Anggota	83%	100%	100%	100%	100%

* Mulai menjabat sebagai Direktur per April 2016

Tabel 99 – AGENDA RAPAT DIREKSI

Tanggal	Agenda Rapat
26 Januari 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Desember 2015, hal lain-lain
16 Februari 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Januari 2016, hal lain-lain
23 Maret 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 29 Februari 2016, hal lain-lain
21 April 2016	Pembahasan mengenai evaluasi persiapan RUPST dan RUPSLB tanggal 25 April 2016, kinerja keuangan, laporan keuangan dan manajemen risiko per 31 Maret 2016, hal lain-lain
25 Mei 2016	Pembahasan mengenai kinerja cabang baru yang dibuka selama 2015, kinerja bisnis ritel dan analisa produk ritel, perkembangan pembiayaan properti, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 April 2016, hal lain-lain
21 Juni 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Mei 2016, hal lain-lain
28 Juli 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan, laporan keuangan dan manajemen risiko per 30 Juni 2016, hal lain-lain
23 Agustus 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Juli 2016, hal lain-lain
27 September 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Agustus 2016, hal lain-lain
24 Oktober 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan, laporan keuangan dan manajemen risiko per 30 September 2016, hal lain-lain
29 November 2016	Pembahasan mengenai usul penetapan pembagian Dividen Tunai Interim untuk tahun buku 2016, kinerja keuangan dan manajemen risiko per 31 Oktober 2016, hal lain-lain
14 Desember 2016	Pembahasan mengenai kinerja keuangan dan manajemen risiko per 30 November 2016, hal lain-lain

Kehadiran dalam Rapat Direksi

Sepanjang 2016, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 12 kali, dengan kehadiran anggota Direksi seperti pada Tabel 98.

Dapat disimpulkan bahwa Direksi Perusahaan telah memenuhi POJK 30 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan Pasal 16 ayat (2), yaitu Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah Rapat Direksi dalam periode satu tahun.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Secara rutin, Direksi mengadakan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris guna membicarakan implementasi keputusan yang dibuat dalam rapat sebelumnya, kinerja keuangan, manajemen risiko, dan hal-hal lain yang mungkin berdampak pada kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan. Selama 2016, telah diselenggarakan 11 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama 2016 dapat dilihat pada Tabel 100.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah disebutkan pada bahasan tentang Dewan Komisaris (halaman 211-212).

EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kebijakan Umum

Kinerja Direksi dan anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Tabel 100 – JADWAL DAN KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tanggal	Francis Lay Sioe Ho	Cornellius Henry Kho	Sudjono	Sutadi	Sigit Hendra Gunawan*
26 Januari 2016	√	√	√	√	-
16 Februari 2016	√	√	√	√	-
23 Maret 2016	-	√	√	√	-
21 April 2016	√	√	√	√	-
25 Mei 2016	√	√	√	√	√
21 Juni 2016	√	√	√	√	√
28 Juli 2016	√	√	√	√	√
23 Agustus 2016	√	√	√	√	√
27 September 2016	√	√	√	√	√
24 Oktober 2016	√	√	√	√	√
29 November 2016	√	√	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	10	11	11	11	7
Persentase Kehadiran per Anggota	91%	100%	100%	100%	100%

* Mulai menjabat sebagai Direktur per 25 April 2016

BAGAN MEKANISME REMUNERASI DIREKSI



Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual terhadap dua penilaian, yaitu penilaian kolektif berdasarkan pencapaian anggaran perusahaan dan penilaian individu berdasarkan *Key Performance Indicator* ("KPI") masing-masing Direktur yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan, khususnya bagi Pemegang Saham, untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi dituangkan dalam KPI. Kriteria kinerja Direksi secara kolektif maupun individu yang berdasarkan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lain yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi diajukan oleh Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk disetujui. KPI Direksi sekurang-kurangnya mencakup antara lain:

1. Kontribusi dalam aktivitas bisnis Perusahaan;
2. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
3. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;
5. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Kontrak Manajemen; dan
6. Pencapaian kinerja sesuai target individual yang telah ditetapkan.

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai anggaran dasar Perusahaan, penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris yang diberi kuasa berdasarkan RUPST. Remunerasi Direksi ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya.

RUPST Perusahaan 25 April 2016 menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing anggota Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

Remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan formulasi remunerasi yang mengacu pada kebijakan internal Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja Perusahaan. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Mekanisme remunerasi Direksi ditetapkan sebagai berikut:

- Direksi dengan mempertimbangkan posisi keuangan Perusahaan, mengajukan usulan jumlah remunerasi bagi Direksi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mempelajari usulan remunerasi bagi Direksi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kondisi keuangan Perusahaan dan perbandingan dengan industri yang relevan dengan ukuran dan bisnis yang sebanding.

- Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan dalam RUPS.

Struktur remunerasi Direksi terdiri dari:

- gaji,
- tunjangan,
- fasilitas; dan
- tantiem/insentif kinerja.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebesar Rp41.469 juta pada 2016 dan Rp37.213 juta pada 2015.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA BARU DIREKSI

BFI menyadari pentingnya Program Orientasi bagi Anggota Baru Direksi agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya agar anggota baru Direksi dapat mengetahui kondisi Perusahaan secara umum dan saling mengenal satu sama lain, serta menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Dalam praktik yang telah berlangsung di BFI hingga saat ini, orientasi untuk anggota baru Direksi

dilaksanakan dalam Rapat Direksi yang pertama kali dihadiri oleh anggota baru tersebut.

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI

Perusahaan mengalokasikan anggaran bagi anggota Direksi guna mengikuti program pelatihan melalui berbagai seminar dan pelatihan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas kinerja Perusahaan. Sepanjang tahun 2016, Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan seperti pada Tabel 101.

Tabel 101 – PELATIHAN DAN SEMINAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI

Nama	Jabatan	Tanggal	Judul/Tema	Lokasi	Penyelenggara
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	23 Juni 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-17	Jakarta	IICD
		6 Desember 2016	Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Tahun 2017”	Jakarta	APPI
Cornellius Henry Kho	Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	6 Desember 2016	Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Tahun 2017”	Jakarta	APPI
Sudjono	Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	29-30 Agustus 2016	Pembicara pada sesi acara <i>Indonesia Fintech Festival & Conference (IFFC) 2016</i> bertema “Fintech dalam Institusi Finansial Non-Perbankan”	Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten	OJK dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia
Sutadi	Direktur Pembiayaan Ritel	23 Juni 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-17	Jakarta	IICD
		24 Mei 2016	Pembicara pada Seminar Edukasi Literasi Keuangan “Mengetahui Lebih Dekat Perusahaan Pembiayaan”	Universitas Multimedia Nusantara (UMN)	UMN
Sigit Hendra Gunawan	Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	23 Juni 2016	One-day Training ASEAN CG Scorecard Batch ke-17	Jakarta	IICD

KOMITE AUDIT

TUGAS POKOK

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

ACUAN HUKUM

Perusahaan membentuk Komite Audit pertama kali pada 2000 guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan serta prinsip-prinsip GCG. Selain itu, Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Bursa Efek Jakarta No. 1-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Ref. No. 315/BEJ/06/2000 tanggal 30 Juni 2000 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55").

PIAGAM KOMITE AUDIT

Perusahaan telah mempunyai Piagam Komite Audit yang disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, transparan dan independen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 55, Perusahaan telah menerbitkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: BOC/1/2016-01 tanggal 26 Januari 2016.

Piagam Komite Audit yang telah dipublikasikan di situs web Perusahaan tersebut antara lain mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Komite Audit, wewenang Komite Audit, jumlah anggota, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan Komite Audit, tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, rapat Komite Audit dan masa tugas Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit Perusahaan mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan atau pihak otoritas lainnya; antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi,

dengan bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko dari Perusahaan;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perusahaan.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Komite Manajemen Risiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diperlukan; dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

JUMLAH ANGGOTA, KOMPOSISI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Jumlah Anggota Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Perusahaan.

Komposisi Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perusahaan, persyaratan untuk menjadi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain pada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan;
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan

- Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Direksi atau Ketua Komite Audit dapat mengusulkan calon dari luar Dewan Komisaris Perusahaan untuk dinominasikan sebagai anggota Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengadakan wawancara dan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon. Setelah selesai melakukan evaluasi, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan sebagai anggota Komite Audit.

Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan memberitahukan Direksi untuk menerbitkan Surat Pengangkatan bagi calon yang telah disetujui.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Dalam Surat Pemberitahuan kepada OJK No. Corp/FL/L/VII/15-0134 tanggal 7 Juli 2015, Perusahaan menyampaikan informasi mengenai Susunan Komite Audit Perusahaan sebagai berikut:

Ketua: Johanes Sutrisno
Anggota:

- Stefanus Ginting
- Friso Palilingan

Susunan Komite Audit Perusahaan per 22 Juni 2016 sebagaimana mengacu kepada Surat Pemberitahuan kepada OJK No. Corp/FL/L/VI/16-0124 tanggal 22 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua: Emmy Yuhassarie
Anggota:

- Friso Palilingan
- Edy Sugito

Susunan anggota Komite Audit ini dikukuhkan dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Juni 2016.

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil masing-masing anggota Komite Audit telah disajikan dalam Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 65-66).

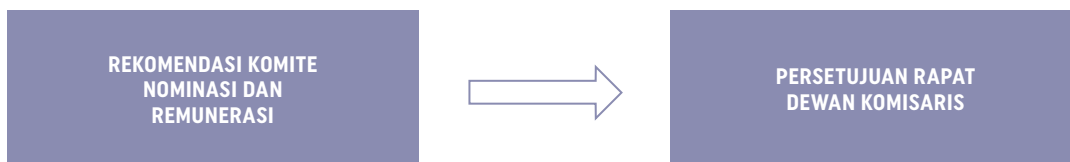
Adapun latar belakang keahlian masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada Tabel 102.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang menjabat per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 103.

BAGAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT



INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, seluruh anggota Komite telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku.

Independensi masing-masing anggota Komite Audit Perusahaan dapat digambarkan dalam Tabel 104.

KEBIJAKAN DAN BESARAN REMUNERASI UNTUK KOMITE AUDIT

Kebijakan dan besaran remunerasi untuk Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi membuat rekomendasi pada

Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Komite Audit, berdasarkan kebijakan Perusahaan dan mempertimbangkan peninjauan pasar atas remunerasi Komite Audit. Remunerasi Komite Audit terdiri atas honorarium saja.

- Anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau anggota manajemen senior dari pemegang saham pengendali tidak berhak atas remunerasi tambahan sebagai anggota Komite Audit.

Tabel 102 – PROFIL KOMITE AUDIT

Nama	Jabatan	Latar Belakang dan Keahlian
Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit	Hukum, Konsultan Hukum
Friso Palilingan	Anggota	Audit, Manajemen, Akuntansi
Edy Sugito	Anggota	Audit, Akuntansi, Pasar Modal

Tabel 103 – MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Nama	Jabatan	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Friso Palilingan	Anggota	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Edy Sugito	Anggota	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

Tabel 104 – INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Emmy Yuhassarie	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Friso Palilingan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Edy Sugito	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit mengatur tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas Komite Audit sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan sistem kontrol internal Perusahaan, Komite Audit melakukan pertemuan berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang, serta melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan.
2. Dalam hubungannya dengan penelaahan atas risiko yang terkait dengan risiko usaha Perusahaan, Komite Audit

melakukan pembahasan dengan Komite Manajemen Risiko atas pengelolaan risiko yang telah dilakukan manajemen risiko Perusahaan.

3. Komite Audit memberikan pertanggungjawaban tahunan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya menjelang Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sejalan dengan itu Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya.
4. Komite Audit bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi Komite Audit serta penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit.

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tabel 105 – JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Tanggal Rapat	Emmy Yuhassarie**	Friso Palilingan	Edy Sugito**	Johanes Sutrisno*	Stefanus Ginting*
16 Februari 2016	-	√	-	√	√
21 April 2016	-	√	-	√	-
28 Juli 2016	√	√	√	-	-
24 Oktober 2016	√	√	√	-	-
Jumlah Kehadiran per Anggota	2	4	2	2	1
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%	100%	50%

Catatan:

*Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015, susunan Komite Audit adalah:

- Ketua: Johanes Sutrisno
- Anggota: Stefanus Ginting, Friso Palilingan

**Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016, susunan Komite Audit adalah:

- Ketua: Emmy Yuhassarie
- Anggota: Friso Palilingan, Edy Sugito

Tabel 106 – AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Tanggal	Agenda Rapat
16 Februari 2016	Pembahasan mengenai presentasi KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan mengenai draft Laporan Audit per 31 Desember 2015 dan laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal
21 April 2016	Pembahasan mengenai tinjauan draft Laporan Keuangan per 31 Maret 2016, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan hal lain-lain
28 Juli 2016	Pembahasan mengenai tinjauan draft Laporan Keuangan per 30 Juni 2016, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan presentasi rencana kerja audit tahunan 2016 oleh BDO Tanubrata
24 Oktober 2016	Pembahasan mengenai tinjauan draft Laporan Keuangan per 30 September 2016, laporan pelaksanaan kegiatan Audit Internal, dan hal lain-lain

Kehadiran dalam Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah melakukan sebanyak empat kali rapat. Kehadiran anggota dalam Rapat Komite Audit Perusahaan dapat dilihat pada Tabel 105.

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Rapat Komite Audit tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 106.

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Komite Audit wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan.

Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

SISTEM KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.

Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Audit dapat menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2016

Program Kerja Komite Audit Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat Komite Audit setiap tiga bulan sekali;
2. Melakukan evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal serta memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan serta Perusahaan Publik; dan
4. Melakukan evaluasi atas terlaksananya sistem pengendalian internal serta pelaporan kegiatan Audit Internal untuk dilaporkan ke Dewan Komisaris.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

TUGAS POKOK

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemegang saham. Selanjutnya, Komite ini bertanggung jawab untuk meninjau ulang risiko utama Perusahaan yang terkandung dalam register risiko Perusahaan dan memastikan bahwa semua risiko baik yang baru maupun yang timbul dievaluasi sewajarnya dan tindakan lebih lanjut diidentifikasi.

ACUAN HUKUM

Pada awalnya fungsi manajemen risiko di BFI berada di bawah tanggung jawab Komite Audit. Pada 2003, berdasarkan SK Dewan Komisaris No. Com/JS/SK/III/2003-04 tanggal 18 Maret 2003, Komite Manajemen Risiko menjadi satu fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris. Hal-hal tersebut meliputi:

1. Mengevaluasi kebijakan dan praktik manajemen risiko yang digunakan dalam mengelola risiko, yang berhubungan dengan perubahan lingkungan bisnis dan parameter risiko;
2. Meninjau ulang identifikasi profil risiko oleh Divisi Manajemen Risiko dan peninjauan kriteria batas risiko maksimum yang dapat ditoleransi di pasar, kredit, treasury dan operasional;
3. Memastikan kegiatan bisnis ada dalam parameter risiko yang dapat diterima; dan
4. Meninjau ulang analisis yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempunyai potensi risiko bagi Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

JUMLAH ANGGOTA, KOMPOSISI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Jumlah Anggota dan Komposisi Komite Manajemen Risiko

Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 1 orang sebagai anggota yang merupakan pihak luar Perusahaan.

Persyaratan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Dalam pembentukannya, Dewan Komisaris melihat beberapa kriteria yang merujuk pada tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- Integritas tinggi dan mampu menjadi independen dalam manajemen Perusahaan;
- Memahami bisnis, produk dan layanannya;
- Memiliki pengetahuan cukup tentang ekonomi makro dan dampaknya terhadap industri;
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan

- Ketua Komite Manajemen Risiko harus merupakan anggota independen dari Dewan Komisaris.

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Setelah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, pemilihan dan pengangkatan anggota Komite Manajemen Risiko didasarkan pada proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Direksi atau Ketua Komite Manajemen Risiko dapat mengusulkan kandidat dari luar Dewan Komisaris Perusahaan untuk dinominasikan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko.
- Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengadakan wawancara dan memeriksa kualifikasi serta kompetensi calon. Setelah selesai

mengevaluasi, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko.

- Jika rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui, Dewan Komisaris akan memberitahukan Direksi untuk menerbitkan surat pengangkatan bagi calon yang telah disetujui.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua: Emmy Yuhassarie
Anggota: Jono Effendy

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Juni 2016, adalah sebagai berikut:

Ketua: Johannes Sutrisno
Anggota: Jono Effendy

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko telah disajikan dalam Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 66-67).

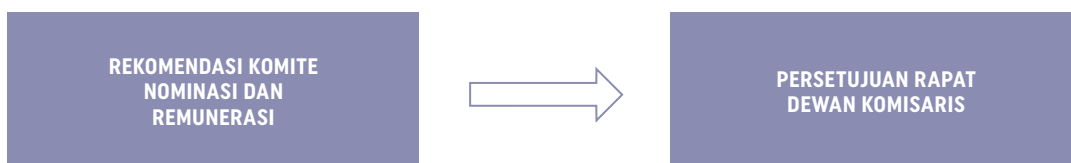
Adapun latar belakang keahlian masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Tabel 107.

MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan selanjutnya.

Adapun masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang menjabat pada 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 107.

BAGAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO



INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko merupakan pribadi yang profesional dan tidak memiliki hubungan usaha; baik langsung maupun tidak langsung; yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian seluruh anggota Komite telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku (Tabel 108).

KEBIJAKAN DAN BESARAN REMUNERASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah menyusun kebijakan remunerasi yang diterapkan pada Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi untuk Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Komite Manajemen Risiko berdasarkan kebijakan Perusahaan dan mempertimbangkan

peninjauan pasar atas remunerasi Komite Manajemen Risiko. Remunerasi Komite terdiri atas honorarium saja.

- Anggota Komite Manajemen Risiko yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan atau anggota manajemen senior dari pemegang saham pengendali tidak berhak atas remunerasi tambahan sebagai anggota Komite Manajemen Risiko.

Tabel 107 – PROFIL DAN MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Nama	Jabatan	Latar Belakang dan Keahlian	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Johanes Sutrisno	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Manajemen Risiko	Keuangan, Akuntansi, Komite Audit, GCG	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Jono Effendy	Anggota	Audit, Manajemen Risiko	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

Tabel 108 – INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Johanes Sutrisno	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jono Effendy	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak empat kali dalam setahun dan melaporkan seluruh hasil rapat kepada Dewan Komisaris.

Kehadiran dalam Rapat Komite Manajemen Risiko

Kehadiran dalam Rapat Komite Manajemen Risiko tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 109.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

Informasi mengenai agenda Rapat Komite Manajemen Risiko pada 2016 dapat dilihat pada Tabel 110.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO 2016

Program Kerja Komite Manajemen Risiko ditujukan untuk memastikan bahwa manajemen mempunyai sistem peringatan dini atas kemungkinan timbulnya risiko yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, serta menghindari

kejutan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Program tersebut meliputi:

1. Melakukan pertemuan tiga bulan sekali dengan departemen Manajemen Risiko Perusahaan serta Direksi untuk membahas *risk monitoring dashboard*;
2. Memastikan bahwa kebijakan yang diambil di bidang Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik;
3. Melakukan penelaahan atas laporan Manajemen Risiko atas evaluasi terhadap *risk exposure* Perusahaan khususnya di bidang terkait risiko kegiatan perusahaan pembiayaan:
 - Risiko kinerja keuangan;
 - Risiko operasional;
 - Risiko pendanaan; dan
 - Risiko hukum.

Tabel 109 –JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tanggal Rapat	Johanes Sutrisno**	Jono Effendy	Emmy Yuhassarie*
16 Februari 2016	√	√	-
21 April 2016	√	√	-
28 Juli 2016	-	√	√
24 Oktober 2016	-	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	2	4	2
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%

Catatan:

* Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015, susunan Komite Manajemen Risiko adalah:

- Ketua: Emmy Yuhassarie
- Anggota: Jono Effendy

** Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016, susunan Komite Manajemen Risiko adalah:

- Ketua: Johanes Sutrisno
- Anggota: Jono Effendy

Tabel 110 –AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tanggal	Agenda Rapat
16 Februari 2016	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional
21 April 2016	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional
28 Juli 2016	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update kualitas portofolio
24 Oktober 2016	Pembahasan mengenai <i>Executive Summary - Risk Dashboard</i> , update risiko finansial dan operasional

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

TUGAS POKOK

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

ACUAN HUKUM

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pertama kali dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. Com/JS/SK/XII/2005-007 pada 29 Desember 2005. Selanjutnya, pengaturan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 ("POJK 34") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak tanggal 8 Desember 2014. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK ini paling lambat satu tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Pelaksanaan Peraturan OJK tersebut telah diimplementasikan mulai tahun 2015.

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dengan mengacu pada POJK 34 dan anggaran dasar Perusahaan, pada 1 Desember 2015 BFI telah menerbitkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman ini merupakan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang menjadi bagian dalam penciptaan sistem GCG berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: BOC/I/2015-05 tanggal 1 Desember 2015.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, wewenang, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas, rapat serta masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta komite-komite; dan

- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Terkait dengan fungsi remunerasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- Struktur remunerasi
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta komite-komite.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Perusahaan.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi

dan Remunerasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.

3. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melibatkan pihak Independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Jumlah Anggota, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Jumlah Anggota dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari tiga orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. Satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

2. Persyaratan Anggota dari Luar Perusahaan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama;
- b. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi; dan
- c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.

Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan.

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua: Alfonso Napitupulu
Anggota:

- Andrew Adiwijanto
- Priyambodo

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di atas dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Juni 2016.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah disajikan dalam Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 68-69).

Adapun latar belakang keahlian dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Tabel 111.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 112.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen di mana dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diilustrasikan pada Tabel 113.

KEBIJAKAN DAN BESARAN REMUNERASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BFI selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Tabel 111 – PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nama	Jabatan	Latar Belakang dan Keahlian
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Hukum, Konsultan Hukum
Andrew Adiwijanto	Anggota	Teknik Elektro, Manajemen SDM dan Operasional
Priyambodo	Anggota	Akuntansi, Manajemen SDM

Tabel 112 – MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nama	Jabatan	Tanggal dan Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Andrew Adiwijanto	Anggota	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021
Priyambodo	Anggota	SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/IV/2015-0081 tanggal 13 April 2015 dan dikukuhkan kembali dengan SK Dewan Komisaris No. BOC/SK/VI/2016-05 tanggal 21 Juni 2016	2016-2021

Tabel 113 – INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Keterangan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali		Komisaris		Direktur		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Alfonso Napitupulu	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andrew Adiwijanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Priyambodo	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri;
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang satu kali dalam setahun.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan rapat tersebut adalah:

- a. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.
- b. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

- f. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- g. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
- h. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan sebanyak empat kali rapat. Hasil rapat telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat dengan Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Adapun agenda dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada 2016 adalah sebagai berikut:

- Pembahasan mengenai gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Merekomendasikan calon anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Tabel 114 – JADWAL DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tanggal Rapat	Alfonso Napitupulu	Andrew Adiwijanto	Priyambodo
16 Februari 2016	√	√	√
21 April 2016	√	√	√
28 Juli 2016	√	√	√
29 November 2016	√	√	√
Jumlah Kehadiran per Anggota	4	4	4
Persentase Kehadiran per Anggota	100%	100%	100%

Tabel 115 – AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tanggal	Agenda Rapat
16 Februari 2016	Pembahasan mengenai gaji, tunjangan dan/atau tantiem Dewan Komisaris dan Direksi
21 April 2016	Pembahasan mengenai rekomendasi calon anggota baru untuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan pembahasan mengenai pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris
28 Juli 2016	Pembahasan kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris
29 November 2016	Pembahasan mengenai anggaran kenaikan gaji dan tunjangan karyawan

SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. Hal tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam:

- Laporan Tahunan; dan
- Situs web Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2016

Adapun program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada 2016 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas riwayat hidup dan kompetensi kandidat anggota Dewan Komisaris serta para anggota Komite-Komite untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris, yang akan diajukan ke RUPS; dan
2. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi sehubungan dengan penetapan remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

TUGAS POKOK

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal, sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, BFI sebagai Perusahaan publik telah membentuk Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai pejabat penghubung (*liason officer*) dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk investor dalam rangka pelaksanaan GCG, penyusunan laporan manajemen serta kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan, penanganan hukum, pengelolaan kehumasan (*relation officer*), Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Informasi Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan dan sekaligus penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan, yaitu Departemen *Corporate Secretariat* yang dikepalai oleh seorang *Head of Corporate Secretariat*.

Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari emiten atau perusahaan publik.

ACUAN HUKUM

- Pembentukan Sekretaris Perusahaan pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Corp/CH/L/VII/07-0115 tanggal 9 Juli 2007 dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 Tahun 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan;
- Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35") yang menggantikan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan;

Sekretaris Perusahaan BFI diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

KEDUDUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
2. Jabatan Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi.
3. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.
4. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, perusahaan publik wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
5. Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (4) tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK 35 tersebut.

PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
- Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
- Dapat berkomunikasi dengan baik; dan
- Berdomisili di Indonesia.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2016 adalah Sudjono, warga negara Indonesia, lahir pada 1970, usia 46 tahun. Beliau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014. Beliau juga merupakan Anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi. Profil beliau sudah disajikan sebelumnya dalam Profil Direksi (halaman 63).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4 jo POJK 35 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan mensosialisasikannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perusahaan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
4. Memberikan pelayanan kepada publik atas setiap informasi mengenai kondisi Perusahaan.

- c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") termasuk mempersiapkan proses penyelenggaraan (pelaporan rencana RUPS, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil RUPS), mempersiapkan materi RUPS (termasuk diantaranya Laporan Tahunan Perusahaan) dan pelaksanaan RUPS;
- d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. Pelaksanaan program pengenalan terhadap Perusahaan untuk anggota baru Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan yang dirangkap oleh Direktur, Sudjono, telah mengikuti seminar dan pelatihan sebagaimana telah diungkapkan di Tabel 101.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2016

Sepanjang 2016, Sekretaris Perusahaan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, dengan agenda sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pasar modal, termasuk peraturan-peraturan baru di bidang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI;
2. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi Perusahaan secara transparan yang meliputi laporan keterbukaan informasi terkait informasi RUPS, laporan keuangan berkala, laporan tahunan, paparan publik, laporan registrasi saham, laporan insidental terkait rencana pengembangan baru, serta memberikan informasi yang diperlukan para pemegang saham;
4. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan mempublikasikan hasil keputusan rapat;
5. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan korporasi;
6. Membuat buku Laporan Tahunan;
7. Melaksanakan program-program CSR melalui keberadaan Unit CSR di bawah koordinasi Departemen Corporate Secretariat;
8. Menjaga dan memelihara hubungan dengan media dan sarana informasi lainnya;
9. Mengkoordinasikan rapat-rapat Perusahaan, seperti RUPS, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan paparan publik;
10. Mencatat risalah rapat dari rapat-rapat Perusahaan, seperti RUPS, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, dan paparan publik; dan
11. Mengkoordinasikan aksi korporasi Perusahaan, antara lain:
 - Pembelian kembali saham Perusahaan (*stock buyback*);
 - Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham ("MESOP"); dan
 - Penerbitan obligasi.

KORESPONDENSI DENGAN OJK DAN BEI

Selama 2016, Perusahaan telah menyampaikan lebih dari 48 kali korespondensi ke OJK dan lebih dari 42 kali ke BEI.

AUDIT INTERNAL

TUGAS POKOK

Tugas pokok Audit Internal adalah untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada organisasi internal Perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

ACUAN HUKUM

Pembentukan Unit Audit Internal di Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56").

Sesuai POJK 56 tersebut, fungsi Audit Internal di lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan mempunyai akses langsung kepada Komite Audit untuk menjamin agar Departemen Audit Internal dapat melaksanakan tugas secara independen dan memberikan konsultasi atas rencana proses pemeriksaan yang dilakukan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Perusahaan telah mempunyai Piagam Audit Internal sejak 1 Maret 2009, yang disusun sebagai pedoman kerja bagi Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh Direksi Perusahaan, guna memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada organisasi internal Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan salah satu bagian yang penting dalam penerapan GCG. Perusahaan menempatkan Audit Internal sebagai badan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang memberikan saran guna meningkatkan kegiatan operasional Perusahaan. Audit Internal membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko dan kontrol.

Perusahaan membentuk Departemen Audit Internal pada 31 Maret 2010 berdasarkan Surat Pengangkatan Anggota Audit Internal Perusahaan. Departemen Audit Internal merupakan departemen yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Anggota Audit Internal merupakan karyawan Perusahaan yang oleh karenanya tunduk kepada peraturan Perusahaan yang berlaku, termasuk prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta penilaian kinerja anggota Audit Internal.

Dalam menjalankan kegiatannya, Departemen Audit Internal wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komite Audit Perusahaan yang secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan kegiatannya, Departemen Audit Internal wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komite Audit Perusahaan yang secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

Departemen Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Departemen dan sekurang-kurangnya terdiri dari satu Kepala Departemen, dan sepuluh anggota yang seluruhnya berasal dari pihak internal Perusahaan. Auditor yang duduk dalam Departemen Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Departemen Audit Internal (*Head of Internal Audit*).

Kepala Departemen Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Departemen Audit Internal setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Departemen Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Departemen Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.

KUALIFIKASI AUDIT INTERNAL

Secara umum, kualifikasi yang diperlukan oleh anggota Departemen Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara umum meliputi:

- Kemampuan melakukan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan audit tahunan terhadap kinerja dan data-data pada sistem dan operasional kantor pusat dan kantor cabang;

- Mengembangkan sistem kerja, prosedur dan standar pelayanan dari masing-masing unit di Departemen Audit Internal;
- Kemampuan melakukan analisa terhadap cara kerja pengendalian/ kontrol internal di kantor pusat dan kantor cabang;
- Mencari informasi mengenai ketentuan dan peraturan Perusahaan terkini terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan dan aplikasinya;
- Melakukan koordinasi dengan departemen dan unit kerja lain di Perusahaan untuk memperoleh jawaban, penjelasan dan masukan terhadap suatu masalah atau dugaan temuan;
- Kemampuan membuat laporan hasil audit, melakukan analisa temuan dan memberikan rekomendasi untuk solusi perbaikan serta sanksi yang diperlukan; dan
- Melaporkan kepada Kepala Departemen Audit Internal mengenai poin-poin penting atas temuan yang memerlukan penanganan segera.

Kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi jabatan Kepala Departemen Audit Internal sebagai berikut:

- Kemampuan melakukan perencanaan dan pemantauan terhadap produktivitas Departemen Audit Internal;
- Kemampuan analisa dalam melakukan evaluasi dan memastikan tersedianya laporan audit yang berkualitas untuk dipertanggungjawabkan kepada Komite Audit dan Presiden Direktur; dan
- Kemampuan dalam memberikan rekomendasi terhadap hasil temuan audit.

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

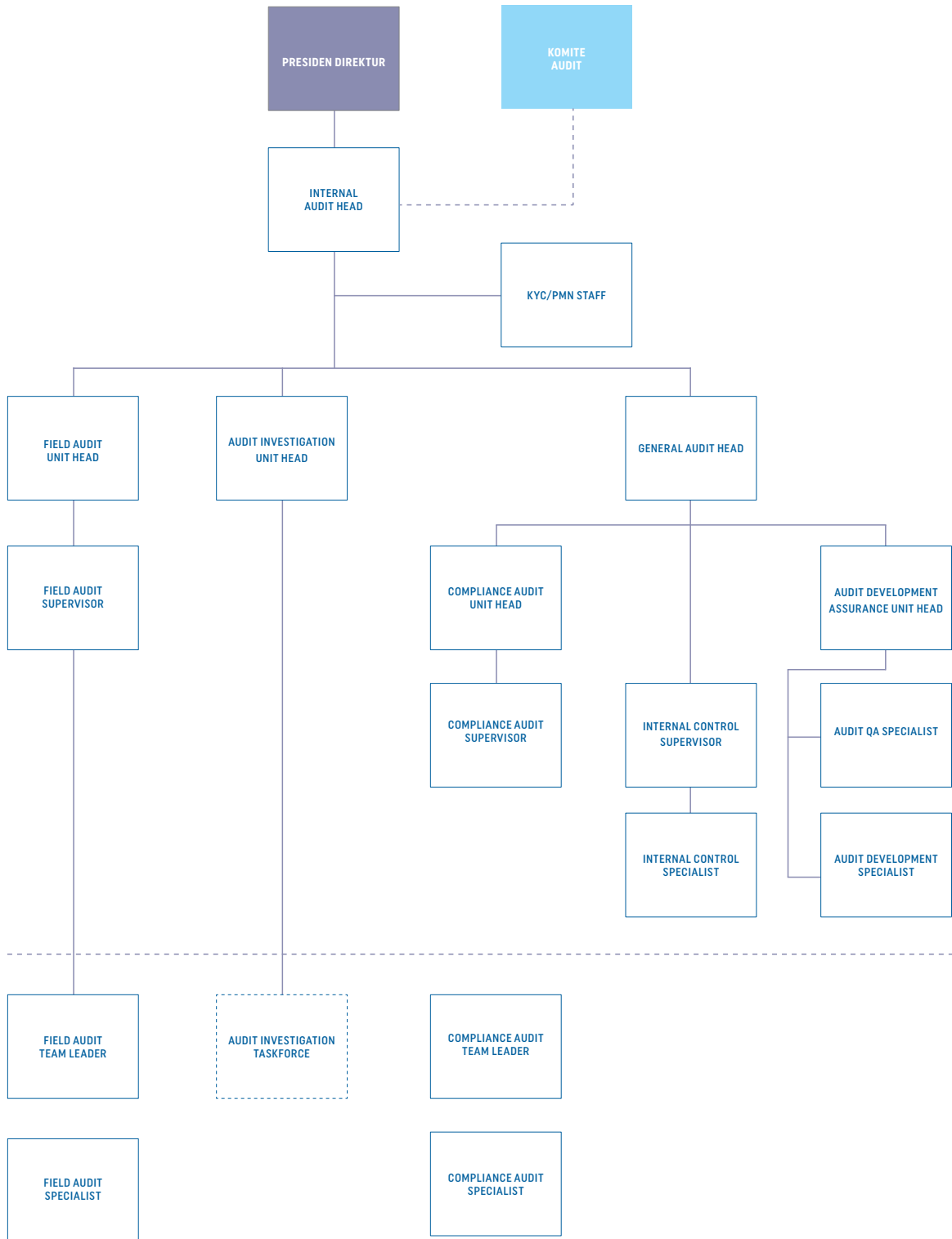


Kepala Departemen Audit Internal Perusahaan per 31 Desember 2016 adalah Fledy Rizmara, warga negara Indonesia, lahir pada 1980, usia 36 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Audit Internal (*Head of Internal Audit*) sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014. Beliau berkarir di BFI sejak 2005 sebagai Staf Audit, kemudian menjadi *Team Leader Audit* pada 2007, *Supervisor Audit* pada 2010, *Unit Head General Audit* pada Maret 2011 dan *Unit Head Field Audit* pada Agustus 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Islam Indonesia (UII) pada 2004.

Program pelatihan dan pengembangan yang pernah diikuti, antara lain:

- 2005:
 - Prinsip Dasar Audit Internal oleh BFI (internal)
 - Teknik Wawancara oleh BFI (internal)
 - Deteksi *Fraud* oleh BFI (internal)

Grafik 22 –STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL



- 2010:
 - *The Most Powerful Rules in Management* oleh ACADEMIA Education & Training
 - *Proven Techniques Build Successful Teams* oleh ACADEMIA Education & Training
- 2011:
 - *Middle Management Development Program (MMDP) Batch 1* diselenggarakan dengan kerja sama BFI dan Prasetya Mulya Business School
 - *Know Your Customer* oleh BFI (internal)

Beliau juga aktif sebagai *trainer* yang memberikan berbagai program pelatihan yang diselenggarakan bagi karyawan Perusahaan sejak 2009 hingga saat ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal menetapkan bahwa tugas dan tanggung jawab fungsi Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan/audit khusus jika diperlukan; dan
10. Menyusun peringkat/skoring hasil audit per kantor cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing kantor cabang terhadap peraturan, kebijakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

WEWENANG DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Wewenang Departemen Audit Internal Perusahaan adalah:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Dalam memenuhi peran dan tanggung jawab di atas, Departemen Audit Internal BFI secara independen menjalankan kegiatan audit di seluruh kantor cabang, demikian pula di kantor pusat. Selain audit atas aspek keuangan, Audit Internal juga memantau kepatuhan pada kebijakan dan *Standard Operating Procedure* ("SOP") Perusahaan dan terus mengevaluasi keefektifan sistem kontrol internal Perusahaan.

Proses audit mengadaptasi konsep Audit Berbasis Risiko yang difokuskan pada bidang-bidang dengan risiko terbesar seperti yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko dan sesuai nasihat Komite Audit. Setiap temuan dari semua kejadian yang merugikan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit.

KODE ETIK DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

1. Integritas
Integritas Auditor Internal menciptakan kepercayaan sehingga melahirkan keyakinan atas kesimpulan yang diambilnya.
2. Obyektivitas
Auditor Internal menunjukkan tingkat obyektivitas dan profesionalisme yang tertinggi dalam pengambilan, evaluasi dan penyebaran informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal melakukan asesmen yang berimbang atas seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dalam membuat suatu kesimpulan.
3. Kerahasiaan
Auditor Internal menghargai nilai dan kepemilikan atas informasi dan data-data yang diterima dan tidak menyebarkan informasi dan data tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas.
4. Kompetensi
Auditor Internal memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya.

INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Audit Internal senantiasa menempatkan diri pada posisi pelaksanaan fungsi yang menjunjung tinggi independensi dan obyektivitas. Departemen Audit Internal harus berada pada kondisi yang dapat merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas audit secara bebas dan mandiri tanpa dipengaruhi kepentingan manapun sesuai dengan pertimbangan profesionalisme dan standar audit yang berlaku serta berdasarkan bukti dan fakta yang ada.

Audit Internal Perusahaan senantiasa menghindari diri dari kondisi yang dapat mengganggu independensi dan obyektivitasnya. Oleh karena itu, Audit Internal tidak dapat menerima penugasan dan mengambil tanggung jawab operasional pada unit kerja atau fungsi bisnis. Apabila menjumpai kondisi yang berpotensi mengganggu independensi dan obyektivitas tersebut, Departemen Audit Internal wajib melaporkannya kepada Presiden Direktur.

JUMLAH AUDITOR PADA DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Departemen Audit Internal memiliki dua unit kerja yang terdiri dari:

- Audit Umum; dan
- Audit Lapangan.

Jumlah pegawai (auditor internal) pada Departemen Audit Internal per 31 Desember 2016 adalah 181 orang, yang terdiri dari:

- Audit Umum: 37 orang;
- Audit Lapangan: 128 orang; dan
- Kantor Pusat: 16 orang.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL 2016 DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab, Audit Internal secara independen telah menjalankan kegiatan audit di seluruh kantor pusat ataupun cabang. Selain audit atas aspek keuangan, departemen ini memantau kepatuhan pada kebijakan dan SOP Perusahaan dan terus mengevaluasi keefektifan sistem kontrol internal Perusahaan. Proses audit mengadaptasi konsep Audit Berbasis Risiko yang difokuskan pada bidang-bidang dengan risiko terbesar seperti yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko dan sesuai nasihat Komite Audit. Setiap temuan dari semua kejadian yang merugikan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit.

Pelaksanaan kegiatan Audit Internal pada 2016 antara lain meliputi:

- Menyusun program kerja audit tahunan 2016 dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program kerja tahun 2015;
- Melakukan audit atas unit kerja di kantor pusat dan cabang-cabang;
- Memantau pelaksanaan rekomendasi audit yang telah disepakati; dan
- Melakukan rapat rutin dengan Komite Audit untuk membahas program kerja Audit Internal, dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penting yang memerlukan perhatian manajemen sesuai dengan fungsi pengawasan Komite Audit.

Selama 2016, Audit Internal melaksanakan 152 pekerjaan audit di 151 cabang, dan 1 audit di kantor pusat. Manajemen secara konsisten menanggapi temuan-temuan audit dan dalam hal terjadi penipuan, Perusahaan memberikan penalti yang dilakukan berurutan mulai dari penggantian atas kerugian Perusahaan hingga pemutusan hubungan kerja. Selama 2016, kerugian Perusahaan adalah di bawah 1% dari pendapatan Perusahaan.

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara baik dan benar sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perusahaan menunjuk Auditor Eksternal.

Dengan mengacu pada keputusan RUPST Perusahaan 25 April 2016, Perusahaan telah menunjuk KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, anggota firma dari jaringan global BDO International Limited, sebagai Auditor Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi KAP tersebut.

Penetapan penggunaan KAP ini dilakukan sesuai dengan ketentuan, di mana Komite Audit telah melakukan tinjauan dan pengkajian mengenai calon KAP yang akan digunakan, dan merekomendasikannya kepada Direksi, setelah sebelumnya mendapat kuasa dari RUPS kepada Direksi untuk menunjuk KAP yang akan digunakan.

Akuntan Publik yang ditunjuk Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Perusahaan, yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dan mempengaruhi independensi Akuntan Publik serta para auditornya. Akuntan Publik melaksanakan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

BIAYA JASA AUDIT

Biaya jasa audit profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2016 adalah sebesar Rp385.000.000.

KOMUNIKASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Auditor Eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit Perusahaan melalui rapat-rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal, untuk selanjutnya hasil rapat tersebut oleh Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Selama 2016 dilakukan rapat antara Komite Audit dan Auditor Eksternal sebanyak dua kali masing-masing pada 16 Februari 2016 dan 24 Oktober 2016. Pokok pembahasan dalam rapat antara Komite Audit dengan Auditor Eksternal dan hal yang perlu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris telah disampaikan dalam rapat berikutnya antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris.

Adapun pembahasan yang dilakukan dalam rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal pada 16 Februari 2016 meliputi hasil temuan audit, rekomendasi auditor dan draft laporan keuangan hasil audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 serta pernyataan opini dari Auditor

Eksternal terhadap laporan keuangan hasil audit. Selanjutnya, laporan hasil audit tersebut akan disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS 2016. Sedangkan untuk agenda rapat Komite Audit dengan Auditor Eksternal pada 24 Oktober 2016 membahas perencanaan audit, antara lain, membahas susunan

tim Auditor Eksternal, pendekatan tata cara dan kebijakan audit, tabel pelaksanaan dan penyampaian laporan hasil audit, serta beberapa asumsi yang dibahas bersama untuk keperluan pelaksanaan audit tahun buku Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2016.

INFORMASI KAP

Tabel 116 – INFORMASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Periode	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan	Opini
2012	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Friso Palilingan	Wajar Tanpa Pengecualian
2013	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Santanu Chandra	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Santanu Chandra	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan	Santanu Chandra	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Asep Ugi Sugianto	Wajar Tanpa Pengecualian

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak memberikan jasa lain di luar jasa yang telah diuraikan di atas.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan di Perusahaan bertujuan untuk memantau kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan Perusahaan, serta memastikan pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui program kepatuhan yang terencana dan terpadu, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan budaya kepatuhan, dan terus menjaga efektivitas upaya pengelolaan risiko.

Fungsi kepatuhan di BFI dikelola oleh Direksi dan dimonitor saat Rapat Direksi setiap bulan, di mana setiap pimpinan di divisi, departemen dan unit Perusahaan harus memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan di Perusahaan berada di bawah Presiden Direktur.

Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, selama 2016 Perusahaan melakukan pelatihan di bidang kepatuhan, mengkaji dan melakukan sosialisasi peraturan baru serta beberapa program terkait hukum.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko menjadi bagian penting dalam menciptakan GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu mendorong akurasi dalam menyusun peta risiko, menekan kemungkinan terjadinya risiko dan mempermudah dalam upaya mitigasi risiko yang tepat dan efisien sehingga kegiatan pengelolaan Perusahaan berjalan lancar dan mampu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Kondisi eksternal dan internal dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha Perusahaan dan meningkatkan kompleksitas tingkat risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Semakin kompleksnya risiko ini perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dengan tantangan yang semakin kompleks dan perubahan industri yang sangat dinamis, ditandai dengan kompetisi yang semakin ketat, demografis pelanggan yang terus berkembang, kondisi peraturan perundang-undangan yang berubah dan iklim makroekonomi yang terus menantang. Hal ini menuntut praktik manajemen risiko yang baik, terukur dan terdokumentasi sehingga menjadi pilar utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif memungkinkan Perusahaan untuk secara efektif mengelola paparan risiko sehingga dapat memperkirakan portofolio risiko dan melakukan tindakan-tindakan preventif dan memaksimalkan pencapaian laba.

Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, POJK No.1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Surat Edaran OJK ("SEOJK") No.15/SEOJK.05/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan SEOJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.

Sesuai POJK dan SEOJK tersebut di atas, penerapan sistem manajemen risiko di Perusahaan mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
4. Sistem informasi manajemen risiko; dan
5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan

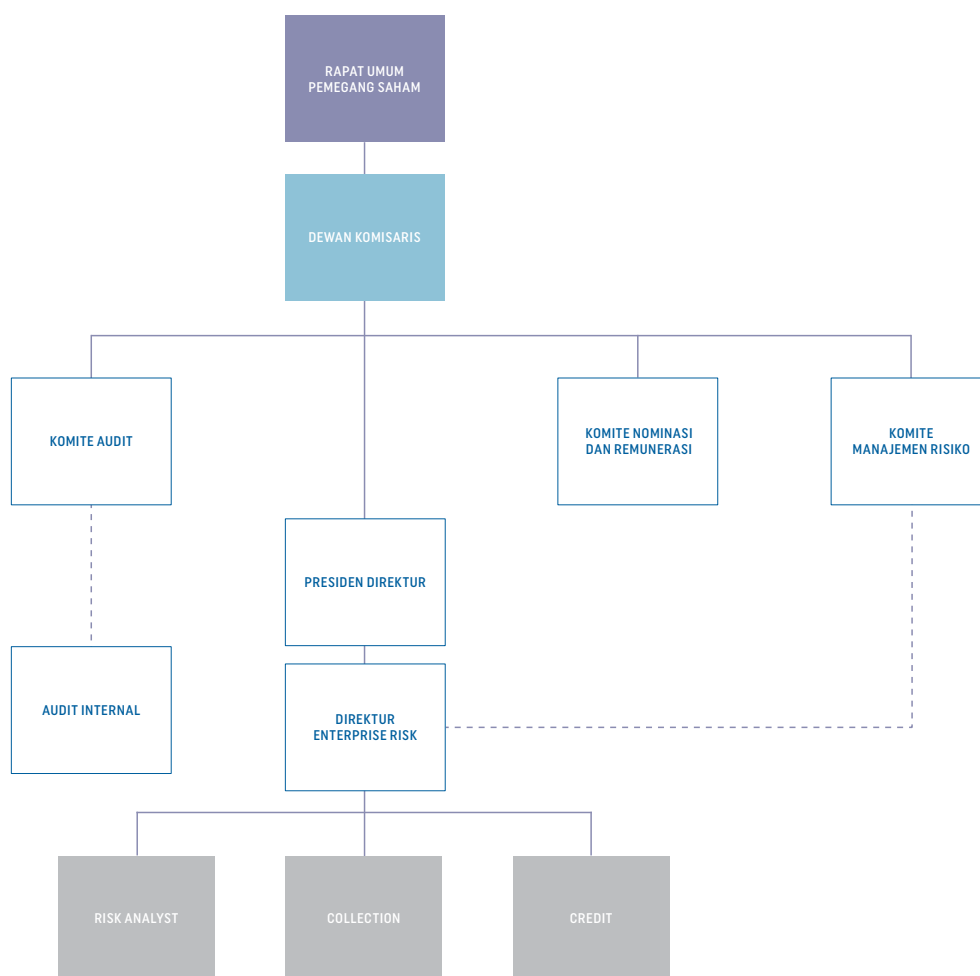
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan berperan aktif dalam penerapan dan pengawasan manajemen risiko di Perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan risiko, Direksi memaksimalkan fungsi Manajemen Risiko secara teratur serta melakukan pemantauan dan pengendalian atas setiap jenis risiko. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi Direksi secara aktif termasuk memeriksa laporan profil risiko Perusahaan secara regular serta melaksanakan tugas Direksi dalam mengendalikan risiko. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Manajemen Risiko merupakan organ tertinggi di tingkat Komisaris dalam hal otoritas manajemen risiko. Komite ini bertanggung jawab untuk menyetujui kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko serta memastikan penerapannya di seluruh Perusahaan. Komite Manajemen Risiko memberikan kuasa kepada Direksi, termasuk Direktur ERM, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko. Komite Manajemen Risiko juga dapat memberikan wewenang kepada Presiden Direktur dan Direktur untuk menyetujui atau merekomendasikan kegiatan bisnis.

Komite Manajemen Risiko secara rutin mengadakan rapat setiap tiga bulan untuk koordinasi, evaluasi, menganalisis portofolio (risiko kredit), risiko operasional, risiko strategi bisnis, risiko pendanaan, risiko tata kelola, risiko manajemen aset dan liabilitas Perusahaan, serta risiko kepengurusan.

Adapun gambaran umum struktur pengawasan di Perusahaan (yang mana manajemen risiko merupakan salah satu bagian penting dari pengawasan yang dilakukan dalam Perusahaan) dapat dilihat dari bagan dan penjelasan di bawah ini.

Grafik 23 – STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO



STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Direktur *Enterprise Risk* bertindak sebagai penanggung jawab menyusun kebijakan, strategi dan

kerangka manajemen risiko yang komprehensif yang sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan, menetapkan prosedur pelaksanaan aktivitas manajemen risiko dan memastikan terwujudnya struktur organisasi

yang mendukung pelaksanaan aktivitas manajemen risiko yang efektif. Selain itu, Direktorat *Risk Management* bertanggung jawab dalam memantau risiko terkait kredit, operasi, keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan reputasi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Perusahaan telah menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha, strategi bisnis dan regulasi terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam SOP dan SK internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun bukan transaksi kredit di mana kebijakan ini juga dikaji ulang secara berkala guna memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan tidak menimbulkan potensi kerugian yang melebihi kemampuan atau mengganggu kesinambungan operasi Perusahaan. Kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan juga sejalan dengan kebijakan pencadangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan sejalan dengan kebijakan OJK yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Perusahaan telah memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit. Sejak semula Perusahaan telah berkeyakinan bahwa pengendalian risiko merupakan isu yang krusial dalam menjalankan

usaha. Oleh karena itu, berbagai mekanisme yang tepat sasaran terus dikembangkan sehingga pengendalian risiko mencakup dari awal hingga akhir, dari penetapan profil segmen konsumen untuk mendapatkan konsumen yang tepat sampai dengan penyelesaian kewajiban konsumen.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan telah mempunyai Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System* atau "MIS") yang terintegrasi (*integrated*) dan terpusat (*centralised*) untuk mendukung penerapan manajemen risiko di Perusahaan, terutama untuk memberikan informasi kinerja portofolio dalam berbagai tingkatan dan segmen sehubungan dengan pengelolaan risiko kredit. MIS yang kokoh dengan *platform Data Warehouse* ini memberikan informasi terperinci mengenai konsentrasi portofolio, perilaku pelanggan dan kinerja, sehingga memungkinkan pendeteksian terhadap perkembangan hal-hal yang memburuk pada tahap awal sebagai antisipasi langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan pada saat yang tepat. MIS yang dilakukan oleh Perusahaan adalah:

1. Sistem pengumpulan informasi sampai dengan laporan (*dashboard*);
2. Integrasi *Early Warning System* (EWS); dan
3. KPI berbasis manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Kerangka kerja yang digunakan dalam Sistem Pengendalian Internal Risiko Manajemen Risiko adalah berdasarkan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang terdiri dari fungsi pengawasan, pengendalian dan pengelolaan.

1. Pertahanan Lapis Pertama

Unit-unit bisnis dan operasional bertindak sebagai lini pertahanan pertama dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan menanggulangi risiko. Tanggung jawab utama adalah untuk mengelola eksposur risiko secara harian, sesuai dengan target pasar, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pertahanan Lapis Kedua

Direktorat Risk Management, Departemen Pengawasan Keuangan (*Financial Control*) dan Departemen Hukum dan Litigasi (*Legal & Litigation*) adalah unit-unit utama dalam lapis pertahanan kedua melalui fungsi pengawasan independen. Direktorat Risk Management bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan persetujuan atas strategi dan tingkat risiko yang dapat diterima, dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan. Departemen *Legal & Litigation* mengelola risiko kepatuhan secara hukum dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku telah disebarluaskan dan dipatuhi oleh seluruh unit terkait.

3. Pertahanan Lapis Ketiga

Departemen Audit Internal melakukan pengujian dan audit secara independen terhadap proses-proses yang dijalankan oleh unit-unit bisnis dan operasional. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa unit-unit tersebut melakukan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, budaya sadar risiko yang kuat di seluruh tingkat bisnis merupakan komponen penting lainnya dalam penerapan kerangka manajemen risiko di Perusahaan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip manajemen risiko terlebih dulu ditanamkan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diturunkan kepada seluruh staf di tiap departemen dan unit Perusahaan. Dengan demikian, tiap karyawan diharapkan dapat memahami risiko yang berkaitan dengan tugas masing-masing serta sadar akan pentingnya menerapkan kebijakan dan prosedur baru yang dirancang untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.

Perusahaan terus mengkaji dinamika peraturan, perekonomian, dan kondisi pasar yang kompetitif, serta memastikan bahwa kebijakan, sistem dan proses yang ada berjalan selaras dengan *best practices* dan ketentuan perundang-undangan.

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah melaksanakan tata kelola manajemen risiko di seluruh tingkat Perusahaan, baik dalam kegiatan usaha maupun proses bisnis yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan mengacu pada:

1. Arahan dan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha Perusahaan;
3. Pembentukan struktur manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan;
4. Kebijakan, prosedur, dan batas-batas risiko yang tepat dan memadai;
5. Sistem perekaman data yang komprehensif, serta analisis dan sarana pelaporan yang efektif untuk memantau efektivitas seluruh proses manajemen risiko; dan
6. Pembentukan Sistem Pengendalian Internal.

PROFIL RISIKO DAN MITIGASINYA

Perusahaan senantiasa mengevaluasi lingkungan usahanya untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang bisnis ritel dan sektor produktif di seluruh negeri, sesuai ketentuan POJK No. 1/POJK.05/2015 ("POJK 1") tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan menggolongkan risiko-risiko yang dihadapinya sebagai berikut:

1. Risiko Strategi;
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Aset dan Liabilitas;
4. Risiko Kepengurusan;

5. Risiko Tata Kelola;
6. Risiko Dukungan Dana; dan
7. Risiko Pembiayaan (Risiko Kredit).

1. Risiko Strategi

Definisi

Risiko strategi didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan risiko strategi dilakukan melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab menyiapkan rencana bisnis Perusahaan untuk kemudian dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi dan situasi ekonomi, politik, pasar, dan kompetisi yang dihadapi Perusahaan di wilayah operasionalnya;
2. Evaluasi dampak peraturan yang berlaku dan akan diajukan;
3. Memastikan rencana tersebut telah sesuai dengan visi, misi dan budaya Perusahaan, serta toleransinya terhadap risiko dan arah pengembangan bisnis; dan
4. Meninjau sektor SDM, kompetensi dan infrastruktur Perusahaan telah memadai untuk menopang strategi bisnis tersebut.

Rencana strategis Perusahaan dievaluasi secara reguler dan perkembangannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jika terjadi perubahan dalam asumsi

yang mengharuskan adanya revisi rencana kerja, perubahan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dikaji dan dimintakan persetujuan ulang dan ditambahkan pada revisi rencana kerja tahunan.

2. Risiko Operasional

Definisi

Risiko operasional merupakan risiko atas kerugian yang disebabkan oleh tidak memadainya atau gagalannya proses, SDM dan sistem internal atau dari lingkungan eksternal, yang berdampak pada operasional perusahaan. Jenis risiko ini menjadi bagian dari produk dan jasa perusahaan, proses bisnis, kegiatan operasional, dan sistem infrastruktur. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional secara memadai dapat membawa akibat kerugian keuangan, terganggunya kegiatan operasional, masalah regulasi, serta mempengaruhi reputasi perusahaan.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh instrumen Perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi, hingga unit-unit operasional Perusahaan, kantor cabang dan karyawan. SOP telah disusun untuk setiap proses kerja guna memastikan adanya internal kontrol yang memadai dalam setiap proses kerja sehingga mengurangi potensi kesalahan atas penyimpangan yang mungkin terjadi.

Perusahaan memiliki unit kerja terpisah untuk melakukan Manajemen Risiko Operasional

(*Operational Risk Management* atau "ORM"). Tujuan utama dari keberadaan unit ini adalah bertindak sebagai fasilitator dari praktik-praktik ORM. Unit ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan dari kebijakan-kebijakan ORM, memantau implementasi dari kebijakan-kebijakan ORM di seluruh unit kerja yang ada, dan memastikan pengawasan yang memadai terhadap kebijakan dan prosedur. Tanggung jawab lainnya adalah melakukan pemantauan dan pengukuran dari indikator risiko operasional, hasil temuan audit internal terhadap kinerja kantor cabang dan tindakan perbaikannya, serta identifikasi dan penyelesaian masalah inti.

Perusahaan juga memiliki *Disaster Recovery Plan* ("DRP") yang melindungi dan mencegah terjadinya gangguan operasional dan memastikan berlanjutnya kegiatan operasional jika pada suatu saat terjadi gangguan operasional yang menyebabkan sistem utama Perusahaan tidak dapat berfungsi normal. Rencana ini diuji secara periodik untuk memastikan kesiapannya pada saat benar-benar terjadi bencana atau gangguan operasional. Data cadangan, server dan infrastruktur telekomunikasi berada pada lokasi DRC (*Disaster Recovery Center*) yang berada di luar Perusahaan.

Tim Audit Perusahaan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan proses kerja Perusahaan secara terus-menerus (di lapangan atau secara *remote*) atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur

Perusahaan. Tim ini bersifat independen terhadap unit-unit kerja yang mengambil risiko dan menjadi bagian dari organisasi Departemen Audit Internal. Setelah kajian audit selesai dilaksanakan, hasil kajian tersebut dan rencana penyempurnaannya kemudian dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit setiap tiga bulan sekali.

Risiko Kecurangan

Risiko kecurangan merupakan salah satu risiko operasional yang menyatu dalam kegiatan perusahaan dan secara signifikan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima. Selain itu, risiko ini juga mempengaruhi reputasi perusahaan dan dapat melibatkan perusahaan dalam pemeriksaan menyeluruh oleh regulator.

Perusahaan selalu mewaspadaai munculnya risiko kecurangan, baik secara internal maupun eksternal, dalam pengelolaan SDM Perusahaan, proses, sistem, dan dalam berhadapan dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Pengendalian risiko ini tertera dalam kebijakan dan prosedur yang ada di Perusahaan dan meliputi serangkaian aktivitas, termasuk pemberian dan penagihan pinjaman, perekrutan karyawan, pengamanan aset dan informasi Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan langkah-langkah untuk memonitor dan memitigasi risiko kecurangan, antara lain:

1. Program kesadaran dan pencegahan kecurangan yang komprehensif, termasuk sistem pelaporan

pelanggaran yang menyeluruh sehingga karyawan dapat dengan aman melaporkan terjadinya tindakan yang berpotensi menyebabkan kecurangan dan/atau tindakan tidak pantas lainnya.

2. Indikator peringatan dini atas kecurangan akan selalu diawasi oleh Departemen Audit Operasional. Pelanggaran terhadap indikator ini akan memicu pengkajian langsung terhadap transaksi, termasuk kunjungan tidak terjadwal.
3. Kerangka kerja pengawasan risiko di cabang yang akan mengukur kinerja kredit cabang atas pembiayaan baru dan yang sudah ada. Jika cabang melakukan transaksi yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, maka kewenangan cabang atas kredit akan dibekukan hingga penyebab penyimpangan tersebut teridentifikasi dan perbaikan dilakukan.

Kebijakan dan Prosedur

Perusahaan senantiasa melakukan pembaruan (*update*) dan sosialisasi mengenai SOP untuk memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap fungsi dalam organisasi. Seluruh SOP ditinjau secara independen dan diterbitkan oleh Unit Operational Policy and Procedure (OPP) yang merupakan bagian dari Unit Manajemen Risiko Operasional. Tinjauan yang dilakukan meliputi koordinasi dengan

Departemen Legal and Litigation untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Risiko Aset dan Liabilitas

Definisi

Risiko aset dan liabilitas didefinisikan sebagai risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Fokus utama manajemen aset dan liabilitas adalah melakukan koordinasi portofolio aset dalam rangka memaksimalkan profit bagi perusahaan dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Kegagalan dalam mengelola risiko ini secara memadai dapat membawa akibat kerugian keuangan, masalah regulasi, serta mempengaruhi reputasi perusahaan.

Mitigasi Risiko

Pengelolaan risiko aset dan liabilitas mencakup:

1. Penetapan kebijakan dan strategi terkait aset dan liabilitas Perusahaan oleh Departemen *Finance and Treasury*;
2. Pengumpulan dan analisa data atas indikator- indikator penting yang bergerak pada posisi aset dan liabilitas serta mengambil keputusan yang tepat;
3. Manajemen likuiditas yang mampu mengelola kecukupan dana dengan baik serta penempatan kelebihan dana pada instrumen-

instrumen yang *liquid* dan memberikan tingkat pengembalian yang baik;

4. Manajemen *gap* yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan memperkecil risiko liabilitas; dan
5. Manajemen *pricing* yang menjamin bahwa strategi penetapan suku bunga dapat menunjang proses pelaksanaan manajemen *gap*, likuiditas dan manajemen valas untuk memaksimalkan pendapatan.

4. Risiko Kepengurusan

Definisi

Risiko kepengurusan didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Mitigasi Risiko

Risiko kepengurusan dikelola melalui pembentukan komposisi kepengurusan (Direksi, Komisaris dan Manajemen) oleh para profesional yang kompeten di bidangnya dalam pengelolaan perusahaan pembiayaan.

5. Risiko Tata Kelola

Definisi

Risiko tata kelola merupakan risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan GCG, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan

pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

Mitigasi Risiko

Risiko tata kelola Perusahaan dikelola dengan menerapkan lima prinsip, yaitu:

1. **Transparansi**, bahwa Perusahaan memiliki informasi yang memadai dan relevan serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. **Akuntabilitas**, bahwa setiap pihak akan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, wajar, dan dikelola secara terukur;
3. **Pertanggungjawaban**, bahwa setiap karyawan berkewajiban untuk melakukan fungsi jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan;
4. **Independensi**, yaitu setiap karyawan Perusahaan memiliki fungsi yang independen dan tidak saling mendominasi; dan
5. **Kesetaraan dan kewajaran**, bahwa Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak lain yang terkait dengan Perusahaan berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

6. Risiko Pendanaan

Definisi

Risiko pendanaan didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

Pertumbuhan perusahaan sepenuhnya bergantung pada tersedianya fasilitas dari pinjaman bank dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk menyediakan pendanaan bagi pembiayaan baru. Perusahaan menggunakan berbagai sumber pendanaan termasuk pinjaman berjangka dalam mata uang lokal dan Dolar AS, obligasi dan MTN dalam mata uang lokal, pengaturan *joint financing* serta ekuitas modal sendiri untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Mitigasi Risiko

Komite Manajemen Risiko, Direksi dan Departemen Keuangan dan Treasuri (*Finance & Treasury*) bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas.

Risiko likuiditas diukur, dianalisa dan dipantau secara berkala baik harian, mingguan maupun bulanan. Analisis kesenjangan likuiditas memberikan wawasan mengenai ketidaksesuaian antara aliran kas masuk yang diharapkan dengan aliran kas keluar. Hal ini dikelola secara sentral oleh *Treasury* yang memiliki akses langsung dan diberikan wewenang akses ke pihak bank dan pasar uang.

Perusahaan mempertahankan diversifikasi sumber dana yang terdiri atas pinjaman dalam mata uang lokal dan asing, obligasi dan efek-efek berjangka menengah dalam rupiah, program *joint financing* dengan institusi keuangan di Indonesia, serta arus kas internal Perusahaan.

Risiko pada nilai tukar mata uang semata-mata berasal dari eksposur Perusahaan terhadap pinjaman mata uang asing, yang ditutup sepenuhnya dengan lindung nilai melalui transaksi *swap* dengan bank terkemuka di Indonesia.

Risiko tingkat suku bunga muncul karena paparan Perusahaan terhadap pendanaan suku bunga mengambang. Pembatasan telah ditetapkan terhadap jumlah proporsi pendanaan suku bunga mengambang yang dapat dimiliki Perusahaan pada waktu tertentu. Seluruh peminjaman menggunakan mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga mendapatkan lindung nilai secara menyeluruh menggunakan kontrak *swap* dengan bank-bank terkemuka di Indonesia. Untuk pinjaman dalam negeri yang dilakukan Perusahaan, mayoritas transaksi dilakukan dalam suku bunga tetap rupiah.

Hingga 31 Desember 2016, seluruh piutang dari portofolio pinjaman Perusahaan tercatat dalam suku bunga tetap rupiah, sementara itu kurang dari 2,1% dari jumlah utang Perusahaan juga tercatat dalam suku bunga mengambang (*floating rate*). Selanjutnya,

seluruh pinjaman dalam mata uang asing mendapatkan lindung nilai tanpa adanya ketidaksesuaian pada tenor, mata uang dan risiko suku bunga.

7. Risiko Pembiayaan (Risiko Kredit)

Definisi

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian terhadap pengembalian pinjaman yang merupakan akibat dari kegagalan peminjam (debitur) untuk memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman atau gagal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak pembiayaan. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dikarenakan perusahaan menjalankan kegiatan pinjaman.

Risiko kredit juga dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan faktor geografis, produk, konsumen, jaminan dan industri. Risiko kredit juga dapat dipengaruhi oleh kejadian yang bersifat eksternal seperti meningkatnya inflasi, menurunnya harga barang komoditas dan naiknya tingkat suku bunga.

Mitigasi Risiko

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan yang ketat dan proses menyeluruh mencakup target pasar, persetujuan penerimaan kredit, penetapan tingkat bunga, pembatasan limit dan eksposur, pengenalan masalah, manajemen penagihan dan penyelesaian kredit, serta pengakuan kerugian. Selain itu, Perusahaan memiliki fondasi Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System* atau "MIS"), yang mampu memberikan informasi kinerja portofolio dalam berbagai tingkatan dan segmen.

Dewan Komisaris memberikan wewenang untuk otoritas persetujuan kredit kepada Direksi yang kemudian akan bertanggung jawab untuk membentuk Komite Kredit yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan Perusahaan. Eksposur risiko yang melebihi wewenang Direksi akan dipaparkan ke Dewan Komisaris untuk evaluasi dan rekomendasi.

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur pendelegasian wewenang untuk otoritas persetujuan kredit. Anggota Komite Kredit yang diberi wewenang memberikan persetujuan atas semua keputusan kredit. Anggota Komite Kredit dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, pengalaman, kompeten dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas jabatannya.

MIS yang kokoh telah ditempatkan dan memberikan informasi detail atas konsentrasi portofolio, perilaku pelanggan dan kinerja. Hal ini memungkinkan pendeteksian terhadap perkembangan hal-hal yang memburuk pada tahap awal, yang memungkinkan perbaikan dapat diimplementasikan pada saat yang tepat. Perusahaan secara terus-menerus melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur serta melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi terakhir.

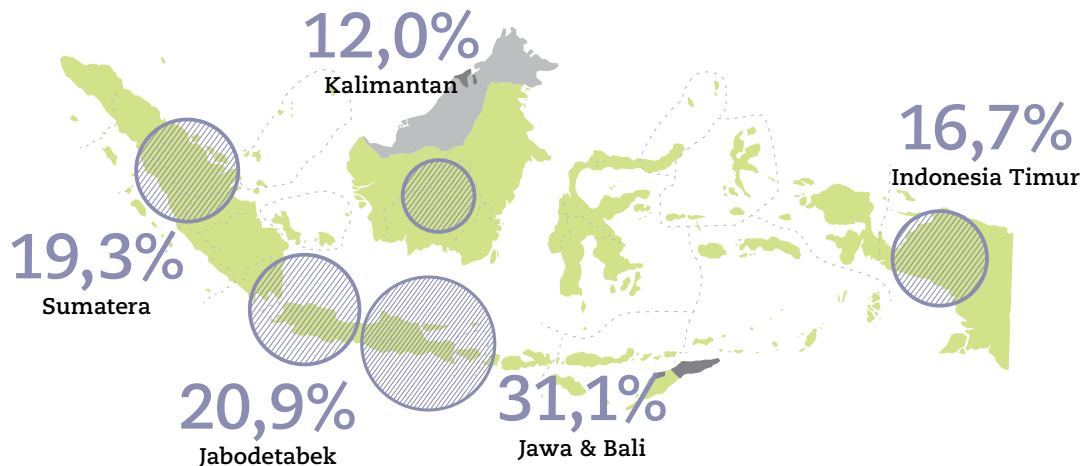
Kebijakan Diversifikasi

Konsentrasi terhadap risiko kredit dapat muncul jika konsumen menjalankan aktivitas usaha yang serupa atau aktivitas usaha di wilayah yang sama. Konsentrasi ini juga dapat meningkat apabila konsumen memiliki produk atau karakteristik yang serupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman pada saat kondisi ekonomi atau lainnya tengah memburuk.

Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio sebagai strategi bisnis Perusahaan.

Portofolio Perusahaan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekitar 52,0% dari piutang terpusat di wilayah pulau Jawa dan Bali, termasuk daerah metropolitan di Jakarta. Diversifikasi secara geografis ini didorong oleh melemahnya harga komoditas di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Grafik 24 – PETA DIVERSIFIKASI BERDASARKAN PIUTANG DIKELOLA



Selain itu, Perusahaan juga melakukan diversifikasi atas pembiayaan meliputi pembiayaan mobil, motor, alat berat, mesin dan peralatan lain serta properti dengan menasar segmen konsumen yang beragam, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Cadangan Kerugian Pinjaman

Perusahaan memperhitungkan Cadangan Kerugian Pinjaman (*Loan Loss Provisions* atau LLP) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (PSAK 55).

Untuk segmen ritel, Perusahaan menggunakan Model Probabilitas Wanprestasi (*Probability of Default*) berdasarkan metodologi *Roll Rates (Net)*, dengan melakukan penyesuaian nilai tagihan berdasarkan perkiraan nilai agunan. Untuk segmen komersial,

pengakuan penurunan nilai dihitung sebagai berikut:

1. Untuk debitur dengan fasilitas kurang dari Rp10 miliar dan peminjam dengan eksposur di atas Rp10 miliar dan tanpa bukti obyektif adanya penurunan nilai, ketentuan pengenalan dihitung secara kolektif menggunakan Model Probabilitas Wanprestasi berdasarkan *Migration Loss*.
2. Peminjam dengan eksposur di atas Rp10 miliar dievaluasi secara individual.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko yang dijalankan, dan

melakukan mitigasi risiko yang diperlukan atas hal-hal yang dinilai masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Direktorat ERM bersama-sama dengan bagian terkait di Perusahaan melakukan pengawasan aktivitas pengelolaan risiko yang dilakukan Perusahaan, dan hasilnya dilaporkan secara berkala ke Dewan Komisaris lewat Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit.

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan, mengawasi penerapannya, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, sementara itu Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian internal Perusahaan, mengawasi

penerapannya melalui laporan yang disampaikan oleh Internal Audit Perusahaan dan memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan POJK No. 10/POJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, BFI telah melakukan penelaahan dan melaporkan hasil penilaian sendiri atas penerapan manajemen risiko Perusahaan per tanggal *cut-off* laporan per 31 Desember 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 117 – JENIS RISIKO

No.	Jenis Risiko	Hasil Penilaian
1.	Risiko Pembiayaan	Rendah
2.	Risiko Operasional	Rendah ke Medium
3.	Risiko Kepengurusan	Rendah
4.	Risiko Strategi	Rendah
5.	Risiko Tata Kelola	Rendah
6.	Risiko Aset dan liabilitas	Rendah ke Medium
7.	Risiko Dukungan Dana	Rendah
	Bobot Risiko Keseluruhan	Rendah

Laporan tersebut telah dibuat sesuai dengan kriteria dan panduan yang ditetapkan oleh pihak OJK selaku regulator dengan hasil yang menunjukkan bahwa keseluruhan risiko Perusahaan masuk dalam kategori Rendah Risiko (*Low Risk*), yang berarti bahwa efektivitas sistem manajemen risiko telah berjalan dengan baik sepanjang 2016.

PENCAPAIAN PENTING MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2016

Pencapaian penting Perusahaan pada 2016 dalam manajemen risiko, antara lain:

1. Perbaikan segmentasi pembiayaan baru dan kualitas piutang yang dibiayai;
2. Perbaikan dan peningkatan manajemen penagihan; dan
3. Perbaikan biaya penyisihan atas potensi kerugian.

Kinerja keuangan berkelanjutan yang ditunjukkan oleh Perusahaan telah membuahkan penilaian yang positif dari lembaga pemeringkat kredit independen, Fitch Ratings.

Berdasarkan penilaian Fitch Ratings, BFI memperoleh penyesuaian peringkat berupa kenaikan peringkat dari A+(idn) menjadi AA-(idn) di akhir 2016. Kenaikan Peringkat Nasional BFI mencerminkan kinerja keuangan dan neraca yang baik di tengah tantangan ekonomi

makro di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam peningkatan rasio profitabilitas dan kapitalisasinya. Peringkat tersebut juga mencerminkan profil *stand-alone* yang kuat dari perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. Rasio NPL tetap di bawah rata-rata industri sebesar 2,2%, walaupun target pasarnya adalah segmen *low-end*. Fitch Ratings percaya bahwa strategi perusahaan untuk memfokuskan kembali pada bisnis *refinancing* yang merupakan kompetensi intinya dan pengurangan *exposure* terhadap pembiayaan mobil dan alat berat akan bermanfaat untuk kualitas asetnya dalam jangka pendek hingga menengah.

FOKUS MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2017

Perusahaan telah menetapkan fokus implementasi manajemen risiko Perusahaan selama 2017 sebagai berikut:

1. Memperkuat *targeting* calon debitur dengan berpedoman kepada *risk appetite* yang sehat dan estimasi serta mitigasi risiko yang sistematis;
2. Pengembangan mitigasi risiko berdasarkan pemeringkatan risiko operasional dan pembiayaan; dan
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan berdasarkan profil risiko dan pengembangan infrastruktur penagihan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

URAIAN SINGKAT MENGENAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Bagi BFI, Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian dari proses bisnis yang terintegrasi antara kegiatan dan peraturan sebagai langkah untuk mencapai tujuan Perusahaan. Melalui Sistem Pengendalian Internal, kegiatan bisnis Perusahaan berjalan efektif dan efisien, menciptakan laporan keuangan yang andal, serta menjaga aset Perusahaan.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal di BFI telah mencerminkan bahwa Perusahaan memiliki catatan keuangan dan operasional bisnis yang sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengendalian keuangan, Perusahaan melakukan pemisahan fungsi pencatatan dengan pengeluaran *cash*. Demikian juga dalam proses persetujuan pengeluaran anggaran yang sudah dilakukan secara berjenjang melalui proses *check and re-check*. Sedangkan dalam pengendalian operasional, Perusahaan menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada sudah cukup baik.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal mencakup komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Direksi dan seluruh karyawan harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan Perusahaan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Masing-masing unit kerja harus mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasionalnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar Perusahaan.

3. Aktivitas Pengendalian

Dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan senantiasa dilakukan proses pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain, melalui pengaturan mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

4. Sistem Informasi dan Komunikasi

Perusahaan menyelenggarakan proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif.

5. *Monitoring*

Kegiatan monitoring dilakukan dalam proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal, termasuk fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Direksi beserta seluruh karyawan berperan aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara keseluruhan. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan diimplementasikan, antara lain, dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha, pedoman operasional, prosedur, petunjuk pelaksanaan, instruksi kerja, dan dokumen acuan Perusahaan lainnya.

Secara keseluruhan, Perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian berjenjang yang meliputi organ tata kelola Perusahaan, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris: melakukan pengawasan dan memberikan pengarahannya terkait proses pengelolaan Perusahaan, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Direksi: menerapkan kebijakan dan prosedur kerja sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara konsisten, antara lain, dengan pengelolaan manajemen risiko, penetapan rencana strategis Perusahaan, serta pembagian

- tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Direksi;
- Audit Internal: bertanggung jawab dalam melaksanakan audit di Perusahaan, dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan pengendalian internal dalam berbagai kegiatan operasional dan keuangan Perusahaan;
 - Direksi menindaklanjuti segala temuan audit berdasarkan laporan hasil Audit Internal; dan
 - Komite Audit: menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Audit Internal guna memberikan rekomendasi penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal. Komite Audit juga memastikan telah terdapat prosedur peninjauan atas informasi yang dikeluarkan Perusahaan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas laporan keuangan Perusahaan pada 31 Desember 2016. Evaluasi tersebut diselenggarakan oleh Departemen Audit Internal. Dalam melakukan penilaian, Departemen Audit Internal menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komite Audit.

Hasil evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal berupa rekomendasi hasil audit internal dan eksternal dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam mengambil langkah perbaikan atau menyempurnakan Sistem Pengendalian Internal maupun kebijakan yang sudah ada (perubahan prosedur, pedoman kerja, dan lain-lain) guna menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi serta pengamanan aset Perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2016, Sistem Pengendalian Internal Perusahaan atas laporan keuangan telah berjalan dengan efektif. Evaluasi yang telah dilakukan menjadi salah satu fondasi bagi Perusahaan untuk terus melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian yang dapat meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

KASUS HUKUM 2016

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan menghadapi beberapa perkara hukum sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
1.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 226PK/Pdt/2010 dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 613K/Pdt/2008 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 143/Pdt/2007/PT.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan, Perkara nomor 383/Pdt.G/2005/PN.Medan di Pengadilan Negeri Medan. 	<ul style="list-style-type: none"> Hendy Ong selaku Pemohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I, Jennifer selaku Pemohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II, <p>melawan:</p> <p>PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat.</p>	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hendy Ong dan Jennifer telah diputus ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 41PK/Pdt/2015 dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 1923K/Pdt/2012 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 434/Pdt/2011/PT.DKI di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Perkara nomor 382/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> PT. Abdi Sarana Nusa selaku Pemohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat I, Agus Himawan selaku Pemohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/ Tergugat II, Purnawati Samsurya selaku Pemohon Peninjauan Kembali III/ Pemohon Kasasi III/ Pembanding III/ Tergugat III, <p>melawan:</p> <p>PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat.</p>	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Abdi Sarana Nusa, Agus Himawan dan Purnawati Samsurya telah diputus ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 77PK/Pdt/2014 dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 45/Pdt.G/2004/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan. 	<p>PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melawan Drs. B. Maruli Situmorang selaku Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat.</p>	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
4.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 1085K/Pdt/2012 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 369/Pdt/2011/PT.Smg di Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. 	Djoko Tri Warno selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat.	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Djoko Tri Warno telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 3186K/Pdt/2013 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 214/Pdt/2013/PT.Bdg di Pengadilan Tinggi Bandung, Perkara nomor 46/Pdt.G/2012/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber. 	Hj. Enok Rubiah selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat.	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Hj. Enok Rubiah telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 415/Pdt/2012/PT.Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara nomor 35/Pdt.G/2011/PN.Mkt di Pengadilan Negeri Mojokerto. 	Edy Setiawan selaku Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/ Tergugat.	Edy Setiawan mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi belum menyerahkan Memori Kasasi sampai dengan saat ini.
7.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 3249 K/PDT/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 144/Pdt/2014/PT.DKI di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perkara nomor 374/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 	Gusnawati Ayank selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat, melawan: <ul style="list-style-type: none"> PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group selaku Turut Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/Turut Tergugat. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8.	Perkara nomor 304/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat, melawan: <p>Fransiskus Borgias selaku Tergugat I,</p> <p>Novy Sumadi selaku Tergugat II.</p>	Fransiskus Borgias mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
9.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 3375 K/PDT/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 78/Pdt/2014/PT.DKI di Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara nomor 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> PT. Pengelola Investama Mandiri (dahulu PT. Salindo Perdana Finance) selaku Pemohon Kasasi I/ Pemanding I/ Tergugat I, PT. Koexim Mandiri Finance selaku Pemohon Kasasi II/ Pemanding II/ Tergugat II, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi III/ Pemanding III/ Tergugat III, PT. Equity Development Finance selaku Pemohon Kasasi IV/ Pemanding IV/ Tergugat IV, PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku Pemohon Kasasi V/ Pemanding V/ Tergugat V, PT. Capitalinc Finance selaku Pemohon Kasasi VI/ Pemanding VI/ Tergugat VI, PT. CIMB Niaga Finance Indonesia (dahulu PT. Saseka Gelora Finance) selaku Pemohon Kasasi VII/ Pemanding VII/ Tergugat VII, <p>melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Tommy Sihotang, SH., LLM selaku Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Penggugat I, Dr. Juniver Girsang, SH.,MH selaku Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Penggugat II, Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku Turut Termohon Kasasi II/ Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10.	Perkara nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat, melawan: <ul style="list-style-type: none"> Ahesa Panji Buana selaku Tergugat, Lalu Eka selaku Turut Tergugat. 	Lalu Eka mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
11.	Perkara nomor 205/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan: <ul style="list-style-type: none"> Hermanto selaku Tergugat I, Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II. 	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Gugatan PT BFI Finance Indonesia Tbk secara verstek. Saat ini masih dalam proses pemberitahuan isi Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Hermanto dan Artina Yuni Dhartuty.
12.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 195K/PDT/2015, dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 78/Pdt/2014/PT.PLK di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Perkara nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Spt di Pengadilan Negeri Sampit. 	Andy Harun selaku Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat.	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Andy Harun telah diputus Niet Ontvankelijk (NO) oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
13.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Selamat Suyanto selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
14.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Ngatiwan selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
15.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Andri Rustiaji selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya.
16.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Sunarmen selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
17.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Titik Murda Ningsih selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
18.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.	Trimo selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
19.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 822 K/PDT.SUS-BPSK/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 24/PDT.Sus/2016/PN-Tbt di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 	Jhon Saputra selaku Pemohon Kasasi/ Termohon/ Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Pemohon/ Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
20.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 507 K/PDT.Sus-BPSK/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 2/Pdt.Sus/2016/PN.Tbt di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 	Siti Khairani Nasution (pasangan dan ahli waris dari Junaidi Pramana Windu) selaku Pemohon Kasasi/ Termohon/ Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Pemohon/ Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
21.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 11 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 19/Pdt/2015/PN.Dum di Pengadilan Negeri Dumai, Perkara Pengaduan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Pekanbaru. 	<ul style="list-style-type: none"> PT Asuransi Wahana Tata selaku Pemohon Kasasi/ Pelawan/ Teradu I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Turut Termohon Kasasi/ Turut Terlawan/ Teradu II <p>melawan:</p> <p>Sukatni selaku Termohon Kasasi/ Terlawan/ Pengadu.</p>	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Asuransi Wahana Tata telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
22.	Perkara nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Spt di Pengadilan Negeri Sampit.	Miftahul Muntaha selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sampit.
23.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 10/PDT/2016/PT.Bbl di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Perkara nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Pgp di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. 	<p>Tom Donnie selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sunkie alias Asen selaku Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II, Dewi selaku Turut Termohon Kasasi / Turut Terbanding/Turut Tergugat. 	Tom Donnie mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
24.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 418/PDT/2016/PT SBY Perkara nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Blt di Pengadilan Negeri Blitar. 	<ul style="list-style-type: none"> Mahesa Yoga Sunardi alias Gandi selaku Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I, Sunardi selaku Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Turut Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi / Pembanding/Turut Tergugat II, <p>melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cucuk Yuwono selaku Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat I, Tina Sugiarti selaku Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Penggugat II. 	Mahesa Yoga Sunardi, Sunardi, dan PT BFI Finance Indonesia Tbk mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Blitar.
25.	Perkara nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Tbn di Pengadilan Negeri Tuban.	Sugianang selaku Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/ Tergugat.	Sugianang mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya atas Putusan Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Niet Ontvankelijke).
26.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 229/PDT/2016/PT.Smg di Pengadilan Tinggi Semarang. Perkara nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus. 	Nuryanto selaku Pemohon Kasasi / Pembanding/ Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi / Terbanding/ Tergugat.	Nuryanto mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Kudus.
27.	Perkara nomor 207/Pdt.G/2015/PN.Amb di Pengadilan Negeri Ambon.	<p>Julius Noya selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Drs. Iksan Iskandar (pimpinan PT. Rianti Rezeki Abadi) selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II, Dit Lantas Polda Maluku selaku Tergugat III, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku Tergugat IV. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Ambon.
28.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 58/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 	Bokar Harahap selaku Pemohon Kasasi/ Termohon/ Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Pemohon/ Teradu.	Bokar Harahap mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
29.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 	Samali selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
30.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 508 K/PDT.Sus-BPSK/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 19/Pdt.sus-BPSK/2016/PN-RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 	Mulyono selaku Pemohon Kasasi/ Termohon/ Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Pemohon/ Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
31.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 1055 K/PDT.Sus-BPSK/2016 dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 	Maulud Harahap selaku Pemohon Kasasi/ Termohon/ Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/ Pemohon/ Teradu.	Berdasarkan situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan Kasasi yang diajukan oleh Maulud Harahap telah ditolak perbaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
32.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Abdul Rozak selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
33.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
34.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Berlin Siahaan selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
35.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Hasan Basri Ginting selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
36.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Sulaiman selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
37.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 270/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN-Cbi di Pengadilan Negeri Cibinong, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bogor. 	Ciarli selaku Termohon/ Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon/ Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
38.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 86/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Plk di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Perkara Pengaduan nomor 34/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/V/2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangkaraya. 	<p>Christian Sancho selaku Termohon Kasasi I/ Termohon I/ Pengadu melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi/ Pemohon/ Teradu PT. Asuransi Sinar Mas selaku Turut Termohon Kasasi/ Turut Termohon/ Teradu II. 	Christian Sancho mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya.
39.	Perkara nomor 163/PDT.G/2016/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok.	<p>Fia Farida Damayanti, Mieke Banaatmadja, H. R Perry Achmad Fuqron, R Barin Rizal Al Amin, M Iqbal Danaatmadja, RD A Umarlufti Danaatmadja dan Tino Akhmat Syafrudin selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Balai Lelang Indonesia selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II, Edi Supriadi selaku Tergugat III, Dyah Petty selaku Tergugat IV, Notaris RMS Soenarto selaku Tergugat V, Wikanto Panca Atmanto selaku Tergugat VI, Notaris Isa Meilia selaku Tergugat VII, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor selaku Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat II. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Depok.
40.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Hotmatua Sitompul selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
41.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Herry (selaku ahli waris dari Bambang Yamin) selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
42.	Perkara nomor 82/PDT.G/2016/PN.Ktg di Pengadilan Negeri Kotamobagu.	<p>Muhdar Potabuga selaku Penggugat melawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Turut Tergugat. 	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.
43.	Perkara nomor 7/PDT.G/2016/PN.Srl di Pengadilan Negeri Sarolangun.	Relawati selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.	Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun telah menolak Gugatan Relawati. Saat ini sedang dalam masa tenggang pengajuan upaya hukum banding oleh Relawati kepada Pengadilan Tinggi Jambi.

No.	Nomor Perkara	Subyek Hukum	Status
44.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tomohon.	Nova Naomi Wajongkere selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tomohon.
45.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 145/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 	Badal Gultom selaku Termohon / Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon/ Teradu	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
46.	<ul style="list-style-type: none"> Perkara nomor 150/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang, Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara. 	Supriyadi selaku Termohon / Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon/ Teradu	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
47.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan.	Nova Zein selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan.
48.	Perkara nomor 39/PDT.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO Tbk selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Debitur)	Sedang dalam proses pemaparan rencana perdamaian oleh PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO Tbk di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
49.	Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	Jumiin selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU ANGGOTA DIREKSI YANG MENJABAT PADA 2016

Selama 2016, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat oleh OJK, Otoritas Pasar Modal atau pihak berwenang lainnya.

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN

KEBERADAAN AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dengan mengacu kepada prinsip keterbukaan dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pasar modal. Penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi, baik internal maupun eksternal. Penyebaran informasi Perusahaan ditunjukkan untuk membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta persepsi positif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Perusahaan.

BFI menyediakan akses informasi dan data Perusahaan seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan dan investor melalui situs web www.bfi.co.id. Situs tersebut memuat berbagai informasi mengenai profil, produk dan jasa, laporan kinerja dan keuangan Perusahaan, dan lain-lain.

Perusahaan juga memiliki pusat informasi sebagai berikut:

1. *Customer Care Hotline*: 1500018
2. *Email Customer Care*: customercare@bfi.co.id
3. *SMS Customer Care*: 08158 767 234
4. Media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan LinkedIn:
 - www.facebook.com/BFIFinanceID
 - www.twitter.com/bfifinance
 - www.instagram.com/bfifinance
 - www.linkedin.com/company/pt-bfi-finance-indonesia-tbk

Informasi lainnya dapat diperoleh dengan menghubungi Kantor Pusat BFI secara langsung dengan alamat sebagai berikut:

PT BFI Finance Indonesia Tbk

u.p. Departemen Corporate Secretariat
 BFI Tower
 Sunburst CBD Lot 1.2
 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
 BSD City
 Tangerang Selatan 15322
 Indonesia
 Tel: (62-21) 2965 0300, 2965 0500
 Fax: (62-21) 2966 0757, 2966 0758
 E-mail: corsec@bfi.co.id
 Situs web: www.bfi.co.id

KOMUNIKASI PERUSAHAAN

Penyediaan informasi dan data Perusahaan dan komunikasi dengan *stakeholder* dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut:

- Komunikasi Eksternal (Umum)
- Komunikasi Internal
- *Corporate Branding* dan Promosi Produk

Komunikasi Eksternal (Umum)

Kegiatan komunikasi Perusahaan secara umum merupakan sarana pengelolaan dan penyebaran informasi Perusahaan ke berbagai media massa serta pihak ketiga lainnya sebagai pemenuhan syarat keterbukaan informasi serta menjalin hubungan harmonis kepada seluruh pemangku kepentingan dan kalangan masyarakat umum. Perusahaan menyampaikan informasi yang diperlukan dengan tepat waktu dan akurat guna memberikan informasi yang positif atas kondisi-kondisi yang terjadi dalam bisnis Perusahaan. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik yang dipegang teguh oleh BFI.

Fungsi komunikasi eksternal Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi di semua media komunikasi Perusahaan;

2. Mengembangkan materi publikasi untuk meningkatkan profil Perusahaan dan kegiatan pemasaran perusahaan;
3. Memastikan adanya konten yang *up-to-date* dan sesuai, membuat perbaikan fungsi, menerapkan dan memperluas strategi media sosial untuk meningkatkan profil Perusahaan;
4. Memastikan komunikasi dan pedoman merek Perusahaan berjalan dengan baik dan memonitor segala hal yang berkaitan dengan merek Perusahaan;
5. Bertanggung jawab atas isi dan informasi dalam setiap media komunikasi dan materi promosi, baik bersifat *above-the-line* maupun *below-the-line*, internal maupun eksternal;
6. Bekerja sama dengan unit-unit lain yang terkait untuk memastikan adanya fungsi komunikasi yang terintegrasi dan saling melengkapi; dan
7. Mendukung semua kegiatan atau acara Perusahaan yang berjalan baik internal maupun eksternal.

Perusahaan memiliki *Unit Communication & Event* bersama dengan Departemen *Corporate Secretariat* untuk menangani komunikasi eksternal Perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- **Mengelola Situs Web Perusahaan**
Situs web Perusahaan, www.bfi.co.id, menjadi fasilitas

eksternal yang memberikan informasi terkini terkait dengan pencapaian kinerja keuangan Perusahaan secara triwulan, keterbukaan informasi terkait aksi korporasi (*corporate action*), serta kemudahan akses informasi terkini tentang Perusahaan. Situs tersebut senantiasa diperbarui sehingga memungkinkan pelanggan dan masyarakat mempelajari tentang program-program promosi terbaru, kesaksian pelanggan, dan jasa-jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Perusahaan. Pengunjung situs web juga dapat berkomunikasi dengan staf *Customer Care* seputar produk-produk jasa pembiayaan, menyampaikan keluhan atau saran, hingga menanyakan tentang lowongan pekerjaan dan beasiswa. Pada 2016, situs web BFI hadir dengan wajah baru yang dilengkapi dengan fungsi komunikasi dan akses data yang semakin memudahkan kalangan masyarakat umum, pelanggan, investor dan calon investor, serta pihak regulator dalam mengetahui berbagai berita seputar kinerja, aktivitas dan pencapaian Perusahaan terkini.

BFI telah melakukan proses pengembangan dan pengkinian situs web Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

- **Jejaring Sosial Perusahaan**
BFI senantiasa memperhatikan perkembangan dunia media sosial guna memudahkan komunikasi interaktif

dengan seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan membuka saluran-saluran komunikasi *online* melalui sarana Facebook, Twitter, Instagram dan LinkedIn sebagaimana telah dirinci secara detail pada bagian Aspek Pemasaran dalam Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 135-139).

- **Siaran Pers**

BFI menerbitkan siaran pers dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik. Informasi yang disampaikan BFI dimuat dalam segala jenis media atau sarana komunikasi, baik cetak maupun *online* di seluruh penjuru Indonesia.

- **Jalur Komunikasi Lainnya**

Perusahaan juga memiliki jalur-jalur komunikasi untuk memudahkan interaksi dengan para pelanggan maupun calon pelanggan, yaitu:

1. Fasilitas SMS *Customer Care*:
08158 767 234
2. *Customer Care Hotline*: 1500018
3. Email *Customer Care*:
customercare@bfi.co.id
4. Media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan LinkedIn:
 - www.facebook.com/BFIFinanceID
 - www.twitter.com/bfifinance
 - www.instagram.com/bfifinance
 - www.linkedin.com/company/pt-bfi-finance-indonesia-tbk

Komunikasi Internal

Perusahaan berkeyakinan bahwa karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, komunikasi internal senantiasa diselenggarakan oleh BFI guna memastikan ketersediaan dan sirkulasi informasi mengenai perkembangan terkini dari Perusahaan serta informasi-informasi umum lainnya yang relevan dengan berbagai aktivitas bisnis, dengan tujuan untuk menjalin kebersamaan, keterbukaan dan persamaan informasi, serta meningkatkan kualitas interaksi antara pihak manajemen Perusahaan dengan para pemangku kepentingan internal khususnya para karyawan. Bidang Komunikasi Internal diatur dan dikelola oleh beberapa unit kerja di Perusahaan yang bekerja sama membentuk tim khusus redaksi untuk mengorganisir kegiatan dalam bentuk media cetak dan media elektronik, yaitu *Unit Communication & Event* bersama Departemen Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) dan Departemen *Corporate Secretariat*.

Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal antara lain:

- **Media Elektronik**
Portal Internal *BFI Learning Center* (disingkat "BLC") dan *email blast* merupakan pusat sarana informasi elektronik khusus bagi para karyawan yang memuat berbagai informasi terkini yang terkait aktivitas bisnis Perusahaan, aktivitas-aktivitas karyawan, sarana berbagi informasi dari

karyawan untuk karyawan, informasi umum seputar tips-tips yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, dan kampanye hidup sehat serta peduli lingkungan.

- **Pertemuan**
Perusahaan menyelenggarakan pertemuan yang berisi dialog dan *sharing* dari para manajemen senior BFI dan pembicara eksternal kepada para karyawan mengenai topik-topik terkini, baik yang berhubungan dengan aktivitas bisnis Perusahaan maupun pengembangan kepribadian.

Perusahaan tidak lagi membuat sarana komunikasi media cetak (seperti buletin) sebagai sarana komunikasi internal dan lebih memilih konsep bebas kertas (*paperless*) guna melestarikan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kebersihan lingkungan kantor yang bebas dari sampah kertas, meningkatkan efisiensi biaya dengan memaksimalkan jalur komunikasi melalui sarana elektronik; seperti komunikasi intensif melalui surat elektronik (*email*) dan informasi di situs web Perusahaan, serta kontribusi positif terhadap isu pemanasan global.

Corporate Branding dan Promosi Produk

Perusahaan memahami pentingnya peran bagian *corporate branding* dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang dapat mencerminkan nama dan citra baik Perusahaan kepada publik; terutama para pemangku

kepentingan eksternal; secara efektif dan efisien. Fungsi utama dari bagian *corporate branding* adalah membuat standarisasi dan batasan-batasan baku lainnya tentang segala hal yang terkait dengan identitas Perusahaan dan cara-cara yang efektif untuk mengkomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan eksternal dan internal.

Fungsi dari *corporate branding* dan promosi produk adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan, memonitor dan menganalisa strategi pemasaran secara nasional setiap jangka waktu tertentu sesuai kebijakan Perusahaan;
- Menyusun usulan strategi promosi secara nasional melalui hasil analisa dan kesiapan unit *Promotion*;
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diikuti Perusahaan sebagai sarana promosi Perusahaan;
- Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam upaya pencapaian target promosi;
- Bertanggung jawab atas setiap desain dan ketersediaan materi promosi, baik bersifat *above-the-line* (ATL) maupun *below-the-line* (BTL), internal maupun eksternal; dan
- Memastikan setiap desain dan materi promosi yang memuat merek telah sesuai dengan pedoman merek Perusahaan.

Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mendukung *corporate branding* pada 2016, antara lain:

- Memantau standarisasi berbagai atribut yang berhubungan dengan identitas Perusahaan;
- Memberikan konsultasi dan bantuan ke berbagai unit kerja di Perusahaan untuk mendukung berbagai aktivitas dan acara resmi dari Perusahaan atau melibatkan partisipasi sponsor dari Perusahaan agar selaras dengan aturan-aturan standar identitas Perusahaan;
- Memberikan konsultasi dan bantuan untuk mendukung kampanye produk-produk pembiayaan dari Perusahaan; dan

- Memastikan bahwa segala atribut yang dipergunakan dan membawa nama Perusahaan, baik untuk kegiatan tingkat nasional maupun lokal di kantor cabang, telah sesuai dengan standarisasi identitas Perusahaan.

Perusahaan melalui Unit *Promotion* memprioritaskan aktivitas-aktivitasnya pada berbagai jenis kegiatan promosi dari produk-produk jasa pembiayaan Perusahaan, baik yang dilakukan dalam skala nasional maupun lokal oleh tiap kantor cabang. Fungsi utama unit ini adalah mengkoordinasikan bentuk dan jenis promosi yang perlu dijalankan oleh Perusahaan dalam tingkat nasional maupun lokal per wilayah kantor cabang agar dapat mendukung target

penjualan yang ditetapkan oleh tiap unit manajemen produk secara maksimal.

Program promosi dan kegiatan menarik diselenggarakan dengan dukungan berbagai media publikasi sebagai upaya untuk mengkomunikasikan manfaat dan kelebihan dari jasa pembiayaan Perusahaan yang merupakan wujud apresiasi kepada para pelanggan dan masyarakat. Pada dasarnya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan sedapat mungkin didasarkan pada empat aspek, yaitu: *branding*, penjualan, hiburan dan CSR. Kedua bagian yang disebut terakhir ditangani khusus dengan kerja sama yang erat antara Unit *Communication & Event* dengan Unit CSR Perusahaan.

PEMBAYARAN PUNGUTAN OJK

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan POJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, selama 2016, Perusahaan telah melakukan lima kali pembayaran pungutan kepada OJK dengan data sebagai berikut:

Tabel 118 – PEMBAYARAN PUNGUTAN OJK

No.	Jenis Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah (Rp)
1.	Adjustment 2015	12 April 2016	236.217.515
2.	Tahap I	12 April 2016	1.087.954.088
3.	Tahap II	13 Juli 2016	1.324.171.603
4.	Tahap III	14 Oktober 2016	1.324.171.575
5.	Tahap IV	27 Desember 2016	1.324.171.575

KORESPONDENSI DENGAN OJK DAN BEI

Selama 2016, Perusahaan telah menyampaikan 48 kali korespondensi kepada OJK dan 42 kali kepada BEI.

HUBUNGAN INVESTOR

Fungsi utama Hubungan Investor adalah untuk membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan para investor, analis, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi dilakukan, antara lain, dengan penyampaian *analyst meeting* (termasuk paparan publik), konferensi dan kunjungan investor.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab dari bagian ini, antara lain:

- Menjembatani komunikasi antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan eksternal, terutama para pemegang saham dan lembaga-lembaga Pemerintah yang terkait dalam hal pasar modal dan investasi;
- Bertindak sebagai koordinator dalam pembuatan Laporan Tahunan Perusahaan dalam bentuk buku dan CD interaktif, serta menangani proses publikasi secara online di situs web Perusahaan, www.bfi.co.id, dan
- Bertindak sebagai penyelenggara, koordinator utama dan pengawas dari berbagai kegiatan Perusahaan, seperti RUPS dan Paparan Publik.

PEJABAT HUBUNGAN INVESTOR



Koon Pek, Ng
Head of Investor Relations

Warga negara Malaysia, lahir pada 1977, usia 39 tahun (per 31 Desember 2016), berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai *Head of Investor Relations* sejak Januari 2011. Sebelum bergabung dengan BFI, beliau adalah Analis di sebuah perusahaan konsultan keuangan korporat di Kuala Lumpur (Nikkei Pacific Corporate Advisors) pada 2001 dan mengikuti Program Manajemen Keuangan di General Electric pada 2002-2004. Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President Equity Capital Markets* di CIMB Investment Bank di Malaysia dan Indonesia sampai tahun 2009. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Arts* atau B.A. (Hons) di bidang Ekonomi Industri dari University of Nottingham, Inggris, pada 1999, dan *Master of Science* atau M.Sc. di bidang Sekuritas, Investasi dan Perbankan Internasional dari ISMA Centre di University of Reading, Inggris, pada 2000.

KEGIATAN HUBUNGAN INVESTOR TAHUN 2016

Program kerja yang telah dilaksanakan Hubungan Investor pada 2016 dapat dilihat di Tabel 119.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 UUPU, Perusahaan senantiasa memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang keberadaannya dapat membantu Manajemen Perusahaan dalam mengidentifikasi potensi transaksi perdagangan orang dalam dan transaksi benturan kepentingan. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus disimpan oleh Sekretaris Perusahaan. Perusahaan mendapatkan Daftar Pemegang Saham dari KSEI setiap bulan. Sedangkan untuk Daftar Khusus dibuat oleh Perusahaan sendiri, yang mana Daftar Khusus tersebut memuat keterangan atas saham-saham yang dimiliki oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan maupun keluarganya, baik saham di dalam Perusahaan maupun pada perusahaan lain dan tanggal perolehan saham tersebut, serta diperbarui setiap terjadi perubahan.

Tabel 119 – KEGIATAN HUBUNGAN INVESTOR TAHUN 2016

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan Tahun 2016
Analyst Meetings (termasuk Paparan Publik)	4 (2 <i>analyst meetings</i> , 2 paparan publik)
Konferensi	2 (Jakarta, Indonesia)
Kunjungan Investor	41 kali

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

KEBERADAAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Dalam mengembangkan konsep GCG, BFI telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika Perusahaan. BFI mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi konsep kode etik Perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam membangun mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Prinsip Transparansi diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji;
- Prinsip Kemandirian diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing;
- Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- Prinsip Kewajaran diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ISI KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan terdiri dari etika bisnis dan etika perilaku.

Etika bisnis menjelaskan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai dasar Perusahaan yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Sedangkan etika perilaku merupakan seperangkat aturan nilai yang mencerminkan suatu sikap dan komitmen dalam memenuhi ketentuan perilaku yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam menjaga nama baik, kerahasiaan, serta hal-hal penting lainnya yang berpengaruh pada reputasi Perusahaan.

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI MANAJEMEN DAN SELURUH KARYAWAN

BFI berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya Perusahaan dan karakter sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Guna mendukung penerapan kode etik, Perusahaan mewajibkan beberapa hal berikut:

- Kode etik yang ditetapkan Perusahaan berlaku bagi seluruh karyawan;
- Kode etik tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan; dan
- Manajemen memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan kode etik tersebut.

PENGUNGKAPAN BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki nilai-nilai dasar yang dianjurkan untuk dipahami dan dipatuhi sebagai budaya Perusahaan. Nilai-nilai dasar Perusahaan yang disingkat menjadi G.R.E.A.T. memiliki arti sebagai berikut:

- Giat Memperbaiki Diri secara Berkesinambungan;
- Realisasikan Saling Menghormati dan Peduli;
- Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal;
- Absolut dalam Integritas; dan
- Tim Kerja yang Solid dan Saling Percaya.

Pemahaman dan kepatuhan terhadap budaya Perusahaan tersebut sangat penting dalam menjaga pertumbuhan serta kesinambungan usaha.

PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

Dengan mengikuti ketentuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang telah ditetapkan, pelapor menyampaikan laporan pelanggaran dengan memenuhi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen Perusahaan.

PEMERIKSAAN TERLAPOR

Berdasarkan laporan pelanggaran yang diterima atas terlapor karyawan BFI, Direksi menugaskan Departemen Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Presiden Direktur.

PENETAPAN SANKSI DISIPLIN

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direksi dapat mengambil keputusan atas penerapan sanksi disiplin karyawan, dan keputusan yang diambil telah mengikat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan sanksi disiplin dilaksanakan oleh Direksi untuk sanksi disiplin sedang dan berat, sedangkan sanksi disiplin ringan dilaksanakan oleh kepala unit kerja terkait.

PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Secara berkelanjutan, BFI melakukan pemantauan terhadap penegakan etika bisnis dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan yang terdiri dari perwakilan Departemen Audit Internal dan *Human Capital* dan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi sesuai jenis dan tingkatan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan BFI senantiasa menjunjung tinggi persaingan usaha yang adil, nilai sportivitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), konflik kepentingan, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

BFI juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang antikorupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara konsisten yang berkaitan dengan pelanggan yang bermasalah dengan rekomendasi dari Departemen Hukum dan Litigasi (*Legal and Litigation*).

TRANSPARANSI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prinsip dan Kebijakan

Perusahaan telah memiliki prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip GCG tanpa adanya benturan kepentingan dalam prosesnya. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan senantiasa menghormati prinsip kejujuran dan kemandirian kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Prosedur tersebut juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata nilai Perusahaan yang menjunjung tinggi kinerja, karakter dan semangat bekerja.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa serta hubungan dengan pemasok, maka diterapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Menerapkan Memo Internal dan Prosedur Operasional untuk pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.
2. Proses pengadaan barang dilakukan berdasarkan nominal dan tingkat otoritas, khususnya di kantor cabang untuk mempercepat proses dalam pemenuhan barang dan jasa di Perusahaan. Untuk pengadaan barang di atas nominal tertentu, dilakukan secara terpusat di kantor pusat, baik untuk persetujuan pengadaan barang dan jasa maupun pengadaannya.
3. Bagi pemasok utama, baik pemasok barang maupun jasa, diwajibkan untuk menyerahkan dokumen legalitas secara lengkap, untuk menjamin hak dan kewajiban dari Perusahaan maupun pemasok dilakukan sesuai dokumen yang ada.
4. Dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan telah diatur larangan bagi setiap karyawan untuk menerima janji atau pemberian dalam bentuk apapun dari pemasok.
5. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala untuk seluruh pemasok, untuk memastikan bahwa para pemasok tersebut dapat menunjang aktivitas Perusahaan.

Sistem Pengadaan

Perusahaan menyelenggarakan proses pengadaan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan: pembuatan rencana pengadaan;
2. Persiapan: kerangka acuan kerja, syarat prakualifikasi, dokumentasi pengadaan, strategi metode pemilihan penyedia barang dan jasa;
3. Pemilihan barang dan jasa: mengumumkan atau mengundang vendor yang memiliki sertifikasi dan prakualifikasi, evaluasi penawaran dan negosiasi, penetapan pemenang, proses kontrak; dan
4. Penggunaan dan manajemen aset Perusahaan.

Sistem tersebut dijalankan secara terbuka dan kompetitif dengan mengikutsertakan calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerja yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Selain melalui tahapan pengadaan barang

Tabel 120 – PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN PADA 2016

Lokasi	Nilai Pengadaan	Persentase	Jumlah Pengadaan	Persentase
Kantor Pusat	32.859.116.666	53%	1.372	25%
Cabang	29.412.305.017	47%	4.091	75%

dan jasa yang telah dijelaskan, Perusahaan juga menggunakan metode lain, seperti pelelangan, pemilihan langsung dan pembelian langsung.

Dengan adanya kebijakan dan sistem tersebut, maka:

1. Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, harga yang kompetitif, pengiriman yang tepat waktu dan pelayanan purnajual yang baik.
2. Pengadaan barang, baik di kantor cabang maupun kantor pusat dapat dimonitor melalui sistem Fixed Assets Management.

Jumlah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa Perusahaan pada 2016:

Asuransi atas Harta Tetap Perusahaan

Untuk mengurangi risiko kerugian atau kehilangan atas harta tetap Perusahaan, maka Perusahaan telah mengasuransikan harta tetap pada perusahaan asuransi.

Perusahaan mengasuransikan harta tetap berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Polis Asuransi atas Properti

Untuk menjamin risiko yang mungkin terjadi atas bangunan, perabotan (*furniture*), *hardware*, mesin peralatan, termasuk BPKB yang disimpan, dalam hal terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi maupun kehilangan.

2. Polis Asuransi Kehilangan atas Barang Bergerak

Untuk menjamin risiko kehilangan atas bermacam-macam benda bergerak Perusahaan.

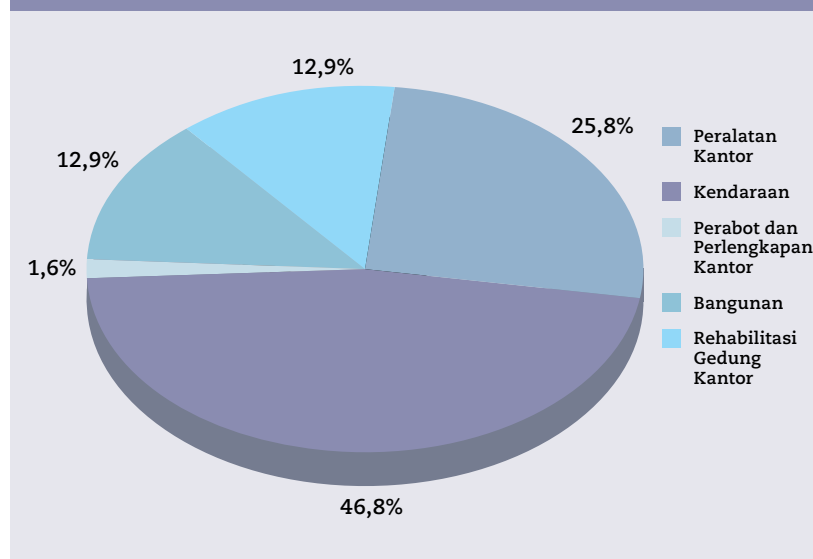
3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Untuk menjamin risiko kerugian atau kehilangan atas kendaraan bermotor motor maupun mobil yg dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Perusahaan dan apabila ada tuntutan hukum dari pihak ketiga yang mungkin timbul ketika terjadi kecelakaan.

4. Polis Asuransi *Public Liabilities*

Untuk menjamin tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga.

Grafik 25 – PENGADAAN BERDASARKAN JENIS BARANG 2016



PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Pemberian hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk pemberian oleh jajaran Perusahaan kepada pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perusahaan di luar batas-batas kewajaran. Penerimaan hadiah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh jajaran Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud mempengaruhi keputusan jajaran Perusahaan yang menguntungkan si pemberi hadiah.

Perusahaan telah mempunyai aturan tentang pemberian hadiah, suap dan sejenisnya, pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan dalam bentuk barang atau jasa.

Dalam hal penerimaan hadiah, setiap pegawai yang menerima hadiah berapapun nilainya dan dalam bentuk apapun, wajib melaporkan kepada atasan langsung. Penerimaan hadiah dari pihak manapun dalam rangka promosi Perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan, dapat diterima sebagai suatu kepatutan dalam pergaulan sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi; dan
- Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pemberi yang sama kepada jajaran perusahaan maksimal tiga kali dalam setahun. Setiap individu di jajaran Perusahaan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif bagi Perusahaan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PIHAK YANG MENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan telah membentuk dan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Peraturan Perusahaan No. SOP/031 tanggal 22 Maret 2013. Dalam peraturan tersebut, setiap individu di lingkungan Perusahaan dapat mengajukan keluhan dan/atau laporan tentang penipuan dan/atau pelanggaran atas tata tertib Perusahaan, Prinsip-Prinsip GCG, dengan cara mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke: fraud_investigator@bfi.co.id atau melalui sarana komunikasi lainnya seperti layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 081212135755, atau melalui surat ke alamat:

Kantor Pusat PT BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City
Tangerang Selatan 15322
u.p. Departemen Audit Internal.

Tabel 121 – JUMLAH LAPORAN PELANGGARAN DAN PENANGANANNYA

Jenis Laporan/ Keluhan	Dalam Proses	Selesai	Jumlah
Dugaan penipuan	0	34	34
Lain-lain	0	3	3
Jumlah	0	37	37

Grafik 26 – TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN



Seluruh keluhan dan/atau laporan yang masuk akan dianalisa dan tindak lanjut yang diperlukan akan dibuat dengan melibatkan Departemen Audit Internal dan Divisi Manajemen Risiko.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN

Dalam pelaksanaan pengaduan/penyungkapan, Sistem Pelaporan Pelanggaran dipayungi oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Selain itu, Perusahaan juga bertanggungjawab secara moral atas perlindungan saksi tersebut.

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh perusahaan dan pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Pada 2016, jumlah laporan yang diterima terkait pelanggaran dan proses tindak lanjutnya dapat dilihat pada Grafik 26.

TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN

Jika hasil pemeriksaan sah sesuai prosedur, maka yang akan dilakukan Perusahaan terhadap pelaku kecurangan adalah dengan memberikan sanksi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang berlaku di Perusahaan.

OPSI SAHAM

Pada 2016, Perusahaan melaksanakan Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham ("MESOP") yang merupakan kelanjutan dari MESOP yang telah dilaksanakan sejak 2012 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Informasi terperinci mengenai MESOP telah disajikan dalam bagian Analisis dan Tinjauan Keuangan di Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 140-161).

AKSI KORPORASI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN

Perusahaan melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham Perusahaan (*stock buyback*), sesuai keputusan RUPSLB tanggal 15 April 2015 yang menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan yang beredar sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp341 miliar.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya diharapkan akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share* atau "EPS").

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 100.273.200 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp252 miliar.

Informasi mengenai aksi korporasi dimaksud juga telah disajikan dalam bagian Kronologi Pencatatan Saham di Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 79).

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BFI telah menyusun sejumlah laporan yang menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan, dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan, yang mencakup antara lain:
 - a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil Perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, Tata Kelola Perusahaan dan CSR.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk satu tahun buku dan disajikan dalam perbandingan dengan satu tahun buku sebelumnya.
 - c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan.
2. Laporan Keuangan publikasi per enam bulan untuk dipublikasikan di media massa.
3. Laporan Keuangan per triwulan untuk dipublikasikan dalam situs web BFI dan situs web BEI.
4. Laporan Keberlanjutan

Selain mengatur tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 juga mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi mengenai kegiatan CSR pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan kepada OJK seperti Laporan

Keberlanjutan (*Sustainability Report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Report*). Dalam hal ini, BFI telah melakukan pembahasan informasi kegiatan CSR dalam Laporan Keberlanjutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan.

5. Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BFI telah memberikan informasi mengenai produk Perusahaan secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh pelanggan, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BFI pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan, dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang antara lain disediakan melalui situs web BFI, *portal online* yang menyediakan informasi mengenai karakteristik produk finansial dan asuransi di Indonesia serta perbandingan antarproduk tersebut.



ASLI PALSU – BANDUNG
ADE BAYU

Kaki dan tangan palsu berbahan baku aluminium
produksi Bengkel Kreatifitas Kelompok
Kreatifitas Difabel

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Keberadaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	296
Implementasi Program CSR	307
Kontribusi untuk Pembangunan	314



KEBERADAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

Kami menyadari pertumbuhan Perusahaan akan dapat berkelanjutan jika berada di tengah-tengah masyarakat yang sejahtera.

Masyarakat adalah pemangku kepentingan yang penting bagi BFI, kami menyadari pertumbuhan Perusahaan akan dapat berkelanjutan jika berada di tengah-tengah masyarakat yang sejahtera. Oleh karenanya peningkatan kualitas masyarakat adalah bagian tidak terpisahkan dari bisnis BFI.



BFI berkomitmen untuk berperan serta secara aktif sebagai perusahaan publik dalam meningkatkan kesejahteraan yang memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional di samping terus menjaga keserasian aspek kesejahteraan karyawan, keamanan kerja dan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan usahanya.

Salah satu wujud komitmen ini adalah pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang meliputi bidang lingkungan dan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya sektor Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Donasi Umum.

KEBIJAKAN STRATEGIS CSR PERUSAHAAN

Visi CSR

Menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan menjaga keseimbangan dari 3P (*Profit, People, Planet*) dan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat.

Misi CSR

- Memberantas keterbelakangan sosial-ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Perusahaan
- Berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi
- Pemberdayaan keluarga-keluarga ekonomi bawah melalui pembiayaan mikro
- Penyediaan saluran distribusi untuk usaha-usaha kecil
- Mengimplementasikan cara-cara konservasi energi dalam rutinitas bisnis sehari-hari

KEBIJAKAN PROGRAM CSR



Think

Semua lapisan; baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan; memikirkan dan merasakan isu-isu sosial yang terjadi di luar dan di dalam Perusahaan. Hal ini merupakan bentuk pola pikir diri sendiri yang sudah memasuki tahap sadar terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan mulai memikirkan bagaimana cara untuk terlibat aktif di dalamnya.

Act

Semua lapisan di dalam lingkungan Perusahaan bertindak untuk membantu memberikan solusi atas isu-isu tersebut dan mengimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata. Hal ini merupakan tindakan nyata dari diri sendiri, hasil dari pemikiran dan keterlibatan secara aktif dalam lingkungan sekitar.

Preserve

Hasil implementasi dan tindakan nyata tersebut dipertahankan, dilakukan secara berkelanjutan oleh semua lapisan Perusahaan. Suatu tindakan nyata yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga mulai memperlihatkan hasil yang positif dari tindakan nyata tersebut.

PROGRAM CSR PERUSAHAAN

Filosofi *Think - Act - Preserve* menjadi suatu landasan kuat atas kebijakan dalam pelaksanaan seluruh program CSR BFI. Program CSR BFI merupakan sinergi dari upaya berkelanjutan untuk melaksanakan serta menginformasikan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui program ini, Perusahaan melibatkan berbagai pihak terkait dengan masyarakat dan lingkungan untuk bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Mengapa Kami melakukan CSR?

- CSR sudah menjadi salah satu pilar pendukung utama Perusahaan dalam berbisnis
- CSR adalah salah satu upaya mencapai keberlangsungan usaha
- CSR sebagai budaya perusahaan dan konsep utama dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
- CSR sebagai salah satu instrumen Hubungan Masyarakat (PR) untuk mempromosikan social brand image Perusahaan
- CSR untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan kalangan internal dan eksternal Perusahaan

Lingkungan dan Infrastruktur

Komitmen BFI diwujudkan melalui berbagai program lingkungan dan pelestarian alam serta perbaikan infrastruktur lingkungan masyarakat. BFI memberikan dukungan dan bantuan terhadap masyarakat, khususnya daerah-daerah di mana BFI menyalurkan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan masyarakat ekonomi bawah dan menengah. Program ini bertujuan mengedukasi masyarakat secara terpadu melalui beberapa pelatihan atau pendidikan, serta pendampingan kepada warga sebagai dasar pengembangan program yang terintegrasi.

BFI untuk Kalialang Baru

BFI memulai kerja sama dengan Habitat for Humanity (“HFH”) Indonesia dalam program kemanusiaan “BFI for Kalialang Baru - Water and Education Project”. Proyek ini juga merupakan bagian dari kegiatan HFH Indonesia “Aku Bangun Indonesiaku 2014-2018”, yang bertujuan membantu 60.000 keluarga berpenghasilan rendah untuk dapat tinggal di rumah layak huni dan lingkungan sehat.

Kerja sama ini telah dimulai sejak 2014 di Kampung Kalialang Baru, Desa Sukorejo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada 2016, BFI dan HFH Indonesia bekerja sama membangun saluran drainase untuk warga RW 07 Kalialang Baru.

BFI juga mendukung HFH Indonesia di Kalialang Baru dengan memfasilitasi pelatihan Pengelolaan Air Bersih dan Perilaku Hidup Bersih Sehat, kebersihan dan kesehatan lingkungan, pembangunan saluran untuk fasilitas air bersih PDAM dan pembangunan sarana Pengembangan Anak Usia Dini (“PAUD”). Proyek saluran drainase ini selain untuk memperbaiki

kondisi lingkungan, juga ditujukan untuk mencegah tanah longsor di musim hujan yang kerap terjadi saat musim penghujan.

Aksi Sosial di Kampung Beting

Didorong oleh keprihatinan yang mendalam untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, maka BFI mengadakan aksi sosial berupa kerja bakti membantu proyek pembangunan infrastruktur dan kebersihan lingkungan.

Kampung Beting adalah wilayah perkampungan yang letaknya paling ujung dari Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mata pencaharian penduduk umumnya adalah pekerja tambak.

Rendahnya pendapatan masyarakat dan minimnya infrastruktur, untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat seperti jalan aspal, saluran pembuangan air limbah (drainase) dan tempat pembuangan sampah, mengakibatkan tingkat penghidupan dan kondisi lingkungan di perkampungan ini.



91

Keluarga berpenghasilan rendah penerima sarana air bersih PDAM



550

Meter pembangunan saluran drainase 2015



20

Balita pengguna fasilitas bangunan PAUD “Cahaya”



708

Meter pembangunan saluran drainase 2016



197

Keluarga penerima pelatihan “Pengelolaan Air Bersih dan Perilaku Hidup Bersih Sehat”

Tiga jenis kegiatan yang didukung oleh BFI untuk pembangunan infrastruktur dan pembersihan lingkungan masyarakat Kampung Beting terdiri dari:

1. Pembangunan jalan kecil dengan pemasangan *paving block*;
2. Pembangunan saluran drainase di wilayah pemukiman penduduk; dan
3. Pembangunan bak pembuangan sampah.

BFI berharap, dengan pembangunan ketiga fasilitas infrastruktur dan lingkungan tersebut di atas mampu memberikan berbagai manfaat berupa perbaikan akses, kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kampung Beting.

Penanaman 1.000 Bibit *Mangrove* di Pantai Marunda

Pada Oktober 2016, BFI melakukan kegiatan aksi sosial penanaman 1.000 bibit *mangrove* di kawasan Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. BFI bekerja sama dengan KeMANGTEER JAKARTA, yaitu sebuah wadah komunitas relawan pecinta lingkungan yang berfokus pada aktivitas pelestarian tanaman *mangrove* di wilayah pesisir DKI Jakarta.

Selain kegiatan penanaman *mangrove*, peserta juga diajak mengenal serba-serbi *mangrove*, fungsi *mangrove* bagi lingkungan dan cara penanaman bibit *mangrove* yang diharapkan ekosistem pesisir dapat diperbaiki dan melindungi pantai dari abrasi air laut.

Renovasi Sekolah, Tempat Ibadah dan Sarana Publik

Selama 2016, BFI telah melakukan renovasi bangunan seperti renovasi sekolah (ruang kelas, halaman sekolah) dan tempat ibadah di beberapa wilayah cabang Perusahaan seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, BFI melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan sarana publik lainnya seperti pengecatan trotoar bagi pejalan kaki.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Program CSR untuk sektor pengembangan sosial dan kemasyarakatan terdiri dari empat bidang kegiatan utama, yaitu:

- **Pendidikan:** fokus jangka panjang dalam program pengembangan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi, program Beasiswa S1, pengembangan keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat;
- **Kesehatan:** program rutin donor darah, pengobatan dan operasi gratis bagi warga kurang mampu;
- **Keagamaan:** program kepedulian masyarakat dalam rangka perayaan hari besar keagamaan (bulan Ramadhan, Idul Adha, Natal); dan

- **Program sosial dan donasi umum:** fokus pada pembangunan dan renovasi infrastruktur/fasilitas masyarakat umum, pemberian bantuan bagi korban bencana alam (internal dan eksternal).

Bidang Pendidikan



Bagi BFI, melaksanakan program CSR di bidang pendidikan berarti adalah investasi sosial yang strategis dan sangat menentukan bagi masa depan bangsa, khususnya dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul.

Oleh karena itu, pendidikan masih menjadi perhatian utama bagi Perusahaan sebagai bagian utama kegiatan CSR.

Beasiswa Mahasiswa Strata Satu ("S1")

Program Beasiswa S1 BFI yang sudah berjalan sejak 2004 ini merupakan salah satu perwujudan komitmen Perusahaan untuk mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi.

Mengapa CSR Bidang Pendidikan Penting bagi Kami?

Fokus kinerja non-bisnis Perusahaan dan korelasinya dengan komitmen Perusahaan untuk mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs), yaitu:



MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

Pasca 2015, Perusahaan meneruskan komitmen dan fokus di bidang pendidikan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan global yang kini menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), yaitu:



PENDIDIKAN BERKUALITAS
Menjamin pendidikan yang adil dan berkualitas, serta mendukung kesempatan untuk belajar dengan stabil di sepanjang hidup untuk semua orang tanpa kecuali.

Program Beasiswa Mahasiswa S1 di BFI terdiri dari:

- Beasiswa dengan Jaminan Bekerja: penerima beasiswa berhak menerima paket lengkap pembayaran biaya kuliah, uang saku dan tunjangan lainnya hingga akhir masa perkuliahan dan langsung bekerja di BFI setelah menyelesaikan kuliah. Beasiswa ini dianugerahkan bagi para mahasiswa S1 berprestasi di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan sistem pendaftaran secara *online* melalui situs *web* www.bfi.co.id.

- Apresiasi Mahasiswa Berprestasi: program beasiswa bersifat hibah, di mana beasiswa diberikan hanya satu kali dalam setahun bagi mahasiswa S1 berdasarkan perolehan nilai akademis tertentu, tanpa adanya jaminan bekerja di BFI.

Pada 2016, tiga belas Beasiswa dengan Jaminan Bekerja diberikan kepada mahasiswa S1 yang sedang belajar di universitas negeri maupun swasta di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu.

Kedua jenis Beasiswa Mahasiswa S1 di atas juga memberikan kesempatan magang bagi para penerimanya di berbagai kantor cabang BFI seluruh Indonesia.

Beasiswa Karyawan dan Apresiasi Prestasi Anak Karyawan

BFI memberikan beasiswa bagi karyawan berpendidikan akhir SMA dan Diploma (D3) untuk melanjutkan ke tingkat sarjana S1 di berbagai wilayah Indonesia. BFI juga memberikan bentuk apresiasi khusus bagi anak-anak karyawan dengan prestasi sekolah terbaik dari tingkat SD hingga SMA yang diberikan per semester.

Kerja Sama BFI dan Gerakan Indonesia Mengajar

Sebagai salah satu bentuk dukungan bagi pendidikan di pelosok Nusantara, BFI bekerja sama dengan Gerakan Indonesia Mengajar ("IM"). Pada 2016, kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dua SD sebagai sekolah binaan di daerah Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- SD 2 Inpres Baya di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur; dan
- SD Inpres Tompotika Makmur di Desa Tompotika Makmur, Kecamatan Masama.

Kedua SD di atas mendapatkan bimbingan IM selama satu tahun penuh pada 2016 melalui kinerja dua orang Pengajar Muda.



73 orang
penerima Beasiswa dengan
Jaminan Bekerja hingga 2016

50 orang
penerima baru Apresiasi Mahasiswa
Berprestasi pada 2016

102 orang
penerima Apresiasi Mahasiswa
Berprestasi hingga 2016

Program Homestay BFI

Program *Homestay* BFI adalah bagian dari kerja sama BFI dengan IM yang memberikan kesempatan kepada karyawan BFI untuk terlibat di dalam program. Karyawan BFI yang bersedia menjadi relawan inspirator dan tinggal di rumah penempatan Pengajar Muda IM selama beberapa hari.

Para relawan inspirator dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan singkat dari IM

mengenai cara melakukan pendekatan dan pengajaran secara menyenangkan kepada murid-murid SD setempat. Program kali ini diselenggarakan untuk tiga SD yang berlokasi di tiga desa Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yaitu:

- SDN 02 Mayak, Desa Mayak, Kecamatan Curug Bitung;
- SDN 01 Mekarwangi, Desa Neglasari, Kecamatan Muncang; dan
- SDN 01 Margaluyu, Desa Cilaketan, Kecamatan Sajira.

Selama program, mereka berinteraksi dengan seluruh *stakeholder* dengan beragam aktivitas yang mendukung program Pengajar Muda dan IM.

Rumah Jahit BFI Duri Kepa - Kerja Sama dengan YCAB

Komitmen BFI dalam mendukung pengembangan bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai program kerja Perusahaan. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (“YCAB”) dalam program kewirausahaan “Rumah Belajar” di daerah Duri Kepa, Jakarta Barat.

“Rumah Belajar” bertujuan memberikan berbagai bentuk pendidikan keterampilan bagi anak-anak dan remaja putus sekolah sebagai bekal mereka untuk dapat merintis usaha sendiri dan mampu hidup mandiri di kemudian hari.

Kerja sama BFI dengan YCAB untuk membentuk “Rumah Jahit BFI” yang diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, antara lain:

- Mendukung pengembangan keterampilan generasi muda dari kalangan keluarga kurang mampu sebagai langkah pembekalan untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga mereka dan mereka dapat hidup mandiri di masa depan;
- Partisipasi aktif BFI sebagai mitra YCAB dengan memberikan kursus keterampilan tambahan bagi murid-murid kelas Rumah Jahit; dan
- Mendukung peningkatan distribusi/penyaluran hasil karya murid-murid kelas Rumah Jahit dengan konsep *co-branding* Rumah Belajar YCAB dan BFI.

Tabel 122 – JUMLAH PENERIMA APRESIASI PRESTASI ANAK KARYAWAN

Tahun Ajaran	Semester	Jumlah Anak Karyawan
2014-2015	1	33
	2	43
2015-2016	1	65
	2	64



1.753
buah buku hasil donasi
karyawan BFI



12
SD penerima
manfaat donasi
buku di wilayah
kurang mampu di
Lombok Utara

BFI mendukung program pengembangan keterampilan menjahit yang diajarkan di Rumah Jahit BFI selama satu tahun untuk periode 2016-2017. Pada 2016, BFI mengadakan *Skill Development Training* selama November untuk para pengajar Rumah Jahit BFI dimana beberapa karyawan BFI memberikan ilmu tambahan merajut yang dapat diaplikasikan pada produksi dari rumah jahit tersebut.

Gerakan 1000 Perlengkapan Sekolah

Gerakan 1000 Perlengkapan Sekolah adalah kegiatan tahunan BFI di bidang pendidikan yang bertujuan menyediakan perlengkapan sekolah yang layak bagi siswa sekolah di daerah pelosok. Pada tahun ini, “Gerakan 1000 Perlengkapan Sekolah” diselenggarakan di Lombok Utara berbarengan dengan kegiatan bakti sosial Ramadhan 1437 Hijriyah. Kegiatan dalam program ini meliputi *talk show*, buka puasa bersama dan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah berupa tas sekolah beserta buku dan alat-alat tulis. Sebelumnya, kantor

pusat dan beberapa kantor cabang juga mengadakan kegiatan pengumpulan buku bacaan dan pelajaran untuk anak-anak usia 6-15 tahun dari para karyawan selama tiga minggu; baik buku kondisi baru maupun bekas layak baca; untuk didonasikan ke 12 SD di Lombok Utara.

Seminar Literasi Keuangan untuk Mahasiswa

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan, BFI memberikan edukasi kepada para mahasiswa tentang perusahaan pembiayaan melalui seminar yang bertema “Mengenal Lebih Dekat Perusahaan Pembiayaan.” Seminar ini diadakan di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada Mei 2016, di mana para mahasiswa memperoleh penjelasan tentang layanan pembiayaan.

Pelatihan Keuangan untuk Pelaku UMKM

BFI mengadakan kegiatan Edukasi dan Inklusi Keuangan berupa pelatihan dengan mengangkat tema “Merancang Bisnis melalui Internet dan Menjadi Pemenang serta Maju Berkat Pembiayaan” pada Oktober 2016.

Dalam kegiatan ini, BFI bekerja sama dengan para pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas Tangan di Atas (TDA) di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. BFI memberikan edukasi dan inklusi keuangan kepada para peserta agar lebih mengenal dekat perusahaan pembiayaan kepada para peserta.

Bidang Kesehatan

Untuk mendukung kesehatan masyarakat, BFI menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan membantu pelayanan kesehatan bagi kalangan masyarakat kurang mampu maupun kepedulian kesehatan untuk karyawan BFI.

Donor Darah PMI dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Donor darah PMI adalah bakti sosial yang rutin diselenggarakan oleh BFI setiap tahun. Mulai 2016, BFI menyelenggarakan kegiatan ini sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu memperingati Hari Ulang Tahun BFI ke-34 pada April 2016, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada Agustus 2016, dan pertengahan Desember 2016 dalam rangka kemeriahan tutup tahun.

Operasi Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Sejak 2012, BFI telah bekerja sama dengan Yayasan Citra Baru (YCB) untuk Program Operasi Gratis bagi Penderita Celah Bibir (Bibir Sumbing) dan Celah Langit-Langit Mulut. Hingga 2016, BFI telah mendanai kegiatan operasi untuk 25 orang penerima manfaat.

Khitanan Massal, *Fogging* dan Program Edukasi Kesehatan

BFI telah melakukan beberapa kegiatan bidang kesehatan di beberapa wilayah cabang perusahaan seluruh Indonesia untuk masyarakat seperti khitanan massal, penyemprotan asap untuk membasmi nyamuk demam berdarah (*fogging*) dan penyuluhan tentang penyakit kanker payudara.

Bidang Keagamaan

BFI menghargai keberagaman dalam masyarakat termasuk keberagaman agama, atas dasar itu Perusahaan menyelenggarakan kegiatan CSR dalam bidang keagamaan sebagai bentuk kepedulian Perusahaan untuk meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat yang merupakan salah satu pemangku kepentingan.

Bakti Sosial Ramadhan dan Perayaan Keagamaan Lain

BFI, melalui partisipasi tujuh kantor cabangnya di berbagai wilayah Indonesia, mewujudkan simpati Perusahaan dengan menyelenggarakan Bakti Sosial Ramadhan 1437 Hijriyah berupa pemberian makanan buka puasa (takjil) kepada warga kurang mampu yang dijalankan tiap cabang selama tujuh hari berturut-turut.

Bakti Sosial Ramadhan ini diprioritaskan kepada para janda miskin, keluarga kurang mampu berdasarkan data kependudukan dari pemerintah daerah setempat, pemungut sampah dan petugas penyapu jalan.

BFI turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan perayaan keagamaan lain di beberapa wilayah cabang seluruh Indonesia.

BFI Berkurban

Perusahaan turut memperingati Idul Adha 1437 Hijriyah dengan menyelenggarakan acara “BFI Berkurban” pada 15 September 2016. BFI melakukan acara doa syukur dan upacara penyembelihan sapi dimana daging kurban tersebut dibagikan kepada beberapa yayasan panti asuhan di daerah sekitar Tangerang Selatan.

Bidang Donasi Umum

Kegiatan amal yang bersifat donasi juga dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan secara selektif. Kegiatan ini terutama merupakan bantuan bagi korban peristiwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan musibah besar lainnya yang terjadi di Indonesia untuk membantu meringankan beban warga masyarakat maupun karyawan yang menjadi korban; seperti pemberian bantuan sembako di lokasi posko pengungsi bagi korban bencana alam. Selain itu, BFI juga mengadakan pembagian sembako ke beberapa penerima manfaat seperti panti asuhan dan kaum dhuafa lainnya yang memerlukan.

PROGRAM RELAWAN BFI (EMPLOYEE VOLUNTEERING)

BFI memfasilitasi karyawan untuk terlibat langsung dalam program-program CSR yang diselenggarakan BFI. Melalui program *employee volunteering* ini, karyawan dapat menjadi relawan yang terlibat dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

Beberapa program relawan BFI yang diadakan oleh kantor pusat, antara lain:

Relawan BFI untuk “Rumah Jahit BFI Duri Kepa” Kerja Sama dengan YCAB

Karyawan BFI melakukan aksi sosial sebagai relawan untuk kegiatan pengecatan dinding ruang kelas Rumah Jahit dan pembuatan majalah dinding di Rumah Belajar Duri Kepa YCAB pada 23 September 2016. Kerja bakti ini merupakan bagian dari peresmian kerja sama BFI dengan YCAB untuk membentuk “Rumah Jahit BFI.”

Selain itu, pada 10 Oktober 2016, dilakukan program kerelawanan kegiatan membongkar pakaian bekas yang terbuat dari bahan denim untuk digunakan kembali dalam produksi “Rumah Jahit BFI”.

Relawan BFI di Kalialang Baru

BFI memulai kerja sama dengan HFH Indonesia dalam program kemanusiaan “BFI for Kalialang Baru-Water and Education Project.” Kerja sama ini telah dimulai sejak 2014 di Dusun Kalialang Baru, Desa Sukorejo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Pada 2016, BFI dan HFH Indonesia bekerja sama untuk membangun saluran drainase sepanjang 708 meter. Dalam kegiatan ini, karyawan juga dilibatkan untuk melakukan kerja bakti bersama masyarakat setempat pada 13 Agustus 2016.

Relawan BFI di Kampung Beting

Pada 13 Agustus 2016, 19 cabang di berbagai wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten berpartisipasi dalam aksi sosial pembangunan infrastruktur dan pembersihan lingkungan masyarakat Kampung Beting, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

Aksi sosial ini merupakan perwujudan partisipasi aktif Perusahaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat di Kampung Beting, tujuannya adalah agar masyarakat Kampung Beting dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Relawan BFI untuk Kelas Inspirasi di Luwuk

Pada 3 September 2016, karyawan BFI berpartisipasi menjadi relawan “guru sehari” dalam Program Kelas Inspirasi diselenggarakan di dua SD binaan IM dan BFI di daerah Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelas Inspirasi adalah aksi sosial di mana karyawan mitra IM meluangkan waktu mereka selama satu hari menjadi relawan dengan memberikan pengajaran atau berbagi ilmu pengetahuan kepada murid-murid dari SD yang menjadi binaan IM.

Dalam program Kelas Inspirasi ini, tujuh orang karyawan yang bertindak sebagai relawan BFI berbagi ilmu kepada murid-murid di kedua sekolah dengan konsep *fun learning*.

Relawan BFI untuk Program Homestay

Program Homestay BFI adalah kerja sama BFI dan Gerakan IM dalam program payung CSR “BFI for Society”. Selama satu tahun penuh BFI dan IM mengadakan berbagai aktivitas, salah satunya adalah Program Homestay BFI yang diselenggarakan perdana pada Mei 2016. Beberapa karyawan BFI terlibat menjadi relawan inspirator dan tinggal di rumah penempatan Pengajar Muda IM selama beberapa hari. Para relawan inspirator berinteraksi dengan seluruh *stakeholder* dengan beragam aktivitas yang mendukung program Pengajar Muda dan IM.

Di akhir program, para relawan BFI memberikan sharing pengalaman selama menjadi relawan inspirator Program Homestay tersebut, tentang pengalaman unik masing-masing saat bertugas mengajar di tiga SD daerah Kabupaten Lebak, Banten.

ANGGARAN PROGRAM CSR

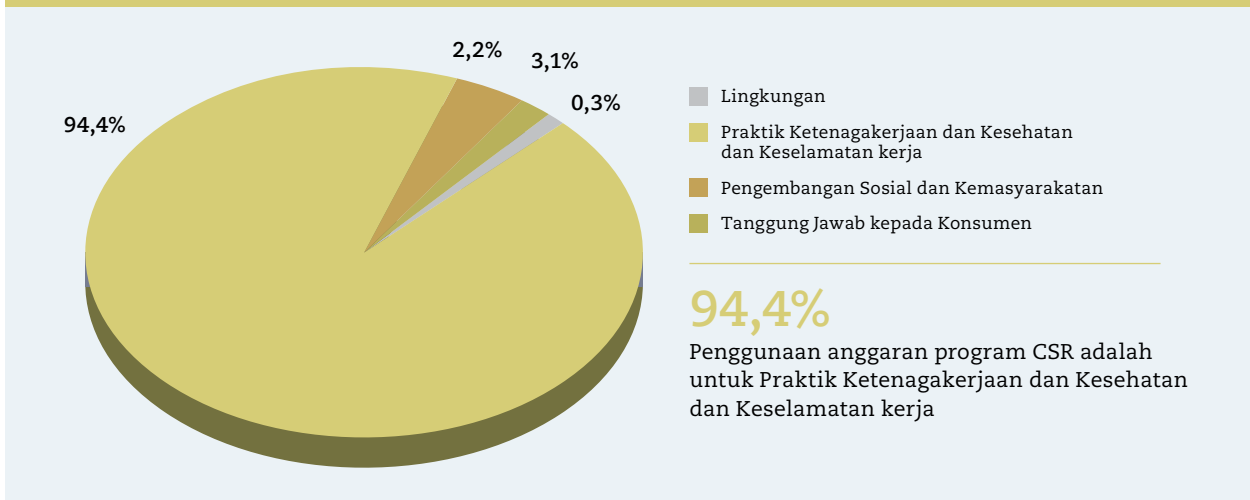
Pelaksanaan program CSR di BFI diselenggarakan oleh Unit CSR yang berada di bawah supervisi Sekretaris Perusahaan dan Departemen *Corporate Secretariat*. Perusahaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan CSR dengan mempertimbangkan faktor keseimbangan antara konsumsi *stakeholder* eksternal dan internal.

Berikut ini adalah penggunaan anggaran seluruh kegiatan CSR yang dilaksanakan BFI untuk bidang lingkungan, praktek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab kepada konsumen.

Tabel 123 – PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM CSR (Rp)

No. Bidang Kegiatan	Jumlah
1. Lingkungan	178.132.510
2. Praktik Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan kerja	51.739.761.879
3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	1.212.805.248
4. Tanggung Jawab kepada Konsumen	1.681.000.000
Jumlah	54.811.699.637

Grafik 27 – PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM CSR

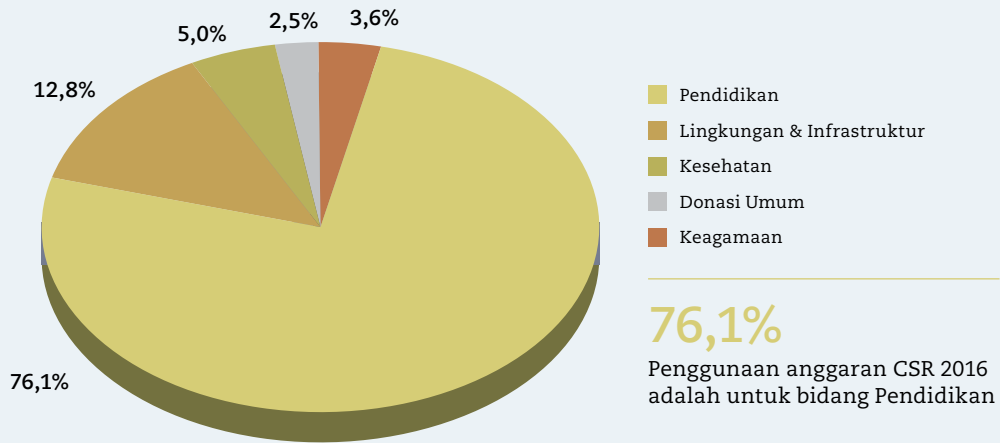


Besarnya realisasi anggaran kegiatan CSR bidang Lingkungan dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan pada 2016 adalah Rp1,39 miliar, di mana jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran 2015 sebesar Rp1,22 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 – PERBANDINGAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM CSR BIDANG LINGKUNGAN & PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (Rp)

Bidang Kegiatan	2016	2015
Lingkungan (termasuk Infrastruktur)	178.132.510	67.754.100
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan:		
- Pendidikan	1.057.989.115	900.411.681
- Kesehatan	35.059.000	37.998.581
- Keagamaan	49.740.200	141.996.100
- Donasi Umum	70.016.933	73.434.000
Jumlah	1.390.937.758	1.221.594.462

Grafik 28 – PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN CSR BIDANG LINGKUNGAN & PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



Penggunaan terbesar anggaran CSR BFI tahun ini adalah untuk bidang Pendidikan yang mencakup 76,1% dari jumlah pengeluaran yang disalurkan untuk berbagai program pengembangan pendidikan dan beasiswa.



IMPLEMENTASI PROGRAM CSR

PELESTARIAN LINGKUNGAN

Sebagai sebuah perusahaan jasa keuangan, dampak lingkungan yang disebabkan aktivitas operasional BFI relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kegiatan usaha lain seperti industri pengolahan lainnya. Berdasarkan sifat dan skala usaha, dampak lingkungan terbatas pada penggunaan sumber daya alam seperti air, kertas dan energi di kantor-kantor serta penggunaan BBM dan emisi dari kegiatan karyawan lapangan.

Walaupun dampak tersebut relatif kecil, BFI tetap berkomitmen untuk menjalankan Bisnis yang bertanggung jawab juga terhadap lingkungan. Komitmen ini merupakan misi CSR BFI yaitu mengimplementasikan cara-cara konservasi energi dalam rutinitas sehari-hari.

Konservasi di Perkantoran

BFI menerapkan program efisiensi sumber daya alam dengan berbagai alternatif yang dilakukan di kantor-kantor Perusahaan, termasuk:

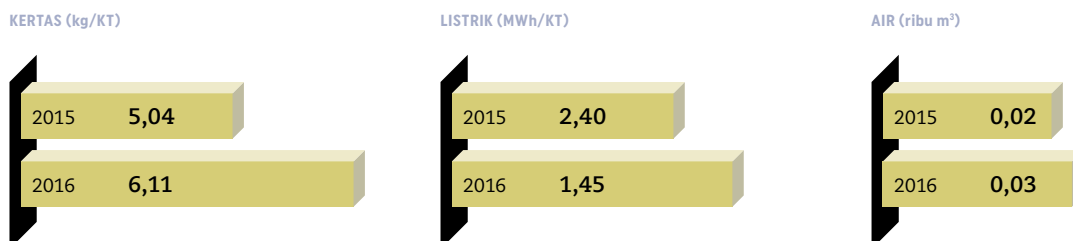
- Penggunaan peralatan kantor yang hemat energi;
- Mematikan lampu pada saat jam istirahat;
- Pembatasan pengoperasian pendingin udara; dan
- Mengurangi pemakaian barang sekali pakai seperti kertas tisu dan air minum dalam kemasan.

Departemen Teknologi Informasi (TI) juga mengembangkan aplikasi untuk mendukung inisiatif *less-paper office*, termasuk:

- Aplikasi *e-Filing* dan *Document Management System (DMS)* yang merupakan sistem pengelolaan manajemen yang terpusat, yang lebih mudah dikontrol dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan lebih sedikit mencetak dokumen berulang kali dan lebih efisien.

- Infrastruktur *video conference* yang memungkinkan tatap muka maya sehingga mengurangi perjalanan dinas yang menghabiskan energi dan waktu.
- Aplikasi *Human Capital Powerplus* ("HC Powerplus") yang merupakan aplikasi berbasis jaringan yang dapat diakses online di seluruh outlet untuk urusan ketenagakerjaan; mulai dari data diri hingga evaluasi kinerja. Dengan adanya aplikasi HC Powerplus yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Human Capital Information System (HCIS)*, kertas cetak untuk kepegawaian menjadi jauh lebih sedikit.
- Optimasi komunikasi elektronik untuk penyebaran informasi dalam Perusahaan melalui portal dan email, termasuk pembuatan buletin elektronik.

Grafik 29 – INTENSITAS KONSUMSI SUMBER DAYA ALAM DI BFI TOWER TAHUN 2016 DAN TAHUN 2015



*Catatan:

Terdiri dari pemakaian kertas potokopi ukuran A4 dan F4 di Kantor Pusat

Kertas A4 60 gr = 1,87 kg/ream

Kertas A4 70 gr = 2,18 kg/ream

Kertas F4 70 gr = 2,48 kg/ream

KT: Karyawan tetap di Kantor Pusat

Kampanye Pelestarian Lingkungan

Sepanjang 2016, BFI menyelenggarakan komunikasi *Internal Tips* dan *Info Seputar Cinta lingkungan* dan *Hemat Energi* berisi artikel-artikel berisi info dan tips mengenai gaya hidup yang mendukung cinta lingkungan, kebersihan lingkungan dan hemat energi yang dapat dipraktikkan secara mudah dalam kehidupan karyawan BFI sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah.

Info dan tips ini dikomunikasikan melalui *e-mail blast* ke seluruh karyawan. Selain itu, sosialisasi pelestarian lingkungan dilakukan di kantor pusat dan cabang melalui sarana video, *banner* dan poster.

Konservasi Lingkungan bersama Masyarakat

Komitmen BFI dalam bidang lingkungan dan infrastruktur dilakukan melalui berbagai program lingkungan dan pelestarian alam, khususnya daerah-daerah di mana BFI menyalurkan pembiayaan.

Program CSR bidang lingkungan pada 2016 adalah kerja sama BFI dengan HFH Indonesia untuk membangun prasarana lingkungan, termasuk higiene komunitas. Melalui inisiatif ini, upaya berkelanjutan untuk pengembangan masyarakat dapat berjalan seiring dengan kebijakan BFI untuk lebih ramah lingkungan.

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN SDM

Jumlah SDM

SDM merupakan aset Perusahaan yang paling penting. Dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan bisnis Perusahaan, jumlah dan komposisi SDM di BFI mengalami perkembangan.

Komposisi SDM

Hingga akhir 2016, karyawan BFI berjumlah 8.941 dan menunjukkan keberagaman berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, usia,

masa kerja dan jenis kelamin. Pembahasan lebih lanjut mengenai komposisi SDM ini telah disajikan pada Bab Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini (halaman 95-113).

Pengembangan SDM

Perusahaan memiliki komitmen jangka panjang untuk memperkuat bisnis dengan SDM sebagai intinya untuk dapat membangun organisasi yang lebih baik, kuat dan efisien. Pada 2016, Perusahaan melanjutkan langkah inisiatif pengembangan SDM, termasuk berbagai program rekrutmen, pelatihan, pengembangan dan manajemen talenta, serta proyek peningkatan produktivitas yang diarahkan untuk mendukung strategi bisnis dan rencana ekspansi.



FOKUS PADA LAYANAN PELANGGAN

Kualitas layanan merupakan faktor yang penting untuk tetap berada pada lini terdepan di tengah meningkatnya persaingan industri pembiayaan. Oleh karena itu, BFI terus melakukan penyempurnaan, baik dari segi sistem, prosedur maupun keandalan jaringan.

Penerapan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan



Sebagai Perusahaan penyedia jasa keuangan, kepercayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam peningkatan kinerja Perusahaan. Pelanggan BFI, baik individual maupun korporasi, merupakan pemangku kepentingan, yang secara langsung ikut mempengaruhi keberlangsungan Perusahaan.

BFI memiliki nilai-nilai dasar yang senantiasa diterapkan untuk meraih kepuasan pelanggan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, yaitu *Excellent Service* atau Ekstra Layanan kepada Pelanggan Internal dan Eksternal.

BFI menerapkan strategi pelayanan prima yang berkelanjutan dengan tema "Smile from the HEART."

HEART merupakan akronim dari:

- Hati yang peduli kepada pelanggan
- Ekspresikan dengan keramahan dan ketulusan
- Andalkan kecepatan dan ketepatan
- Responsif dan proaktif mengatasi kebutuhan pelanggan
- Tutur kata yang positif

Hubungan dengan Pelanggan

BFI menyediakan beragam bentuk sarana dan kemudahan akses bagi konsumen dan pelanggan BFI untuk menjawab segala kebutuhan seputar produk Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan, yaitu:



Peningkatan Kualitas Pelayanan

BFI menyediakan beragam bentuk sarana dan kemudahan akses bagi konsumen dan pelanggan

BFI melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada pelanggan, yang sekaligus menjadi bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

Kami memahami bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi hal penting dalam keberlanjutan Perusahaan, oleh karenanya Perusahaan menyusun kerangka kerja *Service Quality Strategy* untuk meningkatkan layanan agar tujuan Perusahaan dapat tercapai.

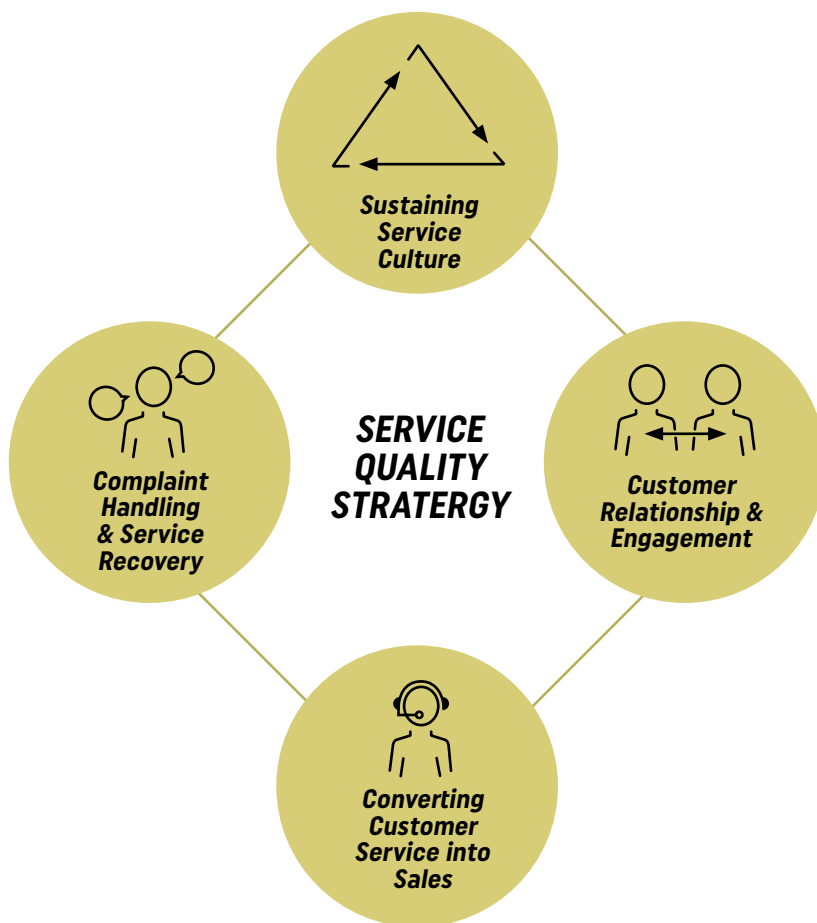
SUSTAINING SERVICE CULTURE

Budaya pelayanan yang konsisten dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk itu, BFI memberikan pelatihan pelayanan kepada para *frontliner* agar memiliki kemampuan berkomunikasi dan kompetensi yang lebih baik, memberikan respon yang cepat, memiliki integritas yang sesuai dengan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, serta konsisten dan santun dalam memberikan pelayanan pelanggan.

Budaya pelayanan BFI juga direpresentasikan melalui penampilan karyawan, tata

Tabel 125 – AKSES KE KANTOR BFI

Jenis Outlet	2016	2015	2014
Cabang	209	205	200
Gerai	96	62	60
Jumlah Outlet	305	267	260



ruang pelayanan, peralatan yang mendukung pelayanan, dan citra positif dari perilaku karyawan dalam setiap interaksi dengan pelanggan. Pada masa mendatang, Perusahaan menargetkan untuk menciptakan pelayanan yang standar, terbaik, dan konsisten di semua cabang.

Customer Relationship & Engagement

Salah satu strategi untuk menjalin ikatan yang kuat dengan pelanggan adalah melalui pemahaman atas kebutuhan dan pengelolaan hubungan yang baik. BFI melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pelanggan selama 2016, antara lain:

- *Service Training*, yaitu pelatihan pelayanan kepada para pelaku pelayanan agar memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu memberikan respon yang cepat, memiliki integritas yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Perusahaan, konsisten dan santun dalam memberikan pelayanan pelanggan.
- Untuk memberikan nilai lebih dan kemudahan bagi pelanggan BFI Prioritas, BFI memiliki berbagai program unggulan guna meningkatkan relasi dengan pelanggan BFI Prioritas.

- *Program Special Treatment* Pelanggan Pembiayaan Motor, yaitu pemberian beberapa layanan dari BFI kepada para pelanggan pembiayaan produk kendaraan motor dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional berupa voucher gratis dan bingkisan khusus.
- Program “BM Goes to Front Office”, yaitu *Branch Manager* BFI turun ke *front office* untuk melayani konsumen dan pelanggan yang datang ke kantor BFI dalam rangka Hari Pelanggan Nasional.

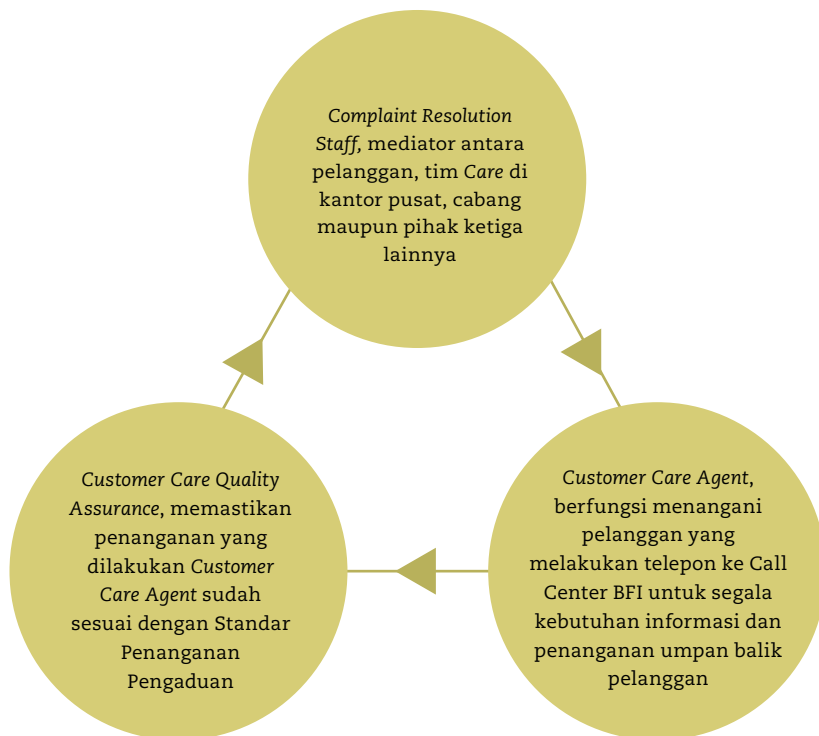
Converting Customer Service Into Sales

Perusahaan membekali *Customer Service* (“CS”) dengan pelatihan peningkatan kompetensi seputar komunikasi, produk serta kemampuan dalam penjualan dan negosiasi. Dengan pelayanan berkualitas yang diberikan oleh CS, BFI berharap dapat bermitra dengan para pelanggannya dalam jangka panjang.

Complaint Handling & Service Recovery

BFI melaksanakan program penanganan umpan balik dari pelanggan secara terintegrasi dalam sistem dan proses kerja dengan kantor cabang dan kantor pusat. Penanganan umpan balik ini dimonitor oleh Unit *Customer Care*.

BFI melalui Unit *Customer Care* berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan pelanggan dengan cepat, tepat dan tuntas.



Unit *Customer Care* juga bekerja sama dengan unit-unit terkait untuk memastikan solusi yang diberikan atas permasalahan pelanggan sudah tepat sasaran dan pelanggan sudah puas atas solusi yang diberikan tersebut.

Integrasi sistem dan proses kerja antara Unit *Customer Care* dan kantor cabang memungkinkan umpan balik pelanggan dapat ditangani dengan lebih baik.

Pemantauan Pelanggan

Pemantauan Umpan Balik Pelanggan

Di BFI, Unit *Customer Care* memantau dengan seksama setiap laporan, masukan dan umpan balik pelanggan untuk memastikan bahwa tiap hal

Tabel 126 – UMPAN BALIK PELANGGAN

No. Keterangan	2016	2015	2014
1 Pemahaman karakteristik produk oleh konsumen	2.652	1.936	2.802
2 Informasi produk kurang memadai	794	603	800
3 Gangguan/kerusakan perangkat dan system teknologi informasi	33	45	149
4 Perubahan/pemutusan akad/perjanjian/kontrak	0	10	10
5 Kelalaian konsumen	217	235	330
6 Kelalaian pelaku usaha jasa keuangan	0	0	0
7 Tindak pidana pelaku usaha jasa keuangan	0	0	0
8 Lainnya (proses pelayanan internal kurang optimal)	1.640	1.368	1.774
9 Lainnya (kegagalan pelayanan pihak ketiga/rekanan BFI)	507	387	779
Jumlah	5.843	4.574	6.644

tersebut tertangani dengan sebaik-baiknya oleh Perusahaan, mulai dari memberikan konfirmasi hingga menyediakan solusi secara tuntas atas permasalahan para pelanggan.

Berdasarkan tabel Laporan Penanganan Umpan Balik Pelanggan tersebut di atas, terjadi peningkatan jumlah umpan balik pelanggan (berupa keluhan, saran dan lain-lain) sebesar 1.269 atau 27,7%, dari 4.574 di 2015 menjadi 5.843 di 2016. Peningkatan terbesar disebabkan oleh pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman karakteristik dari produk yang ditawarkan Perusahaan sebesar 37,0%.

Sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, BFI menetapkan *Service Level Agreement* ("SLA") berupa periode respon pada setiap keluhan yang diterima oleh Perusahaan.

BFI mencatat Laporan Pengaduan Pelanggan yang Diterima pada 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 4.574 dan 5.843 laporan dengan peningkatan kualitas SLA di mana seluruh pengaduan pelanggan selama 2016 berhasil diselesaikan paling lambat dalam waktu 20 hari. Hal ini sesuai komitmen Unit *Customer Care* BFI untuk menyelesaikan setiap permasalahan pelanggan dengan cepat, tepat, dan tuntas.

Pemantauan Kepuasan Pelanggan

BFI mengadakan survei kepuasan pelanggan eksternal atau survei pelanggan purnajual yang melibatkan para pelanggan dan mitra bisnis BFI, serta survei kepuasan konsumen internal dalam lingkup Perusahaan.

Survei pelanggan purnajual bertujuan mengetahui Indeks Kepuasan Pelanggan atas pelayanan BFI, sedangkan survei internal bertujuan untuk

memantau implementasi standar pelayanan dan pemberian bobot KPI.

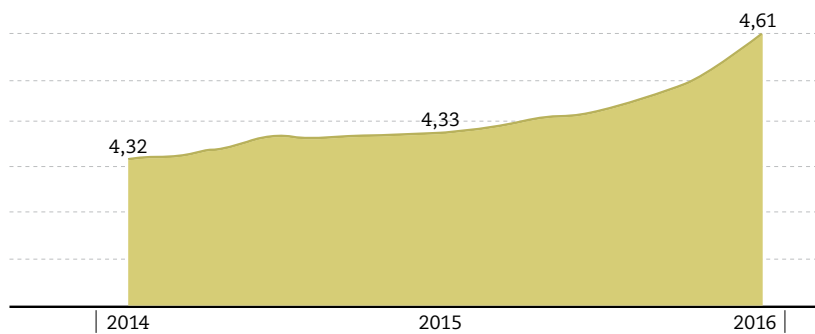
Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI Score) BFI selama enam tahun berturut-turut mengalami peningkatan secara konsisten dari 4,19 di 2012 menjadi 4,62 di 2016. Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan kepada 128.437 konsumen BFI sepanjang 2016. Jumlah responden yang disurvei terus meningkat dari 2014 dan 2015, yaitu masing-masing sebanyak 84.710 dan 103.211 responden menjadi 128.437 responden di 2016.

Hal ini dinilai menggembirakan karena seiring dengan meningkatnya jumlah responden yang disurvei, BFI mampu membuktikan bahwa Perusahaan selalu berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang memberikan kepuasan bagi para konsumen dan pelanggan secara berkelanjutan dengan kualitas yang juga terus meningkat secara konsisten.

Tabel 127 – UMPAN BALIK PELANGGAN

No.	Keterangan	2016	2015	2014
Pemahaman karakteristik produk oleh konsumen				
1.	Telah diselesaikan	5.843	4.574	6.644
2.	Sedang dalam proses penyelesaian	0	0	0
Jumlah		5.843	4.574	6.644
SLA Pengaduan				
1.	≤ 20 Hari	5.843	4.571	209
2.	20 Hari < X ≤ 40 Hari	0	3	3
3.	> 40 Hari	0	0	1
Jumlah		5.843	4.574	213

Grafik 30 – Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan 2014-2016



Tabel 128 – NILAI INDEKS KEPUASAN PELANGGAN DAN JUMLAH RESPONDEN

Deskripsi	2016	2015	2014
Indeks Kepuasan Pelanggan	4,61	4,33	4,32
Jumlah Responden	128.437	103.211	84.710

Apresiasi untuk BFI

Upaya yang dilakukan BFI untuk terus menerus memperbaiki kinerja layanan kepada pelanggan dengan memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap produk dan pelanggan membuahkan penghargaan dari pihak eksternal.

Pada 2016, BFI meraih penghargaan *Market Conduct* dari OJK sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang Telah Melaksanakan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2015.

Dalam *self-assessment* atau penilaian ini, OJK menekankan perihal penerapan lima prinsip perlindungan konsumen yang meliputi transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penghargaan ini merupakan bukti nyata atas upaya BFI dalam memastikan kepuasan dan perlindungan bagi konsumen.



SAVITRI

Machinery Collection Unit Head - Kantor Pusat, Penerima Beasiswa Karyawan BFI

Saya sudah tiga belas tahun bekerja di BFI dan merasa mantap karena Perusahaan ini cukup besar dan stabil. Kondisi kerja di Perusahaan sangat mendukung saya dalam menjalankan tugas-tugas, lingkungannya baik, nyaman dan serba memudahkan. Mudah-mudahan BFI ke depan menjadi lebih kompetitif dan dapat menjadi *benchmark* perusahaan pembiayaan lain dan terus memperkuat budaya Perusahaan.

KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN

Keberlanjutan bagi BFI adalah kemampuan untuk mengakomodir seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan juga berarti kemampuan BFI menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam operasional Perusahaan.

Dalam aspek ekonomi, BFI memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, dividen kepada pemegang saham dan secara tidak langsung mendorong perekonomian melalui pembayaran yang dilakukan kepada karyawan.

MANFAAT UNTUK LEBIH BANYAK MASYARAKAT

BFI memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Pembiayaan alat berat yang diselenggarakan BFI menyediakan peluang pertumbuhan bagi sektor komoditas dan konstruksi di Indonesia, yang beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis BFI didorong oleh pertumbuhan masyarakat ekonomi menengah dan peningkatan jumlah populasi usia produktif di Indonesia. Demografi masyarakat ini merupakan bonus demografi yang baik yang merupakan pasar potensial bagi BFI, yang kami sikapi dengan diversifikasi produk berupa kredit konsumen.

Kredit konsumen yang disediakan perusahaan jasa keuangan memungkinkan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Sehingga dapat memperbaiki kualitas kehidupan di tengah-tengah akses transportasi yang belum merata. (Suwandi Wiranto, Ketua APPI kepada Oxford Business Group)

Untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat, BFI mengeluarkan produk Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat berharga lainnya sesuai ketentuan OJK dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan internal Perusahaan.

Produk Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa atau Pembiayaan Multiguna merupakan diversifikasi produk yang diberikan izinnya dari OJK pada 2014, yang memungkinkan BFI mengeluarkan produk pembiayaan di luar sektor konsumen. Produk ini juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan, terutama di tengah lesunya pembiayaan alat berat dan kredit konsumen saat ini.

Dengan pembiayaan multiguna masyarakat dapat memperoleh dana tunai memenuhi berbagai kebutuhan, baik bersifat konsumtif maupun untuk tujuan produktif, termasuk modal usaha dan investasi.

Pada 2016, BFI meluncurkan produk pembiayaan untuk keperluan pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan biaya pendidikan yang besar seperti uang pangkal. Untuk tujuan ini, BFI telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi.

Selain itu, pada Oktober 2016, BFI meluncurkan produk pembiayaan untuk keperluan pernikahan, di mana BFI bekerja sama dengan beberapa pengusaha *wedding organizer*, dan di masa mendatang akan dikembangkan produk-produk pembiayaan lainnya yang diperlukan masyarakat.

Tabel 129 – DISTRIBUSI MANFAAT EKONOMI (Rp juta)

Kinerja Ekonomi	2016	2015	2014
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan			
- Pendapatan	3.227.107	2.830.617	2.299.463
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan			
- Biaya Operasi	1.485.261	1.366.738	1.040.837
- Biaya Pegawai	715.765	626.324	506.249
- Dividen	224.466*	322.943	297.587
- Pembayaran kepada Pemerintah (Pajak, Retribusi, dll)	233.505	182.742	150.845
- Investasi Sosial (Biaya CSR)	1.120	2.061	1.840
Laba Ditahan (=Nilai Ekonomi yang Dihasilkan – Nilai Ekonomi yang Didistribusikan)	3.636.645	3.169.585	2.819.098

*Merupakan dividen interim, untuk dividen final menunggu RUPS 2017



FRANS ELKANA S. DEPARI

Branch Operations & Services Head (“BOSH”) - Kantor Cabang Semarang,
Ex-Penerima Beasiswa Mahasiswa S1

Saya adalah karyawan baru BFI yang bergabung pada akhir Mei 2016 dan menjalankan penempatan sebagai BOSH di Semarang, Jawa Tengah, sejak awal November 2016 setelah selesai mengikuti *on-the-job training*. Ada banyak hal yang harus saya pelajari lagi untuk melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik. Beasiswa yang saya terima dari BFI sangat membantu selama masa pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang. Setelah lulus, saya bergabung supaya dapat mengikuti program *Management Trainee*. Mudah-mudahan ke depannya saya dapat meraih jenjang karier yang baik.





BATIK SABLON – SOLO
MUKHAMAD FAIES

Penggunaan teknik sablon untuk mempercepat proses produksi batik

DATA PENUNJANG PERUSAHAAN

Alamat Outlet

318



ALAMAT OUTLET

KANTOR PUSAT

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2

Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City
Tangerang Selatan 15322

Tel: (62-21) 2965 0300, 2965 0500

Fax: (62-21) 2966 0757, 2966 0758

Website: www.bfi.co.id

CABANG

JAWA, BALI & NUSA TENGGARA

DKI Jakarta

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Jakarta - Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A No.80, Jl. Utama Griya, Sunter	Jakarta Utara
Jakarta Utara	Rukan Grand Orchard Square Blok C/20 Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura	Jakarta Utara
Jakarta Utara 2	Rukan Bandengan Indah Blok B-3 Jl. Bandengan Utara No. 80, Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan	Jakarta Utara
Jakarta - Meruya	Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	Jakarta Barat
Jakarta - Cengkareng	Sedayu Square Blok C-02, Jl. Outer Ring Road Cengkareng Barat	Jakarta Barat
Jakarta Timur	Jl. Radin Inten, Ruko Radin Inten Center No.8D, Duren Sawit	Jakarta Timur
Jakarta - Cawang	Jl. Dewi Sartika No. 292 F RT 004 / RW 005 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati	Jakarta Timur
Jakarta Selatan	Jl. Ciputat Raya No. 1 C RT 003 / RW 010 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan
Jakarta Selatan 2	Jl. Raya Rawa Bambu No. 18 RT 13 / RW 5 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan
Jakarta - Corporate Leasing	Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No. 31 Jl. Let. Jend. Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran	Jakarta Pusat

Banten

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Tangerang	Jl. M.T. Haryono No. 9, Sukasari	Tangerang
Tangerang 2	Kompleks Balaraja Ultimate For Business Retail Ruko G No. 3A Jl. Raya Serang Km. 24, RT 001 / RW 001 Desa Telagasari, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	Tangerang
Tangerang 3	Ruko Taman Kutabumi Blok B 16 No. 22-23 Kel. Kutabumi, Kec. Pasar Kemis , Kab. Tangerang	Tangerang
Bintaro	Ruko Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No. 09 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren	Tangerang
Cikupa	Ruko Taman Raya Blok M 19 No. 01 A, Citra Raya Kel. Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	Tangerang
Cilegon	Jl. Ahmad Yani No. 135 C RT 004 / RW 002 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang	Cilegon
Pamulang	Jl. Raya Siliwangi No. 57 G, RT 01 / RW 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang	Tangerang
Serang	Jl. Raya Pandeglang Lingk. Kebon Jahe RT 04 / RW 014 Kel. Cipare, Kec. Serang	Serang
Serpong - Tangerang Selatan	BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City	Tangerang Selatan

Jawa Barat

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472 Kel. Batu Nunggal, Kec. Bandung Kidul	Bandung
Bandung - Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No. 12 B	Bandung
Bandung 3	Ruko Soreang Square Blok B No. 10 Jl. Raya Soreang, Kel. Cingcin, Kec. Soreang	Bandung
Bandung 4	Kompleks Tritan Point Bandung Blok B5 No. 10 Jl. Jend. A.H. Nasution, Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Bandung
Bandung 5	Jl. Sari Asih Raya No. 12 RT 06 / RW 09 Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari	Bandung
Bekasi	Kompleks Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47 Jl. Mayor Hasibuan, Margajaya	Bekasi
Bekasi 2	Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32 Harapan Indah	Bekasi
Bekasi 3	Ruko Taman Jatimakmur Indah No. 11 Jl. Raya Jatimakmur, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede	Bekasi
Bekasi 4	Jl. Sultan Hasanudin No. 233 Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan	Bekasi
Bekasi 5	Ruko Citragran Blok CW 6 No. 9 Jl. Alternative Cibubur Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna	Bekasi
Bogor	Jl. Raya Tajur No. 39 D-E	Bogor
Bogor 2	Ruko Taman Yasmin Sektor 6 Jl. Abdullah Bin Nuh No. 218 (Ring Road Bogor Utara), Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat	Bogor
Cibinong	Cibinong City Centre A-30 Jl. Tegar Beriman I RT 05 / RW 12, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong	Bogor
Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6 Jl. Jenderal Sudirman No. 100 Desa Pucung, Kec. Kotabaru	Karawang
Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No. 3A Jl. Niaga Raya, Jababeka 2, Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan	Cikarang
Cimahi	Jl. Jend. Amirmachmud No. 572 RT 002 / RW 001 Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah	Cimahi
Cirebon	Jl. Tuparev No. 115 A Ds. Kertawinangun, Kec. Kedawung	Cirebon
Cirebon 2	Jl. Prabu Kiansantang RT.001 RW.08 Desa Sukadana, Kec. Pabuaran	Cirebon
Depok	Ruko Margonda Residen No. 12A-14 Jl. Margonda Raya Kav. 461	Depok
Garut	Jl. Cikuray No. 72 C RT 05 / RW 06 Kel. Regol, Kec. Garut Kota	Garut
Indramayu	Jl. Raya Bulak No. 16 RT 02 / RW 0, Kel. Bulak, Kec. Jatibarang	Indramayu
Karawang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 73 Bypass RT 04 / RW 12, Karangpawitan, Karawang Barat	Karawang
Kuningan	Jl. RE Martadinata 53A, Cijoho	Kuningan
Majalengka	Jl. K.H. Abdul Halim No. 104 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka	Majalengka
Purwakarta	Jl. Veteran / Terusan Ibrahim Singadilaga Ruko No. 5-6, Kel. Nagrikaler	Purwakarta
Subang	Jl. Kapten Hanafiah Blok B No. 4 RT 98 / RW 97 Kel. Karanganyar, Kec. Subang	Subang
Sukabumi	Jl. KH. Sanusi No. 46 C Ciseureuh	Sukabumi
Tasikmalaya	Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A Jl. H.Z. Mustofa	Tasikmalaya

Jawa Tengah

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Semarang	Ruko Mataram Plaza Blok D No. 03 Jl. M.T Haryono	Semarang
Semarang 2	Jl. Taman Setiabudi Rukan A-8 RT 01 / RW 18 Kel. Srandol Wetan, Kec. Banyumanik	Semarang
Banjarnegara	Jl. S. Parman No. 28 RT 01 / RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara	Banjarnegara
Cilacap	Ruko Dualima Jaya No. 7 Jl. Suprpto, RT 02 / RW 02 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah	Cilacap
Grobogan	Ruko The Grand City Blok E Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63 Purwodadi	Grobogan
Jepara	Jl. Pemuda No. 2 RT 03 / RW 04 Kel. Potroyudan, Kec. Jepara	Jepara
Kebumen	Perum Graha Mahardika 2 Jl. Kutoarjo D3 Kel. Selang, Kec. Kebumen	Kebumen
Kendal	Jl. Soekarno Hatta No. 81 B RT 010 / RW 001 Kel. Cepiring, Kec. Cepiring	Kendal
Klaten	Jl. Veteran No. 256 A Kel. Bareng Lor, Kec. Klaten Utara	Klaten
Kudus	Kompleks Ruko Ahmad Yani No. 1Jl. Letkol Tit Sudono	Kudus
Magelang	Ruko Metro Square F6 Jl. Mayjen. Bambang Soengeng, Mertoyudan	Magelang
Pekalongan	Jl. Dr. Cipto No. 22D	Pekalongan
Purwokerto - Banyumas	Jl. Gerliya Timur No. 35, Ruko No. 3 Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan	Purwokerto
Rembang	Jl. Pemuda No. 3B	Rembang
Salatiga	Ruko Wijaya Square Blok A3 Jl. Diponegoro, RT 02 / RW 05 Sidorejo Lor	Salatiga

Solo	Jl. R.M. Said No. 160 C RT 2 / RW3 Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari	Surakarta
Solo 2	Jl. Raya Solo Permai HD 03 Solo Baru	Sukoharjo
Sragen	Jl. Sukowati No. 170	Sragen
Tegal	Ruko Nirmala Estate No. 3-4 Jl. Yos Sudarso No. 20 Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur	Tegal

Daerah Istimewa Yogyakarta

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav.2 Jl. Monjali Sinduadi Mlati, Sleman	Yogyakarta

Jawa Timur

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Surabaya	Jl. Ngagel Jaya 39	Surabaya
Surabaya 2	Komp. Ruko Sentra Darmo Villa Blok A No. 6 Jl. Raya Darmo Permai Selatan	Surabaya
Surabaya 3	Jl. Soka 21 C RT 004 / RW 007 Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari	Surabaya
Babat	Jl. Raya Plaosan	Babat
Banyuwangi	Jl. S. Parman No. 131 D Kel. Kalirejo, Kec. Kabat	Banyuwangi
Blitar	Jl. Cemara No. 36	Blitar
Bojonegoro	Jl. M.H. Thamrin 103	Bojonegoro
Gresik	Ruko Green Garden Blok A-2 Jl. Dr. Wahidin No. 3-4 Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas	Gresik
Jember	Jl. Diponegoro No. 32 Ruko 32 B Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates	Jember
Jombang	Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1 Jl. Merdeka	Jombang
Kediri	Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No. 7-8 Jl. Hayam Wuruk	Kediri
Kediri 2	Ruko Business Park Kharisma No. 12 (B-1), Jl. PB Sudirman No. 114 RT 16 / RW 04 Kel. Pare, Kec. Pare	Kediri
Lamongan	Jl. Basuki Rahmat No. 203 Kel. Sukomulyo, Kec. Lamongan	Lamongan
Madiun	Jl. Serayu Timur No. 144 RT 043 / RW 015 Kel. Pandean, Kec. Taman	Madiun
Malang	Jl. Letjen Sutoyo No. 148	Malang
Malang 2	Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Business Center A11-A12 Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen	Malang
Mojokerto	Ruko Kranggan Permai Blok A05-06 Jl. Pahlawan	Mojokerto
Pandaan	Kompleks Ruko Pandaan Central Business Kav. A3-A5 Jl. Raya Bypass Pandaan RT 01 / RW 014 Desa Karangjati, Kec. Pandaan	Pasuruan
Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No. 40 A Kel. Purworejo, Kec. Purworejo	Pasuruan
Ponorogo	Jl. Soekarno Hatta No. 238	Ponorogo
Probolinggo	Jl. Dr. Mochammad Saleh 8E Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan	Probolinggo
Sidoarjo	Kompleks Ruko Gateway No. B/2 Jl. Raya Waru (Aloha)	Sidoarjo
Sidoarjo 2	Jl. Mojopahit No. 32 B	Sidoarjo
Tuban	Jl. Letda Sucipto No. 5A, Perbon	Tuban
Tulungagung	Jl. W.R. Supratman No. 103	Tulungagung

Bali

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Denpasar	Jl. Gatot Subroto No. 463	Denpasar
Denpasar - Sudirman	Kompleks Sudirman Agung Blok C No.8 Jl. PB. Sudirman	Denpasar
Denpasar 3	Kompleks Imam Bonjol Square A6 Jl. Imam Bonjol 555 Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat	Denpasar
Buleleng	Jl. Udayana No.16 Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng	Buleleng
Gianyar	Jl. By Pass Dharma Giri No. 27	Gianyar
Tabanan	Jl Ir. Soekarno Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri	Tabanan

Nusa Tenggara Barat

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Mataram	Jl. Anak Agung Gde Ngurah No. 104 F Ling. Karang Kelebut, Kel. Cakranegara Selatan	Mataram
Mataram 2	Jl. Selaparang Sweta Kel. Mayura, Kec. Cakranegara	Mataram
Sumbawa	Jl. Diponegoro No.63 RT 002 / RW 010 Kel. Bugis, Kec. Sumbawa	Sumbawa

Nusa Tenggara Timur

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Kupang	Jl. Frans Seda RT 042 / RW 013 Kel. Fatululi, Kec. Oebobo	Kupang

SUMATERA

Medan

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Medan	Kompleks Istana Prima Blok A No. 7-8 Jl. Brigjend. Katamso Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun	Medan
Medan 2	Jl. Bambu II No. 67 B-C Kel. Durian, Kec. Medan Timur	Medan
Asahan	Jl. Sisingamangaraja No. 48 E, Lingk. III E Kel. Kisaran Timur, Kec. Kota Kisaran Timur Kota Kisaran	Asahan
Binjai	Kompleks Ruko Surya Permai Jl. T. Amir Hamzah No. 1L	Binjai
Karo	Jl. Veteran No. 57 A Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe	Karo
Padang Sidempuan	Jl. Sudirman No. 8 F Kel. Losung Batu, Kec. Padang Sidempuan Utara	Padang Sidempuan
Pematang Siantar	Jl. Kartini No. 48 E Kel. Timbang Galung, Kec. Siantar Barat	Pematang Siantar
Rantauprapat	Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B Labuhan Batu	Rantauprapat

Riau

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Pekanbaru	Jl. Soekarno Hatta No. 88 Kel. Delima, Kec. Tampan	Pekanbaru
Pekanbaru 3	Jl. Setiabudi No. 89-89 A	Pekanbaru
Air Molek - Indragiri Hulu	Jl. Jend. Sudirman Kel. Sekar Mawar, Kec. Pasir Penyul	Indragiri Hulu
Bagan Batu	Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu	Rokan Hilir
Dumai	Jl. Kelakap Tujuh Kel. Ratusima, Kec. Dumai Selatan	Dumai
Pelalawan	Jl. Maharaja Indah RT 001 / RW 009 Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci	Pelalawan
Ujung Batu	Jl. Sudirman Desa Ujung Batu Timur, Kec. Ujung Batu	Rokan Hulu

Kepulauan Riau

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Tanjung Pinang	Jl. D.I. Panjaitan Km. 08 Kec. Tanjung Pinang Timur, Kel. Air Raja	Tanjung Pinang
Batam	Komplek Mahkota Raya Blok B No.11 Batam Center Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota	Batam
Karimun	Jl. Ahmad Yani, RT 004 / RW 003 Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun	Karimun

Sumatera Barat

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E	Padang
Bukittinggi	Jl. Raya Kapas Panji No. 49 B, Jambu Air Nagari Taluak IV Suku, Kec. Banuhampu Kab. Agam	Bukittinggi
Dharmasraya	Jl. Lintas Sumatera Jorong Pasar Koto Baru	Dharmasraya
Pasaman Barat	Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM Kompleks Gunung Tulas, Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua, Kec. Pasaman	Pasaman Barat

Jambi

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Jambi	Jl. Prof. M. Yamin S.H. No. 65-66 RT. 29 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung	Jambi
Muara Bungo	Jl. Sudirman No. 45-46 RT 003 / RW 001 Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah	Muara Bungo
Muaro Jambi	Jl. Lintas Timur RT 16 / RW 02 Kel. Sengeti, Kec. Sekernan	Muaro Jambi
Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan No. 3 Kel. Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang Tebo	Rimbo Bujang
Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun No. 17 RT 06, Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun	Sarolangun

Bengkulu

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Bengkulu	Jl. Danau No. 08 Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati	Bengkulu

Sumatera Selatan

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4 RT 016 / RW 012 Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II	Palembang
Palembang 2	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 20 / RW 04 Kel. Alang-Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar	Palembang
Baturaja	Jl. Dr. Moh. Hatta RT 04 / RW 04 Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komerling Ulu (OKU)	Baturaja
Pangkalan Balai	Jl. Merdeka No. 9A/B Banyuasin III	Pangkalan Balai
Prabumulih	Jl. Jend. Sudirman No. 8-9 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur	Prabumulih
Lahat	Jl. Kolonel Burlian No. 95 RT 09 / RW 03 Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat	Lahat
Lubuklinggau	Jl. Yos Sudarso No. 48 RT 003, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur I	Lubuklinggau

Kepulauan Bangka Belitung

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Pangkal Pinang	Kompleks Bangka Square Ruko No. 2 Jl. Raya Koba Km. 5 No. 17 Kec. Pangkalan Baru	Bangka Tengah
Belitung	Jl. Jend. Sudirman No. 32 B RT 09 / RW 04 Pangkal Lalang, Tanjung Pandan	Belitung
Sungai Liat	Jl. Jend. Sudirman No. 114 D Kel. Srimenanti, Kec. Sungai Liat	Bangka Induk

Lampung

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Bandar Lampung	Jl. Gajah Mada No. 55 Kota Baru, Tanjung Karang Timur	Bandar Lampung
Bandar Jaya	Jl. Proklamator Raya No. 28-29 Kec. Terbanggi Besar, Bandar Jaya	Lampung Tengah
Metro	Jl. Jend. Sudirman No. 282 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat	Metro
Pringsewu	Jl. A. Yani, RT 012 / RW 01 Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu	Pringsewu
Tulang Bawang	Jl. Lintas Timur Sumatera Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung	Tulang Bawang

KALIMANTAN

Kalimantan Barat

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Pontianak	Jl. M. Sohor No. 45 Blok E-F RT 05 / RW 02 Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan	Pontianak
Ketapang	Jl. D.I. Panjaitan No. B16 Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan	Ketapang
Sanggau	Jl. Jenderal Sudirman No. 23 RT 22 / RW 08 Kel. Beringin, Kec. Kapuas	Sanggau
Sintang	Jl. Lintas Melawi No. 70 Kel. Ladang	Sintang

Kalimantan Tengah

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km. 3,5 No. 6-7 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya	Palangkaraya
Barito Utara	Jl. Tumenggung Surapati No. 37 RT 12, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah	Barito Utara
Pangkalan Bun	Jl. Pasanah (Kawitan 1) RT 23, Sidorejo	Pangkalan Bun
Sampit	Jl. Jendral Sudirman Km. 1,5 No. 19 RT 43 / RW 08 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur	Sampit

Kalimantan Selatan

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 7,8 No. 30 Kertak Hanyar Kab. Banjar	Banjarmasin
Banjarbaru	Jl. Ahmad Yani Km. 35 No. 48	Banjarbaru
Hulu Sungai Tengah	Jl. Murakarta No. 8C RT 005, Kel. Bukit, Kec. Barabai	Hulu Sungai Tengah
Tanah Bumbu	Jl. Raya Batulicin RT 3 / RW 1, Desa Sejahtera Kampung Baru - Simpang Empat	Tanah Bumbu
Tanjung	Jl. Ahmad Yani RT II Mabu'un Murung Puduk, Tabalong	Tanjung

Kalimantan Timur

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6	Samarinda
Samarinda 2 Seberang	Kompleks Ruko Sentra Samarinda Seberang Ruko No. 15 Jl. Bung Tomo, Samarinda Seberang	Samarinda

Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 14/295 RT 06 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan	Balikpapan
Berau	Jl. Durian 1, Ruko No. 4, RT 25 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb	Berau
Bontang	Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F Ruko Primagama	Bontang
Paser	Jl. R.A. Kartini No. 21A RT 13 / RW 4, Kel. Tanah Grogot	Paser
Penajam Paser Utara	Jl. Propinsi Km 18, RT 010 Kel. Petung, Kec. Penajam	Penajam Paser Utara
Sengata	Jl. A.W. Syahrani RT 04 / RW 01 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sengata Utara Kab. Kutai Timur	Sengata
Tarakan	Jl. Gajah Mada No. 75 Kel. Karang Anyar Pantai	Tarakan
Tenggarong	Jl. Patin No. 99B, Tenggarong, Kutai Kertanegara	Tenggarong

Kalimantan Utara

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Bulungan	Jl. Durian No. 87 RT 41 / RW 05 Kel. Tanjung Selor Ilir, Kec. Tanjung Selor	Bulungan

SULAWESI

Sulawesi Utara

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Manado	Jl. Bethesda No. 18 Kel. Ranotana, Kec. Sario	Manado
Bitung	Jl. Wolter Monginsidi No. 45 Kel. Girian Bawah, Kec. Girian	Bitung
Bolaang Mongondow Utara	Jl. Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26 Kec. Bolang Itang Barat	Bolaang Mongondow Utara
Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso Kel. Kotobangun	Kotamobagu
Minahasa Selatan	Lingkungan IV Kel. Uwuran I, Kec. Amurang	Minahasa Selatan
Tahuna - Kepulauan Sangihe	Jl. Raramenus Kel. Sawang Bender, Lingkungan III	Tahuna
Tomohon	Jl. Tomohon Raya No. 55 Kel. Walian, Kec. Tomohon Selatan	Tomohon

Gorontalo

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Gorontalo	Jl. Agus Salim No. 290 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah	Gorontalo
Marisa	Graha Arwana Jl. Trans Sulawesi Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiada Kab. Pohuwato	Marisa

Sulawesi Barat

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Mamuju	Jl. Diponegoro Ruko No. 2 Kel. Karema, Kec. Mamuju	Mamuju
Mamuju Utara	Jl. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu	Mamuju Utara
Polewali Mandar	Jl. H. Andi Depu Ruko Taman Asri No. 1 Kel. Takkatidung, Kec. Polewali	Polewali Mandar

Sulawesi Tengah

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Palu	Ruko Moh. Hatta Center Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E RT 11 / RW 03 Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur	Palu
Kotaraya	Jl. I Gusti Ngurah Rai Desa Kotaraya, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong	Kotaraya
Luwuk	Jl. Yos Sudarso No. 15 Kel. Karaton, Kec. Luwuk Kab. Banggai 94711	Luwuk
Parigi Moutong	Jl. Trans Sulawesi Kel. Bantaya, Kec. Parigi	Parigi Moutong
Poso	Jl. Pulau Sumba No. 7 Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota	Poso
Tolitoli	Jl. Magamu No. 63 Kel. Baru, Kec. Baolan	Tolitoli

Sulawesi Selatan

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Makassar	Jl. Hertasing Baru (Aeropala) No. 98 Kel. Karunrung, Kec. Rappocini	Makassar
Makassar 2	Ruko 237 Motor Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18-19 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya	Makassar
Bone	Jl. Ahmad Yani Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat	Watampone
Bulukumba	Jl. Samratulangi, Dusun Lajae Desa Polewali, Kec. Gantarang	Bulukumba

Gowa	Jl. Poros Gowa Takalar Kel. Manggali, Kec. Pallangga	Gowa
Luwu Timur	Jl. Trans Sulawesi Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni	Luwu Timur
Palopo	Jl. Kelapa Kel. Dangerakko, Kec. Wara	Palopo
Parepare	Ruko Pelangi No. 1 Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung	Parepare
Toraja	Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja	Toraja

Sulawesi Tenggara

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Kendari	Jl. Brigjend. Moh. Yunus Bypass	Kendari
Bau-Bau	Jl. Bataraguru No. 39 Kel. Wajo, Kec. Murhum	Bau Bau
Kolaka	Jl. Dr. Sutomo No. 51 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka	Kolaka
Konawe	Jl. Sapati No. 15 D Kel. Tumpas, Kec. Unaha	Konawe

MALUKU & PAPUA

Maluku Utara

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Ternate	Jl. Stadion No. 36 RT 01 / RW 01 Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah	Ternate
Tobelo	Jl. Kemakmuran Desa Rawajaya, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara	Tobelo

Maluku

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07 Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lateri, Kec. Bagualan	Ambon

Papua

CABANG	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Jayapura	Jl. Kelapa Dua Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan	Jayapura
Biak Numfor	Jl. Selat Sunda No. 07 Fandoi, Biak	Biak Numfor
Merauke	Ruko Parako No. 03 Jl. Parakomando RT 001 / RW 001 Kel. Mandala, Kec. Merauke	Merauke
Nabire	Jl. Merdeka No. 69 Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire	Nabire

GERAI

JAWA & BALI

DKI Jakarta

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Cijantung	Jl. Gongseng No. 28 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo	Jakarta Timur
Ciracas	Kompleks PERUMNAS Jl. Kelapa Dua Wetan Blok B No. 12 RT 04 / RW 05 Kel. Kelapa Dua Wetan	Jakarta Timur
Johar Baru	Jl. Pangkalan Asem Raya No. 45 Kel. Galur, Kec. Johar Baru	Jakarta Pusat
Kalideres	Jl. Warung Pojok Kampung Asem No. 114 RT 005 / RW 005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres	Jakarta Barat
Pesanggrahan	Jl. Ciledug Raya No. 6 RT 10 / RW 04 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan	Jakarta Selatan
Tebet	Gedung Regatama Blok A No. 106 Jl. Pariaman Kel. Manggarai, Kec. Tebet	Jakarta Selatan

Banten

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Tangerang - Batuceper	Jl. Raya Poris Indah RT 02 / RW 03 Kel. Poris Indah, Kec. Batuceper	Tangerang
Tangerang - Jatiuwung	Jl. Raya Gatot Subroto Kp. Jatake, RT 006 / RW.002 Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung	Tangerang

Tangerang - Karawaci	Jl. Mendut Raya Blok CC No. 19 Taman Borobudur 2 Perumnas II Tangerang	Tangerang
Tangerang - Larangan	Jl. Inpres Raya No. 3 RT 1 / RW 16 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan	Tangerang
Tangerang - Tigaraksa	Ruko Sudirman Indah Blok A 012A No.10 Kel. Pasir Nangka, Kec. Tigaraksa	Tangerang
Ciputat Timur	Jl. W.R. Supratman No. 3 RT 01 / RW 08 Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur	Tangerang Selatan
Serpong	Jl. Raya Serpong No. 119 B RT 01 / RW 03 Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota	Tangerang Selatan
Serpong Utara	Jl. Raya Bhayangkara Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara	Tangerang Selatan

Jawa Barat

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Bandung - Katapang	Jl. Terusan Kopo Km. 11 No. 46 Cilampeni	Bandung
Bandung - Mandalajati	Jl. A.H. Nasution No. 135 RT 01 / RW 06 Kel. Karangpamulang, Kec. Mandalajati	Bandung
Bandung Barat - Padalarang	Jl. Raya Ciburuy RT 03 / RW 17 Kel. Padalarang, Kec. Padalarang	Bandung Barat
Bekasi - Bantar Gebang	Jl. Pasar Lama No. 40 RT 03 / RW 09 Bantar Gebang	Bekasi
Bekasi - Jatiasih	Jl. Raya Jatiasih No. 36 A Kp. Kebantenan, RT 005 / RW 010 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih	Bekasi
Bekasi - Serang Baru	Jl. Raya Serang Cibarusah Kp. Pasirandu, RT.07 / RW.04 Desa Sukasari, Kec. Serang Baru	Bekasi
Bekasi - Setu	Jl. Raya Setu RT 009 / RW 008 Desa Ciledug, Kec. Setu	Bekasi
Bogor - Bojong Gede	Jl. Raya Bojong Gede No. 65 Kp. Pasar Lama, RT 02 / RW 09 Kel. Bojonggede, Kec. Bojonggede	Bogor
Bogor - Ciomas	Jl. Raya Kreteg Pagelaran Kp. Sukajaya RT 001 / RW 002 Kel. Pagelaran	Bogor
Bogor - Gunung Putri	Jl. Pertigaan Mercedes Kp. Poncol, RT 003 / RW 002 Kel. Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri	Bogor
Depok - Bojongsari	Jl. Raya Ciputat – Parung RT 004 / RW 003 Kel. Bojongsari Baru	Depok
Depok - Pancoran Mas	Jl. Raya Sawangan (Parung Bingung) No. 33 RT 04 / RW 03 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas	Depok
Karawang - Telagasari	Jl. Syeh Quro Dusun Krajan I, RT 03 / RW 01 Kec. Telagasari	Karawang
Sumedang	Jl. Pangerang Sugih No. 29 RT 02 / RW 07 Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan	Sumedang

Jawa Tengah

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Semarang - Ngaliyan	Pondok Ngaliyan Asri Kav. 1RT 01 / RW 14 Kel. Tambak Aji, Kec. Ngaliyan	Semarang
Semarang - Pedurungan	Jl. Brigjen Sudiarto No. 537 B RT 01 / RW 04 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan	Semarang
Semarang - Ungaran	Jl. Sutoyo No. 57 Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur	Semarang
Jepara - Mayong	Kompleks Ruko Atthoyibah No. 2 Jl. Kudus, RT 3 / RW 2 Pelemkerep, Kec. Mayong	Jepara
Pati - Juwana	Jl. Diponegoro No. 16 Blok E RT 04 / RW 01 Desa Kauman, Kec. Juwana	Pati
Pekalongan - Kajen	Jl. Raya Kajen RT 03 / RW 06 Desa Kebon Agung, Kec. Kajen	Pekalongan
Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi No. 22 RT 22, Gayam	Sukoharjo
Sukoharjo - Kartasura	Jl. Adi Sumarmo No. 73 RT 01 / RW 03 Ngabeyan, Kartasura	Sukoharjo
Karanganyar - Tasikmadu	Jl. Lawu No. 196 RT 07 / RW 10 Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu	Karanganyar

Daerah Istimewa Yogyakarta

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Sleman - Triharjo	Jl. Dr. Rajimin Kel. Sucen	Sleman

Jawa Timur

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Surabaya - Jambangan	Jl. Jambangan Tama No. 2A RT 07 / RW 03 Kel. Jambangan, Kec. Jambangan	Surabaya
Surabaya - Tenggilis Mejoyo	Jl. Kutisari Utara No. 19 RT 05 / RW 02 Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo	Surabaya
Blitar - Wlingi	Jl. Gajah Mada No. 39 RT 02 / RW 04 Kel. Wlingi, Kec. Wlingi	Blitar
Gresik - Balongpanggang	Dusun Banci, RT 01 / RW 01 Desa Balongpanggang, Kec. Balongpanggang	Gresik
Gresik - Driyorejo	Jl. Raya Driyorejo No. 127 Kel. Driyorejo	Gresik
Gresik - Menganti	Jl. Raya Bringkang RT 003 / RW 002	Gresik
Gresik - Sidayu	Jl. Pemuda No. 78	Gresik

Jombang - Mojoagung	Jl. Raya Yos Sudarso No. 161 RT 001 / RW 002 Kel. Janti, Kec. Mojoagung	Jombang
Malang - Batu	Jl. Dewi Sartika 1A RT 07 / RW 10, Kel. Temas, Batu	Malang
Malang - Lawang	Pertokoan PJKA Kusuma Masyur Blok BD Jl. Raya Thamrin Selatan Stasiun Lawang	Malang
Mojokerto - Mojosari	Jl. Gajah Mada RT 007 / RW 001 Kel. Menanggal, Kec. Mojosari	Mojokerto
Nganjuk - Tanjunganom	Krajan Selatan, RT 05 / RW 06 Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjunganom	Nganjuk
Sidoarjo - Krian	Pertokoan Katerungan No. 4 Jl. Embong Sono, Kel. Katerungan	Sidoarjo
Sidoarjo - Sukodono	Jl. Raya Dungus RT 16 / RW 04 Kel. Sukodono	Sidoarjo
Sidoarjo - Taman	Jl. Sepanjang Tani No. 8 A Sepanjang, Kec. Taman	Sidoarjo

SUMATERA

Sumatera Utara

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Medan - Medan Marelan	Jl. Marelan Raya No. 149 Link 12 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan	Medan
Deli Serdang - Percut Sei Tuan	Jl. Besar Tembung No. 26 Dusun IX, RT 010 / RW 005 Kel. Bandar Klippa	Deli Serdang
Deli Serdang - Tanjung Morawa	Jl. Medan - Lubuk Pakam Km. 17,6 Dusun IX, RT 010 / RW 005 Desa Tanjung Morawa-B, Kec. Tanjung Morawa	Deli Serdang
Labuhan Batu - Bilah Hulu	Jl. Ampera Kel. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu Labuhan Batu	
Langkat - Stabat	Jl. Proklamasi No. 14 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat	Langkat

Riau

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Pekanbaru - Marpoyan Damai	Jl. Kaharuddin Nasution No. 260 RT 002 / RW 006 Kel. Maharatu	Pekanbaru
Pekanbaru - Rumbai	Jl. Sembilang No. 23 RT 03 / RW 03 Kel. Lembah Sari	Pekanbaru
Pekanbaru - Tenayan Raya	Jl. Lintas Timur Km. 12 RT 003 / RW 001 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya	Pekanbaru

Kepulauan Riau

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Batam - Sagulung	Winner Bugis Junction Blok A3 No. 07 RT 8 / RW1 Kel. Sagulung, Kec. Sagulung Batam, Pulau Batam	Batam
Bintan - Bintan Utara	Jl. Permaisuri No. 5 A Kel. Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara	Bintan
Tanjung Pinang - Bintan Timur	Jl. Perikanan No. 42 Kp. Kuala Lupur, Kel. Kijang Kota	Tanjung Pinang

Sumatera Selatan

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Palembang - Sako	Jl. Siaran Sako No. 1 B RT 014 / RW 08 Kel. Sako, Kec. Sako	Palembang

Lampung

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Lampung Selatan - Jati Agung	Jl. Raya Karang Anyar, RT 02 / RW 01 Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung	Lampung Selatan
Lampung Selatan - Tanjung Bintang	Jl. Raya Serdang RT 24 / RW 4B Kel. Serdang, Kec. Tanjung	Lampung Selatan
Lampung Tengah - Kalirejo	Jl. Jend. Sudirman Dusun 02, RT 02 / RW 07 Kp. Kalirejo, Kec. Kalirejo	

KALIMANTAN

Kalimantan Timur

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Samarinda - Palaran	Jl. Ampera RT 1 Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran	Samarinda
Samarinda Seberang - Sungai Kunjang	Jl. Slamet Riyadi RT 003 Kel. Karang Asem Ilir, Kec. Sungai Kunjang	Samarinda
Balikpapan Utara	Jl. Soekarno Hatta No. 17 RT 01, Kel. Gunung Samarinda	Balikpapan
Balikpapan Selatan	Jl. Mulawarman No. 52 RT 052, Kel. Sepinggian	Balikpapan
Tenggarong Seberang	Jl. Mulawarman RT 17 Kel. Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang

Kalimantan Selatan

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Banjar - Sungai Tabuk	Jl. Martapura Lama Km 1.5 RT 4, Kel. Gudang Hirang, Kec. Sungai Tabuk	Banjar
Banjarbaru - Mataraman	Jl. A. Yani Km. 56,6 RT 01 / RW 01, Ds. Bawah Pasar	Banjarbaru
Barito Kuala - Alalak	Jl. Trans Kalimantan No. 73 RT 008 / RW 002 Kel. Berangas Seberang, Kec. Alalak	Barito Kuala

SULAWESI

Sulawesi Utara

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Manado - Tikala	Jl. Yos Sudarso Kel. Paal Dua, Kec. Tikala	Manado
Bolaang Mongondow - Bolaang	Jl. AKD Trans Sulawesi Kel. Inobonto, Kec. Bolaang	Bolaang Mongondow
Minahasa Utara - Airmadidi	Airmadidi Atas Lingkungan IX Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi	Minahasa Utara
Tomohon - Kawangkoan	Kompleks Tugu Kacang Jl. Raya Kawangkoan Kel. Talikuran Barat Lingkungan I Kec. Kawangkoan Utara	Tomohon

Gorontalo

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Gorontalo - Boliyohuto	Komp. Pasar Monggolito Jl. Raja Tolangohula Dusun Karang Sari, Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto	Gorontalo
Gorontalo - Limboto	Jl. Kolonel Rauf Moo Kel. Kayu Bulan, Limboto	Gorontalo
Gorontalo - Tibawa	Jl. Trans Sulawesi Desa Isimu, Kec. Tibawa	Gorontalo

Sulawesi Tengah

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Palu - Tawaeli	Jl. Trans Sulawesi RT 003 / RW 001 Kel. Lambara, Kec. Tawaeli	Palu
Sigi - Sigi Biromaru	Jl. Lasoso No. 5B RT 002 / RW 001 Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru	Sigi

Sulawesi Selatan

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Makassar - Manggala	Jl. Ujung Bori Lama No. 15 RT 02 / RW 03 Kel. Antang, Kec. Manggala	Makassar
Makassar - Wajo	Jl. Tarakan No. 23 RT 001 / RW 002 Kel. Mampu, Kec. Wajo	Makassar
Maros - Turikale	Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 56 Kel. Pettuadde, Kec. Turikale	Maros
Luwu - Walenrang Utara	Dusun Bolong No. 1 Km. 27 Kec. Walenrang Utara	Luwu

Sulawesi Tenggara

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Kendari - Abeli	Jl. Setiabudi Kel. Lapulu, Kec. Abeli	Kendari

MALUKU & PAPUA

Maluku

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Ambon - Sirimau	Jl. Cendrawasi No. 63 RT 002 / RW 004 Kel. Rijali, Kec. Sirimau	Ambon
Ambon - Teluk Ambon	Jl. Ir. M. Putuhena No. 3 RT 007 / RW 004 Kel. Wayame, Kec. Teluk Ambon	Ambon

Papua Barat

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Sorong - Aimas	Jl. Buncis RT 005 / RW 010 Malawe, Aimas	Sorong
Sorong - Sorong Barat	Jl. Yos Sudarso RT 002 / RW 002 Kel. Kampung Baru, Kec. Sorong Barat	Sorong

Papua

GERAI	ALAMAT	KOTA/KABUPATEN
Nabire - Nabire Barat	Jl. Poros Nabire Wanggar RT 04 / RW 04 Kel. Bumi Raya, Kec. Nabire Barat	Nabire
Merauke - Tanah Miring	Jl. Teuku Umar No. 171 RT 008 / RW 02 Kel. Yasa Mulya, Kec. Tanah Miring	Merauke



FLOATING MARKET – MARTAPURA
IKHSAN EFFENDI

Pasar terapung merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang memanfaatkan fungsi ekonomis sungai dalam mendukung sistem perekonomian



TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2016

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI 2016 PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT BFI Finance Indonesia Tbk tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi Perusahaan.

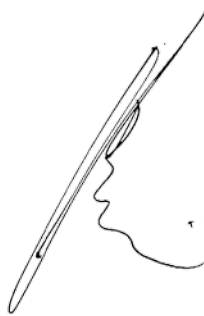
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 24 Maret 2017

DEWAN KOMISARIS



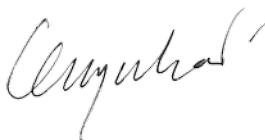
Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris



Johanes Sutrisno
Komisaris (Independen)



Alfonso Napitupulu
Komisaris (Independen)



Emmy Yuhassarie
Komisaris (Independen)



Dominic John Picone
Komisaris

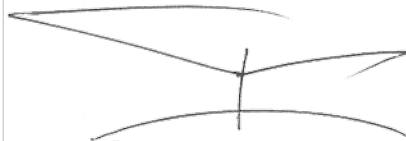


Sunata Tjiterosampurno
Komisaris

DIREKSI



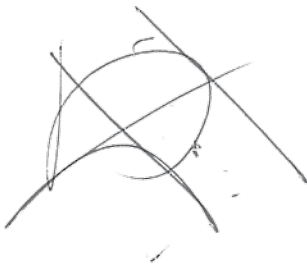
Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur



Cornellius Henry Kho
*Direktur Operasional
dan Pembiayaan Korporasi*



Sudjono
*Direktur Keuangan
dan Teknologi Informasi*



Sutadi
Direktur Pembiayaan Ritel



Sigit Hendra Gunawan
*Direktur Risiko Perusahaan
(Independen)*



WAYANG KEKE - SETU BEKASI
JACOBUS ROIHOT HUTAGAOL

Karya unik wayang yang terbuat dari
daun singkong untuk pertunjukan seni

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

**LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016/
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016**

DAN/AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

DAFTAR ISI

CONTENTS

Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
	Ekshibit/ Exhibit	
Laporan Posisi Keuangan	A	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	B	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	C	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	D	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	E	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2016 AND 2015
AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015**

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Francis Lay Sioe Ho
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014 Pondok Pinang Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Presiden Direktur
- Nama** : Sudjono
Alamat Kantor : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Alamat Rumah : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36
RT 002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

- kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk;
- laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- a. semua informasi dalam laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

- Name** : Francis Lay Sioe Ho
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Jl. Duta Indah II No 6, RT 001
RW 014, Pondok Pinang Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Telephone : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Title : President Director
- Name** : Sudjono
Office Address : BFI Tower - Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang Selatan, 15322
Residential Address : Taman Provence, Blok 3 A9 No. 36 RT
002 RW 025, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang
Selatan
Telephone : 021 - 2965 0300, 2965 0500
Title : Director

declare that :

- we are responsible for the preparation and presentation of PT BFI Finance Indonesia Tbk's financial statements;*
- PT BFI Finance Indonesia Tbk's Financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
- a. *all Information in the PT BFI Finance Indonesia Tbk's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
- b. *PT BFI Finance Indonesia Tbk's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
- we are responsible for PT BFI Finance Indonesia Tbk's internal control system.*

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Tangerang Selatan / *South Tangerang,*
17 Februari / *February,* 2017



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur/President Director



Sudjono
Direktur/Director

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2

Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322

Phone (021) 2965 0300, 2965 0500 Fax (021) 2966 0757, 2966 0758

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 098/1.B008/AUS.1/12.16
Hal : Laporan Keuangan
31 Desember 2016

No. : 098/1.B008/AUS.1/12.16
Re : Financial Statements
31 December 2016

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Tangerang Selatan

*The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT BFI Finance Indonesia Tbk
South Tangerang*

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT BFI Finance Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2016 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT BFI Finance Indonesia Tbk as of 31 December 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan

Asep Ugi Sugianto, SE, CPA
NIAP AP. 1240/
License No. AP. 1240

17 Pebruari 2017 / 17 February 2017

IF/yn

Ekshibit A

Exhibit A

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015*)	1 Jan/Jan 2015*)	
ASET					ASSETS
KAS DAN SETARA KAS	2b,d,3	165.388	777.233	289.680	CASH AND CASH EQUIVALENTS
INVESTASI NETO SEWA PEMBIAYAAN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 60.306, Rp 82.837 dan Rp 52.410 pada tahun 2016, 2015 dan 2014	2d,e,4	7.121.175	5.209.847	3.115.372	NET INVESTMENTS IN FINANCE LEASE - net of allowance for impairment losses of Rp 60,306, Rp 82,837 and Rp 52,410 in 2016, 2015 and 2014
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 122.695, Rp 96.816 dan Rp 109.436 pada tahun 2016, 2015 dan 2014	2d,f,5	4.462.184	4.688.156	5.443.217	CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - net of allowance for impairment losses of Rp 122,695, Rp 96,816 and Rp 109,436 in 2016, 2015 and 2014
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	2g,6	41.929	40.451	36.129	PREPAID EXPENSES
PIUTANG LAIN-LAIN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 25.763, Rp 36.328 dan Rp 22.568 pada tahun 2016, 2015 dan 2014	2d,p,7	164.090	141.317	126.291	OTHER RECEIVABLES - net of allowance for impairment losses of Rp 25,763, Rp 36,328 and Rp 22,568 in 2016, 2015 and 2014
ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 253.855, Rp 200.915 dan Rp 152.390 pada tahun 2016, 2015 dan 2014	2h,8	414.143	427.875	415.852	FIXED ASSETS - net of accumulated depreciation of Rp 253,855, Rp 200,915 and Rp 152,390 in 2016, 2015 and 2014
ASET TAK BERWUJUD - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 47.816, Rp 39.605 dan Rp 31.309 pada tahun 2016, 2015 dan 2014	2i,9	19.712	22.287	30.979	INTANGIBLE ASSETS - net of accumulated amortization of Rp 47,816, Rp 39,605 and Rp 31,309 in 2016, 2015 and 2014
ASET DERIVATIF	2d,n,o,10	41.301	440.832	187.176	DERIVATIVE ASSETS
ASET PAJAK TANGGUHAN	2t,14c	36.554	13.885	32.007	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2d,11	9.780	8.531	5.831	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET		12.476.256	11.770.414	9.682.534	TOTAL ASSETS

*) direklasifikasi (Catatan 37)

*) as reclassified (Note 37)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	1 Jan/Jan 2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Pinjaman yang diterima	2d,j,o,12	4.690.939	5.636.699	3.932.558	Fund borrowings
Utang pajak	2t,14a	93.541	70.449	33.282	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	2d,o,15	190.240	140.586	106.538	Accrued expenses
Imbalan pasca-kerja	2l,28	140.392	111.967	100.778	Post-employment benefits
Surat berharga yang diterbitkan - setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi sebesar, Rp 9.705, Rp 3.884 dan Rp 2.953 pada tahun 2016, 2015 dan 2014	2d,k,13a, 13b	2.965.295	1.681.116	1.622.047	Securities issued - net of unamortized securities issuance cost of Rp 9,705, Rp 3,884 and Rp 2,953 in 2016, 2015 and 2014
Utang dividen	2v,27	1.251	1.003	214.493	Dividend payables
Utang lain-lain	2d,16	139.914	109.491	105.885	Other payables
JUMLAH LIABILITAS		8.221.572	7.751.311	6.115.581	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 250 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 2.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.596.711.562 saham, 1.565.959.562 saham dan 1.549.934.562 saham pada tahun 2016, 2015 dan 2014	17	399.178	391.490	387.484	Share capital - par value of Rp 250 (full amount) per share Authorized capital - 2,000,000,000 shares Issued and fully paid-up capital - 1,596,711,562 shares, 1,565,959,562 shares and 1,549,934,562 shares in 2016, 2015 and 2014
Tambahan modal disetor - bersih Saham treasury	18 2r,17	553.286 (252.160)	475.176 (4.044)	432.918 -	Additional paid-in capital - net Treasury stock
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	2s,19	-	6.117	9.305	Management and employee stock options program share reserve
Penghasilan komprehensif lain Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	2n,10,33	(32.875)	24.563	(32.409)	Other comprehensive income Gain (loss) on derivative instrument for cash flows hedges - net
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	2l,28,33	(49.390)	(43.784)	(49.443)	Loss on defined benefit actuarial program
Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya		31.696 3.604.949	22.374 3.147.211	15.000 2.804.098	Retained earnings Appropriated Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		4.254.684	4.019.103	3.566.953	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12.476.256	11.770.414	9.682.534	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015*)	
PENDAPATAN				INCOME
Sewa pembiayaan	2d,e,m,21	1.332.174	884.977	Finance lease
Pembiayaan konsumen	2d,f,m,20	1.068.610	1.239.489	Consumer financing
Kuangan	2d,m	21.242	35.527	Finance
Lain-lain	2d,h,m,25	805.083	670.624	Others
Jumlah Pendapatan		3.227.109	2.830.617	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Bunga dan keuangan	2d,j,k,m,22 2c,l,m,19,	792.281	712.123	Interest and financing charges
Gaji dan tunjangan	23,29	715.765	626.324	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	2g,h,i,m,24	392.315	341.267	General and administrative
Provisi kerugian penurunan nilai atas:				Provision for impairment losses of:
Piutang pembiayaan konsumen	2d,m,5	190.134	141.594	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	2d,m,4	83.191	88.560	Finance lease receivables
Lain-lain	2d,m,26	28.460	85.255	Others
Jumlah Beban		2.202.146	1.995.123	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.024.963	835.494	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	2t,14	226.598	185.206	Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		798.365	650.288	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	2l,28,33	(7.007)	7.074	Gain (loss) on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	14c,33	1.401	(1.415)	Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss
POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				ITEMS THAT WILL BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	2n,10,33	(71.798)	71.215	Effective portion of the fair value change of the derivative instrument - cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	14c,33	14.360	(14.243)	Income tax relating to item that will be reclassified to profit or loss
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		(63.044)	62.631	OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		735.321	712.919	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2u,32	524	417	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	2u,32	524	417	DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)

*) direklasifikasi (Catatan 37)

*) as reclassified (Note 37)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit C

Exhibit C

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan saham kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/ Management and employee stock options program share reserve	Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih/ Cumulative gain (loss) on derivative instrument for cash flow hedges - net	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti/ Gain (loss) on defined benefit actuarial program	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity
						Telah ditetapkan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditetapkan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	387.484	432.918	9.305 (32.409)(49.443)	15.000	2.804.098	3.566.953
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	650.288	650.288
- Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	-	-	-	56.972	-	-	-	56.972
- Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	-	-	-	-	-	-
- Keuntungan aktuarial	-	-	-	-	5.659	-	-	5.659
Program pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Opsi saham manajemen dan karyawan berbasis saham yang dieksekusi	4.006	42.258	(3.188)	-	-	-	-	43.076
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	-	-	-	-	-	7.374 (7.374)	-
Dividen tunai tahun 2014	-	-	-	-	-	-	83.698 (83.698)
Dividen tunai interim tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	216.103 (216.103)
Saham treasuri	-	(4.044)	-	-	-	-	-	(4.044)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	391.490	475.176 (6.117	24.563 (43.784)	22.374	3.147.211	4.019.103

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Total comprehensive income
for the year -
Income for the year -
Other comprehensive income
- net of tax
Effective portion of cash
- flows hedges
Actuarial gain from -
pension plan
Management and employee
stock options exercised
Appropriation for general
reserve
Cash dividends for the year 2014
Interim cash dividends for the year
Treasury stock

Balance as of 31 December 2014

Balance as of 31 December 2015

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	391.490	475.176 (4.044)	6.117	24.563 (43.784)	22.374	3.147.211	4.019.103	Balance as of 31 December 2015	4.019.103	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity
										Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan saham Manajemen dan karyawan berbasis saham/ Management and employee stock options program share reserve	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	Total comprehensive income for the year	-	-	-	-
- Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	Income for the year	-	-	-	-
- Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income - net of tax	-	-	-	-
- Bagian yang efektif dari	-	-	-	-	-	-	-	Effective portion of cash	-	-	-	-
- melindungi nilai arus kas	-	-	-	57.438	-	-	(57.438)	- flows hedges	-	-	(57.438)	-
- Kerugian aktuarial	-	-	-	-	-	-	-	Actuarial loss from -	-	-	-	-
- program pensiun	-	-	-	-	-	-	(5.606)	pension plan	-	-	(5.606)	-
Opsi saham manajemen dan karyawan berbasis saham yang dieksekusi	7.688	78.110	(6.117)	-	-	-	-	Management and employee stock options exercised	-	-	-	79.681
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	-	-	-	-	9.322 (-	-	Appropriation for general reserve	9.322 (9.322)	-	-
Dividen tunai tahun 2015	-	-	-	-	-	-	(106.840)	Cash dividends for the year 2015	-	(106.840)	(106.840)	(106.840)
Dividen tunai interim tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(224.465)	Interim cash dividends for the year	-	(224.465)	(224.465)	(224.465)
Saham treasury	-	(248.116)	-	-	-	-	-	Treasury stock	-	-	(248.116)	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	399.178	553.286 (252.160)	-	(32.875)	(49.390)	31.696	3.604.949	Balance as of 31 December 2016	3.604.949	4.254.684	4.254.684	4.254.684

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Transaksi pembiayaan		12.304.611	11.520.772	Financing transactions
Bunga bank dan deposito berjangka		26.899	30.591	Interest from banks and time deposits
Lain-lain		801.404	611.223	Others
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Transaksi pembiayaan baru	(10.742.821)	(10.057.695)	New financing transactions
Beban umum dan administrasi	(997.747)	(1.082.367)	General and administrative expenses
Beban bunga dan keuangan	(971.494)	(718.526)	Interest and financing charges
Pajak penghasilan	(189.170)	(155.636)	Income taxes
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		231.682	148.362	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	8	11.823	11.048	Proceeds from sale of fixed assets
Penambahan aset tetap	8	(56.625)	(82.112)	Additions of fixed assets
Penambahan aset tak berwujud	9	(5.636)	(4.827)	Additions of intangible assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(50.438)	(75.890)	Net cash flows used for investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Pinjaman yang diterima	12	4.614.300	4.423.251	Fund borrowings
Pembiayaan bersama	31b	757.731	1.830.553	Joint financing
Surat berharga yang diterbitkan	13a,b	2.000.000	1.255.000	Securities issued
Penerusan pinjaman (<i>channeling</i>) dan jual beli piutang	31a	-	9.867	Channeling and receivables sales and purchase
Opsi saham yang dieksekusi	19	67.808	35.335	Stock options exercised
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pinjaman yang diterima	12	(5.252.307)	(2.886.898)	Fund borrowings
Pembiayaan bersama	31b	(1.463.067)	(1.960.608)	Joint financing
Penerusan pinjaman (<i>channeling</i>) dan jual beli piutang	31a	(178.051)	(578.854)	Channeling and receivables sales and purchase
Pelunasan pokok surat berharga yang diterbitkan	13a,b	(710.000)	(1.195.000)	Repayment of Securities issued principal
Hasil pelaksanaan opsi saham karyawan	19	(50.329)	-	The result of implementation of employee stock option
Dividen tunai	27	(331.058)	(513.521)	Cash dividends
Pembelian kembali saham	17	(248.116)	(4.044)	Treasury stock
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		(793.089)	415.081	Net cash flows (used for) provided by financing activities

Ekshibit D/2

Exhibit D/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015*)	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(611.845)	487.553	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		777.233	289.680	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		165.388	777.233	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:
Kas dan bank	3	145.388	84.233	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka	3	20.000	693.000	Time deposits
		165.388	777.233	

*) direklasifikasi (Catatan 37)

*) as reclassified (Note 37)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT BFI Finance Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia pada tanggal 7 April 1982 berdasarkan Akta notaris No. 57 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390. Berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Inge Hendarmin, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 14 Agustus 1986, nama Perusahaan diubah dari PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9677-HT.01.04.TH.86 tanggal 7 Oktober 1986 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 94 tanggal 25 Nopember 1986, Tambahan No. 1451. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta No. 116 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 27 Juni 2001, sehubungan dengan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03668-HT.01.04.TH.2001 tanggal 24 Juli 2001 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 2002, Tambahan No. 4195.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta No. 10 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan penerbitan saham hasil pelaksanaan Management & Employee Stock Option Program (MESOP) untuk Tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0061069 tanggal 27 Juni 2016. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diselesaikan, perubahan ini belum diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982, yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990.

Pada tanggal 20 Pebruari 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengamandemen ijin usaha Perusahaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-038/KM.5/2006.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information of the Company

PT BFI Finance Indonesia Tbk ("the Company") was established as PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia on 7 April 1982 based on Notarial deed No. 57 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice (recently known as the Ministry of Law and Human Rights) of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 dated 28 October 1982 and was published in the State Gazette No. 102, dated 21 December 1982, Supplement No. 1390. Based on Notarial deed of Inge Hendarmin, S.H., Notary in Jakarta dated 14 August 1986, the Company's name change from PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia to become PT Bunas Finance Indonesia Tbk, this amendment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-9677-HT.01.04.TH.86 dated 7 October 1986 and was published in the State Gazette No. 94 dated 25 November 1986, Supplement No. 1451. The Company's Articles of Association has been amended several times, which one of the amendments was based on Notarial deed No. 116 dated 27 June 2001 of Aulia Taufani, S.H., a substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, concerning the change in the name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to become PT BFI Finance Indonesia Tbk. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-03668-HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001 and was published in the State Gazette No. 35 dated 30 April 2002, Supplement No. 4195.

The Company's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment was covered by the Notarial deed No. 10 dated 20 June 2016 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Tangerang, regarding the issuance approval of shares for the implementation of the Phase II of the Management & Employee Stock Option Program (MESOP), up to 30 June 2016. The amendment was accepted and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0061069 dated 27 June 2016. Up to the date of financial statements were completed, this amendment was not published in the State Gazette.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance by virtue of his decree No. KEP-038/KM.11/1982 dated 12 August 1982 as amended by Decree No. 493/KMK.013/1990 dated 23 April 1990.

On 20 February 2006, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia amended the Company's license in its decision letter No. KEP-038/KM.5/2006.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (Lanjutan)

Melalui amandemen ini, ijin usaha yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk berlaku surut sejak adanya persetujuan perubahan nama Perusahaan dari PT Bunas Finance Indonesia Tbk menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk dari instansi yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03668. HT.01.04.TH. 2001 tanggal 24 Juli 2001.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Sewa pembiayaan
- b. Pembiayaan konsumen
- c. Anjak piutang
- d. Usaha kartu kredit

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29), ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Laporan perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BFI Finance Indonesia Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 44 tanggal 15 April 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 30 April 2015 dan juga telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0934483.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 serta telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank sesuai surat dari Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-4171/NB.111/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, sudah ada aturan mengenai pengklasifikasian pembiayaan sesuai POJK 29 tersebut namun penyajian di dalam laporan keuangan masih dilakukan secara paralel sehingga penyajian kegiatan Perusahaan dalam laporan keuangan ini masih mengacu kepada kegiatan Perusahaan sesuai PMK 84 yang dijalankan oleh Perusahaan yaitu Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen.

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment and General Information of the Company (Continued)

Through this amendment, the previous license granted to PT Bunas Finance Indonesia Tbk was applied for retroactively since the approval of the change in the name of the Company from PT Bunas Finance Indonesia Tbk to PT BFI Finance Indonesia Tbk from the regulatory authority in its decision letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-03668. HT.01.04.TH.2001 dated 24 July 2001.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company is mainly engaged in financing activities through the provision of financing or capital goods comprising the followings:

- a. Finance lease
- b. Consumer financing
- c. Factoring of accounts receivable
- d. Credit card

Furthermore, to meet the regulatory requirements of the Financial Services Authority (OJK) No. 29/POJK.5/2014 concerning the Implementation of Financing Company (POJK 29), the scope of activities of the Company has been changed to be as follows:

- a. Investment financing
- b. Working capital financing
- c. Multipurpose financing
- d. Other business activities under approval of Financial Services Authority (OJK)

Statements of changes in the articles of association related to the intent and purpose as well as the business activities of PT BFI Finance Indonesia Tbk, as referred to Article 3 of the Company's articles were approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) pursuant to the Deed of Minutes of EGM No. 44 dated 15 April 2015 in conjunction with the Deed No. 1 dated 30 April 2015 and has legalized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0934483.AH.01.02 Year 2015 dated 30 April 2015 and have been noted in the file of the Directorate of Institutional and Non-Bank Financial Industrial Products accordance with the letter from the Director of Institutional and Non-Bank Financial Industrial Products of Financial Services Authority (OJK) No. S-4171/NB.111/2015 dated 5 August 2015.

As of the date of financial statements, there has been a regulation that governs the financing classification based on POJK 29, however, the presentation in financial statements was carried out in parallel so that the presentation of the Company's business activities in financial statements is still referring to the activities being engaged by the Company in accordance to PMK 84, namely Finance Lease and Consumer Finance.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (Lanjutan)

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1982. Saat ini, Perusahaan menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Kantor pusat Perusahaan terletak di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan.

Perusahaan mempunyai masing-masing 209 kantor cabang dan 96 gerai pada tanggal 31 Desember 2016, dan 205 kantor cabang dan 62 gerai pada tanggal 31 Desember 2015 yang berlokasi, antara lain, di Palembang, Banjarmasin, Surabaya, Samarinda, Bandung, Pekanbaru, Medan, Jambi, Makassar dan Tangerang.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tahun 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana atas 2.125.000 sahamnya dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham melalui bursa efek di Indonesia dengan harga penawaran sejumlah Rp 5.750 (nilai penuh) per saham. Pada tahun 1993, Perusahaan melakukan penawaran tambahan sebanyak 8.500.000 saham dengan nilai nominal per saham yang sama melalui bursa efek di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 1993, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 10 (sepuluh) saham yang dimiliki, sebanyak 1.062.500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan juga menyetujui untuk menerbitkan saham bonus dengan dasar 17 (tujuh belas) saham baru untuk setiap 20 (dua puluh) saham yang dimiliki, sebanyak 9.934.668 saham dengan nilai nominal yang sama. Pada tanggal 22 Januari 1994, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen saham dengan dasar 1 (satu) saham baru untuk 3 (tiga) saham yang dimiliki, sebanyak 7.207.390 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 18 April 1994, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/BAPEPAM-LK dan terakhir dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan/OJK) (BAPEPAM) melalui surat No. S-639/PM/1994 dalam rangka penawaran umum terbatas pertama (I) Perusahaan sebanyak 28.829.558 saham dengan harga penawaran sejumlah Rp 1.500 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 1 (satu) saham baru. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 1997, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui surat No. S-71/PM/1997 dalam rangka penawaran umum terbatas kedua Perusahaan sebanyak 115.318.232 saham dengan harga penawaran Rp 1.000 (nilai penuh) per saham dimana setiap 1 (satu) saham yang dimiliki berhak atas 2 (dua) saham baru.

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment and General Information of the Company (Continued)

The Company started its commercial operations in 1982. Currently, the Company mainly engages in finance lease and consumer financing activities. The Company's registered office is located at BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, South Tangerang.

The Company has 209 branches and 96 kiosks as of 31 December 2016, and 205 branches and 62 kiosks as of 31 December 2015, which are located in, among others, Palembang, Banjarmasin, Surabaya, Samarinda, Bandung, Pekanbaru, Medan, Jambi, Makassar and Tangerang.

b. Public Offering of the Company's Shares

In 1990, the Company conducted an initial public offering of its 2,125,000 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share through the stock exchanges in Indonesia at an offering price of Rp 5,750 (full amount) per share. In 1993, the Company offered an additional of 8,500,000 shares at the same par value per share through a stock exchange in Indonesia.

On 8 April 1993, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 10 (ten) shares held totaling 1,062,500 shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share. On the same date, the shareholders of the Company also approved to issue bonus shares on the basis of 17 (seventeen) new shares for every 20 (twenty) shares held totaling 9,934,668 shares at the same par value. On 22 January 1994, the shareholders of the Company approved to distribute share dividends on the basis of 1 (one) new share for every 3 (three) shares held totaling 7,207,390 shares at a par value of Rp 1,000 (full amount) per share.

On 18 April 1994, the Company received effective statement from the Capital Market Supervisory Board (was then changed to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency/BAPEPAM-LK and recently known as the Financial Services Authority/OJK) (BAPEPAM) through letter No. S-639/PM/1994 to conduct the first rights issue of the Company's shares on a 1 (one) for 1 (one) basis totaling 28,829,558 shares at an offering price of Rp 1,500 (full amount) per share. Moreover, on 17 January 1997, the Company received effective statement from the BAPEPAM-LK through letter No. S-71/PM/1997 to conduct the second rights issue of the Company's shares on the basis of 2 (two) new shares for every 1 (one) shares held totaling 115,318,232 shares at an offering price of Rp 1,000 (full amount) per share.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)

Pada tanggal 17 Juni 1997, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 500 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari sebanyak 172.977.348 saham menjadi sebanyak 345.954.696 saham.

Dalam rangka restrukturisasi utang, para pemegang saham Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 27 Januari 2000 menyetujui penerbitan *Mandatory Convertible Bonds* atau Obligasi Wajib Konversi (MCB) yang wajib dikonversikan menjadi sebanyak 414.384.585 saham Perusahaan.

Pada bulan Mei 2006, seluruh MCB telah dikonversi menjadi sebanyak 414.384.585 saham biasa sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi sebanyak 760.339.281 saham pada tanggal 31 Desember 2006.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta notaris No. 65 tanggal 21 Juni 2012 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nilai nominal saham Perusahaan (pemecahan saham) dari sebesar Rp 500 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp 250 (nilai penuh) per saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 760.339.281 saham menjadi sebanyak 1.520.678.562 saham, dan menyetujui untuk mengubah Pasal 15 ayat 3b mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Pemecahan saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari BEI melalui surat No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 31 Juli 2012.

RUPSLB tersebut juga telah menyetujui penerbitan saham untuk pelaksanaan program *Management & Employee Stock Option Program (MESOP)* untuk Tahap I di BEI sebanyak 60.826.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250 per saham untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juni 2014. BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap I tersebut secara pra-pencatatan di BEI (Catatan 19).

1. GENERAL (Continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (Continued)

On 17 June 1997, the shareholders of the Company approved a stock split, resulting in a change in par value per share from Rp 1,000 (full amount) to Rp 500 (full amount), thus resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 172,977,348 shares to 345,954,696 shares.

In respect with the debt restructuring, the Company's shareholders through Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 27 January 2000 approved to issue the Mandatory Convertible Bonds (MCB) which should be converted into 414,384,585 shares of the Company.

In May 2006, all of the MCB had been converted into ordinary shares totaling 414,384,585 shares, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 760,339,281 shares as of 31 December 2006.

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial deed No. 65 dated 21 June 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the amendment to Paragraphs 1 and 2 of Article 4 of the Articles of Association concerning the changes in par value of the Company's share (stock split) from Rp 500 (full amount) to Rp 250 (full amount), thus, resulting in the increase in number of the Company's shares outstanding from 760,339,281 shares to 1,520,678,562 shares, and Paragraph 3b of Article 15, concerning the Duties and Authorities of the Directors.

The stock split was approved by the BEI through letter No. S-05439/BEI.PPJ/07-2012 dated 31 July 2012.

The EGM had also approved the issuance of shares for the implementation of the Phase 1 of the Management & Employee Stock Option Program (MESOP) on the Stock Exchange, totaling 60,826,400 shares with par value of Rp 250 per shares, up to 20 June 2014. BEI through its letter No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 dated 6 July 2012 had approved the Company's pre-listing of its MESOP on the Stock Exchange for the implementation of phase I (Note 19).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2013, 30 Mei 2014, 29 Mei 2015, dan 31 Mei 2016, Perusahaan telah menerbitkan saham baru masing-masing sebanyak 5.936.000, 23.320.000, 16.025.000 dan 30.752.000 saham sebagai pelaksanaan Management & Employee Stock Option Program (MESOP) untuk Tahap I - Grant Date 1 dan 2, dan Tahap II - Grant Date 1 dan 2, yang telah dieksekusi sehingga jumlah saham beredar Perusahaan menjadi 1.596.711.562 dan 1.565.959.562 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 19).

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 18 pada tanggal 6 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP untuk tahap II untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan harga pelaksanaan yang mengacu kepada sebagaimana diatur dalam butir V.1 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap II secara pra-pencatatan di BEI sebanyak-banyaknya 46.777.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.205 (nilai penuh) per saham (Catatan 19).

c. Pembelian Kembali (Buy-Back) Saham Perusahaan

Pada tanggal 15 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 10% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan atau sebanyak-banyaknya sebesar 154.993.456 saham. Dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak RUPSLB adalah tidak lebih dari Rp 341.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 100.273.200 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160. Dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 1.572.800 saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 4.044.

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya diharapkan akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share*/EPS).

1. GENERAL (Continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (Continued)

On 31 May 2013, 30 May 2014, 29 May 2015, and 31 May 2016 the Company has issued the additional 5,936,000, 23,320,000, 16,025,000 and 30,752,000 shares, respectively, for the implementation of the MESOP for Phase I - Grant Date 1 and 2, and Phase II - Grant Date 1 and 2, for options that has been exercised, thus resulting in a total outstanding number of the Company's shares of 1,596,711,562 and 1,565,959,562 shares as of 31 December 2016 and 2015, respectively (Note 19).

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial Deed No. 18 dated 6 May 2014 of Aryanti Artisari, S.H., Notary in Jakarta, had approved the issuance of new shares the results of the implementations of the MESOP program phase II up to 30 June 2016 with exercised price which referred to point V.1 Listing Regulation No. I-A as included in the Appendix of the Decision Decree of virtue of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated on 20 January 2014.

BEI through its letter No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 dated 6 June 2014 approved the registration of the Company's pre-listing of its MESOP on the Stock Exchange for the implementation of phase II maximum 46,777,000 shares with exercised price Rp 2,205 (full amount) (Note 19).

c. Buy-Back of the Company's Shares of Stock

On 15 April 2015, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) approved the buy-back of outstanding shares of the Company up to a maximum of 10% of the total shares issued and fully paid-up capital of the Company or as much of 154,993,456 shares. The funds reserved to repurchase shares for a maximum period of 18 (eighteen) months from the EGM should not more than Rp 341,000.

Up to 31 December 2016, the Company had bought back 100,273,200 shares for a total purchase price of Rp 252,160. And up to 31 December 2015, the Company had bought back 1,572,800 for a total purchase price of Rp 4,044.

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation expected to increase the value of *Earnings per Share* (EPS).

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Surat Berharga yang Diterbitkan

d. Securities Issued

Surat Berharga yang diterbitkan/ <i>securities issued</i>	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ <i>Listing date</i>	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Jumlah yang diterbitkan/ <i>Amount issued (Rp)</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>
<i>Medium Term Notes</i> BFI Finance Indonesia I Tahun 2012	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ <i>Not listed on Stock Exchange</i>	25 Januari/ <i>January 2012</i>		
Seri A:			25.000	25 Januari/ <i>January 2014</i>
Seri B:			200.000	25 Januari/ <i>January 2015</i>
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	13 Juni/ <i>June 2012</i>	4 Juni/ <i>June 2012</i> (No. S-6878/BL/2012)		
Seri A:			195.000	17 Juni/ <i>June 2013</i>
Seri B:			110.000	12 Juni/ <i>June 2014</i>
Seri C:			270.000	12 Juni/ <i>June 2015</i>
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	20 Pebruari/ <i>February 2013</i>	4 Juni/ <i>June 2012</i> (No. S-6878/BL/2012)		
Seri A:			100.000	1 Maret/ <i>March 2014</i>
Seri B:			370.000	19 Pebruari/ <i>February 2015</i>
Seri C:			155.000	19 Pebruari/ <i>February 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	10 Maret/ <i>March 2014</i>	28 Pebruari/ <i>February 2014</i> (No. S-121/D.04/2014)		
Seri A:			225.000	17 Maret/ <i>March 2015</i>
Seri B:			55.000	7 Maret/ <i>March 2016</i>
Seri C:			220.000	7 Maret/ <i>March 2017</i>

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Surat Berharga yang Diterbitkan (Lanjutan)

d. Securities Issued (Continued)

Surat berharga yang diterbitkan/ <i>securities issued</i>	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ <i>Listing date</i>	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	Jumlah yang diterbitkan/ <i>Amount issued (Rp)</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>
<i>Medium Term Notes</i> BFI Finance Indonesia II Tahun 2014	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ <i>Not listed on Stock Exchange</i>	4 Juni/ <i>June 2014</i>	130.000	14 Juni/ <i>June 2015</i>
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Seri A:	20 Maret/ <i>March 2015</i>	28 Februari/ <i>February 2014</i> (No. S-121/D.04/2014)	345.000	29 Maret/ <i>March 2016</i>
Seri B:			105.000	19 Maret/ <i>March 2017</i>
Seri C:			550.000	19 Maret/ <i>March 2018</i>
<i>Medium Term Notes</i> BFI Finance Indonesia III Tahun 2015 Seri A:	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ <i>Not listed on Stock Exchange</i>	13 April/ <i>April 2015</i>	50.000	13 April/ <i>April 2017</i>
Seri B:		13 Mei/ <i>May 2015</i>	50.000	13 Mei/ <i>May 2018</i>
<i>Medium Term Notes</i> BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	Tidak dicatatkan di Bursa Efek/ <i>Not listed on Stock Exchange</i>	5 Agustus/ <i>August 2015</i>	155.000	15 Agustus/ <i>August 2016</i>
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Seri A:	26 Februari/ <i>February 2016</i>	28 Februari/ <i>February 2014</i> (No. S-121/D.04/2014)	200.000	5 Maret/ <i>March 2017</i>
Seri B:			142.000	25 Februari/ <i>February 2018</i>
Seri C:			658.000	25 Februari/ <i>February 2019</i>

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Surat Berharga yang Diterbitkan (Lanjutan)

d. Securities Issued (Continued)

Surat berharga yang diterbitkan/ Securities issued	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing date	Tanggal efektif/ Effective date	Jumlah yang diterbitkan/ Amount issued (Rp)	Jatuh tempo/ Maturity date
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016				
Seri A:	26 Oktober/ October 2016	17 Oktober/ October 2016	317.000	25 Oktober/ October 2017
Seri B:		(No. S588/D.04/201)	550.000	25 Oktober/ October 2019
Seri C:			133.000	25 Oktober/ October 2021

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

e. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan akta No. 43 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 masing - masing tertanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03- 0045172 tanggal 28 April 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company, as covered by the deed No. 43 in conjunction with the Deed of Resolutions No. 44 each dated 25 April 2016 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0045172 dated 28 April 2016, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of 31 December 2016 as follows:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris (Independen)	:	Emmy Yuhassarie	:
Komisaris	:	Dominic John Picone	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner (Independent)	:
Commissioner (Independent)	:
Commissioner (Independent)	:
Commissioner	:
Commissioner	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:
Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	:	Cornellius Henry Kho	:
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	:	Sudjono	:
Direktur Pembiayaan Ritel	:	Sutadi	:
Direktur Risiko Perusahaan (Independen)	:	Sigit Hendra Gunawan	:

Directors

President Director	:
Director of Operations and Corporate Business	:
Director of Finance and Information Technology	:
Director of Retail Business	:
Director of Enterprise Risk (Independent)	:

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (Lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan akta No. 1 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 masing - masing tertanggal 8 September 2015 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di kabupaten Tangerang, yang telah diterima oleh dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHUAH.01.03-0970960 tanggal 9 Oktober 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	:
Komisaris (Independen)	:	Johanes Sutrisno	:
Komisaris (Independen)	:	Alfonso Napitupulu	:
Komisaris (Independen)	:	Emmy Yuhassarie	:
Komisaris	:	Dominic John Picone	:
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	:
Direktur Operasional dan Pembiayaan Korporasi	:	Cornellius Henry Kho	:
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi	:	Sudjono	:
Direktur Pembiayaan Ritel	:	Sutadi	:

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

	2016	2015	
Ketua	: Emmy Yuhassarie	Johanes Sutrisno	:
Anggota	: Friso Palilingan	Stefanus Ginting	:
	: Edy Sugito	Friso Palilingan	:

Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK/BOD/VII/14-009 tanggal 16 Juli 2014, Kepala Unit Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Fledy Rizmara.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. BOD-BOC/VI/2014-0011 tanggal 24 Juni 2014, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Sudjono.

Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	2016	2015	
Karyawan tetap	5.322	4.786	Permanent employees
Karyawan tidak tetap	3.619	3.138	Non-permanent employees
Jumlah	8.941	7.924	Total

1. GENERAL (Continued)

e. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (Continued)

Based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company, as covered by the deed No. 1 in conjunction with the Deed of Resolutions No. 2 dated 8 September 2015 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Tangerang, which has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0970960 dated 9 October 2015, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of 31 December 2015 as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner (Independent)
Commissioner (Independent)
Commissioner (Independent)
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director of Operations and Corporate Business
Director of Finance and Information Technology
Director of Retail Business

The composition of the Audit Committee of the Company as of 31 December 2016 and 2015, are as follows:

Audit Committee

Chairman
Members

Internal Audit

Based on the Virtue of the Board of Directors of the Company No. SK/BOD/VII/14-009 dated 16 July 2014, Head of Internal Audit Unit of the Company as of 31 December 2016 and 2015 is Fledy Rizmara.

Corporate Secretary

Based on the Virtue of the Board of Directors of the Company No. BOD-BOC/VI/2014-0011 dated 24 June 2014, Corporate Secretary as of 31 December 2016 and 2015 is Sudjono.

Employees

The total number of the Company's employees as of 31 December 2016 and 2015 was as follows (unaudited):

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK"), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis kecuali untuk instrumen keuangan derivative yang diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Perubahan kebijakan akuntansi

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari perubahan interpretasi standar akuntansi berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan perusahaan. Standar dan penyesuaian standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

- PSAK 4 (Amandemen 2015): Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi
- PSAK 15 (Amandemen 2015): Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap
- PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Tak berwujud

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's financial statement as of 31 December 2016 and 2015 were as follows :

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS"), which includes the standards and Interpretations of Financial Accounting Standards, issued by the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("Bapepam-LK", which function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") starting at 1 January 2013) Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emiten or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012.

The financial statements have been prepared under the historical cost basis, except for derivative financial instruments which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Change in accounting policies

Changes to Statement of Financial Accounting Standards (" SFAS ") and Interpretations of Financial Accounting Standards (" ISAK ")

The application for the changes in interpretation of accounting standards did not have significant effect on the Company's accounting policies and did not provide a material impact on the amounts reported in the financial statements of the company. Standards and standard adjustment which is effective for periods beginning on or after January 1, 2016, are as follows:

- SFAS 4 (Amendment 2015): Separate Financial Statements
- SFAS 5 (Adjustment 2015): Operating Segments
- SFAS 7 (Adjustment 2015): Related Party Disclosures
- SFAS 13 (Adjustment 2015): Investment Property
- SFAS 15 (Amendment 2015): Investment in Associates and Joint Ventures
- SFAS 16 (Adjustment 2015): Fixed Assets
- SFAS 19 (Adjustment 2015): Intangible Assets

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

- PSAK 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (Amandemen 2015): Imbalan Kerja
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53 (Amandemen 2015): Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 65 (Amandemen 2015): Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 (Amandemen 2015): Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (Amandemen 2015): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar
- ISAK 30: Pungutan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan; ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup", PSAK 13: "Properti Investasi".

Penundaan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia memutuskan untuk menunda berlakunya ISAK No. 21 "Perjanjian Konstruksi Real Estat" dan PPSAK No. 7 "Pencabutan PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat paragraph 08 (b)", yang sebelumnya berlaku efektif pada periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, penundaan tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Untuk pengakuan dan pengukuran dari kas dan setara kas, lihat Catatan 2d.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

a. Basis of Preparation of Financial Statements
(Continued)

Changes in accounting policies (Continued)

Changes to Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") (Continued)

- SFAS 22 (Adjustment 2015): Business Combination
- SFAS 24 (Amendment 2015): Employee Benefits
- SFAS 25 (Adjustment 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
- SFAS 53 (Amendment 2015): Share-based Payments
- SFAS 65 (Amendment 2015): Consolidated Financial Statements
- SFAS 66 (Amendment 2015): Joint Arrangement
- SFAS 67 (Amendment 2015): Disclosure of interest in Other Entities
- SFAS 68 (Adjustment 2015): Fair Value Measurement
- IFAS 30 : Levies

Amendments of the following standards and interpretations which effective for periods beginning on or after 1 January 2017, with early implementation is permitted, namely amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" on Disclosure Initiative ; IFAS 31, "Interpretation of Scope", SFAS 13 " Investment Property".

Postponement

Financial Accounting Standards Board of The Indonesian Institute of Accountants decided to postpone the effectiveness of ISAK 21 "Real Estate Construction Agreement" and WPSAK 7 "Withdrawal of PSAK 44 - Accounting for Real Estate Development Activities paragraph 08 (b)", which as previously effective for the period beginning at and or after 1 January 2013. As of the date of these consolidated financial statements, the postponement is still in effect.

As of the issuance date of the financial statements, the Company's management is currently evaluating the impact of these standards and interpretations on the Company's financial statements

b. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

For recognition and measurement of cash and cash equivalents, please refer to Note 2d.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (c) manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor

- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
- (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
- (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
- (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
- (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
- (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (h) Entitas atau anggota dari kelompok mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 19 dan 29).

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

(i) Aset keuangan

Aset keuangan Perusahaan, terdiri dari kas dan setara kas, investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, aset keuangan derivatif dan pinjaman kepada karyawan (dicatat sebagai bagian dari "piutang lain-lain").

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

c. Related Party Transactions

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (a) has control or joint control over the reporting entity;
 - (b) has significant influence over the reporting entity; or
 - (c) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

- (2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (a) The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member).
- (c) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
- (g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (h) Entities or any member of the group to which the entity is part of the group, providing services to the key management personnel of the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements (Notes 19 and 29).

d. Financial Assets and Liabilities

(i) Financial assets

The Company's financial assets, consist of cash and cash equivalents, net investments in finance lease, consumer financing receivables, derivative financial assets and loans to employees (recorded as part of "other receivables").

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Aset keuangan (Lanjutan)

(1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan dicatat sebagai "Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan derivatif".

Kategori ini termasuk aset keuangan derivatif Perusahaan.

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- (b) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
- (c) dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(i) Financial assets (Continued)

(1) Financial assets at fair value through profit or loss

This category comprises two sub-categories: financial assets classified as held for trading, and financial assets designated by the Company as at fair value through profit and loss upon initial recognition.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Financial instruments included in this category are recognized initially at fair value; transaction costs are taken directly to the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial instruments are included directly in the profit or loss and are reported respectively as "Gain (loss) from changes in fair value of derivative financial instruments".

This category includes the Company's derivative financial assets.

(2) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit and loss;
- (b) those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or
- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Aset keuangan (Lanjutan)

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pemberian suatu pinjaman maupun perolehan piutang dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila pinjaman maupun piutang tersebut tidak diperoleh. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari 'pendapatan pembiayaan konsumen' atau 'pendapatan sewa pembiayaan'. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Kategori ini termasuk kas dan setara kas, investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan pinjaman kepada karyawan (dicatat sebagai bagian dari "piutang lain-lain").

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar, surat berharga yang diterbitkan dan utang lain-lain.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(i) Financial assets (Continued)

(2) Loans and receivables (Continued)

At initial recognition, the Company's loans and receivables are measured at fair values plus or minus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of loans or receivables and they are incremental costs that would not have been incurred if the loan or receivables had not been acquired. Income on financial assets classified as loan and receivables is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of 'consumer financing income' or 'finance lease income'. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Allowance for Impairment Losses".

This category includes the Company's cash and cash equivalents, net investments in finance lease, consumer financing receivables and loans to employees (recorded as part of "other receivables").

(ii) Financial liabilities

The Company's financial liabilities consist of fund borrowings, accrued expenses, securities issued and other payables.

The Company classified its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pengakuan suatu pinjaman yang diterima, dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila pinjaman yang diterima tidak diakui. Beban atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari 'beban bunga dan keuangan'.

(iii) Hierarki pengukuran nilai wajar

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b. input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c. input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tingkatan di dalam hierarki nilai wajar di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan dikategorikan penetapannya pada basis tingkatan input paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah aset keuangan derivatif.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(ii) Financial liabilities (Continued)

Financial liabilities measured at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs. After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rates method. Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the recognition of loan received and they are incremental costs that would not have been incurred if the loan has not been recognized. Expenses on financial liabilities measured at amortized cost is charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of 'interest and financing charge'.

(iii) Fair value measurement hierarchy

The classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the fair value measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- a. *quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);*
- b. *inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) (level 2); and*
- c. *inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).*

The level in the fair value hierarchy within which the financial asset or financial liability is categorised is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Financial assets and financial liabilities are classified in their entirety into only one of the three levels.

The Company's financial asset that are measured and recognised at fair value (level 2) are derivative financial assets.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iii) Hierarki pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

(iv) Penghentian pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan pada saat dilakukannya penarikan jaminan kendaraan. Selain itu, penghentian pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, di mana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(iii) Fair value measurement hierarchy (Continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- other techniques, such as discounted cashflows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

(iv) Derecognition

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company transfer the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the company are recognized as assets or liabilities separately.

The Company derecognize consumer financing receivables at the time when the vehicle collateral has been taken out. In addition, derecognition of financial liabilities when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In a transaction where the Company has substantially no or did not transfer all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company terminate the recognition of such assets, if the company no longer has control over those assets. The rights and obligations arising or that still exists in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In transfers where control over the assets still owned, the Company continued to recognize the transferred assets in the amount of involvement that is sustainable, where the level of sustainability of the Company in the transferred assets amounted to changes in the value of the transferred assets.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Perusahaan menghapusbukkan saldo piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan, dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada kemampuan keuangan konsumen sehingga konsumen tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau konsumen atau unit yang dibiayai tidak dapat ditemukan atau dikuasai oleh pihak ketiga atau nilai realisasi bersih atas jaminan yang dikuasai kembali diperkirakan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan.

(v) Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan dapat disaling hapuskan dan jumlah bersih tersebut dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang secara hukum dapat dipaksakan untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui and terdapat intensi untuk menyelesaikan pada basis bersih, maupun merealisasi aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar yang relevan.

(vi) Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami konsumen;
- (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Perusahaan, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami konsumen, memberikan keringanan (konsesi) pada konsumen yang tidak mungkin diberikan jika konsumen tidak memiliki kesulitan tersebut;

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(iv) Derecognition (Continued)

Companies write off any outstanding consumer financing receivables and net investments in finance lease, and allowance for impairment losses, when the Company determines that the consumer financing receivables and net investments in finance lease cannot be collectible. This decision was taken after consideration of information such as the occurrence of significant changes to the financial ability of consumers so that consumers can no longer pay the loan, or consumer or units being financed cannot be found or is controlled by third party or the net realizable value of collateral is not expected to be sufficient to pay the entire exposure for the consumer financing receivables and net investments in finance lease.

(v) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by relevant standards.

(vi) Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- (a) significant financial difficulty of the consumer;
- (b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- (c) the Company, for economic or legal reasons relating to the consumer's financial difficulty, granting to the consumer a concession that the lender would not otherwise consider;

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(vi) Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- (d) terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau
- (f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - (1) memburuknya status pembayaran konsumen dalam kelompok tersebut; dan
 - (2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portfolio yang diidentifikasi.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(vi) Impairment of financial assets (Continued)

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include: (Continued)

- (d) it becomes probable that the consumer will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- (e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- (f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
 - (1) adverse changes in the payment status of consumers in the portfolio; and
 - (2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.

The Company firstly assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If a financial asset measured at amortized cost has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(vi) Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi beban-beban untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Ketika piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan tidak tertagih diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas aset keuangan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

(vi) Impairment of financial assets (Continued)

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the group and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

When a consumer financing receivable or net investment in finance lease account is uncollectible, such receivable is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivable is written off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment expense related to consumer financing receivables and net investments in finance lease are classified into "Allowance for Impairment Losses".

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of financial assets written-off in the previous period are recognized as other income.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima oleh perusahaan sewa pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Investasi bersih dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama di mana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsi (without recourse), pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Pembiayaan Bersama

Pembiayaan bersama terdiri atas pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (without recourse) dan pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (with recourse). Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain di mana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

e. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Moreover, leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

The net investments in finance lease are recognised initially at fair value, deducted by administration income and plus directly attributable transactions costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

At initial recognition, the fair value of net investments in finance lease represents lease financing receivables plus the residual value at the end of the lease period deducted by unearned lease income and security deposits. The difference between the gross lease receivables and the present value of the lease receivables is recognised as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to the current year statement of income using the effective interest rate. Net investments in finance lease are classified as loans and receivables. See Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

f. Consumer Financing

Consumer financing receivables are stated net of joint financing receivables where joint financing providers bear credit risk in accordance with its portion (without recourse), unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year's statement of profit or loss and other comprehensive income at the date of transaction.

Joint Financing

Joint financing consist of with and without recourse joint financing to end-user consumers. The consumer financing receivables under joint financing where each party assumes the credit risk according to the risk portion (without recourse) are stated at net amount in the statement of financial position.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban keuangan yang terkait dengan pembiayaan bersama (*without recourse*) disajikan secara bersih di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain di mana Perusahaan menanggung risiko kredit (*with recourse*) disajikan di laporan posisi keuangan secara bruto, sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai liabilitas (pendekatan bruto). Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban keuangan yang terkait dengan pembiayaan bersama *with recourse* tersebut disajikan secara bruto di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Keuangan".

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan, akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan konsumen pada tingkat pengembalian berkala yang tetap dari piutang pembiayaan konsumen.

Piutang pembiayaan konsumen yang menunggak dan terjadi wanprestasi, piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 270 hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

g. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Consumer Financing (Continued)

Joint Financing (Continued)

Consumer financing income and finance cost related to without recourse joint financing are stated at net amount in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Consumer financing receivable under joint financing where the Company assume the credit risk (*with recourse*) are stated at gross amount in the statement of financial position, while the credit that are distributed by the fund provider are recorded as liability (*gross approach*). The consumer financing income and finance cost related to with recourse joint financing are stated at gross amount in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For joint financing without recourse, the Company reserves the right to charge greater interest rates to customers than those stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Finance Income".

Consumer financing receivables are classified as loans and receivables. See Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

Unearned income on consumer financing, which is the excess of aggregate installment payments collectible from the customers over the cost of the financed assets, is recognized as income over the terms of the respective agreements at a constant periodic rate of return on the consumer financing receivables.

Consumer financing receivables which installments are overdue and in the events of default, consumer financing receivables could be settled by selling their vehicle that financed by the Company.

Consumer financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 270 days. Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

h. Fixed Assets

The Company uses the cost model for its fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and any impairment value, if any.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Masa manfaat/ Useful lives	Tarif/ Rates	
Bangunan	20 tahun/years	5 %	Building
Peralatan kantor	5	20 %	Office equipment
Kendaraan	5	20 %	Vehicles
Perabot dan perlengkapan kantor	5	20 %	Furniture and fixtures
Rehabilitasi gedung kantor	5	20 %	Leasehold improvements

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi tahun berjalan pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam penyelesaian dan perangkat lunak dalam pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

h. Fixed Assets (Continued)

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and purchase taxes that should not be credited and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the fixed assets useful lives as follows:

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the current year profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Asset in progress and software under development are stated at cost and presented as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Aset Tetap (Lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya.

Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

i. Aset Tak Berwujud

Piranti lunak

Piranti lunak pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal piranti lunak meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa piranti lunak siap dipakai.

Setelah pengakuan awal, piranti lunak diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah lima tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tak berwujud ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan diakui di dalam laporan laba rugi.

j. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with *recourse*. Fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing*) with *recourse* disajikan secara *gross*, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

h. Fixed Assets (Continued)

Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimation of the asset's recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of the fair value of an asset or cash-generating unit less costs of disposal with its value in use

An impairment loss is recognized immediately in profit or loss. Impairment losses recognized in prior periods for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there is a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss is recognized.

i. Intangible Assets

Software

Software is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of software consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the software to its intended use.

After initial recognition, software is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the estimated useful life of software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is five years.

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Gains or losses on disposal of intangible assets are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are recognized in profit or loss.

j. Fund Borrowings

Borrowings represent funds received from various banks and financial institutions, including with recourse joint financing facilities. With recourse joint financing facilities are presented gross, i.e. loans granted to customers and borrowings received from banks are recorded at their full amount with repayment obligations in accordance with the terms of the agreement.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Pinjaman yang Diterima (Lanjutan)

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

k. Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan meliputi utang Obligasi dan *Medium Term Notes*.

Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Beban emisi surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penerbitan surat berharga yang diterbitkan diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi surat berharga yang diterbitkan untuk menentukan hasil emisi bersih surat berharga yang diterbitkan tersebut.

Surat berharga yang diterbitkan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif setelah pengakuan awalnya. Diskonto diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2d).

l. Imbalan Kerja

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Amandemen 2014): "Imbalan Kerja", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.

Imbalan Pasca Kerja (IPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan, yaitu imbalan kerja jenis manfaat pasti, yang mencakup pensiun, uang pesangon, uang penghargaan dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perusahaan" yang telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2013.

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja dimasa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pension. Perhitungan dilakukan oleh aktuaria independen dengan metode *projected-unit-credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan atau beban komprehensif lainnya pada periode dimana keuntungan/(kerugian) aktuarial terjadi. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dicatat di saldo laba.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

j. Fund Borrowings (Continued)

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of loans are deducted from total borrowings. See Note 2d for the accounting policy on financial liabilities measured at amortized cost.

k. Securities Issued

Securities issued consist of Bonds payable and Medium Term Notes.

Securities issued are presented at nominal value net of unamortized discounts. Securities issuance costs are recognized as discounts and directly deducted from the proceeds of securities issuance to determine the net proceeds of the securities issued.

Securities are measured at amortized cost using effective interest method after initial recognition. The discounts are amortized over the period of the securities using the effective interest method (Note 2d).

l. Employees' Benefits

Post-employment Benefits

The Company applies SFAS No. 24 (Amendment 2014): "Employee Benefits", which became effective as of 1 January 2016.

Post Employment Benefits as stipulated under the Labor Law regarding to severance pay, service pay, compensation pay and other benefits, are calculated in accordance with "Company Regulation" which is in line with Labor Law No. 13/2013.

The obligation for post-employment benefits recognized in the statement of financial position is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior years, deducted by any plan assets. The Calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly fully recognized to other comprehensive income or expense in the period when such actuarial gain/(losses) occur. Accumulated actuarial gains and losses are recorded in retained earnings.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

l. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Perusahaan telah memiliki program pensiun iuran pasti yang mana Perusahaan membayar iuran ke dana pensiun lembaga keuangan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terhutang.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari sewa pembiayaan (Catatan 2e) dan pembiayaan konsumen (Catatan 2f) diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh biaya transaksi yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perusahaan tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

l. *Employees' Benefits (Continued)*

Post-employment Benefits (Continued)

The Company has a defined contribution pension program where the Company pays contributions to a financial institution pension plan which is calculated at a certain percentage of fixed income of the employees who meet the Company's criteria. The contributions are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as they become payable.

Short-term employee benefits

Short-term employees' benefits are recognized when they are owed to the employees based on an accrual method.

m. *Revenue and Expenses Recognition*

Income from finance lease (Note 2e) and consumer financing (Note 2f) are recognised over the term of the contract based on the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flow considering all contractual term of the financial instrument (for example, prepayment options, call option and other similar options) but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees, commissions and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums discounts.

Transaction costs are additional charges that are directly attributable to the acquisition, issuance or disposal of financial assets or financial liabilities.

Additional costs are costs that would not occur if the Company does not obtain, publish or otherwise dispose of financial instruments.

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen Perusahaan disajikan bersih setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

Pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 2d).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

n. Akuntansi Lindung Nilai

Akuntansi lindung nilai diterapkan untuk aset dan liabilitas keuangan hanya ketika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Pada awal lindung nilai terdapat rancangan formal dan dokumentasi atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko Perusahaan dan strategi untuk melakukan lindung nilai.
- Untuk lindung nilai arus kas, item yang dilindung nilai dalam transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi dan menyajikan eksposur terhadap variasi dalam arus kas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba rugi.
- Perubahan kumulatif nilai wajar instrumen lindung nilai diharapkan berkisar antara 80% - 125% dari perubahan kumulatif nilai wajar atau arus kas item yang dilindung nilai dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai (misalnya diperkirakan sangat efektif).
- Efektifitas lindung nilai dapat di perkirakan secara andal.
- Lindung nilai masih sangat efektif pada tanggal pengujian. Efektifitas diuji setiap kuartal.

Lindung nilai arus kas

Bagian yang efektif dari kontrak *forward* sebagai lindung nilai dari variabilitas arus kas dari risiko mata uang asing yang terjadi karena adanya komitmen perusahaan, dan transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi, diukur pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar di akui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam cadangan lindung nilai arus kas. Perusahaan menggunakan kontrak *forward* seperti ini untuk mengeliminasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang atas pembayaran pinjaman dalam valuta asing.

Jika transaksi yang diperkirakan sangat mungkin terjadi menghasilkan pengakuan aset non moneter, maka kerugian/(keuntungan) kumulatif ditambahkan pada/(dikurangi dari) biaya aset yang di akuisisi (dasar penyesuaian). Jika tidak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari cadangan lindung nilai arus kas ke laporan laba rugi dalam waktu yang bersamaan pada saat transaksi lindung nilai mempengaruhi laba rugi.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

m. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

The Company's consumer financing income is presented net of with consumer financing income belongs to the bank in relation with channeling transactions, joint financing cooperations, factoring, and the appointment as manager of accounts receivable.

Income from excess of insurance premiums and excess of commission expenses and subsidy to dealer are recognised as an adjustment to the effective interest rate of the loan and receivables (Note 2d).

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

n. Hedge Accounting

Hedge accounting is applied to financial assets and financial liabilities only where all of the following criteria are met:

- At the inception of the hedge there is formal designation and documentation of the hedging relationship and the Company's risk management objective and strategy for undertaking the hedge.
- For cash flow hedges, the hedged item in a forecast transaction is highly probable and presents an exposure to variations in cash flows that could ultimately affect profit or loss.
- The cumulative change in the fair value of the hedging instrument is expected to be between 80% - 125% of the cumulative change in the fair value or cash flows of the hedged item attributable to the risk hedged (i.e. it is expected to be highly effective).
- The effectiveness of the hedge can be reliably measured
- The hedge remains highly effective on each date tested. Effectiveness is tested quarterly.

Cash flow hedges

The effective part of forward contracts designated as a hedge of the variability in cash flows of foreign currency risk arising from firm commitments, and highly probable forecast transactions, are measured at fair value with changes in fair value recognised in other comprehensive income and accumulated in the cash flow hedge reserve. The Company uses such forward contracts to eliminate the risk of fluctuations in currency exchange rates on repayment of loans in foreign currency.

If a highly probable forecast transaction results in the recognition of a non-monetary asset, the cumulative loss/(gain) is added to/(subtracted from) the cost of the asset acquired ("basis adjustment"). Otherwise the cumulative gain or loss recognised in other comprehensive income is reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss at the same time as the hedged transaction affects profit or loss. The two transactions are recognised in the same line item.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Akuntansi Lindung Nilai (Lanjutan)

Lindung nilai arus kas (Lanjutan)

Jika transaksi perkiraan ini dipertimbangkan tidak mungkin akan terjadi namun masih di harapkan untuk terjadi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihentikan dan diakui dalam laba atau rugi sesuai dengan kebijakan yang di ungkapkan dalam paragraf di atas. Perubahan nilai wajar derivatif selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi. Jika Perusahaan menyelesaikan posisinya sebelum transaksi terjadi (meski masih diharapkan untuk terjadi), maka keuntungan atau kerugian kumulatif atas perubahan nilai wajar derivatif diakui sesuai dengan kebijakan yang diungkapkan di paragraf di atas. Jika, pada titik tertentu, transaksi lindung nilai ini tidak lagi diharapkan untuk terjadi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif direklasifikasikan dari cadangan lindung nilai arus kas ke laba atau rugi secara langsung.

Bagian efektif keuntungan atau kerugian derivatif yang digunakan untuk mengatur risiko tingkat suku bunga arus kas (seperti tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga swap tetap) juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas. Namun, jika Perusahaan menyelesaikan posisinya lebih awal, maka keuntungan dan kerugian kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihentikan dan direklasifikasikan dari cadangan lindung nilai arus kas ke laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian derivatif di gunakan untuk mengatur resiko suku bunga arus kas yang diakui dalam laporan laba rugi dalam beban atau pendapatan keuangan.

Ketika derivatif digunakan untuk lindung nilai eksposur Perusahaan terhadap resiko nilai wajar tingkat suku bunga (seperti tingkat suku bunga tetap menjadi tingkat suku bunga swap mengambang), maka item lindung nilai diukur kembali untuk memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai (dalam hal pinjaman dengan tingkat bunga tetap, maka risiko yang dilindung nilai adalah perubahan nilai wajar tingkat suku bunga) dengan keuntungan atau kerugian yang muncul diakui dalam laporan laba rugi. Hal ini akan menyebabkan saling hapus keuntungan atau kerugian yang muncul atas instrumen lindung nilai yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Hedge Accounting (Continued)

Cash flow hedges (Continued)

If a forecast transaction is no longer considered highly probable but the forecast transaction is still expected to occur, the cumulative gain or loss recognised in other comprehensive income is frozen and recognised in profit or loss in accordance with the policy set out in the paragraph above. Subsequent changes in the fair value of the derivative are recognised in profit or loss. If the Company closes out its position before the transaction takes place (even though it is still expected to take place) the cumulative gain or loss on changes in fair value of the derivative is similarly recognised in accordance with the policy set out in the paragraph above. If, at any point, the hedged transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss is reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss immediately.

The effective portion of gains and losses on derivatives used to manage cash flow interest rate risk (such as floating to fixed interest rate swaps) are also recognised in other comprehensive income and accumulated in the cash flow hedge reserve. However, if the Company closes out its position early, the cumulative gains and losses recognised in other comprehensive income are frozen and reclassified from the cash flow hedge reserve to profit or loss using the effective interest method. The ineffective portion of gains and losses on derivatives used to manage cash flow interest rate risk are recognised in profit or loss within finance expense or finance income.

Where derivatives are used to hedge the Company's exposure to fair value interest rate risk (such as fixed to floating rate swaps), the hedged item is remeasured to take into account the gain or loss attributable to the hedged risk (in the case of a fixed rate loan, the hedged risk is changes in the fair value of interest rates) with the gains or losses arising recognised in profit or loss. This offsets the gain or loss arising on the hedging instrument which is measured at fair value through profit or loss.

o. Balances in Foreign Currency Transactions

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs utama yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

	2016
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	13.436
Penjabaran mata uang asing dicatat sesuai dengan PSAK 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.	

p. Piutang dalam Proses Penyelesaian

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait, yaitu pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual obyek yang dijaminkan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

q. Pelaporan Segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (2) hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

o. Balances in Foreign Currency Transactions
(Continued)

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The main exchange rates used for translating the foreign currency as of 31 December 2016 and 2015 are based of the mid rates published by Bank Indonesia, are as follows:

	2015
13.795	1 United States Dollars (USD)
Foreign currency translation is recorded in accordance with SFAS 10 (revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.	

p. Receivables in the Settlement Process

Receivables in the process of settlement of the claim in respect of the guarantees under control and are stated net realizable value is the carrying amount or principal amount of finance receivables related, namely consumer financing and finance lease net investment net of allowance for decline in market value of the security is under control. Consumer finance receivables and net investment reclassified to finance lease receivables in the settlement process when bail withdrawn because consumers are not able to meet its obligations after going through the stages stipulated in the financing agreement with the consumer.

Customer authorizes the Company to sell the pledged object or performing other actions in solving the debts in the event of default of the financing agreement. Excess result of a settlement with the total obligations of the consumer is the right of the customer, while the shortage of the settlement proceeds will be charged to written-off other receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables in the settlement process are classified as financial assets classified as loans and receivables.

q. Segment Reporting

An operating segment is a component of entity which:

- (1) involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- (2) operations result is observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and
- (3) separate financial information is available.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Pelaporan Segmen (Lanjutan)

Perusahaan menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Perusahaan yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perusahaan adalah Direksi.

Segmen operasi Perusahaan disajikan berdasarkan segmen primer dibagi ke dalam segmen-segmen usaha berikut: sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, sedangkan segmen sekunder dibagi ke dalam segmen geografis berikut: Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi (Catatan 30).

r. Saham Treasuri

Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut (saham treasuri) dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas.

s. Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham

Karyawan (termasuk eksekutif senior) Perusahaan menerima remunerasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham, dimana karyawan memberikan jasa sebagai pertimbangan untuk instrumen ekuitas ('equity-settled transactions'). Saat opsi di eksekusi, Perusahaan menerbitkan saham baru. Hasil bersih dari eksekusi berupa biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan premi saham.

Dalam situasi di mana instrumen ekuitas yang diterbitkan dan beberapa atau seluruh barang atau jasa yang diterima oleh entitas sebagai pertimbangan tidak dapat diidentifikasi secara khusus, barang atau jasa yang diterima (atau yang akan diterima) yang tidak dapat diidentifikasi diukur sebagai selisih antara nilai wajar pembayaran berbasis saham dan nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima yang teridentifikasi pada tanggal pemberian hak. Hal ini kemudian dikapitalisasi atau dibebankan secara tepat.

Beban program opsi karyawan berbasis saham dan beban program opsi manajemen diukur pada tanggal pemberian kompensasi (*grant date*) berdasarkan nilai wajar dari seluruh opsi yang diberikan yang dihitung dengan menggunakan metode *black-scholes* (lihat Catatan 19 untuk perlakuan akuntansi atas kompensasi berbasis saham ini).

t. Pajak Penghasilan

Pajak kini

Aset dan/ atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari kantor pelayanan pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelum periode pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

q. Segment Reporting (Continued)

The Company presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision-maker is Board of Directors.

Operating segments presented by the primary segments are divided into the following business segments: finance leases and consumer financing, while the secondary segments are divided into the following geographic segments: Java, Kalimantan, Sumatera and Sulawesi (Note 30).

r. Treasury Stock

If the entity regain its equity instruments, then those instruments (treasury shares) are deducted from equity. Gains or losses arising from the purchase, sale, issuance, or cancellation of the entity's equity instruments are not recognized in profit or loss. Compensation paid or received is recognized directly in equity.

s. Management and Employees Stock Option Program

Employees (including senior executives) of the Company receive remuneration in the form of share-based payment transactions, whereby employees render services as consideration for equity instruments ('equity-settled transactions'). When the options are exercised, the Company issues new shares. The proceeds received net of any directly attributable transaction costs are credited to share capital (nominal value) and share premium.

In situations where equity instruments are issued and some or all of the goods or services received by the entity as consideration cannot be specifically identified, the unidentified goods or services received (or to be received) are measured as the difference between the fair value of the share-based payment transaction and the fair value of any identifiable goods or services received at the grant date. This is then capitalised or expensed as appropriate.

Employee stock option program and management option program costs are measured at grant date based on the fair value of the stock option using a *black-scholes* model (refer to Note 19 for the accounting treatments of these share-based payments).

t. Income Tax

Current tax

Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the statement of financial position date.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

t. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak kini (Lanjutan)

Pajak kini dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset direalisasi atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui, diukur kembali pada tiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila terdapat kemungkinan pendapatan kena pajak di masa depan memulihkan aset pajak tangguhan.

Perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

u. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK No. 56 "Laba per saham", laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Jika jumlah saham yang beredar meningkat akibat dari pemisahan saham (*stock split*), maka perhitungan laba per saham dasar untuk seluruh periode penyajian harus disesuaikan secara retrospektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

t. Income Tax (Continued)

Current tax (Continued)

Current income tax are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which it's relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each statement of financial position date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

The extra amount of tax principal and penalties stipulated by the Tax Assessment Letter (SKP) is recognized as income or expense in the current operations, unless further proposed settlement efforts. The extra amount of tax principal and penalties stipulated by SKP are deferred as long as it meets the criteria for asset recognition.

u. Earnings per Share

In accordance with SFAS No. 56 "Earning per share", earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during current year.

Diluted earning per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

If the outstanding number of shares increase as result of stock split, the computation of basic earnings per share for all presentation periods is adjusted retrospectively.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

w. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi yang dilaporkan. Karena adanya unsur ketidakpastian melekat dalam melakukan estimasi sehingga dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

i. Penggunaan Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

(i) Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan kategori atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2015) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

(ii) Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu, hubungan dengan pelanggan dan status piutang dari pelanggan berdasarkan catatan piutang pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

v. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statement in the period which the dividends are approved by the Company's shareholders. Interim dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

w. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions

The preparation of the Company's financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, commitments and contingent liabilities which are reported. Due to inherent uncertainty in the estimates thus can lead to actual results reported in future periods differ from those estimates.

i. Use of Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

(i) Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the category of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2015). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2d.

(ii) Allowance for impairment of financial assets

The Company evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current receivables status based on any available third party receivables reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expected to collect.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

I. Penggunaan Pertimbangan (Lanjutan)

(ii) Cadangan atas kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto pembiayaan dan cadangan piutang pembiayaan konsumen. Nilai tercatat dari investasi neto sewa pembiayaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 7.181.481 dan Rp 5.292.684. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 4. Nilai tercatat dari piutang pembiayaan konsumen Perusahaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 4.584.879 dan Rp 4.784.972. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

II. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

(i) Nilai wajar atas instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 35.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

I. Use of Judgements (Continued)

(ii) Allowance for impairment of financial assets (Continued)

These specific allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of net investments in finance lease and consumer financing receivables. The carrying amount of the Company's net investments in finance lease before allowance for impairment losses as of 31 December 2016 and 2015 were amounted to Rp 7,181,481 and Rp 5,292,684, respectively. Further details are shown in Note 4. The carrying amount of the Company's consumer financing receivables before allowance for impairment losses as of 31 December 2016 and 2015 were amounting to Rp 4,584,879 and Rp 4,784,972, respectively. Further details are shown in Note 5.

II. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes reflected in the assumptions as they occur.

(i) Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models. Further details are shown in Note 35.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(ii) Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

Perusahaan telah menelaah pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Perusahaan membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan cadangan perubahan kerugian penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 4 dan 5.

(iii) Estimasi umur manfaat aset tetap dan aset tak berwujud

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Lihat Catatan 8 untuk jumlah tercatat aset tetap.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(ii) Allowance for impairment losses of financial assets (Continued)

The Company has reviewed loans and receivables at each statements of financial positions date to assess whether impairment should be recognized in the profit or loss or not. In particular, justification by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment. In the estimation of cash flows, the Company makes the justification of the financial condition of debtors and net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in reserves of changes in these impairment losses in the future.

Allowance for impairment losses that collectively assessed includes inherent credit losses in financing receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances. Further details are shown in Notes 4 and 5.

(iii) Useful life estimate for fixed assets and intangible assets

The Company reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. See Note 8 for the carrying amount of fixed assets.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

II. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(iv) Imbalan pasca-kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca-kerja.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28.

(v) Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham

Perusahaan mengukur biaya *equity-settled transactions* karyawan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal diberikan. Estimasi nilai wajar untuk pembayaran berbasis saham untuk menentukan model penilaian yang paling sesuai, tergantung pada persyaratan dan kondisi pemberian. Estimasi ini juga mengharuskan menentukan *input* yang paling tepat untuk valuasi model termasuk masa manfaat yang diharapkan dari opsi saham, volatilitas dan *dividend yield* dan membuat asumsi yang digunakan. Asumsi dan model yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk pembayaran berbasis saham diungkapkan dalam Catatan 19.

(vi) Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14b.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

II. Estimates and Assumptions (Continued)

(iv) Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefit obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions. Further details are shown in Note 28.

(v) Management and employees stock option program

The Company measures the cost of equity-settled transactions with employees by reference to the fair value of the equity instruments at the date at which they are granted. Estimating fair value for share-based payment transactions requires determining the most appropriate valuation model, which is dependent on the terms and conditions of the grant. This estimate also requires determining the most appropriate inputs to the valuation model including the expected life of the share option, volatility and dividend yield and making assumptions about them. The assumptions and models used for estimating fair value for share-based payment transactions are disclosed in Note 19.

(vi) Income tax

Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are shown in Note 14b.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

ll. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

(vii) Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14c.

x. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

y. Kontinjensi

Liabilitas kontinjen tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjen tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis.

z. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti dari kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

w. Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions (Continued)

ll. Estimates and Assumptions (Continued)

(vii) Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are shown in Note 14c.

x. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre - tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

y. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

z. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

Ekshibit E/36

Exhibit E/36

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2016	2015
Kas	32.961	23.972
Bank		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	57.666	29.778
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.768	14.174
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	7.360	7.293
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.811	2.244
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.530	3.193
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.782	430
PT Bank Permata Tbk	2.411	1.267
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	2.207	132
Lain-lain (Saldo di bawah Rp 1.000)	892	1.750
Jumlah bank	112.427	60.261
Jumlah kas dan bank	145.388	84.233
Setara kas		
Deposito berjangka		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Muamalat Tbk	20.000	33.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	210.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	-	145.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	120.000
PT Bank Bukopin Tbk	-	90.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	-	40.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	30.000
PT Bank Andara	-	20.000
PT Bank Victoria International Tbk	-	5.000
Jumlah setara kas	20.000	693.000
Jumlah kas dan setara kas	165.388	777.233

Kisaran suku bunga kontraktual dari deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	4,30% - 10,50%	4,00% - 11,00%

Pendapatan bunga dari deposito berjangka sebesar Rp 15.276 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 (2015 : Rp 25.334).

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of the followings:

	2016	2015
Cash	32.961	23.972
Bank		
Third parties		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	57.666	29.778
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.768	14.174
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	7.360	7.293
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.811	2.244
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.530	3.193
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.782	430
PT Bank Permata Tbk	2.411	1.267
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	2.207	132
Others (Balances below Rp 1,000)	892	1.750
Total cash in banks	112.427	60.261
Total cash on hand and in banks	145.388	84.233
Cash equivalents		
Time deposits		
Third parties		
Rupiah		
PT Bank Muamalat Tbk	20.000	33.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	210.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	-	145.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	-	120.000
PT Bank Bukopin Tbk	-	90.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	-	40.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	30.000
PT Bank Andara	-	20.000
PT Bank Victoria International Tbk	-	5.000
Total cash equivalents	20.000	693.000
Total cash and cash equivalents	165.388	777.233

The range of the contractual interest rates from the above time deposits is as follows:

	2016	2015
Time deposit interest rate per annum Rupiah	4,30% - 10,50%	4,00% - 11,00%

Interest income from time deposits amounted to Rp 15,276 for the year ended 31 December 2016 (2015 : Rp 25,334).

Ekshibit E/37

Exhibit E/37

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INVESTASI NETO SEWA PEMBIAYAAN

Rincian investasi neto sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Investasi sewa pembiayaan - bruto	8.809.005	6.496.116
Nilai sisa yang terjamin	5.336.545	3.617.269
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(1.553.267)	(1.147.384)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(74.257)	(56.048)
Simpanan jaminan	(5.336.545)	(3.617.269)
Jumlah	7.181.481	5.292.684
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(60.306)	(82.837)
Bersih	7.121.175	5.209.847

Angsuran investasi sewa pembiayaan - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2016	2015
<= 1 tahun	5.203.178	3.738.439
1 - 2 tahun	2.738.256	2.098.105
> 2 tahun	867.571	659.572
Jumlah	8.809.005	6.496.116

Pengelompokan investasi sewa pembiayaan - bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	2016	2015	2016 %	2015 %
Belum jatuh tempo	7.731.574	5.686.846	87,77	87,54
Lewat jatuh tempo:				
1-30 hari	884.572	657.028	10,04	10,11
31-90 hari	139.033	104.758	1,58	1,61
91-120 hari	17.475	12.897	0,20	0,20
121-180 hari	26.987	19.476	0,31	0,30
> 180 hari	9.364	15.111	0,10	0,24
Jumlah	8.809.005	6.496.116	100,00	100,00

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto sewa pembiayaan berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

	2016		
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total
Saldo awal	31.124	51.713	82.837
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	52.022	31.169	83.191
Penghapusan	(56.810)	(48.912)	(105.722)
Saldo akhir	26.336	33.970	60.306

4. NET INVESTMENTS IN FINANCE LEASE

The details of net investments in finance lease are as follows:

Investment in finance leases - gross
Guaranteed residual value
Unearned finance lease income
Unamortized transaction costs
Security deposits
Total
Less allowance for impairment losses
Net

The installments of investments in finance lease - gross, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

<= 1 year
1 - 2 years
> 2 years

The classification of investments in finance lease - gross based on days overdue are as follows:

Current
Past due:
1-30 days
31-90 days
91-120 days
121-180 days
> 180 days

The movements in the allowance for impairment losses of net investments in finance lease based on individual and collective assessments are as follows:

Beginning balance
Additions to allowance made during the year - net
Write-off

Ending balance

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. INVESTASI NETO SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto sewa pembiayaan berdasarkan penilaian secara individual dan kolektif adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

4. NET INVESTMENTS IN FINANCE LEASE (Continued)

The movements in the allowance for impairment losses of net investments in finance lease based on individual and collective assessments are as follows: (Continued)

	2015			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	45.074	7.336	52.410	Beginning balance
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	23.718	64.842	88.560	Additions to allowance made during the year - net
Penghapusan	(37.668)	(20.465)	(58.133)	Write-off
Saldo akhir	31.124	51.713	82.837	Ending balance

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah investasi neto sewa pembiayaan sebesar 0,84% dan 1,57% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Percentage of the allowance for impairment losses to net investments in finance lease is 0.84% and 1.57% as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya investasi neto sewa pembiayaan tersebut.

The management believes that the allowance for impairment losses was sufficient to cover possible losses arising from uncollectible net investments in finance lease.

Seluruh transaksi sewa pembiayaan dilakukan dengan pihak ketiga.

All of the Company's finance lease transactions were carried out with third parties.

Rincian bunga kontraktual per tahun untuk investasi neto sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

The detail of contractual interest rates per annum on net investments in finance lease are as follows:

	2016 %	2015 %	
Alat berat dan mesin	16,00 - 19,00	16,00 - 18,00	Heavy equipment and machinery
Kendaraan bermotor	16,02 - 21,50	17,01 - 22,00	Vehicles

Sebagai jaminan atas investasi neto sewa pembiayaan yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur atas kendaraan bermotor dan alat berat yang dibiayai Perusahaan.

As the collateral to the net investments in finance lease, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB) and purchase invoices of the motor vehicles and heavy equipment financed by the Company.

Rincian investasi neto sewa pembiayaan yang digunakan sebagai jaminan atas surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Details of net investment in finance lease pledged as collateral for securities issued and fund borrowings as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
Term loan - dalam negeri	132.797	61.390	Term loan - domestic
Term loan - luar negeri	1.626.273	3.116.058	Term loan - foreign
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Term loan - dalam negeri	999.253	265.713	Term loan - domestic
Pinjaman debt market	980.490	719.565	Loan of debt market
Jumlah	3.738.813	4.162.726	Total

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini merupakan piutang dalam Rupiah yang dikenakan bunga, yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk kendaraan kepada pemakai akhir dengan pembayaran angsuran secara berkala.

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

This account represents interest bearing receivables denominated in Rupiah arising from financing activities in the form of provision of vehicle to end users with periodic installment payment schedule.

	2016	2015	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto Pihak ketiga	7.202.876	8.481.227	<i>Consumer financing receivables - gross Third parties</i>
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui Pihak ketiga	(1.358.480)	(1.544.783)	<i>Unearned consumer financing income Third parties</i>
	5.844.396	6.936.444	
Pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman - bersih	(1.259.517)	(2.151.472)	<i>Joint financing and channeling - Net</i>
	4.584.879	4.784.972	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(122.695)	(96.816)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih	<u>4.462.184</u>	<u>4.688.156</u>	<i>Total consumer financing receivables - net</i>

Angsuran piutang pembiayaan konsumen - bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of consumer financing receivables - gross, which will be collected from customer in accordance with the due dates are as follows:

	2016	2015	
<= 1 tahun	3.939.755	4.702.036	<i><= 1 year</i>
1 - 2 tahun	1.970.110	2.368.927	<i>1 - 2 years</i>
> 2 tahun	1.293.011	1.410.264	<i>> 2 years</i>
Jumlah	<u>7.202.876</u>	<u>8.481.227</u>	<i>Total</i>

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen - bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The classification of consumer financing receivables - gross based on days overdue are as follows:

	2016	2015	2016 %	2015 %	
Belum jatuh tempo	6.204.912	7.139.545	86,14	84,18	<i>Current</i>
Lewat jatuh tempo:					<i>Past due:</i>
1-30 hari	805.818	1.058.645	11,19	12,48	<i>1-30 days</i>
31-90 hari	127.463	167.608	1,77	1,98	<i>31-90 days</i>
91-120 hari	16.994	26.911	0,24	0,32	<i>91-120 days</i>
121-180 hari	29.327	42.003	0,41	0,50	<i>121-180 days</i>
> 180 hari	18.362	46.515	0,25	0,54	<i>> 180 days</i>
Jumlah	<u>7.202.876</u>	<u>8.481.227</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<i>Total</i>

Jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen yang disalurkan oleh Perusahaan atas kendaraan bermotor berkisar antara 6 (enam) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan dan perumahan (KPR) berkisar 12 (dua belas) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.

The term of consumer financing contracts financed by the Company on vehicles range between 6 (six) to 48 (forty-eight) months and housing ranges between 12 (twelve) to 180 (one-hundred-eighty) months.

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen berdasarkan penilaian secara kolektif adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal	96.816	109.437
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	190.134	141.594
Penghapusan	(164.255)	(154.215)
Saldo akhir	122.695	96.816

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar 2,68% dan 2,02% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen tersebut.

Suku bunga kontraktual setahun untuk pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	2016 %	2015 %
Mobil	16,01 - 21,01	16,01 - 22,00
Sepeda motor	38,05 - 41,03	38,01 - 41,10
Properti	14,00 - 18,00	14,00 - 18,00

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas kendaraan bermotor dan properti (bangunan) yang dibiayai Perusahaan.

Rincian piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Mata uang asing			Foreign currencies
Term loan - dalam negeri	19.599	60.209	Term loan - domestic
Term loan - luar negeri	594.874	1.345.714	Term loan - foreign
Rupiah			Rupiah
Term loan - dalam negeri	1.186.643	447.304	Term loan - domestic
Pinjaman debt market	769.548	598.460	Loan of debt market
Jumlah	2.570.664	2.451.687	Total

Perusahaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi dalam menutup asuransi kendaraan bermotor konsumen yang dibiayai Perusahaan, terutama dengan PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life dan PT FWD Life Indonesia. Seluruh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Perusahaan tersebut adalah pihak ketiga.

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (Continued)

The movements in the allowance for impairment losses of consumer financing receivables based on collective assessments are as follows:

	2016	2015
Saldo awal	96.816	109.437
Penambahan cadangan selama tahun berjalan - bersih	190.134	141.594
Penghapusan	(164.255)	(154.215)
Saldo akhir	122.695	96.816

Percentage of the allowance for impairment losses to consumer financing receivables is 2.68% and 2.02% as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

The management believes that the allowance for impairment losses was sufficient to cover possible losses arising from uncollectible consumer financing receivables.

The detail of contractual interest rates per annum on consumer financing is as follows:

	2016 %	2015 %
Mobil	16,01 - 21,01	16,01 - 22,00
Sepeda motor	38,05 - 41,03	38,01 - 41,10
Properti	14,00 - 18,00	14,00 - 18,00

As the collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB), Proprietary Certificate (SHM) and Right of Building Utilization Certificate (SHGB) of the vehicles and property (building) financed by the Company.

Details of consumer financing receivables pledged as collateral for securities issued and fund borrowings as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
Mata uang asing			Foreign currencies
Term loan - dalam negeri	19.599	60.209	Term loan - domestic
Term loan - luar negeri	594.874	1.345.714	Term loan - foreign
Rupiah			Rupiah
Term loan - dalam negeri	1.186.643	447.304	Term loan - domestic
Pinjaman debt market	769.548	598.460	Loan of debt market
Jumlah	2.570.664	2.451.687	Total

The Company engages several insurance companies, in covering the insurance on the consumers vehicles that financed by the Company, mainly with PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life and PT FWD Life Indonesia. All insurance companies that the engaged by the Company are third parties.

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	2016	2015
Sewa	37.784	34.910
Asuransi	1.920	4.050
Lain-lain	2.225	1.491
Jumlah	41.929	40.451

6. PREPAID EXPENSES

Rent
Insurance
Others

Total

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	2016	2015
Piutang dalam proses penyelesaian	84.045	123.142
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(25.763)	(36.328)
	58.282	86.814
Piutang opsi saham karyawan (MESOP)	50.329	-
Piutang karyawan	26.741	31.200
Piutang penerimaan angsuran konsumen	24.649	19.051
Premi asuransi	3.394	4.252
Piutang lain-lain	695	-
Jumlah	164.090	141.317

7. OTHER RECEIVABLES

Receivables in the settlement process
Less :
Allowance for impairment losses

Share option employee (MESOP) receivables
Employee receivables
Customer installment receipt receivables
Insurance premium
Other receivables

Total

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen yang diantaranya dilakukan secara *online* melalui fasilitas layanan pembayaran pelanggan (*payment point*) seperti jaringan ATM Prima, ATM Bersama, Kantor Pos Indonesia, jaringan toko ritel Indomaret dan Alfamart (termasuk di dalamnya jaringan Alfa Midi, Lawson dan Alfa Express). Fasilitas *payment point* ini akan meneruskan angsuran yang dibayarkan konsumen tersebut ke rekening Perusahaan di beberapa bank dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dari tanggal angsuran konsumen diterima.

Customer installment receipt receivables are customer installment such paid through online customer's payment channel (*payment point*) such as ATM networks of Prima, ATM Bersama, the Indonesian Post Office, and outlets of Indomaret and Alfamart retail stores (including the store chains of Alfa Midi, Lawson and Alfa Express). This channels will transfer the installment paid to the Company's bank account in several bank within 1 (one) day up to 2 (two) days from the date that the customer installment is received.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 25.763 dan Rp 36.328 cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang dalam proses penyelesaian - pihak ketiga.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables in the settlement process - third parties as of 31 December 2016 and 2015 amounting to Rp 25,763 and Rp 36,328, respectively, are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables from receivables in the settlement process - third parties.

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari penghabusbukuan peralatan kantor dan rehabilitasi gedung kantor, serta penjualan aset tetap kendaraan dan peralatan kantor dengan rincian keuntungan bersih yang diperoleh sebagai berikut:

	2016	2015
Hasil penjualan	11.823	11.048
Jumlah tercatat	(7.312)	(7.196)
Keuntungan atas penjualan aset tetap - bersih	4.511	3.852

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") yang memiliki masa manfaat yang akan berakhir antara tahun 2016 sampai tahun 2045. Manajemen Perusahaan beryakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah karena tanah tersebut diperoleh secara sah dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Asoka Mas, pihak ketiga, terhadap risiko kerugian kebakaran, banjir dan risiko kerugian lainnya (*all risks*) dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 438.666 dan Rp 391.843 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap terhadap risiko-risiko yang dipertanggungkan.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset tetap.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan jumlah tercatat.

8. FIXED ASSETS (Continued)

Deductions of fixed assets for the years ended 31 December 2016 and 2015 consisted of written off office equipment and leasehold improvement, and sales of fixed assets - motor vehicles and office equipment with details of net gain on sales as follows:

Proceeds	11.048
Carrying amount	(7.196)
Gain on disposal of fixed assets - net	3.852

The Company owns several plots of land with "Hak Guna Bangunan" titles ("Building-Use Titles" or "HGB") with remaining useful lives that will expire in the various years between 2016 and 2045. The management of the Company believes that there will be no difficulty in extending the land rights as the land was acquired legally and this is supported by sufficient evidence of ownership.

All fixed assets, except for land, are covered by insurance to PT Asuransi Asoka Mas, third party, against losses from fire, flood and other risks (all risks) with a total sum insured amounting to Rp 438,666 and Rp 391,843 as of 31 December 2016 and 2015, respectively. The management believes that the sum insured is sufficient to cover the possible losses that may arise from the said insured risks.

The Management of the Company believes that there were no conditions or event that indicate impairment in the carrying amount of its fixed assets, and therefore an allowance for impairment losses of fixed assets was not considered necessary.

The Management of the Company believes that there is no significant difference between the fair value and the carrying amount of fixed assets.

9. ASET TIDAK BERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

	2016				Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Harga perolehan						
Piranti lunak	59.196	2.490	-	1.713	63.399	Acquisition cost Software
Piranti lunak dalam Penyelesaian	2.696	3.146	-	(1.713)	4.129	Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	61.892	5.636	-	-	67.528	Total Cost
Akumulasi amortisasi						
Piranti lunak	39.605	8.211	-	-	47.816	Accumulated amortization Software
Jumlah akumulasi amortisasi	39.605	8.211	-	-	47.816	Total accumulated amortization
Jumlah Tercatat	22.287				19.712	Carrying Amount

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

9. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

	2015					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan Piranti lunak	56.565	716	-	1.915	59.196	Acquisition cost Software
Piranti lunak dalam penyelesaian	5.723	4.111	(5.223)	(1.915)	2.696	Software in progress
Jumlah Harga Perolehan	62.288	4.827	(5.223)	-	61.892	Total Cost
Akumulasi amortisasi Piranti lunak	31.309	8.296	-	-	39.605	Accumulated amortization Software
Jumlah akumulasi amortisasi	31.309	8.296	-	-	39.605	Total accumulated amortization
Jumlah Tercatat	30.979				22.287	Carrying Amount

10. ASET DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif berdasarkan lawan transaksi, jenis dan underlying pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

10. DERIVATIVE ASSETS

A summary of derivative transactions by counterparty, type and underlying as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Lawan transaksi	2016				Counterparty
	Nilai Nosional (nilai penuh)/ Notional Amount (full amount)	Nilai wajar/ Fair values (full amount)	Aset keuangan derivatif/ Derivative financial Assets Rp	Liabilitas keuangan derivatif/ Derivative financial liabilities Rp	
PT Bank Permata Tbk Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	79.500.000 (2.305.238)	1.040.289	1.071.263	PT Bank Permata Tbk Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	62.760.270	4.893.749	836.844	771.091	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
PT Bank ANZ Indonesia Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	30.000.000	532.244	400.151	393.000	PT Bank ANZ Indonesia Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	10.000.000 (46.819)	130.471	131.100	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
			2.407.755	2.366.454	
			41.301		

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET DERIVATIF (Lanjutan)

Ikhtisar transaksi derivatif berdasarkan lawan transaksi, jenis dan *underlying* pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

10. DERIVATIVE ASSETS (Continued)

A summary of derivative transactions by counterparty, type and *underlying* as of 31 December 2016 and 2015 are as follows: (Continued)

Lawan transaksi	2015		Aset keuangan derivatif/ <i>Derivative financial Assets</i> Rp	Liabilitas keuangan derivatif/ <i>Derivative financial liabilities</i> Rp	Counterparty
	Nilai nosional (nilai penuh)/ <i>Notional amount (full amount)</i>	Nilai wajar/ <i>Fair Values (full amount)</i>			
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch					Standard Chartered Bank, Jakarta Branch
Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	203.096.865	24.986.921	2.814.100	2.469.406	Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
PT Bank Permata Tbk					PT Bank Permata Tbk
Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	107.500.000	3.287.145	1.485.246	1.439.900	Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
PT Bank ANZ Indonesia					PT Bank ANZ Indonesia
Kontrak Valuta Berjangka pertukaran mata uang asing (Catatan 12a) Dolar Amerika Serikat	50.000.000	3.681.882	705.792	655.000	Foreign currency swap contract (Note 12a) United States Dollar
			5.005.138	4.564.306	
			440.832		

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 4 Juli 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan PT Bank Permata Tbk, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 100.100 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 10 Juli 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut sebesar Rp 25.025, serta piutang derivatif USD 2.500.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 34.330. Pada tanggal 10 Juli 2016, perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) ini telah berakhir dan diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 30 Juli 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan PT Bank Permata Tbk, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 1.414.875 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 105.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 13 Nopember 2018. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 1.071.263 dan Rp 1.414.875, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD 79.500.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 1.040.289 dan USD 105.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 1.450.916.

PT Bank Permata Tbk

On 4 July 2013, the Company entered into a foreign currency swap contract with PT Bank Permata Tbk, whereby the Company obliged to pay Rp 100,100 and had the right to receive USD 10,000,000 (full amount). This contract was valid since 10 July 2013 until 10 July 2016. As of 31 December 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 25,025, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 2,500,000 (full amount) or equivalent to Rp 34,330. As of 10 July 2016, this foreign currency swap contract has matured and settled by both parties.

On 30 July 2015, the Company entered into a foreign currency swap contract with PT Bank Permata Tbk, whereby the Company obliged to pay Rp 1,414,875 and had the right to receive USD 105,000,000 (full amount). This contract was valid since 11 August 2015 until 13 November 2018. As of 31 December 2016 and 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 1,071,263 and Rp 1,414,875, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 79,500,000 (full amount) or equivalent to Rp 1,040,289 and USD 105,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 1,450,916, respectively.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET DERIVATIF (Lanjutan)

Standard Chartered Bank, Jakarta Branch

Pada tanggal 21 Juni 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 803.200 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 80.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut sebesar Rp 267.733, serta piutang derivatif USD 26.666.667 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 366.245. Pada tanggal 19 Juli 2016, perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) ini telah berakhir dan diselesaikan oleh kedua belah pihak

Pada tanggal 16 Juni 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 888.750 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 8 Agustus 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 195.963 dan Rp 540.443, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD 16.537.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 221.102 dan USD 45.607.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 633.435.

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 302.500 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 25.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan 23 September 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 87.544 dan Rp 204.793, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD Rp 7.235.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 96.906 dan USD 16.925.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 235.891.

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 610.000 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 221.818 dan Rp 443.636, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD 18.181.818 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 240.865 dan USD 36.363.636 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 501.547.

10. DERIVATIVE ASSETS (Continued)

Standard Chartered Bank, Jakarta Branch

On 21 June 2013, the Company entered into a foreign currency swap contract with Standard Chartered Bank Jakarta Branch, whereby the Company obliged to pay Rp 803,200 and had the right to receive USD 80,000,000 (full amount). This contract was valid since 19 July 2013 until 19 July 2016. As of 31 December 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 267,733, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 26,666,667 (full amount) or equivalent to Rp 366,245. As of 19 July 2016, this foreign currency swap contract has matured and settled by both parties.

On 16 June 2014, the Company entered into a foreign currency swap contract with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whereby the Company obliged to pay Rp 888,750 and had the right to receive USD 75,000,000 (full amount). This contract was valid since 16 June 2014 until 8 August 2017. As of 31 December 2016 and 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 195,963 and Rp 540,443, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 16,537,000 (full amount) or equivalent to Rp 221,102 and USD 45,607,000 (full amount) or equivalent to Rp 633,435, respectively.

On 30 June 2014, the Company entered into a foreign currency swap contract with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whereby the Company obliged to pay Rp 302,500 and had the right to receive USD 25,000,000 (full amount). This contract was valid since 30 June 2014 until 23 September 2017. As of 31 December 2016 and 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 87,544 and Rp 204,793, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 7,235,000 (full amount) or equivalent to Rp 96,906 and USD 16,925,000 (full amount) or equivalent to Rp 235,891, respectively.

On 7 October 2014, the Company entered into a foreign currency swap contract with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whereby the Company obliged to pay Rp 610,000 and had the right to receive USD 50,000,000 (full amount). This contract was valid since 14 October 2014 until 13 October 2017. As of 31 December 2016 and 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 221,818 and Rp 443,636, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 18,181,818 (full amount) or equivalent to Rp 240,865 and USD 36,363,636 (full amount) or equivalent to Rp 501,547, respectively.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET DERIVATIF (Lanjutan)

Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (Lanjutan)

Pada tanggal 23 Januari 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 376.500 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 30.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan 12 Pebruari 2018. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 188.250 dan Rp 349.607, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD 15.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 201.085 dan USD 27.857.143 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 390.003.

Pada tanggal 11 Juni 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 667.500 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 25 Juni 2018 (untuk Tranche A) dan tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2016 (untuk Tranche B). Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 77.516 dan Rp 663.194, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD 5.806.452 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 76.886 dan USD 49.677.419 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 686.979.

PT Bank ANZ Indonesia

Pada tanggal 20 Maret 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan PT Bank ANZ Indonesia, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 655.000 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 27 Juni 2018. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp 393.000 dan Rp 655.000, serta piutang derivatif masing-masing sebesar USD 30.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 400.151 dan USD 50.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 705.792.

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch

Pada tanggal 13 Juli 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 131.100 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 17 Juli 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016 nilai utang derivatif atas perjanjian tersebut sebesar Rp 131.100, serta piutang derivatif sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 130.471.

10. DERIVATIVE ASSETS (Continued)

Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (Continued)

On 23 January 2015, the Company entered into a foreign currency swap contract with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whereby the Company obliged to pay Rp 376,500 and had the right to receive USD 30,000,000 (full amount). This contract was valid since 12 February 2015 until 12 February 2018. As of 31 December 2016 and 31 December 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 188,250 and Rp 349,607, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 15,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 201,085 and USD 27,857,143 (full amount) or equivalent to Rp 390,003, respectively.

On 11 June 2015, the Company entered into a foreign currency swap contract with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whereby the Company obliged to pay Rp 667,500 and had the right to receive USD 50,000,000 (full amount). This contract was valid since 22 June 2015 until 25 June 2018 (for Tranche A) and 22 June 2015 until 22 June 2016 (for Tranche B). As of 31 December 2016 and 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 77,516 and Rp 663,194, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 5,806,452 (full amount) or equivalent to Rp 76,886 and USD 49,677,419 (full amount) or equivalent to Rp 686,979, respectively.

PT Bank ANZ Indonesia

On 20 March 2015, the Company entered into a foreign currency swap contract with PT Bank ANZ Indonesia, whereby the Company obliged to pay Rp 655,000 and had the right to receive USD 50,000,000 (full amount). This contract was valid since 27 March 2015 until 27 June 2018. As of 31 December 2016 and 2015, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 393,000 and Rp 655,000, respectively, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 30,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 400,151 and USD 50,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 705,792, respectively.

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch

On 13 July 2016, the Company entered into a foreign currency swap contract with Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch whereby the Company obliged to pay Rp 131,100 and had the right to receive USD 10,000,000 (full amount). This contract was valid since 14 July 2016 until 17 July 2017. As of 31 December 2016, derivative payable arising from the contract amounted to Rp 131,100, and derivative receivable arising from the contract amounted to USD 10,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 130,471.

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET DERIVATIF (Lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing (*foreign currency swap transaction*) dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan ketentuan Perusahaan berkewajiban untuk membayar sebesar Rp 132.850 dan memiliki hak untuk menerima sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh). Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2020. Pada tanggal 31 Desember 2016 Perusahaan belum melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

10. DERIVATIVE ASSETS (Continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

On 11 October 2016, the Company entered into a foreign currency swap contract with PT Bank CIMB Niaga Tbk, whereby the Company obliged to pay Rp 132,850 and had the right to receive USD 10,000,000 (full amount). This contract was valid since 10 January 2017 until 10 January 2020. As of 31 December 2016, The Company has not drawdown the entire loan.

11. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2016	2015	
Uang muka	1.103	1.247	Advance payment
Lainnya	8.677	7.284	Others
Jumlah	9.780	8.531	Total

11. OTHER ASSETS

This account consist of:

12. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari:

	2016	2015
Pinjaman (Dolar AS) (a)		
<u>Pihak ketiga</u>		
Standard Chartered Bank (<i>Facility Agent</i>)(1)	1.387.563	2.678.971
Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch (2)	403.080	689.750
The Korea Development Bank (<i>Facility Agent</i>) (3)	244.291	501.636
Standard Chartered Bank, Singapore Branch (4)	201.540	384.289
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch (5)	134.360	-
Emirates NBD Bank PJSC (<i>Facility Agent</i>) (6)	78.015	685.300
JA Mitsui Leasing, Ltd. (7)	-	34.488
Jumlah pinjaman (Dolar AS)	2.448.849	4.974.434

Pinjaman (Rupiah) (b)

	2016	2015
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1)	757.819	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (2)	295.972	141.861
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (3)	270.622	221.988
PT Bank Permata Tbk (4)	225.224	2.654
PT United Tractors Tbk (5)	217.529	-
PT Bank KEB Hana Indonesia (6)	184.181	-
Bank of China Limited, Jakarta Branch (7)	137.500	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (8)	81.944	-
PT Bank CTBC Indonesia (9)	52.059	105.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk (10)	50.000	-
PT Bank DKI (11)	-	206.780
PT Bank Commonwealth (12)	-	34.722
Jumlah pinjaman (Rupiah)	2.272.850	713.005

12. FUND BORROWINGS

Fund borrowings consist of the followings:

	2016	2015
Borrowings (US Dollar) (a)		
<u>Third parties</u>		
Standard Chartered Bank (<i>Facility Agent</i>)(1)	1.387.563	2.678.971
Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch (2)	403.080	689.750
The Korea Development Bank (<i>Facility Agent</i>) (3)	244.291	501.636
Standard Chartered Bank, Singapore Branch (4)	201.540	384.289
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch (5)	134.360	-
Emirates NBD Bank PJSC (<i>Facility Agent</i>) (6)	78.015	685.300
JA Mitsui Leasing, Ltd. (7)	-	34.488
Total borrowings (US Dollar)	2.448.849	4.974.434
Borrowings (Rupiah) (b)		
<u>Third parties</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1)	757.819	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (2)	295.972	141.861
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (3)	270.622	221.988
PT Bank Permata Tbk (4)	225.224	2.654
PT United Tractors Tbk (5)	217.529	-
PT Bank KEB Hana Indonesia (6)	184.181	-
Bank of China Limited, Jakarta Branch (7)	137.500	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (8)	81.944	-
PT Bank CTBC Indonesia (9)	52.059	105.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk (10)	50.000	-
PT Bank DKI (11)	-	206.780
PT Bank Commonwealth (12)	-	34.722
Total borrowings (Rupiah)	2.272.850	713.005

Ekshibit E/49

Exhibit E/49

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

12. FUND BORROWINGS (Continued)

Pinjaman yang diterima terdiri dari: (Lanjutan)

Fund borrowings consist of the followings (Continued)

	2016	2015	
Jumlah pinjaman	4.721.699	5.687.439	Total borrowing
Dikurangi:			Less:
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(30.760)	(50.740)	Unamortized transaction costs
Pinjaman - bersih	<u>4.690.939</u>	<u>5.636.699</u>	Borrowings - net
	2016	2015	
Tingkat bunga tahunan (%)			(%) Annual interest rate
Mata uang Rupiah	5,50 - 12,00	9,25 - 12,00	Rupiah currency
Mata uang asing	2,22 - 3,30	2,11 - 2,97	Foreign currency

Angsuran pinjaman yang diterima menurut jatuh temponya masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Installments of loans received according to the due dates as of 31 December 2016 and 2015, respectively, are as follows:

	2016	2015	
< = 1 tahun	2.791.829	3.024.775	< = 1 year
1 - 2 tahun	1.406.553	1.896.576	1 - 2 years
2 - 3 tahun	523.317	766.088	2 - 3 years
Jumlah	<u>4.721.699</u>	<u>5.687.439</u>	Total

a. Pinjaman (Dolar AS)

a. Borrowings (US Dollar)

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank

(1) Pada tanggal 29 Juli 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 105.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*). Fasilitas pinjaman tersebut disediakan untuk keperluan modal kerja pembiayaan dengan pembayaran pokok akan diangsur secara bertahap dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pencairan setiap pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

(1) On 29 July 2015, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 105,000,000 (full amount) with several banks, whereas Standard Chartered Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation whose acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent, and PT Bank Central Asia Tbk, whose acting as the Security Agent. The facility is provided to the Company for working capital purpose. The loan facility will be repaid quarterly within 36 (thirty-six) months commencing 9 (nine) months from each loan utilization date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar USD 79.500.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 1.068.162 dan USD 105.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 1.448.475.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to USD 79,500,000 (full amount) or equivalent to Rp 1,068,162 and USD 105,000,000 or equivalent to Rp 1,448,475, respectively.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan ini, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan PT Bank Permata Tbk dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n,10).

In relation to this Syndicated Term Loan Facility Agreement, the Company have entered into a Cross Currency Swap transaction with PT Bank Permata Tbk to hedge the risk of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n,10).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

a. Pinjaman (Dolar AS) (Lanjutan)

Standard Chartered Bank (Lanjutan)

Pada tanggal 16 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah Bank, antara lain, Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dan First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch yang bertindak sebagai "Mandated Lead Arrangers", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*) dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*) untuk keperluan modal kerja pembiayaan.

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas Sindikasi terkait perjanjian ini, sehingga total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman tersebut akan diangsur secara bertahap dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2017.

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar USD 23.772.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 319.401 dan USD 62.532.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 862.629.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman diatas, Perusahaan melakukan perjanjian *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dengan tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n, 10).

Pada tanggal 1 Juli 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 80.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Jakarta Branch bertindak sebagai "Mandated Lead Arranger and Bookrunner", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*). Fasilitas pinjaman tersebut disediakan untuk keperluan modal kerja pembiayaan dengan pembayaran pokok akan diangsur secara bertahap dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

12. FUND BORROWINGS (Continued)

a. Borrowings (US Dollar) (Continued)

Standard Chartered Bank (Continued)

On 16 June 2014, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 75,000,000 (full amount) with several banks, which among others, Standard Chartered Bank, Jakarta Branch and First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch, whose acting as the Mandated Lead Arrangers, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent and PT Bank Central Asia Tbk. whose acting as the Security Agent for financing working capital.

On 30 June 2014, the Company signed a Syndication and Amendment Agreement relating to this facility, hence the total facility increase to USD 100,000,000 (full amount). The loan facility will be repaid in 31 (thirty-one) monthly installments commencing from 23 December 2014 to 23 September 2017.

The Company had drawdown the entire loan.

The loan is secured by net investment in finance leases and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to USD 23,772,000 (full amount) or equivalent to Rp 319,401 and USD 62,532,000 (full amount) or equivalent to Rp 862,629, respectively.

In respect with the above Loan Facility Agreement, the Company had entered into a Cross Currency Swap agreement with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch to cover risks of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n, 10).

On 1 July 2013, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 80,000,000 (full amount) with several banks, whereas Standard Chartered Bank, Jakarta Branch whose acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, whose acting as the Facility Agent, and Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whose acting as the Security Agent. The facility is provided to the Company for working capital purpose. The loan facility will be repaid quarterly within 24 (twenty-four) months commencing from 19 July 2014 to 19 July 2016. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

a. Pinjaman (Dolar AS) (Lanjutan)

Standard Chartered Bank (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman tersebut sebesar USD 26.666.667 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 367.867.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan ini, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n,10).

Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch

- (2) Pada tanggal 19 Maret 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Bilateral dengan nominal sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch dimana PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*). Fasilitas pinjaman tersebut disediakan untuk keperluan modal kerja pembiayaan dengan pembayaran pokok akan diangsur secara bertahap dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman yang terakhir.

Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar USD 30.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 403.080 dan USD 50.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 689.750.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Bilateral dengan Jaminan ini, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan PT Bank ANZ Indonesia dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n,10).

The Korea Development Bank

- (3) Pada tanggal 2 Oktober 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah Bank, antara lain, The Korea Development Bank yang bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger*", The Korea Development Bank, Singapore Branch sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*) dan PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta Branch sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*) untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Fasilitas pinjaman tersebut akan diangsur secara bertahap dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman.

12. FUND BORROWINGS (Continued)

a. Borrowings (US Dollar) (Continued)

Standard Chartered Bank (Continued)

As of 31 December 2015, the outstanding loan amounted to USD 26,666,667 (full amount) or equivalent to Rp 367,867.

In relation to this Syndicated Term Loan Facility Agreement, the Company have entered into a Cross Currency Swap transaction with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch to hedge the risk of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n,10).

Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch

- (2) On 19 March 2015, the Company entered into a Secured Bilateral Term Loan Facility Agreement amounting to USD 50,000,000 (full amount) with Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch, whereas PT Bank Central Asia Tbk whose acting as the Security Agent. The facility is provided to the Company for working capital purpose. The loan facility will be repaid quarterly within 36 (thirty-six) months commencing from the last loan drawdown date.

The loan is secured by net investment in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2016 and 2015 and, the outstanding loan amounted to USD 30,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 403,080 and USD 50,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 689,750, respectively.

In relation to this Secured Bilateral Term Loan Facility Agreement, the Company have entered into a Cross Currency Swap transaction with PT Bank ANZ Indonesia to hedge the risk of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n,10).

The Korea Development Bank

- (3) On 2 October 2014, the Company entered into a Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement amounting to USD 50,000,000 (full amount) with several banks, which among others, The Korea Development Bank whose acting as the Mandated Lead Arranger, The Korea Development Bank, Singapore Branch, whose acting as the Facility Agent and PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta Branch whose acting as the Security Agent for financing working capital. The loan facility will be repaid in 36 (thirty-six) monthly installments commencing from drawdown date.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

a. Pinjaman (Dolar AS) (Lanjutan)

The Korea Development Bank (Lanjutan)

Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo pinjaman tersebut tersebut masing-masing sebesar USD 18.181.818 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 244.291 dan USD 36.363.636 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 501.636.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dimaksud, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n, 10).

Standard Chartered Bank, Singapore Branch

- (4) Pada tanggal 27 Januari 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan sebesar USD 30.000.000 (nilai penuh) dengan Standard Chartered Bank, Singapore Branch, dimana Standard Chartered Bank, Jakarta Branch sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*). Fasilitas pinjaman tersebut disediakan untuk keperluan modal kerja pembiayaan dengan pembayaran pokok akan diangsur secara bertahap dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018.

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan (Catatan 4).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo pinjaman tersebut tersebut masing-masing sebesar USD 15.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 201.540 dan USD 27.857.143 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 384.289.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan ini, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n,10).

12. FUND BORROWINGS (Continued)

a. Borrowings (US Dollar) (Continued)

The Korea Development Bank (Continued)

The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to USD 18,181,818 (full amount) or equivalent to Rp 244,291 and USD 36,363,636 (full amount) or equivalent to Rp 501,636, respectively.

In relation to this Facility Agreement, the Company had entered into a Cross Currency Swap transaction with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch to hedge the risks of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n, 10).

Standard Chartered Bank, Singapore Branch

- (4) On 27 January 2015, the Company entered into a Secured Term Loan Facility Agreement amounting to USD 30,000,000 (full amount) with Standard Chartered Bank, Singapore Branch whereas Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, whose acting as the Security Agent. The facility is provided to the Company for working capital purpose. The loan facility will be repaid quarterly within 36 (thirty-six) months commencing from 12 February 2015 to 12 February 2018.

The Company had drawdown the entire loan.

The loan is secured by net investment in finance lease (Note 4).

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to USD 15,000,000 (full amount), or equivalent to Rp 201,540 and USD 27,857,143 (full amount) or equivalent to Rp 384,289, respectively.

In relation to this Secured Term Loan Facility Agreement, the Company have entered into a Cross Currency Swap transaction with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch to hedge the risk of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n,10).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

a. Pinjaman (Dolar AS) (Lanjutan)

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch

- (5) Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch dengan batas maksimum kredit sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam nilai Rupiah. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman tersebut sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh) setara dengan Rp 134.360.

Emirates NBD Bank PJSC

- (6) Pada tanggal 8 Juni 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan Emirates NBD Bank PJSC yang bertindak sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), Emirates NBD Capital Limited yang bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*) untuk keperluan modal kerja pembiayaan.

Fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan 36 (tiga puluh enam) terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman.

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar USD 5.806.452 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 78.015 dan USD 49.677.419 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 685.300.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dimaksud, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n, 10).

12. FUND BORROWINGS (Continued)

a. Borrowings (US Dollar) (Continued)

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch

- (5) On 30 June 2016, the Company signed a credit agreement with The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Branch with a maximum credit limit of USD 10,000,000 (full amount) or equivalent to the value of the Rupiah. The term of the loan was 1 (one) year from the signing date of the credit agreement. The loan is secured by the net investment finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to USD 10,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 134,360.

Emirates NBD Bank PJSC

- (6) On 8 June 2015, the Company entered into a Secured Term Loan Facility Agreement amounting to USD 50,000,000 (full amount) with Emirates NBD Bank PJSC whose acting as the Facility Agent, Emirates NBD Capital Limited whose acting as the Mandated Lead Arranger and Bookrunner, and PT Bank Central Asia Tbk whose acting as the Security Agent for financing working capital.

The loan facility will be matured up 36 (thirty- six) monthly commencing from drawdown date.

The Company had drawdown the entire loan.

The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

As of 31 December 2016 and 2015 and, the outstanding loan amounted to USD 5,806,452 (full amount) or equivalent to Rp 78,015 and USD 49,677,419 (full amount) or equivalent to Rp 685,300, respectively.

In relation to this Facility Agreement, the Company had entered into a Cross Currency Swap transaction with Standard Chartered Bank, Jakarta Branch to hedge the risks of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n, 10).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

a. Pinjaman (Dolar AS) (Lanjutan)

JA Mitsui Leasing, Ltd.

- (7) Pada tanggal 25 Juni 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan dengan JA Mitsui Leasing, Ltd. dengan batas maksimum kredit sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh). Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dimaksud, Perusahaan melakukan transaksi *Cross Currency Swap* dengan PT Bank Permata Tbk dengan tujuan melakukan lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga (Catatan 2n, 10).

Pada tanggal 10 Juli 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan dengan JA Mitsui Leasing, Ltd. sebesar USD 10.000.000 (nilai penuh). Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan belum melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

b. Pinjaman (Rupiah)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- (1) Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 500.000, untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan kembali menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 500.000, untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman atas kedua perjanjian fasilitas tersebut sebesar Rp 757.819.

12. FUND BORROWINGS (Continued)

a. Borrowings (US Dollar) (Continued)

JA Mitsui Leasing, Ltd.

- (7) On 25 June 2013, the Company entered into a Secured Term Loan Facility Agreement with JA Mitsui Leasing, Ltd. with a maximum credit limit of USD 10,000,000 (full amount). The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the withdrawal date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

In relation to this Facility Agreement, the Company had entered into a Cross Currency Swap transaction with PT Bank Permata Tbk to hedge the risks of foreign exchange and interest rate volatility (Notes 2n, 10).

On 10 July 2016, the Company has fully repaid this loan.

On 11 October 2016, the Company entered into a Secured Term Loan Facility Agreement with JA Mitsui Leasing, Ltd. USD 10,000,000 (full amount). The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the withdrawal date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company has not drawdown the entire loan.

b. Borrowings (Rupiah)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- (1) On 15 August 2016, the Company entered into a Working Capital Credit Facility Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a maximum credit limit of Rp 500,000, for financing working capital. The term of this facility was 36 (thirty-six) months from the loan drawdown date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

On 26 October 2016, the Company entered into a Working Capital Credit Facility Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a maximum credit limit of Rp 500,000, for financing working capital. The term of this facility was 36 (thirty-six) months from the loan drawdown date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

As of 31 Desember 2016, the outstanding loan of then facility agreement amounted to Rp 757,819.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. Pinjaman (Rupiah) (Lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk

- (2) Pada tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan BPD Jabar dan Banten dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 200.000 dan bersifat "non-revolving", untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 32.000. Pada tanggal 31 Desember 2016, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.

Pada tanggal 19 Januari 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan BPD Jabar dan Banten dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 150.000 dan bersifat "non-revolving", untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 59.861 dan Rp 109.861.

Pada tanggal 22 April 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan BPD Jabar & Banten dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 120.000 dan bersifat "non-revolving", untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 96.667.

Pada tanggal 28 September 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan BPD Jabar & Banten dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 250.000 dan bersifat "non-revolving", untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

12. FUND BORROWINGS (Continued)

b. Borrowings (Rupiah) (Continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk

- (2) On 26 August 2013, the Company entered into a Credit Agreement with BPD Jabar dan Banten with a maximum credit limit of Rp 200,000 and on a "non-revolving" basis, for financing working capital. The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the loan withdrawal date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2015, the outstanding loan amounted to Rp 32,000. As of 31 December 2016, the Company has fully repaid this loan.

On 19 January 2015, the Company entered into a Credit Agreement with BPD Jabar dan Banten with a maximum credit limit of Rp 150,000 and on a "non-revolving" basis, for financing capital. The term of the loan was 36 (thirty-six) working months from the loan withdrawal date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to Rp 59,861 and Rp 109,861, respectively.

On 22 April 2016, the Company entered into a Credit Agreement with BPD Jabar & Banten with a maximum credit limit of Rp 120,000 and on a "non-revolving" basis, for financing working capital. The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the loan withdrawal date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 96.667.

On 28 September 2016, the Company entered into a Credit Agreement with BPD Jabar & Banten with a maximum credit limit of Rp 250,000 and on a "non-revolving" basis, for financing working capital. The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the loan withdrawal date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. Pinjaman (Rupiah) (Lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 139.444.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- (3) Pada tanggal 22 Desember 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 200.000. Jangka waktu pencairan pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan awal kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 5).

Pada tanggal 18 Juni 2013, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dimana batas maksimum kredit ditingkatkan dari Rp 200.000 menjadi sebesar Rp 400.000. Jangka waktu pencairan fasilitas ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Desember 2013. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 5).

Perjanjian ini telah diperpanjang jangka waktunya beberapa kali, dan terakhir pada tanggal 22 April 2016, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dimana jangka waktu pencairan fasilitas ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Desember 2016. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan telah melakukan pencairan pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 314.050 dan Rp 261.637.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 270.622 dan Rp 221.988.

PT Bank Permata Tbk

- (4) Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Piutang Pembiayaan Kendaraan dengan Bank Permata dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 100.000 dan bersifat "revolving", untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu penarikan fasilitas tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 dan jangka waktu pembayaran kembali maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas. Fasilitas tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

12. FUND BORROWINGS (Continued)

b. Borrowings (Rupiah) (Continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Continued)

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 139,444.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- (3) On 22 December 2011, the Company entered into a Working Capital Credit Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with a maximum credit limit of Rp 200,000. The term of the loan was 12 (twelve) months from the initial drawdown date. The loan is secured by consumer financing receivables (Note 5).

On 18 June 2013, the Company entered into an Amendment to the Working Capital Credit Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) whereas the maximum credit limit was increased from Rp 200,000 to Rp 400,000. This facility is available for withdrawal until 21 December 2013. The loan is secured by consumer financing receivables (Note 5).

The availability period of this Agreement has been extended in previous years and on 22 April 2016, the Company entered into an Amendment to the Working Capital Credit Facility Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) whereas the facility is available for withdrawal until 21 December 2016. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

In 2016 and 2015, the Company had drawdown the loan amounting to Rp 314,050 and Rp 261,637, respectively.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to Rp 270,622 and Rp 221,988, respectively.

PT Bank Permata Tbk

- (4) On 31 March 2010, the Company entered into a Vehicles Financing Receivables Facility Agreement with Bank Permata with a maximum financing limit of Rp 100,000 and on a "revolving" basis, for financing working capital. The drawdown period was valid until 31 March 2012, and will be due for repayment in 48 (forty-eight) months from the drawdown date. The facility is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. Pinjaman (Rupiah) (Lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali pembaharuan, dan pada tanggal 3 Nopember 2015, telah ditandatangani Perubahan Perjanjian dimana batas maksimum pembiayaan diubah menjadi sebesar Rp 150.000 untuk "Fasilitas Piutang Pembiayaan Kendaraan" dan sebesar Rp 100.000 untuk Fasilitas *Money Market*. Pada tanggal 28 Maret 2016 Perjanjian ini kembali diubah dimana jangka waktu penggunaan fasilitas diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 225.224 dan Rp 2.654.

PT United Tractors Tbk

- (5) Pada tanggal 2 Mei 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan PT United Tractors Tbk senilai Rp 300.000, untuk modal kerja Perusahaan yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembelian alat-alat berat dari pelanggan Perusahaan. Pinjaman tersebut akan diangsur secara bertahap selama 12 kali angsuran per pinjaman dengan periode 3 bulan untuk setiap kali angsuran. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5)

Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 217.529.

PT Bank KEB Hana Indonesia

- (6) Pada tanggal 30 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas *Working Capital Installment* dengan PT Bank KEB Hana Indonesia dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 400.000 untuk "Fasilitas Piutang Pembiayaan Kendaraan", dan sebesar Rp 100.000 untuk Fasilitas *Money Market*. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Fasilitas *Working Capital Installment* tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen sedangkan Fasilitas *Money Market* tidak dijamin dengan jaminan khusus (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 184.181.

Bank of China Limited, Jakarta Branch

- (7) Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Bank of China Limited, Jakarta Branch (Bank of China) dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 150.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 137.500.

12. FUND BORROWINGS (Continued)

b. Borrowings (Rupiah) (Continued)

PT Bank Permata Tbk (Continued)

This agreement had been amended several times, and on 3 November 2015, the amendment of this agreement has been signed with maximum financing limit is adjusted to Rp 150,000 for Vehicles Financing Receivables Facility Agreement and Rp 100,000 for Money Market Facility. On 28 March 2016, the agreement has been amended further for extension of the facility availability period until 28 March 2017.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to Rp 225,224 and Rp 2,654, respectively.

PT United Tractors Tbk

- (5) *On 2 May 2016, the Company entered into a Loan Agreement with PT United Tractors Tbk amounting to Rp 300,000 which will be used as company's working capital for heavy equipment financing to the customer. The loan will be repaid in 12 (twelve) quarterly installments. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).*

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 217,529.

PT Bank KEB Hana Indonesia

- (6) *On 30 August 2016, the Company signed a Working Capital Installment Facility Agreement with PT Bank KEB Hana Indonesia with a maximum limit of financing of Rp 400,000 for "Vehicle Financing Receivables Facilities" and Rp 100,000 for Money Market Facility. The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the loan withdrawal date. The Working Capital Installment Facility was secured by net investment finance lease and consumer financing receivables while Money Market Facility are not secured by specific collateral (Notes 4 and 5).*

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 184,181.

Bank of China Limited, Jakarta Branch

- (7) *On 20 June 2016, the Company signed a Term Loan Facility Agreement with Bank of China Limited, Jakarta Branch (Bank of China) with a maximum credit limit amounting to Rp 150,000. The term of the loan was 36 (thirty six) months from the date of loan withdrawal date. The loan is secured by the net investment finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).*

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 137,500.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. Pinjaman (Rupiah) (Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

- (8) Pada tanggal 19 Nopember 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Berjangka (Term Loan) dimana batas maksimum pembiayaan menjadi sebesar Rp 200.000 untuk "Fasilitas Piutang Pembiayaan Kendaraan", dan sebesar Rp 100.000 untuk Fasilitas *Money Market*. Pada tanggal 7 Nopember 2016 jangka waktu penggunaan fasilitas diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 81.944.

PT Bank CTBC Indonesia

- (9) Pada tanggal 16 Oktober 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit berupa Pinjaman Jangka Menengah (*Medium Term Loan Facility*) dengan PT Bank CTBC Indonesia dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 150.000, untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp 52.059 dan Rp 105.000.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

- (10) Pada tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 untuk "Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)", dan sebesar Rp 50.000 untuk Fasilitas Pinjaman Tetap. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Fasilitas tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 50.000.

12. FUND BORROWINGS (Continued)

b. Borrowings (Rupiah) (Continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

- (8) On 19 November 2015, the entered into an Amendment Term Loan Facility Agreement (Term Loan) to with a maximum limit is set to Rp 200,000 for Vehicle Financing Receivables Facility Agreement and Rp 100,000 for Money Market Facility. On 7 November 2016 The facility period is extended to 19 November 2017.

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 81,944.

PT Bank CTBC Indonesia

- (9) On 16 October 2014, the Company entered into a Term Loan Facility Agreement (Medium Term Loan Facility) with PT Bank CTBC Indonesia with a maximum credit limit of Rp 150,000, for financing working capital. The term of this facility was 36 (thirty-six) months from the drawdown date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding loan amounted to Rp 52,059 and Rp 105,000, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

- (10) On 22 December 2016, the Company signed a Credit Agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum limit of financing of Rp 250,000 for "Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)" and Rp 50,000 for Pinjaman Tetap. The term of the loan was up to 36 (thirty six) months from the loan withdrawal date. This Facility was secured by net investment finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

As of 31 December 2016, the outstanding loan amounted to Rp 50,000.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. Pinjaman (Rupiah) (Lanjutan)

PT Bank DKI

(11) Pada tanggal 5 April 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan 4 (empat) bank untuk pinjaman berjangka (term loan) dimana PT Bank DKI bertindak sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan. Batas maksimum kredit pinjaman berjangka ini ditetapkan sebesar Rp 500.000 dan bersifat "non-revolving", dimana fasilitas disediakan untuk keperluan modal kerja pembiayaan Perusahaan. Jangka waktu fasilitas tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal maksimum plafon kredit telah digunakan seluruhnya. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 83.333.

Pada tanggal 19 September 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank DKI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 250.000 dan bersifat "non-revolving", untuk keperluan modal kerja pembiayaan. Jangka waktu fasilitas tersebut selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tahun 2015, perusahaan telah melakukan pencairan pinjaman tersebut sebesar Rp 140.000.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 123.447.

Pada tanggal 2 Nopember 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman tersebut.

PT Bank Commonwealth

(12) Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka IV (Term Loan IV) dengan Bank Commonwealth dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 50.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan kredit. Pinjaman tersebut dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen (Catatan 4 dan 5).

Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan pencairan pinjaman tersebut sebesar Rp 50.000.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 34.722.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman tersebut.

12. FUND BORROWINGS (Continued)

b. Borrowings (Rupiah) (Continued)

PT Bank DKI

(11) On 5 April 2013, the Company entered into a Syndicated Facility Agreement with 4 (four) banks in relation to a term loan facility whereas PT Bank DKI acting as the Facility Agent and the Security Agent. This term loan have maximum credit limit of Rp 500,000 and on a "non-revolving" basis, and provided for financing working capital to the Company. The facility tenor was 36 (thirty-six) months from the final utilization date of the facility. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

The Company had drawdown the entire loan.

As of 31 December 2015, the outstanding loan amounted to Rp 83,333.

On 19 September 2014, the Company entered into a Credit Agreement with PT Bank DKI with a maximum credit limit of Rp 250,000 and on a "non-revolving" basis, for financing working capital. The term of the facility was 42 (forty-two) months from the credit agreement date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

In 2015, the Company had drawdown the loan amounting to Rp 140,000.

As of 31 December 2015, the outstanding loan amounted to Rp 123,447.

As of 2 November 2016, the Company had fully repaid the entire outstanding loan.

PT Bank Commonwealth

(12) On 18 December 2014, the Company entered into a Term Loan IV Facility Agreement with Bank Commonwealth with a maximum credit limit of Rp 50,000. The term of the loan was 36 (thirty-six) months from the loan drawdown date. The loan is secured by net investments in finance lease and consumer financing receivables (Notes 4 and 5).

In 2015, the Company had drawdown the loan amounting to Rp 50,000.

As of 31 December 2015 the outstanding loan amounted to Rp 34,722.

As of 26 October 2016, the Company had fully repaid the entire outstanding loan.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pembatasan dan Kewajiban

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Menjaga rasio jumlah pencadangan kerugian penurunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, atau
- Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Bank selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan dan laporan keuangan kuartalan paling lambat 60 hari sejak berakhirnya tiap kuartal, atau
- Menjaga rasio antara jaminan fasilitas kredit minimal 100% dari outstanding pinjaman, atau
- Menjaga *gearing ratio* (rasio antara pinjaman dengan modal sendiri) tidak lebih besar dari 5 (lima) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali, atau
- Menjaga *Non Performing Loan* (NPL) tidak melebihi 5% dari piutang pembiayaan, atau
- Dampak mata uang yang tidak dilindungi secara keseluruhan maksimum 25% dari jumlah ekuitas secara keseluruhan, atau
- Ekuitas diharuskan lebih besar dari Rp 1.000.000, atau melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank, salah satunya apabila terdapat perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, perubahan susunan anggota komisaris dan direksi, perubahan bidang atau jenis kegiatan usaha Perusahaan, serta apabila Perusahaan melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan atau peleburan dengan Perusahaan lain.

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang dijamin atas fasilitas kredit di atas berkisar 100% dari jumlah *outstanding* pinjaman dan diikat secara fidusia.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

Tidak ada pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan.

12. FUND BORROWINGS (Continued)

Covenants

On loans received by the Company, the creditors generally entails restrictions and certain obligation that should be met by the Company, which generally include the followings:

- *Maintaining the ratio of total allowance for impairment losses as required by the Accounting Standard, or*
- *Submitting annual audited financial statements to the Bank no later than 4 (four) months subsequent to the year end and quarterly financial statements no later than 60 (sixty) days subsequent to the quarterly period end, or*
- *Maintaining the security margin of at least 100% of the total outstanding loan, or*
- *Maintaining gearing ratio (debt to equity ratio) of not greater than 5 (five) to 10 (ten) times, or*
- *Maintaining Non Performing Loans (NPL) shall not exceed 5% of financing receivables, or*
- *The impact of currency risk exposure that are not being covered/hedged shall not exceed 25% of the total equity, or*
- *Total equity should be greater than Rp 1,000,000, or provide a written notice to the Bank, should any of the following condition are met: one of them if there are changes in the composition of major shareholders, changes in the composition of the Commissioners and Directors, alter the nature of business, change the field or type of business activities, and enter into consolidation, merger, and or acquisitions.*

Total net investments in finance lease and consumer financing receivables pledged as collateral for the above-mentioned credit facilities was about 100% of total outstanding loans and fiduciary transferred.

The Company has complied with covenants on loan agreement.

There are no principal and interest of loans that have been due but not yet paid.

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan terdiri dari :

	2016	2015
Obligasi (a)	2.865.295	1.426.563
Medium Term Notes (MTN) (b)	100.000	254.553
Jumlah	2.965.295	1.681.116

a. Obligasi

	2016	2015
Nilai nominal:		
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	-	155.000
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	220.000	275.000
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	655.000	1.000.000
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	1.000.000	-
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	1.000.000	-
Jumlah nilai nominal	2.875.000	1.430.000
Dikurangi:		
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(9.705)	(3.437)
Jumlah - bersih	2.865.295	1.426.563
Utang obligasi sesuai jatuh temponya:		
• < 1 tahun	842.000	555.000
• 1-2 tahun	692.000	325.000
• 2-3 tahun	1.341.000	550.000
	2.875.000	1.430.000
Amortisasi biaya emisi obligasi yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 22)	4.404	3.536

13. SECURITIES ISSUED

Securities issued consisting of :

	2015	2016
Bonds (a)	1.426.563	2.865.295
Medium Term Notes (MTN) (b)	254.553	100.000
Total	1.681.116	2.965.295

a. Bond

	2015	2016
Nominal value:		
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	155.000	-
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	275.000	220.000
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	1.000.000	655.000
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	-	1.000.000
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	-	1.000.000
Total nominal value	1.430.000	2.875.000
Less:		
Unamortized bond issuance cost	(3.437)	(9.705)
Total - net	1.426.563	2.865.295
Bonds payable by maturity profile:		
< 1 year •	555.000	842.000
1-2 years •	325.000	692.000
2-3 years •	550.000	1.341.000
	1.430.000	2.875.000
Amortization of bonds issuance costs charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 22)	3.536	4.404

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 100.000	7,50%	1 Maret/ March 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 370.000	8,50%	19 Februari/ February 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 155.000	9,00%	19 Februari/ February 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 100.000	7,50%	1 Maret/ March 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 370.000	8,50%	19 Februari/ February 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 155.000	9,00%	19 Februari/ February 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 (Obligasi Berkelanjutan I Tahap II) dengan jumlah nominal sebesar Rp 625.000 yang terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Februari 2013.

The Company issued Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 (Obligasi Berkelanjutan I Tahap II) at a nominal value of Rp 625,000 which consist of A Series, B Series and C Series and were listed at the Indonesian Stock Exchange on 20 February 2013.

Bunga Obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal 19 Mei 2013 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing masing seri Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Interests on these Bonds are paid on a quarterly basis with the first payment on 19 May 2013 and the last payment date together with payment of principal of each series of Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

a. Obligasi (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 (Lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin secara fidusia dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pokok Obligasi yang terutang yang harus tersedia 5 bulan setelah tanggal emisi (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melunasi seluruh utang pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing pada tanggal 1 Maret 2014, 18 Pebruari 2015 dan 18 Pebruari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang terutang sebesar Rp 155.000.

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 225.000	10,50%	17 Maret/ March 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 55.000	11,00%	7 Maret/ March 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 220.000	11,50%	7 Maret/ March 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

Pada tanggal 28 Pebruari 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-121/D.04/2014 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap I) dengan jumlah nominal sebesar Rp 500.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1d) dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2014.

Bunga Obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal 7 Maret 2014 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Berdasarkan hasil pemeringkatan terakhir atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 189/DIR/RAT/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), Obligasi tersebut telah mendapat kenaikan peringkat menjadi AA-(idn).

Obligasi tersebut dijamin secara fidusia dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pokok Obligasi yang terutang yang harus tersedia 5 bulan setelah tanggal emisi (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melunasi seluruh utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dan Seri B masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 7 Maret 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang terutang masing-masing sebesar Rp 220.000 dan Rp 275.000.

13. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Bond (Continued)

Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 (Continued)

The Bonds were secured by the fiduciary transfers of the Company's net investments in finance lease and consumer financing receivables to the third parties which categorized as current totalling 80% (eighty percent) of the principal amount of the Bonds payable after 5 months from issuance date (Notes 4 and 5).

The Company fully paid the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan I Tahap II A Series, B Series, and C Series on 1 March 2014, 18 February 2015 and 18 February 2016.

As of 31 December 2015, the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan I Tahap II amounted to Rp 155,000.

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014

On 28 February 2014, the Company obtained an effective statement from Indonesia's Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) in its letter No. S-121/D.04/2014 in respect with the Public Offering of Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap I), at a nominal value of Rp 500,000, offered at par (Note 1d) and were listed at the Indonesian Stock Exchange on 10 March 2014.

Interests on these Bonds are paid on a quarterly basis with the first payment on 7 March 2014 and the last payment date together with payment of principal of each series of Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Based on the latest annual bond rating result on long-term debentures according to Letter No. 189/DIR/RAT/XI/2016 dated 25 November 2016 of PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), these Bonds rating were upgraded to AA-(idn).

The Bonds were secured by the fiduciary transfers of the Company's net investments in finance leases and consumer financing receivables to the third parties which categorized as current totalling 80% (eighty percent) of the principal amount of the Bonds payable after 5 months from issuance date (Notes 4 and 5).

The Company fully paid the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan II Tahap I A Series & B Series, each on 17 March 2015 and 7 March 2016 respectively.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan II Tahap I amounted to Rp 220,000 dan Rp 275,000 respectively.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

a. Obligasi (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 345.000	9,875%	29 Maret/ March 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 105.000	10,500%	19 Maret/ March 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 550.000	10,875%	19 Maret/ March 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

Perusahaan telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap II) dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.000.000 yang terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2015.

Bunga Obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal 19 Juni 2015 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Berdasarkan hasil pemeringkatan terakhir atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 189/DIR/RAT/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), Obligasi tersebut telah mendapat kenaikan peringkat menjadi peringkat AA-(idn).

Obligasi tersebut dijamin secara fidusia dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pokok Obligasi yang terutang yang harus tersedia 6 bulan setelah tanggal emisi (Catatan 4 dan 5).

Perusahaan telah melunasi seluruh utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A pada tanggal 29 Maret 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang terutang masing-masing sebesar Rp 655.000 dan Rp 1.000.000.

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 200.000	9,75%	5 Maret/ March 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 142.000	10,25%	25 Pebruari/ February 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 658.000	10,75%	25 Pebruari/ February 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

13. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Bond (Continued)

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015

The Company issued and offered Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap II) at a nominal value of Rp 1,000,000 which consist of A Series, B Series and C Series and were listed at the Indonesian Stock Exchange on 20 March 2015.

Interests on these Bonds are paid on a quarterly basis with the first payment on 19 June 2015 and the last payment date together with payment of principal of each series of Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Based on the latest annual bond rating results on long-term debentures according to Letter No. 189/DIR/RAT/XI/2016 dated 25 November 2016 of PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), these Bonds rating were upgraded to AA-(idn).

The Bonds were secured by the fiduciary transfers of the Company's net investments in finance leases and consumer financing receivables to the third parties which categorized as current totalling 80% (eighty percent) of the principal amount of the Bonds payable after 6 months from issuance date (Notes 4 and 5).

The Company fully paid the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan II Tahap I A Series on 29 March 2016.

As of 31 December 2016 and 2015, the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan II Tahap II amounted to Rp 655,000 and Rp 1,000,000 respectively.

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

a. Obligasi (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia
Tahap III Tahun 2016 (Lanjutan)

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap III) dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.000.000 yang terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Februari 2016.

Bunga Obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal 25 Mei 2016 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

Berdasarkan hasil pemeringkatan terakhir atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 189/DIR/RAT/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), Obligasi tersebut telah mendapat kenaikan peringkat menjadi peringkat AA-(idn).

Obligasi tersebut dijamin secara fidusia dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pokok Obligasi yang terutang yang harus tersedia 6 bulan setelah tanggal emisi (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang terutang sebesar Rp 1.000.000.

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap
I Tahun 2016

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 317.000	8,10%	25 Oktober/ October 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 550.000	8,80%	25 Oktober/ October 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 133.000	9,10%	25 Oktober/ October 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 (Obligasi Berkelanjutan III Tahap I) dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.000.000 yang terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2016.

Bunga Obligasi tersebut dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal 25 Januari 2017 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Berdasarkan hasil pemeringkatan terakhir atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 189/DIR/RAT/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), Obligasi tersebut telah mendapat kenaikan peringkat menjadi peringkat AA-(idn).

13. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Bond (Continued)

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia
Tahap III Tahun 2016 (Continued)

The Company issued Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap III) at a nominal value of Rp 1,000,000 which consist of A Series, B Series and C Series and were listed at the Indonesian Stock Exchange on 26 February 2016.

Interests on these Bonds are paid on a quarterly basis with the first payment on 25 May 2016 and the last payment date together with payment of principal of each series of Obligasi Berkelanjutan II Tahap III.

Based on the latest annual bond rating results on long-term debentures according to Letter No. 189/DIR/RAT/XI/2016 dated 25 November 2016 of PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), these Bonds rating were rated at upgraded to AA-(idn).

The Bonds were secured by the fiduciary transfers of the Company's net investments in finance leases and consumer financing receivables to the third parties which categorized as current totalling 80% (eighty percent) of the principal amount of the Bonds payable after 6 months from issuance date (Notes 4 and 5).

As of 31 December 2016, the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan II Tahap III amounted to Rp 1,000,000.

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap
I Tahun 2016

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series A	Rp 317.000	8,10%	25 Oktober/ October 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 550.000	8,80%	25 Oktober/ October 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series C	Rp 133.000	9,10%	25 Oktober/ October 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

The Company issued Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 (Obligasi Berkelanjutan III Tahap I) at a nominal value of Rp 1,000,000 which consist of A Series, B Series and C Series and were listed at the Indonesian Stock Exchange on 26 October 2016.

Interests on these Bonds are paid on a quarterly basis with the first payment on 25 January 2017 and the last payment date together with payment of principal of each series of Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Based on the latest annual bond rating results on long-term debentures according to Letter No. 189/DIR/RAT/XI/2016 dated 25 November 2016 of PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), these Bonds rating were upgraded to AA-(idn).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

a. Obligasi (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia
Tahap I Tahun 2016 (Lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin secara fidusia dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi yang terutang yang harus tersedia 6 bulan setelah tanggal emisi (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang terutang sebesar Rp 1.000.000.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.700.038 dan Rp 1.144.019 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 4 dan 5).

Selain itu, berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain:

- a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perusahaan atau kepada kreditur lainnya yang utangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (Kreditur Preferen), selama Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang atau Perusahaan tidak melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang.
- b. Mengalihkan kekayaan atau Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perusahaan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perusahaan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
- c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga obligasi.
- d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perusahaan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

13. SECURITIES ISSUED (Continued)

a. Bond (Continued)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia
Tahap I Tahun 2016 (Continued)

The Bonds were secured by the fiduciary transfers of the Company's net investments in finance leases and consumer financing receivables to the third parties which categorized as current totalling 60% (sixty percent) of the principal amount of the Bonds payable after 6 months from issuance date (Notes 4 and 5).

As of 31 December 2016, the outstanding principal of Obligasi Berkelanjutan III Tahap I amounted to Rp 1,000,000.

The Bonds Trustee Agreements prescribe several negative covenants to the Company, entails restrictions and certain obligation that should be met by the Company, which among others collateral with fiduciary transfer of net investments in finance lease and consumer financing receivables amounting to Rp 1,700,038 and Rp 1,144,019 as of 31 December 2016 and 2015, respectively (Notes 4 and 5).

Moreover, under the agreements, the Company is not allowed to, among others:

- a. Carries out a payment except of dividend payments to shareholders during the Company's financial year or to any other creditors whose debt are not secured by specific collateral (preferred creditors), as long as the Company fails to make payment of the payable amount or the Company does not make payments of the payable amount based on a Trustee Agreement and Acknowledgement of Debt.
- b. Transfer asset or pledge the assets as collateral on debts, which constitute of greater than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether its related to one another or not, that occur within 1 (one) financial year, except for the purposes of financing the Company's operational activities and has obtained approval through the Company's General Meeting of Shareholders.
- c. Carries out a business combination, consolidation and merger with another company unless provided that its carried out in a similar industry and have no negative impact to the course of the Company's operational business and does not affect the Company's ability to pay the principal and/or interest on the bonds.
- d. Carries out business activities other than those set forth in the Articles of Association of the Company.
- e. Entered into a management agreement or other similar agreement that resulted in the Company operations being controlled by other parties that may result in a significant negative impact to the Company's business operation.

Ekshibit E/66

Exhibit E/66

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

13. SECURITIES ISSUED (Continued)

b. Medium Term Notes (MTN)

b. Medium Term Notes (MTN)

	2016	2015	
Nilai nominal:			Nominal value:
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015	100.000	100.000	Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015
Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015	-	155.000	Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015
Dikurangi:			
Biaya emisi MTN yang belum diamortisasi	-	(447)	Unamortized MTN issuance cost
Jumlah - neto	<u>100.000</u>	<u>254.553</u>	Total - net
MTN sesuai jatuh temponya:			MTN have the following maturity:
• < 1 tahun	50.000	155.000	< 1 year •
• 1-2 tahun	50.000	50.000	1-2 years •
• 2-3 tahun	-	50.000	2-3 years •
	<u>100.000</u>	<u>255.000</u>	
Amortisasi biaya emisi MTN yang dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 22)	<u>447</u>	<u>525</u>	Amortization of MTN costs charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 22)

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

MTN	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok MTN/ MTN principal installment
Seri/Series A	Rp 50.000	5,50%	13 April/ April 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date
Seri/Series B	Rp 50.000	5,50%	13 Mei/ May 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ Bullet payment on due date

Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015 (MTN III) dengan jumlah pokok sebesar total Rp 100.000 yang terdiri dari Seri A sebesar Rp 50.000 dan Seri B sebesar Rp 50.000 yang telah didistribusikan secara elektronik oleh KSEI pada tanggal 13 April 2015.

The Company issued a Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015 (MTN III) with a principal amount of Rp 100,000 which consist of A Series amount of Rp 50,000 and B Series amount of Rp 50,000 which have been distributed electronically by KSEI on 13 April 2015.

Bunga MTN III dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan tanggal pembayaran bunga MTN tersebut. Pembayaran Bunga MTN III terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri MTN III.

Interests on the MTN III are paid on a quarterly basis according to the interest payment schedule of the MTN. The final interest payment on the MTN III together with payment of principal of each series of the MTN III.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pokok MTN III yang terutang masing-masing sebesar Rp 100.000.

On 31 December 2016 and 2015, the outstanding principal of MTN III amounted to Rp 100,000, respectively.

Berdasarkan hasil pemerinkatan terakhir atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 190/DIR/RAT/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), Medium Term Notes tersebut telah mendapat kenaikan peringkat menjadi peringkat AA-(idn).

Based on the rating results on long-term debentures according to Letter No. 190/DIR/RAT/XI/2016 dated 25 November 2016 of PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), these Medium Term Notes rating were upgraded to AA-(idn).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (Lanjutan)

b. *Medium Term Notes (MTN)* (Lanjutan)

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015

Pada tanggal 5 Agustus 2015, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015 (MTN IV)* dengan nilai nominal sebesar Rp 155.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun.

Bunga MTN IV dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan tanggal pembayaran bunga MTN tersebut. Pembayaran Bunga MTN IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pokok MTN IV yang terutang sebesar Rp 155.000.

Perusahaan telah melunasi seluruh utang pokok MTN IV pada tanggal 12 Agustus 2016.

Perjanjian Penerbitan MTN III dan MTN IV mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 50.001 dan Rp 174.005 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Catatan 4 dan 5).

Selain itu, berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain:

- a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perusahaan atau kepada kreditur lainnya yang utangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (kreditur preferen), selama Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang atau Perusahaan tidak melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianan dan Pengakuan Utang.
- b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perusahaan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perusahaan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
- c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga MTN I, II, III dan IV.
- d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perusahaan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

13. *SECURITIES ISSUED* (Continued)

b. *Medium Term Notes (MTN)* (Continued)

Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015

On 5 August 2015, the Company issued a *Medium Term Notes BFI Finance Indonesia IV Tahun 2015 (MTN IV)* with a nominal value of Rp 155,000 bearing fixed interest rate of 10.50% per annum.

Interests on the MTN IV are paid on a quarterly basis according to the interest payment schedule of the MTN. The final interest payment on the MTN IV as well as the principal will mature on 15 August 2016.

On 31 December 2015, the outstanding principal of MTN IV amounted to Rp 155,000.

The Company fully paid the outstanding principal of MTN IV on 12 August 2016 .

The MTN III and MTN IV Issuance Agreement prescribes several negative covenants to the Company, entails restrictions and certain obligation that should be met by the Company, which among others, collateral with fiduciary transfer of net investments in finance lease and consumer financing receivables amounting to Rp 50,001 and Rp 174,005, respectively, as of 31 December 2016 and 2015 (Notes 4 and 5).

Moreover, under the agreement, the Company is not allowed to, among others:

- a. Carries out a payment except of dividend payments to shareholders during the Company's financial year or to any other creditors whose debt are not secured by specific collateral (preferred creditors), as long as the Company fails to make payment of the payable amount or the Company does not make payments of the payable amount based on a Trustee Agreement and Acknowledgement of Debt.
- b. Transfer asset or pledge the assets as collateral on debts, which constitute of greater than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether its related to one another or not, that occur within 1 (one) financial year, except for the purposes of financing the Company's operational activities and has obtained approval through the Company's General Meeting of Shareholders.
- c. Carries out a business combination, consolidation and merger with another company unless provided that its carried out in a similar industry and have no negative impact to the course of the Company's operational business and does not affect the Company's ability to pay the principal and/or interest on the MTN I, II, III and IV.
- d. Carries out business activities other than those set forth in the Articles of Association of the Company.
- e. Entered into a management agreement or other similar agreement that resulted in the Company operations being controlled by other parties that may result in a significant negative impact to the Company's business operation.

Ekshibit E/68

Exhibit E/68

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2016	2015
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	17.599	14.576
Pasal 23	414	315
Pasal 25	18.452	10.022
Pasal 26	29.078	31.925
Pasal 4 (2) - Final	2.620	1.075
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	880	676
Taksiran pajak penghasilan badan terutang	24.498	11.860
Jumlah	93.541	70.449

b. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Laba sebelum pajak penghasilan	1.024.963	835.494
Beda tetap:		
Beban sewa	1.881	2.409
Pendapatan keuangan yang pajaknya bersifat final	(22.947)	(35.837)
Beban asuransi	9.455	9.045
Beban depresiasi	2.663	2.466
Beban lain-lain	636	1.139
Jumlah beda tetap	(8.312)	(20.778)
Beda temporer:		
Gaji dan imbalan pasca-kerja	(7.280)	35.291
Cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain	231.963	198.286
Penghapusan piutang	(209.168)	(194.387)
Penyusutan aset tetap	6.396	(303)
Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap	(598)	(92)
Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan	(5.821)	(931)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	19.980	(14.653)
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan konsumen	(261)	(31.771)
Beban lain-lain	(675)	(3.750)
Jumlah beda temporer	34.536	(12.310)
Taksiran laba kena pajak	1.051.187	802.406

14. TAXATION

a. Taxes payable

Income Taxes:
Article 21
Article 23
Article 25
Article 26
Article 4(2) - Final
Value Added Tax (VAT)

Estimated income tax payable

Total

b. Income taxes

A reconciliation between profit before income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable profit for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Profit before income tax

Permanent differences:
Rent expenses

Finance income subjected to final tax
Insurance expenses
Depreciation expenses
Other expenses

Total permanent differences

Temporary differences:
Salaries and post-employment benefits
Allowance for impairment losses of net investments in finance lease, consumer financing receivables and other receivables
Receivables written-off
Depreciation of fixed assets

Net gain on sale of fixed assets

Amortization of securities issued cost
Unamortized transaction cost on fund borrowings
Unamortized transaction cost on consumer financing receivables

Other expenses

Total temporary differences

Estimated taxable income

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Beban pajak penghasilan		
2016		
20% x Rp 1.051.187	210.238	-
2015		
20% x Rp 802.406	-	160.481
Beban pajak penghasilan	210.238	160.481
Dikurangi: kredit pajak penghasilan pasal 25	(185.740)	(148.621)
Taksiran pajak penghasilan badan terutang	<u>24.498</u>	<u>11.860</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2016 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2015 sesuai dengan SPT Perusahaan.

14. TAXATION (Continued)

b. Income taxes (Continued)

A reconciliation between profit before income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable profit for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows: (Continued)

<i>Estimated income tax expense</i>
2016
<i>20% x Rp 1,051,187</i>
2015
<i>20% x Rp 802,406</i>
<i>Estimated income tax expense</i>
<i>Less: income tax credit article 25</i>
<i>Estimated corporate income tax payable</i>

The corporate income tax calculation for 2016 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodged its Annual Corporate Income Tax Return.

The corporate income tax calculation for 2015 conforms with the Company's Annual Tax returns.

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari:

14. TAXATION (Continued)

c. Deferred tax

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:

	31 Desember/ December 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain / Credited (charged) Into statement of profit or loss and other comprehensive Income	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Credited to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2016	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai	7.049	4.560	-	11.609	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca-kerja	22.395	5.683	-	28.078	Post-employment benefits
Beban yang masih harus dibayar	5.293	312	-	5.605	Accrued expenses
Cadangan saham kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	7.587 (7.587)	-	-	Management and employee stock options program share reserve
Penyusutan aset tetap	(8.654)	1.160	-	(7.494)	Depreciation of fixed assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen	(1.304) (52)	-	(1.356)	Unamortized transaction cost on net investments in finance lease and consumer financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan belum diamortisasi	(776) (1.165)	-	(1.941)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(10.149)	3.997	-	(6.152)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	(7.556)	-	15.761	8.205	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - Bersih	13.885	6.908	15.761	36.554	Deferred tax assets - Net

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

c. Pajak tangguhan (Lanjutan)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari: (Lanjutan)

c. Deferred tax (Continued)

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 2014	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain / Credited (charged) Into statement of profit or loss and other comprehensive Income	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ Credited to equity from other comprehensive income	31 Desember/ December 2015	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.270	779	-	7.049	Allowance for impairment losses
Imbalan pasca-kerja	20.157	2.238	-	22.395	Post-employment benefits
Beban yang masih harus dibayar	2.771	2.522	-	5.293	Accrued expenses
Cadangan saham kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	6.039	1.548	-	7.587	Management and employee stock options program share reserve
Penyusutan aset tetap	(8.575)	(79)	-	(8.654)	Depreciation of fixed assets
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen	5.050	6.354	-	1.304	Unamortized transaction cost on net investments in finance lease and consumer financing receivables
Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan belum diamortisasi	(590)	(186)	-	(776)	Unamortized securities issued cost
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(7.217)	(2.932)	-	(10.149)	Unamortized transaction cost on fund borrowings
Penghasilan komprehensif lain	8.102	-	(15.658)	7.556	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - Bersih	32.007	(2.464)	(15.658)	13.885	Deferred tax assets - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

The management believes that future taxable profit will be sufficient to be compensated against the deductible of temporary differences.

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

14. TAXATION (Continued)

d. Beban Pajak Penghasilan

d. Income Tax Expense

	2016	2015	
Kini	210.239	160.481	Current
Tangguhan	(6.908)	2.464	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	23.267	22.261	Adjustment on prior fiscal year assessment
Beban Pajak Penghasilan	226.598	185.206	Income Tax Expense

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dengan beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rates to the profit before income tax, and the income tax expense as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
Laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.024.963	835.494	Profit before income tax as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dengan tarif pajak tunggal yang Berlaku	204.993	167.099	Tax expense at the applicable tax rate
Pengaruh pajak penghasilan atas: beda tetap pada tarif pajak tunggal yang berlaku	(1.662)	(4.154)	Tax effects on: permanent differences at the applicable single tax rate
Penyesuaian tahun lalu	23.267	22.261	Adjustment on profit fiscal year assessment
Beban Pajak Penghasilan	226.598	185.206	Income Tax Expense

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Pada tanggal 28 Desember 2007, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 ("PP No. 81/2007") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

On 28 December 2007, the President of the Republic Indonesia stipulated the Government Regulation No. 81 Year 2007 ("Gov. Reg. No. 81/2007") on "Reduction of the Rate of Income Tax on Resident Corporate Tax Payers in the Forum of Publicly-listed Companies".

PP No. 81/2007 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1b Undang-undang Pajak Penghasilan, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu perseroan yang saham atau efek bersifat ekuitas lainnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang jumlah kepemilikan saham publiknya adalah 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi oleh perseroan terbuka dalam waktu paling singkat enam bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak.

This Gov. Reg. No. 81/2007 provides that resident publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate i.e., 5% lower than highest income tax rate Article 17 paragraph 1b of the Income Tax Law, provided they meet the prescribed criteria, i.e., companies whose shares or other equity instruments are listed in the Indonesia Stock Exchange, whose shares owned by the public is 40%, or more of the total paid shares and such shares are owned by at least 300 parties, each party owning less than 5% of the total paid up shares. These requirements should be fulfilled by the publicly-listed companies for a period of six months in one tax year.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Administrasi (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Nopember 2013, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013 ("PP No. 77/2013") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" yang kemudian telah diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 ("PP No. 56/2015") tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013.

PP No. 56/2015 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan telah memenuhi persyaratan di atas untuk mendapatkan penurunan tarif sebesar 5%, sehingga menggunakan tarif 20% untuk perhitungan PPh Badan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Pemeriksaan Pajak

Tahun Pajak 2011

Pada tanggal 18 Maret 2016, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2011 sehubungan dengan pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan lainnya masing-masing sebesar Rp 12.261, Rp 27.936 dan Rp 123. Selain itu, Perusahaan juga telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak sebesar Rp 3.775.

Perusahaan telah membayar kekurangan pajak tersebut ke Kantor Pajak pada tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 44.095 dan telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan.

14. TAXATION (Continued)

e. Administration (Continued)

On 21 November 2013, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 77 Year 2013 ("Regulation No. 77/2013") on "Income Tax Rate Reduction Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies" which was later amended back through Government Regulation No. 56 of 2015 ("PP No. 56/2015") on the Amendment of Government Regulation No. 77 Year 2013.

PP No. 56/2015 regulates publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate of 5% lower than the income tax rate corporate taxpayer in the country, provided they meet the prescribed criteria, ie at least 40% of the total paid-up shares recorded to be traded on the stock exchanges in Indonesia; the shares must be held by at least 300 Parties; each Party may only have a share of less than 5% of the total shares issued and fully paid; and must be met in a short time at least 183 calendar days within a tax year.

On 31 December 2016 and 31 December 2015, the Company has met requirements to obtain the reduced income tax rate of 5%, so that the rate using of 20% for corporate income tax calculation.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

f. Tax Assessment

Fiscal Year 2011

On 18 March 2016, the Company received a Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) for corporate income tax, value added tax and various other taxes for fiscal year 2011 amounting to Rp 12,261, Rp 27,936 and Rp 123, respectively. In addition the company also received Tax Collection Letter (STP) from Tax Office amounting Rp 3,775.

On 15 April 2016, the Company has paid the tax underpayment to the Tax Office amounting to Rp 44,095 and has been recorded as income tax expense.

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR		15. ACCRUED EXPENSES		
	2016	2015		
Bunga	78.610	54.781		Interest
Bonus dan tunjangan	76.939	60.885		Bonus and allowance
Jasa tenaga ahli	1.551	7.301		Professional fees
Lainnya (saldo dibawah Rp 1.000)	33.140	17.619		Others (balance below Rp 1,000)
Jumlah	190.240	140.586		Total
16. UTANG LAIN-LAIN		16. OTHER PAYABLES		
	2016	2015		
Titipan konsumen	73.286	69.451		Customer deposits
Premi asuransi	29.097	11.094		Insurance premium
Utang kepada dealer	9.535	4.112		Payable to dealers
Utang pengurusan fidusia	1.024	657		Fiducia processing payables
Lainnya (saldo dibawah Rp 1.000)	26.972	24.177		Others (balance below Rp 1,000)
Jumlah	139.914	109.491		Total
17. MODAL SAHAM		17. SHARE CAPITAL		

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholder of the Company based on the share register of PT Sirca Datapro Perdana, the share registrar, as of 31 December 2016 and 2015, are as follow:

	2016			
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Amount	%	
Pemegang saham				Shareholders
Trinugraha Capital & CO SCA	683.524.966	170.881	42,81	Trinugraha Capital & CO SCA
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	812.913.396	203.229	50,91	Others (each below 5%)
	1.496.438.362	374.110	93,72	
Saham treasuri	100.273.200	25.068	6,28	Treasury stock
Jumlah	1.596.711.562	399.178	100,00	Total
	2015			
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai nominal/ Amount	%	
Pemegang saham				Shareholders
Trinugraha Capital & CO SCA	683.524.966	170.881	43,65	Trinugraha Capital & CO SCA
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	880.861.796	220.216	56,25	Others (each below 5%)
	1.564.386.762	391.097	99,90	
Saham treasuri	1.572.800	393	0,10	Treasury stock
Jumlah	1.565.959.562	391.490	100,00	Total

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh bertambah masing-masing sebanyak 30.752.000 saham dan 16.025.000 saham sebagai hasil eksekusi opsi saham dari program MESOP oleh manajemen dan karyawan (Catatan 19), dan berkurang masing-masing sebesar 100.273.200 saham dan 1.572.800 saham sebagai hasil dari pembelian kembali saham Perusahaan (buy-back).

As of 31 December 2016 and 2015, the number of issued and fully paid-up shares increase of 30,752,000 shares and 16,025,000 shares, respectively, as result by MESOP program exercised (Note 19), and decrease of 100,273,200 shares and 1,572,800 shares as result of repurchase of the Company's shares, respectively.

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Saham Treasuri

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang diperkenankan sesuai Peraturan OJK No.2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 98.700.400 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 248.116, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 100.273.200 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 252.160 (2015: 1.572.800 lembar saham dengan nilai pembelian sebesar Rp 4.044).

Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perusahaan untuk meningkatkan manajemen permodalan Perusahaan dimana pelaksanaannya akan meningkatkan nilai laba bersih per saham (*Earnings per Share/EPS*).

Jumlah saham yang dimiliki anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Sirca Datapro Perdana, biro administrasi efek, adalah sebanyak 57.698.754 dan 26.133.478 saham, yang merupakan kepemilikan sebesar 3,61% dan 1,66% dari jumlah saham Perusahaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Anggota/ <i>Name of Members</i>	Jabatan/Positions	Jumlah Saham/Total Shares		%	
		2016	2015	2016	2015
Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	38.988.508	13.208.232	2,44	0,84
Cornelius Henry Kho	Direktur/ <i>Director</i>	12.171.998	9.721.998	0,76	0,62
Sudjono	Direktur/ <i>Director</i>	3.338.000	2.203.000	0,21	0,14
Sutadi	Direktur/ <i>Director</i>	2.200.000	1.000.000	0,14	0,06
Sigit Hendra Gunawan	Direktur/ <i>Director</i>	1.000.000	-	0,06	-
Johanes Sutrisno	Komisaris/ <i>Commissioner</i>	248	248	0,00	0,00
Jumlah/ Total		57.698.754	26.133.478	3,61	1,66

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo akun ini masing-masing sejumlah Rp 553.286 dan Rp 475.176 merupakan selisih lebih antara hasil yang diterima dengan nilai nominal dari setoran modal, penawaran umum perdana dan konversi dari obligasi konversi termasuk penyesuaian saldo karena kuasi reorganisasi. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015, tambahan masing-masing sejumlah Rp 78.110 dan Rp 42.258 berasal dari pembayaran berbasis saham dari program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham (MESOP) (Catatan 19).

19. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)

Program MESOP yang dilaksanakan oleh Perusahaan mengacu pada ketentuan Peraturan No. IX.D.4 Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. 429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang "Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" ("Peraturan No. IX.D.4").

17. SHARE CAPITAL (Continued)

Treasury stock

The Company has bought back its shares publicly traded on the Indonesia Stock Exchange, as allowed by OJK Regulation No.2/POJK.04/2013 dated 23 August 2013. As of 31 December 2016 and 2015, the Company had bought back 98,700,400 shares for a total purchase price of Rp 248,116, bringing the total becomes to 100,273,200 shares for a total purchase price of Rp 252,160 (2015: 1,572,800 shares for a total purchase price of Rp 4,044).

This repurchase transaction was intended to increase the Company's capital management where the implementation will increase the value of Earnings per Share (EPS).

The number of shares held by the member of the board of commissioners and directors of the Company based on the share register of PT Sirca Datapro Perdana, the share registrar, was 57,698,754 and 26,133,478 shares representing 3.61% and 1.66% of the total outstanding shares of the Company as of 31 December 2016 and 2015, respectively with detail as follows:

18. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

On 31 December 2016 and 2015 balance of this account amounted to Rp 553,286 and 475,176 was the difference between amount received and par value from paid-in capital, initial public offering and conversion of convertible bonds including adjustments balance of quasi reorganization. For year ended 31 December 2016 and 2015, addition of Rp 78,110 and Rp 42,258, respectively, derived from payments of Management and Employee Stock Options Program (MESOP) (Note 19).

19. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTIONS PROGRAM (MESOP)

MESOP Program implemented by the Company refers to regulation No. IX.D.4 as included in the Appendix of the Decision Decree of Bapepam-LK No. 429/BL/2009 dated 9 December 2009 regarding "Increase in Capital Without Pre-emptive Rights" ("Regulation No. IX.D.4").

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (Lanjutan)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPSLB) pada tanggal 21 Juni 2012, pemegang saham telah menyetujui Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui Program MESOP dengan menerbitkan Hak Opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan, yakni sebanyak-banyaknya sejumlah 38.016.500 saham dengan nilai nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham, atau 76.033.000 saham dengan nilai nominal Rp 250 (nilai penuh) per saham setelah pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam RUPSLB juga telah disetujui penerbitan saham hasil pelaksanaan Program MESOP untuk Tahap I untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 dengan harga pelaksanaan yang mengacu kepada sebagaimana diatur dalam butir V.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004. Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang disampaikan ke Bapepam-LK melalui surat No. Corp./CH/L/VI/12-0129 tanggal 5 Juni 2012, jumlah saham yang akan diterbitkan pada tahap I adalah maksimal 80% dari jumlah MESOP yang telah disetujui atau sebanyak-banyaknya 60.826.400 saham.

Selanjutnya BEI melalui suratnya No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 tertanggal 6 Juli 2012 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap I secara pra-pencatatan sebanyak-banyaknya 60.826.400 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.100 (nilai penuh) per saham (sesudah pemecahan nominal saham) yang terdiri dari:

- Tahap I - *Grant Date* 1: sebanyak-banyaknya 22.809.900 saham dengan tanggal pelaksanaan 1 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013
- Tahap I - *Grant Date* 2: sebanyak-banyaknya 38.016.500 saham dengan tanggal pelaksanaan 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014

Dalam RUPSLB pada tanggal 6 Mei 2014, telah disetujui penerbitan saham baru hasil pelaksanaan hak opsi untuk Tahap II program MESOP untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan harga pelaksanaan yang mengacu kepada sebagaimana diatur dalam butir V.1 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Jumlah saham yang akan diterbitkan pada tahap II adalah sebesar sisa saham yang telah dialokasikan di Program MESOP tahap I yang belum dilaksanakan ditambah alokasi hak opsi tahap II sebanyak 15.206.600 saham.

BEI melalui suratnya No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 tertanggal 6 Juni 2014 telah menyetujui pencatatan saham Perusahaan hasil pelaksanaan Program MESOP untuk tahap II secara pra-pencatatan di BEI sebanyak-banyaknya 46.777.000 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.205 (nilai penuh) per saham yang terdiri dari:

- Tahap II - *Grant Date* 1: sebanyak-banyaknya 23.388.500 saham dengan tanggal pelaksanaan 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015
- Tahap II - *Grant Date* 2: sebanyak-banyaknya 23.388.500 saham dengan tanggal pelaksanaan 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016

19. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTIONS PROGRAM (MESOP) (Continued)

Based on the resolution of the Extraordinary General meeting of Shareholders (EGM) of the Company dated 21 June 2012, the shareholders approved the implementation of Management and Employee stock options program (MESOP) with issuance of shares options to exercised by MESOP participants maximum 5% of issued and fully paid-up shares of the Company, which is maximum 38,016,500 shares with par value Rp 500 (full amount), or 76,033,000 shares with par value Rp 250 (full amount) after the implementation of the changes in par value of the Company's share Without Pre-Emptive Rights.

The EGM had also approved the issuance of shares for the implementation of the phase 1 up to 20 June 2014 with exercised price which referred to point V.2 Listing Regulation No. I-A as included in the Appendix of the Decision Decree of virtue of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. 305/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004. Based on the Company's disclosure letter No. Corp./CH/L/VI/12-0129 to Bapepam-LK dated 5 June 2012, the number of shares issued in phase I maximum 80% of the number approved or maximum 60,826,400 shares.

Moreover BEI through its letter No. S-04847/BEI.PPJ/07-2012 dated 6 July 2012 approved the registration of the Company's shares the results of the pre-listing MESOP program phase I maximum 60,826,400 shares with exercised price Rp 2,100 (full amount) (after the changes in par value) which consists of:

- Phase I - *Grant Date* 1: maximum 22,809,900 shares with grant date of 1 May 2013 up to 31 May 2013
- Phase I - *Grant Date* 2: maximum 38,016,500 shares with grant date of 1 May 2014 up to 31 May 2014

The EGM dated 6 May 2014, had approved the issuance of new shares the results of the implementation of the MESOP program phase II up to 30 June 2016 with exercised price which referred to point V.1 Listing Regulation No. I-A as included in the Appendix of the Decision Decree of virtue of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/07-2014 dated 20 January 2014. The number of shares to be issued in the phase II is equal to the remaining shares that have been allocated in the MESOP program phase I that has not exercised plus allocation shares options phase II maximum 15,206,600 shares.

BEI through its letter No. S-02280/BEI.PGI/06-2014 dated 6 June 2014 approved the registration of the Company's prelisting of its MESOP on the Stock Exchange for the implementation of phase II maximum 46,777,000 shares with exercised price Rp 2,205 (full amount) which consists of:

- Phase II - *Grant Date* 1: maximum 23,388,500 shares with grant date of 1 May 2015 up to 31 May 2015
- Phase II - *Grant Date* 2: maximum 23,388,500 shares with grant date of 1 May 2016 up to 31 May 2016

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN
BERBASIS SAHAM (MESOP) (Lanjutan)

Rincian dan mutasi MESOP Tahap I untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

19. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTIONS PROGRAM
(MESOP) (Continued)

The details and movements of MESOP Phase I for the year ended 31 December 2016 are as follows:

	Tanggal penerbitan/ Grant date	Jumlah opsi saham yang diberikan/ Number of share options granted	Jumlah opsi saham yang dieksekusi/ Number of share options exercised	Tahun eksekusi/ Exercise year	Harga eksekusi (nilai penuh)/ Exercise price (full amount)	Nilai wajar (nilai penuh)/ Fair value (full amount)
Tahap I - Grant Date 1	7 Juli/ July 2012	22.809.900 (5.936.000)	2013 -2014	2.100	714
Tahap I - Grant Date 2	30 Juni/ June 2013	38.016.500 (23.320.000)	2014	2.100	714
		<u>60.826.400 (</u>	<u>29.256.000)</u>			

Rincian dan mutasi MESOP Tahap II untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The details and movements of MESOP Phase II for the year ended 31 December 2016 are as follows:

	Tanggal penerbitan/ Grant date	Jumlah opsi saham yang diberikan/ Number of share options granted	Jumlah opsi saham yang dieksekusi/ Number of share options exercised	Tahun eksekusi/ Exercise year	Harga eksekusi (nilai penuh)/ Exercise price (full amount)	Nilai wajar (nilai penuh)/ Fair value (full amount)
Tahap II - Grant Date 1	30 Juni/ June 2014	23.388.500 (16.025.000)	2015	2.205	682
Tahap II - Grant Date 2	30 Juni/ June 2015	23.388.500 (30.752.000)	2016	2.205	585
		<u>46.777.000 (</u>	<u>46.777.000)</u>			

Nilai wajar dari opsi yang diberikan oleh penilai independen menggunakan model penentuan harga opsi Black Scholes dengan asumsi utama yg digunakan dalam perhitungan nilai wajar opsi adalah sebagai berikut:

The fair value of the options granted is determined by an independent valuer using the Black Scholes option-pricing model with key assumptions used in calculating the fair value of the options are as follows:

Asumsi:	Tahap I Grant Date 1 dan 2	Tahap II Grant Date 1	Tahap II Grant Date 2	Assumption: Fair value (full amount)
Nilai wajar (nilai penuh)	714	682	585	Fair value (full amount)
Tingkat suku bunga bebas risiko (per tahun)	4,68%	7,02%	6,84%	Free risk interest rate (per annum)
Periode opsi (tahun)	2	2	1	Option period (annum)
Perkiraan ketidakstabilan harga saham (per tahun)	59,90%	56,46%	53,82%	Expected volatility of the share price (per annum)

"Beban gaji dan imbalan kerja" yang diakui sehubungan dengan MESOP tersebut (Catatan 23) masing-masing sebesar Rp 11.873 dan Rp 7.741 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The amount recognized under "Salaries and employee benefits" (Note 23) amounted to Rp 11,873 and Rp 7,741 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham sebesar Rp 6.117 pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 31 Mei 2016, semua cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham telah dieksekusi.

Management and employee stock options program share reserve amounted to Rp 6,117 as of 31 December 2015. As of 31 May 2016 all management and employee stock options program share reserve have been exercised.

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Rincian pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pendapatan pembiayaan konsumen Pihak ketiga	1.275.759	1.593.899
Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama (Catatan 31)	(207.149)	(354.410)
Pendapatan pembiayaan konsumen - bersih	1.068.610	1.239.489

Pada tahun 2016 dan 2015, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp 79.263 dan Rp 58.658.

Pada tahun 2016 dan 2015, tidak terdapat pendapatan pembiayaan konsumen yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan kepada satu konsumen saja.

20. CONSUMER FINANCING INCOME

Details of unearned consumer financing income were as follows:

	2016	2015
Consumer financing income Third parties	1.275.759	1.593.899
Less: Portion of funds financed by banks in relation to channeling and joint financing cooperation (Note 31)	(207.149)	(354.410)
Consumer financing income - net	1.068.610	1.239.489

In 2016 and 2015, the amortization of transaction costs recognized as a reduction to consumer financing income amounting to Rp 79,263 and Rp 58,658, respectively.

In 2016 and 2015, the Company had no consumer financing income in excess of 10% of total revenues to a single customer.

21. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

Pada tahun 2016 dan 2015, pendapatan sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 1.332.174 dan Rp 884.977.

Pada tahun 2016 dan 2015, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai penambah dari pendapatan sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 18.544 dan Rp 16.164.

21. FINANCE LEASE INCOME

In 2016 and 2015, finance lease income amounted to Rp 1,332,174 and Rp 884,977, respectively.

In 2016 and 2015, the amortization of transaction costs recognized as a addition to finance lease income amounted to Rp 18,544 and Rp 16,164, respectively.

22. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2016	2015
Bunga atas pinjaman yang diterima	558.146	540.234
Bunga atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 13)	227.682	165.216
Amortisasi biaya emisi atas surat berharga yang diterbitkan (Catatan 13)	4.851	4.061
Beban administrasi bank	1.602	2.612
Jumlah	792.281	712.123

22. INTEREST AND FINANCING CHARGES

	2016	2015
Interest on borrowings	558.146	540.234
Interest on securities issued (Note 13)	227.682	165.216
Amortization on securities issued (Note 13)	4.851	4.061
Bank administration charges	1.602	2.612
Total	792.281	712.123

23. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

	2016	2015
Pihak ketiga		
Gaji dan imbalan kerja	626.338	551.753
Imbalan pasca-kerja (Catatan 28)	32.001	25.354
Cadangan opsi saham (Catatan 19)	7.491	6.082
	<u>665.830</u>	<u>583.189</u>
Pihak berelasi		
Gaji dan imbalan kerja	41.469	37.213
Imbalan pasca-kerja (Catatan 28)	4.085	4.263
Cadangan opsi saham (Catatan 19)	4.381	1.659
	<u>49.935</u>	<u>43.135</u>
Jumlah	715.765	626.324

23. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

	2016	2015
Third parties		
Salaries and Employee benefits	626.338	551.753
Post-employment benefits (Note 28)	32.001	25.354
Share options reserve (Note 19)	7.491	6.082
Related parties		
Salaries and employee benefits	41.469	37.213
Post-employment benefits (Note 28)	4.085	4.263
Share options reserve (Note 19)	4.381	1.659
Total	715.765	626.324

Lihat catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 29 for details of balances and transactions with related parties.

Ekshibit E/79

Exhibit E/79

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2016	2015	
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	63.045	60.197	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Jasa penerimaan angsuran	40.597	38.525	Installment collection fees
Perbaikan dan pemeliharaan	39.934	39.431	Repairs and maintenance
Asuransi	28.576	25.204	Insurance
Perjalanan dinas dan transportasi	26.552	26.310	Travel and transportation
Honorarium tenaga ahli	22.637	5.498	Professional fees
Pendidikan dan pelatihan	18.567	14.245	Training and education
Sewa kantor dan gudang	16.906	15.768	Office and warehouse rental
Perlengkapan kantor	16.204	15.097	Office supplies
Komunikasi	16.098	14.530	Communications
Pengiriman, perangko dan materai	14.350	14.022	Courier, postage stamp and stamp duty
Listrik dan air	12.476	12.362	Electricity & Water
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 9)	8.211	8.296	Amortization of intangible assets (Note 9)
Pemasaran	4.472	3.948	Marketing
Lain-lain	63.690	47.834	Others
Jumlah	392.315	341.267	Total
<hr/>			
25. PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain adalah pendapatan usaha lain-lain yang merupakan bagian dari pendapatan utama dari kegiatan usaha Perusahaan.			Other income is other business income that are part of the main revenue of the Company's operations.
	2016	2015	
Pendapatan administrasi	391.825	281.573	Administration income
Denda keterlambatan	217.027	184.747	Late charges
Pendapatan terminasi	102.210	76.076	Termination income
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukkan	75.811	50.206	Recovery on written-off receivables
Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap (Catatan 8)	4.511	3.852	Gain on disposal of fixed assets - net (Note 8)
Lain-lain	13.699	74.170	Others
Jumlah	805.083	670.624	Total
<hr/>			
26. BEBAN LAIN-LAIN			
Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:			The details of other expenses are as follows:
	2016	2015	
Penghapusan piutang dalam proses penyelesaian	39.025	71.495	Written-off receivables in the settlement process
(Pemulihan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian	(10.565)	13.760	(Recovery) provision for impairment losses of receivables in the settlement process
Jumlah	28.460	85.255	Total

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. DIVIDEN KAS DAN SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT BFI Finance Indonesia, Tbk pada tanggal 21 Nopember 2016, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2016, sebesar Rp 150 (nilai penuh) per saham kepada para pemegang saham Perusahaan, yang telah dibagikan pada tanggal 16 Desember 2016.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 25 April 2016, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 208 per saham. Setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 138 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 216.103 yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 16 Desember 2015, sisanya sebesar Rp 70 (nilai penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 106.840 yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2016. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 9.322 sebagai cadangan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 19 Nopember 2015, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2015, sebesar Rp 138 (nilai penuh) per saham atau setara dengan Rp 216.103 kepada para pemegang saham Perusahaan, yang telah dibagikan pada tanggal 16 Desember 2015.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 15 April 2015, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai yang berasal dari laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 192 (nilai penuh) per saham atau setara dengan Rp 297.587 kepada para pemegang saham Perusahaan yang merupakan 49,8% dari laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2014, setelah memperhitungkan dividen tunai interim sebesar Rp 138 (nilai penuh) per saham atau setara dengan Rp 213.891 kepada para pemegang saham Perusahaan, yang telah dibagikan pada tanggal 15 Januari 2015. Sisanya sebesar Rp 54 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 83.698 telah dibagikan pada tanggal 15 Mei 2015. Perusahaan juga menyetujui untuk menyisihkan sebesar Rp 7.374 sebagai cadangan dan sisa laba bersih untuk tahun buku 2014 sebesar Rp 292.130 dibukukan sebagai Saldo Laba.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tanggal 9 Desember 2014, Perusahaan menetapkan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2014, sebesar Rp 138 (nilai penuh) per saham atau setara dengan Rp 213.891 kepada para pemegang saham Perusahaan, yang telah dibagikan pada tanggal 15 Januari 2015.

27. CASH DIVIDENDS AND APPROPRIATION OF RETAINED
EARNINGS

Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors PT BFI Finance Indonesia, Tbk on 21 November 2016, the Company sets dividend interim cash for the financial year 2016, amounting to Rp 150 (full amount) per share, to the shareholders of the Company, which was distributed on 16 December 2016.

Based on the decision of Shareholders' Annual and Extraordinary General Meeting on 25 April 2016, the Company announced a cash dividend from net profit in 2015 amounted to Rp 208 (full amount) per share. After taking into account the interim cash dividend amounted to Rp 138 (full amount) per share amounting to Rp 216,103 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 16 December 2015. The remaining balance amounted to Rp 70 (full amount) per share amounting to Rp 106,840 which has been distributed on 25 May 2016. The Company agreed to set aside Rp 9,322 for the reserve.

Based on the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of PT BFI Finance Indonesia Tbk on 19 November 2015, the Company establishes an interim cash dividend for the financial year 2015, amounted to Rp 138 (full amount) per share, equivalent to Rp 216,103 to the shareholders of the Company, which have been distributed on 16 December 2015.

Based on the decision of Shareholders' Annual and Extraordinary General Meeting on 15 April 2015, the Company announced a cash dividend from net profit in 2014 amounted to Rp 192 (full amount) per share amounting to Rp 297,587 to the shareholders of the Company which is 49.8% of net profit for year 2014, after taking into account the interim cash dividend amounted to Rp 138 (full amount) per share amounting to Rp 213,891 to the shareholders of the Company, which has been distributed on 15 January 2015. The remaining balance amounted to Rp 54 (full amount) per share amounting to Rp 83,698 which has been distributed on 15 May 2015. The Company agreed to set aside Rp 7,374 for the reserve and the remaining balance of net profit for year 2014 amounted to Rp 292,130 was recorded as Retained Earnings.

Based on the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of PT BFI Finance Indonesia Tbk on 9 December 2014, the Company establishes an interim cash dividend for the financial year 2014, amounted to Rp 138 (full amount) per share, equivalent to Rp 213,891 to the shareholders of the Company, which have been distributed on 15 January 2015.

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. IMBALAN PASCA-KERJA

Sesuai dengan UU 13/2003, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan, dimana program pensiun ini dikelola dan diadministrasikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Imbalan pasca-kerja lainnya meliputi uang jasa, uang pisah, pesangon dan kompensasi lainnya dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam laporannya bertanggal 18 Januari 2017 dan 2 Februari 2016 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing 5.316 dan 4.743 karyawan.

Rincian liabilitas atas imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	181.619	142.473
Nilai wajar aset program	(41.227)	(30.506)
Imbalan pasca-kerja	140.392	111.967

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

	2016	2015
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	142.473	126.365
Biaya jasa kini	19.639	17.904
Biaya bunga	12.779	10.619
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(3.550)	(1.744)
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.666	-
Pengukuran kembali atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:		
- (Keuntungan) / kerugian atas perubahan asumsi ekonomis	13.694	(10.950)
- (Keuntungan) / kerugian atas penyesuaian pengalaman	(5.082)	279
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	<u>181.619</u>	<u>142.473</u>

28. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

In accordance with Law UU 13/2003, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

The Company has defined contribution pension program covering its qualified permanent employees who meets the Company's criteria, where the contribution pension program is defined and administered by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Other post-employment benefits include bonuses, cash severance, severance and other compensation is calculated by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, in its report dated 18 January 2017 and 2 February 2016 for the years ended 31 December 2016 and 2015 by using the "Projected Unit Credit". Number of employees entitled for the employee benefits for the years ended 31 December 2016 and 2015 was 5,316 and 4,743 employees, respectively.

The details of the liability for post-employment benefits are as follows:

	2016	2015
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	181.619	142.473
Nilai wajar aset program	(41.227)	(30.506)
Imbalan pasca-kerja	140.392	111.967

Movements in the present value of defined benefit obligation recognised in the statement of financial position are as follows:

	2016	2015
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	142.473	126.365
Biaya jasa kini	19.639	17.904
Biaya bunga	12.779	10.619
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(3.550)	(1.744)
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.666	-
Pengukuran kembali atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:		
- (Keuntungan) / kerugian atas perubahan asumsi ekonomis	13.694	(10.950)
- (Keuntungan) / kerugian atas penyesuaian pengalaman	(5.082)	279
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	<u>181.619</u>	<u>142.473</u>

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

28. POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Mutasi nilai wajar aset program yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Movements in the fair value of plan asset in the statement of financial position are as follows:

	2016	2015	
Nilai wajar aset program pada awal periode	30.506	25.587	Fair value of plan assets at beginning of period
Pendapatan bunga atas aset program	3.116	2.516	Interest income on plan assets
Iuran Perusahaan	6.000	6.000	Company contribution
Imbal hasil aset program (tidak termasuk pendapatan bunga)	1.605	(3.597)	Return on plan assets excluding interest income
Nilai wajar aset program pada akhir periode	41.227	30.506	Fair value of plan assets at end of period

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Movements in the liability recognised in the statement of financial position are as follows:

	2016	2015	
Saldo awal 1 Januari	111.967	100.778	Beginning balance as of 1 January
Iuran Perusahaan yang dibayarkan (aktual)	(6.000)	(6.000)	Contribution to plan made by the Company
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (sesuai provisi yang dihitung)	(3.550)	(1.744)	Benefits paid by the Company excluding excess benefits paid
Beban yang diakui pada laporan laba rugi	36.086	29.617	Expense recognized in profit loss statement
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	7.007	(7.074)	Expense recognized in other comprehensive income
Biaya terminasi	(5.118)	(3.610)	Termination benefit
Liabilitas yang diakui di laporan posisi Keuangan	140.392	111.967	Liability recognized in statement of financial position

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2016	2015	
Biaya jasa kini	19.639	17.904	Current service cost
Biaya bunga	12.779	10.619	Interest cost
Pendapatan bunga atas aset program	(3.116)	(2.516)	Interest income on plan assets
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.666	-	Liability assumed due to recognition of past services
Biaya terminasi oleh Perusahaan	5.118	3.610	Termination benefit by Company
Jumlah beban	36.086	29.617	Total expenses

Riwayat penyesuaian pengalaman adalah sebagai berikut:

The history of experience adjustment are as follows:

	31 Desember/ December					
	2016	2015	2014	2013	2012	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(181.619)	(142.473)	(126.365)	(86.199)	(43.152)	Present value of defined Obligation
Nilai wajar aset program	41.227	30.506	25.587	23.514	17.414	Fair value of plan assets
Defisit	(140.392)	(111.967)	(100.778)	(62.685)	(25.738)	Deficit
Penyesuaian pengalaman liabilitas program	5.082	(279)	(15.982)	(33.634)	5.130	Experience adjustment on plan liabilities
Penyesuaian pengalaman aset program	1.605	(3.597)	653	-	(973)	Experience adjustment on plan assets

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Kategori utama aset program per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai persentase dari total aset program adalah pasar uang 50%, pendapatan tetap 30% dan saham 20%.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variable lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

28. POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

The main categories of plan assets as of 31 December 2016 and 2015 as percentage of total plan assets was money market 50%, fixed income 30% and shares 20%.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the obligation for post-employment and current service cost as of 31 December 2016 and 2015:

	31 Desember/ December 2016		31 Desember/ December 2015		
	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ Obligation for post-employment benefits	Biaya jasa kini dan biaya bunga/ Current service cost and interest cost	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ Obligation for post-employment benefits	Biaya jasa kini dan biaya bunga/ Current service cost and interest cost	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(161.727)	(31.153)	(127.136)	(15.432)	Increase in interest rate in 100 basis point
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	205.267	34.261	160.651	20.925	Decrease in interest rate in 100 basis point

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas:

Key assumptions used in the above calculation:

2016		
Asumsi ekonomi:		Economic assumption:
- Tingkat diskonto per tahun	8,70% per tahun/8.70% per annum	Annual discount rate -
- Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	10% per tahun/10% per annum	Annual salary incremental rate -
Asumsi lainnya:		Other assumption:
- Tingkat kematian	Tabel Mortalisasi Indonesia - 2011/ Indonesian Mortality table - 2011 (TMI - 2011)	Mortality table -
- Tingkat cacat	10% dari Tabel Mortalisasi/10% of Mortality Table	Disability rate -
- Tingkat pengunduran diri peserta	10% per tahun sebelum usia 31 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 55/ 10% per annum before the age of 31 and linearly decreasing to 0% per annum at age of 55.	Resignation rate -
- Usia pensiun normal	55 tahun/55 years old	Normal retirement age -
2015		
Asumsi ekonomi:		Economic assumption:
- Tingkat diskonto per tahun	9,30% per tahun/9.30% per annum	Annual discount rate -
- Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	10% per tahun/10% per annum	Annual salary incremental rate -
Asumsi lainnya:		Other assumption:
- Tingkat kematian	Tabel Mortalisasi Indonesia - 2011/ Indonesian Mortality table - 2011 (TMI - 2011)	Mortality table -
- Tingkat cacat	5% dari Tabel Mortalisasi/5% of Mortality Table	Disability rate -
- Tingkat pengunduran diri peserta	10% per tahun sebelum usia 31 dan terus menurun menjadi 0% pada usia 55/ 10% per annum before the age of 31 and linearly decreasing to 0% per annum at age of 55.	Resignation rate -
- Usia pensiun normal	55 tahun/55 years old	Normal retirement age -

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu sebagai berikut:

Pihak berelasi/Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi/Transactions
Karyawan/Employee	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Imbalan kerja jangka-pendek/ Short-term employees' benefits Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/Management and employee stock options program
Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		Balances and transactions to or from a related party are as follows:
Beban gaji dan tunjangan		Salaries and employee benefits
	2016	2015
Personil manajemen kunci:		Key management personnel:
Imbalan kerja jangka-pendek	41.469	37.213
Imbalan pasca-kerja	4.085	4.263
Pembayaran berbasis saham	4.381	1.659
	49.935	43.135
Persentase terhadap jumlah beban	2,27%	2,16%
		Percentage of total expenses

Transaksi dengan pihak berelasi, kecuali beban gaji dan imbalan kerja kepada personil manajemen kunci, dilakukan dengan menggunakan persyaratan usaha normal.

Transaction with related parties, except salary expense and employee benefits to key management personnel, conducted by normal operations requirements.

30. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Perusahaan dibagi berdasarkan produk: pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggungjawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perusahaan:

- Pembiayaan konsumen
Termasuk dalam pelaporan segmen pembiayaan konsumen adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen.
- Sewa pembiayaan
Termasuk dalam pelaporan segmen sewa pembiayaan adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari sewa pembiayaan.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing pelaporan segmen disajikan di bawah ini sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Perusahaan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

29. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In carrying out its business activities, the Company enters into transactions with certain related parties as the followings:

Pihak berelasi/Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi/Transactions
Karyawan/Employee	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Imbalan kerja jangka-pendek/ Short-term employees' benefits Imbalan pasca-kerja/ Post-employment benefits Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham/Management and employee stock options program
Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:		Balances and transactions to or from a related party are as follows:
Beban gaji dan tunjangan		Salaries and employee benefits
	2016	2015
Personil manajemen kunci:		Key management personnel:
Imbalan kerja jangka-pendek	41.469	37.213
Imbalan pasca-kerja	4.085	4.263
Pembayaran berbasis saham	4.381	1.659
	49.935	43.135
Persentase terhadap jumlah beban	2,27%	2,16%
		Percentage of total expenses

Transaction with related parties, except salary expense and employee benefits to key management personnel, conducted by normal operations requirements.

30. SEGMENT INFORMATION

The Company's operating segments are divided into products: consumer financing and finance leases. Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance.

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments.

- Consumer financing
Included in consumer financing reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as a part of consumer financing.
- Finance lease
Included in the finance leases reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as a part of finance lease.

Information regarding the results of each reportable segment is included below as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within the industry.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

30. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2016				
	Sewa pembiayaan/ <i>Finance Lease</i>	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Jumlah pendapatan	1.707.540	1.488.155	31.414	3.227.109	Total income
Hasil					Result
Pendapatan segmen	1.707.540	1.488.155	31.414	3.227.109	<i>Segment income</i>
Beban bunga dan keuangan	-	-	792.281	792.281	<i>Interest and financing charges</i>
Beban gaji dan tunjangan	-	-	715.765	715.765	<i>Salaries and benefits</i>
Beban umum dan administrasi	4.283	43.542	344.490	392.315	<i>General and administrative</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	83.191	190.134	-	273.325	<i>Provision for impairment losses</i>
Beban lain-lain	11.837	16.623	-	28.460	<i>Other expenses</i>
Laba sebelum pajak penghasilan				1.024.963	<i>Profit before income tax</i>
Beban pajak penghasilan	-	-	226.598	226.598	<i>Income tax expense</i>
Laba tahun berjalan	-	-	-	798.365	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain					<i>Other comprehensive income net</i>
setelah pajak	-	-	(63.044)	(63.044)	<i>of tax</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	735.321	<i>Comprehensive income for the year</i>
Aset dan Liabilitas					Assets and Liabilities
Aset segmen	7.148.427	4.496.606	831.223	12.476.256	<i>Segment assets</i>
Liabilitas segmen	23.588	43.452	8.154.532	8.221.572	<i>Segment liabilities</i>
Informasi Segmen Lainnya					Other Segment Information
Pengeluaran modal:					<i>Capital expenditure:</i>
- Aset tetap berwujud	-	-	62.262	62.262	<i>Tangible fixed assets -</i>
Penyusutan aset tetap	-	-	71.255	71.255	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban non kas lainnya:					<i>Other non - cash expense:</i>
- Imbalan pasca-kerja	-	-	36.086	36.086	<i>Post-employment benefits -</i>

Ekshibit E/86

Exhibit E/86

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

30. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2015						
	Sewa pembiayaan/ Finance Lease	Pembiayaan konsumen/ Consumer financing	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total			
Jumlah pendapatan	1.091.564	1.650.141	88.912	2.830.617	Total income		
Hasil					Result		
Pendapatan segmen	1.091.564	1.650.141	88.912	2.830.617	Segment income		
Beban bunga dan keuangan	-	-	712.123	712.123	Interest and financing charges		
Beban gaji dan tunjangan	-	-	626.324	626.324	Salaries and benefits		
Beban umum dan administrasi	5.474	42.292	293.501	341.267	General and administrative		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	88.560	141.594	-	230.154	Provision for impairment losses		
Beban lain-lain	37.465	47.790	-	85.255	Other expenses		
Laba sebelum pajak penghasilan	-	-	-	835.494	Profit before income tax		
Beban pajak penghasilan	-	-	185.206	185.206	Income tax expense		
Laba tahun berjalan	-	-	-	650.288	Profit for the year		
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	-	-	62.631	62.631	Other comprehensive income net of tax		
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	712.919	Comprehensive income for the year		
Aset dan Liabilitas					Assets and Liabilities		
Aset segmen	5.281.632	4.707.426	1.781.356	11.770.414	Segment assets		
Liabilitas segmen	17.460	44.354	7.689.497	7.751.311	Segment liabilities		
Informasi Segmen Lainnya					Other Segment Information		
Pengeluaran modal:					Capital expenditure:		
- Aset tetap berwujud	-	-	86.938	86.938	Tangible fixed assets -		
Penyusutan aset tetap	-	-	68.493	68.493	Depreciation of fixed assets		
Beban non kas lainnya:					Other non - cash expense:		
- Imbalan pasca-kerja	-	-	29.617	29.617	Post-employment benefits -		
Segmen Geografis	Geographical Segments						
	2016						
	Jawa/ Java	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Jumlah Pendapatan	1.609.615	392.896	602.589	587.352	34.657	3.227.109	Total Revenues
Informasi Segmen Lainnya						Other Segment Information	
- Aset segmen	7.195.872	1.200.123	1.948.462	1.767.634	364.165	12.476.256	Segment assets -
Pengeluaran Modal						Capital expenditure	
- Aset tetap berwujud	29.713	5.075	18.003	9.471	-	62.262	Tangible fixed assets -
	2015						
	Jawa/ Java	Kalimantan/ Kalimantan	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Jumlah Pendapatan	1.308.484	386.874	511.100	551.082	73.077	2.830.617	Total Revenues
Informasi Segmen Lainnya						Other Segment Information	
- Aset segmen	5.540.385	1.388.306	1.913.044	1.888.452	1.040.227	11.770.414	Segment assets -
Pengeluaran Modal						Capital expenditure	
- Aset tetap berwujud	32.691	16.252	13.415	24.559	-	86.917	Tangible fixed assets

Ekshibit E/87

Exhibit E/87

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

Dalam kaitan untuk mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, Perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan, antara lain dalam bentuk perjanjian pembiayaan bersama (*joint financing*), penerusan pinjaman (*chanelling*) dan perjanjian jual beli piutang yang dibukukan secara *off balance sheet*.

	2016	2015
Penerusan Pinjaman dan Jual Beli Piutang (a)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1)	3.248	51.560
Pembiayaan Bersama (b)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1)	671.049	1.327.100
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h: PT Bank Internasional Indonesia Tbk)(2)	276.954	262.684
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (3)	175.002	511.665
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (4)	140.618	-
Jumlah Perjanjian Penting dan Komitmen	1.266.871	2.153.009
Dikurangi:		
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(6.254)	(9.311)
Perjanjian Penting dan Komitmen - Bersih	1.260.617	2.143.698

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(1) Pada tanggal 17 Pebruari 2010, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 150.000 dan bersifat "*non-revolving*" dengan dasar "*without recourse*".

Berdasarkan perjanjian tersebut, BRI setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan porsi pembiayaan sampai dengan 100% dari keseluruhan pembiayaan. Perusahaan bertanggungjawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Perusahaan dapat menetapkan suku bunga tertentu kepada konsumen melebihi suku bunga yang dibayarkan Perusahaan kepada BRI. Jangka waktu perjanjian selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Perusahaan dan BRI menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor tersebut, dimana dilakukan perubahan dan penambahan beberapa ketentuan-ketentuan, salah satunya mengubah jangka waktu fasilitas pembiayaan kendaraan menjadi maksimal 4 (empat) tahun untuk mobil bekas jenis penumpang dan kendaraan niaga.

Pada tanggal 27 Mei 2011, Perusahaan dan BRI menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor tersebut di atas, dimana batas maksimum pembiayaan ditingkatkan menjadi sebesar Rp 300.000 dan mengubah jangka waktu kerja sama menjadi maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 27 Mei 2011.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT

In order to support funding needs for business expansion, the Company has also initiated cooperation with banking institutions, in the form of joint financing, channelling and receivables sales and purchase agreements which are accounted for as "*off balance sheet*" transactions.

	2016	2015
Chanelling and Receivables Sales and Purchase (a)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1)	3.248	51.560
Joint Financing (b)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1)	671.049	1.327.100
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2)	276.954	262.684
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (3)	175.002	511.665
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (4)	140.618	-
Total Significant Agreements and Commitments	1.266.871	2.153.009
Less:		
Unamortized transaction costs	(6.254)	(9.311)
Significant Agreements and Commitment - Net	1.260.617	2.143.698

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(1) On 17 February 2010, the Company entered into a Motor Vehicles Loans Care Cooperation Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) with a maximum financing limit of Rp 150,000 and on a "*non-revolving*" and "*without-recourse*" basis.

Under the agreement, BRI agreed to provide motor vehicle financing facility with a financing portion of up to 100% of the total financing. The Company is responsible for, among others, collection, administration and custody of documents. The Company may apply interest rate to the customer exceeding the interest rate paid by the Company to BRI. The term of the agreement was 24 (twenty-four) months.

On 13 October 2010, the Company and BRI signed an Amendment to the Motor Vehicles Financing Cooperation Agreement to include several changes and addition of several provisions, which one of these is to change the term of the vehicles financing facility to a maximum of 4 (four) years for the used passenger cars and commercial vehicles.

On 27 May 2011, the Company and BRI signed an Amendment to the Motor Vehicles Financing Cooperation Agreement, whereby the maximum financing limit was increased to Rp 300,000 and to change the term of the agreements to a maximum of 24 (twenty-four) months from 27 May 2011.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

a. Penerusan Pinjaman dan Jual Beli Piutang (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh BRI sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut sebesar Rp 436, sedangkan pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan bagian BRI adalah masing-masing sebesar Rp 45 dan Rp 407 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Pada tanggal 21 Mei 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 600.000 dan bersifat "non-revolving" dengan dasar "without recourse".

Berdasarkan perjanjian tersebut, BRI setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan porsi pembiayaan sampai dengan 100% dari keseluruhan pembiayaan. Perusahaan bertanggungjawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Perusahaan dapat menetapkan suku bunga tertentu kepada konsumen melebihi suku bunga yang dibayarkan Perusahaan kepada BRI. Jangka waktu pencairan fasilitas sesuai perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh BRI sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut masing-masing sebesar Rp 3.248 dan Rp 51.124, sedangkan pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan bagian BRI adalah sebesar Rp 2.119 dan Rp 11.346 untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

b. Pembiayaan Bersama

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(1) Pada tanggal 10 Juni 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 125.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu fasilitas tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan jangka waktu penarikan selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 22 September 2011, Perusahaan dan Bank Mandiri menandatangani Addendum Perjanjian Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama tersebut, dimana batas maksimum pembiayaan ditingkatkan menjadi sebesar Rp 245.000.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (Continued)

a. *Chanelling and Receivables Sales and Purchase* (Continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

As of 31 December 2015, the total principal amount financed by BRI in respect with the cooperation agreement amounted to Rp 436, while the total consumer financing income of BRI's portion amounted to Rp 45 and Rp 407 for the years ended 31 December 2016 and 31 December 2015, respectively.

On 21 May 2013, the Company entered into a Motor Vehicles Financing Cooperation Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) with a maximum financing limit of Rp 600,000 and on a "non-revolving" and "without-recourse" basis.

Under the agreement, BRI agreed to provide motor vehicle financing facility with a financing portion of up to 100% of the total financing. The Company is responsible for, among others, collection, administration and custody of documents. The Company may apply interest rate to the customer exceeding the interest rate paid by the Company to BRI. The availability period for utilisation of this facility as defined in the agreement was 24 (twenty-four) months.

As of 31 December 2016 and 2015, the total principal amount financed by BRI in respect with the cooperation agreement amounted to Rp 3,248 and Rp 51,124, respectively, while the total consumer financing income of BRI's portion amounted to Rp 2,119 and Rp 11,346 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

b. *Joint Financing*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(1) On 10 June 2011, the Company entered into a Cooperation Agreement in respect with the provision of Joint Financing Facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) with a maximum financing limit of Rp 125,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The facility is valid for 3 (three) years with the drawdown period of 18 (eighteen) months from the signing date of the agreement.

On 22 September 2011, the Company and Bank Mandiri signed an Amendment to the Cooperation Agreement in respect with the provision of Joint Financing Facility, whereby the maximum financing limit was increased to Rp 245,000.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

b. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 6 Desember 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse".

Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 7 Pebruari 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 16 (enam belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 23 Agustus 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 21 Pebruari 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT
(Continued)

b. Joint Financing (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Continued)

On 6 December 2012, the Company entered into a Cooperation Agreement in respect with the provision of Joint Financing Facility with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 250,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis.

Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The drawdown of the facility is from 18 (eighteen) months from the signing date of the agreement.

On 7 February 2013, the Company entered into a Cooperation Agreement in respect with the provision of Joint Financing Facility with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 250,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 16 (sixteen) months from the agreement date.

On 23 August 2013, the Company entered into a Cooperation Agreement in respect with the provision of Joint Financing Facility with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 500,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 18 (eighteen) months from the agreement date.

On 21 February 2014, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 500,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agree to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 12 (twelve) months from the agreement date.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

b. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 26 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 6 Agustus 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 16 (enam belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 14 (empat belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 12 Januari 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 250.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 11 (sebelas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (Continued)

b. Joint Financing (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Continued)

On 26 June 2014, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 250,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agree to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 18 (eighteen) months from the agreement date.

On 6 August 2014, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 250,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 16 (sixteen) months from the agreement date.

On 16 October 2014, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 250,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 14 (fourteen) months from the agreement date.

On 12 January 2015, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 250,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 11 (eleven) months from the agreement date.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

b. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 20 Pebruari 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan Bank Mandiri dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 14 (empat belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dialihkan kepada Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp 361.274 dan Rp 1.297.734 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut masing-masing sebesar Rp 671.049 dan Rp 1.327.100 serta pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan bagian Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 120.148 dan Rp 192.356 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h: PT Bank Internasional Indonesia Tbk)

- (2) Pada tanggal 21 Oktober 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 150.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan perjanjian tersebut, Maybank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya sebesar 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah, dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (Continued)

b. Joint Financing (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Continued)

On 20 February 2015, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 500,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 18 (eighteen) months from the agreement date.

On 10 June 2015, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with Bank Mandiri with a maximum financing limit of Rp 500,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Bank Mandiri agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers, and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 14 (fourteen) months from the agreement date.

The total Company's consumer financing receivables transferred to Bank Mandiri amounted to Rp 361,274 and Rp 1,297,734 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

As of 31 December 2016 and 2015, the total principal amount financed by Bank Mandiri in respect with the cooperation agreement amounted to Rp 671,049 and Rp 1,327,100, respectively, while the total consumer financing income of Bank Mandiri's portion amounted to Rp 120,148 and Rp 192,356 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly: PT Bank Internasional Indonesia Tbk)

- (2) On 21 October 2013, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) with a maximum limit of Rp 150,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the agreement, Maybank agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total joint financing facility to the costumers, and remaining 5% will be financed by the Company. The drawdown period of 12 (twelve) months from the signing date of the agreement.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

b. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Oktober 2014, Perusahaan menandatangani addendum Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) dengan penambahan plafon sebesar Rp 200.000 sehingga batas maksimum pembiayaan berubah menjadi sebesar Rp 350.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan addendum perjanjian tersebut.

Pada tanggal 17 Nopember 2016, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000 dan bersifat "revolving" dengan dasar "without-recourse". Berdasarkan Perjanjian tersebut, PT Bank Maybank Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kredit dengan porsi pembiayaan setinggi-tingginya 95% dari jumlah keseluruhan pembiayaan kepada nasabah dan sisanya sebesar 5% dibiayai oleh Perusahaan. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian tersebut. Perjanjian Kerjasama ini menggantikan seluruh Perjanjian kerjasama serupa dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang telah berjalan sebelumnya.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dialihkan kepada Maybank masing-masing sebesar Rp 218.397 dan Rp 96.673 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh BI sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut sebesar Rp 276.954 dan Rp 262.684 serta pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan bagian Maybank adalah sebesar Rp 30.581 dan Rp 30.025 untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (Continued)

b. Joint Financing (Continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (Continued)

On 21 October 2014, the Company entered into a Addendum to the Joint Financing Facility Agreement with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) with a additional limit of Rp 200,000, hence the total facility increase to Rp 350,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. The drawdown period of 12 (twelve) months from the signing date of the agreement.

On 17 November 2016, the Company entered into a Joint Financing Facility Agreement with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (formerly: PT Bank Internasional Indonesia Tbk) with a maximum limit of Rp 500,000 and on "revolving" and "without-recourse" basis. Under the Agreement, PT Bank Maybank Indonesia Tbk agreed to provide financing facility with a maximum financing portion of 95% of the total financing to the customers and the remaining 5% will be financed by the Company. The withdrawal of the facility is from 12 (twelve) months from the signing date of the agreement. The Cooperation Agreement supersedes all similar cooperation agreement with PT Bank Maybank Indonesia who had walked earlier.

The total Company's consumer financing receivables financed by Maybank amounted to Rp 218,397 and Rp 96,673 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

As of 31 December 2016 and 2015, the total principal amount financed by BI in respect with the cooperation agreement amounted to Rp 276.954 and Rp 262,684, respectively, while the total consumer financing income of Maybank's portion amounted to Rp 30,581 and Rp 30,025 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

b. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

(3) Pada tanggal 25 Agustus 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Penunjukan Pengelola Fasilitas pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan BTPN. Berdasarkan perjanjian tersebut, batasan maksimum pembiayaan adalah sebesar Rp 1.000.000, yang dapat digunakan untuk *joint financing* dan *refinancing* bersama-sama tidak melebihi Rp 1.000.000 dengan batasan maksimum *refinancing* tidak melebihi Rp 300.000. Jangka waktu penggunaan fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.

Pada tanggal 21 Juni 2013, BTPN melalui suratnya No. S.157/RBFI/VI/2013, batas maksimum pembiayaan dinaikkan menjadi sebesar Rp 1.300.000 yang dapat digunakan untuk *joint financing* dan *refinancing* bersama-sama dengan ketentuan batasan pembiayaan *refinancing* tidak melebihi Rp 600.000. Jangka waktu penggunaan fasilitas tersebut tetap berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.

Pada tanggal 18 Agustus 2014, BTPN melalui suratnya No. S.122/DIR/TFI/VIII/2014, melakukan perpanjangan jangka waktu penggunaan fasilitas sampai dengan 25 Agustus 2016.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dialihkan kepada BTPN sebesar Rp 272.247 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh BTPN sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut masing-masing sebesar Rp 175.002 dan Rp 511.665 serta pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan bagian BTPN masing-masing sebesar Rp 47.198 dan Rp 120.294 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(4) Pada tanggal 3 Juni 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 600.000 dan bersifat "*non-revolving*" dengan dasar "*without recourse*".

Jumlah piutang pembiayaan konsumen Perusahaan yang dialihkan kepada bank BRI masing-masing sebesar Rp 178.060 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (Continued)

b. Joint Financing (Continued)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

(3) On 25 August 2011, the Company entered into a Cooperation Agreement in respect with the provision of Joint Financing Facility and appointment of stewards Agreement on 8 August 2012 with BTPN. Under the agreement, maximum financing limit of Rp 1,000,000, for the purpose of joint financing and refinancing with a maximum limit of Rp 1,000,000 with maximum refinancing limit of Rp 300,000. The facility was valid until 25 August 2014.

On 21 June 2013, BTPN through its letter No. S.157/RBFI/VI/2013, maximum financing limit was increased to Rp 1,300,000 for the purpose of joint financing and refinancing with maximum refinancing limit of Rp 600,000. The facility was valid until 25 August 2014.

On 18 August 2014, BTPN has notified by its letter No. S.122/DIR/TFI/VIII/2014, to extend the availability period of the facility until 25 August 2016.

The total Company's consumer financing receivables financed by BTPN amounted to Rp 272,247 for the year ended 31 December 2015.

As of 31 December 2016 and 2015, the total principal amount financed by BTPN in respect with the cooperation agreement amounted to Rp 175,002 and Rp 511,665, respectively, while the total consumer financing income of BTPN's portion amounted to Rp 47,198 and Rp 120,294 for the years ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

(4) On 3 June 2016, the Company entered into a Motor Vehicles Loans Care Cooperation Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) with a maximum financing limit of Rp 600,000 and on a "*non-revolving*" and "*without-recourse*" basis.

The total Company's consumer financing receivables transferred to bank BRI amounted to Rp 178,060 for the year ended 31 December 2016.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

b. Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah keseluruhan pokok yang dibiayai oleh BRI sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut Rp 140.618 serta pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan bagian Bank BRI adalah sebesar Rp 7.103 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pembatasan dan Kewajiban

Atas fasilitas-fasilitas yang diterima Perusahaan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, yang pada umumnya meliputi:

- Menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak melebihi atau sama dengan 10 (sepuluh) kali, atau
- Menjaga *Current Ratio* tidak boleh kurang atau sama dengan 1 (satu) kali, atau

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life dan PT FWD Life Indonesia untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas hilangnya kendaraan yang dibiayai Perusahaan dan atau atas kerusakan kendaraan sesuai dengan pilihan polis konsumen. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan bertindak sebagai penerima ganti rugi yang utama (*preferred loss payee*).

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan berbagai dealer (pedagang kendaraan bermotor) di seluruh Indonesia dalam membiayai kendaraan yang dijual oleh dealer tersebut kepada konsumen yang persyaratan kredit dan administratifnya memenuhi ketentuan Perusahaan. Sifat perjanjian tersebut tidak mengikat satu sama lain, di mana dealer tidak diwajibkan untuk memberikan seluruh dan atau sebagian penjualan kreditnya untuk dibiayai Perusahaan, atau sebaliknya Perusahaan juga tidak wajib untuk membiayai seluruh dan atau sebagian aplikasi kredit yang diajukan oleh *dealer* tersebut.

Perusahaan tidak mengadakan kerjasama dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT (Continued)

b. Joint Financing (Continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Continued)

As of 31 Desember 2016, the total principal amount financed by BRI in respect with the cooperation agreement amounted to Rp 140,618, while the total consumer financing income of BRI's portion amounted to Rp 7,103 for the years ended 31 December 2016.

Covenants

On facilities received by the Company, the creditors generally entails restrictions and certain obligation that should be met by the Company, which generally include the followings:

- Maintaining a *Debt to Equity Ratio* (DER) shall not exceed or equal to 10 (ten) times, or
- Maintaining the *Current Ratio* should no less than or equal to 1 (one), or

The Company entered into partnership agreements with several insurance companies such as PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life and PT FWD Life Indonesia to cover losses that may arise from the damage and/or the loss of vehicles financed by the Company according to type of policies selected by the costumers. Under these agreements, the Company acts as the preferred loss payee.

The Company entered into cooperation agreements with various dealerships (dealers of motor vehicles) throughout Indonesia in financing the vehicles sold by the dealers to costumers who meet the Company's credit and administrative requirements. The agreements do not bind one another exclusively, whereby the dealers are not obliged to exclusively render the entire or part of the vehicles they sell to be financed by the Company, and vice versa, the Company is not obliged to exclusively finance all the credit application submitted by or through the dealers.

The Company does not enter into any agreement with Sole Agents (ATPM).

Ekshibit E/95

Exhibit E/95

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

	2016	2015
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	798.365	650.288
Jumlah rata-rata tertimbang saham	1.524.312.078	1.558.822.503
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	524	417
Jumlah rata-rata tertimbang saham dilusian	1.524.312.078	1.559.493.673
Laba bersih per saham dilusian (nilai penuh)	524	417

32. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average common shares outstanding during the year.

Net profit for the computation of basic earning per shares

The weighted average of shares outstanding

Basic earnings per share (full amount)

The weighted average of diluted shares outstanding

Diluted earnings per share (full amount)

33. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Perubahan komponen penghasilan komprehensif lain yang tidak mempengaruhi laba rugi adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal tahun - sebelum pajak penghasilan tangguhan	(19.221)	(81.852)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai arus kas	(71.798)	71.215
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(7.007)	7.074
	(98.026)	(3.563)
Aset pajak tangguhan (Catatan 14c)	15.761	(15.658)
Saldo akhir tahun - setelah pajak penghasilan tangguhan	(82.265)	(19.221)

33. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The movement of other comprehensive income component that have not yet affected the profit and loss were as follows:

Balance at the beginning of the year - before deferred income tax

Items that will be reclassified to profit or loss
Effective portion of changes in fair value of cash flow hedging instruments

Items that will not be reclassified to profit or loss
Actuarial gain (loss) on defined benefit program

Deferred tax assets (Note 14c)

Balance at the end of the year - after deferred income tax

34. MANAJEMEN RISIKO

Pendahuluan dan gambaran umum

Perkembangan dunia *multifinance* yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada dasarnya sudah dilakukan sejak perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

34. RISK MANAGEMENT

Introduction and general description

The development in *multifinance* industry followed with the improvement in complexity of financing activity has emphasized more on the importance of good corporate governance and a reliable risk management. Such both matters are important factors, which bring the investors' attention in assessing their investment targeting. Basically, the implementation of risk management within the Company had been carried out since the establishment of the Company, eventhough the Company was still using a conventional manner and keep improving in accordance with the recent development of internal and external circumstances.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)

Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan empat tipe risiko utama:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko pendanaan dan likuiditas
4. Risiko operasional

Pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perusahaan, yang didasarkan pada kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan menjadi *strategic partner* bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi Perusahaan.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai, Perusahaan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

Kerangka manajemen risiko

Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batasan transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh aktivitas lingkup usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut:

1. **Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi**, yang mencakup:
 - Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
 - Menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portfolio secara berkala;
 - Terdapatnya Komite Audit dan Manajemen Risiko dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. **Kebijakan dan penerapan batasan**

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar, Ketentuan Umum dan Surat Keputusan Dewan Direksi, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terkait. Perusahaan juga menerapkan batasan persetujuan atau otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Introduction and general description (Continued)

The Company realizes that risk is an integral part of its operational activity and can be managed practically and effectively day by day, with the following four particular risks:

1. Credit risk
2. Market risk
3. Funding and liquidity risk
4. Operational risk

Risk management within the Company includes overall scope of business activity within the Company, which based on the necessity of balance between business operational function and its risk management thereof. By means of proper risk management and policy, thus the risk management will become a strategic partner to the business in obtaining optimal outcome from the Company's course of operation.

In the event of development of proper risk management, the Company keeps developing and improving the integrated and comprehensive framework of risk management system and internal control structure, in order that they are able to provide information as an early warning of any potential risk and accordingly, take appropriate actions to mitigate the risk.

Framework of risk management

The framework of risk management is implemented under the form of policy, procedures, transactional limits, authorizations, and other rules as well as various risk management instruments applicable to entire business activity. In order to ensure that the policy and procedures is in line with the current business development, evaluation is frequently carried out in accordance with the change in its risk parameter.

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows:

1. **Active supervision by the Board of Commissioners and Directors**, which includes:
 - Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;
 - Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;
 - Presence of Audit Committee and Risk Management Committee in carrying out their supervisory functions.
2. **Policy and implementation limits**

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies concerning the level of authority on approval or authorization for both credit and non-credit transactions.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut: (Lanjutan)

3. Identifikasi, pengukuran, pengawasan dan sistem informasi manajemen

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen. Untuk menjamin ketersediaan data risiko yang terkini dan komprehensif, Perusahaan telah melakukan pengkonversi sistem operasi Perusahaan yang ada menjadi *centralized system* yang dikenal dengan CONFINS. Selain itu, Perusahaan juga melakukan implementasi sistem informasi *business intelligence* agar data atau informasi risiko dapat disediakan secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen atau pihak ketiga lainnya.

4. Pengendalian internal

Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tanggungjawab dari Departemen Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari proses bisnis yang ada di dalam Perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan risiko Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian di dalam Perusahaan termasuk rekomendasi perbaikan yang potensial terhadap proses tersebut; dan

Melakukan koordinasi strategis dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, hukum, sistem dan prosedur, dan audit eksternal).

Proses dan penilaian risiko

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Tugas utama dari Departemen Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan, melakukan pengukuran dan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows: (Continued)

3. Identification, measurement, monitoring, and management information system

The Company has a set of tools to identify, measure, and monitor risks, particularly the credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism. In order to ensure the availability of updated and comprehensive risk data, the Company had converted the existing operating system into a centralized system, which known as CONFINS. Moreover, the Company has also implemented business intelligence information system in order that data or risk information could be provided to the management or other third parties on a prompt and accurate manner.

4. Internal control

The Company has the Internal Audit Division in place, which independently reports on process and results of assessment to the Board of Commissioners and Directors. The responsibility of the Internal Audit Division includes:

- Providing assessment on the adequacy and effectiveness of the entire existing business process within the Company;
- Conducting examination on compliance to the Company's risk policies;
- Reporting on significant issues related to the control activities within the Company, including potential improvements to these processes; and

Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal, system and procedures, and external auditor)

Process and risk assessments

Basically, risk management processes are carried out by each unit considering that the risk faced represents individual risks which are embedded into the products, transactions, as well as process in the related unit. The primary task of Risk Management Division is to determine policies and procedures as well as doing a series of processes of collecting, measuring, and reporting to the Board of Commissioners and Directors. The determination of risk management policies is carried out through approval process by the Board of Directors.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko utama perusahaan, yaitu risiko yang timbul apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industri, merk dan tipe barang.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, yaitu penetapan tingkat bunga pembiayaan berdasarkan risiko yang dihadapi, antara lain dinilai dari tingkat uang muka yang dibayar konsumen, usia kendaraan yang dibiayai, jenis penutupan asuransi yang dipilih dan lain sebagainya.
- Adanya *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai "early warning system" atas suatu masing-masing produk pembiayaan maupun kantor cabang.
- Penanganan kontrak bermasalah yang dilakukan secara disiplin dan proaktif.
- Analisa atas kualitas portofolio secara periodik dan tindakan preventif dan sanksi bagi cabang-cabang yang kualitas portofolionya tidak sesuai target.

Tabel berikut menjelaskan eksposur maksimum sesuai dengan konsentrasi risiko kredit:

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

1. Credit Risk

Credit risk is the main risk of the Company, that is the risk arising when the customer are unable to meet its obligation in accordance with the agreement as agreed upon between the customer and the Company.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Diversify the portfolio by region, economic sector and industry, brand and type of goods.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, namely setting the interest rate of financing based on the risks faced by, among others, assessed based on the level of advances paid by consumers, age of vehicles financed, type of insurance coverage selected and so forth.
- The *Key Performance Indicators* (KPI) as an "early warning system" of an individual loan products as well as branch offices.
- Handling of problematic contracts in a discipline and proactive manner.
- Analysis of portfolio quality through periodic and preventive actions and sanctions for branches whose quality of its portfolio is not on target.

The following table illustrates the Company's maximum exposure based on credit risk concentration:

	2016				Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Lain-lain/ Others			
Kas dan setara kas	165.388	-	-	-	165.388	Cash and cash equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	1.312.341	5.869.140	-	-	7.181.481	Net investments in finance Lease
Piutang pembiayaan konsumen	2.298	4.582.581	-	-	4.584.879	Consumer financing receivables
Aset derivatif	41.301	-	-	-	41.301	Derivative assets
Aset lain-lain	-	26.741	-	-	26.741	Other assets
	<u>1.521.328</u>	<u>10.478.462</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.999.790</u>	
	2015				Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	Korporasi/ Corporate	Ritel/ Retail	Lain-lain/ Others			
Kas dan setara kas	777.233	-	-	-	777.233	Cash and cash equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	1.122.267	4.170.417	-	-	5.292.684	Net investments in finance Lease
Piutang pembiayaan konsumen	2.878	4.782.094	-	-	4.784.972	Consumer financing receivables
Aset derivatif	440.832	-	-	-	440.832	Derivative assets
Aset lain-lain	-	31.200	-	-	31.200	Other assets
	<u>2.343.210</u>	<u>8.983.711</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.326.921</u>	

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

Process and risk assessments (Continued)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

1. Credit Risk (Continued)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang dibedakan antara yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak:

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those which impaired and not impaired:

	2016			
	Tidak Mengalami Penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	165.388	-	165.388	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi neto sewa pembiayaan	7.127.656	53.825	7.181.481	<i>Net investments in finance lease</i>
Piutang pembiayaan konsumen	4.521.634	63.245	4.584.879	<i>Consumer financing receivables</i>
Aset derivatif	41.301	-	41.301	<i>Derivative assets</i>
Aset lain-lain	26.741	-	26.741	<i>Other assets</i>
	<u>11.882.720</u>	<u>117.070</u>	<u>11.999.790</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(<u>183.001</u>)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
			<u>11.816.789</u>	
	2015			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Not impaired</i>	Mengalami Penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	777.233	-	777.233	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi neto sewa pembiayaan	5.245.200	47.484	5.292.684	<i>Net investments in finance lease</i>
Piutang pembiayaan konsumen	4.673.194	111.778	4.784.972	<i>Consumer financing receivables</i>
Aset derivatif	440.832	-	440.832	<i>Derivative assets</i>
Aset lain-lain	31.200	-	31.200	<i>Other assets</i>
	<u>11.167.659</u>	<u>159.262</u>	<u>11.326.921</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(<u>179.653</u>)	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
			<u>11.147.268</u>	

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan rincian aset keuangan Perusahaan yang penilaian penurunannya dibedakan antara yang dinilai secara individual dan kolektif.

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

1. Credit Risk (Continued)

The following table illustrates the detail of financial assets distinguished between those assessed individually and collectively.

	2016			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	165.388	-	165.388	Cash and cash equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	1.651.814	5.529.667	7.181.481	Net investments in finance lease
Piutang pembiayaan konsumen	-	4.584.879	4.584.879	Consumer financing receivables
Aset derivatif	41.301	-	41.301	Derivative assets
Aset lain-lain	26.741	-	26.741	Other assets
	<u>1.885.244</u>	<u>10.114.546</u>	<u>11.999.790</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(183.001)	Less: Allowance for impairment losses
			<u>11.816.789</u>	
	2015			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	777.233	-	777.233	Cash and cash equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	1.373.083	3.919.601	5.292.684	Net investments in finance lease
Piutang pembiayaan konsumen	-	4.784.972	4.784.972	Consumer financing receivables
Aset derivatif	440.832	-	440.832	Derivative assets
Aset lain-lain	31.200	-	31.200	Other assets
	<u>2.622.348</u>	<u>8.704.573</u>	<u>11.326.921</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(179.653)	Less: Allowance for impairment losses
			<u>11.147.268</u>	

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing, sementara seluruh utang Perusahaan dalam mata uang asing telah diproteksi dengan swap dalam jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sama dengan utangnya. Dalam hal suku bunga, seluruh bunga yang dibebankan ke konsumen adalah suku bunga tetap (*fixed interest rate*), sementara utang yang diperoleh sebagian besar juga dalam suku bunga tetap dan hanya sebagian kecil utang dalam bentuk bunga mengambang (*floating interest rate*).

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Kewajiban untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat bunga pembiayaan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

Tabel berikut menjelaskan eksposur Perusahaan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan Perusahaan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

	2016		
	USD (Nilai penuh)/ (Full amount)	Nilai (Rp)/ Equivalent (Rp)	
Liabilitas			Liabilities
Pinjaman yang diterima	182.260.270	2.448.849	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	2.410.077	32.382	Accrued expenses
Jumlah liabilitas	184.670.347	2.481.231	Total liabilities
Liabilitas bersih	184.670.347	2.481.231	Net liabilities
Kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing	(184.670.347)	(2.481.231)	Foreign currency swap transactions Contract
Eksposur bersih dalam mata uang asing	-	-	Net exposure in foreign currency

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku.

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

2. Market Risk

Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates and exchange rates which could resulting in decrease in revenue, or increase in cost of capital of the Company. With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is mitigated to the minimum level. The Company has neither consumer financing nor finance lease business activity that denominated in foreign currencies, while all borrowings of the Company that denominated in foreign currencies have been protected by entering into swap transactions at amount and settlement date that similar to the borrowings thereof. In terms of interest rate, all interest rate charged to the customer is fixed interest rate, while most of the borrowings received bear fixed interest rate, and only a small portion the borrowings bear floating interest rate.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- The requirement to cover risks of foreign exchange.
- Performing review over the interest rate on financing associated with interest rate on borrowings.
- Limiting exposure in the investment that has fluctuating market prices.

The following table illustrates the Company's exposure to foreign currency exchange rate risk as of 31 December 2016. Included in the table are financial instruments of the Company at carrying amounts, categorised by currency.

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. Risiko Pasar (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan konsumen bersih dan investasi neto sewa pembiayaan:

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

2. Market Risk (Continued)

The following table illustrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the net consumer financing income and net investments in finance lease:

	2016	2015	
<u>Pendapatan pembiayaan konsumen:</u>			<u>Consumer finance income:</u>
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	47.247	56.588	Increase in interest rate by 1% (100 basis point)
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(47.247)	(56.588)	Decrease in interest rate by 1% (100 basis point)
<u>Investasi neto sewa pembiayaan:</u>			<u>Net investments in finance lease:</u>
Kenaikan suku bunga 1% (100 basis poin)	58.345	39.809	Increase in interest rate by 1% (100 basis point)
Penurunan suku bunga 1% (100 basis poin)	(58.345)	(39.809)	Decrease in interest rate by 1% (100 basis point)

Tahun 2016/ Year 2016

	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat bunga tetap/ Fixed rate				Jumlah Total	
	< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ Months	> 3 bulan/ Months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ Years	> 2 tahun/ years		
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	165.388	-	-	-	-	-	165.388	Cash and cash equivalents
Investasi sewa pembiayaan	-	-	1.264.401	2.822.215	2.305.717	789.149	7.181.482	Net investments in finance lease
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	815.254	1.531.370	1.249.574	988.681	4.584.879	Consumer financing receivables
Jumlah aset keuangan	165.388	-	2.079.655	4.353.585	3.555.291	1.777.830	11.931.749	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	25.610	163.057	930.386	1.740.113	1.347.588	484.185	4.690.939	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	886.726	739.502	1.339.067	2.965.295	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	25.610	163.057	930.386	2.626.839	2.087.090	1.823.252	7.656.234	Total financial Liabilities
Bersih	139.778	(163.057)	1.149.269	1.726.746	1.468.201	(45.422)	4.275.515	Net

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

2. Risiko Pasar (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan konsumen bersih dan investasi neto sewa pembiayaan: (Lanjutan)

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

2. Market Risk (Continued)

The following table illustrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the net consumer financing income and net investments in finance lease: (Continued)

	Tahun 2015/ Year 2015						Jumlah Total	
	Tingkat bunga mengambang/ Floating rate			Tingkat bunga tetap/ Fixed rate				
	< 3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	> 3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ Years	> 2 tahun/ years		
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	777.233	-	-	-	-	-	777.233	Cash and cash Equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	-	-	910.768	2.008.396	1.770.363	603.157	5.292.684	Net investments in finance lease
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	924.335	1.610.538	1.222.843	1.027.256	4.784.972	Consumer financing Receivables
Jumlah aset keuangan	777.233	-	1.835.103	3.618.934	2.993.206	1.630.413	10.854.889	Total financial assets
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	17.319	121.734	577.376	2.351.687	1.810.735	757.848	5.636.699	Fund borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	707.460	373.883	599.773	1.681.116	Securities Issued
Jumlah liabilitas keuangan	17.319	121.734	577.376	3.059.147	2.184.618	1.357.621	7.317.815	Total financial Liabilities
Bersih	759.914	(121.734)	1.257.727	559.787	808.588	272.792	3.537.074	Net

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko terkait dengan kemampuan sumber dana Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai dengan periode jatuh tempo piutang, sehingga tidak terjadi *mis-match*.
- Menjaga agar posisi kas dan Perusahaan selalu dalam posisi likuid untuk mendukung aktivitas pembiayaan selama minimal 7 hari.
- Memonitor posisi kas dan bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat surplus kas yang memadai.
- Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk associated with the ability of the Company to meet its obligations when they fall due.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Obtaining borrowings with principal and interest repayment schedule that aligns with the original maturities of receivables, in order to prevent *mis-match*.
- Maintaining the cash and bank position of the Company to remain in a liquid position in supporting the financing activities for at least 7 days.
- Monitoring the cash and bank position of the Company in a regular basis, whether annually, monthly, weekly or daily, to ensure that there is always sufficient cash surplus.
- Manage to maintain the number of receivables due in a certain period keeps greater than the debts maturing in the same period.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

3. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Tabel berikut menjelaskan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

3. Liquidity Risk (Continued)

The following table illustrates the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2016 and 2015:

		2016							
		Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ Months	>3-12 bulan/ Months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah Total	
Aset keuangan									Financial assets
	Kas dan setara kas	165.388	-	-	-	-	-	165.388	Cash and cash equivalents
	Investasi neto sewa pembiayaan	-	547.021	717.380	2.822.214	3.067.902	26.964	7.181.481	Net investment in finance lease
	Piutang pembiayaan konsumen	-	401.801	413.453	1.531.370	1.932.563	305.692	4.584.879	Consumer financing receivables
	Aset derivatif	-	8.684	9.366	33.714	(10.463)	-	41.301	Derivative assets
	Piutang karyawan	-	129	786	3.144	11.029	11.653	26.741	Employees receivables
	Jumlah aset keuangan	165.388	957.635	1.140.985	4.390.442	5.001.031	344.309	11.999.790	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
	Pinjaman yang diterima Surat berharga yang diterbitkan	-	532.802	428.903	1.830.124	1.920.506	9.364	4.721.699	Fund borrowings
	Beban yang masih harus dibayar	-	-	525.000	367.000	1.950.000	133.000	2.975.000	Securities issued
	Utang premi asuransi	-	78.610	-	-	-	-	78.610	Accrued expenses
	Utang kepada dealer	-	10.534	9.193	7.104	2.226	-	29.097	Insurance premium payables
		-	9.535	-	-	-	-	9.535	Payable to dealers
	Jumlah liabilitas keuangan	-	631.481	963.096	2.204.228	3.872.732	142.364	7.813.941	Total financial liabilities
	Perbedaan jatuh tempo	165.388	326.154	177.889	2.186.214	1.128.299	201.945	4.185.849	Difference in maturity
		2015							
		Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	Jumlah Total	
Aset keuangan									Financial assets
	Kas dan setara kas	777.233	-	-	-	-	-	777.233	Cash and cash equivalents
	Investasi neto sewa pembiayaan	-	399.610	511.158	2.008.396	2.349.927	23.593	5.292.684	Net investment in finance lease
	Piutang pembiayaan konsumen	-	478.569	445.765	1.610.538	1.953.767	296.333	4.784.972	Consumer financing receivables
	Aset derivatif	-	51.444	21.665	209.094	158.630	-	440.833	Derivative assets
	Piutang karyawan	-	25	107	7.319	10.826	12.923	31.200	Employees receivables
	Jumlah aset keuangan	777.233	929.648	978.695	3.835.347	4.473.150	332.849	11.326.922	Total financial assets
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
	Pinjaman yang diterima Surat berharga yang diterbitkan	-	295.738	306.776	2.422.261	2.656.765	5.899	5.687.439	Fund borrowings
	Beban yang masih harus dibayar	-	-	555.000	155.000	975.000	-	1.685.000	Securities issued
	Utang kepada dealer	-	54.781	-	-	-	-	54.781	Accrued expenses
	Utang premi asuransi	-	4.112	-	-	-	-	4.112	Payable to dealers
		-	3.588	4.280	3.205	21	-	11.094	Insurance premium payables
	Jumlah liabilitas keuangan	-	358.219	866.056	2.580.466	3.631.786	5.899	7.442.426	Total financial liabilities
	Perbedaan jatuh tempo	777.233	571.429	112.639	1.254.881	841.364	326.950	3.884.496	Difference in maturity

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan karyawan baik yang disengaja maupun tidak; kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak berfungsinya sistem pengendalian internal dalam operasional Perusahaan sehari-hari.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat dan terkontrol secara sistem dan dimonitor dari waktu ke waktu.
- Menyiapkan *backup* dan *Disaster Recovery Plan* yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi *hardware* dan *software*.
- Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
- Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan.
- Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindari/ mengurangi potensi penyimpangan.
- Adanya penilaian kinerja yang *fair* dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

5. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*)

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan gearing ratio. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan medium-term notes) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

4. Operational Risk

Operational risk is the risk that could potentially cause an operating loss due to employee error whether intentional or not; system failures and operational processes as well as the malfunction of the internal control system in the day-to-day operations.

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Implementing a centralized system in order that business processes can be controlled by the system and monitored from time to time.
- Preparing backup and Disaster Recovery Plan that is sufficient whenever unexpected event or condition occur towards the Company's major application systems, both in terms of hardware and software.
- Implementing a sustainable compliance audit system, both in branch offices or headquarters.
- Implementing a clear code of conduct (SOP) and strict sanctions for irregularities that occurred, according to level of error identified.
- Promoting the Company's core values to employees since the early stage, in order to avoid/reduce the potential for irregularities.
- Fair and transparent performance appraisal and opportunities for career development.

5. Capital Risk

The Company's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders, and maintain the optimization of capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return for the results of capital to shareholders or issue new shares to reduce lending

Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-terms notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No. 84/PMK.012/2006 dated 26 September 2006 regarding Multifinance Company, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Proses dan penilaian risiko (Lanjutan)

5. Risiko Permodalan (Lanjutan)

Struktur Modal Keterangan	PMK No.84/ PMK.012/2006	Struktur Modal Perusahaan/ Company's Capital Structure	
		2016	2015
Modal Disetor (dalam miliar Rupiah)	Minimal Rp 100 miliar/ Minimum Rp 100 billion	399	391
Rasio Utang Bersih Terhadap Ekuitas	Maksimum 10x/ Maximum 10x	1,8	1,6

Tingkat rasio utang bersih terhadap ekuitas Perusahaan berada pada kondisi sehat, yaitu 1,8 kali pada tahun 2016, dibandingkan dengan 1,6 kali pada tahun 2015.

34. RISK MANAGEMENT (Continued)

Process and risk assessments (Continued)

5. Capital Risk (Continued)

Capital Structure Description	Struktur Modal Perusahaan/ Company's Capital Structure	
	2016	2015
Paid-up Capital (in billion Rupiah)	399	391
Net Debt to Equity Ratio	1,8	1,6

Net debt-to-equity ratio level of the Company was healthy at 1.8 times in 2016 compared to 1.6 times in 2015.

35. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2d menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian halnya dengan liabilitas keuangan telah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

35. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Fair value of financial assets and financial liabilities

In the following table, financial instrument have been allocated based on the classification. Significant accounting policies in Note 2d describes how each category of financial assets and financial liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

The classification of financial assets has been classified as financial assets measured at fair value through profit and loss, and loans and receivables. So with the financial liabilities has been classified as financial liabilities measured at amortized cost.

2016	Nilai tercatat/ Carrying amount					2016
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities measured at amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Carrying value amount	Jumlah nilai wajar/ Fair value amount	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	-	165.388	-	165.388	165.388	Cash and cash equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	-	7.121.175	-	7.121.175	7.121.175	Net investments in finance lease
Piutang pembiayaan konsumen	-	4.462.184	-	4.462.184	4.462.184	Consumer financing receivables
Aset derivatif	41.301	-	-	82.395	41.301	Derivative assets
Aset lain-lain	-	26.741	-	26.741	26.741	Other assets
Jumlah	41.301	11.775.488	-	11.857.883	11.816.789	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	4.690.939	4.690.939	4.690.939	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	-	-	190.240	190.240	190.240	Accrued expenses
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	2.965.295	2.965.295	2.965.295	Securities issued
Utang lain-lain	-	-	139.914	139.914	139.914	Other payables
Jumlah	-	-	7.986.388	7.986.388	7.986.388	Total

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

Tabel berikut merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015: (Lanjutan)

35. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)

The following table are the carrying value and fair value of financial assets and financial liabilities as of 31 December 2016 and 2015: (Continued)

2015	Nilai tercatat/ Carrying amount					2015
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loan and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities measured at amortized cost	Jumlah nilai tercatat/ Carrying value amount	Jumlah nilai wajar/ Fair value amount	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	-	777.233	-	777.233	777.233	Cash and cash equivalents
Investasi neto sewa pembiayaan	-	5.209.847	-	5.209.847	5.209.847	Net investments in finance lease
Piutang pembiayaan konsumen	-	4.688.156	-	4.688.156	4.688.156	Consumer financing receivables
Aset derivatif	440.832	-	-	410.128	440.832	Derivative assets
Aset lain-lain	-	31.200	-	31.200	31.200	Other assets
Jumlah	440.832	10.706.436	-	11.116.564	11.147.268	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	5.636.699	5.636.699	5.636.699	Fund borrowings
Beban yang masih harus dibayar	-	-	140.586	140.586	140.586	Accrued expenses
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.681.116	1.681.116	1.681.116	Securities issued
Utang lain-lain	-	-	87.490	87.490	87.490	Other payables
Jumlah	-	-	7.545.891	7.545.891	7.545.891	Total

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Nilai wajar kas dan setara kas, deposito berjangka, beban yang masih harus dibayar dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Estimasi nilai wajar terhadap pinjaman yang diterima yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga hutang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Nilai wajar pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga mengambang mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunganya sering ditinjau ulang.
- Investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan aset lain-lain dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi oleh beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- The fair values of cash and cash equivalents, time deposit, accrued expenses and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.
- The estimated fair value of fund borrowings not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. The fair value of floating rate fund borrowings approximate their carrying amounts because the interest rate is repriced frequently.
- Net investments in finance lease, consumer financing receivables and other assets are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Expected cash flows are discounted at current market rates to determine fair value.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(Lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai
wajar adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Nilai wajar untuk aset keuangan derivatif ditetapkan menggunakan harga pasar.
- Nilai wajar agregat untuk surat berharga yang diterbitkan dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva yield terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah aset keuangan derivatif.

36. LITIGASI

Gugatan PT Aryaputra Teguharta (APT) kepada Perusahaan, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menuntut pengembalian sebanyak 111.804.732 lembar saham Perusahaan, menuntut pembagian dividen dan juga menuntut kerugian immaterial, telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) No. 240/PK/PDT/2006 tanggal 20 Februari 2007 (Putusan PK 240), dengan amar putusan pada intinya antara lain menyatakan Perusahaan dan Direksi Perusahaan dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan saham-saham APT kepada APT.

Terhadap Putusan PK 240 tersebut telah diajukan permohonan Sita Eksekusi oleh APT dan dari pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi perkara atas putusan PK 240 tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) berdasarkan Penetapan Daft No. 079/2007/EKS tertanggal 10 Oktober 2007.

35. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(Continued)

The following methods and assumptions are used to
estimate the fair value: (Continued)

- The fair value for derivative financial assets is based on market rates.
- The aggregate fair values securities issued is calculated based on quoted market prices. For those notes where quoted market prices are not available, a discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term of maturity.

SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- (b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- (c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The Company's financial assets that are measured and recognised at fair value (level 2) are derivative financial assets.

36. LITIGATION

The lawsuit PT Aryaputra Teguharta (APT) to the Company, through the Central Jakarta District Court, demanding the return of as many as 111,804,732 shares of the Company, demanding payment of dividend and also demanded immaterial loss, has obtained a legally binding verdict based Decision Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA) No. 240/PK/ PDT/2006 dated 20 February 2007 (Decision PK 240), with the verdict in essence, among others, the Company and its Directors were sentenced to return and submit the APT's shares to APT.

The Verdict Against PK 240 petition has been filed by the APT and Sita Execution of implementation Sita Bailiffs Execution by the Central Jakarta and South Jakarta District Court, the Chairman of the Central Jakarta District Control stated that the execution of the case against the decision of the PK 240 can not be executed pursuant to the Stipulation Daft No. 079/2007/EKS dated 10 October 2007.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. LITIGASI (Lanjutan)

APT telah berulang kali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan Sita Eksekusi kembali terhadap putusan PK 240 tersebut dengan pembatalan dan/atau pencabutan Penetapan Non-Executable tersebut. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.079/2007.Eks tanggal 23 September 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Penetapan Non-Executable tersebut di atas dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi serta menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan PK 240 dapat dilakukan (executable). Dalam rangka Eksekusi Putusan PK 240, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Bursa Efek Indonesia/BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI).

Berdasarkan Surat dari KSEI No. KSEI-6536/DIR/1214 tanggal 11 Desember 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam administrasi KSEI tidak ada catatan penitipan saham Perusahan milik APT, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi atas Putusan PK 240 belum dapat dilaksanakan sesuai Surat No. W.10.u1/7284/079.2007.Eks/HT.02/VI/2015/01/BD tanggal 24 Juni 2015. Oleh karena itu manajemen berpendapat, perkara tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan secara material.

36. LITIGATION (Continued)

APT has been repeated requests to the Chairman of the Central Jakarta District Court to do Sita Execution back against the decision of the PK 240 with the cancellation and/or revocation of the Stipulation of Non-Executable. Based on the Stipulation of the Chairman of the Central Jakarta District Court No.079/2007.Eks dated 23 September 2014 in essence states that the Stipulation of Non-Executable aforementioned revoked/declared invalid and declare that the execution of PK 240 decision can be done (executable). In order to Execution of PK 240 Decision, the Chairman of the Central Jakarta District Court had called and clarified related parties (Financial Services Authority/OJK, Stock Exchange Indonesia/BEI and Indonesian Central Securities Depository/KSEI).

Based on the Letter of KSEI No. KSEI-6536/DIR/1214 dated 11 December 2014 which basically states that in KSEI's administration, there is no storage record for the Company's shares owned by APT, the Chairman of the Central Jakarta District Court stated that the execution of the PK 240 decision could not be implemented in accordance to the Letter No. W.10.u1/7284/079.2007.Eks/HT.02/VI/2015/01/BD dated 24 June 2015. Therefore, the management believes that the case will not affect the Company's operations materially.

37. REKLASIFIKASI

Laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2016. Rincian reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

37. RECLASSIFICATIONS

The 2015 and 2014 financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2016 financial statements. The details of the reclassifications are as follows

	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassification</i>	
<u>Aset</u>				<u>Asset</u>
2015				2015
Aset tetap	450.162 (21.477)	428.685	Fixed Assets
Aset tidak berwujud	-	21.477	21.477	Intangible Assets
2014				2014
Aset tetap	446.831 (30.979)	415.852	Fixed Assets
Aset tidak berwujud	-	30.979	30.979	Intangible Assets
<u>Beban umum dan administrasi</u>				<u>General and Administrative Expense</u>
2015				2015
Penyusutan aset tetap	68.493 (8.296)	60.197	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset tidak berwujud	-	8.296	8.296	Amortization of intangible assets
2014				2014
Penyusutan aset tetap	55.971 (6.345)	49.626	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset tidak berwujud	-	6.345	6.345	Amortization of intangible assets

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2016

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. REKLASIFIKASI (Lanjutan)

Laporan keuangan tahun 2015 dan 2014 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2016. Rincian reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Sesudah reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassification</i>	
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flow from investment activities
2015				2015
Pembelian aset tetap	86.939 (4.827)	82.112	Acquisitions of fixed assets
Pembelian aset tak berwujud	- (4.827)	4.827	Acquisitions of intangible assets

37. RECLASSIFICATIONS (Continued)

The 2015 and 2014 financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2016 financial statements. The details of the reclassifications are as follows: (Continued)

38. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. Corp/SJN/L/III/17-0024 tanggal 1 Pebruari 2017 bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Cornelius Henry Kho selaku Direktur Perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Untuk itu Perusahaan saat ini sedang menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan RUPS dimaksud sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perusahaan

38. SUBSEQUENT EVENTS

Based on the Letter of Disclosure Information submitted by the Company to the Financial Services Authority ("OJK") No. Corp/SJN/L/III/17-0024 dated 1 February 2017, that on 31 January 2017, the Company received a resignation letter from Cornelius Henry Kho as a Director of the Company.

In accordance with the provisions of the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 about the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or a Public Company and the Company, the Company shall held a General Meeting of Shareholders ("RUPS") to decide on the resignation later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation intended.

Therefor the Company is currently preparing a plan and schedule for the RUPS intended in accordance with POJK No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Company.

39. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 17 Pebruari 2017.

39. ISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Authorized for issuance by Directors on 17 February 2017.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN

Untuk memilih topik-topik yang dibahas dalam Laporan Terintegrasi ini, Perusahaan meninjau ulang topik-topik yang telah dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan BFI yang diterbitkan pada 2015 dan mendefinisikan ulang aspek-aspek material yang kami sajikan dalam laporan ini.

Data dan informasi finansial disajikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sedangkan topik bahasan lain yang dilaporkan dipilih dari aspek-aspek keberlanjutan Perusahaan yang material berdasarkan matriks materialitas sebagaimana digambarkan berikut ini.

Penentuan aspek-aspek dalam pelaporan yang dinilai bersifat material, ditentukan berdasarkan opini internal dan eksternal yang telah didiskusikan sebelum proses penyusunan laporan. Secara umum, aspek material yang dilaporkan adalah tentang kinerja usaha, layanan kepada pelanggan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Grafik 31 – MATRIKS MATERIALITAS BFI

Pengaruh terhadap persepsi pemangku kepentingan BFI ↑	Sangat Tinggi			<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Perusahaan yang baik (halaman 174) • Pengembangan Usaha (halaman 128)
	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian Lingkungan (halaman 307) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan' (halaman 296) • Ketenagakerjaan' (halaman 96) • Pendidikan dan Pelatihan' (halaman 99) • Tanggung Jawab kepada Konsumen' (halaman 309) 	
	Sedang		<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Karyawan (halaman 105) 	
		Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
	Pengaruh terhadap keberlanjutan BFI →			

Catatan: *Topik yang sudah disajikan pada laporan sebelumnya

Dalam laporan ini, terdapat perubahan aspek material yang dilaporkan dibandingkan dengan Laporan Keberlanjutan BFI 2015, sebelumnya kami hanya melaporkan empat bidang program tanggung jawab sosial BFI, yaitu (1) lingkungan, (2) praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, (3) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan (4) tanggung jawab kepada konsumen.

ASPEK MATERIAL DAN RANTAI PASOKAN PERUSAHAAN

Sebagai sebuah perusahaan jasa keuangan, BFI memiliki rantai pasokan yang sederhana. Pemasok BFI terutama, antara lain, *dealer* dan *supplier* mobil, perusahaan jasa asuransi untuk produk kendaraan bermotor,

notaris, konsultan, perusahaan jasa teknologi informasi dan pemasok barang dan jasa kebutuhan perkantoran. Tidak ada proses bisnis inti BFI yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Pada 2016, terdapat 789 pemasok yang bekerja sama dengan BFI. Sebanyak 784 atau 99% dari keseluruhan pemasok tersebut adalah pemasok lokal, yaitu perusahaan pemasok yang memiliki domisili nasional.

Tabel 130 – DAFTAR TOPIK MATERIAL DAN BATASANNYA DI BFI

No. Topik	Internal		Eksternal	
	BFI	Pelanggan	Pemasok	Masyarakat
1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik	√		√	
2. Pengembangan Usaha	√		√	
3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	√			√
4. Ketenagakerjaan	√			√
5. Pendidikan dan Pelatihan	√			√
6. Tanggung Jawab kepada Konsumen	√	√	√	
7. Produktivitas Karyawan	√			
8. Pelestarian Lingkungan	√			√

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan Perusahaan, berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan bisnis, adalah karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemasok dan mitra kerja, masyarakat dan regulator. Perusahaan bekerja untuk membangun komunikasi yang transparan dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa saling percaya.

BFI menjalin dialog yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, harapan, menyelesaikan masalah, mengelola dampak dan mengidentifikasi peluang demi terwujudnya manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Tabel 131 – RANGKUMAN ISU PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016

Kelompok Pemangku Kepentingan	Metode Dialog dan Pelibatan	Isu yang Diangkat pada 2016
Pelanggan	Survei pelanggan, data keluhan pelanggan	Layanan pelanggan, penjelasan informasi produk, akses layanan
Karyawan	Survei karyawan, pertemuan dengan perwakilan karyawan, rapat, <i>town hall meeting</i>	Kesejahteraan dan manfaat, pengembangan kompetensi dan karier, produktivitas
Pemegang Saham	Laporan triwulan dan tahunan, <i>investor road show</i> , rapat umum pemegang saham	Manfaat, pengembangan usaha, tata kelola dan akuntabilitas, kesehatan usaha
Pemasok	Pelibatan berbasis kontrak	Keberlanjutan pasokan, kinerja, ketepatan waktu
Mitra Kerja	Pelibatan berbasis kontrak, tinjauan kinerja	Kinerja, ketepatan waktu, evaluasi kontrak
Masyarakat	Forum, pertemuan, kemitraan dengan lembaga untuk kemasyarakatan	Dukungan pada sosioekonomi masyarakat dan lingkungan
Regulator	Pertemuan/rapat teratur, pelaporan	Kepatuhan, pengembangan usaha, tata kelola dan akuntabilitas, kesehatan usaha

BFI juga memandang pelibatan dengan pemangku kepentingan dilakukan dengan keikutsertaan Perusahaan dalam organisasi eksternal yang relevan dan mendukung tujuan Perusahaan. BFI berpartisipasi dalam keanggotaan organisasi sebagai berikut:

1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagai anggota;
2. Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sebagai anggota;
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai anggota; dan
4. Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) sebagai anggota.

SEOJK NOMOR 30/ SEOJK.04/2016 – BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016	HALAMAN
BENTUK LAPORAN TAHUNAN	
1. Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan Salinan dokumen elektronik.	√
2. Laporan tahunan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid dan dapat diperbanyak dgn kualitas baik.	√
3. Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk Salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√
ISI LAPORAN TAHUNAN	
1. Ketentuan umum.	
a. Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai:	
1) Ikhtisar data keuangan penting.	10-11
2) Informasi saham (jika ada).	12-15
3) Laporan Direksi.	36-43
4) Laporan Dewan Komisaris.	30-35
5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik.	46-93
6) Analisis dan Pembahasan Manajemen.	125-172
7) Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	173-293
8) Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik.	295-315
9) LKT yang telah diaudit.	334-455
10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan.	329-331
b. Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	2-5
2. Uraian isi Laporan Tahunan.	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting.	
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1) Pendapatan/penjualan.	10
2) Laba bruto.	10
3) Laba (rugi).	10
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	10
5) Total laba (rugi) komprehensif.	10
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	10
7) Laba (rugi) per saham.	10
8) Jumlah aset.	10
9) Jumlah liabilitas.	10
10) Jumlah ekuitas.	10
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	11
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	11
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	11
14) Rasio lancar.	11

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016	HALAMAN
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	11
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	11
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten dan jenis industrinya.	11
b. Informasi Saham.	
Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
a) Jumlah saham yang beredar.	12
b) Kapitalisasi pasar.	12
c) Harga tertinggi, terendah, dan penutupan.	12
d) Volume perdagangan.	12
2) Dalam hal terjadi aksi Korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sesuai poin 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	
a) Tanggal pelaksanaan aksi Korporasi.	12
b) Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.	12
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi Korporasi.	12
d) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	12
3) Dalam hal terjadi suspension dan/atau delisting saham dalam tahun buku, Emiten menjelaskan alasan suspension dan/atau delisting tersebut.	n/a
4) Dalam hal suspension dan/atau delisting sesuai point 3) di atas masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, Emiten menjelaskan Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.	n/a
c. Laporan Direksi.	
Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
1) Uraian singkat mengenai kinerja Emiten paling sedikit meliputi:	
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	42
b) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan.	38
c) Kendala yang dihadapi Emiten.	37
2) Gambaran tentang prospek usaha.	41
3) Penerapan tata kelola Emiten.	40
4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	42
d. Laporan Dewan Komisaris.	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten.	31
2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten.	32
3) Pandangan atas prospek usaha Emiten yang disusun oleh Direksi.	34
4) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten.	33
5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	34
6) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	32
e. Profil Emiten.	
Profil Emiten paling sedikit memuat:	
1) Nama Emiten termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	46-48
2) Akses terhadap Emiten termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten meliputi : alamat, telepon, facsimile, email dan alamat Situs Web.	318-327
3) Riwayat singkat Emiten.	50 -51
4) Visi dan Misi Emiten.	47
5) Kegiatan usaha menurut AD terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	52
6) Struktur organisasi Emiten dalam bentuk bagan, paling singkat 1 tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.	55

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016	HALAMAN
7) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	
a) Nama dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	61
b) Foto terbaru.	63-64
c) Usia.	63-64
d) Kewarganegaraan.	63-64
e) Riwayat pendidikan.	63-64
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai Direksi pada Emiten.	63-64
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Komite serta jabatan lainnya (jika ada).	63-64
iii. Pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten.	63-64
g) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).	100
h) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.	226
8) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
a) Nama.	56-60
b) Foto terbaru.	56-60
c) Usia.	56-60
d) Kewarganegaraan.	56-60
e) Riwayat pendidikan.	56-60
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten ybs.	56-60
ii. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten ybs.	56-60
iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	56-60
iv. Pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	56-60
g) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).	217
h) Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi.	210
i) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada).	210-211
9) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan adalah susunan yang terakhir dan sebelumnya.	204-205
10) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku.	108-113
11) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku yang terdiri dari:	
a) Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Emiten.	209
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten.	209, 228
c) Kelompok pemegang saham masyarakat (kurang dari 5%).	n/a
12) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi:	
a) Kepemilikan institusi lokal.	77
b) Kepemilikan institusi asing.	77
c) Kepemilikan individu lokal.	77
d) Kepemilikan individu asing.	77
13) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk bagan/skema.	77
14) Nama entitas anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan ventura bersama di mana Emiten memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Perusahaan tersebut (jika ada), untuk entitas anak ditambahkan informasi mengenai alamat.	92

15) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten dicatatkan (jika ada).	79
16) Kronologis pencatatan efek lainnya selain saham, yang memuat antara lain nama efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	79-82
17) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.	83
18) Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan.	93
19) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku berakhir (jika ada) yang memuat:	
a) Nama penghargaan/sertifikasi.	98-99
b) Badan atau lembaga yang memberikan.	98-99
c) Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikat (jika ada).	98-99
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen.	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yang paling sedikit memuat:	
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten, paling sedikit mengenai:	
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	128-134
b) Pendapatan/penjualan.	128-134
c) Profitabilitas.	128-134
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	140-161
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas.	140-161
c) Ekuitas.	140-161
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	140-161
e) Arus Kas.	140-161
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	162
4) Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	163
5) Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan.	164
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	
a) Tujuan dari ikatan tersebut.	165
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.	165
c) Mata uang yang menjadi denominasi.	165
d) Langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	165
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
a) Jenis investasi barang modal.	165
b) Tujuan investasi barang modal.	165
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	165
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.	165
9) Prospek usaha dari Emiten dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	170-171
10) Perbandingan target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai, mengenai:	
a) Pendapatan/penjualan.	n/a
b) Laba (rugi).	n/a
c) Struktur modal (capital structure).	n/a
d) Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten.	n/a

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016	HALAMAN
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten untuk 1 tahun mendatang, meliputi:	
a) Pendapatan/penjualan.	171
b) Laba (rugi).	171
c) Struktur modal (capital structure).	171
d) Kebijakan dividen.	171
e) Hal lain yang dianggap penting bagi Emiten.	171
12) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, paling sedikit strategi pemasaran dan pangsa pasar.	135-139
13) Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	
a) Kebijakan dividen.	166
b) Tanggal dividen pembayaran kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	166
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	166
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	166
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.	167
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sesuai POJK tentang LRPD, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	167
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	167
b) Nama pihak yang melakukan transaksi.	167
c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada).	167
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	167
e) Pemenuhan ketentuan terkait.	167
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	168
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	169
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	
Tata Kelola Emiten memuat uraian singkat, paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1) Direksi, mencakup antara lain:	
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.	222-223
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi.	n/a
c) Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.	232-233
d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut.	230-231
e) Informasi mengenai keputusan RUPS 1 tahun sebelumnya, meliputi:	
i. Keputusan RUPS yang direalisasikan dalam tahun buku.	190-201
ii. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	190-201
f) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	
i. Keputusan RUPS yang direalisasikan dalam tahun buku.	190-201
ii. Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	190-201
g) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.	244-249
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	207
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman Dewan Komisaris.	204
c) Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.	215
d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut.	211-214

e) Kebijakan Emiten tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	
i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.	219
ii. Kriteria yang digunakan.	219
iii. Pihak yang melakukan penilaian.	219
f) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	219
g) Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	
i. Alasan tidak dibentuknya komite.	n/a
ii. Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.	n/a
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam AD, paling sedikit memuat:	
a) Nama.	n/a
b) Tugas dan tanggung jawab DPS.	n/a
c) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap Emiten.	n/a
4) Komite Audit, mencakup antara lain:	
a) Nama dan jabatannya dlm keanggotaan komite.	234-239
b) Usia.	234-239
c) Kewarganegaraan.	234-239
d) Riwayat pendidikan.	234-239
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	234-239
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	234-239
iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten.	234-239
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit.	234-239
g) Pernyataan independensi Komite Audit.	234-239
h) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut.	234-239
i) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	234-239
j) Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) komite audit.	234-239
5) Komite lain yang dimiliki Emiten dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	244-249
b) Usia.	244-249
c) Kewarganegaraan.	244-249
d) Riwayat pendidikan.	244-249
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	244-249
ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	244-249
iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten.	244-249
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit.	234-239
g) Uraian tugas dan tanggung jawab.	234-239
h) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman komite.	234-239
i) Pernyataan independensi komite.	234-239
j) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	234-239
k) Jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	234-239
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	234-239

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016	HALAMAN
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	
a) Nama.	250-252
b) Domisili.	250-252
c) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris Perusahaan.	250-252
ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten.	250-252
d) Riwayat pendidikan.	250-252
e) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku (jika ada).	250-252
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku.	250-252
7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	
a) Nama kepala unit audit internal.	253-258
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal.	253-258
ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten.	253-258
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	253-258
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku (jika ada).	253-258
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal.	253-258
f) Uraian tugas dan tanggung jawab.	253-258
g) Pernyataan bahwa telah memiliki piagam (charter) unit audit internal.	253-258
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku.	253-258
8) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai:	
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	271-272
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	271-272
9) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten, paling sedikit mengenai:	
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten.	261-270
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	261-270
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten.	261-270
10) Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten, Entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	
a) Pokok perkara.	273-280
b) Status penyelesaian perkara.	273-280
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten.	273-280
11) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, oleh Otoritas lainnya pada tahun buku.	280
12) Informasi mengenai kode etik, meliputi:	
a) Pokok kode etik.	286-287
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya.	286-287
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten.	286-287
13) Informasi mengenai budaya Perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai Perusahaan (jika ada).	286-287
14) Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten, antara lain mengenai:	
a) Jumlah saham dan/atau opsi.	292
b) Jangka waktu pelaksanaan.	292
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.	292
d) Harga pelaksanaan.	292
15) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), antara lain meliputi:	
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran.	287
b) Perlindungan bagi pelapor.	287
c) Penanganan pengaduan.	287

SEOJK NOMOR 30/SEOJK.04/2016	HALAMAN
d) Pihak yang mengelola pengaduan.	287
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	287
i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku.	
ii. Tindak lanjut pengaduan.	
16) Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat Ekuitas, meliputi:	
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	n/a
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	n/a
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik.	
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan/atau biaya yang dikeluarkan, antara lain aspek:	
a) Lingkungan hidup, antara lain:	
i. Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.	296-315
ii. Sistem pengolahan limbah Perusahaan.	296-315
iii. Mekanisme pengaduan masalah lingkungan.	296-315
iv. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	296-315
b) Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	
i. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja.	296-315
ii. Sarana dan kesempatan kerja.	296-315
iii. Tingkat perpindahan (turnover) karyawan.	296-315
iv. Tingkat kecelakaan kerja.	296-315
v. Pendidikan dan/atau pelatihan.	296-315
vi. Remunerasi.	296-315
vii. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.	296-315
c) Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	
i. Penggunaan tenaga kerja lokal.	296-315
ii. Pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan masyarakat atau pemberian edukasi.	296-315
iii. Perbaikan sarana dan prasarana sosial.	296-315
iv. Bentuk donasi lainnya.	296-315
v. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, serta pelatihan mengenai anti korupsi.	296-315
d) Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	
i. Kesehatan dan keselamatan konsumen.	296-315
ii. Informasi barang dan/atau jasa.	296-315
iii. Sarana, jumlah dan penganggulungan atas pengaduan konsumen.	296-315
2) Dalam hal EPP menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti sustainability report, maka EPP dikecualikan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.	n/a
3) Sustainability report sebagaimana poin 2 wajib disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan.	√
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit. Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan Keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan atau POJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Efek.	334-455
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	329-331

INDEKS GRI-G4 INTI

Laporan Keberlanjutan BFI tahun 2016 ini disusun dengan mengikuti prinsip 'in accordance' pada aspek-aspek yang material berdasarkan Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan dari *Global Reporting Initiatives* Generasi-4 (GRI-G4) dan Panduan Pelaporan Sektor Layanan Keuangan dengan opsi inti.

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM	DESKRIPSI	HALAMAN	ALASAN TIDAK DICANTUMKAN
STRATEGI DAN ANALISIS			
G4-1	Pernyataan dari Manajemen Paling Senior	37	
G4-2	Penjelasan Dampak Penting, Risiko dan Peluang	126	
PROFIL ORGANISASI			
G4-3	Nama Organisasi	46	
G4-4	Merek, produk dan jasa utama	52-53	
G4-5	Lokasi Kantor Pusat	46	
G4-6	Jumlah Negara tempat Operasi Utama	1 (Indonesia)	
G4-7	Sifat Kepemilikan dan Badan Hukum	46	
G4-8	Pasar yang Dilayani	53	
G4-9	Skala Organisasi Pelapor	10-11	
G4-10	Jumlah Tenaga Kerja	46	
G4-11	Persentase Karyawan yang Dicapuk dalam Perjanjian Kerja Bersama	100%	
G4-12	Rantai Pasokan Organisasi Pelapor	288	
G4-13	Perubahan Signifikan Selama Masa Pelaporan	Tidak ada	
KOMITMEN PADA INISIATIF EKSTERNAL			
G4-14	Penjelasan tentang Penerapan Pendekatan dan Prinsip Kehati-hatian	261	
G4-15	Keikutsertaan dalam perjanjian, prinsip atau inisiatif ekonomi, sosial, dan lingkungan	Tidak ada	
G4-16	Keanggotaan Organisasi	46	
ASPEK MATERIAL DAN BATASAN YANG TERIDENTIFIKASI			
G4-17	Entitas yang Dicapuk dalam Laporan Keuangan	46	
G4-18	Proses untuk menetapkan Isi Laporan	457	
G4-19	Daftar Aspek Material yang Teridentifikasi	458	
G4-20	Identifikasi Batasan Aspek di Dalam Organisasi	458	
G4-21	Identifikasi Batasan Aspek di Luar Organisasi	458	
G4-22	Dampak Pernyataan Ulang terhadap Laporan Sebelumnya	Tidak ada pernyataan ulang	
G4-23	Perubahan Signifikan dari Laporan Sebelumnya terkait Cakupan dan Batasan Aspek	Tidak ada perubahan terkait	
PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN			
G4-24	Daftar Pemangku Kepentingan yang Dilibatkan	458	
G4-25	Dasar Pemilihan Pemangku Kepentingan	458	
G4-26	Pendekatan Organisasi dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan	458	
G4-27	Topik dan Pertimbangan Utama dari Proses Pelibatan	458	
PROFIL LAPORAN			
G4-28	Periode Pelaporan	1 Januari - 31 Desember 2016	
G4-29	Tanggal Terbit Laporan Terakhir	April 2016	
G4-30	Siklus Pelaporan	Tahunan	
G4-31	Poin Kontak untuk pertanyaan terkait Isi Laporan	46	
G4-32	Opsi GRI 'in-accordance' yang dipilih	<i>In-accordance core</i>	
G4-33	Kebijakan dan Praktik Pemastian Eksternal bagi Laporan ini	Belum dilakukan untuk Pelaporan Periode ini	

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM	DESKRIPSI	HALAMAN	ALASAN TIDAK DICANTUMKAN
TATA KELOLA			
G4-34	Struktur Organisasi Tata Kelola	55	
ETIK DAN INTEGRITAS			
G4-56	Penjelasan nilai-nilai, prinsip, standar dan norma perilaku organisasi	286	

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS

ASPEK MATERIAL	PENGUNGKAPAN	HALAMAN	HAL YANG TIDAK DICANTUMKAN
KINERJA EKONOMI			
G4-DMA		129, 314	
G4-EC1	Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan	315	
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG			
G4-DMA		314	
G4-EC8	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Signifikan dan luasan dampaknya	314	
MATERIAL			
G4-DMA		307	
G4-EN1	Material yang Dipergunakan berdasarkan Berat atau Volume	307	Baru mencakup Kantor Pusat
ENERGI			
G4-DMA		307	
G4-EN3	Konsumsi Energi dalam Organisasi	307	Baru mencakup Kantor Pusat
AIR			
G4-DMA		307	
GR-EN8	Jumlah Pengambilan Air	307	Baru mencakup Kantor Pusat
KETENAGAKERJAAN			
G4-DMA		96	
G4-LA2	Remunerasi Karyawan	102	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
G4-DMA		96	
G4-LA10	Program Pengelolaan Keterampilan dan Pembelajaran	99	
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA			
G4-DMA		106	
G4-LA6	Kasus Kecelakaan Kerja	107	
MASYARAKAT SETEMPAT			
G4-DMA		296-297	
G4-SO1	Persentase Operasi yang Menerapkan Pelibatan Masyarakat	Seluruh Operasi	
ANTI KORUPSI			
G4-DMA		288	
G4-SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang dilakukan	291	
PELABELAN PRODUK DAN JASA			
G4-DMA		309	
G4-PR5	Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Pelanggan	313	
PORTOFOLIO PRODUK			
G4-DMA		129	
G4-FS6	Persentase portofolio lini bisnis	129	

2016

LAPORAN TAHUNAN
TERINTEGRASI



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan 15322
Indonesia

 1500018

 corsec@bfi.co.id

 www.bfi.co.id